

MUTROFIN

# OTOKRITIK PENDIDIKAN

*Gagasan-Gagasan Evaluatif*



**OTOKRITIK PENDIDIKAN:  
Gagasan-gagasan Evaluatif**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MUTROFIN

# OTOKRITIK PENDIDIKAN

*Gagasan-gagasan Evaluatif*

Editor:  
Pudjo Suharso

**OTOKRITIK PENDIDIKAN**  
**Gagasan-gagasan Evaluatif**

---

*Penulis:*  
Mutrofin

*Cetakan Kedua:*  
Diterbitkan pertama kali oleh LESFI (Lembaga Studi Filsafat)  
April 2007

*Diterbitkan oleh:*  
LaksBang PRESSindo  
Email: laksbangyk@yahoo.com

*Editor:* Pudjo Suharso

*Perancang Sampul:* Muh. Rasheed Z.  
*Tata Letak:* Wahyu Setya  
*Produksi:* Santo\_so

ISBN: 979-26-8504-9

---

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Mutrofin,

Otokritik pendidikan, gagasan-gagasan evaluatif / Mutrofin ; editor,  
Pudjo Suharso, -- Yogyakarta ; LaksBang PRESSindo, 2007  
381 hal. + xiv ; 15,5 x 23 cm

ISBN 979-26-8504-9

1. Pendidikan.                      I. Judul.  
II. Pudjo Suharso.

370

## PROLOG

KOTA Krui di belahan Barat Kabupaten Lampung Barat yang hanya beberapa jengkal dari Samudera Hindia, jaraknya dari Liwa, Ibukota Kabupaten Lampung Barat memang sangat jauh. Setelah melewati jalan kabupaten yang menembus hutan belantara yang kiri kanannya ditumbuhi pohon gambir menjulang setinggi langit, sampailah kita di Kecamatan Pesisir Utara. Wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Di depan sebuah SMP di Kecamatan Pesisir Utara itu, kami para peneliti, bersistirahat sejenak melepas lelah setelah melakukan serangkaian wawancara dengan warga masyarakat pesisir yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota.

Anak-anak usia sekolah yang pada jam-jam selepas sekolah tampak begitu asyik bermain di jalan pesisir yang benar-benar bebas polusi. Mereka berombongan naik sepeda kecil, saling kebut, saling mendului, bahkan ada yang sampai harus terjatuh karena belum menguasai betul bagaimana mengendarai sepeda *onthel*. Melihat anak-anak itu, mata penulis menerawang jauh, teringat pada Bobby kecil yang bernama lengkap Bobby Garfield ketika sedang berulang-tahun yang ke-11.

Seperti sesama anak lelaki seusianya, Ia mendambakan sebuah sepeda sebagai hadiah dari sang Ibu. Namun sayang, almarhum ayahnya yang semasa hidup menghabiskan waktu bermain poker, hanya meninggalkan sejumlah utang yang mesti dilunasi Ibunya dan polis asuransi kadaluwarsa. Sang Ibu yang dalam istilah sekarang disebut sebagai *single parent* (orangtua tunggal) cuma bekerja sebagai staf kesekretariatan di sebuah badan usaha. Alhasil, Ia hanya bisa menghadiahi Bobby kecil sebuah Kartu Perpustakaan Dewasa yang, di negeri Paman Sam (baca: Amerika Serikat) dapat dipakai untuk meminjam buku-pustaka secara leluasa dan gratis.

Di rumah kontrakan dua lantai yang musti segera ditinggalkan, datanglah Ted Brautigan, konon seorang cenayang (paranormal) yang sedang diuber-uber negara. Penyewa baru yang sementara tinggal di lantai atas.

Ted : *“Kau dapat uang banyak dari hadiah ulang tahunmu?”*

Bobby : *“Tidak!”* Sembari menyodorkan kartu perpustakaan pemberian ibunya.

Ted : *“Kau tabu kenapa dia berikan itu?”*

Bobby : *“Karena gratis.”*

Ted : *“Tidak apa-apa. Jangan hilangkan kartu ini. Buku-buku itu adalah emas. Para penulis ulung telah menghibur kita selama berabad-abad. Berikan kesempatan satu atau dua jam untuk satu buku. Jika tidak suka, pilih buku yang lain. Kini para pendongeng ulung dunia sedang menantimu.”*

Dialog tersebut, yang terekam kuat di benak penulis, sebenarnya dapat kita temui dalam *Stephen King's collection of stories* bertitel *Hearts in Atlantis*. Apa yang menarik dari kisah tersebut? Bobby kecil, untuk dapat membeli sebuah sepeda yang didambakannya, pada akhirnya mendapat satu dollar seminggu sebagai upah membacakan berita-berita penting di koran untuk Ted. Jelas bukan suatu hal yang kebetulan apabila ketika dewasa, Bobby ternyata menjadi seorang ilmuwan biologi terkemuka di negerinya. Penggalan kisah itu melengkapi sederet kisah tentang manusia-manusia luar biasa yang sebetulnya biasa-biasa saja namun karena sejak dini sudah bergelut dengan dunia pustaka dan memiliki kegemaran membaca, maka ketika dewasa ia menjadi manusia unggul, bermartabat dan memiliki kontribusi signifikan bagi diri, dunia dan lingkungannya.

Mengingat semua itu, penulis jadi terkesan pada Sosiolog Ignas Kleden yang dalam sebuah risalahnya pernah mengajukan beberapa pertanyaan menarik. Mengapa gerangan penduduk Jepang misalnya, lebih banyak membaca buku dari bangsa kita? Bolehkah kita berkata bahwa keinginan bangsa Jepang untuk menjadi cerdas lebih besar dari keinginan bangsa kita? Apakah bangsa Jepang menjadi cerdas karena membaca banyak buku, ataukah justru karena tingkat kecerdasan umum di negara itu sudah demikian tinggi sehingga *intellectual demand* (permintaan intelektual) mereka hanya bisa dilayani dengan produksi buku secara besar-besaran?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut barangkali akan dapat kita temui dalam *Higher Education in Japan: Its Take-off and Crash* karya Michio Nagai. Jepang yang di pertengahan tahun 40-an luluh lantak akibat Perang Dunia Kedua, bangkit kembali hanya dalam tempo satu era pembangunan jangka panjang kurang lebih 25 tahun kemudian. Sampai-sampai Prof. Ezra Vogel

dari *Harvard University* memuji keunggulan Jepang melalui judul bukunya yang spektakuler: *Japan as Number One*.

Pujian tersebut jelas tidak berlebihan. Perhatikanlah secara cermat di sekeliling kita, adakah sisi hidup keseharian bangsa ini yang tidak diwarnai oleh hasil karya kecerdasan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Jepang? Termasuk Adidaya Amerika Serikat sekali pun, dipimpin Bill Clinton, bahkan pernah “mengemis” pada Jepang agar rakyatnya membelanjakan sebagian uangnya guna membeli sejumlah produk Amerika disertai ancaman akan mengenakan pajak bea masuk yang tinggi terhadap produk Iptek Jepang yang masuk dan membanjiri pasar Amerika jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Jepang dapat bangkit dari keterpurukan dan memimpin secara ekonomi karena satu hal: mereka memiliki kesadaran bahwa buku – sebagai sumber informasi dan rekaman pikiran-pikiran pengarang yang telah teruji dunia publik – dapat dijadikan pedoman dan tuntunan untuk mendapatkan informasi yang berguna sehingga mendorong peningkatan kecerdasan. Keingintahuan yang besar yang diperlihatkan bangsa Jepang terhadap semua budaya yang berbeda-beda di dunia sungguh luar biasa. Pada empat dasawarsa yang lalu saja, tidak kurang dari 21.849 judul buku setiap tahun diterbitkan. Suatu angka yang mengalahkan industri penerbitan di Amerika dan menduduki peringkat ke-4 dunia sesudah Uni Soviet (sebelum bubar), Inggris, dan Jerman Barat (sebelum unifikasi). Sepuluh tahun yang lalu, Jepang mampu menerbitkan 44.000 judul buku setiap tahun, menduduki peringkat tiga dunia setelah Amerika dan Inggris yang masing-masing 100.000 dan 61.000 judul. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menerbitkan buku kurang dari 10 ribu judul setiap tahun.

Sadar atau tidak, sebetulnya titik awal kecerdasan sebuah bangsa bermula dari motivasi untuk mengetahui banyak hal dan menjadikan buku atau dunia pustaka sebagai pintu keluar dari kedunguan, kebodohan dan keterbelakangan. Sekaligus sebagai pintu masuk menuju penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

*Perish or publish* (menulis atau mati) adalah jargon atau credo yang lazim dianut kalangan akademisian, intelektual atau cerdik cendekia. Meskipun begitu, tidak banyak di antara kalangan tersebut yang begitu tekun, kontinyu dan produktif menulis. Persoalannya bukan saja terletak pada apa yang akan ditulis, jenis tulisan apa yang akan ditekuni dan bagaimana teknik menuliskannya. Lebih dari itu adalah lewat media apa tulisan itu disebarluaskan sehingga efektif mencapai sasaran.

Ditilik dari segi topik, sebenarnya banyak hal bisa ditulis, terutama yang bertali-temali dengan kepentingan publik. Baik menyangkut persoalan hubungan antara negara dan masyarakat, kompleksitas problem realitas sosiokultural dalam

tataran horizontal, pengalaman dan masalah keprofesian, hingga wacana religiositas (persoalan spiritual). Mulai dari yang baru dimensi waktu kemasalualan, kekinian sampai kemasadepanan.

Jenis tulisan pun sangat beragam. Ada tulisan yang serius seperti karya ilmiah dalam bentuk laporan riset, artikel ilmiah untuk jurnal dan majalah ilmiah hingga *critical book review*. Bisa tulisan semi ilmiah atau ilmiah populer yang dapat memperkaya pengetahuan khalayak seperti artikel opini (esai), reportase investigatif dan atau berita, kolom hingga *features*. Bahkan ada tulisan yang sifatnya menghibur seperti karya sastra dalam bentuk cerpen, novel, dan puisi. Ihwal bagaimana teknik menuliskannya memang seringkali menjadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab

Sampai di sini penulis sadar, mengapa kita tidak menulis buku? Mengapa gagasan-gagasan kita tidak diakumulasikan untuk kemudian dijadikan buku? Kesadaran demikian inilah yang amat kuat mendorong penulis untuk memulung satu demi satu gagasan-gagasan evaluatif penulis yang berserak di berbagai media, baik dalam bentuk tulisan ilmiah populer maupun makalah yang disajikan di forum-forum ilmiah seperti seminar atau diskusi.

Buku (kalau boleh disebut demikian) yang ada di tangan pembaca ini adalah sederetan narasi kesaksian. Layaknya sebuah kesaksian, narasi itu bersifat kontekstual, bertumpu pada peristiwa atau konteks yang dibatasi oleh kurun waktu atau periode kapan peristiwa atau konteks itu berlangsung. Sangat jelas bahwa peristiwa atau konteks yang dimaksud adalah konteks atau peristiwa pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Suatu dunia hiruk pikuk, namun penuh kesahajaan, yang penulis tekuni sejak menamatkan sekolah pendidikan guru pada tahun 1981.

Pengalaman menjadi guru SD selama setahun, menjadi guru SMP selama tiga tahun, menjadi guru SMA selama empat tahun dan menjadi dosen di perguruan tinggi yang menghasilkan para calon guru SD sampai calon guru sekolah menengah sejak tahun 1987 hingga sekarang; agaknya sudah cukup bagi penulis untuk secara sadar berkaca, berintrospeksi diri, dan melakukan kontemplasi. Untuk apa? Untuk melihat secara jernih profesi dan dunia yang selama ini digeluti sehari-hari. Untuk memantapkan segumpal keberanian guna mengkritisi dunianya sendiri, membeberkan ketidakberesan, segala kekeliruan, bias praktik dan barangkali juga aib sendiri atau malpraktik.

Argumentasi itulah yang kemudian menjelma menjadi judul buku ini, yakni *Otokritik Pendidikan*. Kita sebut otokritik oleh karena berbagai narasi yang termaktub dan dipaparkan dalam buku ini sarat akan kritik pada dunia penulis sendiri. Namun begitu, kritik-kritik tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan ditunjang oleh solusi konstruktif yang selalu penulis paparkan dalam setiap narasi.

Dunia pendidikan, sejauh warga masyarakat menghajatkannya, merupakan dunia yang amat luas tanpa batas. Bahwa sebagian besar buku ini menyoroti dunia pendidikan persekolahan, hal itu semata-mata karena di lokasi itulah yang paling banyak permasalahannya. Lebih-lebih karena dunia pendidikan sekolah membawa konsekuensi akuntabilitas keuangan negara yang sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Penulis percaya, sekecil apa pun sumbangsiah yang dihasilkan oleh kehadiran buku ini, masih tetap jauh lebih bermanfaat ketimbang sepeda *ontbel* sebagaimana dikisahkan di awal prolog ini. Penulis berharap akan banyak Bobby-Bobby lain yang tumbuh menjadi ilmuwan sejati karena sejak kecil sudah berkecimpung dengan buku.

# Daftar Isi

Prolog *v*

Daftar Isi *xi*

## **BAB I : ANDAIKATA MATEMATIKA SEPERTI KOMIK ▶▶1**

1. Pendidikan dan Produktivitas SDM ▶▶3
2. Sekolah Elit Tidak Identik Sekolah Bermutu ▶▶6
3. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural ▶▶10
4. Skenario Belajar Lima Hari di Sekolah dan Pertimbangannya ▶▶18
5. Sarjana Berwawasan Kerakyatan ▶▶23
6. Aksi Antirektor dan Dilema Seorang Rektor ▶▶26
7. Memperbaiki Mekanisme Pemilihan Rektor ▶▶30
8. Menjunjung Tinggi Etika Riset ▶▶34
9. Bahasa Riset dan Penerjemahan ▶▶38
10. “Non-Grading System” dalam Pendidikan ▶▶42
11. Pembaruan Metodologi Pendidikan Sejarah ▶▶46
12. Andaikata Matematika Seperti Komik ▶▶50

## **BAB II : PARTAI MENCERDASKAN BANGSA? ▶▶55**

1. Partai Mencerdaskan Bangsa? ▶▶57
2. Guru SD, “Sapi Perah” dan Kepentingan Politik ▶▶61
3. Mempercakapkan Baku Mutu Profesionalisme Guru di Sekolah ▶▶65
4. Ukuran Profesionalisme Guru ▶▶69
5. Konsekuensi LPTK Tanpa IKIP ▶▶72

6. Babak Baru Pendidikan Guru ▶▶76
7. Pendidikan Guru Pasca IKIP ▶▶80
8. Nasib Guru Daerah Terpencil ▶▶84
9. Satu Sekolah Satu Guru? ▶▶88
10. Perlindungan Hukum Profesi Guru ▶▶91
11. Guru Sejati dan Ledakan Informasi ▶▶95
12. PGRI Masa Depan dan Masa Depan PGRI ▶▶99

### **BAB III : PERSPEKTIF OTONOMI**

#### **PENDIDIKAN ▶▶105**

1. Pendidikan di Bawah Otonomi Daerah ▶▶107
2. Perspektif Otonomi Pendidikan (Dasar dan Menengah) ▶▶111
3. Paradigma Baru Pengelolaan Sekolah ▶▶119
4. Skenario Madrasah di Era Otonomi ▶▶129
5. Sasaran Pokok Deregulasi Pendidikan ▶▶133
6. Plus Minus Belajar Islam di Luar Negeri ▶▶137
7. Pendidikan & Pemberdayaan Masyarakat ▶▶141
8. Pendidikan Kepolisian ▶▶145

### **BAB IV : PRESTASI DENGAN SEBUTIR TELUR ▶▶149**

1. Hak Asasi Anak-anak ▶▶151
2. Prestasi Dengan Sebutir Telur? ▶▶155
3. Inpres PMT-AS Butuh Kredibilitas Pelaksana ▶▶159
4. Mengefektifkan Gerakan Perlindungan Anak ▶▶162
5. Otonomi Sejati Tumbuh Kembang Anak ▶▶166
6. Tantangan *‘Education For All’* di Indonesia ▶▶170
7. Lulusan SLTP dan Prospek Wajar 12 Tahun ▶▶174
8. Menguak Misteri para Tekyan ▶▶178
9. Makna Edukasional Idul Fitri ▶▶182
10. Lembaga Advokasi Pekerja Anak ▶▶187

### **BAB V : PERSPEKTIF PENDIDIKAN**

#### **DEMOKRASI ▶▶191**

1. Pendidikan HAM dan HAM dalam Pendidikan ▶▶193
2. Perpektif Pendidikan Demokrasi ▶▶197
3. Kampanye sebagai Wahana Pendidikan Politik ▶▶200
4. Bukan Politisasi Pendidikan ▶▶204
5. “Trituna”, Pendidikan dan Wakil Rakyat ▶▶206
6. Musyawarah (Tanpa) Mufakat di Internet ▶▶210

7. Ekses Degradasi Kejujuran Pemimpin Bangsa ▶▶214
8. Isu HAM dan Ketimpangan Ekonomi Global ▶▶218
9. Reformasi: Percepatan Evolusi dan Total ▶▶222
10. Melindungi Simbol Budaya ▶▶227
11. Prasyarat Birokrasi Bebas (Ber-) Politik ▶▶232
12. Menyikapi Dekonstruksi Republik ▶▶237
13. Muatan Kritik HAM dan Elemen Prokekuasaan ▶▶242

## **BAB VI : TEKNOLOGI DAN PORNOGRAFI ▶▶245**

1. Televisi dan Pendidikan Kita ▶▶247
2. Teknologi dan Pornografi ▶▶251
3. TV, Disiplin Nasional dan Produktivitas ▶▶255
4. Tayangan TV dan Kekhusyukan Ibadah Puasa ▶▶259
5. Kertas, Nasib Pers dan Masa Depan Pendidikan ▶▶263
6. Anak-anak, Televisi dan Internet ▶▶267
7. Kecenderungan Seksual Kaum Muda dan Nilai-nilai Keluarga ▶▶272
8. Langkanya Pendidikan Kreatif ▶▶276

## **BAB VII : OTAK DAN WATAK TERDIDIK IBU MANUSIA ▶▶281**

1. Otak dan Watak Terdidik Ibu Manusia ▶▶283
2. Pendidikan Bagi Anak Wanita:  
Sebuah Analisis Kebijakan ▶▶287
3. Aborsi & Dilema Pembangunan Kependudukan ▶▶291
4. Pengklonan Manusia ▶▶295
5. Pengklonan dan Peradaban Manusia ▶▶299
6. Replika Manusia dalam Perspektif Islam ▶▶303
7. Kualitas Tenaga Kerja dan Elite Wanita Indonesia ▶▶306

## **BAB VIII: KOMITMEN KERAKYATAN SEKOLAH NEGERI ▶▶311**

1. Komitmen Kerakyatan Sekolah Negeri ▶▶313
2. Krisis Ekonomi, Perubahan Kurikulum dan Proses Pemiskinan ▶▶317
3. Kompensasi Komersialisasi Pendidikan ▶▶321
4. Penarikan Iuran Sukarela Non-SPP ▶▶324
5. Swasta Wajib Ikut Membiayai Pendidikan ▶▶329
6. Mutu Pendidikan dan Indeks Daya Saing ▶▶333

7. Dengan Pendidikan Kita Selamatkan Indonesia ▶▶337
8. Kebangkitan Bangsa ▶▶341

**BAB IX : KRIMINALITAS PELAJAR DAN  
PENDIDIKAN ▶▶345**

1. Ketidakseimbangan Pendidikan ▶▶347
2. Kriminalitas Pelajar dan Pendidikan ▶▶351
3. Keberingasan Pelajar dan Intensitas Pembudayaan ▶▶355
4. Kekerasan dan Vaksinasi Psikologis ▶▶359
5. Mengusut Tuntas Pemalsu NEM ▶▶363

**Epilog ▶▶369**

**Daftar Pustaka ▶▶375**



Bab  
**1**



**ANDAİKATA MATEMATIKA  
SEPERTI KOMIK**





## **PENDIDIKAN DAN PRODUKTIVITAS SDM**



WACANA pendidikan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sering dijadikan referensi para ahli adalah kasus Jerman dan Jepang. Kebangkitan kembali ekonomi Jerman dan Jepang yang begitu cepat dan menyakinkan sesudah Perang Dunia II dimungkinkan oleh adanya infrastruktur pendidikan yang sangat baik di kedua negara itu.

Barangkali benar, sebab tanpa didukung oleh angkatan kerja industri yang tangguh yang dilahirkan oleh sistem pendidikan di kedua negara itu, tidak akan mungkin bagi industri di Jerman dan Jepang bangkit kembali dan berkembang dalam jangka waktu begitu pendek (Buchori, 1993).

Mengenai Jerman, ditengarai negara ini telah lama memiliki tradisi sistem pendidikan yang andal, yakni sistem pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan tenaga kependidikan dan tuntutan tenaga kerja industrial dengan *dual system*-nya (Wolfgang Mitter, 1988).

Sementara di Jepang sebagaimana dikatakan Michio Nagai (1993) dan Koichi Igarashi (1988), infrastruktur pendidikan yang baik dan andal tidak terlepas dai hasil reformasi pendidikan yang dilaksanakan selama Era Meiji pada 1868-1912. Reorientasi dan reformasi itulah yang menyebabkan Jepang dapat menjadi *The Number One* -meminjam istilah Ezra Vogel dari Universitas Harvard - sekalipun Jepang luluh lantak akibat PD II.

Perbaikan tingkat pendidikan angkatan kerja juga berhasil mengejar keterbelakangan ekonomi di beberapa negara Asia lain selain Jepang. Misalnya Hongkong, Taiwan, Korea dan Singapura. Keberhasilan itu ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di negara-negara itu.

Pertanyaanya, cukupkah peningkatan pendidikan bagi angkatan kerja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi? Menurut hemat kita, tentu saja tidak. Sebab, sekalipun di negara-negara itu jumlah sekolah, hakikat kurikulum, struktur sistem pendidikan dengan jelas diorientasikan kepada kebutuhan perekonomian yang didasarkan pada teknologi tinggi, fleksibilitas dan mobilitas angkatan kerja, ternyata ada hal yang lebih fundamental. Yakni, pendidikan juga diorientasikan ke arah keterampilan produktif dan pentingnya membentuk sikap efisien. Jadi, sasaran terakhir pendidikan yang mendukung pembangunan ekonomi ialah produktivitas SDM sebagai pelaku pembangunan ekonomi.

## **PRODUKTIVITAS SDM**

Produktivitas SDM sebagai masalah krusial haruslah menjadi inti dari proses pendidikan. Bagaimana proses pendidikan berhasil menetak manusia-manusia produktif amat bergantung pada sistem pembelajaran. Kalau sistem pembelajaran tidak kondusif bagi optimalisasi kemampuan subjek didik, tidak demokratis dalam arti gurunya lebih banyak berperan dan atau tidak membangkitkan kreativitas siswa, maka jangan harap pendidikan mampu menghasilkan manusia produktif.

Manusia produktif dibutuhkan berdasar asumsi teori modal manusiawi (*human capital*). Dunia pendidikan dan para perencana SDM, sepanjang tahun 1970-an di seluruh pelosok dunia telah melestarikan keyakinan, pendidikan yang lebih banyak dan baik akan meningkatkan produktivitasnya.

Hasil sejumlah studi membuktikan, peningkatan produktivitas dan tingkat penghasilan petani yang berpendidikan SD dengan para petani yang buta huruf misalnya, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kontribusi pendidikan SD sangat berarti. Kontribusi itu akan lebih substansial jika dibandingkan dengan sumbangan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Dari riset Unesco dapat diketahui, pendidikan merupakan *indirect investment* dalam proses produksi. Untuk peningkatan efisiensi kerja, manusia yang dididik selama enam tahun saja berturut-turut keluarannya akan meningkat 91 persen.

SDM berpendidikan SD, diberi keterampilan selama setahun, keluaran produktivitasnya akan meningkat 30 persen, tahun kedua naik 23 persen, tahun ketiga naik 15 persen, tahun keempat naik 11 persen, tahun kelima naik 8 persen dan tahun keenam mencapai total 91 persen.

Sementara itu SDM yang tak berpendidikan SD, kemudian dididik selama enam tahun dengan berbagai pelatihan, keluaran produktivitasnya pada tahun pertama akan naik 16 persen, tahun kedua naik 14 persen, tahun ketiga naik 14

persen, tahun keempat naik 13 persen, tahun kelima naik 11 persen dan pada tahun keenam kenaikannya menjadi 78 persen.

Perbandingan itu baru dari segi pendidikan dasar di satuan SD. Belum lagi di satuan SLTP, jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Tapi harus diingat, ukuran produktivitas bermacam-macam dan dari waktu ke waktu standardisasinya berbeda. Untuk melampaui atau minimal mendekati sama dengan standar produktivitas yang cenderung meninggi, mau tidak mau pembiayaan pendidikan seharusnya ditingkatkan.

Guna meraih keunggulan ekonomi, mestinya peningkatan anggaran pendidikan dipandang sebagai konsekuensi logis dari paradigma peningkatan kualitas SDM. Ini penting untuk mengejar ketertinggalan.

Tapi lebih penting dari itu ialah bagaimana mengalokasikan anggaran agar tepat guna dan berhasil guna, menghindari inefisiensi dan disesuaikan dengan sasaran program. Terutama program yang terkait dengan proses pembelajaran, yakni para guru.

Secara kostitusional, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Sebab, pendidikan merupakan sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau seseorang dan atau sekelompok masyarakat tidak mengenyam pendidikan, negara akan merugi.

Bisa juga pembiayaan pendidikan dibebankan kepada para pengusaha di sektor swasta. Karena merekalah yang paling banyak menikmati keluaran pendidikan.

Jakarta, HU *Kompas*, Selasa, 28 Juni 1994



## SEKOLAH ELIT TIDAK IDENTIK SEKOLAH BERMUTU



DALAM keterangannya kepada *Kompas* (30/12/93), Mendikbud Wardiman Djojonegoro menyatakan tidak keberatan terhadap pihak swasta yang ingin membangun sekolah-sekolah bermutu. Lebih banyak sekolah bermutu muncul lebih baik, karena akan mencegah orang akan menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Terminologi “sekolah bermutu” yang dikatakan Mendikbud., tampaknya menunjuk pada sekolah mewah atau sekolah elit yang didesain khusus untuk melayani pendidikan anak-anak golongan *the haves*, kaum berduit. Jika benar demikian, ini memprihatinkan.

Memprihatinkan, karena dapat menimbulkan salah pengertian di masyarakat, bahwa sekolah elit atau mewah itu identik dengan sekolah bermutu. Bisa pula “menyinggung perasaan” 1,7 juta lebih para guru yang saat ini mengajar di “sekolah rakyat”, yakni sekolah yang didirikan dengan penuh kesederhanaan dan kesahajaan para pengajarnya. Dapat pula ditafsirkan menihili upaya tangan dingin mereka, yang telah banyak melahirkan para pemimpin terbaik di negeri ini.

### INDIKATOR MUTU

Atas dasar apa suatu sekolah disebut bermutu? Apakah karena gedungnya dibangun di atas tanah berhektar-hektar dan perlu merelokasi rumah penduduk? Apakah karena peralatan dan sarananya mencapai milyaran rupiah dan SPP-nya menggunakan dollar AS? Ataukah, karena para gurunya berdas, ada orang asingnya, dan digaji jutaan rupiah?

Sekiranya jawaban tiga pertanyaannya terakhir itu adalah ya, maka bisa dipastikan, cuma ada empat sekolah bermutu di Indonesia (TK, SD, SMP, SMA). Selebihnya, 254.691 sekolah mulai dari TK sampai SLTA tidak bermutu.

Adalah hal yang wajar jika masyarakat berkeinginan untuk memperoleh layanan pendidikan yang sangat baik dan bermutu. Sebab di jenjang sekolah mana pun, biaya riil yang dikeluarkan peserta didik (orangtua) relatif besar. Persoalannya adalah, indikator apa yang bisa dijadikan ukuran ideal dan dapat diterima semua pihak, bahwa suatu sekolah disebut bermutu.

Terus terang harus diakui, yang namanya sekolah bermutu sampai saat ini masih membuka perbantahan di antara para pakar evaluasi pendidikan. Ada anggapan, indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang cenderung memudahkan lulusannya melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya secara vertikal. Mempermudah lulusannya mendapat pekerjaan. Dan secara sosial mengangkat prestise pergaulannya.

Sedikit lebih ideal, indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang secara optimal dapat mengaktualisasikan kemampuan kognitif, matra afektif dan keterampilan psikomotorik subjek didiknya. Dari bodoh menjadi pintar; dari tumpul menjadi kreatif;; dari kurang adab menjadi beradab, dan seterusnya. Dengan kalimat lain, sekolah bermutu mendidik manusia paripurna, utuh lahir maupun batin.

Sekolah mana yang dapat menunjukkan secara konkret dan rinci indikator-indikator diatas? Depdikbud, dengan anggaran besar sekalipun, belum tentu bergairah mengevaluasi hal-hal yang rumit dan relatif seperti itu.

Dalam kaitan ini, tampaknya diperlukan standardisasi dan acuan evaluasi yang bisa secara menyeluruh diterapkan. Tidak terbatas oleh dimensi geografis, tidak terhalang oleh dimensi strata sosial, dan tentu saja mengkalkulasinya mudah dan biayanya relatif murah. Suatu hal yang jelas, harus didasarkan pada inti aktivitas lembaga pendidikan bernama sekolah, yakni proses pembelajaran.

## **INDEKS PRODUKTIVITAS**

Mengingat kegiatan sekolah adalah proses pembelajaran, maka sekolah bermutu seyogyanya dilihat dari keefektifan dan efisiensi proses pembelajarannya, sesuai dengan tuntutan manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, salah satu ukuran keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran adalah indeks produktivitas.

Bukan semata-mata produktivitas dalam arti jumlah kelulusan. Lebih dari itu, adalah indeks yang diperoleh guna mengatrol kualitas subjek didiknya. Gampangnya pembelajaran disebut efektif dan efisien, bilamana

kemampuan anak yang sedang, dengan fasilitas sederhana dan biaya sedikit dapat menjadi anak berkemampuan tinggi setelah lulus.

Filosofi dan spirit produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia. Makna esensinya adalah 'keinginan' (*the will*) dan 'upaya' (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang.

Secara teknis, di bidang pendidikan diartikan sebagai rasio antara keluaran (*out put*) dan masukan (*input*) yang terpakai. Lewat hitungan kompleks (produktivitas total), masukan mencakup  $5M + 1 + E$  (*man, machine, material, money, management, plus information, dan energy*).

Namun, untuk menentukan produktivitas sekolah yang mudah dipahami masyarakat, cukup dipakai konsep produktivitas parsial. Dalam konsep produktivitas parsial, perhitungan masukan didasarkan atas data kemampuan awal masuk sekolah. Bisa berdasar NEM (nilai ebtanas murni), bisa pula hasil tes intelegensi (IQ). Sementara keluaran didasarkan atas data kemampuan akhir, dapat berupa NEM ketika lulus, dapat juga berupa tes intelegensi lanjutan.

Berikut ini contoh sederhana untuk membandingkan mana di antara dua SMP disebut bermutu berdasar NEM dengan indikator indeks produktivitas. NEM dipilih karena saat ini paling logis dan mendekati kebenaran kemampuan siswa. Sebab diukur dari perangkat tes yang validitasnya sudah teruji.

Misalnya SMP-A menerima tiga orang murid yang NEM SD-nya masing-masing 40. Karena NEM maksimal SD adalah 50, maka rerata indeks masukan adalah  $120 : 150 = 80$ . Selama tiga tahun menempuh pendidikan, ketiganya lulus dari SMP-A dengan NEM masing-masing, misalnya 55. Mengingat NEM maksimal SMP adalah 60, maka indeks keluaran adalah  $165 : 180 = 92$ . Rasio antara keluaran dengan masukan ( $92 : 80$ ) hasilnya = 1,15. Koefisien ini merupakan indeks produktivitas SMP-A di tahun ajaran berjalan.

Contoh lain, SMP-B menerima tiga siswa baru dengan NEM SD masing-masing 30. Dengan cara sama diperoleh indeks masukan = 60. Setelah tiga tahun, mereka lulus dan memperoleh NEM masing-masing 55. Maka indeks keluaran yang dihasilkan sama dengan SMP-A, yaitu 92. Dengan demikian, indeks produktivitasnya, rasio keluaran dibandingkan masukan ( $92 : 60$ ) = 1,53.

Dari perhitungan itu tampak, SMP-B lebih produktif dibandingkan SMP-A. Sebab indeks produktivitas SMP-B lebih besar dibandingkan indeks produktivitas SMP-A. Menurut teori produktivitas, besaran indeks produktivitasnya menunjukkan mutu sebuah kinerja. Itu berarti, SMP-B lebih bermutu ketimbang SMP-A. Ini logis, sebab secara didaktis mengajar siswa yang kemampuannya relatif rendah, jauh lebih sulit ketimbang mengajar siswa yang kemampuannya relatif tinggi.

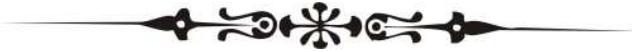
Dengan cara yang sederhana itu, kita bisa menentukan sekolah-sekolah bermutu. Tetapi, perlu diingat, apa yang kita paparkan di muka hanyalah sebuah pendapat. Hal yang penting dan perlu ditegaskan ialah, kita tidak bisa gegabah menyebut sekolah yang baru berdiri dan belum menghasilkan lulusan serta merta disebut sekolah bermutu. Apalagi oleh Pak Menteri.

Jakarta, HU *Kompas*, Senin, 14 Februari 1994

# 3



## MULTIKULTURALISME DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL



KEPRIHATINAN mendalam terhadap situasi kehidupan berbangsa dan bernegara selama periode 1998-2002 dinilai sudah berada di ambang kerusakan yang sempurna dan menyeluruh sebagaimana diungkapkan banyak para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh seni, akademisi dan para pemikir politik di berbagai media massa. Hal itu bisa dimengerti. Oleh karenanya, siapa pun yang masih mencintai keutuhan bangsa berkewajiban mendukung gerakan moral secara bersama-sama guna menyelamatkan keadaan. Namun penting dimengerti bahwa gerakan moral saja tidaklah cukup guna mengatasi karut marut persoalan bangsa tanpa ada solusi jangka panjang yang permanen.

Karut marut yang paling mengesankan tentu saja adalah cerai-berainya harmoni kehidupan dan lemahnya ketahanan masyarakat (*community resiliency*) terhadap provokasi yang mengarah pada perpecahan dan pertarungan antarsesama dengan bermacam dalih. Di luar persoalan besar kekerasan sebagaimana terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, nyaris dalam keseharian warga bangsa dijejali informasi bentrok antarmassa yang terentang mulai dari Jakarta hingga ke pelosok daerah. Mulai dari elit politik, sosial, bahkan elit kultural hingga tingkat “akar rumput” seakan berlomba menjadi jagoan. Ditambah kusut masai kerumitan persoalan lain seperti betapa sulit memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kondisi keterpurukan ekonomi yang makin menghimpit, dan menipisnya kecerdasan emosional dan spiritual; maka lengkap sudah penderitaan bangsa ini.

Menghadapi problematika mahaberoat tersebut, sudah ratusan diskusi maupun seminar digelar, puluhan pertemuan diselenggarakan, bahkan ribuan manuskrip ditulis oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian terhadap

nasib bangsanya. Tapi sudah lebih lima tahun, masih sedikit tanda-tanda bahwa berbagai persoalan yang mendera bangsa ini bisa terselesaikan dengan baik dan berperadaban.

Spesifik mengenai pertikaian yang menjurus pada kekerasan antarsesama secara fisik, terdapat catatan menarik yang relevan diperhatikan. Jika pada era Orde Baru orang dewasa dirisaukan oleh maraknya perkelahian antarpelajar, maka pada era Orde Reformasi sebaliknya, para muda justru merisaukan tawuran antarorang dewasa. Tawuran antarkampung, antarkelompok organisasi massa, perang urat syaraf antarelite politik, bahkan adu jotos antaranggota lembaga tertinggi negara, (maaf) sungguh menjadi tontonan sangat menyedihkan.

Tulisan berikut ini berusaha melacak dan mendeskripsikan satu perspektif yang relatif baru, yakni multikulturalisme, dan berusaha memaparkan peluang penerapannya dalam konteks Pendidikan Multikultural di Indonesia.

## **PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME**

Sekurang-kurangnya ada tiga istilah yang selama ini seringkali digunakan guna menggambarkan masyarakat yang terdiri atas agama, ras, etnik, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas atau kemajemukan (*plurality*), keberagaman atau diversitas (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Secara substansial, ketiga terminologi tersebut pada prinsipnya tidak merepresentasikan hal yang sama kendati ketiganya mengacu kepada pengakuan adanya “ketidaktunggalan.” Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); diversitas menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan tidak bisa disamakan, bahkan menurut penulis juga mendapat pengakuan.

Jika diperbandingkan dengan dua konsep terdahulu, multikulturalisme tergolong baru (Alexander, 2002). Pada masa Orde Baru dan sebelumnya, konsep pluralitas dan diversitas pengakuannya tercermin pada semboyan *bhinneka* (sungguhpun berbeda-beda), namun sesungguhnya satu (*tunggal ika*) atau “sungguhpun satu, namun sesungguhnya berbeda-bedalah itu” (lihat Wignjosoebroto, 2002). Tetapi sekali lagi, hal itu masih sebatas pengakuan (proeksistensi). Sedangkan inti perspektif multikulturalisme adalah kesediaan untuk menerima kelompok-kelompok lain secara sama sebagai satu kesatuan, tanpa mempedulikan agama, ras, etnik, gender, bahasa, dan kultur yang diwujudkan dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (koeksistensi).

Jadi, secara konseptual dapat dikatakan bahwa apabila pluralitas dan diversitas sekadar merepresentasikan adanya pengakuan kemajemukan yang ‘lebih dari satu’, maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan

segala perbedaannya, siapa pun sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme dengan demikian menjadi semacam respon kebijakan baru terhadap keberagaman. Dengan kalimat lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidaklah cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara dan siapa pun yang tertarik (*concern*) kepadanya.

Dalam hubungannya dengan sistem pendidikan, Nasikun (2002) menekankan betapa penting meletakkan daya ikat (imperatif) pendidikan multikultural bagi masyarakat majemuk. Menurut Ekstrand (1997) dalam Nasikun (2002), ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan, yaitu: (1) perspektif *cultural assimilation*; (2) perspektif *cultural pluralism*; dan (3) perspektif *cultural synthesis*. Perspektif pertama merupakan suatu model transisi di dalam pendidikan yang menunjuk pada proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub-nasional ke dalam suatu *core culture* dan/atau *core society*. Perspektif kedua menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Perspektif ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sistesis di dalam diri anak atau subjek didik dan masyarakat, serta terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.

Sangat jelas, dalam konteks suatu sistem politik kesukuan (*ethnic politics*), proses politik memiliki kecenderungan kuat untuk memilih ujung-ujung ekstrem di antara polarisasi pilihan perspektif pendidikan *asimilasionis-pluralis* (Nasikun, 2002). Oleh karena tekanan yang kuat pada pergumulan integrasi nasional dan potensi konflik etnik yang dihadapi Indonesia di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, sistem pendidikan nasional selama ini diselenggarakan dengan memberikan tempat sangat penting pada aplikasi perspektif pendidikan asimilasionis di atas argumen pentingnya pembentukan satu kebudayaan nasional yang kuat bagi pembangunan institusi-institusi koalisi dan *brokerage* multietnik yang sangat bagi proses integrasi nasional. Hal ini tercermin, misalnya, dalam berbagai dokumen GBHN maupun UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemberian tempat yang berlebihan pada fungsi pendidikan “integratif” melalui aplikasi perspektif asimilasionis itu, telah terbukti gagal menciptakan institusi-institusi koalisi dan *brokerage* sebagai bangunan yang kokoh bagi berkembangnya proses integrasi nasional. Sebaliknya, yang berhasil diciptakan tidaklah lebih dari suatu “bangunan semu” yang sangat rapuh bagi pengembangan proses integrasi nasional.

## PENDIDIKAN MASA SILAM

Dipandang dari sudut ilmu sosial dan politik, siapa pun berhak percaya pada tesis Jack Snyder (2000) sebagaimana diungkapkannya dalam buku *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict* mengenai hubungan antara demokratisasi dan timbulnya pertikaian antarsesama alias konflik. Sebab hubungan tersebut secara empirik tercermin pada kenyataan bahwa hampir semua konflik yang penuh kekerasan selama dasawarsa 1990-an terjadi di negara yang baru mengalami kebebasan politik, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan pers. Konflik dimaksud memuncak ketika gelombang transisi ke arah demokrasi juga memuncak. Bukanlah suatu kebetulan semata bahwa Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama.

Namun begitu tidak bisa dinafikan juga bahwa dalam perjalanannya, hampir setiap bangsa mengalami *never ending development process* melalui tritmen pendidikannya. Baik itu pendidikan politik, pendidikan budaya, lebih-lebih politik pendidikannya. Dalam bahasa ilmu ekonomi, tritmen pendidikan itulah yang disebut-sebut sebagai investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini bukanlah semata-mata persis seperti disebut Snyder; lebih dari itu merupakan produk politik pendidikan masa lalu yang tidak bersenyawa dengan bidang kebudayaan dan politik terutama dalam visi dan perspektif serta kehidupan sejati bangsa ini. Implisit di dalamnya adalah kegagalan pendidikan membangun kesadaran sejarah dan kemampuan memandang segala persoalan secara dialektik sehingga bangsa ini tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya.

Jika benar demikian, maka solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini bukanlah terletak pada proses alamiah demokratisasi itu sendiri dengan segala dinamika dan rekayasanya, melainkan bagaimana menginvestasikan sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Tapi penting dicatat, sebagaimana pernah disinggung seorang budayawan, investasi sumber daya manusia tidak bisa instan. Paling tidak dibutuhkan waktu satu generasi untuk berkorban sebelum bisa mengambil buahnya. Dengan kalimat lain, jika pendidikan orang dewasa sudah tidak bisa dijangkau, maka tumpuan harapan terletak pada pendidikan angkatan muda.

Persoalannya adalah, pendidikan bagaimanakah yang bisa menjadi solusi permanen sehingga membuahkan generasi yang bisa hidup sejahtera dan lebih memiliki prestise hidup, menghargai harmoni kemanusiaan dan kedamaian, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan kultural, dan tentu saja berjihad demokratis? Salah satu jawabannya barangkali adalah pendidikan multikultural yang dalam setahun belakangan mengemuka sebagai wacana di kalangan intelektual Indonesia.

## FASE-FASE PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dalam berbagai risalah tercatat, konsep pendidikan multikultural bermula dari gerakan reformasi pendidikan di Amerika Serikat selama perjuangan hak-hak sipil kaum Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah peserta didik dari kelompok etnik marjinal, beberapa orang berpendapat bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai guna mencapai keberhasilan akademik. Tetapi bagaimana pun, banyak teoritis multikultural menunjuk kegagalan sekolah akibat ketidakmerataan institusi yang menciptakan rintangan sehingga justru memarjinalkan keberhasilan akademik kaum muda.

Banks (1994) dalam *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice* telah mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultural dalam empat fase. *Pertama*, terjadinya upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnik pada setiap kurikulum. *Kedua*, hal itu diikuti oleh pendidikan multietnik sebagai suatu usaha guna menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marjinal yang lain seperti kaum perempuan, penyandang cacat, kaum homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Perbedaan kebutuhan dan agenda berbagai kelompok ini menghasilkan banyak sekali fokus teoritis. Tapi bagaimana pun fase *keempat*, perkembangan teori, riset dan praktik yang perhatiannya tertuju pada hubungan antarras, kelamin dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis meskipun bukan pada praktisi pendidikan multikultural.

Gerakan reformasi itu mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga setiap peserta didik, apa pun ras dan etniknya, kecacatan, kelamin, kelas sosial (miskin dan nonmiskin) dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan (misalnya lihat Alexander, 2002).

Nieto (1992) dalam *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* menyatakan bahwa kebanyakan pengikut pendidikan multikultural setuju bahwa tujuan mereka adalah sebuah pendidikan yang bersifat antiras yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi setiap peserta didik; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan peserta didik bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu

pendidikan kritis yang memberi perhatian pada bangunan pengetahuan sosial dan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan serta tindakan sosial.

Mereka juga memiliki pandangan yang sama terhadap sekolah sebagai sistem sosial dari komponen yang saling berhubungan seperti sikap dan tindakan pengajar, kebijakan dan politik sekolah, budaya dan kurikulum tersembunyi sekolah, gaya belajar siswa, prosedur penilaian dan pengujian, materi yang diajarkan, kurikulum pendidikan yang resmi, strategi dan gaya pengajaran, bahasa dan budaya sekolah, serta partisipasi komunitas. Melalui cara itu pendidikan multikultural berkembang melampaui reformasi kurikulum menjadi transformasi keseluruhan unsur dalam sistem (lihat Reich, 2002).

Berdasarkan diskursus tersebut, bukan berarti institusi-institusi pendidikan berciri khas seperti sekolah-sekolah berlabel agama harus dibubarkan, tetapi bagaimana memberi isi yang benar dalam proses pendidikannya sehingga tidak cenderung eksklusif, melainkan sebaliknya menjadi inklusif. Hal yang sama juga berlaku bagi institusi-institusi pendidikan publik maupun privat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari mana hal itu harus dimulai? Tentu saja dari hulunya, yakni dasar pijakan hukum dan politik pendidikan yang memuat filsafat, visi dan perspektif pendidikan yang melampaui batas-batas kedaerahan dan nasional meskipun secara teknis dilaksanakan di daerah. Melelahkan memang. Tapi begitulah jalan panjang yang mesti dilalui agar Indonesia Baru di kelak kemudian hari bisa terwujud. Amerika Serikat saja membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun jembatan bagi terlaksananya multikulturalisme dalam konteks pendidikannya (Reich, 2002).

Gerakan reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil (baca: kelompok etnik, agama, ras untuk menyebut di antara yang paling penting), dan telah menjadi dasar bagi pilihan perspektif pada ujung ekstrem yang lain yang oleh Ekstrand disebut sebagai perspektif *radical multiculturalism* (multikulturalisme radikal).

Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang akan semakin menguatkan ketidakmampuan kita untuk membangun institusi-institusi koalisi dan *brokerage* multi-etnik yang diperlukan sebagai landasan bagi pengembangan suatu sistem politik rasional. Sebagaimana sudah disebutkan di muka, perspektif pendidikan pluralis sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap

kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

Menurut Nasikun (2002), yang diperlukan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem demokrasi di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan “sintesis multikultural” ketiga, yang merupakan sintesis dari aplikasi perspektif asimilasionis dan pluralis. Perspektif pendidikan ini memberikan peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub-nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan promosi terbentuknya suatu *melting pot* dari beragam kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.

Pilihan perspektif pendidikan *sintesis multikultural* memiliki rasionalnya yang paling dasar di dalam hakikat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi meliputi tiga tujuan berikut (Ekstrand, 1997 dalam Nasikun, 2002): tujuan *attitudinal*, tujuan *kognitif*, dan tujuan *instruksional*. Pada tingkat *attitudinal*, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap *culture responsive*, dan keahlian dalam penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan memiliki kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok-kelompok etnik yang dimuat di dalam buku-buku dan media-media pembelajaran; menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat-perangkat konseptual untuk komunikasi multikultural, mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.

Secara konseptual agak sulit memang meletakkan fondasi pendidikan multikultural dalam posisi sebagai *hard-ware* sistem pendidikan nasional di Indonesia. Namun langkah awal bisa dimulai dengan meletakkan muatan multikulturalisme dalam proses pembelajaran, hampir di semua bidang. Guru Matematika misalnya, perlu menegaskan bahwa lambang bilangan 2, 5 dan 9 itu memang berbeda, sama dengan perbedaan agama, jender dan bahasa setiap warga negara. Tapi, jika lambang bilangan berbeda itu saling bersatu membentuk

satu kesatuan angka, misalnya 592 atau 952, maka kekuatan dan maknanya menjadi lebih besar dan luar biasa, yakni lima ratus sembilan puluh dua dan sembilan ratus lima puluh dua.

Guru Biologi barangkali perlu menegaskan bahwa keberagaman bukan hanya menjadi milik berbagai ordo makhluk, tetapi hal itu sudah dimulai dari diri sendiri. Setiap manusia bukan hanya berbeda secara genetik dan sidik jarinya, setiap organ tubuh saja sudah berbeda fungsi dan bentuknya. Perbedaan itu menjadi bermakna ketika berada dalam satu harmoni aktivitasnya. Tangan dan kaki tak dapat leluasa menjalankan fungsinya jika mata dan teinga tidak membantunya. Demikian seterusnya.

Bagaimana dengan kajian sosial (*social studies*) dan atau pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? Guru yang menekuni bidang ini tentu saja menjadi lebih leluasa memasukkan muatan multikulturalisme dalam setiap proses pembelajarannya. Namun fakta menunjukkan, pendidikan IPS, sebagaimana juga tercermin dalam skop dan sequen mata ajarnya, belum mencerminkan perspektif multikulturalisme, apalagi praktik pembelajarannya (lihat misalnya Mulder, 1997 dan 2000). Karena itulah diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut secara komprehensif agar *social studies* yang termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Kewargaan Negara dan Pendidikan IPS benar-benar menjadi pioner bagi terwujudnya praktik pendidikan multikultural di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Multikulturalisme sebagai paham keberagaman yang cenderung humanitairian relatif baru di Indonesia. Demi menghindari meluasnya disintegrasi bangsa, dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan tritmen multikulturalisme melalui berbagai wahana, termasuk pendidikan multikultural. dengan basis tekanan pada kaum muda. Peluang penerapannya pada prinsipnya relatif terbuka, meskipun perlu dimulai dari proses pembelajaran di semua bidang studi. Pada konteks sistem pendidikan, kendati terdapat tiga perspektif multikulturalisme, yakni perspektif *cultural assimilation*; perspektif *cultural pluralism*; dan perspektif *cultural synthesis*, agaknya perspektif yang terakhirlah yang paling relevan diterapkan jika dikaitkan dengan kondisi kekinian dan pengalaman sejarah kebangsaan Indonesia.



## **SKENARIO BELAJAR LIMA HARI DI SEKOLAH DAN PERTIMBANGANNYA**



ADA pemikiran, pemerintah akan menetapkan lima hari kerja efektif dalam seminggu secara nasional mulai 17 Agustus 1995. Sasaran lima hari kerja antara lain agar kesejahteraan keluarga meningkat, produktivitas dan layanan kerja semakin baik, serta efisiensi dan efektivitas terdongkrak.

Di lingkungan pendidikan, pelaksanaan konsep lima hari kerja tentu akan berdampak pula, yakni penerapan lima hari belajar. Sebab, para guru yang bekerja di lingkungan sekolah umumnya adalah pegawai negeri. Tak terkecuali yang mengajar di sekolah swasta. Mereka ini sebagian besar adalah guru-guru pinjaman dari sekolah negeri.

Dalam hubungan ini, Mendikbud Wardiman Djojonegoro sudah mengatakan, sangat dimungkinkan Sabtu jadi hari libur resmi sekolah. Disertai catatan agar program sekolah tetap jalan. Dia menyarankan agar mulai sekarang sekolah dan guru mencobanya. Bahkan ia menjanjikan dalam tempo delapan bulan akan mengkaji berbagai implikasi jika belajar lima hari dilaksanakan.

Efektifkah belajar lima hari sementara Kurikulum 1994 tidak dirancang untuk itu? Pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu diperhatikan agar belajar lima hari – sekiranya jadi dilaksanakan – bisa efektif?

### **SUSUT**

Di satu pihak, sasaran belajar lima hari di sekolah adalah agar para siswa pada Sabtu dan Minggu bisa berkumpul dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya. Di pihak lain, lima hari kerja diharapkan memberi kesempatan pada

orangtua agar bisa bekerja sampingan pada Sabtu. Ini sebuah kontradiksi jika sasaran utama adalah kesejahteraan keluarga.

Secara finansial bisa saja tercapai. Tapi secara psikologis apakah mungkin? Kapan mereka bisa bercengkrama dengan anak-anak jika pada Sabtu dan Minggu juga diharapkan bekerja sampingan?

Salah satu ciri pokok kurikulum 1994 adalah memakai sistem catur wulan (Cawu) yang membagi satu tahun ajaran menjadi tiga Cawu (tiga kali empat bulanan). Tidak lagi menggunakan sistem semesteran (enam bulan) sebagai penggalan belajar. Penggunaan Cawu ini bertujuan mencegah kejenuhan belajar akibat rentang waktu belajar yang terlalu lama.

Selain itu, agar pada masa liburan para pelajar bisa bersama-sama dengan adik-adiknya yang di pendidikan dasar. Sistem Cawu ini jika dihubungkan dengan konsep lima tahun hari kerja sangat klop.

Kurikulum 1994 yang dimulai berlaku sejak 18 Juli 1994 pada dasarnya merupakan jawaban terhadap salah satu kritik Bank Dunia bahwa hambatan terhadap meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya hari belajar setiap tahun, yakni hanya sekitar 180 hari.

Praktiknya, hari efektif belajar tak sebanyak itu. Soalnya, gangguan hari libur tak resmi cukup banyak. Sekedar contoh, acara-acara seremonial semisal hari-hari nasional yang mesti dihadiri guru dan siswa, perayaan penyambutan pejabat, perlombaan- perlombaan, dan sebagainya. Praktis hari efektif kurang dari itu.

Kurikulum 1994 mencoba mengatasi dengan memperpanjang hari belajar menjadi sekitar 200 hari setiap tahun. Untuk SMU misalnya, Cawu 1 dan 2 untuk kelas I, II, dan III lamanya masing-masing 12 minggu. Cawu 3 di kelas I dan II lamanya 10 minggu. Sedangkan Cawu 3 di kelas III lamanya delapan minggu.

Dengan demikian lama belajar di kelas I dan II adalah 34 minggu atau 204 hari belajar. Sementara itu kelas III adalah 32 minggu atau 192 hari belajar. Itu berarti lama hari belajar di kelas I dan II, 24 minggu lebih panjang dibandingkan dengan kurikulum 1984. Sementara di kelas III, 12 minggu lebih panjang dibanding kurikulum 1984.

Belajar lima hari dalam seminggu akan mempersusut jumlah hari belajar dalam setahun, yakni 170 hari di kelas I dan II, serta 160 hari di kelas III. Memang, susutnya jumlah hari belajar dikompensasi dengan bertambahnya jam belajar per hari agar target kurikulum tetap tercapai. Tapi bagaimana pun hal itu akan membawa implikasi tertentu.

## BEBERAPA SKENARIO

Berdasarkan kurikulum 1994, jumlah jam belajar setiap minggu untuk SLTP dan SMU adalah 42 jam pelajaran. Saat ini komposisi jam belajar yang telah disusun sekolah untuk Senin-Kamis terdiri dari 8 jam pelajaran. Sementara untuk Jumat dan Sabtu masing-masing 5 jam pelajaran.

Pada Senin-Kamis rata-rata siswa belajar selama 6 jam per hari. Jika pelajaran dimulai pukul 07.00 sementara satu jam pelajaran lamanya 45 menit, ditambah istirahat 2 kali 15 menit, maka pelajaran berakhir pukul 13.30. Sedangkan pada Jumat dan Sabtu berakhir pada pukul 11.00 (lihat tabel).

**Tabel 1**  
**Skenario Jam Belajar Senin – Kamis Berdasarkan Kurikulum 1994**

Jam ke	Saat ini	Skenario 1	Skenario 2
I	07.00 - 07.45	08.00 - 08.45	07.00 - 07.45
II	07.45 - 08.30	08.45 - 09.30	07.45 - 08.30
III	08.30 - 09.15	09.30 - 10.15	08.30 - 09.15
IV	08.30 - 09.15	09.30 - 10.15	08.30 - 09.15
Istirahat pertama	15 menit		
V	09.30 - 10.15	10.30 - 10.15	09.30 - 10.15
VI	10.15 - 11.00	11.30 - 12.00	10.15 - 11.00
VII	11.00 - 11.45	12.00 - 12.45	11.00 - 11.45
Istirahat kedua	15 menit	30 menit	30 menit
VIII	12.00 - 12.45	13.15 - 14.00	12.15 - 13.00
IX	12.45 - 13.30	14.00 - 14.45	13.00 - 13.45
X	Pulang	14.45 - 15.30	13.45 - 14.30

Bagi sekolah yang menyelenggarakan *single shift* (hanya kelas-kelas pagi) barangkali tak ada masalah. Namun, bagi sekolah yang menyelenggarakan *double shift* (kelas pagi dan sore), jelas ada masalah.

Saat ini saja, yang masuk sore dimulai pukul 14.00 (karena jam pelajaran untuk yang masuk pagi berakhir pukul 13.30), sehingga pelajaran baru berakhir pada pukul 20.30. Bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, saat ini sudah terlalu malam. Kecuali itu, penggunaan penerangan listrik menjadikan anggaran sekolah membengkak.

Dengan belajar lima hari, komposisi jam belajar akan berubah. Rata-rata siswa belajar setiap harinya selama 9 jam pelajaran untuk Senin-Kamis, dan 6 jam pelajaran pada Jumat. Menurut skenario 1, sesuai jam kerja yang berlaku, jam belajar dimulai pukul 08.00. Disertai istirahat dua kali – sekali 15 menit sesudah jam ketiga, sekali 30 menit sesudah jam keenam untuk makan siang dan Sholat dhuhur bagi yang Islam – maka pelajaran akan berakhir pada pukul 23.30.

Memang skenario ini dengan sendirinya tidak dimungkinkan lagi membuka kelas sore yang biasanya dilakukan sekolah swasta seperti banyak terjadi selama ini. Sebab, jika dipaksakan *shift* kedua yang dimulai pada pukul 16.00, maka pelajaran akan berakhir pada pukul 23.30.

Memang, dalam hal penggunaan gedung sekolah untuk *single shift* maupun *double shift*, setiap daerah bisa mengatur sendiri. Namun bagi kota raya yang arus lalu lintas menjadi problem, *double shift* jelas tak mungkin. Sedangkan bagi kota kecil pelajaran bisa dimajukan. Misalnya memakai skenario 2 di mana kelas pagi dimulai pada pukul 07.00, sehingga kelas sore bisa dimulai pukul 14.45.

Kendati begitu masih tetap penuh risiko. Untuk *shift* kedua, selain soal keamanan, penerangan, dan kemampuan mengajar para guru karena pelajaran akan berakhir larut malam, juga menyangkut keterikatan siswa yang mayoritas beragama Islam untuk melaksanakan sholat ashar dan maghrib. Sehingga efektivitas jam belajar menjadi berkurang.

## **PERTIMBANGAN**

Suatu saat, belajar lima hari di Indonesia pasti menjadi kenyataan. Seperti halnya yang telah dilaksanakan di banyak negara maju. Bercermin dari pengalaman negara- negara lain yang telah melaksanakan sistem belajar lima hari, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

*Pertama*, jumlah mata ajar yang harus dipelajari dirancang seramping mungkin. Kurikulum harus menyediakan mata ajar antara 5-10 mata ajar. Jangan seperti sekarang, siswa SD dan SLTP diharuskan menerima 12 mata ajar, siswa SMU kelas I dan II yang mendapat 10 mata ajar. Sedikit mata ajar akan mengurangi kejenuhan belajar.

*Kedua*, sistem klasikal di mana kelas besar berlaku (terdiri dari 40 siswa per kelas) harus ditinggalkan. Diganti dengan sistem kelas kecil antara 10-20 orang. Hal ini memungkinkan guru membimbing secara individual. Kecuali itu, memungkinkan guru menciptakan jalinan simpatik yang bisa membuat kerasan para siswa di sekolah. Berapapun lamanya jam belajar (di negara maju seperti Jepang, belajar dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00).

*Ketiga*, kelengkapan fasilitas belajar harus terjamin sehingga memungkinkan para siswa dan guru melaksanakan proses pembelajaran lebih variatif. Tidak monoton dan membosankan. *Terakhir*, selain jumlah guru ditambah agar lebih seimbang, gaji guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran harus diperbaiki. Hanya dengan imbal jasa yang memadai produktivitas para guru dapat ditingkatkan. Jika tetap seperti sekarang, dedikasinya memang tinggi, tapi produktivitasnya tidaklah sebaik seperti apa yang diharapkan.

Beberapa pertimbangan itu tentu saja tidak mengesampingkan upaya-upaya untuk semakin mempertinggi etos belajar bangsa. Sebab, tingginya etos belajar bangsa menjadi tolak ukur sejauh mana anak generasinya dapat bertahan lama dalam belajar.

Jakarta, HE *Bisnis Indonesia*, 13 Agustus 1994



## SARJANA BERWAWASAN KERAKYATAN



TIGA belas tahun yang silam William K. Cummings – empat tahun menjadi konsultan Balitbangdikbud – dalam risalah berjudul *Notes on higher education and Indonesian society* (1981) memberikan kritik cukup menantang. Katanya, universitas – universitas di Indonesia pernah menjadi tempat dari idealisme yang menggairahkan, namun, sekarang ini mereka melakoni proses rutin yang membosankan.

Banyak fakultas di universitas-universitas di Indonesia benar-benar merasa, bahwa perguruan tinggi mereka telah mengerjakan karya yang baik. Hal itu tidak dapat dipercaya karena keadaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini sangat menyedihkan.

Di hari sarjana, yang ditetapkan tanggal 29 September, kritik itu kita angkat kembali. Inilah konteks, di mana relevansi kritik tersebut amat jelas.

SEPERTI diungkapkan Agustinus Rachmat Widiyanto (mantan Rektor Unpar, Bandung), banyak perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini terlalu mementingkan persoalan kompetensi (*competence*) dibanding kesediaan membela nasib orang lain atau emansipatoris (*compassion*). Akibatnya, perguruan tinggi semacam ini hanya akan menghasilkan sarjana atau lulusan yang “kering”, orang kaya baru (*nouveaux-riches*) yang steril kepekaan dan tanggung jawab sosialnya (*Kompas*, 5/9/94).

Kata-kata kunci otokritik itu, yakni soal kepekaan dan tanggung jawab sosial seorang sarjana, secara argumentatif dibaliklogikakan oleh Soetjipto Wirosardjono sebagai potret derajat kepekaan masyarakat secara luas. Masyarakatlah yang membentuk kepekaan para lulusan perguruan tinggi (*Kompas*, 6/9/94).

Itu berarti, watak sarjana Indonesia dianggap sebagai fungsi watak masyarakatnya. Lantas, di mana peranan sistem (orde) politik, dimensi-dimensi ekonomik, dan pola kebijaksanaan publik yang diintroduksikan oleh negara?

Tanpa bermaksud mencari-cari kaitan itu, dua pandangan di muka mengingatkan kita pada harapan Bung Hatta semasa hidupnya, yakni agar sarjana Indonesia menjadi sarjana yang berkarakter. Seorang sarjana yang, selain memiliki visi kebenaran ilmiah paripurna, sekaligus peka akan hidup dan kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain, kita saat ini dan mendatang amat membutuhkan sosok sarjana yang berwawasan kerakyatan.

Persoalannya, atas dasar apa seorang sarjana dikatakan memiliki wawasan kerakyatan? Jawaban atas pertanyaan itu sekurang-kurangnya akan mereduksi keabsahan otokritik di muka. Soalnya, terkesan adanya pengingkaran terhadap fakta-fakta empiris di mana para sarjana berkecimpung dan bergelut mengabdikan diri sesuai bidang keahlian masing-masing.

Namun, sekiranya kita berpikir general, kerinduan terhadap sarjana yang memiliki wawasan kerakyatan adalah wujud “keresahan sosial” di mana para tenaga pengajar berkecimpung membentuknya. Keresahan itu timbul akibat dipaksakannya paradigma ekonomik masuk ke dalam karakter sarjana yang hendak dibentuk di perguruan tinggi. Hal ini bisa dimengerti, sebab calon sarjana pastilah tidak memilih jadi manusia cerdas, terampil, jujur, namun tetap melarat setelah jadi sarjana.

Melainkan sebaliknya, ingin jadi manusia cerdas, terampil, jujur dan hidup berkecukupan jika kelak menjadi sarjana. Hal demikian – disadari atau tidak – sering menjebak seorang calon sarjana untuk menempatkan premis “kewajiban” perguruan tinggi sebagai wahana pencetak tenaga kerja pada posisi berlebihan.

Alhasil, bukan kemandirian yang diperoleh, melainkan ketergantungan. Celakanya, ketergantungan itu bernama “lapangan kerja”, sesuatu yang nyaris belum jadi muatan sungguh-sungguh dalam kurikulum perguruan tinggi. Perguruan tinggi lebih bergairah mendidik calon sarjana jadi intelektual. Pandai berbicara tapi tak mampu kerja.

Inilah gejala di mana calon sarjana menjadi *jack of all trades* (orang yang menangani segala macam bidang), yang pada akhirnya menjadikannya sebagai *a master of none* (orang yang nyaris tak menguasai apa pun). Didesak oleh posisi semacam itu, dengan sendirinya seorang sarjana akan bersikap individual. Untuk apa memikirkan nasib orang lain kalau nasibnya sendiri tidak menentu?

Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengubah perilaku calon sarjana dari merasa bergantung menjadi bisa mandiri. Dan kita pasti sepakat, bahwa kemandirian tidaklah berdiri sendiri sebagai konsep psikologis. Melainkan amat terkait dengan masukan instrumental lain seperti struktur

kurikulum, teladan kepemimpinan, sistem organisasi, ragam fasilitas, kemampuan tenaga pengajar dan falsafah sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Sekiranya pengenalan medan (*field familiarization*) melalui bentuk-bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata), praktik kerja lapangan, dan sebagainya dirasa gagal; sekiranya pembentukan keterampilan (*skill development*) melalui kurikulum inti, dan kinerja perguruan tinggi dirasa kurang dalam mendidik para calon sarjana, maka ada baiknya kita mawas diri. Dalam arti bersedia melakukan pembaruan di segala sektor.

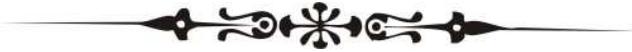
Tugas melakukan pembaruan tentu saja bukan oleh fakultas, universitas, apalagi pemerintah, melainkan tugas jurusan. Peran sentral jurusan dilandasi fakta, di unit pelaksana akademis perguruan tinggi itulah para ahli berkumpul, para calon sarjana digodok. Merekalah yang seharusnya merencanakan proses pembelajaran, sekaligus menyediakan kurikulum yang berwawasan kerakyatan.

Jurusanlah yang harus memutuskan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dan mengarahkannya pada tuntutan-tuntutan konsep kerakyatan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti politik dan ekonomi global; perubahan teknologi; dan faktor internal, selain perlu memperbarui manajemen dan tenaga pengajarnya.

Jakarta, HU *Kompas*, 30 September 1994



## **AKSI ANTIREKTOR DAN DILEMA SEORANG REKTOR**



DITULIS Derek Bok di tengah-tengah kesibukannya sebagai rektor Universitas Harvard, *Beyond The Ivory Tower* (1982), merupakan wacana menarik. Dalam buku itu, Bok mengatakan, suatu institusi akademis seperti perguruan tinggi pertama kali harus memenuhi komitmen terhadap “kontrak” yang dilakukan untuk masyarakat. Mematuhi persyaratan hukum, dan menjauhi tindakan-tindakan “keliru.” Tapi, tidak berarti harus “netral.” Sebab, bagaimanapun perguruan tinggi tidak bertanggungjawab kolektif terhadap ide dan tindakan kontroversial dari sivitas akademikanya.

Lebih lanjut Bok berujar, tugas utama perguruan tinggi ialah menciptakan atmosfer, di mana setiap sivitas akademika dapat bebas belajar, bebas mencari serta menekuni ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan bebas untuk mengekspresikan pendapatnya.

Pandangan itu dikemukakan terkait dengan maraknya aksi antirektor di kampus Ganesha (ITB). Kasus ini menarik karena aksi antirektor harus ditelaah secara proporsional dalam kedudukan yang seimbang tanpa harus menyudutkan pihak-pihak yang berselisih.

### **MEMPRIHATINKAN**

Warta aksi antirektor di ITB antara lain menyebutkan, beberapa mahasiswa mengadakan masalahnya ke Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Azasi Manusia). Sebab rektor dinilai menginjak-menginjak hak asasi manusia, terutama dalam kaitan dengan hak memperoleh pendidikan. Sementara itu Mendikbud Wardiman Djojonegoro menyerukan agar rektor dan pimpinan perguruan tinggi

hendaknya bersikap akomodatif dan melakukan dialog dengan seluruh aktivitas akademika, termasuk mahasiswa (*Kompas*, 10/2/94).

Kita patut ikut prihatin, sebab keterlibatan pihak lain di luar kampus mengindikasikan betapa “parah” suasana yang terjadi. Bisa lebih “parah” ketimbang aksi antirektor lain sebagaimana pernah terjadi di Unair Surabaya, IAIN Suka, Yogyakarta, ISTN Jakarta, UNAS Jakarta, UKSW Salatiga, ITATS Surabaya, dan sebagainya.

Tentu saja, keprihatinan atas berbagai aksi antirektor itu cukup mendalam. Mengingat epilog dari kasus-kasus itu ialah terganggu, terancam, bahkan terhentinya proses pembelajaran, yang jelas-jelas merupakan nadi kehidupan dan inti aktivitas perguruan tinggi.

Pandangan Bok diketengahkan dengan harapan, para mahasiswa, dosen dan pimpinan perguruan tinggi serta masyarakat menyadari, betapa penting menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis dan memungkinkan iklim akademik kondusif.

## **DILEMA REKTOR**

Perjalanan Bok menjadi rektor universitas kelas wahid yang dituang dalam bukunya itu, layak dipelajari. Begitu jelas diperlihatkan, betapa sulit dan repot “hidup” sebagai seorang pimpinan perguruan tinggi. Diakui, melepaskan sifat menara gading, tanpa meninggalkan cara-cara akademis, tidaklah mudah. Banyak faktor harus diperhitungkan. Dan kelihatannya hal itu berlaku universal.

Di negeri ini, dilema seorang rektor sebagai bagian dari orang yang “berkuasa” sekaligus “dikuasai” juga, terjadi. Memang, masalah-masalah yang timbul dalam tugas-tugas administratif dan pengelolaan pendidikan sering mudah diatasi. Tapi, dalam mememanajementi kebebasan akademis dan dinamika politik mahasiswa - bagian terbesar yang mendominasi aksi antirektor - selalu terjadi pro dan kontra.

Pekerjaan rektor ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi harus membela kepentingan penguasa (pemerintah) sebagai mitra mencipta iklim dan stabilitas kampus yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan. Pada saat yang sama ia harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh sivitas akademika dengan segala dinamikanya.

Dalam kaitan itu kita yakin, kebebasan akademis, berpolitik, mengeluarkan ekspresi, berbicara, dan menulis merupakan kontribusi yang bisa merangsang dan memperkaya kehidupan akademik. Tapi, kita pun perlu menyadari, bagi mereka yang kontra semua itu, semua ide dan gagasan bahkan tindakan kecil sekalipun bisa dipandang sebagai sebuah kekuatan.

Berlandaskan pokok pikiran demikian, seorang rektor memang bisa terjebak dalam menentukan pilihan: tetap bertahan dan mengambil inisiatif guna menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di kampusnya, atau menyerah dan mengalihkan penyelesaian kepada pihak lain. Dua-duanya absah dilakukan, sepanjang dipijaki oleh logika penyelesaian yang argumentatif, sekalipun beda.

Sekiranya dicermati lebih serius, akar permasalahan dari maraknya aksi antirektor dan kasus-kasus perselisihan lain bermuara di satu hal, yakni bias makna esensi kebebasan akademis dan tidak seimbangnya distribusi hak dan tanggung jawab. Tanpa pretensi membela, kita cukup prihatin dengan nasib mahasiswa. Mereka kurang mendapat peluang tumbuh dewasa dan belajar bertanggung jawab. Mereka boleh beraktivitas tanpa boleh bertanggung jawab. Ini berbeda dengan pokok pikiran Bok. Sehingga, lingkup aktivitas mahasiswa baru terbatas sejauh yang diperkenankan dan diizinkan pihak lain yang dituntut bertanggung jawab, yakni para rektor dan aparatnya.

Akibatnya, kekangan sekecil apa pun - lambat namun pasti - mendorong mahasiswa bersikap “memberontak.” Di satu pihak, dalam banyak hal mereka tak punya akses untuk mengemukakan, sebab katup ekspresi itu demikian kuatnya. Aksi antirektor dan perselisihan yang terjadi, boleh jadi hanyalah bocoran kecil dari katup-katup tersebut.

Di pihak lain, seorang rektor dituntut bertanggung jawab atas segala kegiatan kampus. Tanggung jawab kolektif. Karenanya wajar, jika banyak rektor sering menolak atau meminimalisasi beban tanggung jawab atas kegiatan yang berada di luar kendali dengan caranya sendiri. Cenderung lebih represif ketimbang yang dikehendaki penguasa.

## **UTAMAKAN KOOPERATIF**

Siapa saja boleh memandang aksi antirektor dan perselisihan antara pihak rektorat dengan mahasiswa-dosen sebagai hal biasa. Sehingga, tak perlu berpusing-pusing memikirkannya. Dalam tataran berbeda, toh hal sejenis selalu terjadi di kampus mana pun. Tapi, mengingat akibat akhir adalah disintegrasi, pikiran waras tentu tak tega membiarkan selamanya berlangsung. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis minimal oleh warga kampus, sendiri-sendiri atau bersama-sama (kolektif).

Dalam kasus ITB kali ini, terjadi “perang dingin.” Dua kubu “berlaga”, antara pihak “prorektor terpilih” dengan pihak “antirektor terpilih.”

Dari modus perselisihan itu tampak, baik pihak rektor maupun mahasiswa-dosen adalah orang-orang senasib. Keduanya merupakan sesama korban. Korban dari kekacauan distribusi hak dan tidak seimbangnya tanggung jawab.

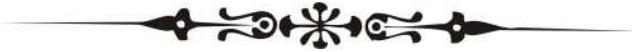
Akan lebih baik jika mereka mengutamakan langkah kooperatif, saling bekerjasama. Membangun kesadaran kesetiakawanan sosial, menumbuhkembangkan etika profesional, menciptakan suasana dan budaya akademis yang teduh bagi hidup dan kehidupan sivitas akademika demi kepentingan bersama yang saling melengkapi.

Sungguh kita tak rugi mengikuti alur pikiran Bok, bahwa dalam mengatasi aksi antirektor, kemelut dan perselisihan di kampus, pendekatan secara komunikatif merupakan cara paling baik dan ampuh. *Punishment* memang diperlukan, tapi tak harus mematikan. Rektor dan dosen adalah para pendidik dan pembimbing, bukan pembidik (kesalahan) dan pembanting.

Jakarta, HU *Kompas*, Jum'at 18 Februari 1994



## **MEMPERBAIKI MEKANISME PEMILIHAN REKTOR**



RICUH rebutan kursi jabatan rektor tampaknya terus menggelinding. Setelah kurun 1993 didominasi gejala pemilihan rektor PTS (perguruan tinggi swasta), sepanjang 1994 ini diperkirakan mengimbas ke PTN (perguruan tinggi negeri). Tanda-tanda timbulnya kericuhan ini sebenarnya sudah lama. Baru terasa setelah mencuatnya kasus penolakan tiga bakal calon (balon) rektor yang diajukan Senat Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon oleh Mendikbud.

Tarik urat terjadi karena perbedaan visi mengenai usia balon rektor, yang konon tak boleh lebih dari 56 tahun (*Kompas* 17, 18, 19 dan 21 Maret 1994). Kebijakan ini mendapat komentar cukup pedas. Anggota Komisi IX DPR, HM Popo Sonandar Haroen mengatakan, kebijakan itu tidak berdasar (*Kompas*, 22/3/94). Sementara Drs Leonard Thomasoa, anggota Komisi IV DPR menyarankan agar Mendikbud menghargai hasil pemilihan Senat, karena pemilihan itu sudah melalui proses demokrasi (*Kompas*, 22/3/94)

### **MEKANISME DAN FUNGSI SENAT**

Sungguh tidak menarik berdebat soal usia bagi jabatan rektor. Sebab siapa pun tahu jika faktor itu bukan harga mati. *Tob* banyak jabatan lain yang jauh lebih penting dipegang oleh mereka yang (maaf) tergolong udzur. Justru yang menarik dikaji ialah ketidakseriusan pemerintah dalam memberi otonomi perguruan tinggi. Timbulnya gejala pemilihan rektor adalah cermin dari kemandulan otonomi dimaksud.

Kemelut pemilihan rektor pada prinsipnya tak perlu terjadi jika masing-masing pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Ragam kepentingan

semestinya diletakkan di atas kerangka sudut pandang yang sama, yakni mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor sebagaimana diatur PP No 30/1990 tentang Perguruan Tinggi.

Pengangkatan dan pemberhentian rektor bagi PTN, yaitu perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain atau pimpinan pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut (Pasal 38 ayat 1).

Akan halnya balon rektor PTS, menurut pasal 38 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dengan persetujuan Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga pemerintah.

Jika dicermati, redaksi pasal itu mengkuai hal esensial yang seharusnya menonjol, yakni “pertimbangan senat.” Secara terminologis, pertimbangan senat memang tidak mengikat. Tapi karena kedudukan senat menurut pasal 30 ayat (1) dan pasal 40 ayat (1) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan, maka seharusnya pertimbangan itu mengikat.

Sebab, kecuali “pertimbangan” menunjuk pada mekanisme proses dan mengisyaratkan peran sentral senat dalam pemilihan, anggota senatlah yang mengetahui secara persis bagaimana figur rektor yang diperlukan perguruan tingginya. Itu berarti, peran Presiden dan yayasan, dalam tataran tertentu sebatas melakukan pengangkatan dan pemberhentian secara administratif.

Demikian halnya dengan peran Menteri. Untuk balon rektor PTN sebatas pada pengusulan kepada Presiden, tidak berkonotasi dengan penolakan. Sementara untuk rektor PTS sebatas menyetujui secara formal, tidak dilawankan dengan ketidaksetujuan terhadap pengangkatan rektor oleh yayasan.

Jadi, mekanisme pemilihan kandidat rektor sepenuhnya berada di tangan senat mengingat fungsinya. Ini logis, kecuali sejalan dengan semangat otonomi perguruan tinggi, juga sesuai tugas pokok senat sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (2) butir 7, dan pasal 40 ayat (2) butir 7. Yakni, memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi (universitas/institut) berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan diangkat menjadi rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor.

Taruhlah kita beda penafsiran mengenai hal itu, karena dalam penjelasan PP tersebut tidak dirinci. Tapi kita tentunya paham jika gejolak pergantian rektor di PTN dan PTS, antara lain disebabkan pemerintah maupun pihak yayasan kurang akomodatif terhadap aspirasi dan partisipasi sivitas akademika (diwakili senat)

## POLITIS VS PROFESIONAL

Pandangan yang berkembang di lingkungan akademisi mengenai jabatan rektor terpolarisasi menjadi dua. Kelompok pertama memandang jabatan rektor sebagai jabatan politis. Lainnya melihat jabatan rektor sebagai jabatan profesional. Sejauh ini yang paling menonjol, dilihatnya rektor sebagai jabatan politis.

Sebagai jabatan politis, tentu saja berkonsekuensi tak steril dari *vested interest*. Ragam kepentingan dengan segala cara berlomba menduduki, atau memasang orang-orang yang dianggap menguntungkan. Kondisi begitu merupakan awal dari maraknya konflik internal. Jabatan rektor lantas cenderung ditafsirkan sebagai kepanjangan tangan penguasa.

Keadaan akan berbeda jika rektor dipandang sebagai jabatan profesional. Jabatan profesional senantiasa disemangati oleh kepiawaian *leadership*, prestasi kerja, karier manajerial serta keunggulan akademik. Pandangan ini menggiring institusi ke arah manajemen terbuka. Sehingga prinsip kerja diletakkan di atas profesionalisme. Alhasil, penentuan kandidat rektor pun tidak akan mengalami rekayasa. Dan dengan sendirinya, setiap sivitas akademika dapat mengukur dirinya sendiri, sejauh mana ia mampu tampil memimpin perguruan tinggi.

## MEMPERBAIKI TEKNIS

*Back to mechanism* dalam pemilihan rektor tidak berarti steril dari kelemahan, lewat optimalisasi otonomi perguruan tinggi dan wewenang senat sekalipun. Interes pribadi, kelompok dan golongan jelas tetap ada. Faktanya, sejumlah PTN dari periode ke periode selalu dijabat oleh sarjana kedokteran. Sebab mayoritas anggota senat berkualifikasi sarjana kedokteran, bukan ekonomi, hukum, atau yang lain.

Padahal secara objektif kadar intelektual yang mengemuka dari PTN itu (dan tentu saja memiliki kapasitas kepemimpinan untuk sekadar jabatan rektor) justru dari disiplin ilmu lain, bukan dari kalangan sarjana kedokteran. Ini stigma paling elementer dari sistem pemilihan rektor oleh senat.

Cacat lain ialah cara voting dengan wewenang lebih besar pada Menteri. Dari sisi demokrasi, pilihan terbanyak untuk seorang calon rektor pastinya sudah cukup bagi Mendikbud untuk memberikan ketetapan. Faktanya tidak. Si Polan yang mengantongi 20 suara senat misalnya, belum tentu diusulkan untuk diangkat sekalipun calon lain mendapat suara lebih sedikit.

Akibatnya memang bisa parah, baik secara psikologis maupun secara organisatoris. Sekadar ilustrasi, bisa dibayangkan jika rektor Unpatti yang diangkat Mendikbud justru calon yang mengantongi dua suara sementara calon lain mendapat 13 suara.

Mengeliminasi unsur ketidakdemokratisan dalam penentuan rektor akibat adanya klik-klik yang main, tampaknya pemilihan kandidat rektor secara teknis perlu diperbaiki. Ada beberapa alternatif bisa dipertimbangkan.

*Pertama* dengan cara “urut kacang.” Strategi ini didasari asumsi, ketika seseorang mulai menduduki jabatan rektor, pada saat itu pula ia harus memulai mencari “jago” berupa bibit unggul. Menjelang turun dari jabatan rektor, penggantinya sudah siap meneruskan tugas itu.

*Kedua*, model “eksekutif.” Model ini mengasumsikan, jabatan rektor adalah tangga naik yang dapat dilihat objektif. Setiap sivitas akademika dapat mengetahui dengan persis dan jelas kapan bisa naik ke jabatan rektor serta bilamana saatnya. Ukuran untuk dapat menduduki jabatan rektor adalah prestasi karier dan prestasi akademik.

*Ketiga*, dengan sistem “*going public*.” Lowongan jabatan rektor diumumkan secara terbuka. Kriterianya pun ditentukan dengan jelas. Sistem ini, kecuali meredam ambisi orang per orang dan antarkelompok, sekaligus menguji tekad, keberanian dan komitmen kandidat rektor. Calon bisa didapat dari dalam perguruan tinggi, bisa pula dari luar perguruan tinggi atau dari kalangan profesional.

Harus diakui, ketiga teknis di muka mengandung plus minus yang tak mudah diatasi. Oleh karena itu, ada baiknya kita juga belajar dari negara lain. Di beberapa negara, begitu seorang rektor secara formal akan mundur atau berhenti, *Board of Trustees* (semacam Yayasan di PTS atau Dewan Penyantun/Kurator di PTN) menyebarluaskan edaran ke seluruh sivitas akademika. Termasuk kepada para alumninya di seluruh dunia. Edaran ini biasanya berisi desakan agar anggota ikut berperan aktif dalam menentukan figur rektor baru.

Bahkan, bilamana perlu dibentuk komite khusus yang merekomendasi penetapan rektor baru. Untuk kita, rekomendasi itu diberikan kepada anggota senat. Dengan cara begitu, pergantian rektor berjalan mulus tanpa perlu kemelut, gejolak, intrik-intrikan dan rekayasa yang justru merugikan perguruan tinggi. Lebih penting lagi, segala upaya membenahi unsur manajerial di tingkat institusi seharusnya dilandasi konsep-konsep kolegialisme, bukan disemangati konsep-konsep birokratisme.

Jakarta, HU *Kompas*, Selasa 29 Maret 1994



## MENJUNJUNG TINGGI ETIKA RISET



MENDENGAR kata riset, di benak kebanyakan orang pertama kali terbayang biasanya seperangkat alat, bahan kimia, ruangan laboratorium, daftar definisi, formula statistik plus manusia dengan kaca mata tebal. Padahal sering tidak kita sadari bahwa sosok riset telah mengembara ke berbagai kawasan. Dalam komunitas di mana kultur ilmiah telah berkembang sedemikian baik, riset mini yang tersistematika secara imajinatif biasanya menjadi alat pengambilan keputusan.

Tindakan seseorang di komunitas ini biasanya dilandasi riset mini imajinatif yang prosesnya begitu cepat. Berbeda dengan riset sungguhan pada umumnya, evidensinya demikian elastis. Tidak selalu fakta, bisa juga pengalaman pribadi orang perorang atau “buah bibir.” Itulah sebabnya mengapa dalam kultur masyarakat Jawa berkembang penolakan pada tradisi *waton sulaya* atau *waton njeplak* (asal bunyi).

Di kalangan akademisi, ilustrasi Borg dan Gall (1983) lebih mudah dipercaya. Riset itu seperti rimba belantara, penuh onak-duri yang melintang. Kelengahan sedikit saja mengarangungnya bisa fatal akibatnya. Dari kehati-hatian yang serius itulah kemudian lahir rambu-rambu untuk menetralisasi segala bentuk kekeliruan riset. Rambu-rambu itu berupa teori sampling, uji kesahihan, instrumentasi, dan ragam metode riset. Ini berlaku universal, baik untuk sains keras (ilmu-ilmu eksakta) maupun untuk sains lunak (ilmu-ilmu sosial-kebudayaan).

## ETIKA RISET

Dinamika pemikiran mengenai riset beserta alat-alat bantunya mempunyai efek positif. Antara lain akurasi riset pada titik tertentu bisa dioptimalkan. Keyakinan akan dekatnya kesimpulan riset dengan kebenaran itulah yang kemudian memunculkan etika riset. Suatu “lembaga ilmiah” yang memberi arah bagaimana sebaiknya dan untuk kepentingan apa riset dilakukan.

Melalui tangan-tangan piawai seperti Patton, Kerlinger, Babbie, Campbel, John W. Best dan sejumlah pakar-pakar lainnya, etika riset berkembang ke seluruh dunia serta diikuti tanpa respek apapun. Etika itu misalnya, menjamin kerahasiaan sumber data dan komitmen untuk menggunakan hasil riset demi kepentingan positif berupa kemaslahatan, perbaikan hidup dan kehidupan serta penghargaan yang tinggi pada harkat kemanusiaan. Mengingat efeknya yang vital, maka sekuritas periset dan perangkat infrastrukturnya selalu dijamin masing-masing negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, periset ahli mengakumulasi membentuk keorganisasian profesional untuk melancarkan gerak dan koordinasi. Berkiprah melakukan riset dan publikasi-publikasi ilmiah. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai pamor yang lumayan hebat dalam melayani kepentingan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan kebudayaan. Lembaga-lembaga riset seperti Gallup, AERA, APA di Amerika atau LIPI, LP3ES, CSIS di Indonesia pengaruhnya cukup besar dalam proses pengakjian strategi kebijakan. Proyek-proyek besar mereka tetap *concern* pada etika riset.

Kalaupun kemudian berkembang perdebatan di sekitar keabasaan metode baru seperti riset evaluasi dalam bentuk *need assesment*, diskrepansi dan studi fisibilitas misalnya, yang beraksi mengungkap “sisi gelap” suatu institusi, strategi kebijakan dan biografi perorangan; tujuan akhir lebih diarahkan untuk menemukan solusi konstruktif dan deskripsi mana yang laik publikasi dan mana yang tidak. Bukan pada terminasi dan penghinaan.

Karena itu kita sangat prihatin pada kecenderungan akhir-akhir ini di mana etika riset sudah cenderung ditinggalkan. Untuk menyebutnya sebagai contoh, tidak terkjaminya sumber data. Diungkapnya sekian persen pelajar SLTA di Jateng yang pernah *ngeseks* bebas, sekian dari sekian suami pernah berselingkuh, dan sekian persen warga Jakarta mengidap gejala sakit jiwa, jelas tidak menguntungkan warga di kedua lokasi riset tersebut.

Secara definitif sumber data memang dirahasiakan. Namun secara lokatif ternyata kerahasiaan itu tidak terjamin. Maka, ketika seseorang mengenalkan diri sebagai pelajar asal Jateng misalnya, sudah timbul dugaan jangan-jangan

yang bersangkutan termasuk dari sekian persen yang *ngeseks* bebas itu. Akibat publikasi riset yang merugikan karena mengabaikan etika riset, pergaulan mereka jadi terganggu. Pelanggaran etika riset yang paling banyak terjadi ialah duplikasi riset dan “menembak” riset orang lain. Orisinalitas dan kreativitas riset seolah-olah ditempatkan di bagian paling belakang dalam kinerja periset.

Kondisi diabaikannya etika riset itu mengingatkan kita pada saat kampanye menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ketika itu, Juli 1992 terbetik berita bahwa Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) menyewa *Denton & Samuel* – sebuah perusahaan ternama yang konon sangat profesional dalam masalah riset - dengan tujuan menggali “sisi gelap” presiden Bush agar bisa dijatuhkan. Kondisi demikian merupakan tantangan terbuka bagi periset sosial politik. Sikap tersebut sangat jelas menggambarkan antitesis terhadap etika riset yang selama ini dengan gigih disuarakan.

## **PERLU DIWASPADAI**

Kecenderungan baru publikasi riset yang mengabaikan etika riset tentu saja patut diwaspadai. Sebab selain akan mengurangi kredibilitas intelektual para periset, sekaligus tidak mendidik masyarakat untuk memahami dengan baik apa makna riset yang sebenarnya. Boleh saja kita berkilah bahwa hal itu hanya merupakan fenomena baru riset yang nonriset, melainkan lebih cenderung ke arah investigasi jurnalistik dengan aksentuasi pada pola kerja detektif.

Namun perlu ditingkatkan bahwa memperbaiki keadaan yang buruk jauh lebih sulit ketimbang membangun sesuatu yang baik. Jika benar demikian akan sia-sialah pendidikan riset, pancangkakan mata kuliah metodologi riset dan keharusan menyusun skripsi, tesis dan disertasi pada mahasiswa program sarjana jalur gelar yang dimaksudkan untuk mengembangkan latihan riset dan membentuk sikap akomodatif terhadap perkembangan riset.

Padahal, lebih tinggi lagi diharapkan agar para intelektual tersebut mempunyai instink riset yang andal. Orang bisa ala biasa, demikian adagium yang berkembang. Apa yang penulis katakan soal kewaspadaan sudah barang tentu cukup beralasan. Asumsinya sederhana saja, bahwa mayoritas intelektual Indonesia belajar dan menimba ilmu di Amerika.

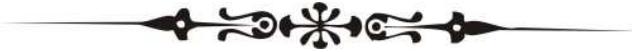
Barangkali, tema baru “riset oposisi” dengan mengabaikan etika riset bagi masyarakat Amerika yang mendewakan liberalisme dan berkultur ilmiah mapan, tak menjadi soal benar. Tetapi bagi kita di mana Pancasila melandasi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, jelas cara-cara seperti itu patut dikaji kembali.

Kebenaran dan kejujuran dalam menjunjung tinggi etika riset memang merupakan barang mahal. Anak kunci keberhasilan dalam mempertahankan kepribadian periset yang mengagumkan, barangkali terletak pada sejauh mana kita menaruh kewaspadaan. Namun, semuanya terserah kita. Bukankah ada penghargaan yang tinggi pada kemerdekaan berpikir? Di sini intuisi, intelegensia, apresiasi pada etika riset dan diri kemanusiaan kita diuji.

Jakarta, HU *Kompas*, 30 Agustus 1995



## **BAHASA RISET DAN PENERJEMAHAN**



SEORANG pemikir Italia, Antonio Gramsci mengatakan, bahasa itu pada dasarnya adalah sebuah fakta politik dan sekaligus instrumen politik. Bahasa merupakan ekspresi kepentingan-kepentingan konkret dari kelompok-kelompok sosial yang menghasilkan bahasa itu. Dengan sendirinya, kebenaran bahasa sangat bergantung pada praktis suatu kelompok yang dominan (Salamini, 1981).

Karenanya, terasa sia-sia jika kita mempertanyakan masalah perkembangan bahasa itu urusan siapa. Urusan para ahli bahasa, pemerintah, ataukah para pengguna bahasa. Sebab seperti dikatakan Habermas, bahasa itu pada dasarnya merupakan sarana dominasi dan kekuasaan sosial. Bahasa senantiasa berfungsi sebagai pelegitimasi antarhubungan berbagai kekuatan yang terorganisasi. Itu berarti, bahasa pada prinsipnya bersifat ideologis.

Kekuatan bahasa sebagai alat hegemoni untuk kepentingan komunikasi pembangunan juga terasa. Kemunculan semantisisda penggunaan bahasa bisa ditunjuk sebagai contohnya. Semantisisda dengan modus “pelesetan”, “penghalusan” dan “pengubahan makna kata” dimaksudkan untuk semakin memperkukuh dominasi elit politik atas kelompok lain yang berada pada jalur komunikasi politiknya.

Tidak terkecuali di dunia riset - bahasa riset, yakni bahasa ragam ilmu yang digunakan untuk penulisan ilmiah, laporan riset dan buku ajar – praktik penggunaan bahasa sebagai alat hegemoni juga menggejala. Bukti-bukti tentang itu cukup gamblang. Misalnya, kecenderungan periset untuk mengatur pemilihan kata agar kelihatan mempunyai kredibilitas ilmiah. Dalam hal ini, periset akan merasa bangga jika bahasa yang ditampilkan membuat pambacanya berkerut, bahkan tidak mengerti sama sekali.

Demikian pula soal penerjemahan. “Kekuasaan” penerjemah melalui bahasa amat kentara. Mereka tidak lagi memerlukan konteks komunikasi dalam penggunaan bahasa. Penerjemah cukup mengalih-bahasakan, perkara hasil terjemahannya bisa dimengerti, dipahami ataukah tidak, itu soal lain.

Terjadinya pola bahasa semacam itu tidak berdiri sendiri sebagai fenomena. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa riset misalnya, terbentur sejumlah dilema. Pengguna bahasa masih sering terjebak pada pro-kontra soal kejelasan dan kebakuan, kepraktisan dan penghematan kata dan sebagainya.

Selain itu, karena bahasa Indonesia ragam ilmu selalu menuntut ketaatazasan pada kaidah bahasa yang ada. Misalnya, keharusan penggunaan bahasa baku, pola dan sistematika ditentukan secara kaku. Ini menimbulkan situasi komunikasi yang dilematis. Kecuali akibatnya terkesan monoton, juga kurang bervariasi.

Pada satu sisi penulis dituntut menampilkan tulisan dengan sistematika jelas dan mencerminkan pola pikir ilmiah, pada lain sisi tetap diharapkan muncul keragaman dan kreativitas penulisan. Kecenderungannya; kelancaran dan derajat keterbacaan karya ilmiah dikorbankan untuk menimbulkan kesan keseriusan ilmiah. Inilah yang kemudian menimbulkan kesan betapa sulitnya memahami bahasa riset.

Memang masih perlu dipertanyakan, apakah hal itu sekadar kekaburan memahami bahasa, ataukah kelemahan penggunaa bahasa dalam memetakan konsep dan penstrukturan logikanya. Jadi bukan semata-mata permasalahan bahasa. Jika benar demikian, maka institusi yang berwenang dalam hal kebahasaan seyogyanya sigap menanggapi kecenderungan perkembangan dan menyajikan simpulan secepat mungkin pada masyarakat.

Terutama pada kalangan profesional yang banyak menggunakan bahasa sebagai sarannya. Sepeti guru, dosen, penulis buku ajar dan pengarang, wartawan, penyiar dan lain-lain. Soalnya, bagi mereka permasalahan bukan lagi kreativitas pemilihan kosakata, melainkan keterbatasan daya ingat dalam mengakumulasikan kosakata baru.

Tanpa cara demikian, maka periset, penulis karya ilmiah dan buku ajar akan tetap terjebak dalam upaya hegemoni melalui bahasa. Padahal dalam jangkauan yang lebih luas, isolasi dan eksklusivisme seperti itu justru akan menimbulkan apa yang oleh Nasbitt (1994) disebut sebagai tribalisme. Bukankah tribalisme atau sukuisme itu bisa dibangun oleh etnisitas, budaya, agama, profesi, bahkan bahasa?

Dalam hal penerjemahan karya-karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa asing sebagai bahasa sumber, dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran juga mengalami hal yang sama. Penerjemah sering mengabaikan

penguasaan teori-teori penerjemahan. Mereka lebih menekankan penggunaan *formal corespondence* yang menekankan pada bentuk pesan bahasa sumber daripada unsur makna pesannya. Penerjemah lebih suka mencari padanan suatu ujaran bahasa sumber dalam bahasa Indonesia yang sedapat mungkin sama bentuk, struktur, dan satuan-satuan gramatikalnya.

Ini jelas sebuah kekeliruan, atau memang kesengajaan. Sebab, terjemahan kata demi kata (*word-for-word translation*) menimbulkan kejanggalan. Sasarannya kurang mengena dan sering menimbulkan kesalahpahaman. Padahal, padanan bentuk padahal lebih cocok diterapkan pada bahasa-bahasa serumpun. Selain kemiripan kosakata dan tata bahasa, latar belakang budaya bangsa-bangsa yang berbahasa serumpun tak terpaut jauh. Untuk kasus ini orang akan lebih enak membaca naskah aslinya ketimbang naskah terjemahannya.

Seharusnya, penerjemah lebih menekankan pada ekivalensi dinamis, dan atau saduran. Terjemahan jenis ini jelas mengutamakan makna tanpa harus sepenuhnya mengorbankan bentuk. Padanan kata dan ekivalensi budaya yang paling dekat diampilkkan sehingga menghasilkan ungkapan yang wajar dalam bahasa Indonesia.

Penerjemah tidak perlu lagi merasa terikat pada gramatikal. Kalimat bahasa sumber dapat diterjemahkan menjadi frase dalam bahasa Indonesia, atau frase bahasa sumber menjadi kata bahasa Indonesia. Cara ini amat menguntungkan pembaca, karena keterbacaan dan makna pesan bahasa sumber mudah ditangkap.

Almarhum Soedjatmoko pernah menganjurkan, agar kita menjadi manusia kosmopolit dan berarti dalam pergaulan global, menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kalimat itu juga bermakna, selain menguasai bahasa asing sebagai alat komunikasi juga kalau perlu mendekati penutur aslinya.

Hal itu hanya bisa terjadi jika kita mengenal latar belakang kebudayaan masyarakat bahasa sumber. Jika hanya mengandalkan penguasaan bahasa yang baik terhadap bahasa Indonesia dan menuliskannya, maka penguasaan tidak akan tercapai. Sebab bagaimanapun masih terdapat masalah-masalah yang timbul akibat perbedaan-perbedaan dalam bentuk kedua bahasa. Baik yang bersifat sintaksis, semantik, ungkapan-ungkapan idiomatik, maupun yang menyangkut aspek sosiolinguistiknya.

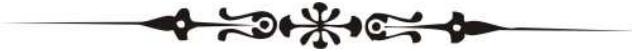
Di masa mendatang kita ingin lebih mampu menjadi penutur asli bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak melulu mengabdikan pada kepentingan ilmu dan komunikasi lisan, melainkan juga pada kenyamanan karya tulis yang enak dibaca dan gampang dimengerti. Sehingga, kesan bahwa bahasa riset untuk karya tulis ilmiah sangat membosankan, menjenuhkan, dan membuat kepala

menjadi pusing bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Demikian pula dalam hal karya-karya terjemahan. Bukankah bahasa Indonesia amat *compatible* terhadap bahasa asing? Dalam arti kosakata bahasa asing sangat “mudah” menjadi kosakata bahasa Indonesia?

Jakarta, HU *Kompas*, Senin, 31 Oktober 1994



## “NON-GRADING SYSTEM” DALAM PENDIDIKAN



DEWASA ini Indonesia menghadapi tiga problem berat di bidang pendidikan (persekolahan). *Pertama*, adanya inefisiensi internal yang berupa tingginya angka putus sekolah (*dropout*) dan angka mengulang (*repeaters*) pada kelas yang sama. *Kedua*, terjadinya inefisiensi eksternal berupa tidak dipakainya keluaran pendidikan pada pasar tenaga kerja. Kalaupun dipakai, pekerjaan itu berbeda dengan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah (*mismatch*). *Ketiga*, menyangkut ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.

Pencanangan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar (WBPD) 9 tahun merupakan langkah terapeutik guna mengatasi masalah ketiga. Sebab WBPD 9 tahun antara lain bertujuan makin menjamin terlaksananya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (*equality in educational opportunity*).

Munculnya masalah kedua, yakni adanya *mismatch* dan irrelevansi bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Karena partisipasi pendidikan jadi sasaran pokok WBPD 9 tahun, maka kegagalan mendongkrak angka partisipasi otomatis menjadi indikasi kegagalan WBPD 9 tahun.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah (Depdikbud) mencoba mendiseminasi *dual system* (sistem ganda) bagi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan penekanan pada program keterampilan (SLTP-K) sejak 18 Juli 1994, bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum 1994.

### **GAGAL STUDI**

Berbeda dengan dua masalah sebelumnya, soal DO (putus sekolah sebelum akhir masa studi); kegagalan studi (tak berhasil lulus program terminal

di kelas akhir), dan mengulang kelas nyaris tak mendapat perhatian. Ini terjadi karena masih ada anggapan, ibarat penyakit, ketiga hal itu baru dipandang sebagai panu dan jerawat. Tak seberat penyakit lain.

Padahal sekiranya WBPD 9 tahun diandaikan sebagai gadis cantik, maka panuan dan jerawat pasti mengurangi kecantikannya. Bahkan jika akut tentu memperburuk rupa. Suatu cacat program yang tak boleh dipandang sebelah mata.

Perhatian serius pada masalah DO, repeaters, dan gagal studi bukan tanpa alasan. Data Rangkuman Statistik Persekolahan 1990/1991 (Balitbangdikbud,1992) menunjukkan, rerata angka DO selama periode 1987-1991 untuk SD sebesar 4,5 persen. Untuk SLTP sebesar 7,17 persen.

Pengulang kelas di tingkat SD selama periode 1987-1991 rerata tiap tahunnya lebih dari 2,5 juta anak (9,7 persen). Hampir separuh dari lulusan SD yang tidak melanjutkan studi ke SLTP. Sedang untuk tingkat SLTP memang tak begitu besar. Rata-rata dalam periode yang sama, siswa yang gagal studi di satuan SLTP mencapai 6,99 persen setiap tahunnya.

Hubungan langsung data-data tersebut dengan sukses WBPD 9 tahun terlihat dari sejumlah riset. Indikasi nyata sukses itu ialah tuntasnya lulusan SD bersekolah di SLTP. Riset dimaksud tentu saja yang berhubungan dengan pertanyaan, mengapa banyak lulusan SD yang tidak melanjutkan studi ke SLTP?

Di sejumlah negara, hasil Meta Analisis lebih dari seribuan riset oleh Barry J Fraser dan kawan-kawan dalam *Syntheses of Educational Productivity Research* (1987) menunjukkan, disposisi belajar (mau melanjutkan studi ke sekolah lebih tinggi) dipengaruhi banyak hal. Antara lain faktor-faktor sosial, latar belakang kognitif, efektif, dan atribut-atribut fisik.

Riset-riset mutakhir membuktikan, disposisi belajar positif (tidak DO, tak gagal studi dan melanjutkan studi) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang meliputi keluarga (SES, struktur dan karakteristik psikologis), media massa dan peranan teman sebaya.

Sekadar gambaran, di Indonesia, hasil Susenas BPS 1989 menunjukkan, murid SD yang tak melanjutkan studi disebabkan alasan biaya (69,19 persen); menganggap pendidikannya cukup (11,18 persen), mencari pekerjaan (4,52 persen); tak ada sekolah/ sekolah terlalu jauh (4,4 persen), merasa pikirannya tidak mampu (2,42 persen) dan karena sebab-sebab lain (8,29 persen).

Sejauh ini kita sudah yakin, faktor utamanya adalah alasan biaya. Sehingga pemerintah memberi rangsangan dengan menghapuskan SPP SLTP. Ada pertanyaan mengusik, apakah setelah mereka dibiayai lantas mau sekolah dan tidak putus di tengah jalan? Ternyata tidak. Ada faktor lain yang justru selama

hampir setengah abad luput dari perhatian, yakni pengalaman pernah tak naik kelas atau mengulang.

Riset Prof Ida Bagus Alit Ana (1989), juga Mutrofin (1994) menunjukkan adanya kontribusi pengalaman pernah tidak naik kelas atau mengulang terhadap DO dan keengganan melanjutkan sekolah. Kelompok repeaters ini potensial tidak sekolah secara kontinyu. Maksudnya bersekolah sebatas yang dimau.

## MENGUBAH SISTEM

Mengulang kelas terjadi karena kita menerapkan *grading system*. Suatu praktik pendidikan sekolah di mana penempatan siswa dalam satu tingkatan sekolah (sekelas) didasarkan atas sukses tidaknya ia mengikuti tugas-tugas skolastik di tingkat atau kelas tersebut. Keadaan akan berbeda jika kita mengubah sistem menjadi *non-grading system*, yakni penempatan siswa bukan atas dasar pemenuhan tugas-tugas sekolah.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yakni tak ada tingkatan kelas (seperti *Dalton System* di Amerika Serikat) dan ada tingkatan kelas. Dasar penempatan siswa dalam tingkatan kelas bukan pemenuhan tugas sekolah. Melainkan praktik kenaikan kelas di mana semua siswa dinaikkan berdasar usia kronologis mereka atau berdasar *lichting* (angkatan).

*Non-grading system* ada baiknya digagas sebagai salah satu alternatif mengatasi DO setelah efektivitas pembelajaran dirasa kurang berhasil. Soalnya, anak-anak Indonesia memiliki pola distribusi kemampuan intelektual yang sama dengan anak-anak lain di dunia. Mengikuti pola kurve normal.

Jika simpangan baku sejauh 1,6 dianggap sebagai kemampuan intelektual normal, maka persentase anak-anak normal mencakup daerah lebih kurang 90 persen. Ilustrasinya, andaikata dalam satu kelas terdapat 40 orang siswa, mereka yang tergolong normal adalah 36 siswa. Dua tergolong terbelakang, dua sisanya berkecerdasan di atas rerata kawan-kawannya.

Dengan demikian tampak, jumlah siswa normal lebih besar ketimbang siswa abnormal. Itu berarti, secara ilmiah alternatif *non-grading system* bisa dipertanggungjawabkan. Bukankah untuk 10 persen siswa abnormal dan *gifted* sudah disiapkan sekolah-sekolah khusus? Sekolah Luar Biasa dan SMU Plus (sekolah unggulan) adalah jawaban untuk yang 10 persen itu.

Kecuali itu, *non-grading system* memberi kemungkinan lebih besar pada peserta didik berkembang wajar. Tanpa perlu ada tekanan psikologis berupa ketakutan tidak naik kelas, trauma pernah tidak naik kelas (seperti kasus di Semarang di mana orangtua menuntut sekolah ke PTUN), dan perbedaan umur

yang lebih besar. Apalagi pengalaman negara lain yang menerapkan ternyata menunjukkan dampak positif bagi pendidikan anak.

Khusus mengenai trauma pernah tidak naik kelas, banyak temuan menyebutkan, mereka yang DO, gagal studi di kelas akhir, dan/atau tidak melanjutkan studi, rata-rata pernah tidak naik kelas. Minimal sekali. Dengan *non-grading system*, jumlah itu bisa ditekan. Bahkan ditiadakan sama sekali. Dan secara kuantitas akan sangat berkontribusi kesuksesan kewajiban belajar.

Namun begitu tidak berarti kualitas pendidikan harus dikorbankan. Karenanya *non-grading system* tak perlu menyeluruh. Cukup di kelas-kelas rendah. Misalnya kelas I–V SD; dan kelas I–II SLTP. Sebab, di kelas-kelas tersebutlah pengalaman belajar dengan segala konsekuensi psikologisnya dibentuk, melekat, dikenang, dan menjadi dasar pertimbangan perlu tidaknya belajar lebih lanjut.

Jakarta, HU *Media Indonesia*, 6 Agustus 1994



## PEMBARUAN METODOLOGI PENDIDIKAN SEJARAH



ALKISAH, ada seorang guru dengan penuh semangat menceritakan betapa ganas sebuah peperangan. Tentu saja ada pesan edukatif yang hendak disampaikan kepada peserta didiknya, yakni agar mereka arif memahami fakta sejarah bahwa perang ternyata lebih banyak menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan penderitaan bagi manusia. Peserta didik diharapkan lebih mencintai perdamaian dalam menyelesaikan masalah melalui jalan lain seperti dialog, negosiasi, diplomasi, dan cara-cara damai lainnya. Dikisahnya berbagai jenis perang, mulai dari Perang Dunia I dan II, perang kemerdekaan, perang Malvinas, perang di Bosnia, hingga perang Teluk. Lengkap dengan tokoh-tokoh dan rincian tanggal dan tahunnya: khas pengajaran sejarah.

Pada akhir pelajaran sang guru bertanya, “Bagaimana pandangan kalian tentang peperangan?” Tidak lama kemudian seorang peserta didik mengacungkan telunjuk tanda siap menjawab. Tapi jawabannya sungguh di luar dugaan, sangat mengecewakan sang guru. Murid tersebut menjawab, “Menurut penulis, lebih baik manusia tidak melakukan perang, sebab jika terus-menerus ada perang berarti akan menambah materi pelajaran sejarah yang harus dihafal!”

Kisah tersebut kita kemukakan sebagai gambaran pengantar ke perbincangan tentang rencana Depdikbud untuk mengubah kurikulum pendidikan sejarah dan penulisan buku pelajaran sejarah. Kisah itu pula yang mengingatkan kita pada risalah tentang *the end of history*. Namun jangan keliru, *the end of history* yang dimaksud bukanlah karya spektakuler Francis Fukuyama berjudul *The End of History and The Last Man* (1992), yang memenangkan daftar *best seller* di AS, Jepang dan Perancis. Juga memenangkan *The Los Angeles Times*

*Book Critic Award*. Melainkan istilah tadi ialah yang diintroduksi dua sejarawan Robert Bain & Jeffrey Mirel (1982) dalam risalah berjudul *Re-Enacting The Past: Using Colling Wood at The Secondary Level* sebagaimana dimuat dalam *The History Teacher*.

Jika *the end of history* yang pertama menunjuk pada penegasan teoritis bahwa ambruknya imperium Soviet mendatangkan akhir bagi pencarian historis manusia atas bentuk pemerintahan universal maka *the end of history* kedua ini dipakai untuk menunjukkan betapa suram nasib mata ajar sejarah di sekolah. Suatu krisis sebagaimana pernah melanda Amerika Serikat pada tahun 1960-1970-an, atau semangat anti sejarah (*cliophobia*) sebagaimana pernah berjangkit dan berkembang di Eropa.

## PENYELEWENGAN DATA SEJARAH

Andaikata makna kedua diterapkan untuk mengandaikan kondisi di Indonesia, barangkali banyak orang akan menyangkalnya sebagai pandangan yang sangat berlebihan. Namun, manakala kita disodori fakta bahwa telah terjadi manipulasi dan penyelewengan data sejarah selama puluhan tahun dimana para sejarawan sendiri tak mampu berbuat banyak untuk meluruskannya, barulah banyak orang sadar bahwa fakta sejarah dapat mengubah jalan hidup manusia. Rencana pembaruan kurikulum dan penulisan kembali pelajaran sejarah adalah bukti tentang kesadaran itu.

Kendati demikian, banyakkah peserta didik yang mempedulikan bahwa konseptor Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, bukan Soeharto sebagaimana tertulis dalam buku sejarah dan didokumentasikan melalui film Janur Kuning? Seberapa banyak orang peduli bahwa baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru ternyata memerlukan legitimasi sejarah dengan cara memanipulasinya untuk kepentingan pengukuhan kekuasaan? Kita yakin tidak banyak. Bahwa kemudian muncul nama Wilardjito yang demikian populer terkait kebenaran kasus Supersemar, hal itu pastilah semata-mata *euphoria* belaka. Hangat-hangat tahi ayam. Maka sebenarnya *the end of history* telah terjadi.

Lagi-lagi *the end of history* menemukan relevansinya dalam tata hidup sehari-hari. Kini banyak orang tidak lagi percaya bahwa etos heroisme adalah kekayaan maha penting yang diwariskan para leluhur. Hal itu terjadi bukanlah tanpa sebab. Mondialisasi pergaulan yang makin intensif, universalisme yang terus-menerus berlangsung, kehadiran teknologi komunikasi dan luberan informasi di satu pihak, sementara kita gagal menciptakan ideologi tandingan untuk menyaringnya di pihak lain; merupakan faktor potensial yang mengikis keyakinan tersebut.

Makin jauhnya cita-cita kemerdekaan dari sasaran kemakmuran bersama (dengan indikasi kemakmuran individu dan segelintir orang yang makin menonjol), mesin materialisme dan gelombang konsumerisme yang melaju sangat kencang juga mempunyai kontribusi tinggi atas terkikisnya etos heroisme dalam berusaha. Prinsip ekonomi yang diterima tanpa *reserve* dimana dibutuhkan modal dan upaya sedikit namun diharapkan hasil sebesar-besarnya menjadi obsesi kebanyakan generasi dewasa ini. Itulah sebabnya mengapa jalur-jalur koruptif dan interrelasi yang nepotistik makin sulit dipotong, bahkan tumbuh subur merasuk ke segenap penjuru kehidupan.

## PEMBARUAN METODOLOGI

Sejarawan Sartono Kartodirdjo (1996) mengatakan, betapa penting sejarah nasional sebagai sumber inspirasi dan aspirasi generasi muda yang mencakup heroisme dengan muatan ceritera-ceritera kepahlawanan tanpa jatuh ke kultusnya. Dalam konteks pendidikan nasional, dibutuhkan kesadaran untuk membangkitkan jiwa kewarganegaraan yang penuh dedikasi. Untuk itu, agar mata ajar sejarah nasional berdampak afektif, maka bahan historis berupa biografi haruslah secara konkret menggambarkan *role* model semangat pengabdian selama hidup tanpa pamrih yang seringkali harus berakhir dengan pengorbanan jiwa.

Jadi, sebenarnya *the end of history* tidak dimaksudkan sebagai bagian dari perdebatan perlu tidaknya mata ajar sejarah diintensifkan dalam pendidikan sekolah atau soal keraguan terhadap nilai instrinsik edukatifnya. Melainkan bagaimana mengkaitkan substansi sejarah dalam proses pendidikan dan pembelajaran agar lebih aktual. Sebab sejauh ini, kata I Gede Widja (1996), penanaman nilai sejarah lebih menonjolkan pencapaian tujuan-tujuan edukatif yang bersifat ekstrinsik dan instrumental.

Padahal penonjolan yang bersifat ekstrinsik dan instrumental, selain akan mendorong pemahaman generasi pada pemujaan yang berlebihan terhadap masa lampau, juga memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini (*presentisme*). Pengaburan seperti itu, menurut Aswab Mahasin (1976) bisa mendorong generasi muda hanya terpesona dan mengagumi masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya.

Teori-teori belajar mutakhir mengemukakan, dalam setiap mata ajar apapun (termasuk penanaman nilai-nilai dalam mata ajar sejarah), nilai instrinsik jauh lebih utama ketimbang nilai ekstrinsik. Penguasaan konsep dengan titik tekan pada kemampuan berpikir strategis, reflektif dan inovatif jauh lebih lekat daripada sekadar kemampuan berpikir naratif, verbalistik, apalagi hafalan.

Maksudnya, penting ditanamkan kesadaran bahwa fakta-fakta masa lampau tidak akan mempunyai makna jika tidak dikaitkan dengan kondisi kekinian dan merefleksikannya ke masa depan.

Oleh karena itu, pembaruan kurikulum dan penulisan kembali pelajaran sejarah tidak akan pernah berarti tanpa disertai pembaruan metodologi pendidikannya. Pembaruan metodologi pendidikan sejarah tidak hanya mencakup konsep-konsep dasar tentang nilai atau proses dan cara pembelajaran sejarah. Lebih dari itu sudah saatnya dominasi fasilitator (guru) dikurangi untuk lebih memberi peran intensif kepada peserta didik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Tugas tersebut tentu saja sangat berat. Karenanya tidak melulu menjadi tanggung jawab para guru sejarah, para sejarawan pun mempunyai beban moral dan akademik untuk turut menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Jika tidak dan terlambat, maka selama-lamanya mata ajar sejarah hanya akan menjadi pelengkap penderita. Padahal menurut orang-orang bijak, hanya dengan mempelajari sejarah (yang benar tentunya) kita akan terhindar dari upaya yang sering disebut sebagai reduksi atas harkat dan martabat hidup manusia dan kemanusiaan.

Terbukti, selama lebih dari setengah abad, kita belum pernah tamat belajar demokrasi sehingga tidak pernah demokratis. Padahal, sejarah masa lampau telah mengajarkan betapa para tokoh pergerakan dalam berbagai sepak terjangnya telah memberi suritauladan bagaimana hidup dengan cara-cara menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Hal itu disebabkan karena selama ini peristiwa sejarah lebih dimaknai sebagai peristiwa seremonial ketimbang sebagai peristiwa kultural dan politis.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, 14 Oktober 1998



## ANDA KATA MATEMATIKA SEPERTI KOMIK



EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) Sekolah Menengah Umum (SMU) produk kurikulum 1994 meninggalkan “kesan” akademik menarik. Yakni di-Ebtanaskan mata ajar matematika untuk jurusan IPS dan Bahasa. Sementara diketahui, mata ajar tersebut tidak diberikan kepada mereka di kelas III. Sekalipun Dirjen Dikdasmen Depdikbud Zaenal Arifin Achmady jauh-jauh sudah mengingatkan, faktanya tidak banyak SMU berhasil mengantisipasinya.

Bagi SMU yang mapan, dalam arti mempunyai dana berlebih dan tersedia guru yang cukup, persiapan dilakukan matang. Sekurang-kurangnya seminggu sekali matematika diberikan sebagai mata ajar tambahan untuk jurusan itu. Sebab yang di-Ebtanaskan adalah matematika dasar, padahal yang didapat mereka adalah matematika terapan (matematika ekonomi). Sementara SMU yang hidupnya pas-pasan tak berkesempatan lagi membekali siswanya. Hasilnya bisa ditebak, rata-rata nilai Ebtanas murni untuk mata ajar itu *jeblok*, tergolong sangat buruk. Dan jangan lupa, mata ajar yang sama juga akan diujikan pada UMPTN 1997.

Mengapa kesan coba-coba dan asal-asalan dalam agenda Ebtanas itu bisa terjadi? Barangkali kita masih setengah-setengah menyikapi mata ajar tersebut. Jika di jenjang pendidikan dasar banyak siswa SD stres lantaran mata ajar yang mereka terima semakin menumpuk dan terlalu berat (*Bernas*, 22-3-97), maka di jenjang pendidikan menengah matematika telah menjadi momok paling menakutkan bagi para siswa (*Kompas*, 25-5-97). Akhirnya, matematika bak buah simalakama, dibuang sayang, tak dibuang malang.

## MITOS “PIPO-LONDO”

Mata ajar matematika mulai dirasakan sebagai “bencana” sejak tahun 1970-an, yakni manakala mata ajar berhitung mulai ditinggalkan dan diganti dengan *new mathematic*. *New math* sendiri pada prinsipnya kaya akan konsep fungsi, konsep hitungan, konsep logika, dan lain-lain. Melebihi konsep aritmatika (berhitung) yang dikembangkan terdahulu. Namun sayang, masuknya matematika dalam kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia, sebelumnya tidak disertai penyediaan sumberdaya manusia (guru) yang memadai.

Dari dasarnya saja, yakni di tingkat SD, mayoritas guru tidak menguasai banyak mata ajar. Bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan dengan baik sementara materi tidak di kuasainya?

Penulis sendiri, selaku lulusan SPG jurusan SD program studi matematika dan IPA merasakan, tak cukup bahan kurikulum SPG ketika itu untuk menguasai matematika, kalah jauh dengan para siswa SMA. Sementara di lapangan, penataran-penataran yang diberikan tidak banyak membantu. Selain metode yang digunakan tidak cocok dengan standar kemampuan para guru, seringkali penataran hanya jadi ajang rekreasi.

Tidak hanya itu, pertimbangan bahwa mayoritas orangtua tidak memahami matematika sama sekali diabaikan. Padahal, sekolah hanyalah persinggahan sementara bagi siswa untuk belajar dengan waktu yang sangat terbatas. Belajar selebihnya justru lebih banyak di rumah dimana orangtua wajib menjadi partner yang berfungsi memfasilitatori, sekaligus membimbing mereka. Padahal, kebanyakan orangtua hanya mengenal mitos *pipo-londo* (*ping, poro, lan, sudo*/perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan).

Penguasaan itu pun dengan metode yang amat sederhana, sehingga tidak mungkin lagi mampu membantu anak-anaknya untuk mempelajari matematika. Sehingga jangan heran jika setiap kali anak-anak belajar bersama tentang matematika, yang terjadi justru “perang mulut” berkepanjangan. Dan ketika anak-anak berada di sekolah, guru pun bersikap bak tukang sulap, menjelaskan secara *njlimet*, sulit dipahami.

## KEUNGGULAN MATEMATIKA

Berdasarkan keterangan Roger W Sperry, David H Hubel, dan rekannya Tosten N Weisel, peraih Nobel Kedokteran tahun 1981, konstruksi jaringan otak akan hidup bila diprogram melalui berbagai rangsangan. Tanpa rangsangan, kata mereka, otak manusia akan bodoh. Bagi akademisi yang awam soal hal itu, agak sulit mencernanya. Namun atas jasa Joseph E Le Doux (1994) yang berhasil memetakan otak manusia, sungguh tak sulit memahaminya. Dan

matematika merupakan salah satu cara untuk merangsang agar konstruksi jaringan otak seorang anak yang dalam taraf pertumbuhan menjadi optimal fungsinya.

Kemampuan *maths* berada di belahan otak sebelah kiri. Bersama-sama dengan kemampuan perhitungan (*computation*), logika, analisis dan bahasa. Namun, optimalisasi kemampuan itu harus ditopang oleh belahan otak sebelah kanan yang antara lain berisi kemampuan berpikir dengan gambar (*think of picture*), kreatif, non-verbal, angan-angan (*day dreaming*) dan imajinasi. Tanpa memahami hal ini, sangat sulit bagi seorang guru untuk secara metodis menyesuaikan cara mengajar matematika agar mudah dipahami.

Matematika pada prinsipnya hanya berisi dua hal, yakni materi dan pola berpikir. Agar keunggulan matematika bisa dicapai optimal, keduanya harus berjalan seiring. Hal itu hanya bisa terjadi jika matematika dikuasai secara benar dan wajar, dalam arti dihayati untuk apa bidang itu dipelajari. Penguasaan yang benar dan wajar akan menghasilkan optimalisasi fungsi otak sehingga seseorang bisa berpikir secara logis, runtut dan sistematis.

Kecuali itu, penguasaan matematika yang benar dan wajar akan menjadikan seseorang bisa berpikir skematis, strategis, analitis, dan kreatif. Karena itu bisa di pastikan, orang-orang kreatif yang penuh dengan ide-ide inovatif dan berkemampuan menganalisis secara jernih suatu masalah, tentu sangat pandai, paling sedikit telah menguasai matematika. Bahkan agak bombastis, Kapuslit UI Umar F Achmadi mengatakan, dunia penelitian kita akan tersesat di rimba belantara jika seseorang tidak menguasai matematika.

Tapi mengapa matematika justru menimbulkan “bencana” yang cukup meluas hingga sekarang? Sampai-sampai Prof Andi Hakim Nasoetion, pakar matematika dan statistika IPB, mengatakan sangat capek, sebab persoalannya setiap tahun sama saja dan akan terus begitu? Barangkali karena kita sudah terlanjur “benci” terhadap matematika, sebab guru-guru kita jarang memotivasi untuk menyukai mata ajar itu.

## MATERI DAN METODE

Riset Rahma Sugihartati dari Unair, Surabaya (1995) yang mengkaji kebiasaan anak membaca dan bacaan yang disukainya menghasilkan temuan, 64 persen anak-anak lebih suka membaca komik bergambar. Sementara buku-buku ilmu pengetahuan hanya disukai oleh 32 persen anak-anak, sama dengan cerita petualangan. Sekalipun riset itu belum tentu representatif mewakili keseluruhan anak-anak Indonesia, agaknya suatu kenyataan tak terbantahkan, yakni kesukaan anak-anak.

Lantas kita berpikir, andaikan matematika seperti komik, mungkin sangat disukai dan tak sulit memahaminya. Namun tentu saja tidak serta merta seperti itu sekalipun banyak pengarang komik anak-anak menyertakan mata ajar matematika di dalamnya. Sebut misalnya serial *Chinmi si Kungfu Boy* (Penerbit Elexmedia Komputindo) yang sangat laris dan pernah dimuat bersambung di Harian Umum *Bernas*, Yogyakarta, banyak kita jumpai muatan matematika seperti mengukur jarak pukulan, sudut tendangan hingga peluang (probabilitas) meraih kemenangan.

Agar matematika seperti komik, paling sedikit ada dua hal yang diperlukan. *Pertama*, perlu diupayakan supaya calon guru benar-benar menguasai matematika, khususnya matematika dasar. Secara institusional, lembaga pendidikan guru berkewajiban memikirkan hal itu. Baru kemudian mengupayakan keperluan *kedua*, yakni bagaimana mengajarkannya sesuai dengan kemampuan subjek didik.

Berkaitan dengan metode pengajaran matematika, kita harus terbuka terhadap perkembangan yang terjadi dan tidak kaku dalam mengikuti kurikulum pendidikan sekolah. Sebagai contoh, di berbagai kota besar telah ada kursus metode Kumon yang dipersiapkan untuk memahami matematika. Bahkan khusus aritmatika, telah dikembangkan metode yang sangat handal, yakni Mental Aritmatika Swipoa (MAS). Metode pengajaran berhitung dengan tumpuan pada penguasaan teknik dasar pengoperasian alat hitung Cina klasik bernama swipoa atau sempoa (abakus), semacam dekak-dekak.

Akses guru matematika untuk mengadopsi metode-metode itu harus terbuka lebar. Namun tanpa bantuan pemerintah, agaknya hal itu sulit terjadi mengingat kondisi finansial guru yang belum memadai. Orangtua pun mestinya juga tanggap akan perkembangan. Demi masa depan anak-anak, mereka tidak boleh berpangku tangan, sebab sekolah bukanlah satu-satunya tempat anak belajar.

Tapi lebih penting dari semua itu adalah pemahaman bahwa tidak mungkin kita memaksa anak untuk habis-habisan bernalar melalui bahasa matematika. Ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma, namun tidak semua orang ingin ke Roma.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 16 Juni 1997



Bab  
2



**PARTAI MENCERDASKAN BANGSA?**





## PARTAI MENCERDASKAN BANGSA?



KARAKTERISTIK menonjol organisasi sosial-kemasyarakatan pada masa zaman Orde Baru berkuasa yang tak berbeda dengan zaman Orde Lama ialah kebergantungannya (dependensi) kepada partai politik. Melalui tampilan wajah yang terkesan malu-malu kucing, dan demi seperiuk nasi yang dijamin lingkaran birokrasi, tak sedikit ormas yang berafiliasi dan menjadi *ouderbow* partai politik.

Berbeda dengan ormas, tidak semua organisasi profesi memosisikan diri sebagai penyambung lidah aspirasi anggotanya terhadap partai politik tertentu. Kendati masih sering dikooptasi, diintervensi dan menjadi subordinat kekuasaan, organisasi profesi semacam PWI, IDI, Ikadin, dan lain-lain, tetap menyatakan diri independen dan memberi keleluasaan kepada anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politik kepada parpol mana pun.

Bagaimana dengan PGRI yang pada 25 November 1998 genap berusia 53 tahun? Perkembangan menarik terjadi saat Kongres PGRI XVIII (25-28 November 1998) di Lembang, Jawa Barat, berakhir. Walau tidak mengejutkan, karena sudah diramal banyak pihak, hasil sidang Komisi D bidang organisasi menghasilkan keputusan “aneh” alias tidak lazim. Selain keputusan PGRI tidak lagi menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar (independen), beberapa tokoh PGRI juga mendeklarasikan partai baru bernama Partai Mencerdaskan Bangsa (PMB).

Kalau sekadar dimaksudkan sebagai obat manjur sakit kepala dan stres mendalam yang diderita guru. Mirip partai dagelan Parsendi. Inilah barangkali manifestasi optimal kejengkelan guru yang selama ini terkungkung kebebasan pedagogisnya, terbelenggu aspirasi politiknya, ditumpuli motivasi kreativitasnya, dan secara sengaja dijadikan tumbal serta mesin politik oleh penguasa. Sementara kesejahteraannya dikebiri dan diabaikan.

Tapi, jika embrio pembentukan PMB diarahkan untuk memperjuangkan nasib guru melalui jalur politik, tunggu dulu. Sebab, di tengah perdebatan seru soal posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilu mendatang yang belum rampung, sementara lebih 90 persen guru anggota PGRI adalah PNS: maka pembentukan PMB terasa sangat menggelikan. Euforia reformasi agaknya terlalu kuat menutup nurani dan “mencuci” rasional para guru yang diutus mengikuti kongres sehingga merasa perlu membentuk partai politik.

Jika serius, pembentukan PMB makin membuat rancu posisi guru PNS. Sebab tak lama berselang, induk organisasi PNS, yakni Korpri telah menyatakan diri independen dan tidak mendukung parpol mana pun. persoalannya, manakah yang lebih urgen dilakukan? Mensosialisasikan independensi sikap politik PGRI yang sudah direposisi kepada para anggotanya, ataukah *intensive marketing* PMB yang baru saja dideklarasikan meski belum jelas arahnya.

Ditilik dari posisi guru sebagai *public servant*, penegasan relevan segera diputuskan, mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni kepentingan pendidikan anak bangsa sebagai pilar masa depan negara.

## **SOAL HAK POLITIK**

Kontak profesi guru dengan dunia politik memiliki catatan menarik dan sejarah panjang. Episode perjuangan bangsa mencatat, profesi guru sangat disegani penguasa kolonial Hindia Belanda bersama dengan profesi dokter, jaksa, serta “pokrol bambu” alias pengacara. Itulah babak ketika profesi ini menjadi semacam pekerjaan yang menantang kaum muda di zamannya. Terutama mereka yang terpanggil untuk berbuat “sesuatu” bagi bangsanya.

Karenanya tak mengherankan jika kemudian lahir aktivis politik yang menentang penjajahan Belanda dan sebagian besar terdiri atas guru-guru muda. Sebut misalnya Bung Hatta. Pada masa revolusi, dari kalangan mereka sebagian tak lagi mengajar, melainkan bertempur seperti halnya Panglima Besar Soedirman dan AH Nasution.

Namun, tak ada guru yang begitu disegani seperti Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ia bukan saja seorang pendidik, tapi juga peletak dasar pergerakan nasional. Keturunan pangeran Sri Paku Alam III inilah yang bersama-sama dengan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Deker mendirikan partai politik pertama di tanah air pada tahun 1912 dengan nama *Indische Partij* sehingga mengakibatkan ketiganya dibui dan diasingkan ke negeri Belanda.

Guru inilah yang juga populer karena kontak intensifnya dengan dunia politik tercatat Ki Sarino, perumus konsep falsafah pendidikan Indonesia yang

pernah menjabat sebagai Wakil Residen Pati dan Menteri Pendidikan pada masa Bung Karno. Guru pertanian Ki Sarino yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IKIP Malang pada 1976, juga pernah menjabat sebagai rektor Sarjana Wiyata Tamansiswa.

Kentalnya kontak politik para guru yang menyejarah itu tentu saja kelak mewarnai organisasi mereka. Terbukti, PGRI yang kemudian dideklarasikan berdirinya di kota Surakarta menyebut dirinya sebagai organisasi perjuangan yang bersifat profesi (Bab I, Pasal 1 butir 1 AD PGRI). Sejak masa revolusi hingga kelahiran Orde Baru, kontak politik tersebut terus dipertahankan PGRI sehingga organisasi itu tidak mengalami dinamika berarti dalam profesionalismenya.

Dokumen terakhir menyebutkan, PGRI berada dalam jajaran Orde Baru. Karena pilar utama Orde Baru adalah Golkar, maka PGRI menempatkan diri secara institusional sebagai bagian dari Golkar. Kini zaman telah berubah. Konstelasi politik pun juga mengalami perubahan signifikan, dan PGRI telah menempuh jalan yang tepat, yakni menjaga independensi organisasi. Sebab jika tidak, lamban namun pasti, PGRI akan menjadi organisasi yang akan mengalami pembusukan didalam (*internal decay*).

Tapi mengapa para guru yang selama ini dikenal sebagai *Silent majority* tiba-tiba mendeklarasikan PMB? Kalau sekadar memenuhi hak politik, ini kekeliruan besar. Sebab hak politik para guru, utamanya guru PNS telah terpenuhi melalui penguasaan birokrasi dengan menjadi pegawai negara yang tidak bisa dinikmati oleh warga negara sipil lainnya. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan sebagai upaya pengelabuhan, menutupi ambivalensi - pada satu sisi menyatakan independen, namun pada sisi lain bergerilya mencari dukungan untuk kemudian dikoalisi dengan partai lain. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada partai Golkar.

Jika dugaan ini benar, sungguh patut disesalkan. Sebab selain dengan demikian PGRI dan PMB ikut berkontribusi kehidupan politik yang tidak sehat, sekaligus akan membahayakan posisi peserta didik dan orangtuanya. Bukan mustahil, di masa depan dunia pendidikan sebagai lahan profesi guru akan dijadikan alat *bargaining power* demi kepentingan politik mereka. Jika itu terjadi, Indonesia baru yang dicita-citakan akan “jauh panggang dari api.” Tatanan sosial budaya akan menjadi rusak dan berantakan karenanya.

## **AGENDA PENTING LAIN**

*Hidden* agenda seperti itu patut diwaspadai. Para guru mesti komitmen hanya pada profesinya, tak perlu ikut arus besar yang belum jelas ke mana

arahnya. Cobalah dicermati serius. Jumlah guru dewasa ini sekitar 2,5 juta orang; 1,7 juta di antaranya menjadi anggota PGRI. Jika digunakan taktik klasik sekasur (suami-istri) dalam penggalangan suara, maka diperoleh tak kurang dari 3,4 juta suara. Kalau kiat itu dikembangkan menjadi sedapur (dalam rumah tangga dengan rata-rata dua anak dan satu mertua), penggalangan suara menjadi berlipat sampai 13,6 juta suara.

Apalagi jika sudah melebar menjadi taktik sesumur (mengaet tetangga) dan selembur (mempengaruhi orangtua sekampung, termasuk orangtua peserta didik) perolehan suara menjadi berjuta-juta. Suatu jumlah yang menggiurkan hampir semua partai politik yang ada. Dan strategi seperti itulah yang selama ini dipakai Golkar dengan cara menyelewengkan monoloyalitas PNS terhadap pemerintahan yang sah untuk memenangkan pemilu, selain cara-cara curang lainnya.

Pepatah mengatakan, tak kan lari gunung dikejar, nasib orang siapa tahu. Guru selama ini sudah menempati posisi unik di hati masyarakat. Dunia politik niscaya akan menjauhkan guru dari masyarakat, sebab inti politik adalah konflik kepentingan. Kalau sebatas memperjuangkan nasib dan posisi profesi, tak perlu harus dengan partai politik. Menurut hemat penulis, ada agenda lain yang jauh lebih penting agar eksistensi profesi makin diakui dan profesionalisme guru mendapat penghargaan layak yang setimpal.

Agenda dimaksud adalah bagaimana mengeliminasi berbagai tantangan sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan spektrum profesionalisme bisa berkembang. Independensi merupakan pilihan paling tepat seraya mereaktualisasikan jati diri fungsional, daya kritis, kekuatan vital dan moral yang dimiliki guru menyongsong era pencerahan dan reformasi. Sementara secara institusional-organisatoris, PGRI tak boleh terpuruk menjadi sekadar *trade unionism*; melainkan sebagai ikatan profesi yang profesional.

Jika cara-cara damai dan beradab dalam bentuk gerakan moral untuk memperjuangkan nasib masih diabaikan penguasa, pilihan terakhir bisa dijatuhkan: demonstrasi besar dan mogok kerja secara nasional bisa digelar. Opsi terakhir ini jauh efektif ketimbang mengurus partai yang niscaya akan secara rutin mengganggu tugas pokoknya.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 8 Desember 1998



## 2

### **GURU SD, “SAPI PERAH” DAN KEPENTINGAN POLITIK**



BANYAK orang mengatakan, sekolah dasar (SD) itu ibarat sandal jepit. Sangat diperlukan, tetapi tetap terpuruk, kumuh, dan terseret-seret bergantung ke mana kaki melangkah. Secara fisik, cerita duka SD seolah-olah tidak menarik lagi untuk didengar. Bahkan secara fungsional pun rasanya kurang mengesankan untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut kepuasan kerja para praktisinya, yakni para guru SD.

Untung Indonesia bukan Mexico atau Kanada. Sehingga segala perlakuan minor terhadap mereka tidak perlu didemonstrasi secara massal di seluruh pelosok negeri. Hanya riak-riak kecil terjadi manakala ada harkat dan martabat yang tersinggung. Hal itu pun sporadis sifatnya. Kasus pemukulan seorang guru SDK di Kediri misalnya, sempat membuat berang dan mengundang protes keras para guru di sana.

Misal lain, perihal pemotongan gaji untuk Pemilu sebagaimana terjadi di berbagai daerah, para guru cuma bisa mengeluh dan mengadu. Termasuk kalau mereka di-PHK karena sesuatu dan lain hal. Daya tawar-menawar para guru SD yang tergolong *silent majority* itu sangat minimal. Sehingga seolah-olah sudah menjadi kodrat bahwa guru SD ibarat “sapi perah” yang harus siap diambil sari madunya, diperas manfaatnya, diperlukan tenaganya, tetapi tetap dibiarkan bergumul penderitaan. Untuk kepentingan politik sekalipun.

Masih soal guru SD, baru-baru ini terjadi peristiwa menarik, yakni dibatalkannya ujian PGSD (Pendidikan Guru SD) melalui UMPTN yang sedianya diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juni 1996. Alasannya karena sejumlah calon peserta sudah direkrut tanpa tes. Sementara sisanya khusus dialokasikan untuk guru honorer yang bertugas di daerah terpencil.

Sebenarnya guru SD itu lebih atau kurang? Motivasi apa di balik tarik ulur pengangkatan guru SD di banyak daerah? Sampai batas mana posisi mereka secara politis sehingga harus mengalah pada langgam kekuasaan?

## **DUALISME PENGELOLAAN**

Hingga saat ini, lulusan PGSD yang belum diangkat menjadi guru SD berjumlah sekitar 23 ribu orang. Tersebar diseluruh Indonesia. Tapi umumnya mengakumulasi tidak jauh dari lokasi PGSD berada. Agak aneh memang, sebab pembukaan program PGSD sudah melalui perencanaan matang. Didahului perhitungan mendalam soal kebutuhan guru, sigi data-data guru yang akan pensiun dan dikaitkan ketentuan bahwa guru SD harus setingkat dengan diploma dua (D2).

Sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran PGSD, soal seretnya pengangkatan itu sudah sempat diperbincangkan dengan Kepala Kantor Wilayah. Hasil audiensi mengindikasikan bahwa proses pengangkatan guru SD tidak sesederhana yang diduga banyak orang. Dualisme pengelolaan guru SD turut mempengaruhi melesetnya dasar-dasar perhitungan ilmiah tersebut.

Selama ini pembinaan profesionalisme guru SD memang berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Tetapi proses usulan pengangkatan, pembinaan jabatan dan pengelolaan karir berada dalam kewenangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Dikbud mempunyai andil sangat besar dalam menentukan nasib guru SD. Tarik ulur atas dualisme ini sudah lama diperdebatkan. Dengan alasan jumlah guru SD sangat banyak (mencapai 1,3 juta orang) Depdagri tetap mempertahankan mereka.

Kalau ditelusur lebih jauh, sebenarnya argumentasi Depdagri cukup beralasan. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik dimana guru SD adalah pilar strategis yang sangat menopang keberlangsungan pemerintahan yang sedang berjalan. Sebab lebih dari 95 persen guru SD menjadi anggota PGRI yang, semua orang tahu kemana afiliasi politiknya. Kondisi ini agak berbeda dengan “kakak-kakaknya” di tingkat pendidikan menengah dan tinggi yang lebih bebas menentukan sikap politik, karena kemandirian dan kelebihannya untuk tidak harus menjadi anggota PGRI.

Itulah sebabnya mengapa banyak daerah masih mengangkat guru SD lulusan SPG dan mengesampingkan lulusan PGSD. Politik “balas budi” agaknya diterapkan guna menjamin target kepentingan politik, terutama menjelang Pemilu. Karena itu lulusan SPG, guru SD honorer dan lulusan PGSD sebenarnya tidak ada alasan untuk resah. Sebab pada saatnya - tunggu saja tanggal mainnya - semua pasti diangkat sebagai guru.

Jika selama ini kita dihadapkan fakta banyak daerah berteriak-teriak merasa kekurangan guru SD, sementara disisi lain banyak lulusan PGSD yang menganggur, hal itu disebabkan banyak guru SD fiktif yang hanya menerima gaji tetapi tidak mengajar. Mereka umumnya menjadi kepala desa atau bertugas di Dinas Dikbud atau menjadi anggota DPRD.

Dari segi administrasi negara, sebenarnya dualisme pengelolaan guru SD sangat tidak menguntungkan. Kalau koherensi kepentingan dua pihak bisa tercapai, barangkali tidak menjadi soal. Namun seringkali terjadi kebijakan khusus yang dikeluarkan dua departemen tersebut (Depdagri dan Depdikbud) justru makin memperburuk kondisi keprofesian.

Belum lagi keterlibatan organisasi-organisasi lain di luar profesi guru yang seringkali meminjam tangan untuk menggolkan kepentingan masing-masing. Hal-hal seperti itu punya kontribusi nyata terhadap kemerosotan kinerja guru SD yang secara otomatis mempengaruhi kinerja pendidikan nasional.

## **PERLU KEMERDEKAAN**

Pada saat kepentingan politik begitu kental membayangi profesi guru, selama itu pula potensi kreatif dan jiwa-jiwa inovatif mengalami pemasangan. Para pelaku profesi senantiasa berada dalam situasi serba ragu. Keberanian untuk menampilkan kinerja optimal sesuai potensi kreatifnya menjadi surut. Sebab tidak ada jaminan kepastian bahwa langkah inovatif yang diprakarsai mendapat empati dan penghargaan proporsional. Bahkan bisa jadi diputarbalikkan sebagai bentuk-bentuk penentangan yang tidak layak mendapat tempat.

Dalam kaitan itu, menarik diperhatikan pandangan Sheldon Shaeffer - pakar pendidikan dari Unicef (1995) - yang menyatakan, karena guru ibarat bukan keranjang yang diisi penuh lalu dikeluarkan lagi untuk murid-muridnya, maka guru harus diberi kemerdekaan mengajar dalam kelas, dibebaskan dari aturan-aturan ketat dari atas dan diberi kebebasan dalam berinovasi.

Kita setuju bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah dua istilah yang bersifat tentatif dan mempunyai derajat ketergantungan tinggi pada posisi fungsional seseorang. Tetapi tanpa kemerdekaan dan kebebasan, tak ada jaminan bagi siapa pun untuk memiliki tanggung jawab besar sebagai aktor dan pelaku keprofesian. Sebab di balik kemerdekaan dan kebebasan, sudah menunggu belunggu pengikat dan sanksi. Di negara yang tergolong predator - meminjam istilah Christianto Wibisono - dua senjata itu siap menghunjam siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Dalam hal menjadi guru SD, kemerdekaan dan kebebasan merupakan barang mahal yang sulit didapat. Sejak dari berpakaian saja sudah diatur dan ditentukan demikian ketat, mulai dari jenis bahan, warna, hingga modelnya. Apalagi yang menyangkut upaya pengembangan diri melalui organisasi keprofesian.

Tidak ada peluang bagi guru SD untuk secara mandiri maupun bersama-sama membentuk organisasi keprofesian yang independen dan sama sekali bebas dari kepentingan politik.

Jangankan membentuk organisasi profesi “tandingan”, berani menolak menjadi anggota PGRI, berani menolak (dalam arti menyoal) ragam iuran yang seringkali tidak masuk akal itu, dan berani tidak memiliki NPAG saja sudah tergolong ampuh. Sebab dengan demikian ia benar-benar menjadi manusia sejati yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan. Sementara untuk menjadi guru sejati, tentu saja harus diikuti kinerja profesional, disiplin dan tanggung jawab yang besar.

Memang benar, dengan kemerdekaan dan kebebasan sekali pun, guru SD tidak serta merta akan menjadi lebih profesional, hidup makmur dan sentosa. Namun dengan kemerdekaan dan kebebasan, sekurang-kurangnya daya cipta, rasa dan karsanya akan menjadi lebih tajam karena dimanajementi sendiri.

Itulah awal dari penggalian potensi kreatif dan jiwa-jiwa inovatif yang menjadi pilar kinerja profesional tanpa harus begitu kental dipengaruhi oleh determinan eksternal yang sering kali menjadi pembunuh paling potensial potensi tersebut.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 15 JULI 1996



## **MEMPERCAKAPKAN BAKU MUTU PROFESIONALISME GURU DI SEKOLAH**



KETIKA membuka kongres VII Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) dan Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1997 di Medan, Presiden Soeharto mengharapkan agar para ilmuwan sosial dapat ikut mempersiapkan profesionalisme di seluruh bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (*KR*, 19/3/97). Harapan tersebut tentu saja tidak hanya berlaku untuk mereka yang menekuni ilmu-ilmu sosial semata-mata. Lebih dari itu juga diharapkan diantisipasi oleh bidang-bidang lain, keguruan misalnya.

Dalam hal profesionalisme keguruan, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Depdikbud menyetujui gagasan dikembangkannya bentuk standar profesi guru untuk meningkatkan mutu kinerja dan kemampuan profesional mereka. Gagasan pengembangan bentuk standar profesional guru ini bertolak dari kenyataan bahwa model-model peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru yang dilakukan selama ini, baik melalui seminar maupun penataran, dianggap kurang efektif.

Sebenarnya bukan hanya kali itu profesionalisme guru dipermasalahkan. Selama lebih dari empat dasa warsa orang memperdebatkan idealisasi tenaga pengajar dan berupaya mengkriskalkannya sebagai profesi profesional. Menurut istilah Brian Rowan sebagaimana ditulis dalam *Comparing Teachers' Work With Work in Other Occupations: Notes on the Professional Status of Teaching* (1994), hal itu disebut profesiisme. Suatu upaya untuk menerapkan faham profesi terhadap jabatan tenaga pengajar (guru) dan membandingkannya dengan jabatan lain

sehingga menjadikan profesi guru sebagai jabatan profesional yang bisa dibandingkan karakteristiknya dengan profesi lain.

Di tingkat wacana, upaya itu telah cukup menunjukkan hasil. Di Amerika Serikat misalnya, menurut *The Dictionary of Occupational Titles* (1991) diterbitkan Departemen Tenaga Kerja AS, jabatan tenaga pengajar tercantum sebagai profesi dalam kelompok jabatan kependidikan dengan kode K-12 (*Education Occupations*). Termasuk dalam kelompok ini antara lain guru pendidikan dasar dan menengah, asisten guru, kepala sekolah dan guru pembimbing.

## **TEORI VS PRAKTIK**

Maksud profesiisme adalah untuk menunjukkan betapa kompleks pekerjaan guru berkaitan dengan manusia dan alat-alat. Kira-kira sama kompleks dengan pekerjaan seorang dokter. Tujuan akhir dari pembuktian itu ialah memperbaiki kedudukan status sosial guru yang berimplikasi pada tingginya imbal jasa profesional. Namun agaknya upaya itu belum sepenuhnya berhasil. Terbukti, Amerika Serikat memberi imbal jasa terhadap guru rata-rata hanya 1,7 pendapatan per kapita negara itu tiap bulannya. Bandingkan dengan Jepang yang memberi imbal jasa rata-rata 2,4 kali pandapatan per kapitanya. Di Indonesia, upaya-upaya seperti itu teoritis mestinya sudah selesai dengan pemberlakuan Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan. Tapi, di tingkat praksis pendidikan hal itu belum cukup menjamin tumbuh kembangnya profesi tenaga kependidikan yang benar-benar terlindungi secara hukum dari tangan-tangan yang tak bertanggungjawab yang tergolong ilegal.

Akibatnya terjadi apa yang sering disebut sebagai tindakan *deskilled of teachers'work*, yakni pemerosotan kinerja profesional dan keterampilan profesi guru yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebut misalnya, teoritis antara guru dan dosen diberi tugas dan fungsi yang sama sebagai tenaga pengajar, namun kenyataannya penghargaan material (imbal jasa) yang diberikan kepada mereka berbeda.

Masalah pemerosotan kinerja guru di sekolah sangat berlarut-larut. Mengingat urgensi dan kontribusinya yang begitu besar terhadap kemerosotan mutu pendidikan, maka seharusnya masalah ini menjadi perhatian serius untuk dipecahkan. Guru dalam pengertian ini mencakup tenaga pendidik sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum PP No 38/1992, Pasal 1 butir 2, yakni yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik.

Fenomena lain pemerossotan kinerja itu tercermin dari makin banyak guru yang tidak memiliki kewenangan membimbing, melatih dan mengajar. Seorang pakar pernah menyebut lebih dari separuh guru di jenjang pendidikan dasar tidak berkewenangan, dan lebih dari sepertiga guru di jenjang pendidikan menengah juga demikian.

Padahal, pasal 28 ayat (1) UUSPN menyebutkan, penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar. Khusus untuk tenaga pengajar (guru), dalam ayat (2) dikatakan, untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai pengajar.

Kewenangan itu ditegaskan kembali dalam pasal 5 ayat (1) PP 38/1992, yakni, tenaga pendidik pada pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memiliki kemampuan mengajar yang dinyatakan dengan ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga keguruan.

Sementara dalam ayat (4) dikatakan, tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu di jalur pendidikan sekolah wajib memiliki wewenang mengajar di satuan pendidikan yang bersangkutan yang diperoleh dari penyelenggara satuan pendidikan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, untuk bisa menjadi guru pada prinsipnya harus memenuhi tiga syarat utama, yakni: kemampuan mengajar (ijazah), wewenang mengajar (akta mengajar untuk satuan pendidikan tertentu), dan kualifikasi tenaga pengajar (jenis mata ajar yang dikuasai). Satu saja dari ketiga syarat ini tidak dipenuhi oleh seseorang (sarjana sekali pun), seharusnya tidak bekerja dan/atau mengabdikan diri sebagai guru.

Sebab, keterpaksaan untuk menjadi guru dengan alasan kekurangan inilah yang secara langsung maupun tak langsung mengakibatkan mutu pendidikan hanya berjalan di tempat, bahkan cenderung mengalami kemerosotan. Profesiisme mengandaikan upaya penertiban guru di sekolah jika diinginkan peningkatan mutu pendidikan yang memadai di semua jenis dan jenjang, baik di sekolah-sekolah negeri, maupun di sekolah-sekolah swasta.

## **INKONSISTENSI DAN BAKU MUTU**

Profesionalisasi guru di sekolah jelas bukan persoalan mudah. Kendala cukup berarti justru datang dari inkonsistensi pasal-pasal (klausul) mengenai ketentuan dan persyaratan sebagai tenaga pengajar di samping bersumber dari

sikap masa bodoh aparat birokrasi pendidikan. Sebut misalnya adanya ketentuan mengenai wajib kerja tenaga pendidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 PP No 38/1992. Menurut ayat (1) pasal ini dikatakan, “Untuk kepentingan pembangunan nasional, pemerintah dapat mewajibkan warga negara RI yang memiliki kemampuan profesional dalam cabang ilmu pengetahuan tertentu bekerja sebagai tenaga pendidik untuk jangka waktu tertentu.

Pasal itu ada karena dalam UUSPN No 2/1989 ketentuan yang mendasarinya ada, yakni pasal 29 ayat (1) UUSPN yang mengatakan, “Untuk kepentingan pembangunan nasional, pemerintah dapat mewajibkan warga negara RI atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.”

Posisi pasal mengenai wajib kerja itu tentu saja jauh lebih kuat ketimbang pasal-pasal ketentuan yang mengatur persyaratan tenaga pendidik. Sebab pelanggaran terhadap ketentuan wajib kerja tenaga pendidik dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima juta rupiah (Pasal 56 UUSPN). Tindak pidana dimaksud dalam pasal tersebut dikategorikan pelanggaran. Sementara pelanggaran terhadap pasal ketentuan yang mengatur persyaratan tenaga pengajar tidak diancam sanksi apapun.

Oleh karena itu, demi mutu pendidikan yang merata, pemerintah sudah seharusnya segera mengatur ketentuan wajib kerja tersebut secara tersendiri. Ketentuan itu tentu saja bukan untuk melegitimasi guru yang tidak memenuhi kualifikasi namun terlanjur mengajar. Melainkan justru sebaliknya, melindungi profesi guru agar tidak dikotori tangan-tangan tak profesional yang bekerja atas nama daripada menganggur. Kecuali itu, agar evaluasi terhadap pekerjaan guru bisa dilakukan secara transparan dan tidak semua orang bisa seenaknya sendiri memvonis pekerjaan guru tidak bermutu, diperlukan kriteria mengenai baku mutu profesionalisme.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, 24 Maret 1997



## UKURAN PROFESIONALISME GURU



SETELAH bekerja keras selama empat tahun sejak 1975, Konsorsium Ilmu Pendidikan berhasil menelurkan Pedoman Pola Pembaruan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (PP-SPTK) pada 1979. PP-SPTK yang terdiri atas lima buku pedoman itu, dianggap banyak kalangan sebagai langkah mendasar dalam memperbaiki profesionalisme guru dari sisi institusi.

Banyak orang menyangka akan terjadi “revolusi” dalam hal mutu pendidikan sebagai imbasnya. Faktanya, justeru banyak yang malah kecewa. Sepanjang waktu empat belas tahun sejak lahirnya pembaruan itu, tak henti-hentinya orang mempersoalkan betapa profesionalisme para guru melorot terus. Meskipun upaya tambal-sulam lain juga dilakukan.

Mengapa profesionalisme guru selalu digugat? Apakah karena tak ada ukuran yang sama tentang bilamana seorang guru dianggap profesional?

### PERLU KESERAGAMAN

Empatbelas tahun silam, kita “menjiplak” begitu saja sistem pendidikan guru sebagaimana berlaku di Amerika. Konsep *Competence-Based Teacher Education* (Pendidikan Guru Berbasis Kompetensi) diterapkan tanpa respek apa pun. Maksudnya, tidak memperhitungkan kesiapan lembaga pendidikan guru, baik ditinjau dari segi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, perpustakaan pendukung, serta budaya belajar. Padahal CBTE itu bertujuan agar para calon guru kelak dapat menjadi guru profesional, memiliki profil kompetensi seperti diharapkan.

Dari berbagai diskusi mengenai CBTE, lahirlah sepuluh profil kemampuan dasar (kompetensi) guru. Kesepuluh profil kompetensi itu lantas menjadi ukuran profesionalisme guru, ukuran guru ideal. Secara teoritis, kesepuluh profil kompetensi memang bagus. Tetapi, dalam pelaksanaannya

tidak *measurable* (sukar diukur). Instrumen pengukurannya sampai saat ini belum dapat diciptakan.

Alhasil, jadilah sepuluh profil kompetensi hanya sebatas wacana. Bahan kajian yang dari waktu ke waktu dijejalkan kepada para calon guru. Dalam kaitan ini kita percaya, ukuran memang bisa beragam, bergantung kepada siapa yang mengukur. Keberagaman itu berimplikasi pada pembinaan yang berbeda-beda pula. Tetapi, banyak yang meyakini, di antara keberagaman tentu ada kesamaan. Sekurang-kurangnya, seseorang dianggap profesional bila memiliki keahlian, komitmen, dan *skill* relevan.

Berdasarkan argumentasi demikian, tentu saja ukuran profesionalisme guru bisa disederhanakan. Dalam arti, bukan sekadar rumusan redaksinya diperjelas atau dikurangi. Lebih dari itu adalah, sejauh mana ukuran itu bisa disepakati, dimengerti, dan tampak jelas indikatornya. Baik di mata lembaga penyedia tenaga guru, pemerintah dan swasta yang mengkonsumsi tenaga guru, maupun di mata masyarakat yang terlibat secara transaksional dalam proses pendidikan.

Kesadaran akan seragamnya cara pandang profesionalisme guru sangat penting. Bukan karena mengandung muatan apologetik keprofesian, melainkan agar hak, kewajiban dan tanggung jawab para guru dilihat secara proporsional. Sehingga, orang tidak serta merta melakukan penilaian berdasarkan visinya sendiri, yang cenderung menempatkan guru pada posisi terpojok tanpa melibatkan guru sebagai pelaku utamanya.

Mengapa ukuran seragam diperlukan? Sebab, segala perbantahan mengenai mutu pendidikan, keterkaitan (*link*) dan keterpadanan (*match*) antara keluaran pendidikan dengan kepentingan publik dan dunia kerja, selalu berporos pada pembicaraan mengenai profesionalisme guru.

Hal ini dapat dimengerti, karena seperti dikatakan Brant (1993), hampir seluruh upaya reformasi pendidikan seperti pembaruan kurikulum, pelaksanaan metode mengajar baru pada akhirnya bergantung pada guru. Tanpa guru menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa guru dapat mendorong siswa dapat mencapai prestasi tinggi, segala upaya meningkatkan mutu pendidikan tak akan berhasil optimal.

Dengan kalimat lain, mutu pendidikan akan terjamin jika didukung oleh guru-guru yang profesional. Persoalannya adalah, guru bagaimanakah yang dapat dikatakan profesional?

## UKURAN PROFESIONALISME

Pekerjaan profesional – tak terkecuali guru – biasanya lahir dari semangat profesionalisme. Dalam pengertian kontekstual, makna profesional haruslah dibedakan dari pengertian kebanyakan. Seperti penjajah profesional, petinju profesional, dan semacamnya, yang biasa dilawankan amatiran. Sebab, pekerjaan guru bukanlah pekerjaan tukang, melainkan mempersyaratkan sistem pendidikan berangkai, seperti dokter, pengacara, dan profesi lain.

Dalam menentukan profesionalisme seorang guru, banyak wacana bisa digelar. Laporan utama jurnal *Educational Leadership* edisi Maret 1993, mengetengahkan lima ukuran seorang guru dikatakan profesional, yakni: (1) memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya; (2) menguasai secara mendalam bahan ajar dan cara mengajarkannya; (3) bertanggungjawab memantau kemajuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi; (4) mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugasnya; dan (5) seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Ukuran ini jauh lebih sederhana ketimbang sepuluh kompetensi sebagaimana tercantum dalam PP-SPTK. Kesederhanaan itu mempunyai nilai lebih, antara lain lebih pragmatis, tak cenderung ideal dalam menetapkan kriteria.

Sudah tentu, ukuran itu harus didukung sistem supervisi yang memadai. Akan lebih klop lagi jika digabung dengan pandangan umum yang selama ini berkembang, yakni, bahwa profesi yang profesional biasanya melewati titian *well educated, well trained, well paid*. Berpendidikan baik saja tak cukup menjamin calon guru menjadi guru profesional. Terlatih dengan baik pun belum sepenuhnya mendukung calon guru menjadi guru profesional. Dibayar mahal juga belum berarti para guru akan profesional.

Singkatnya, ketiga titian itu haruslah dilalui secara seimbang. Salah satu unsur saja diabaikan, jangan berharap terlalu banyak pada profesionalisme guru. Dengan sendirinya juga jangan berharap banyak dalam hal mutu pendidikan. Walaupun demikian, perlu ditekankan di sini, bahwa penampilan karakteristik seorang guru secara lahiriah tidaklah sama bagi setiap orang. Ciri khas yang mendasari profesionalismenya biasanya hanya berlaku secara transaksional di lapangan. Maksudnya, amat tergantung dari pihak-pihak dan kondisi-kondisi yang terlibat secara aktual dalam proses pendidikan.

Jakarta, HU *Kompas*, Kamis, 25 November 1993



## KONSEKUENSI LPTK TANPA IKIP



LEMBAGA Pendidikan Tenaga Kependidikan (keguruan dan ilmu pendidikan) atau LPTK, menurut PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan, ditunjuk khusus untuk menghasilkan tenaga kependidikan (tenaga pendidik dan bukan tenaga pendidik). Termasuk dalam kategori tenaga pendidik ialah pengajar (guru dan dosen), pembimbing, dan pelatih. Sementara pengelola satuan pendidikan dan pimpinan PLS, laboran, teknisi perpustakaan, dan sebagainya dikategorikan sebagai bukan tenaga pendidik.

Ada tiga institusi pendidikan tinggi yaitu IKIP, FKIP di Universitas dan STKIP negeri dan swasta yang tergabung dalam LPTK, yang di dalamnya sudah termasuk PGSD sebagai lembaga pengganti SPG. Di jajaran PTN ada 10 IKIP dan sekitar 19 FKIP. Di jajaran PTS jumlahnya lebih banyak.

### **PERSOALAN DAN PEMEKARAN**

Terkait lulusan LPTK, persoalan elementer yang dihadapi jenjang pendidikan dasar ialah terjadinya disparitas (ketimpangan), baik mutu maupun jumlah. Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terjadi kekurangsesuaian (*mismatch*) dan irrelevansi. Sementara itu secara makro ditengarai terjadi dua fenomena, yakni persediaan tenaga kependidikan berlebih (*over supply*) dan rendahnya mutu calon mahasiswa LPTK.

Menghadapi berbagai persoalan mendasar itu, dalam tujuh tahun terakhir dilakukan langkah-langkah antara lain: 1) sejumlah program studi dicitak, digabung dan ditutup; 2) sejak 1992 diberlakukan kurikulum fleksibel dengan memberikan kewenangan yang lebih luwes kepada lulusan LPTK; 3) sejumlah IKIP swasta beralih fungsi menjadi universitas; dan 4) menyalurkan lulusan LPTK ke instansi pemerintah nonpendidikan berdasarkan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara jumlah lulusan LPTK dengan kebutuhan nyata tenaga kependidikan di lapangan.

Langkah pertama berjalan mulus, kendati di beberapa LPTK sempat terjadi demonstrasi menentangnya. Langkah kedua yang dipelopori 10 IKIP dan dua FKIP di universitas sudah tidak jelas rimbanya. Selain karena kekurangsiapan institusional dan kooptasi berlakunya kurikulum nasional, juga terimbas pada psikososial pengalihfungsian IKIP swasta menjadi universitas.

Dimulai dari IKIP Malang dan IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Padang serta, IKIP Semarang, kelima IKIP Negeri lainnya berbondong-bondong mengajukan rencana pengalihfungsian atau pemekaran menjadi universitas ke Depdikbud sesuai saran Mendikbud Wardiman Djojonegoro dalam berbagai kesempatan.

Sementara langkah keempat tak jelas petunjuk pelaksanaannya di seluruh jajaran Departemen, maka di berbagai daerah jumlah lulusan LPTK menumpuk, menganggur, dan tentu saja jadi beban masyarakat. Akibatnya, persoalan tenaga kependidikan menjadi bertambah. Selain dirundung problem kualitas yang tak kunjung terselesaikan, masih harus disusul masalah pemerataan yang makin tidak menentu.

Dari wacana seputar pengalihfungsian dan pemekaran IKIP menjadi universitas, yang diturunkan sejumlah pakar dan pengamat pendidikan, dapat kita tangkap adanya pro-kontra serta usulan-usulan. Sekaligus makin jelas bahwa persoalan LPTK sebenarnya bukan semata-mata kelembagaan, melainkan menyangkut sikap, penghargaan terhadap bidang kependidikan dan profesi guru, serta minat masyarakat terhadapnya. Struktur kelembagaan IKIP dapat saja diubah dan direkayasa sesuai selera dan keinginan. Tapi, tanpa usaha memahami dan menyentuh masalah paling elementer, usaha itu tidak akan banyak manfaatnya.

Karenanya, terasa klise jika kita kembali mempersoalkan plus minus pengalihfungsian dan pemekaran IKIP menjadi universitas. Sebab, andaikata Mendikbud Wardiman menyetujui (dan agaknya memang begitu), barangkali pada tahun akademik 1996-1997 mendatang beberapa IKIP Negeri (dan mungkin seluruh IKIP Negeri) berubah menjadi universitas dengan tetap mempertahankan fungsi sebagai penyedia tenaga kependidikan. Dengan demikian, yang tersisa adalah FKIP (yang barangkali akan dipecah menjadi Fkg/PGSD-TK serta FIP seperti kondisi sebelum 1981).

Dari keterangan pers beberapa rektor, antara lain rektor IKIP Yogyakarta (*Suara Pembaruan*, 28/12/1995), rektor IKIP Semarang (*Media Indonesia*, 28/12/1995) dan IKIP Malang (*Kompas*, 18/1/1996) yang LPTK-nya telah siap

dimekarkan menjadi universitas, serta keterangan Mendikbud sendiri (*Kompas*, 4/1/1996) didapat keterangan bahwa pengalihfungsian itu semata-mata karena efisiensi dan efektivitas, yakni pemanfaatan SDM yang tersedia; menjawab tuntutan zaman dan tentu saja agar lulusan IKIP lebih banyak berkorporasi dalam pembangunan nasional di berbagai bidang.

Ketersediaan SDM yang dimaksud tentu saja karena akomodasi atas usulan LPTK = Universitas + kependidikan di mana ketika itu berbondong-bondong dosen IKIP disekolahkan ke program pascasarjana ilmu murni dan ilmu terapan di universitas dalam dan luar negeri. Dengan harapan, jika para dosen itu kembali ke kampus, bahan ajar yang dikuasai untuk ditularkan kepada calon guru lebih berbobot.

Kalau penguasaan ilmu para calon guru berbobot, diharapkan transfer pengetahuan kepada para siswa pun berbobot. Dengan demikian, mutu pendidikan secara nasional juga berbobot.

Sebab, menurut data Balitbang Depdikbud, penguasaan ilmu para siswa dengan indikator rerata NEM nasional dalam skala 1-10 untuk IPA di tingkat SD-SMP, Bahasa Inggris untuk SMP-SMA, Matematika SD-SMA dan Fisika, Kimia, Biologi untuk SMA sangat rendah. Jadi, studi lanjutan para dosen IKIP ke S2 dan S3 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan pengalihfungsian IKIP menjadi universitas. Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan atas pemekaran itu belum menepis tuduhan bahwa IKIP sebenarnya kurang percaya diri, mengejar *profit*, pasar, dan tidak setia dengan memilih satu dari tiga pilihan strategis, yakni “murtad”. Pilihan lainnya, asal hidup dan atau mati mengenaskan.

## **FKIP “GAYA BARU”**

Pilihan telah dijatuhkan. Ribuan dosen IKIP dipastikan mendukung pemekaran lembaga yang seringkali dianaktirikan menjadi lembaga pendidikan umum. Kalangan IKIP berharap, wacana akademik yang kurang berkembang selama ini dengan status IKIP-nya akan berubah. Tidak lama lagi mereka akan dengan “bangga” menyebut dirinya dosen MIPA Universitas ini, dosen Fisipol Universitas itu, atau dosen Fakultas anu Universitas anu.

Ketika IKIP telah “punah” menjadi catatan sejarah, barangkali satu-satunya sebutan yang agaknya kurang patut “dibanggakan” – kendati tidak pada tempatnya – ialah menyebut diri sebagai dosen FKIP Universitas anu. Begitulah, FKIP akan berada dalam posisi kesendirian dan *single fighter* dalam mencetak tenaga kependidikan.

Sebagai konsekuensinya, jika FKIP tetap mengikuti dan melaksanakan pola seperti sekarang, di mana kondisi institusional belum lebih baik ketimbang IKIP, sementara LPTK swasta tidak ditertibkan, maka mutu para calon guru akan kembali pada siklus semula. Bahkan barangkali akan lebih parah lagi. Karena itu, sangat relevan untuk menggagas kembali FKIP “gaya baru” yang bisa menjawab problem keguruan kini dan mendatang.

FKIP “gaya baru” mengandaikan dua hal. *Pertama*, ia menerima calon mahasiswa untuk dua bidang – keguruan dan ilmu pendidikan. Bidang keguruan jurusan guru TK/SD dan pendidikan luar biasa dibedakan dengan jurusan keguruan lain sesuai tuntutan kurikulum pendidikan dasar tingkat SLTP dan pendidikan menengah. Secara manajerial, seluruh pengelolaan menjadi tanggung jawab FKIP. Namun, dalam hal penajaman penguasaan bidang studi, dilakukan oleh fakultas lain di lingkungan universitas. Misalnya, mahasiswa jurusan Pendidikan IPS program studi Pendidikan Dunia Usaha mengikuti kuliah-kuliah ilmu ekonomi di fakultas ekonomi, begitu seterusnya. Model seperti ini sangat efisien dari segi SDM, namun menuntut keterpaduan dan fleksibilitas manajemen pendidikannya.

*Kedua*, FKIP tidak lagi menerima calon mahasiswa baru selain mahasiswa jurusan TK/SD dan pendidikan luar biasa mengingat kekhususannya. Sesuai kewenangannya, FKIP menjadi lembaga penyelenggara program Akta Mengajar bagi para sarjana yang ingin menjadi guru sesuai bidangnya. Sebut, misalnya, seorang sarjana ilmu-ilmu sosial yang ingin menjadi guru IPS dipersilakan mengambil program Akta Mengajar di FKIP selama satu hingga dua tahun.

Ditilik dari sisi kelembagaan pendidikan guru, FKIP “gaya baru” itu diharapkan bisa menjawab keluhan rendahnya mutu calon guru yang berimbas pada mutu pendidikan secara nasional ditilik dari segi penguasaan materi pelajaran. Namun, jika dengan cara itu tetap didapat calon guru yang tidak berkualitas dan alamat caci maki masih harus diterima oleh FKIP, agaknya kita perlu bereksperimen untuk tidak memiliki lembaga penyedia tenaga guru.

Biarkanlah setiap warga negara melakukan otodidak, tanpa guru. Sebab, seringkali kritik mengenai mutu pendidikan nasional dilontarkan tanpa sasaran yang jelas untuk jenis dan jenjang pendidikan yang mana. Apalagi paradigma pekerjaan mengajar dan mendidik tidaklah sesederhana yang digambarkan. Orang cenderung melupakan faktor lain selain guru dalam menilai kemajuan pendidikan.

Jakarta, HU *Republika*, 25 Januari 1996



## BABAK BARU PENDIDIKAN GURU



MANTAN ketua Masyarakat Linguistik Indonesia, Dr Bambang Kuswanti Purwo, lulusan IKIP Sanata Dharma (sekarang Universitas Sadhar, Yogyakarta) dan IKIP Malang, pernah berkomentar bahwa ia memilih masuk IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), bukan universitas dengan pertimbangan, di universitas hanya menawarkan ilmu, tetapi di IKIP ia bisa belajar ilmu, sekaligus bagaimana menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kini seiring dengan *turning up* enam dari 10 IKIP menjadi universitas berdasarkan Keppres No 93/1999 tertanggal 4 Agustus 1999, komentar sejenis tidak akan pernah terdengar kembali.

Perubahan IKIP sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) menjadi universitas merupakan klimaks dari semangat *wider mandate* (perluasan peran) dengan sasaran pokok mencapai standar kualitas calon guru yang dipersyaratkan. Klimaks, karena sejarah *wider mandate* telah mengalami pasang surut seiring dengan terjadinya *disparitas* gagasan dalam rentang waktu cukup lama. Bermula dari periode 1987-1991, gagasan melebur IKIP menjadi universitas muncul. Padahal pada saat yang sama LPTK lain, yakni FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) sudah ada di berbagai universitas, sehingga suka atau tidak suka, kritik tajam yang tertuju pada IKIP juga mengimbas pada FKIP.

Merebaknya tuntutan berbagai kalangan pada saat itu didasarkan beberapa kenyataan. *Pertama*, IKIP bertanggung jawab atas mayoritas tenaga kependidikan dinilai gagal memecahkan problem inti pendidikan, yakni rendahnya kualitas peserta didik dan tenaga kependidikan. *Kedua*, IKIP dinilai kurang kontribusinya bagi penyediaan tenaga industrial karena IKIP terlalu sibuk dengan urusan mikro seperti belajar mengajar, pendidikan guru dan teknologi pendidikan. *Ketiga*, adanya fakta bahwa lulusan IKIP yang terserap dalam formasi spesifiknya, yakni dunia pendidikan hanyalah sebagian kecil saja, sementara selebihnya terserap dalam formasi kerja di luar kependidikan.

## MENGILMUWANKAN GURU

Terhadap kritik tersebut, respon LPTK sangat positif. Kritik pertama dan kedua dijawab LPTK dengan mensosialisasikan paradigma baru pengembangan LPTK melalui program mengilmuwalkan guru. Paradigma ini diterjemahkan secara teknis lewat dua hal, yakni hanya menerima tenaga dosen baru lulusan non-kependidikan dan mengharuskan studi lanjut dosen-dosen LPTK ke jenjang Pascasarjana (S2 dan S3) ilmu-ilmu murni dengan harapan penguasaan ilmu yang ditularkan kepada para calon guru lebih mumpuni.

Sementara kritik ketiga dijawab LPTK melalui perubahan kurikulum fleksibel PGSM (Pendidikan Guru Sekolah Menengah) yang mulai diberlakukan sejak 1992, dirancang agar memungkinkan *enrollment* mahasiswa S1 kependidikan fleksibel secara vertikal, yakni mengajar di dua jenjang (SLTP dan SLTA), fleksibel secara horisontal, yakni mampu mengajar lebih dari satu bidang studi namun masih sejenis serta diharapkan terampil dalam bidang kerja nonkeguruan. Dan penting diketahui, pada saat yang sama berbagai perguruan tinggi seperti UGM, Yogyakarta dan ITB, Bandung, juga diberi kesempatan untuk mencetak calon guru melalui program D-III.

Dalam kurun waktu lebih lima tahun, fakta membuktikan bahwa upaya mengilmuwalkan guru, khususnya menjawab kritik pertama dan kedua hasil evaluasinya bermacam-macam. Guru lulusan D-III universitas ternyata tidak lebih baik dibanding guru lulusan IKIP. Sementara di sisi lain, prestasi peserta didik diberbagai jenjang sekolah secara nasional (diukur berdasarkan standar Nilai Ebtanas Murni) tak kunjung meningkat. Oleh karena itu pendapat publik yang berkembang bisa ditebak: upaya mengilmuwalkan guru ternyata kurang berhasil jika tak boleh disebut gagal.

Sementara kritik ketiga relatif terjawab. Survei membuktikan, banyak lulusan FPBS (Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni) tidak hanya melulu menjadi guru bahasa atau guru seni, melainkan juga menjadi pemandu wisata, bekerja di perhotelan internasional, editor penerbitan, menjadi penulis, menjadi seniman atau pekerja seni, menjadi jurnalis, dan sebagainya. Para lulusan FPTK (Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan) pun banyak menjadi wirausahawan di bidang busana (desainer dan konveksi), boga (ahli masak dan buka restoran), bengkel otomotif, elektronika, dan sebagainya tanpa perlu menjadi guru SMK. Kenyataan membuktikan, daya *survival* (bertahan hidup) mereka jauh lebih tinggi ketimbang yang nyata-nyata menekuni profesi keguruannya.

Ketidakterhasilan itu, paling tidak dikarenakan dua hal. *Pertama*, secara internal mentalitas dan komitmen para dosen LPTK yang sudah mengenyam ilmu-ilmu murni tidak terjaga, mengalami disfungsi sehingga terjadi arogansi. Tak sedikit di antara mereka mengaku diri sebagai ekonom, teknolog, fisikawan,

sosiolog, dan sebagainya setelah mengenyam pendidikan lanjut ilmu-ilmu murni di bidangnya. Kesan yang kemudian timbul ialah, pelecehan akademik terhadap para mahasiswa calon guru sehingga memunculkan rasa rendah diri berlebihan dan berakibat komitmen calon guru terhadap profesi keguruan menjadi tereduksi. Didukung keengganan para dosen untuk menularkan ilmunya habis-habisan, menjadikan para lulusan “biasa-biasa” saja ketika bekerja menjadi guru.

Bahkan di FKIP-Universitas, arogansi itu begitu kental dengan adanya tuntutan agar mereka dapat juga mengajar di fakultas yang program studinya tersedia. Difasilitasi oleh ambisi rektorat, bagi universitas yang belum mempunyai fakultas baru, dibukalah fakultas baru seperti FMIPA atau Fakultas Teknik dengan memanfaatkan dosen-dosen FKIP yang sudah menempuh studi lanjutan ilmu-ilmu murni tersebut. Tanpa menyebut satu persatu banyak dosen FKIP-Universitas bergelar doktor dan master atau magister di Jawa dan luar Jawa yang kemudian *bedhol* kantor dengan pindah ke fakultas baru dengan alasan makro pengembangan universitas. Padahal diketahui, akreditasi yang diberlakukan secara nasional bukanlah untuk fakultas atau universitas, melainkan program studi. Sementara salah satu indikator akreditasi program studi adalah ketersediaan tenaga dosen berpendidikan doktor dan master atau magister.

*Kedua*, di luar upaya institusional yang sudah dilaksanakan optimal, masih segudang faktor menyangkut profesi kependidikan belum diatasi serius. Sebut misalnya, rendahnya kemampuan masukan calon guru karena soal minat serta rendahnya apresiasi masyarakat terhadap profesi keguruan. Rendahnya apresiasi ini terkait dengan rendahnya prestise sosial maupun material yang didapat dari profesi ini. Padahal, profesionalisme tenaga pendidik akan tercapai jika masukan instrumental yang didapat LPTK memadai. Dicapainya keadaan ini tentu saja bertalian erat atau berbanding lurus dengan imbal jasa material dan non-material profesi.

## MENGGURUKAN ILMUWAN

Perubahan status enam IKIP (Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, dan Ujungpandang) menjadi universitas jelas merupakan babak baru pendidikan guru. Sebab perubahan itu bukan semata-mata alih fungsi dengan perluasan mandat untuk mengajarkan ilmu-ilmu lain selain ilmu pendidikan sebagaimana sudah dilakukan lebih dulu oleh IKIP-IKIP swasta, melainkan perubahan yang signifikan karena mencoba menerapkan paradigma baru pendidikan guru berupa upaya untuk menggurukan ilmuwan.

Pertanyaannya, apakah strategi menggurukan ilmuwan ini bisa lebih efektif dibanding mengilmuwan guru dalam menghasilkan tenaga kependidikan profesional yang berkualitas? Di atas kertas barangkali lebih efektif mengingat

asumsinya, hanya para calon ilmuwan dengan masukan instrumental yang bermutulah yang diharapkan menjadi calon pendidik dan benar-benar memilih profesi kependidikan sebagai jalan hidupnya. Dengan dua catatan, IKIP yang sudah beralihfungsi sebagai universitas itu benar-benar taat azas pada pola ilmiah pokoknya, yakni ilmu kependidikan serta menerapkan instrumen kendali mutu yang ketat sebagai elemen penyaring siapa-siapa yang berhak memilih jalur kependidikan di samping menekuni spesialisasinya.

Diluar kedua prasyarat tersebut, langkah lebih lanjut yang mesti dilakukan oleh universitas baru hasil perubahan IKIP ialah tetap punya komitmen pada tanggung jawab institusional untuk menghasilkan calon-calon tenaga kependidikan bermutu.

Bentuk akuntabilitas tersebut bisa ditempuh melalui jalur politik, misalnya, memperkuat daya tawar posisi (*bargaining power*) agar terlibat aktif mengambil kebijakan nasional di bidang kependidikan. Sebab tanpa politik pendidikan yang kuat, peningkatan mutu profesi kependidikan tetap akan berjalan di tempat. Sehingga, langkah institusional apa pun yang ditempuh, tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak sinkron dengan kebijakan yang diambil.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 2 September 1999



## PENDIDIKAN GURU PASCA IKIP



KETIKA Presiden Habibie meresmikan perubahan enam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada hari Selasa, 31 Agustus 1999, tak terjadi publikasi memadai. Perhatian publik lebih tertuju pada masalah-masalah nasional lain yang begitu kompleks. Padahal, alih fungsi, peningkatan status (*turning-up*) IKIP menjadi universitas bukanlah semata-mata perubahan nama biasa. Selain dimaksudkan sebagai wujud semangat *wider mandate* (perluasan peran), sekaligus menandai pelaksanaan paradigma baru pendidikan guru.

Berdasarkan Keppres No 93/1999, tanggal 4 Agustus 1999, sejak tahun akademik baru 1999/2000 yang dimulai pada awal September 1999 enam dari 10 IKIP, yakni Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Ujung Pandang berganti nama menjadi Universitas. Sementara empat IKIP negeri lainnya menyusul, yakni Medan, Bandung, Semarang, dan Manado. Oleh karena sosialisasi visi, misi dan teknis kelembagaan berikut segala konsekuensi akademik yang kelak mengiringi pergantian nama tersebut belum memadai, maka diskursus yang berkembang dalam masyarakat beragam.

Di kalangan pimpinan universitas yang hingga kini masih memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) misalnya, serta merta perubahan tersebut dianggap sebagai peluang bagi eksistensi FKIP. Beberapa di antara mereka sudah kasak kusuk mengadakan rapat untuk membuka kembali program-program studi kependidikan seperti Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling Sekolah, dan lain-lain yang pada 1986 ditutup atas inisiatif pemerintah. Sementara di masyarakat beredar kekhawatiran bahwa pada suatu masa kita akan kekurangan tenaga kependidikan (guru dan non guru), Kalangan ini mempertanyakan kelanjutan pendidikan guru pasca IKIP.

Kedua mispersepsi itu terjadi, selain karena minimnya sosialisasi, juga lebih disebabkan oleh penyebaran data dasar yang tidak memadai di mana ketersediaan guru hingga tahun 2005 mendatang masih *over productive*. Namun demikian, kekhawatiran tersebut bisa dimaklumi karena dari tahun ke tahun, minat lulusan SMU berkualitas untuk menjadi guru semakin merosot. Padahal problem kunci IKIP yang dikeluhkan selama ini justru di situ, yakni didapatnya masukan instrumental calon tenaga kependidikan yang kurang memadai sebagai “sisa-sisa” universitas, namun dipaksa untuk dididik sebagai guru dan non guru.

Jika kekhawatiran itu dianggap pertanda baik mengingat apresiasi masyarakat terhadap profesi guru selama ini sangat rendah, maka pertanyaan substansial yang relevan dijawab secara prosedural ialah, apakah dengan perubahan nama tersebut juga disiapkan serius suatu mekanisme pendidikan calon guru yang representatif sehingga kelak menghasilkan guru yang berkualitas? Pertanyaan lain, adakah jaminan bahwa universitas pasca- IKIP akan tetap bersedia mendidik calon guru? Disiapkan atau tidak, terjamin atau tidak, jawabannya berpulang pada konsistensi sumberdaya institusi lama IKIP dan komitmen generasi baru pengelola universitas pasca- IKIP.

## **TUGAS GANDA**

Jika ditilik dari asumsi dasar Keppres di muka, yakni untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional; maka konversi enam IKIP menjadi universitas mengemban tugas ganda. Selain menuju upaya ekspansif kuantitatif daya tampung sebagai jawaban atas tantangan pemerataan pendidikan tinggi; sekaligus berupaya membangun paradigma baru pendidikan guru. Jika selama ini tanggung jawab institusional diletakkan dalam rangka menjadikan calon guru sebagai ilmuwan yang menguasai betul ilmu-ilmu dasar yang hendak ditransfer ke peserta didik melalui proses pembelajaran; maka untuk selanjutnya aktivitas institusional diarahkan guna menyaring para calon ilmuwan yang berminat serius menjadi guru.

Tugas ganda ini jelas bukan tugas yang ringan karena ada keharusan untuk berbeda dengan universitas yang memiliki FKIP. Bagi universitas yang memiliki FKIP, upaya penyediaan guru sepenuhnya dibebankan kepada FKIP, sementara tugas universitas hanya bersifat fasilitatif dan administratif semata. Sebaliknya, bagi universitas pasca- IKIP, tugas penyediaan dan pengelolaan calon guru adalah tugas universitas dan seluruh fakultas yang ada. Karena itu banyak prasyarat yang mesti dipenuhi agar asumsi dasar konversi bisa tercapai optimal.

*Pertama*, secara manajerial sangat penting bagi universitas pasca- IKIP agar menyediakan sistem informasi manajemen yang terpadu. Sekat-sekat birokratis antar fakultas yang selama ini membelenggu mobilitas mahasiswa

perlu dipotong. Fleksibilitas perlu diciptakan mutlak, baik bagi mahasiswa yang menempuh bidang-bidang ilmu dasar terlebih dulu untuk selanjutnya menjadi calon guru (jalur *consecutive*), maupun bagi mahasiswa yang sejak awal memang menempuh belajar ilmu-ilmu dasar bersamaan dengan ilmu keguruan dan pendidikan secara simultan (jalur *concurrent*). Agar diperoleh kualitas lulusan calon guru yang benar-benar bermutu, konsep ijazah ganda yang selama ini mengemuka hendaknya dikesampingkan. Ijazah ganda hanya diberikan kepada para sarjana ilmu murni yang setelah lulus berminat serius menjadi guru sehingga masa pendidikannya pun berbeda dengan dua jalur di muka.

*Kedua*, instrumen kendali mutu yang ketat. Universitas pasca-IKIP hendaknya memberlakukan regulasi khusus bagi mahasiswa ilmu-ilmu murni yang berminat menjadi guru. Karena problem pokok IKIP selama ini adalah masukan instrumental yang rendah, maka yang bisa diperkenankan mengambil sertifikasi calon guru (Program Akta Mengajar sesuai tuntutan PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan) mestinya mereka-mereka yang berprestasi. Jika tidak demikian, maka konversi IKIP menjadi universitas tidak akan memberi nilai tambah bagi paradigma baru pendidikan guru.

*Ketiga*, kejelasan institusional. Diperlukan keputusan politik pendidikan secara spesifik untuk menetapkan kejelasan institusi penghasil guru. Apakah perlu kompatibel dengan aspek-aspek mendasar pengelolaan pendidikan tinggi nasional seperti kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi; ataukah tidak. Hal ini penting karena menyangkut keberlangsungan (*sustainability*), akreditasi dan relevansi ketenagakerjaan sesuai *The Dictionary of Occupational Titles* sebagaimana berlaku di Indonesia.

## **KORELAT KUALITAS**

Sudah sering dibahas bahwa *trigger* kualitas profesi guru sangat beragam. Keragaman korelat mutu ini memaksa pengelolaan profesi guru menjadi multidimensional. Tak ada solusi unilateral yang begitu hebat untuk mengontrol kualitas guru di mana pun di dunia. Dari aras institusi misalnya, persiapan calon tenaga guru (*preservice education*) tidak melulu mengandalkan instrumen masukan berupa calon guru yang memiliki standar kognitif cemerlang. Lebih dari itu juga diperlukan tenaga dosen dan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang sesempurna mungkin.

Dari catatan riset tentang status profesional pengajaran di Amerika Serikat sebagaimana diungkap Brian Rowan (1994) dalam *Comparing Teacher's Work With Work in Other Occupations*, masing-masing negara bagian menetapkan parameter dan standar kualitas yang berbeda-beda. Namun secara substansial, semua sepakat bahwa profesi guru memiliki kompleksitas kerja yang sangat

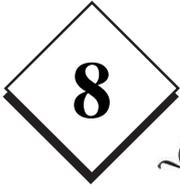
tinggi dan profesional karena didului oleh persiapan pendidikan yang memadai. Substansi ini berlaku untuk berbagai definisi tentang status profesional guru, baik sebagai buruh, pekerja terampil, pekerja seni maupun sebagai profesi profesional. Oleh karena itu, ada abstraksi umum, selain calon guru harus *well educated* juga mestilah *well trained* dan *well paid*.

Terkait abstraksi terakhir, melalui serangkaian riset, Reyes (1990) dalam *Teachers and their Workplace: Commitment, Performance, and Productivity* sampai pada simpulan bahwa profesi guru selalu membutuhkan perubahan untuk peningkatan *on-the-job learning*, kesehatan psikologis dan kepuasan kerja. Ketiga kebutuhan dimaksud jelas tak mungkin disediakan oleh universitas pasca-IKIP, melainkan hidup dinamis seiring dengan kebijakan nasional di bidang keguruan dan apresiasi masyarakat pemakai tenaga guru.

Berdasarkan kenyataan itu, sangat jelas bahwa korelat profesi guru yang profesional dan berkualitas tak seluruhnya menjadi tanggung jawab universitas pasca-IKIP atau FKIP di Universitas. Pemerintah dan masyarakat turut pula memikulnya. Pemerintah misalnya, perlu melakukan deregulasi atau mengubah regulasi yang memperlakukan tenaga pendidik sama dengan PNS lainnya. Sudah saatnya ada aturan tersendiri seperti yang di Jepang dikenal sebagai *Kyoiku Komuin Tokurei* (Peraturan-peraturan Tentang Pegawai Negeri dalam Bidang Pendidikan). Sasaran deregulasi lain adalah SK Men-PAN No 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Regulasi itu perlu segera disederhanakan karena tidak memiliki dampak ekonomik lebih kepada guru.

Kecuali itu, ada fakta bahwa bertahun-tahun para guru bekerja seperti robot, disetir pemerintah dan nyaris tak ada kepuasan kerja. Mereka ibarat “sapi perah.” Habis manis, sepah didaur ulang (lewat Pemilu). Potensi kreatif sengaja ditumpuli dengan mengekang kebebasan pedagogis, bahkan politis. Karena itulah rata-rata penyandang profesi ini menjadi *silent majority* tanpa perlawanan, minus pemberdayaan. Diperlukan otonomi pedagogis agar tumbuh kembang profesi ini lebih terjamin.

Jakarta, HU *Suara Karya*, Selasa 19 Oktober 1999



## NASIB GURU DAERAH TERPENCIL



SETELAH beberapa harian Ibukota mengungkapkan keluhan seorang guru dari daerah terpencil yang diundang ke Jakarta oleh Depdikbud, Agustus 1993, persoalan guru daerah terpencil (GDT) kembali mencuat ke permukaan dan mendapat perhatian banyak pihak. Adalah Giser Mahar, seorang GDT dari Kalimantan Selatan yang berhasil menggugah keberanian 20 orang GDT utusan provinsi lain guna menyampaikan keluhan kepada Mendikbud.

Ketika temuwicara dengan Mendikbud Wardiman Djojonegoro, diketahui betapa tingginya kompleksitas problematika GDT. Satu di antaranya ialah belum turunnya tunjangan bagi GDT sekali pun Keputusan Presiden yang mengaturnya sudah lama ada, yaitu Kepres No. 13/1992. Gayung pun bersambut, anggota DPR RI Komisi IX Marsetio Donoseputro dan Ketua Umum PGRI Basyuni Suryamiharja, angkat bicara. Katanya, meskipun pihak Pemda belum dapat menentukan kriteria GDT, realisasi tunjangan khusus bagi GDT tak bisa ditunda. Faktanya, dari 21 GDT yang diundang ke Jakarta mewakili 21 provinsi (minus Jawa dan Bali), baru utusan provinsi Irian Jaya yang sudah menerima tunjangan itu sejak Maret 1993.

Berbicara soal nasib GDT memang sangat riskan, sebab nasib guru pada umumnya pun belum sebaik yang diharapkan. Padahal, mau memilih profesi guru saja kita sudah bersyukur. Kalau mau jujur, berapakah orangtua yang rela dan ikhlas anak-anaknya menjadi guru dalam situasi ekonomi serba kompetitif dewasa ini? Karenanya, kita amat prihatin kalau masih ada oknum yang berusaha merongrong kesejahteraan guru dengan dalih macam-macam memotong gaji mereka.

## BEBERAPA MASALAH

Siapa pun sadar, guru dalam prose pembelajaran di sekolah berperan vital. Kehadirannya punya kontribusi optimal terhadap mutu keluaran pendidikan. Dalam kaitan ini ada dua problem yang sampai saat ini belum terpecahkan, yaitu soal kuantitas dan soal kualitas. Selain diperlukan jumlah guru yang memadai, sekaligus diperlukan standardisasi. Ketika dua pilar itu (kuantitas dan kualitas) dipertanyakan, jawabannya ternyata gampang-gampang susah. Dikatakan gampang oleh karena rasio guru-murid di negeri ini sudah ideal, yaitu 1:25. Secara teoritis jumlahnya sudah memadai. Dikatakan susah oleh karena sejumlah daerah ternyata masih berteriak-teriak kekurangan guru.

Bagi daerah terpencil persoalannya lebih pelik lagi. Terungkap fakta di daerah itu seorang guru harus merangkap banyak tugas, selain menjadi guru yang menangani lebih dari satu dua kelas, ia merangkap tugas administratif sebagai kepala sekolah, wali kelas, sekaligus penjaga sekolah. Sehingga dapat dibayangkan betapa sibuk dan menderitanya para GDT. Lebih sibuk dan jauh lebih menderita daripada guru-guru kebanyakan yang sudah menderita.

Dalam kondisi seperti itu, sangat sulit diharapkan kualitas pendidikan daerah terpencil menjadi baik. Mengatasi problem itu bukan hal mudah. Kecuali soal pendistribusian yang tidak merata, juga ada kecenderungan sebagian besar calon guru tak bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Apa sebabnya? Barangkali karena mereka para calon guru belum sepenuhnya punya minat menjadi guru, mental dan naluri keguruannya belum sepenuhnya integral. Hal ini bisa dimaklumi sebab usia ketika lulus sekolah guru (SPG) maupun PGSD relatif masih muda, belum siap *bantingan*.

Persoalan yang diduga punya kontribusi besar bagi rendahnya minat calon guru ditempatkan di daerah terpencil cukup banyak. Misalnya, masalah psikologis yang terkait dengan kebutuhan pokok individu secara umum dalam hal kesenangan dan hiburan. Masalah demografis, yaitu tuntutan untuk menyesuaikan diri dan mensosialisasikan diri di daerah terpencil dirasa sebagian besar GDT amat sulit. Terutama guru-guru dari Jawa yang ditugaskan di luar Jawa, sebab pelajaran Ilmu Bumi dan watak suku-suku bangsa (etnologi) seperti adat istiadat dalam kurikulum lama sudah menghilang. Dalam kurikulum LPTK tak ada muatan pengenalan karakteristik suku bangsa agar jika kelak lulusannya mengajar di luar komunitasnya bisa menyesuaikan diri.

Tak kalah rumit adalah soal karier. Akibat kondisi demografis, kemajuan karier GDT sering terhambat. Mulai dari kenaikan pangkat sampai pada promosi ke arah jabatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya para calon guru enggan ditempatkan di daerah terpencil. Dengan segala cara, mereka berusaha ditempatkan di daerah tertentu yang lebih enak, bahkan kalau perlu di daerahnya sendiri.

## DOMINASI WANITA

Tidak diketahui pasti, apa yang dilakukan rekan-rekan guru di pelosok dalam memperingati hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November setiap tahun. Tetapi bisa diduga mereka di pelosok biasanya lebih semarak aktivitasnya ketimbang koleganya di kampung kota. Tataran kesemarakan itu tentu saja berbeda antardaerah. Satu hal yang bisa sama ialah, tiada henti-hentinya mereka membicarakan suasana keprihatinan yang selalu membelenggu keseharian kerjanya. Guru, seperti dinyatakan oleh *Ernest House*, telah dibelenggu kondisi *economic scarcity* dan *isolated profeseion*, suatu kondisi yang menyebabkan dirinya miskin dan terasing di lingkungannya.

Agaknya, fenomena inilah yang kini tengah melanda keadaan guru-guru di tanah air. Pada satu sisi, pemerintah nyaris hanya setengah hati mengangkat harkat ekonomi mereka sehingga profesi guru tetap tersungkur dalam dinamika kehidupan yang pekat materialisme dimana uang telah menjadi panglima. Sementara pada sisi lain, mudarnya nilai moral, kejujuran, dan kebenaran dalam bermasyarakat, menjadikan makna pendidikan yang menjadi misi utama para guru menjadi asing.

Akibatnya, para guru kehilangan kewibawaan. Anutan etik dan wawasan normatif tidak lagi menjadi pedoman dalam memandang profesi guru. Ada pergeseran serius masyarakat dalam mengapresiasi profesi ini. Bukan ke arah yang lebih baik, melainkan justru sebaliknya.

Mendiskusikan solusi guna mengatasi kompleksitas problem guru di pelosok jelas kurang menarik. Sebab, pada prinsipnya segala permasalahan telah diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan rekrutmen dan pembinaan guru. Langkah-langkah mengantisipasinya pun sudah ditempuh. Tetapi baru pada batas setengah hati, belum sungguh-sungguh menyentuh masalah mendasar problem keguruan.

Justru yang menarik diperhatikan ialah, adanya kecenderungan dari tahun ke tahun di mana bagian terbesar dari mereka yang bertugas sebagai guru di pelosok adalah wanita. Sekadar contoh, ketika tiga tahun lalu diangkat kira-kira 21.000 guru SD untuk 27 provinsi, hanya 7.000 di antaranya yang diangkat di pelosok. Lebih dari 50 persen di antaranya adalah guru wanita. Bahkan di Sumatera Barat ketika itu, dari 250 guru, hanya ada sembilan guru laki-laki, selebihnya wanita.

Dilihat dari satu sisi, terisinya formasi guru di pelosok oleh kaum hawa sangat membanggakan. Terutama jika dikaitkan dengan fungsionalisasi dan semangat kejuangan wanita di tengah arus perubahan global. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan isu gender yang kini lagi berkembang. Tetapi ditilik dari sisi

lain yang sifatnya alamiah, justru menimbulkan problem serius yang akut di pelosok.

Misalnya, apabila guru yang bersangkutan sudah ketemu jodoh dan harus mengikuti suami, sekolah-sekolah di pelosok praktis kesepian karena ditinggal guru. Begitu seterusnya siklus itu berputar. Setiap kebutuhan guru di pelosok terpenuhi, tak lama kemudian karena berbagai sebab mereka meninggalkannya. Keadaan demikian, apalagi jika berlangsung terus menerus jelas tidak menguntungkan. Kecuali semangat demokratisasi pendidikan kurang mendapat tempat, upaya pemerataan mutu pendidikan akan sia-sia.

Pada prinsipnya, tunjangan khusus sebagaimana diuraikan di awal tulisan ini bukanlah satu-satunya langkah untuk memperbesar minat calon guru agar bersedia ditugaskan di pelosok. Banyak langkah lain bisa ditempuh. *Pertama*, melakukan deregulasi kenaikan pangkat otomatis yang direduksi waktunya. Tidak empat tahun, melainkan cukup dua tahun, untuk tidak lebih dari dua atau tiga kali kenaikan pangkat.

*Kedua*, membebaskan mereka dari biaya penyetaraan PGSD. Jika perlu memberi kemudahan khusus untuk mengikuti kuliah lanjutan di Universitas Terbuka atas biaya negara. *Ketiga*, secara teratur melaksanakan kebijakan sirkulasi penugasan. Perlu ada mobilitas antarguru di masing-masing daerah. Sirkulasi itu, kecuali menambah pengalaman, juga mengurangi disparitas mutu antardaerah.

Dari sisi lain, fenomena guru wanita di pelosok seharusnya memperbesar rasa malu para guru pria. Sebab, sebagaimana umum diyakini, wanita adalah sosok yang relatif lemah secara fisik dan mental. Tetapi dalam kasus ini justru sebaliknya. Mereka malah tangguh bertugas di pelosok. Untuk pengorbanan itu agaknya kita perlu angkat topi dan salut setinggi tingginya.

Jakarta, HU *Media Indonesia*, Kamis 23 Nopember 1995



## SATU SEKOLAH SATU GURU?



BARU-BARU ini berkembang ide perlunya penunjukan guru bidang studi untuk mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar (SD). Alasannya, Matematika dan IPA merupakan pengetahuan yang bersusun sehingga tanpa fondasi kuat, siswa selamanya mengalami kesulitan mengikuti pelajaran tersebut. Kecuali itu sistem guru kelas yang diharuskan menguasai semua bahan ajar sudah tak memadai lagi mengingat ilmu pengetahuan sangat pesat.

Sementara pada saat yang sama menyebar pula rencana Depdikbud yang akan mengembangkan satu sekolah (SD) dibawah seorang guru (*one teacher school*).

Satu sekolah satu guru itu konon kabarnya sudah dirintis pada enam SD di enam provinsi guna mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil. Dalam sistem ini, ruang belajar seluas 12 x 12 m persegi ditempati seluruh kelas berkelompok. Jumlah siswa dibatasi antara 10-30 siswa.

Guru berada di tengah-tengah ruangan, dilengkapi radio komunikasi SSB (*single side band*) dengan frekuensi yang tak dapat diubah-ubah, yakni di 10.325,7 MHz. Dengan SSB itu guru dapat berkomunikasi langsung dengan Direktorat Pendidikan Dasar di Jakarta guna mengemukakan berbagai masalah selain untuk berkomunikasi dengan sesama guru di daerah/sekolah lainnya.

Gagasan pertama dilandasi empirik bahwa pada jenjang pendidikan di atas SD sederajat penguasaan kedua bidang studi itu sangat rendah dilihat dari rerata nilai Ebtanas murni (NEM) secara nasional. Data Balitbangdikbud tahun ajaran 1993/1994 menunjukkan dalam skala 10 rerata NEM nasional Matematika SMP hanya 3,69, sementara di SMA hanya 4,72. Untuk IPA di tingkat SMP hanya 4,60. Sedangkan tiga bidang studi IPA, yakni Fisika, Biologi, Kimia di tingkat SMA masing-masing hanya 4,70; 4,37 dan 5,53.

Melalui penunjukan guru bidang studi, kemampuan dasar siswa SD akan tertolong untuk bidang-bidang tersebut. Sebab hal itu akan sulit jika diberikan pada guru kelas yang mengajar berbagai bidang studi sekaligus. Implikasi gagasan ini ialah, diperlukan tenaga sekurang-kurangnya 147.066 guru sekolah kalau yang bersangkutan merangkap dua bidang studi. Dan dua kali lipatnya, yakni 294.132 orang guru jika terpisah. Suatu jumlah yang sangat menolong para pengangguran lulusan LPTK.

Sementara gagasan kedua, yakni satu sekolah satu guru sepintas merupakan gagasan inovatif untuk mengatasi kebuntuan masalah pengadaan guru di daerah terpencil. Sebab seperti diketahui, di daerah terpencil persoalan guru jauh lebih pelik. Seorang guru terpaksa dan dipaksa merangkap banyak tugas. Selain menjadi guru yang menangani lebih dari satu dua kelas, ia merangkap tugas administratif sebagai wali kelas dan kepala sekolah. Bahkan sebagai penjaga sekaligus tukang kebun sekolah.

Dapat dibayangkan, betapa sibuk dan menderitanya para guru itu. Lebih sibuk dan jauh lebih menderita ketimbang guru-guru kebanyakan yang sudah menderita. Mencermati kondisi seperti itu, sangat sulit berharap kualitas pendidikan di pelosok menjadi baik.

Dengan demikian ditilik dari visi kemajuan belajar, yakni masa depan mutu pendidikan dan hak-hak konstitusional untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, agaknya kedua ide itu saling bertolak belakang.

Kita sepakat dengan gagasan pertama mengingat sangat sesuai dengan kebutuhan nyata bangsa ini di masa-masa mendatang. Namun untuk gagasan kedua hendaknya dipikirkan lebih lanjut. Karena konsekuensi kemanusiaannya yang sangat kompleks.

Dengan kondisi finansial dan sistem karier seperti sekarang, sungguh tidak manusiawi membebani seorang guru dengan tugas berat seperti itu. Apalagi kalau dilihat dari kemungkinan proses belajar mengajar (PBM), siapa yang bisa menjamin kelancaran?

Satu sekolah satu guru? Sekilas ada bayangan suasana pasar terjadi di dalam kelas. Mana mungkin guru yang masih didominasi metode ceramah akan bisik-bisik mengajar kelas tertentu sementara kelas lainnya sedang asyik belajar? Kurikulum yang integral sekalipun rasanya belum memadai untuk PBM seperti itu. Apalagi dalam sistem satu sekolah satu guru, siswa kelas-kelas tertinggi diperkenankan menjadi tutor bagi kelas-kelas yang lebih rendah. Itu baru dari segi teknis. Dari segi psikologis dan derajat pencapaian program tentu akan lebih rumit.

Untuk itu, langkah paling rasional ialah mengembalikan kondisi-kondisi pendidikan di daerah terpencil kepada peraturan yang ada. Menurut PP No.28/

1990 tentang Pendidikan Dasar, khususnya Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan pendirian sekolah dasar, jika ada sekurang-kurangnya 10 orang siswa, maka mereka berhak mendapatkan satu unit sekolah dasar. Peraturan ini membawa implikasi diperlukan penyediaan sekurang-kurangnya satu guru untuk satu kelas.

Sebab, dengan makin kecilnya rasio guru-siswa, akan tercapai efektivitas pendidikan yang optimal. Sekalipun dari segi pembiayaan kurang efisien, bukan alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan layanan pendidikan yang memadai.

Sudah menjadi konsekuensi tuntutan konstitusional bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945. Negara berkewajiban memenuhi kepentingan publik seperti itu. Kebijakan *zero growth* dalam pengangkatan PNS tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk tidak mengangkat guru baru sejauh warga negara membutuhkannya.

Jikalau mengangkat tenaga guru untuk daerah terpencil dirasa sangat sulit, tentu cara paling tepat adalah mengatasi sumber-sumber kesulitan tersebut. Dari beberapa kajian diperoleh informasi bahwa determinan yang punya andil besar bagi rendahnya minat calon guru ditempatkan di daerah terpencil relatif banyak. Antara lain masalah psikologis, masalah demografis, dan masalah karier.

Andaikata pemerintah berhasil mengatasi kendala-kendala tersebut, tentu minat untuk menjadi guru di daerah terpencil akan besar. Misalnya saja merealisasikan Keputusan Presiden No. 13/1992 yang mengatur tunjangan khusus bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil. Sebab Kepres ini lahir antara lain sebagai upaya menimbulkan daya tarik para calon guru agar mau ditugaskan di daerah terpencil.

Sejauh ini banyak kepala daerah belum merealisasikannya. Alasannya bermacam-macam. Misalnya karena daerah belum mampu menuntaskan atau menetapkan kriteria terpencil. Alasan ini menggelikan sekaligus menjengkelkan. Terkesan mengada-ada, kalau tak boleh dibilang kurang serius memikirkannya. Sebab, jangankan kepala daerah dan petugas pendidikan yang *nota bene* adalah cerdas pandai, orang awam yang tak pernah “makan sekolahan” saja mengerti bilamana suatu daerah disebut terpencil.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 13 Februari 1996.



## PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU



SELAIN karena kekeliruan semantik dalam memaknai profesi, harapan berlebihan dengan melabeli anutan etik menyebabkan difusi jaminan hukum yang melindungi para guru kurang intensif dan kurang efektif. Kenyataannya, tindak sewenang-wenang dan fenomena pelecehan terhadap profesi guru, disengaja maupun tidak selalu saja terjadi.

Bukti-bukti tentang pelecehan itu cukup banyak. Beberapa hari menjelang peringatan Hari Guru Internasional yang ditetapkan oleh Unesco (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) pada tanggal 5 Oktober 1995, kita dikejutkan oleh peristiwa keprihatinan yang menyangkut nasib guru.

Untuk menyebutnya beberapa saja misalnya di Kediri, Jawa Timur, seorang guru SDK dipukuli orangtua murid hingga babak belur. Tak cukup sampai di situ, si guru pun akhirnya diancam oleh seorang ketua DPC organisasi pemuda yang membekingi si pemukul. Akibatnya terjadi unjuk rasa dan berbuntut perusakan mobil dan rumah si pemukul.

Sementara dari Maliana, Timor-Timur diperoleh kabar, sekitar 200 orang guru terpaksa meninggalkan tugas dan mengungsi (pulang kampung) karena rumahnya diobrak-abrik dan dibakar. Dirinya dilempari batu dan diusir. Pelakunya justru sebagian besar adalah anak-anak muda bekas murid dan murid-muridnya.

Dari Purwokerto, Jawa Tengah, para guru protes karena gajinya yang dipotong tak kurang dari 13 jenis, masih dipotong lagi untuk keharusan membeli seragam baru PGRI. Dan terakhir dibantainya secara keji Ibu dan tiga anak keluarga seorang guru SMP, di Jakarta.

Peristiwa-peristiwa memprihatinkan yang menyangkut guru sebagai pribadi dan warga negara, serta guru sebagai penyandang profesi tersebut baru yang kita ketahui dari media massa. Tentu, masih banyak potret keprihatinan yang menimpa para penyandang profesi ini yang makin hari makin marjinal, namun tidak kita ketahui, karena sengaja tidak diungkap atau tak tercium pihak lain.

Sejauh masih membutuhkan pendidikan, pembicaraan mengenai sosok guru selalu membetot perhatian. Derajat kemenarikan, daya sentuh dan bobot persoalan yang terkait profesi keguruan, jauh lebih besar ketimbang persoalan pendidikan lain. Sebab, mata rantai masalah guru selalu bersngkut paut dengan persoalan nasib manusia. Nasib orang yang membuka mata kita terhadap panorama dunia dengan segala kompleksitasnya.

Dengan bantuan guru kita bisa mencerna ragam keajaiban alam. Hanya karena sentuhan tangan dingin para guru, kita dapat membaca dan menulis, berhitung, bahkan berlogika dan mengoptimalkan rasionalitas yang dianugerahkan Tuhan. Belum pernah ada seorang pakar, cerdik cendekia dan para tokoh yang diidentifikasi sebagai otodidak sekalipun, yang benar-benar bebas dari sentuhan kepiawaian seorang guru.

Oleh karena itu, ketika tersebar luas informasi yang menyangkut keprihatinan penyandang profesi guru, segera menyentuh nurani. Nurani yang tidak membenarkan adanya perlakuan kurang senonoh oleh pihak-pihak lain yang kita yakin selama hidupnya tak terbebas dari pekerjaan para guru. Sebelum ia menjadi pengusaha, sebelum ia menjadi pemimpin yang berkuasa, sebelum ia menjadi pegawai, karyawan, eksekutif, dan sebagainya; pastilah di suatu masa dalam hidupnya bergaul dan menimba ilmu dari para guru. Omong kosong kalau para guru tidak berjasa dalam hidup dan kehidupan seseorang.

Bobot dari berbagai peristiwa memprihatinkan yang menimpa para guru itu tidak kalah dengan yang dialami oleh para murid SD yang berseragam putih merah terlantar karena gedung sekolahnya bobrok berantakan, atau digusur untuk perumahan mewah oleh para developer, dengan seizin penguasa.

Memang bukan pada tempatnya untuk mengiba-iba supaya terjadi perbaikan nasib guru secara mendasar. Tidak perlu pula kita mengulang-ulang kembali peran strategis dan penting yang dimainkan para guru dalam konteks pembangunan dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaklumi bersama. Sebab seluruh persoalan yang bersangkutan paut dengan guru sudah menjadi rahasia umum yang diketahui bersama, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Justru yang belum optimal adalah tindakan nyata yang langsung menyentuh problem elementer profesi guru.

Sekadar simpati dan empati saja tidaklah cukup sebagai landasan agar prospek profesi keguruan semakin baik, handal, unggul dan profesional. Namun begitu, kesadaran akan pentingnya penghargaan kepada guru setidaknya-tidaknya akan menggugah para guru untuk tetap dalam integritas pengabdian. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi tindakan terus menerus yang melecehkan profesi keguruan. Sebab guru juga manusia biasa yang memiliki batas kesabaran. Buktinya, ketika terjadi kasus pemukulan di Kediri, tidak kurang dari seluruh guru berunjuk-rasa, bahkan cenderung bertindak brutal. Suatu sikap yang selama Orde Baru sangat ditabukan dan belum banyak terjadi.

## **PERLINDUNGAN HUKUM**

Relasi sosial antarmanusia meniscayai seseorang mempunyai peranan sosial. Melalui komunikasi, seseorang bisa berperan sebagai penerima pesan, sementara pada saat lain sebagai penyampai pesan. Manakala proses komunikasi berlangsung, secara psikologis dan sosiologis segera akan terlihat siapa yang disebut dewasa, dan siapa yang belum dewasa. Dalam dunia edukasi, ada pihak yang disebut pendidik, ada pula pihak yang disebut subjek didik.

Ketika orangtua sedang menasehati anak-anaknya, perbuatannya dikatakan mendidik. Dan oleh karenanya, orangtua disebut pendidik. Seorang pemimpin yang mengingatkan kesalahan bawahannya, juga melakukan perbuatan mendidik. Karena itu ia disebut pula pendidik. Demikian halnya para guru di sekolah yang membelajari siswa-siswinya selalu disebut pendidik, karena ia melakukan perbuatan mendidik, walaupun lebih banyak mengajar.

Tetapi harus diingat, tidak serta merta para orangtua dan para pemimpin yang melakukan perbuatan mendidik disebut “tenaga pendidik” terkait dengan dimensi waktu (jam kontak), dimensi ruangan (tempat), dan dimensi normatif (peraturan atau rambu-rambu).

Pendidik dan pemimpin merupakan konsep idiomatik yang menunjuk peran sosial seseorang dalam tatanan bermasyarakat. Berbeda dengan keduanya, “tenaga pendidik” merupakan konsep definitif yang menuntut profesionalisme. Dan oleh karenanya ia terbatas, perlu dilalui lewat institusi formal. Menurut PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan, guru termasuk salah satu dari banyak tenaga kependidikan.

Dan dalam menjalankan tugasnya itu ia berhak memperoleh perlindungan hukum yang sepenuhnya dijamin oleh Undang-undang. Menurut PP di muka, perlindungan profesi guru diatur dalam Bab XII, Pasal 60. Dalam ayat (2) disebutkan, perlindungan hukum terhadap guru meliputi: *pertama*, rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan

dengan tugas mengajar; *kedua*, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa karena alam maupun perbuatan manusia; *ketiga*, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan; *keempat*, penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Perlindungan hukum ini tentu saja harus dimengerti dan dihargai oleh pihak lain yang terkait dengan tugas profesi keguruan. Termasuk oleh para orangtua, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran menitipkan anak-anaknya untuk dididik di sekolah. Bentuk penghargaan itu ialah mengakui bahwa para guru merupakan representasi orangtua di sekolah. Sehingga segala tindakan mendidik yang dilakukan oleh guru, sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis seharusnya dimaklumi oleh para orangtua murid. Bukan malah sebaliknya.

## **PERAN PGRI**

Dua di antara banyak ciri keprofesian sebagaimana lazimnya ialah pemilikan mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif dan pemilikan organisasi profesi yang bertindak sebagai pengayom, pelindung sekaligus wahana perjuangan profesi. Bagi profesi keguruan, ciri pertama itu menuntut keharusan bahwa hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja memberi layanan keahlian keguruan. Sementara ciri kedua ditandai oleh adanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi para guru.

Apakah PGRI sebagai lembaga profesi memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi guru? Ini yang harus diperjuangkan oleh PGRI agar dapat memberi kemudahan bagi PGRI untuk melakukan kontrol kualitas teman sejawat.

Jika PGRI hanya berperan sebagai pemotong gaji guru, maka perlindungan profesi guru sebagaimana telah diakui legalitasnya hanya akan menjadi klausul pajangan. Dan profesi guru akan makin terpuruk ke pinggiran. Diejek dan dicaci, dihina dan dimaki, tapi masih dibutuhkan

Yogyakarta, HU *Yogya Post*, 10 Oktober 1995



## **GURU SEJATI DAN LEDAKAN INFORMASI**



DALAM buku *Global Paradox* (1994), John Naisbitt “berkisah” tentang revolusi di bidang telekomunikasi dan ledakan informasi. Ia antara lain menulis bahwa pada awal abad informasi dari abad XXI, semua kemampuan komunikasi yang mungkin saja kita butuhkan akan dapat diletakkan di atas meja kerja kita, di dalam mobil kita, atau di atas telapak tangan kita.

Gambaran dunia global akibat lompatan teknologi komunikasi itu memang baru dapat dirasakan di dunia ekonomi dan oleh kalangan dunia usaha. Sayang sekali Naisbitt tidak “meramalkan” bagaimana dampaknya terhadap perkembangan dan dinamika profesi lain, keguruan misalnya. Padahal, bagi negara-negara berkembang yang nyaris menapak menjadi negara industri semacam Indonesia, kemajuan teknologi komunikasi dan ledakan informasi seperti itu sangat terasa.

Ketika perkembangan kemampuan profesi keguruan belum sebanding dengan peningkatan kedua bidang tersebut, mau tidak mau mengharuskan kita untuk menyiasati bagaimana agar profesi keguruan tidak tenggelam, bahkan tergantikan fungsinya. Sebab, dalam dunia yang semakin egaliter dan cenderung liberal, kehadiran guru di dalam kelas tetap dibutuhkan oleh manusia untuk mengerem laju erosi dehumanisasi.

Tanpa mengecilkan arti pengabdian profesi keguruan dan rasa terima kasih karena justru melahirkan banyak kemajuan itu, kita angkat masalah pokok tersebut dalam suasana memperingati Hari Guru Nasional bertepatan dengan Setengah Abad PGRI yang mewadahnya, 25 November 1995.

## KEWIBAWAAN

Revolusi komunikasi dan informasi sebagai bagian dari era globalisasi membawa konsekuensi tersendiri. Bagi profesi keguruan, dampaknya begitu terasa. Terutama pada perubahan anutan etik, standar normatif, dan wawasan atau cara pandang penghormatan profesi guru. Revolusi komunikasi dan informasi yang tidak mudah diakses oleh guru karena ketidakberdayaan ekonominya menyebabkan kewibawaan guru dan status sosialnya merosot sangat tajam. Berkorelasi negatif atau berbanding terbalik dengan laju kemajuan kedua bidang itu.

Hal ini bukan hanya menjadi keluhan Indonesia sebagaimana dilontarkan Mendikbud Prof Dr Wardiman Djojonegoro. Tetapi juga dialami oleh negara-negara berpenduduk besar lainnya. Menteri Pengembangan Sumberdaya Manusia India, Shri Madhavrao Scindia, misalnya, mengemukakan bahwa dalam tradisi India guru menduduki tempat yang sangat tinggi di masyarakat. Namun pelbagai kesenjangan akibat modernisasi telah membuat martabat profesi guru makin merosot.

Keprihatinan terhadap status sosial guru itulah yang kemudian membuat dua dari 14 butir Komunike Bersama yang dihasilkan pertemuan sembilan menteri pendidikan dari negara-negara berpenduduk besar berbicara mengenai masalah guru. Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Hilton, Nusa Dua Bali pada pertengahan September 1995 itu menghasilkan kesepakatan untuk memperhatikan dua hal dalam upaya mengangkat kembali status sosial dan kewibawaan guru, yakni *memperbaiki kesejahteraan dan pelatihan guru*.

Asumsi penjelas komunike itu sangat sederhana. Apabila lebih besar perhatian diberikan pada status sosial dan pelatihan guru, maka tanggung jawab, kualitas pendidikan untuk semua, serta efektivitas proses pendidikan dan pengajaran akan bisa bertambah baik.

Begitu sederhananya logika peningkatan kualitas pendidikan ditilik dari sisi guru dengan “hanya” mengontrol prestise materialnya. Tapi kenyataannya kesederhanaan itu tidak begitu mudah diwujudkan dalam bentuk keputusan politik yang jelas. Sebab tidak semua negara menempatkan status profesi guru dalam hirarkhi birokratikalnya.

Kasus Indonesia misalnya, mengangkat prestise material para guru yang *nota bene* adalah pegawai negeri sipil, berarti juga menaikkan prestise material PNS lainnya. Sangat kecil kemungkinan perlakuan istimewa dalam hal finansial diberikan kepada guru tanpa melihat konteks kepegawaianegerian yang lebih luas. Jalan yang ditempuh memang akhirnya menaikkan jumlah tunjangan fungsional. Misalnya, melalui Keppres No. 23/ 1995, terhitung bulan April

1995, tunjangan guru dinaikkan rata-rata Rp 10 ribu untuk Golongan II, III dan IV sehingga masing-masing menjadi Rp 35 ribu; Rp 45 ribu; dan Rp 60 ribu.

Tapi kenaikan yang mengharuskan pemerintah mendongkrak beban anggaran sebesar Rp 154 milyar karena jumlah guru tak kurang dari 1,6 juta orang itu, tidak berdampak banyak bagi guru untuk mampu mengakses teknologi komunikasi dan ledakan informasi bagi perbaikan mutu kinerjanya. Sebab, daya beli para guru ternyata tetap tidak meningkat. Apa gunanya *take home pay* meningkat jika harga barang membubung tinggi hampir sepanjang tahun? Jadi, agaknya percuma menaikkan gaji dan tunjangan para guru jika tidak disertai kenaikan daya beli dan atau penurunan harga-harga barang.

Barang yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja bukan hanya kebutuhan pokok. Lebih dari itu ialah barang kebutuhan akibat revolusi telekomunikasi dan ledakan informasi. Misalnya harga buku, jurnal ilmiah, surat kabar, televisi, komputer, dan telepon. Jika para guru mampu menganggarkan untuk mengakses sedikitnya keenam barang itu, sangat niscaya segala bentuk penataran, seminar, lokakarya dan lain-lain program yang diperuntukkan meningkatkan kualitas kemampuan guru, tidak diperlukan lagi.

Sebab, melalui keenam media itulah lalu-lintas informasi ilmu pengetahuan dan teknologi melintas dunia. Dengan begitu para guru bisa mengimbangi laju kemampuan dan daya kritis para siswa yang justru aksesnya terhadap keenam sumber informasi itu sangat baik. Alhasil, kewibawaan dan status sosial guru akan terangkat dengan sendirinya. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena wibawa keilmuannya yang nyata-nyata terejawantahkan dalam keseharian proses pergaulan belajar. Kapan kira-kira hal itu akan tercapai? Agaknya masih bergantung pada keberpihakan jaman.

## KESEJATIAN

Di tengah kehidupan yang serba komersial dan didorong ikatan iklan yang cenderung mengajak hidup konsumtif, tanda-tanda kesulitan bagi guru untuk menyesuaikan diri secara ekonomis sangat terasa. Kinerja yang baik saja belum menjamin derajat penerimaan sosial seorang guru di masyarakat menjadi terangkat tanpa diimbangi kemampuannya secara ekonomis. Itulah sebabnya regulasi pemerintah (PP No. 38/ 1992 tentang Tenaga Kependidikan) memberi ruang gerak leluasa kepada para guru untuk bisa bekerja diluar tugas pokok sepanjang tidak mengganggu tugas pokok.

Di luar komunitas kosmopolitan, barangkali hanya guru sejati yang dapat bertahan untuk tetap setia kepada profesinya. Maksudnya, revolusi telekomunikasi

dan ledakan informasi tidak serta-merta membuatnya patah arang, stres apalagi mengalami gegar budaya. Mereka tetap pasrah dan menerima konsekuensi profesi apa adanya. Berkebalikan dengan para buruh (karyawan) yang sudah bersinggungan dengan kepentingan politik dan gerakan prodemokrasi.

Tapi, jika dikaitkan dengan gerakan disiplin nasional dan sadar kemajuan yang sedang digalakkan, agaknya “kesejatian” itu justru kontraproduktif. Kemandekan dinamika untuk menyoal masa depan yang lebih baik dan subkultur nostalgik cukup merisaukan. Sebab, ternyata berdampak pada penurunan produktivitas dan tidak tumbuhnya kebutuhan berprestasi. Karena itu jangan heran jika di kampung kota maupun di perdesaan kampung, banyak guru “tu”, yakni para guru yang masuknya lebih dari pukul tujuh pulang kerja tak lebih dari jam satu, berharap-harap segera hari Sabtu, dan tidak masuk kerja menjelang tanggal satu.

Untuk memperbaikinya, selain diperlukan perubahan kriteria kesejatian, barangkali sudah saatnya melokalisasi para guru untuk disediai fasilitas bersama. Tentu saja fasilitas bersama produk revolusi telekomunikasi dan ledakan informasi.

Jakarta, HU *Suara Karya*, Sabtu, 25 November 1995



## **PGRI MASA DEPAN DAN MASA DEPAN PGRI**



KETIKA terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal guru-guru sekolah swasta di Jakarta, Surabaya dan Brebes, banyak koran penulis bolak-balik. Siapa tahu ada pernyataan khusus dari organisasi tunggal yang mewadahi para guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hasilnya ternyata nihil. Padahal sebagai satu-satunya organisasi para guru, PGRI mestinya merespon PHK di atas, sebab PHK itu tidak semata-mata berdiri sendiri sebagai fenomena, melainkan terkait dengan integritas dan pola pandang profesi guru.

Sampai di sini, penulis lantas teringat komentar cukup panas dan menantang yang pernah dilontarkan Basyuni Suriamihardja, Ketua Umum PGRI, di tengah berlangsungnya Konferensi Tingkat Pusat PGRI ke-III di Jakarta, September 1993. Kata beliau, seperti dilansir berbagai media massa ketika itu, kalau para guru merasa PGRI tidak bermanfaat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan guru, maka bisa saja PGRI dibubarkan.

Dalam pengamatan penulis, itulah pernyataan paling keras sepanjang kepemimpinannya selama ini di tengah kritik gencar yang dialamatkan ke PGRI. Masalahnya, tak sedikit suara yang menghendaki agar PGRI bisa menjadi organisasi profesi yang profesional, mandiri dan independen agar mampu mengangkat derajat, harkat, dan martabat keprofesian anggotanya.

### **REPUTASINYA MEMUDAR**

Tantangan yang dilontarkan Basyuni, orang nomor satu dalam jajaran PGRI itu, terkesan bernada “patah arang.” Betapa tidak, dalam usianya yang hampir setengah abad, sebenarnya PGRI telah mengukir sejumlah prestasi

mengagumkan. Mulai dari soal pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan, kewanitaan, generasi muda, sampai pada upaya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru anggotanya.

Reputasi baik PGRI dalam keanggotaan dua organisasi guru internasional seperti *World Confederation of Organization of the Teaching Profession* (WCOTP), dan *International Federation of Free Teachers Union* (IFFTU) patut dibanggakan. Termasuk dalam keorganisasian guru regional Asean. Demikian pula halnya dengan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP-PGRI) yang mengelola 5.021 sekolah, mulai dari TK sampai SLTA ditambah 47 perguruan tinggi.

Prestasi spektakuler yang tak lepas dari jerih payah PGRI dalam memperjuangkan guru ialah keberhasilannya meyakinkan pemerintah tentang profesi guru sebagai profesi fungsional dengan lahirnya SK Men-PAN No. 026/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru di Lingkungan Depdikbud. Kendati pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya menggembirakan.

Dalam perkembangan selanjutnya, reputasi PGRI mulai memudar. Kecuali ternoda oleh kasus akut pemotongan tak resmi yang sering dilakukan terhadap gaji dan penghasilan guru, juga secara manajerial PGRI semakin tidak profesional. Sehingga ada yang mempelesetkan PGRI menjadi “Pemotong Gaji guru-guru di Republik Ini.” Ketidaprofesionalan itu tampak dari rontoknya ratusan sekolah yang dikelolanya.

Sudah menjadi rahasia umum, keanggotaan PGRI saat ini sangat homogen. Dari 1,3 juta guru yang menjadi anggota PGRI, mayoritas adalah guru-guru sekolah dasar (SD). Inilah yang menyebabkan sementara tenaga kependidikan bersikap skeptis dan gamang. Mereka beranggapan bahwa PGRI itu merupakan organisasinya guru-guru SD. Kenyataannya memang membuktikan, sampai saat ini lebih dari 300 ribu guru belum menjadi anggota PGRI.

Dari mereka yang belum menjadi anggota PGRI tersebut umumnya adalah guru-guru SLTP dan SLTA serta para dosen di perguruan tinggi. Padahal, kelompok terakhir yang penulis sebut secara yudisial menurut UUSPN No. 2/1989 dan PP No. 39/1992 tentang Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai tenaga pendidik yang diangkat secara khusus dengan tugas utama mengajar.

## **FORMAT KEORGANISASIAN**

Masa depan sebuah organisasi amat bergantung pada para pimpinan dan kualitas anggotanya, tak terkecuali PGRI. Sementara itu harus diakui, menggoyang PGRI hampir-hampir tidak mungkin dilakukan, sebab format

keorganisasian PGRI memiliki dimensi politis yang amat strategis. Menggoyang PGRI sama beratnya dengan menggugat KNPI seperti dilakukan oleh ormas-ormas pemuda beberapa waktu yang lalu.

Kita tahu, kiprah politik PGRI telah ikut membidani orsospol terbesar di Republik ini. Secara historis, aspiratif dan politis, PGRI mempunyai hubungan dengan salah satu kekuatan sosial politik sebagai sesama komponen Orde Baru, baik atas dasar kesamaan prinsip dan strategi perjuangannya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara, maupun dalam orientasinya pada karya dan kekayaan, pembaruan dan pembangunan. Bagi yang kurang memahami makna kehadiran PGRI, hal itu mengesankan PGRI tidak independen (mandiri).

Tidak independennya PGRI tersebut, menjadi salah satu alasan mengapa tak semua tenaga kependidikan mau dan sukarela menjadi anggota PGRI. Dalam kondisi demikian, format keorganisasian PGRI sulit untuk bisa menyentuh kepentingan esensial para guru yang berkaitan dengan pengembangan profesinya. Dalam hal ini, ada keterbatasan gerak langkah yang secara “etik” membatasi PGRI.

## **MASA DEPAN PGRI**

PGRI di masa depan diharapkan lebih memiliki makna progresif. Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah dalam hal mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) menyongsong PJPT II. Tapi, kalau masa depan PGRI tak menjanjikan apa-apa, terutama bagi pengembangan profesionalisme anggotanya, jangan berharap terlalu banyak terhadapnya. Barangkali jika demikian, tak salah kalau orang menyatakan bahwa di masa depan, PGRI akan menjadi satu-satunya organisasi profesional yang mandul. Tak bisa lebih baik, bahkan sama sekali berbeda kualitasnya dengan IDI atau PII, dan organisasi profesi lain yang perkembangan kualitasnya semakin bagus.

Agar masa depan PGRI semakin menjanjikan, banyak langkah bisa ditempuh. Misalnya, melakukan sinergi yang erat antara PGRI, Guru (termasuk guru swasta) dan Dosen. Dengan begitu PGRI akan mempunyai nafas lain. Sebab, hampir tak banyak yang menyadari bahwa profesi keguruan kependidikan pada umumnya, dan upaya meningkatkan kualitas anggota PGRI pada khususnya, berpulang kepada jatidiri PGRI itu sendiri sebagai satu-satunya organisasi profesional para guru (mestinya juga para dosen).

Integritas PGRI di masa depan bisa diukur dari kemampuannya menyasati sekurang-kurangnya tiga tantangan dan hambatan. *Pertama*, hambatan dan tantangan psikologis. Sebagian besar guru masih belum memiliki kesadaran yang mantap tentang pentingnya memiliki organisasi profesi yang sehat, mapan,

dan andal. *Kedua*, hambatan dan tantangan yuridis. Belum ada satu pun regulasi yang dapat mengharuskan setiap guru menjadi anggota PGRI. Belum ada jaminan kemampuan bahwa setiap anggota PGRI akan memperoleh perlindungan hukum dari organisasi sesuai yang diperlukan. *Ketiga*, hambatan dan tantangan profesional; bagaimana menjadikan PGRI sebagai organisasi yang efektif, kokoh, kuat, mantap dan andal.

Untuk dapat mengatasi ketiga hambatan dan tantangan di atas, tampaknya hanya ada satu pilihan: PGRI harus benar-benar menjadi organisasi yang profesional, mandiri dan independen. Karena itu, kita tak perlu membubarkan diri dengan membentuk organisasi baru. Langkah mendasar yang perlu dilakukan ialah, membenahi landasannya, merevisi AD/ART, dan melakukan revitalisasi fungsi-fungsi keorganisasian agar efektif dan efisien, serta melakukan penyegaran kepemimpinan, pola dan sistem manajerialnya.

Barangkali, dengan cara demikian PGRI akan dapat menata kembali kualitas keanggotaannya. Merangkul keseluruhan tenaga kependidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, sampai para dosen di perguruan tinggi. Dalam hal ini, penulis tidak beranggapan bahwa kelompok guru-guru dan dosen non anggota PGRI lebih berkualitas dibandingkan dengan para guru warga PGRI. Hal yang ingin ditekankan di sini, ribuan doktor dan ratusan profesor di perguruan tinggi merupakan sumberdaya potensial yang perlu dirangkul oleh PGRI. Ini suatu tantangan besar bagi PGRI jika memang berkehendak menjadi organisasi profesi yang berkualitas dan mandiri.

Ketika tuntutan terhadap profesi keguruan-kependidikan agar menjadi profesional semakin santer terdengar, rasanya sudah saatnya PGRI dalam Kongres-kongres mengagendakan kemungkinan itu. Sehingga kontrol kualitas terhadap teman sejawat akan mudah dilakukan. Impian agar profesi keguruan-kependidikan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana profesi lain seperti dokter, pengacara, dan yang lain-lain, akan mudah diwujudkan.

Dalam kedunguan dan ketololan penulis yang kenyang akan mitos “pahlawan tanpa tanda jasa”, seringkali penulis mengkhayal bahwa di suatu masa di republik ini akan ada pemakai jasa kependidikan, sehingga ada orangtua murid dan mahasiswa yang menuntut para guru dan dosen karena tak beres memintarkan subjek didiknya; bukan sekadar menuntut tindakan guru yang menyimpang dari norma umum yang juga dilakukan kebanyakan orang.

Di suatu masa penulis juga mengkhayalkan bahwa tak sembarang orang dapat menjadi guru. Hanya mereka yang berkompeten dan mempunyai kualifikasi keguruan-kependidikanlah yang fisibel (layak) menjadi guru. Dan

para guru juga dapat menuntut secara hukum perlakuan tak adil sementara pihak terhadapnya. Dalam kaitan ini, sudah barang tentu PGRI menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan para guru.

Jakarta, HU *Republika*, Selasa, 21 September 1993.



Bab  
3



**PERSPEKTIF OTONOMI  
PENDIDIKAN**





## **PENDIDIKAN DI BAWAH OTONOMI DAERAH**

KEBIJAKAN publik dalam tahun 1994 yang ditempuh pemerintah dan diperkirakan mempunyai dampak luas terhadap pendidikan adalah Otonomi Daerah. Seperti diketahui melalui Kepmendagri No 105/1994, tanggal 3 Oktober 1994 telah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek percontohan pelaksanaan otonomi daerah 26 kabupaten di 26 propinsi pada tahun anggaran 1995/1996 (*Kompas*, 13/10). Implikasi birokratis dari pelaksanaan otonomi daerah antara lain dihapusnya 26 kantor Departemen di Dati II yang direncanakan sebelum 1 April 1995 (*Kompas*, 2/12).

Dalam bidang pendidikan, kantor departemen yang selama ini menaungi lembaga pendidikan formal mulai tingkat kantor wilayah hingga ranting rencananya dihapuskan. Fungsinya digantikan oleh kantor dinas pendidikan di Dati II. Soal teknis apakah sumberdaya manusia (pegawai) yang jumlahnya ratusan ribu itu akan dibebastugaskan ataukah “dialihfungsikan” tentu sudah dipikirkan jauh-jauh hari.

Terpenting dikemukakan adalah kesiapan aparat di daerah di segi etos dan kinerja, mentalitas dan prakarsa serta pemberdayaan masyarakat setempat. Sebab, kondisi daerah tingkat II secara geografis meupun demografis tidaklah sama tingkat kemajuannya. Diferensi kemampuan daerah yang terkadang sangat ekstrem diduga akan membawa akibat tersendiri yang perlu diantisipasi.

### **KONSEP PARADIGMATIK**

Selama ini penanganan SDM (guru), fasilitas belajar, dan keuangan untuk pendidikan dasar di tingkat SD berada di bawah tanggung jawab Dinas P & K (Depdagri). Sementara yang menyangkut kurikulum dan perangkatnya ditangani

oleh Depdikbud. Untuk SLTP dan SLTA semuanya dibawah kendali Depdikbud.

Selama belasan tahun, banyak keluhan datang dari kalangan guru SD. Mulai dari soal hambatan karir, sampai soal membudayanya pemotongan dana-dana pendidikan. Tersebutlah kemudian istilah dualisme pengelolaan pendidikan di tingkat SD.

Menghadapi ragam masalah tersebut, para pakar administrasi pendidikan tak henti-hentinya menyuarakan perlunya pengelolaan pendidikan di bawah satu atap (hanya berada di bawah Depdikbud saja, tidak oleh Dinas P & K).

Dengan otonomi daerah, tentu saja konsep satu atap di bawah kendali Depdikbud menjadi gugur. Seluruh pengelolaan pendidikan, mulai dari TK hingga SLTA (apakah perguruan tinggi juga?) akan ditangani oleh Dinas P & K Dati II. Akankah otonomi daerah berkontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan dan mengurangi disparitas mutu pendidikan antardaerah?

Tak mudah menjawab pertanyaan itu. Soalnya, otonomi daerah merupakan konsep paradigmatik dimana komponen yang menyertainya sebagai sebuah sistem belum jelas benar. Pola ketergantungan antarkomponen belum bisa diprediksi standardisasinya, sekaligus belum diperikan secara rinci.

Kalangan yang optimis berpandangan, pendidikan di bawah otonomi daerah akan meningkatkan mutu akuntabilitas pengelolaan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Prakarsa administrator pendidikan di daerah akan tumbuh kembang menggemibirakan tanpa menunggu instruksi dan konsultasi instansial ke atas. Ketatausahaan pendidikan pun akan mengalami kelancaran dari yang selama ini terjadi mengingat pendeknya meja birokrasi.

Sementara kalangan yang optimis justru berpandangan lain. Otonomi daerah akan mengukuhkan subkultur arogansi kekuasaan akibat belum otonomnya perilaku institusi kependidikan. Bahkan ada kemungkinan makin intensifnya rongrongan terhadap kewibawaan pendidikan melalui penyalahgunaan fungsi administratif. Kecenderungan merasa paling berkuasa di kalangan pegawai Dinas P & K sulit bisa dihindari. Sehingga derajat kebergantungan para praktisi pendidikan dasar dan menengah akan menimbulkan dampak tidak sehatnya iklim edukatif.

Beberapa saran cukup menarik untuk menjembatani ketidaksiapan prakarsa otonom institusi pendidikan di daerah dikemukakan Sudarwan (1994) antara lain: (1) segera menggantikan kultur sentralisasi menjadi kultur desentralisasi dengan menetapkan kriteria kinerja dan prestasi lembaga pendidikan berdasar potensi lokal; (2) hendaknya masyarakat di daerah mengambil pilihan mengenai wujud sumbangsih langsung bagi kepentingan pendidikan sesuai keinginannya;

(3) perlunya ditumbuhkembangkan sikap keberanian mengambil keputusan akibat perampangan instansial yang diduga meluas ke berbagai bidang; serta (4) tetap dipertahankannya subsidi silang atau subsidi penunjang otonomi daerah untuk menghindari disparitas mutu.

## MAJELIS SEKOLAH

Teoritis, pelaksanaan otonomi daerah akan makin mempercepat tumbuhnya masyarakat *Coppoler* (*community participation on policy of education resources*), yakni masyarakat yang sangat aktif berpartisipasi terhadap kebijakan pendidikan. Tapi, jika mentalitas aparat kependidikan tetap dalam kondisi seperti sekarang, maka akibatnya justru sebaliknya.

Agar masyarakat setempat memiliki rasa percaya diri dan tanggung-jawab yang besar, pemberdayaannya perlu segera ditumbuhkembangkan. Untuk itu perlu diperhatikan dua peristiwa penting yang terjadi tahun 1994 sebelum otonomi daerah dilaksanakan, yakni diberlakukannya kurikulum 1994 dan dicanangkannya wajib belajar pendidikan dasar (WBPD) 9 tahun.

Kurikulum 1994 kita ketahui mengintroduksikan sistem pendidikan ganda dengan keterlibatan optimal kalangan persekolahan dengan kalangan dunia usaha dan masyarakat. Untuk menjamin optimalisasi itu, sekaligus menjamin wewenang masing-masing pihak, diperlukan instrumen lain yang dapat berfungsi sebagai badan pengendali, sekaligus sebagai supervisor.

Sebagai langkah persiapan, Kanwil Depdikbud dan Kandep-kandepnya sebelum dihapuskan, bekerjasama dengan Dinas P & K, Kadinda, asosiasi profesi, kalangan industri, organisasi serikat pekerja, serta instansi terkait bertanggungjawab mempersiapkan pembentukan majelis sekolah sebagaimana disarankan almarhum Ki Suratman. Majelis sekolah inilah yang akan berfungsi merumuskan “cetak biru” program belajar mengajar dan praktik magang di daerah untuk kemudian diserahkan kepada Dinas P & K Dati II.

Guna mengerem laju ketidakberesan pengelolaan pendidikan oleh aparat Dinas P & K Dati II, majelis sekolah sekaligus berfungsi mengawasi pelaksanaannya. Inilah bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yang secara demokratis mendekati ideal. Majelis sekolah, merupakan satu dari dua konsekuensi yang perlu dilaksanakan sebelum aturan baku otonomi daerah diberlakukan.

Konsekuensi lain, aparat Kandepdikbud, cabang dinas P & K beserta aparat pemda tingkat II sudah saatnya memulai melakukan pendekatan intensif dan terbuka guna merangkul kalangan dunia usaha. Terbuka dalam arti menyadari bahwa tidak mungkin persekolahan yang berada dalam tanggung jawabnya

mampu secara absolut menghasilkan lulusan berkualitas dan terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Mulai memetakan konsep kooperasinya dengan menetapkan skala prioritas. Tentu saja prioritas dimaksud harus memperhatikan kepentingan regional dan nasional dalam hal persekolahan.

Jakarta, HU. *Kompas*, Senin, 19 Desember 1994



## PERSPEKTIF OTONOMI PENDIDIKAN (DASAR DAN MENENGAH)



*"Persoalan politik dan persoalan-persoalan masing-masing negara berbeda-beda, akan tetapi semuanya menghadapi isu yang sama seperti stabilitas ekonomi, reformasi kesejahteraan dan pendidikan."*

(Lionel Jospin, PM. Perancis, 1999)

*"Desentralisasi merupakan tema yang harus dilaksanakan dalam bidang pendidikan abad ke-21. Selain karena jumlah sekolah yang harus dikelola Depdiknas di seluruh nusantara sangat besar, juga karena UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan kenyataan yang mengandung nilai dan norma baru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan."*

(Dr. Budiono, Kepala Balitbang-Depdiknas, 1999)

MENJELANG pergantian abad dan kehadiran milenium ketiga, dunia pendidikan era Indonesia Baru diharuskan memulai *entry point* reformasi berbekal dua dokumen penting yang diperkirakan berdampak langsung pada sistem dan proses pendidikan nasional. Dokumen pertama adalah rekomendasi Bank Dunia (World Bank) terhadap pendidikan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 18651-IND Bank Dunia bertajuk *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, edisi 9 Desember 1998. Satu di antara beberapa rekomendasi dalam dokumen tersebut ialah tekanan kepada pentingnya desentralisasi pendidikan. Maksudnya, pengelolaan pendidikan nasional yang semula diatur secara sentral oleh pemerintah pusat, sudah saatnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah otonom. Desentralisasi pendidikan inilah yang kemudian populer dengan sebutan otonomi pendidikan. Dokumen kedua ialah Undang-undang (UU) Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini menetapkan soal otonomi daerah di mana kabupaten dan kotamadya menjadi basis pengelolaan pemerintahan daerah otonom.

Konsep dan format otonomi daerah yang lebih nyata memungkinkan pemerintah daerah berbuat lebih banyak dalam berbagai bidang – dengan beberapa pengecualian seperti Hankam, kebijakan ekonomi, fiskal dan anggaran, hubungan dan politik luar negeri – termasuk bidang pendidikan. Terkait dua dokumen tersebut, suka tidak suka, mau tidak mau, pengelolaan pendidikan mesti didesentralisasikan atau diotonomikan. Persoalannya, siapkah pemerintah daerah mengambil-alih pengelolaan pendidikan berikut segala konsekuensi dan implikasinya? Informasi mutakhir apa saja yang seyogyanya diacu pemerintah daerah sebagai dasar guna mengoptimalkan potensi inisiatif lokal agar pengelolaan pendidikan dan hasil-hasilnya kompatibel dan relevan dengan situasi lokal sekaligus menjawab tuntutan global?

Analisis berikut secara sengaja hanya membatasi pada opsi dan implikasi strategis otonomi pendidikan dasar dan menengah di mana pemerintah daerah berkepentingan langsung. Sementara otonomi pendidikan tinggi tidak disinggung karena memerlukan pembahasan tersendiri mengingat *rule of game*-nya yang berbeda, yakni PP No 60 dan 61 Tahun 1999; sementara pelaksanaannya baru akan diujicobakan pada tahun akademik 2000/2001 mendatang di empat perguruan tinggi negeri, yakni UI, Jakarta, IPB, Bogor, ITB, Bandung, dan UGM, Yogyakarta dengan nama PT-BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara).

## PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Ucapan Lionel Jospin sebagaimana disampaikannya dalam pertemuan enam pemimpin dunia anggota klub “Jalan Ketiga” di Florence, Italia pada Minggu, 21 November 1991 urgen dikutip pertama dengan maksud memberi tekanan bahwa persoalan pendidikan bukanlah semata-mata berada dalam perspektif nasional, apalagi lokal (tentang “Jalan Ketiga, lihat Giddens, 1998).<sup>1</sup> Pendidikan adalah bentuk layanan publik sebagai bagian dari *welfare state* yang dimensinya universal. Karenanya, perspektif internasional setidaknya-tidaknya penting menjadi bagian dari segala pertimbangan dan kebijakan pendidikan.

Perspektif internasional ditekankan mengingat dewasa ini tidak sejengkal pun wilayah di bumi ini yang tidak memiliki kaitan global. Dalam hubungan tersebut, ada beberapa determinan yang layak mendapat perhatian serius. Determinan pertama adalah intensitas revolusi geostrategis. Menurut perkiraan sebuah lembaga pemikiran asal Amerika Serikat, Institute for National Strategic

<sup>1</sup> “Jalan Ketiga” adalah seperangkat (*set*) gagasan yang masih sangat baru – masih terus berubah – mengenai bagaimana mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi seiring dengan keadilan sosial. Lebih jauh periksa gagasan “Jalan Ketiga” Anthony Giddens, 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Malden USA: Blackwell Publisher Ltd.

Studies (INSS), di dunia ini telah terjadi perubahan besar, terutama setelah Perang Dingin sedang digantikan oleh hubungan multipolar asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat yang mengendalikan jaringan internasional. Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis global sebagaimana diungkapkan INSS ialah kemenangan gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (*democracy market*).<sup>2</sup>

Determinan kedua ialah revolusi teknologi informasi, yakni kemajuan komunikasi global sebagai pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan politik dan ideologi, kultur, bahkan nilai-nilai. Revolusi teknologi komunikasi yang oleh Naisbitt<sup>3</sup> dan Toffler<sup>4</sup> jauh-jauh sudah diramalkan kehadirannya menyebabkan eksplosif informasi luar biasa, sehingga Stewart tidak merasa ragu sedikit pun untuk menyebut abad mendatang sebagai abad informasi yang konteksnya melahirkan perekonomian, perusahaan dan pekerja berbasis pengetahuan. Jika akhir abad ke-20 ditandai oleh kuatnya pengaruh teori modal manusia, maka awal abad ke-21 dan seterusnya akan ditandai oleh kuatnya karakteristik teori modal intelektual.<sup>5</sup>

Determinan ketiga adalah revolusi dalam pemerintahan, yakni adanya kecenderungan penyusutan wilayah kontrol negara yang beralih ke pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumberdaya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis. David Osborne dan Plastrik<sup>6</sup> dengan gamblang telah menunjukkan contoh-contoh konkret bagaimana desentralisasi pemerintahan terjadi di banyak negara maju di dunia. Layaknya mengikuti teori domino, Indonesia Baru pun agaknya sedang bergulat untuk menuju ke arah tercapainya revolusi tersebut jika tidak ingin mengalami disintegrasi.

<sup>2</sup> Institute for National Strategic Studies, 1997. *Strategic Assessment*. Dalam laporan itu, INSS membagi-bagi tiga kategori negara, yakni negara-negara sukses melaksanakan demokrasi ekonomi pasar; negara-negara transisi dari otoritarian menuju demokrasi dan berisiko membeku; serta negara-negara bermasalah dengan problem etnisitas, separatisme, dan lain-lain.

<sup>3</sup> Uraian panjang soal ini dapat ditelaah dalam John Naisbitt, 1994. *Global Paradox*. Colorado: William Morrow and Company, Inc. Juga dalam *Megatrends 2000* edisi tahun 1990 oleh penulis yang sama.

<sup>4</sup> Eksplosif informasi akibat revolusi teknologi komunikasi justru menimbulkan banyak krisis, baik fisik maupun psikologis sebagai akibat *over load* pada sistem adaptif manusia dan proses pengambilan keputusan. Alvin Toffler, 1989. menguraikan secara gamblang dalam *The Third Wave*. New York: Bantam Books.

<sup>5</sup> Modal intelektual adalah materi intelektual seperti pengetahuan, informasi, hak kepemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan baru. Lebih jauh tentang itu periksa Thomas A. Stewart, 1998. *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. Manhattan: Doubleday.

<sup>6</sup> Periksa David Osborne dan Peter Plastrik, 1997 dalam buku menantang berjudul *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Massachusetts Menlo Park: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Ketiga determinan tersebut merupakan unsur-unsur kapitalisme yang dipelopori Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Sasaran pokoknya tentu saja adalah mengendalikan negara-negara periferal yang baru berkenalan dengan sistem kapitalisme. Memang harus diakui, gelombang kapitalisme telah memberikan “angin surga” bagi negara-negara di Asia dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Namun karena negara-negara itu melupakan satu hal, yakni pengembangan sumberdaya manusia, maka sejak pertengahan 1997 konsekuensi kapitalisme telah menimbulkan keguncangan sosial, ekonomi, bahkan politik. Sektor swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kendali pada akhirnya menjadikan banyak negara di Asia, termasuk Indonesia nyaris bangkrut.

Padahal, KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark sebelumnya telah mengingatkan, sesungguhnya tidak ada yang lebih mendasar dilakukan untuk mencapai kemajuan sosial daripada pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Rekomendasi tersebut mestinya disadari betul oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju. Jelasnya, sebuah adopsi inovasi suatu sistem tidak begitu saja gampang diterapkan tanpa persiapan sumberdaya manusia yang terlibat dalam manajemen sistem tersebut.

## **IMPLIKASI STRATEGIK**

Sebuah sistem secara implisit dan eksplisit mempersyaratkan integrasi antarkomponen, tidak terkecuali sistem otonomi pendidikan. Oleh karenanya, otonomi pendidikan dasar dan menengah mengandaikan dimulainya pemberian peran lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kotamadya sebagai basis pengelolaan pendidikan. Guna mencapai sasaran optimal, diperlukan persiapan sistemik, baik yang menyangkut mekanisme kerja maupun tatanan organisasi pengelolaan pendidikannya. Jika soal suprastruktur bisa diatasi dengan pemanfaatan potensi sumberdaya fisik dan manusia yang telah ada, maka soal infrastruktur hendaknya sudah dipikirkan dan dipersiapkan dari sekarang.

Infrastruktur dimaksud sekurang-kurangnya perlu mencakup tiga hal, yakni: (1) ketersediaan lembaga birokrasi (organisasi) yang bertugas melaksanakan kebijakan dan mengelola pendidikan; (2) lembaga normatif nonstruktural yang bertugas memberikan pemikiran dan saran sebagai bahan pertimbangan kebijakan pendidikan kepada pimpinan daerah; (3) lembaga perencana yang bertugas menyigi potensi wilayah guna menyiapkan pembagian kawasan pengembangan sekaligus menyusun kurikulum muatan lokal.

Infrastruktur pertama haruslah mempunyai ciri integral dalam tugas, tidak saling tumpang tindih dan tidak memberi peluang terjadinya dualisme pengelolaan pendidikan sebagaimana berlangsung selama ini. Opsi strategik yang mudah ditempuh ialah melebur Kantor Depdiknas, Kantor Dinas P dan K, Bagian Pendidikan Kantor Depag dan lain-lain menjadi satu unit kerja baru. Unit kerja baru inilah yang kelak bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun rencana sasaran; program kerja pendidikan dan kebudayaan; melakukan monitoring dan evaluasi; perencanaan rekrutmen, penempatan dan pembinaan tenaga kependidikan; serta alokasi anggaran program pendidikan dan kebudayaan.

Infrastruktur kedua, yakni lembaga normatif nonstruktural haruslah memiliki ciri independen dalam tugasnya. Lembaga ini mesti melibatkan masyarakat luas guna memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Lembaga ini dapat dibentuk berdasarkan komposisi wakil kalangan usahawan, tokoh masyarakat dan agama, organisasi nonpemerintah (LSM), unsur-unsur perguruan tinggi dan pakar pendidikan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan daerah namun independen dalam tugas. Independensi sangat penting guna menjamin objektivitas dan transparansi, sekaligus menjamin munculnya ide-ide kreatif, inovatif dan korektif tanpa harus diintervensi oleh kekuatan politik dan bebas dari rasa takut.

Sementara infrastruktur ketiga, yakni lembaga perencana haruslah memiliki ciri profesional dalam tugasnya. Guna menjamin profesionalisme tersebut, sekaligus menghindari pola-pola KKN dalam menentukan keanggotaannya, dapat dilakukan rekrutmen secara terbuka melalui seleksi ketat sesuai keahlian yang dibutuhkan. Karena tidak setiap daerah memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengisi lembaga ini, maka kesempatan terbuka bagi sumberdaya manusia di luar daerah. Mengingat sifatnya yang demikian, maka lembaga ini tidak harus lembaga tetap, namun dapat bersifat temporer (*ad-hoc*) melalui sistem kontrak agar efisiensi biaya, keakurasian tugas dan objektivitas faktual dapat tercapai optimal.

Dalam penentuan personal infrastruktur dimaksud, pimpinan daerah hendaknya mengedepankan prinsip bahwa masa depan pendidikan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen warga daerah. Dan kemajuan pendidikan daerah adalah cermin kemajuan pendidikan bangsa.

## **ORIENTASI PENDIDIKAN**

Menggagas otonomi pendidikan dasar dan menengah berarti menggagas filosofi dan pertanyaan elementer hendak dibawa ke mana sebenarnya

sumberdaya manusia di daerah melalui pendidikan. Hal itu berarti, orientasi pendidikan, khususnya menghadapi milenium ketiga yang sangat kompetitif harus dipahami betul konteks dan nuansanya agar kekeliruan konvensional dalam pendidikan persekolahan selama ini tidak terjadi lagi. Persoalannya terletak pada sudut pandang tentang pendidikan, sebagai konsep sosial atau sebagai konsep ekonomi. Namun seiring dengan merebaknya teori “Jalan Ketiga”, barangkali yang paling moderat adalah menempatkan pendidikan sebagai konsep sosial, sekaligus sebagai konsep ekonomi.

Terkait perspektif internasional di muka, desentralisasi atau otonomi pemerintahan yang terjadi sudah demikian luasnya sehingga mencakup pula upaya *reinventing government*.<sup>7</sup> Sementara di bidang desentralisasi atau otonomi pendidikan, orientasi pendidikan juga sudah mengarah pada pelaksanaan *reinventing education*.<sup>8</sup> Ketika banyak negara bagian di Amerika Serikat begitu antusias memandang pendidikan sebagai konsep ekonomi dan menerapkannya dalam sistem pendidikannya, pada saat yang hampir bersamaan masyarakat AS menghendaki adanya perubahan dalam dunia ekonomi dan sosial. Sebab, manakala pendidikan diarahkan sesuai dengan esensi pasar di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja lulusan pendidikan dua-duanya ada pada pihak pemakai; baik guru maupun peserta didik berada dalam perangkap sehingga menghadapi apa yang disebut sebagai *stalemate* (skakmat). Masyarakat AS menghadapi kenyataan pahit dalam masalah permintaan dan penawaran.<sup>9</sup>

Teori “Jalan Ketiga” akhirnya menemukan relevansinya dengan kemunculan berbagai *Magnet Schools*, yakni sekolah-sekolah yang dengan kekuatan kurikulum dan organisasinya mempersiapkan para siswanya baik untuk memperoleh karir yang spesifik maupun untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Sekolah seperti ini merupakan sekolah pilihan karena reputasinya yang menonjolkan kualitas tinggi. Sekolah seperti inilah yang diharapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dituntut oleh kemutakhiran zaman.

Apabila otonomi pendidikan diorientasikan untuk menghadirkan *Magnet Schools* di daerah sehingga menarik minat daerah-daerah lain bahkan kemungkinan menarik minat konsumen pendidikan manca negara, maka banyak implikasi serius yang mesti dilakukan. Satu di antara yang paling strategis ialah menyederhanakan muatan kurikulum nasional yang selama ini tidak banyak

<sup>7</sup> Istilah itu dikemukakan bersama Ted Gaebler, ditulis David Osborne, 1992. *Reinventing Government*. Readings, USA: Addison-Wessley Longman, Inc.

<sup>8</sup> Pertama kali istilah ini diintroduksi oleh Louis V. Gerstner Jr.; Roger D. Emerald; Dennis Philips Doyle dan William B. Johnson, 1995. *Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Schools*. New York: Pinguin Books USA, Inc.

<sup>9</sup> Gerstner, dkk. Menguraikan panjang lebar ihwal kenyataan pahit tersebut dalam uraian mengenai *The Fundamentals of Supply and Demand*. *Ibid*.

bermanfaat. Kurikulum nasional mestinya hanya mengharuskan penanaman konsep-konsep ilmu pengetahuan yang universal seperti berhitung dan aritmetika, ilmu-ilmu bahasa dan sastra, ilmu-ilmu alam dan lingkungan serta ilmu-ilmu sosial. Selebihnya adalah kurikulum muatan lokal. Pendidikan agama, Kertangkes, Orkes, Bahasa Daerah dan PPKN mestinya sudah di-*passing out* dari kurikulum nasional untuk selanjutnya diserahkan pada PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan keluarga.

Kurikulum muatan lokal seperti agribisnis dan agroindustri, budi daya perikanan, industri kerajinan, industri kerumahtanggaan, industri kepariwisataan, kewirausahaan dan koperasi, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing penting mendapat prioritas jika efektivitas otonomi pendidikan dasar dan menengah diinginkan optimal. Kecuali perubahan muatan kurikulum, perubahan mendasar harus pula terjadi pada organisasi sistem instruksionalnya. Organisasi kurikulum yang berbasis *subjects matter* (pendekatan mata pelajaran) terbukti tidak efektif. Hal itu disebabkan koneksitas antarvariabel yang sangat tinggi dalam kehidupan riil sosial, ekonomi, bahkan politik. Karenanya, seperti dikatakan Toffler, menyusun kurikulum untuk kebutuhan saat ini mestinya ditinggalkan dan digantikan dengan menyusun kurikulum untuk kebutuhan masa depan.<sup>10</sup> Misalnya saja kurikulum berbasis kompetensi (*Competence-Based Curriculum*).

Berlarut-larut, lama dan sulitnya Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis yang terjadi dibanding negara-negara lain seperti Korsel, Thailand, Malaysia, dan Singapura sebagai contoh, menunjukkan betapa lemah orientasi pendidikan di Indonesia. Beberapa fenomena bisa disebut, misalnya, hanya empat persen pengusaha Indonesia yang berpendidikan tinggi; 70 persen di antaranya hanyalah lulusan SD (termasuk DO SD).<sup>11</sup> Meskipun ada sekitar 1.400 perguruan tinggi di Indonesia, kenyataannya hanya sekitar 20 persen saja yang layak disebut perguruan tinggi. Paling banter hanya 39 persen.<sup>12</sup>

Kelemahan orientasi pendidikan dan pembangunan SDM mengakibatkan modal intelektual yang dimiliki Indonesia sangatlah minim. Modal intelektual, kata Menteri Pendidikan Singapura Teo Chee Hean, dapat digambarkan secara gamblang, yakni dengan mencermati rata-rata lama orang dewasa mengenyam pendidikan sekolah – di beberapa negara berarti mengenyam pendidikan

<sup>10</sup> Periksa pula Alvin Toffler, 1974. *Future Shock*. New York: Bantam Books.

<sup>11</sup> Keterangan ini disampaikan oleh mantan staf ahli Menaker RI, M. Djuhari Wirakartakusumah di Jakarta kepada Kantor Berita *Antara*, 16 Oktober 1997.

<sup>12</sup> Disampaikan mantan Mendikbud Juwono Sudarsono dalam “Seminar Strategi Pendidikan Pasca Reformasi” di Kampus Atma Jaya, Ujungpandang. Kompas, 7 November 1998. Juga keterangan Ketua Umum BM-PTSI Prof. Dr. Bun Yamin Ramto kepada wartawan di Jakarta. Harian Umum *Kompas*, 7 November 1998.

menengah, sementara di Korsel berarti mengenyam pendidikan tinggi – dan rasio jumlah peneliti di antara 10 ribu tenaga kerja.<sup>13</sup>

Berdasar kedua parameter itu saja, Indonesia jelas sangat tertinggal. Rata-rata orang dewasa mengenyam pendidikan sekolah hanya 4,1 tahun. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 7,8 tahun atau Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 10,8 tahun dan 12,4 tahun. Sementara jumlah peneliti di Indonesia hanya 2,8 orang setiap 10 ribu tenaga kerja. Kalah jauh dengan Singapura, Jepang dan AS yang mencapai 60, 109 dan 75,2 peneliti untuk setiap 10 ribu tenaga kerja.

Guna mendekati kesetaraan dengan gerak laju kompetisi global, sekaligus memperkaya modal intelektual bangsa, maka kemungkinannya bukan semata-mata dicapai melalui politik pendidikan seperti kewajiban belajar. Lebih dari itu ialah bagaimana membuat setiap warga bangsa merasa kerasan di sekolah. Jalan yang dapat ditempuh tentu saja cukup banyak. Satu di antaranya ialah menyediakan pendidikan yang memiliki orientasi sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhan daerah lokal, sekaligus mampu menjawab tantangan nasional dan dunia internasional. Itulah agaknya yang hendak dicapai melalui semangat otonomi pendidikan dasar dan menengah.

*Makalah*, disampaikan pada “Rapat Kerja dan Seminar Sehari” di STAIN-Jember, Senin, 29 November 1999.

---

<sup>13</sup> Untuk hal ini periksa tulisan Fitrisia Martisasi, 1998. “Singapura dan Modal Intelektual: Modal Otak, Bukan Otot.” *Harian Kompas*, 13 Desember 1998.



## PARADIGMA BARU PENGELOLAAN SEKOLAH



*“The school somehow ignores the world outside, is aloof to it, and does not give any guidance as to how to behave there. School does not even offer the possibility to begin to reflect critically, or logically, or rationally about life outside its fence. Its students are filled with rules to follow, with values to adhere to, but their conscience has not been trained. They do not know how to take responsible or moral decisions.” (Mulder, 2000).*

MENTERI Keuangan Amerika Serikat, Lawrence Summers, dalam pembukaan *Economic and Social Conference (Ecosoc)* yang diketuai oleh ahli Indonesia Makarim Wibisono di New York (*Kompas*, 7 Juli 2000) mengatakan, ada lima faktor penyebab kegagalan negara berkembang meraih kemajuan ekonomi. Salah satu di antaranya ialah kelemahan dalam investasi pendidikan. Hal itu mengisyaratkan betapa penting setiap negara berkembang (termasuk Indonesia tentunya) memperhatikan prioritas investasi pendidikan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas, selain menyangkut nominal besar, juga proporsi memadai, yakni berapa persen dari *Gross National Product (GNP)* per kapita dan atau berapa persen dari anggaran belanja nasional. Sedangkan kualitas berkaitan dengan untuk apa anggaran sebesar itu dibelanjakan.

Pendidikan dan pelatihan hampir-hampir telah menjadi mantra baru para politikus demokrat sosial yang umumnya berada di negara-negara maju. Tony Blair - Perdana Menteri Inggris - misalnya, menggambarkan tiga prioritas utama pemerintahannya, yakni: pendidikan, pendidikan dan pendidikan” (Giddens, 1999). Kebutuhan peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan tampak jelas dalam sebagian besar negara industrial, khususnya sejauh menyangkut kelompok penduduk miskin. Tidak dapat dipungkiri, populasi terpelajar dicita-citakan oleh masyarakat manapun, sehingga investasi dalam pendidikan

merupakan keharusan bagi setiap pemerintahan di dunia saat ini. Sebab, selain akan menjadikan mobilitas sosial masyarakat secara horizontal dan vertikal semakin dinamis, sekaligus merupakan basis penting “redistribusi kemungkinan.” Tetapi, gagasan bahwa pendidikan dapat secara langsung mengurangi ketimpangan berbagai hal perlu ditanggapi secara kritis. Sebab banyak riset perbandingan di Amerika Serikat dan Eropa membuktikan bahwa pendidikan cenderung merefleksikan ketimpangan ekonomis yang lebih luas dan semua itu harus diatasi dari akarnya.

Persoalannya ialah, apa dan di mana sebenarnya akar permasalahan pendidikan sehingga hampir setiap negara maju terus menerus memprioritaskannya? Sejauh menyangkut pendidikan sekolah, tidak satu pun negara maju memberikan solusi unilateral yang absolut. Sebab mereka agaknya menyadari bahwa pendidikan merupakan *never ending process*, namun terus menerus memerlukan sentuhan intelektual dan pembaruan kinerja bagi setiap pengelola dan praktisinya, sehingga dalam kurun waktu tertentu selalu muncul paradigma-paradigma baru yang relevan dan urgen dilaksanakan. Tentu saja relevansi dan urgensinya sangat bergantung pada konteks problematika kekinian dan kemasadepanan yang dihadapi oleh lingkungan pendidikan sekolah di mana sekolah itu berada, baik makro maupun mikro-ekologis.

Untuk sampai pada referensi mengenai hal itu, agaknya penting dimengerti bahwa pengelolaan pendidikan di masa lalu yang sangat sentralistik telah menempatkan sekolah hanya sebagai penyelenggara pendidikan. Sekolah di masa lalu (bahkan tilasnya hingga kini masih sangat kuat) hanya dituntut mematuhi dan pada hampir semua tataran sudah terbiasa menunggu petunjuk yang kadangkala sulit diterjemahkan karena ada kesenjangan yang lebar dalam berbagai hal. Meskipun tidak sama potensi dan kendalanya, hampir seluruh sekolah, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat memiliki beban yang sama untuk memikul target nasional berupa pencapaian: pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sekolah, efektivitas dan efisiensi pendidikan, kualitas pendidikan, dan relevansi pendidikan.

Keempat sasaran tersebut ternyata tidak didukung oleh fundamental pendidikan yang memadai, sehingga unsur-unsur seperti otonomi, akuntabilitas publik, evaluasi dalam bentuk akreditasi, dan manajemen sekolah nyaris hanya menjadi wacana belaka. Padahal, benang merah yang dapat ditarik dari setiap referensi pembaruan pendidikan sekolah di berbagai belahan dunia berkuat pada masalah tersebut, terutama bagaimana suatu sekolah mampu memamanajementi setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya (lihat Pennell & David, 1998).

Kemampuan untuk memanejemeni perubahan, melakukan analisis dan sistesis sehingga menghasilkan konkretisasi aplikatif atas program pendidikan itulah yang dimaksud dengan paradigma baru pendidikan. Guna mendapatkan paradigma yang diinginkan, diperlukan suatu kerangka pengembangan yang terdiri atas sejumlah fase dalam bentuk diskusi dan aksi.

Secara akademis, tentu saja banyak paradigma baru pendidikan yang mesti dikuasai setiap pengelola dan praktisi pendidikan. Namun, dalam kaitan pelaksanaan otonomi pendidikan ke depan, maka pembahasan akan difokuskan pada tiga hal saja, yakni paradigma baru tujuan pendidikan, paradigma baru praktik profesional dan paradigma baru pengelolaan pendidikan sekolah. Paradigma baru ini tentu saja merujuk pada paradigma umum (*general paradigm*) sintetik-sistemik sebagai kontras dari paradigma lama fungsional dan sosialisasi.

## **TUJUAN PENDIDIKAN**

Banyak substansi dan muatan pendidikan sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan pendidikan - sebut misalnya UU-Sisdiknas No. 2/1989 berikut berbagai Peraturan Pemerintah yang menyertainya - sudah tidak sejalan lagi dengan kondisi kekinian dan kemasadepanan alias kedaluwarsa. Kedaluwarsa dalam arti tidak lagi akomodatif bagi kepentingan perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional, dan oleh karenanya relevan direvisi (Mutrofin, 2000). Salah satu di antaranya ialah perihal tujuan pendidikan. Diakui atau tidak, substansi dan isi tujuan pendidikan nasional sebagaimana bisa dikutip dari berbagai naskah legal kebijakan pendidikan nasional dapat dikatakan sangat konvensional (Supratiknya, 2000).

Seluruh ciri dan atau kemampuan sebagai tujuan pendidikan yang disebut dalam peraturan-peraturan tersebut praktis dapat digolongkan ke dalam tiga ranah atau matra kemampuan menurut taksonomi tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada dasa warsa enam puluhan, yakni bidang kognitif (kecerdasan, pengetahuan), afektif (nilai, sikap, budi pekerti) dan psikomotorik (kesenian, keterampilan). Semua kemampuan tersebut merupakan jenis kemampuan yang sangat umum dan elementer dalam makna tidak kontekstual, meskipun ada sedikit perbedaan baik tujuan pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada prinsipnya, cara merumuskan tujuan pendidikan seringkali tidak dapat dipisahkan dari substansinya. Sejumlah pakar pendidikan menyebut, tujuan pendidikan semestinya merupakan aktivitas manusia yang menopang berfungsinya masyarakat, termasuk fungsionalisasi individu di tengah masyarakat yang dapat diperoleh lewat media pembelajaran. Oleh karenanya, setiap tujuan

pendidikan lazimnya dirumuskan dalam pernyataan yang melukiskan aneka jenis aktivitas atau kinerja manusia yang spesifik. Namun hal itu tidaklah sama dengan perumusan tujuan instruksional khusus sebagaimana dikenal dalam PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) selama ini.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka otonomi pendidikan meniscayai adanya perbedaan tujuan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan antartujuan pendidikan di satu sekolah dengan tujuan pendidikan di sekolah lain. Perbedaan tujuan pendidikan tersebut dimungkinkan karena perumusannya didasarkan atas *need assesment* secara komprehensif terhadap masyarakat lingkungannya tanpa harus kehilangan koneksitas global yang menyertai kehidupan universal sebagaimana terjadi dewasa ini dan di masa depan. Sebagai bahan perbandingan untuk pengayaan, berikut ini dikemukakan contoh tujuan-tujuan pendidikan yang kontekstual dan dianut sebagai acuan oleh sejumlah sekolah di berbagai negara.

*Pertama*, Murname & Levy (1996, seperti dikutip oleh Zamroni, 1997) mengemukakan bahwa kehidupan modern sekarang ini menuntut dikembangkannya seperangkat kemampuan atau keterampilan baru dalam diri peserta didik. Keterampilan-keterampilan baru tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu: (1) *the hard skills*, meliputi penguasaan dasar-dasar matematika, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan membaca cepat; (2) *the soft skills*, meliputi kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta kemampuan menyampaikan gagasan secara jernih baik lisan maupun tertulis; (3) *computer literacy*, yakni kemampuan memahami bahasa komputer setidaknya yang paling sederhana.

*Kedua*, Wisnubroto Hendrojuwono (seperti dikutip Supratiknya, Faturochman dan Sentot Haryanto, 2000) mengemukakan bahwa terdapat visi lain yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pribadi peserta didik hingga ke kelas dunia yang meliputi: (1) penguasaan pengetahuan dan gagasan mutakhir yang terbaik; (2) kemampuan kerja dengan standar paling tinggi dalam berbagai pekerjaan dan berbagai tempat; (3) kemampuan menjalin hubungan dan akses terhadap berbagai sumber yang ada di dunia baik secara perorangan maupun kelembagaan.

*Ketiga*, Unesco (Badan Kerjasama Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan PBB), sebagaimana dikutip Kompas (2000) mengemukakan paradigma baru tujuan pendidikan untuk abad ke-21 yang memuat nilai-nilai sekaligus sasaran hasil yang disarankan agar dicapai lewat praksis pendidikan. Paradigma baru tersebut meliputi lima tujuan pendidikan, yaitu: (1) *learning how to think* atau belajar bagaimana berfikir, yakni kemampuan menumbuhkan rasionalitas serta kemampuan dan keberanian untuk bersikap kritis dan mandiri; (2) *learning how*

*to do* atau belajar hidup, yakni keterampilan dalam keseharian hidup termasuk kemampuan memecahkan setiap masalah yang dihadapi secara pribadi; (3) *learning to be* atau belajar menjadi diri sendiri, yakni kemampuan untuk tumbuh berkembang sebagai pribadi mandiri dan penuh rasa harga diri; (4) *learning how to learn* atau belajar bagaimana cara belajar, yakni mengembangkan sikap-sikap yang kondusif untuk belajar seumur hidup seperti sikap kreatif, eksploratif dan imajinatif; dan (5) *learning how to live together* atau belajar hidup bersama orang lain dan lingkungan sekitar, yakni pembentukan kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain, penanaman tanggung jawab atas kelestarian lingkungan, pengembangan sikap toleransi, cinta damai dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia.

Jika dicermati serius, ketiga contoh tujuan-tujuan pendidikan di atas merupakan paradigma baru yang spesifik dalam arti menunjuk pada gugus kompetensi konkret tertentu, namun sekaligus kompleks dalam arti merupakan kombinasi antarberbagai kemampuan. Jika dikembangkan, visi di atas tentu saja akan sangat membantu para manajer dan praktisi pendidikan di lapangan dalam memilih dan mengembangkan aneka sasaran serta strategi pembelajaran, sehingga arah dan praksis pendidikan sekolah menjadi semakin jelas dan tajam. Sebab hanya dengan sasaran yang jelas dan tajamlah sebenarnya unsur-unsur kualitas pendidikan sekolah menjadi terpenuhi. Salah satu di antaranya adalah efektivitas.

Masalahnya, bilamanakah suatu sekolah dikatakan efektif? Tidak ada ukuran yang baku mengenai hal ini. Namun ada ciri-ciri dan karakteristik penting yang dapat diidentifikasi. Mortimore misalnya (seperti dikutip Suyanto, 1995) menjelaskan 12 faktor penting yang menjadi ciri suatu sekolah disebut efektif, yakni: (1) kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada tujuan pendidikan yang harus dicapai; (2) keterlibatan para wakil kepala sekolah secara fungsional; (3) keterlibatan praktisi pendidikan dalam kegiatan sekolah; (4) konsistensi di antara para tenaga kependidikan; (5) adanya sesi pembelajaran yang terstruktur; (6) proses pembelajaran yang secara intelektual terus menerus menantang; (7) tersedianya lingkungan yang berorientasi pada kultur kerja; (8) adanya fokus yang terbatas pada sesi-sesi pembelajaran; (9) ada komunikasi optimal antara tenaga kependidikan dan peserta didik; (10) ada dokumentasi yang baik; (11) ada keterlibatan orangtua peserta didik secara fungsional dan sistematis tanpa harus terorganisir; serta (12) terciptanya iklim sekolah yang kondusif dan positif.

## **PRAKTIK PROFESIONAL**

Diakui atau tidak, disadari atau tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi fenomena pembodohan masyarakat secara sistematis oleh sekolah.

Mata rantainya adalah praktik pendidikan di masa lalu yang sama sekali tidak mengindahkan akuntabilitas publik yang semestinya dilakukan oleh sekolah atas kinerja dan praktik profesional mereka. Sekurang-kurangnya ada dua bukti empirik yang bisa dikemukakan. *Pertama*, ihwal perburuan sekolah setiap tahun ajaran baru. Sejauh yang dapat dikonfirmasi dari masyarakat, selama ini para orangtua calon siswa baru tidak mendapatkan informasi akurat guna menilai seberapa bermutu praktik profesional yang telah dijalankan sekolah. Pilihan sekolah semata-mata hanya didasarkan atas opini publik bahwa sekolah-sekolah tertentu sajalah yang dianggap baik dan bermutu (Mutrofin, 1999).

*Kedua*, perilaku para siswa pasca-Ebtanas di kelas terakhir masing-masing jenjang. Tidak banyak yang menyadari bahwa perilaku mengecat rambut berwarna-warni, mencoreti seragam sekolah dengan spidol dan cat pilog, berarak-arakan ngebut di jalan raya tanpa mengenakan helm pengaman, pesta berlebihan dengan mengkonsumsi bahan-bahan terlarang seperti narkoba dan sebagainya adalah wujud dan refleksi dari keterbebasan mereka dari sekolah. Bukan semata-mata bentuk rasa syukur atas sejumlah keberhasilan yang mereka dapati. Gejala tersebut tidak dapat begitu saja dicandra sebagai bentuk dinamika perilaku remaja karena seringkali sudah melampaui batas kepatutan yang dianut oleh nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan.

Gambaran gelap tentang praktik persekolahan di Indonesia setidaknya tidaknya tercermin dari komentar Niels Mulder atas hasil risetnya. *The school is prison*, kata Mulder (1997) dan jerujinya merupakan ideologi negara. Para siswa yang terkungkung seperti itu hanya menginginkan satu hal: keluar dari penjara, bergerak menurut kecenderungan mereka sendiri, bebas leluasa, tidak peduli apa akibatnya.

Di Indonesia, masih menurut Mulder (2000), kecenderungan seperti itu disebut sebagai individualisme. Individualisme tanpa individualitas, individualisme liar, tidak dikuasai oleh hati nurani yang otonom. Tentu saja, perilaku seperti itu tidak diinginkan di mana pun, namun di Indonesia para siswa dilatih untuk berperilaku seperti itu. Latihan mereka di sekolah untuk hidup bermasyarakat dalam masyarakat yang lebih luas, dalam dunia umum, menyebabkan mereka merasa bahwa apa yang telah mereka pelajari sia-sia belaka. Satu-satunya hal yang jelas terlihat adalah kontras yang besar antara “bagaimana seharusnya” dengan “apa kenyataannya.” Padahal yang dimaksud individualisme secara universal adalah bertindak atas dasar otonominya sendiri, bertindak sesuai dengan kehendaknya secara bertanggung jawab.

Gejala-gejala tersebut di atas jelas merupakan fenomena yang tidak sehat dalam pendidikan nasional. Untuk gejala pertama, idealnya masyarakat menentukan pilihan sekolah berdasarkan informasi akurat bahwa dilihat dari

praktik profesional suatu sekolah tergolong baik dan bermutu. Praktik profesional tersebut secara transparan harus diumumkan secara luas kepada masyarakat menjelang penerimaan siswa baru, minimal untuk tiga tahun terakhir. Cara demikian, selain mendidik masyarakat dan paraktisi pendidikan bertindak jujur, sekaligus memungkinkan kompetisi yang sehat, jujur dan adil (*fairness*) antarsekolah dalam mendapatkan siswa baru. Sementara untuk gejala kedua, semestinya para siswa merasakan betapa sekolah benar-benar merupakan wahana pembebasan dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan, bukan keterkungkungan.

Persoalannya adalah, di mana sebenarnya letak kekeliruan praktik profesional yang telah dijalankan sekolah sehingga relevan dibenahi?

Secara umum, praktik profesional menjadi tanggung jawab penuh para tenaga kependidikan atau prtaktisi pendidikan sekolah. Hampir seluruh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang berwenang menghasilkan mereka membekali berbagai kemampuan profesional seperti *curriculum knowledge*, *pedagogical knowledge*, *psychological knowledge*, *sosiological knowledge*, dan *process knowledge*. Dari segi keterampilan, mereka dididik antara lain menguasai *organizing skill*, *analysing skill*, *synthesis skill*, *presentational skill*, *assesment skill*, *management skill*, dan *evaluative skill*.

Namun demikian sangat jelas bahwa LPTK sama sekali tidak memberikan pengetahuan yang paling mendasar tentang prinsip dan keterampilan dari hubungan kemanusiaan yang efektif, komunikasi yang jujur, dan pemecahan masalah yang konstruktif. Padahal, keterampilan berkomunikasi yang efektif untuk menciptakan hubungan, mata rantai dan jembatan penghubung dalam bentuk jalinan simpatik antara tenaga pendidik dengan peserta didik sangat diperlukan. Sedangkan diketahui, untuk menjadi tenaga pendidik yang efektif, hanya dapat dibangun berdasarkan aktivitas-aktivitas mendasar yang setiap hari pada dasarnya telah dilakukan tenaga pendidik. Kualitas hubungan dan komunikasi tenaga pendidik dengan peserta didik sangat penting apabila tenaga pendidik ingin menjadi efektif dalam mengajarkan apa saja - mata pelajaran apa saja, apapun isinya, keterampilan apa saja, nilai-nilai maupun keyakinan apa saja (Gordon, 1997).

Sebagian besar para tenaga pendidik memang mengetahui banyak tentang pengajaran. Tapi seringkali mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tidak banyak yang menyadari bahwa antara “mengajar” dan “belajar” merupakan dua terminologi yang berbeda. Sehingga terjadi kekeliruan paling mendasar, yakni para tenaga pendidik terkungkung oleh berbagai mitos tentang dirinya yang cenderung mengingkari harkat kemanusiaannya. Inilah praktik profesional yang tidak dapat atau belum dilakukan para tenaga pendidik

kecuali penambahan permainan peran (*role play*) dan penipuan diri (*self-deception*). Pengetahuan tentang kurikulum, mata ajar, metode mengajar, perkembangan peserta didik dan lain-lain memang sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari itu justru bagaimana menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik. Sebab tanpa hubungan dan komunikasi yang baik, teknik atau metode mengajar yang bagaimana pun canggihnya tidak akan banyak gunanya.

Di luar itu terdapat beberapa paradigma baru yang mesti dikembangkan oleh para praktisi pendidikan terkait dengan peran dan praktik profesionalnya. Sebagai seorang profesional, tenaga pendidik harus banyak berperan dalam sekolah meskipun dilaksanakan pada tataran dan dimensi yang berbeda-beda. Praktik profesional mengharuskan tenaga pendidik berperan sebagai: (1) *manager of classroom processes*; (2) *developer and interpreter of curriculum*; (3) *developer of curriculum resources*; (4) *facilitator of students' learning*; (5) *guide and supporter of students' personal development*; (6) *administrator within the school*; (7) *public relations with regard to parents and the community in general*; dan (8) *mentor for other staff* (lihat Angwin, *et.al.*, 1997).

Untuk masing-masing praktik profesional tersebut para praktisi pendidikan tidak harus bertindak secara isolatif, melainkan memerlukan dukungan penuh pihak sekolah dan peranserta masyarakatnya. Agar mampu memerankan praktik profesional secara benar dan tepat (*bener lan pener*), setiap tenaga pendidik hendaknya memiliki rasa percaya diri yang kuat dan kesadaran diri tinggi atas tuntutan praktik profesionalnya melalui proses berubah dan refleksi.

## **PENGELOLAAN SEKOLAH**

Sebagai organisasi nonkomersial, tidak dapat disangkal lagi bahwa sekolah berperan besar dalam menghasilkan sumberdaya manusia sebagai modal intelektual suatu bangsa. Terdapat dua peran penting yang dapat diidentifikasi, yakni peran politik dalam bentuk pemyarakatan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural suatu bangsa; serta peran ekonomi dalam bentuk mempersiapkan tenaga kerja guna memerangi kemiskinan, kebodohan, mendorong perubahan sosial serta untuk meratakan kesempatan dan pendapatan (periksa kembali tulisan John C. Bock dalam *Education and Development: A Conflict Meaning*, 1992).

Namun demikian, krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memberi pelajaran berharga bahwa kenyataannya kontribusi yang disumbangkan pendidikan sekolah tidaklah banyak bermakna. Tingkat kemandirian yang rendah telah menjadi sumber bagi munculnya ketidakpercayaan diri sehingga untuk *survival* banyak orang harus mengorbankan jati diri dan berlomba-lomba membangun konflik horizontal yang justru sangat merugikan diri sendiri sebagai bangsa.

Hasil-hasil pendidikan sekolah belum optimal sebagai *driving force* dalam melakukan terobosan yang mengarah pada pemulihan ekonomi (*economic recovery*) karena pada satu sisi dilaksanakan melalui paradigma lama yang tidak sejalan dengan situasi global saat ini; sementara pada sisi lain berbagai ketidakseimbangan menunjukkan adanya situasi paradoksal yang dihadapi. Usaha peningkatan kapasitas daya serap sekolah yang didorong oleh adanya *pressure* kuat masyarakat menyebabkan pendidikan diselenggarakan secara massal. Pada gilirannya, secara signifikan memberikan kontribusi dalam penurunan kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut telah lama sebenarnya disinyalir oleh Bank Dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (World Bank, 1994).

Sekalipun terjadi *mass education*, masih terdapat celah yang memungkinkan pendidikan sekolah diperbaiki, yakni sisi manajemennya. Manajemen atau pengelolaan sekolah merupakan unsur penting yang harus mendapatkan titik berat pembenahan jika pelaksanaan otonomi pendidikan diinginkan berhasil optimal. Berkaitan dengan pembenahan tersebut, Unesco (1995) telah memberikan arah pengembangan manajemen institusi dengan paradigma baru yang mencakup 10 unsur karakteristik manajemen, dijelaskan secara singkat berikut ini.

Pada unsur strategi misalnya, sudah saatnya paradigma lama yang mendasarkan diri pada aspek perencanaan diubah menjadi paradigma baru dalam bentuk aspek *entrepreneurship*, yakni kemampuan dan etos untuk “menciptakan” kegiatan produktif bagi institusi dan masyarakatnya. Unsur struktur yang semula mengandalkan pada hirarkhi, sudah saatnya berubah menjadi pola jaringan kerja. Dalam menjalankan sistem sebagai salah satu unsur yang semula sangatlah rigid (kaku), sudah semestinya berubah menjadi sangat luwes atau fleksibel.

Pengembangan staf yang semula mengandalkan gelar dan peringkat, mestinya sudah harus berubah menjadi dilandaskan pada azas kemanfaatan. Gaya kepemimpinan yang dulu diarahkan hanya untuk memecahkan masalah, seharusnya sudah diubah menjadi proses transformasi yang proaktif dan bersifat preventif. Tritmen keterampilan yang semula diarahkan dalam usaha untuk menguasai, mestinya sudah diarahkan untuk membangun. Unsur pertukaran nilai yang dulu didasarkan pada penonjolan “lebih baik bekerja dalam kesamaan-kesamaan”, seharusnya sudah berubah menjadi “bagaimana memanfaatkan secara optimal berbagai jenis perbedaan” sebagai kekayaan organisasi.

Fokus kinerja yang di masa lalu diarahkan untuk membangun sistem dalam kerangka institusional, maka selanjutnya diarahkan guna membangun institusi untuk kepentingan kesejahteraan individual. Jika semula unsur sumberdaya kekuatan diarahkan guna menjamin stabilitas, selanjutnya mesti

diarahkan untuk memmanajemeni berbagai perubahan. Pola kepemimpinan yang semula dilandasi oleh kinerja dogmatis, selanjutnya mesti berubah menjadi pola kinerja yang inspiratif.



## **SKENARIO MADRASAH DI ERA OTONOMI**



SEJAUH ini, otonomi daerah yang terbatas (di tingkat provinsi), luas (di tingkat kabupaten dan kota) dan bertanggung jawab sebagai implikasi dari penerapan UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25/1999 tentang Primbangan Keuangan Pusat dan Daerah masih mengalami “bias” pemahaman. Menurut Deputi Kepala Bappenas Bidang Regional dan daerah Herman Kaeruman (1999), kehadiran kedua UU tersebut seolah-olah hanya mewujudkan kemandirian daerah baik dalam mengelola uang maupun urusannya. Padahal, pelaksanaan otonomi daerah pada gilirannya harus mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada seluruh unsur masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensinya ialah, pelaksanaan otonomi daerah yang ideal memerlukan beberapa prasyarat seperti ketersediaan sumberdaya manusia (aparatur dan masyarakat) yang berkualitas, terwujud dan berfungsinya kelembagaan yang ada seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, institusi perekonomian dan institusi kemasyarakatan lainnya. Termasuk didalamnya adalah ketersediaan dan bekerjanya sistem hukum yang menjamin ditegakkannya supremasi hukum (*law enforcement*) dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang dan hak yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah dalam berbagai sektor kehidupan dengan kekecualian seperti Hankam, moneter, hukum, politik luar negeri dan agama. Dengan demikian pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang diotonomikan (Passal 11 UU No 22/1999)

Di luar pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umum, kondisi objektif menunjukkan bahwa banyak pendidikan yang juga diselenggarakan oleh sekolah-sekolah bernafaskan agama. Madrasah adalah salah satunya.

Madrasah adalah salah satu institusi pendidikan yang dikelola oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama yang terdiri atas beberapa satuan pendidikan yakni Ibtidaiyah (setingkat SD), Tsanawiyah (Setingkat SLTP), dan Aliyah (setingkat SMU).

Menurut penjelasan Sekjen Depag H Marwan Saridjo sebagaimana dikutip banyak media tak lama berselang, seluruh madrasah akan diserahkan kepada Pemda, namun masih dikaji agar prosesnya berjalan secara arif tanpa mengganggu psikologi umat. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa menyerahkan madrasah yang jumlahnya sangat banyak tidaklah semudah memindahkan kandang ayam. Diperlukan pemikiran serius dan sumbang saran berbagai kalangan agar penyerahan tersebut tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan psiko-siopolitik maupun kultural, terutama di kalangan umat Islam selaku pilar pendukung eksistensi madrasah.

## **SEJUMLAH PERSOALAN**

Seperti halnya institusi pendidikan lainnya, kontribusi madrasah terhadap upaya pencerdasan kehidupan bangsa tak lagi patut dipertanyakan. Kuantitas madrasah yang signifikan dengan tingkat pembiayaan pendidikan yang murah telah lama menjadi institusi pendidikan pilihan bagi sebagian umat Islam. Peta demografis dimana penyebaran umat Islam merata di Tanah Air, diikuti konsentrasi madrasah dengan pola yang sama secara konsisten. Tentu saja dengan tingkat peminatan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Di Daerah Istimewa Aceh atau di Jawa Timur misalnya, minat umat Islam untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah tidak terpaut jauh dengan minat mereka terhadap sekolah-sekolah umum. Bahkan di beberapa daerah di Sumatera Barat, Madura, dan wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur (baca Mutrofin, *Mengapa Mereka Tak Bersekolah?*, Jakarta, PT. Media Edukasi Utama, 1992) banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya pagi di sekolah umum, sementara sore hari di madrasah.

Namun sama dengan problematika yang dihadapi sekolah-sekolah umum dalam hal kualitas, madrasah pun sebenarnya telah cukup lama menyimpan banyak persoalan. Persoalan dimaksud antara lain mengenai muatan kurikulum. Pada satu sisi madrasah diharuskan tunduk pada UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana kurikulum nasional wajib diberikan di sekolah

manapun, pada sisi lain secara institusional madrasah memiliki kewajiban moral dan akademik untuk memberi secara proporsional muatan pendidikan agama Islam dalam kurikulumnya.

Posisi dilematis ini menyebabkan kualitas lulusan madrasah boleh dikatakan “setengah jadi”, menguasai Iptek tidak, menguasai agama pun belum tentu.

Di luar persoalan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan di madrasah juga harus berhadapan dengan kendala teknis yang tidak ringan, yakni soal sumberdaya manusia berupa tenaga kependidikan dan *raw input* peserta didik, serta sumberdaya finansial karena sebagian besar bergantung pada anggaran departemen. Hal terakhir inilah yang pada gilirannya menyebabkan jumlah madrasah swasta, yakni yang dikelola oleh masyarakat jumlahnya tidak optimal. Selain karena madrasah-madrasah ma’arif yang umumnya dikelola oleh para nahdliyin (umat NU) telah banyak yang “gulung tikar”, umat Islam di kalangan Muhammadiyah lebih memilih model sekolah umum dengan label “Muhammadiyah” di belakang nama sekolah ketimbang madrasah.

Persoalan lain berkaitan erat dengan apresiasi masyarakat terhadap madrasah yang dari tahun ke tahun cenderung menurun. Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap madrasah sama sekali tidak identik dengan rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan Islam. Melainkan karena pendidikan Islam telah melampaui perspektifnya yang lain, baik dalam bentuk Pendidikan Luar Sekolah (PLS) maupun makin menguatnya posisi Pondok Pesantren di berbagai daerah.

Modernisasi pesantren yang signifikan disertai sosialisasi yang intensif dalam berbagai institusi sosial politik, telah mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan pesantren nyaris tanpa kendala berarti. Sementara di sisi lain diketahui, hampir setiap pesantren mampu menyelenggarakan pendidikan umum dan madrasah lebih leluasa karena pendidikan sistem asrama memiliki keunggulan waktu kontak dibanding sistem lainnya.

## **BEBERAPA SKENARIO**

Dengan mencermati berbagai persoalan, lebih spesifik lagi jika dikaitkan dengan keterbatasan dan belum optimalnya penggalan potensi sumberdaya finansial menjelang pelaksanaan otonomi daerah, sungguh terlalu berat bagi pemerintah daerah apabila madrasah serta merta begitu saja diserahkan tanpa disertai solusi memadai dan katup pengaman yang sempurna. Dalam kaitan itu, beberapa skenario madrasah berikut ini aganya relevan dikemukakan.

*Pertama*, secara institusional, madrasah tetap seperti sekarang, namun pola pelaksanaannya mengikuti sekolah-sekolah umum sebagaimana hendak dirancang daerah sesuai tuntutan otonomi. Perbedaan mendasar dibanding yang sekarang terletak pada pengelolaannya di mana madrasah berada dalam satu atap pengelolaannya dengan sekolah-sekolah umum. Pengelola satu atap itu tidak lain adalah unit kerja baru yang dibentuk pimpinan daerah sebagai hasil sinergi, koordinasi, bahkan barangkali peleburan antara Bagian Pendidikan Depag di daerah, Kantor Depdiknas Kabupaten atau Kota dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten/Kota.

*Kedua*, madrasah diintegrasikan ke dalam Pondok Pesantren. Pengintegrasian ini tidak harus dipahami secara fisik karena di kebanyakan pesantren sendiri sebenarnya telah ada madrasah. Lebih dari itu adalah pengelolaan yang melampaui batas geografis pesantren. Pesantren Krapyak di Yogyakarta misalnya, dapat diberi kewenangan untuk mengelola madrasah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta; demikian pula pesantren besar lain. Langkah ini ditempuh dengan asumsi bahwa pondok pesantrenlah sebenarnya yang paling memahami karakteristik dan profil pendidikan Islam sebagaimana dikembangkan sistem pendidikan madrasah.

*Ketiga*, madrasah diserahkan pengelolaannya kepada perguruan tinggi agama Islam seperti IAIN dan STAIN. Selain hal ini akan memungkinkan perguruan tinggi Islam memiliki sekolah-sekolah laboratorium, sekaligus memungkinkan kalangan intelektual Islam akan melakukan eksperimentasi, inovasi, dan pembaruan pendidikan Islam tanpa harus dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kekuasaan.

*Keempat*, madrasah dibubarkan saja agar tidak membebani pemerintah daerah. Namun pembubaran ini haruslah didasari argumentasi logis dan elementer. Misalnya jika madrasah memang secara riil tidak banyak berkontribusi kemaslahatan umat. Pembubaran madrasah harus pula disertai sosialisasi intensif bahwa kewenangan pendidikan agama diserahkan sepenuhnya kepada keluarga, masyarakat dan pendidikan luar sekolah (PLS). Tanpa kedua prasyarat tersebut, pembubaran madrasah hanya akan menimbulkan gejolak sosial yang semestinya tak perlu terjadi.

Masing-masing skenario jelas tidak sempurna karena selain memiliki kelebihan juga mempunyai kekurangan. Skenario mana yang akan dipilih agaknya sangat bergantung kepada kondisi dan potensi daerah di mana satu dengan yang lain dipastikan berbeda. Agar diperoleh skenario yang pas dan optimal, terutama dari visi dan misi pendidikan Islam, maka diperlukan diskusi mendalam di antara berbagai kalangan terkait. Jika perlu dilakukan sigi komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat Islam.



## **SASARAN POKOK DEREGULASI PENDIDIKAN**



TERDAPAT kecenderungan praktik birokrasi Weberian yang menekankan pada struktur fisik bergeser ke arah praktik birokrasi baru yang mengandalkan struktur logis. Praktik birokrasi yang berbasis pada tata kerja *one single organization to customers* (pelayanan tunggal kepada masyarakat pelanggan) di mana aktivitas didasarkan atas dasar apa yang dikehendaki dan diketahui birokrasi dengan apa yang dikehendaki dan diketahui masyarakat, setidaknya-tidaknya telah dikenalkan Menteri Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN) TB Silalahi. Kondisi objektif, yakni kemajuan teknologi komunikasi dan eksplosif informasi menjadikan kinerja birokrasi berdasar susunan logis inilah yang agaknya dipandang cocok untuk era global dan masa depan.

Di tangan Silalahi, banyak persoalan-persoalan krusial antardepartemen mengemuka menjadi perhatian publik. Sebut misalnya soal pendidikan nasional yang dimandori Wardiman Djojonegoro, pernah hadir isu kontroversial tentang kemungkinan militer menjabat rektor perguruan tinggi. Pada pertengahan Oktober 1997, lagi-lagi Depdikbut “keduluan” informasi penting yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas, yakni soal rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi pendidikan sebagaimana dilansir Men-PAN.

Sebagaimana deregulasi (penyederhanaan peraturan yang sudah ada) di bidang ekonomi yang bertujuan menyehatkan perekonomian nasional sekaligus mengurangi beban ekonomi berbiaya tinggi (efisiensi); langka deregulasi pendidikan pun bertujuan sejenis, yakni menyehatkan tatalaksana pendidikan nasional sehingga tercapai baku mutu sekaligus mengurangi beban ekonomi pendidikan berbiaya tinggi.

Dalam kasus ekonomi, kebijakan deregulasi ditempuh setahap demi setahap. Di bidang pendidikan pun, agaknya pemerintah juga akan menempuh cara yang sama. Sejauh ini, masyarakat baru mengetahui bahwa sasaran deregulasi pendidikan akan mencabut aturan tentang larangan perguruan tinggi luar negeri membuka cabang di Indonesia dengan maksud agar para lulusan semakin muda berkompetensi mendapatkan posisi dalam jabatan-jabatan baru yang berkembang sesuai dinamika pasar kerja. Sementara sasaran pokok deregulasi pendidikan lainnya masih menjadi tanda tanya besar dan ditunggu dengan harap-harap cemas.

## **PENDIDIKAN TINGGI**

Di belahan mana pun, segmen pendidikan yang paling rentan terhadap berbagai jenis masalah suatu bangsa adalah pendidikan tinggi. Sebab pendidikan tinggillah yang diharapkan berperan besar mencetak pioner-pioner pengelola negara di segala bidang. Namun diketahui, banyak sekali peraturan imperatif menjadi penghambat potensial bagi terciptanya perguruan tinggi bermutu yang mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan handal dan daya saing memadai.

Sebenarnya, deregulasi atas Pasal 120 PP No 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi bukanlah langkah urgen yang dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Agar tercapai tujuan optimal, deregulasi pendidikan tinggi mesti menyentuh berbagai elemen pokok dengan fokus perguruan tinggi di tanah air. Beberapa di antara yang perlu pendapat pembenahan serius diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, perluasan otonomi perguruan tinggi. Selama ini otonomi hanya diberikan untuk keilmuan (Pasal 17-20 PP No 30/1990) dengan aksentuasi pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan kebebasan mimbar akademik. Kecuali itu juga mencakup otonomi keuangan sebagaimana diatur pasal 112. Namun dalam praktik, lembaga perizinan masih diberlakukan dan perguruan tinggi tidak leluasa mencari dan menggunakan sumber dana karena terikat peraturan pemerintah.

Perluasan otonomi baru dapat dicapai jika rektor sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi tidak lagi menjadi tangan panjang pemerintah sehingga dilabeli sebagai jabatan politis, melainkan murni sebagai jabatan akademis. Otonomi mengandung makna kebebasan perguruan tinggi dari dominasi pihak luar dan kelestariannya sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, namun tidak berarti menutup diri sama sekali dari saran-saran, kritik-kritik, maupun advis masyarakat luas (Nagai, 1993).

*Kedua*, persyaratan kurikulum nasional perlu dihapuskan. Untuk mengantisipasi berbagai kemajuan dan kemunculan profesi-profesi baru yang sekian tahun lalu belum pernah terpikirkan kehadirannya, setiap perguruan tinggi mestinya diberi keleluasaan agar mampu mendesain kurikulumnya sendiri sejauh bertanggung jawab secara moral dan profesional atas ilmu dan profesi yang dikembangkan. Hanya dengan ketidakbakuan kurikulumlah optimalisasi *link and match* dapat dicapai. Masih terkait dengan langkah ini, peraturan pembukaan program studi baru di perguruan tinggi mestinya diperlonggar. Bukankah akreditasi untuk kelayakan suatu program studi sudah berjalan?

*Ketiga*, megubah visi lama soal pembiayaan perguruan tinggi dengan visi baru yang “bebas” jiwanya tetapi tetap dibiayai oleh negara. “Visi ini berlaku tidak saja untuk PTN tetapi juga untuk PTS. Tentu saja dengan persyaratan proposal yang komprehensif. Hal ini didasari kenyataan bahwa setiap perguruan tinggi bermutu selalu memiliki potensi pembiayaan yang sangat berlimpah (periksa hasil peringkat perguruan tinggi di Asia sebagaimana di publikasikan majalah *Asiaweek* nomor 21, 23 Mei 1997 dan hasil survei berbagai universitas di belahan dunia sebagaimana dipublikasikan Mingguan Berita *The Economist*, edisi 4 Oktober 1997).

*Keempat*, internasionalisasi gelar akademik dengan mencabut SK Mendikbud No 036/U/1993 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesional. Sebab regulasi itu sudah tidak lagi memadai dan tidak sejalan dengan semangat liberalisasi ekspor dan impor tenaga kerja. Banyak spesifikasi gelar akademik yang tidak bisa dimengerti oleh para pengguna tenaga kerja asing atas lulusan pendidikan tinggi di dalam negeri. Kecuali itu, sebagai antisipasi manakala pendidikan di Indonesia sudah mampu menjadi salah satu komoditas yang layak dijual ke dunia internasional.

Di samping empat sasaran pokok tersebut, sebenarnya masih banyak peraturan pendidikan tinggi yang perlu dideregulasi. Sebut misalnya peraturan yang mengharuskan hanya lulusan perguruan tinggi tertentu yang diperbolehkan menjadi tenaga akademik tanpa meneliti lebih jauh kemampuan profesionalnya sekiranya ia diterima sebagai tenaga akademik. Termasuk yang paling krusial adalah hambatan birokratis dalam hal pengembangan karier tenaga kependidikan yang sangat potensial menjadi penghambat kinerja profesionalnya karena “hanya” dahargai sebatas peraturan yang ada.

## **DASAR DAN MENENGAH**

Kecuali di bidang pendidikan tinggi, deregulasi pendidikan diharapkan juga menyentuh sasaran pokok yang kini masih menjadi kendala besar bagi terciptanya pendidikan dasar dan menengah yang kokoh dan bermutu. Sebut

misalnya soal dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar. Dengan sistem informasi terpadu sebagaimana mulai dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Diknasmen), dualisme pengelolaan pendidikan dasar mestinya sudah tidak relevan lagi. Apalagi diketahui, dualisme itulah yang menyebabkan kinerja praktisi pendidikan dasar menjadi mandeg, bahkan makin termarginalisasi.

Dipotongnya jalur dualisme pengelolaan pendidikan dasar akan sangat menguntungkan. Selain langkah efisiensi organisasi dapat dicapai karena ratusan Kantor Dinas dapat dipangkas sehingga anggaran negara dapat dialihkan untuk subsektor lainnya, kinerja profesional tenaga kependidikan dasar dapat berkembang leluasa karena tidak “diawasi dua mata”. Pengembangan kurikulum dan pembinaan guru akan menjadi satu kesatuan.

Tahap selanjutnya, deregulasi pendidikan perlu merambah pendidikan menengah yang saat ini dikotak-kotak menjadi SMU dan SMK. Dengan pengandaian bahwa penguasaan konsep dasar keilmuan sangat tepat dipupuk di lingkungan pendidikan menengah mengingat para peserta didik sudah matang secara kognitif, maka pembagian pendidikan menengah menjadi SMU dan SMK sudah tidak relevan lagi. Sistem *double track* seperti itu di negara-negara yang maju pendidikannya sudah lama ditinggalkan. Selain tidak efisien, juga menjadi mata rantai kemerosotan mutu perguruan tinggi karena mendapatkan *raw input* yang *amburadul* penguasaan konsepnya.

Barangkali saran Tilaar (1997) agar SMK dijadikan lembaga pelatihan, layak dipertimbangkan. Hal itu berarti pendidikan menengah ditempuh secara *single track*. Keuntungan yang bisa diraih, lagi-lagi adalah efisiensi organisasi. Puluhan direktorat sekolah kejuruan yang memperkerjakan ribuan personal dengan anggaran tersendiri dapat dipangkas. Makin sempit volume pengawasan (akreditasi) akan memperkuat fokus penajaman kualitas pendidikan menengah umum yang memang disiapkan untuk menghasilkan para calon peserta didik perguruan tinggi.

Tentu saja masih banyak peraturan-peraturan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi penghambat kemajuan dan mutu pendidikan. Dalam situasi di mana kinerja birokrasi pemerintah tidak lagi terpancang pada ikatan struktur fisik organisasional, sumbangsih masyarakat dalam bentuk *urun rembug* akan menjadi sangat berarti.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 11 Desember 1997



## **PLUS MINUS BELAJAR ISLAM DI LUAR NEGERI**



DI TANAH air, para calon mahasiswa yang ingin belajar Islam tentu tidak mengalami kesulitan untuk memilih lembaga pendidikan Islam. Selain di lingkungan pendidikan luar sekolah (PLS), yakni pondok-pondok pesantren yang tersebar luas, juga tersedia lembaga pendidikan tinggi, yakni di 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Bahkan mulai tahun akademik 1997-1998, IAIN dimekarkan. Selain pemekaran dengan menjadikan fakultas yang menjadi cabang-cabangnya menjadi Sekolah Tinggi, juga ada pemikiran menjadikan IAIN sebagai Universitas Islam Negeri mengikuti pola IKIP menjadi universitas.

Berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 1997 dan Kepmen Agama No. 284-316 dan 317-349 tahun 1997, 33 dari 37 fakultas (filial) IAIN dijadikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kebijakan tersebut dilakukan mengingat kapasitas IAIN sebagai perguruan tinggi Islam dirasa cukup berat menanggung tuntutan kualitas *out-pul*-nya. Apalagi diketahui, jumlah umat Islam Indonesia sangat besar, bahkan paling besar dibanding negara-negara lain di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kecuali itu, engan pemekaran tersebut diharapkan mampu mengimbangi akselerasi dan tuntutan perkembangan masyarakat yang makin kompetitif.

Pemekaran IAIN dengan menambah STAIN tentu saja mempunyai implikasi luas. Satu di antaranya adalah bagaimana menyediakan tenaga pengajar yang memadai. Selain berpendidikan tinggi Islam, juga berkualitas sesuai minat studinya masing-masing. Jika hanya mengandalkan lembaga pendidikan tinggi di dalam negeri, tuntutan kuantitas maupun kualitas jelas belum memadai. Oleh karenanya Departemen Agama menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri untuk mendidik calon-calon dosen IAIN dan STAIN. Baik dengan negara-negara Timur Tengah maupun dengan negara-negara Barat.

Persoalan seringkali menjadi pelik manakala kita harus menentukan ke mana belajar Islam, ke Barat atau ke Timur Tengah? Tulisan berikut yang disarikan dari dua buku penting tentang hal itu, yakni *Academic Freedom in Islam and the West* (1997) karya Ahmed O Altwairi dan *Pengalaman Belajar Islam di Kanada* (1997) karya Yudian, dkk, diharapkan menjadi bahan pertimbangan.

## **BARAT DAN ISLAM**

Interaksi antarnegara, khususnya hubungan bilateral antara negara-negara berkembang di Timur-Selatan dengan negara-negara maju di Utara-Barat telah mencapai suatu tahapan sejarah yang sangat kritis. Mereka berhadapan dengan aneka ragam tantangan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tantangan-tantangan tersebut tentu saja tidak lepas dari kompleksitas sisa-sisa dan akibat sejarah itu sendiri. Kepercayaan, mentalitas, tradisi dan orde sosial yang berbeda dalam kehidupan antar bangsa juga turut mewarnai corak sekaligus tingkat kedalaman tantangan yang timbul.

Satu di antara sekian tantangan yang pelik tersebut ialah persoalan Barat dan Islam. Kerjasama yang erat bisa saja terjalin secara baik tanpa harus memperhitungkan berbagai perbedaan. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kerjasama di antara mereka justru mengakibatkan pertikaian. Faktor pemahaman Barat atas Islam yang belum sepenuhnya positif, serta adanya kecurigaan Islam terhadap Barat mengakibatkan harmoni Barat dan Islam nyaris tak terwujud. Bahkan perseteruan makin berbiak.

Sekadar contoh bisa disebut, yakni munculnya antagonisme antara Barat dan Islam, khususnya dalam alih teknologi yang menjadi ajang kerjasama yang saling bergantung dan saling menguatkan. Tetapi sayang bahwa perangkat-perangkat tersebut justru menyisipkan ancaman bagi sisi damai dan harmoni antara kedua belah pihak. Jalan buntu perdamaian di Timur Tengah, berlarut-larutnya penyelesaian damai di Bosnia, stigma terorisme oleh Barat terhadap Islam adalah wujud betapa kerjasama itu belum optimal.

Memang harus diakui, corak kultur dan ideologi yang antagonistis bukan berarti tak bisa bersanding secara tenteram dan damai. Sebab kesamaan kepentingan seringkali mengharuskan Barat dan Islam duduk dalam satu meja. Dalam kaitan itu jelas dibutuhkan mediator yang netral agar masing-masing kepentingan tidak saling dirugikan. Salah satu mediator yang paling netral dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang bisa melihat secara jernih dan proporsional berbagai persoalan yang mengganjal kerjasama Barat dan Islam. Karena itu dibutuhkan kerjasama ilmiah dan pertukaran keahlian.

Mewujudkan gagasan itu, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan mahasiswa dikirim ke Barat untuk mempelajari Islam. Salah satu tujuannya

adalah agar terjadi sosialisasi dan diskusi yang seimbang sehingga pergaulan ilmiah tersebut sedikit demi sedikit akan mempengaruhi cara pandang Barat tentang Islam. Namun demikian, apakah tujuan tersebut tercapai? Sulit mengukurnya.

Satu hal yang jelas ialah, selama lebih dari satu dasawarsa, wacana teologi di Barat makin mempopulerkan dan membahas secara serius konsep *Abrahamic religions* - agama-agama penerus tradisi Ibrahim - baik secara akademis maupun teologis. Tidak terkecuali Islam yang semula dilabeli agama palsu karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan tradisi Yahudi dan Kristiani, juga mulai diposisikan sejajar.

Menyangkut berbondong-bondongnya sarjana agama yang belajar Islam di lembaga pendidikan Barat, seringkali terdengar nada-nada sinis seraya mengutip sebaht puisi Arab *faqoduu al syay'a laa yu'thuubu* (mereka kehilangan sesuatu maka tak bisa memberinya). Bagaimana mungkin para mahasiswa itu memperoleh sesuatu dari orang yang kehilangan sesuatu? Lebih konkret lagi, bagaimana mungkin mereka belajar Islam dari para profesor yang kebanyakan tidak beriman Islam, atau bahkan mungkin ateis?

Dalam suasana seperti itulah agaknya para mahasiswa Islam yang hendak belajar Islam ke Barat mendapat tantangan yang relevan. Sebab sejauh ini kebanyakan orang beranggapan bahwa untuk belajar Islam, pemahaman yang paling mungkin adalah belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berada di Timur Tengah. Dengan demikian, pandangan kebanyakan orang juga sama dengan pandangan Barat tentang Islam, yakni bahwa Islam identik dengan bangsa Arab.

Hal itu tentu saja tak dapat disalahkan – sekalipun Islam pada prinsipnya adalah agama universal dimana nilai-nilai Islam itu akan ada tanpa bisa dibatasi ruang dan waktu sehingga mempelajari Islam bisa dilakukan di mana saja – sebab para santri disini dibesarkan dalam masyarakat Islam yang sudah baku, dan diajari Islam dari sudut pandang tertentu saja.

Fiqh misalnya, yang banyak diajarkan hanyalah fiqh Syafi'i padahal Syafi'i hanyalah salah satu madzhab dari sekian madzhab yang pernah muncul dalam dunia Islam. Demikian pula Asy'ariyah sebagai teologi yang banyak dianut, hanyalah salah satu dari banyak madzhab teologi yang berkembang dalam sejarah Islam.

Akibat cara pandang seperti itu, seringkali para sarjana Islam lulusan Barat dituduh menyebarkan kesesatan, berbahaya, gegabah dan mencari popularitas manakala mereka mengemukakan pikiran-pikiran kontroversial tentang Islam. Padahal, gagasan yang dianggap kontroversial itu sebenarnya bukan barang baru karena sudah tercatat dalam tradisi dan sejarah pemikiran intelektual Islam.

## SITUASI BELAJAR

Di atas sudah disinggung bahwa para ilmuwan Islam hasil didikan Barat yang pulang ke tanah air telah membawa konsekuensi-konsekuensi logis sebagai akibat interaksi sistem pemikiran, sosial dan budaya Barat. Akibatnya, seringkali timbul konflik antara mereka dengan sejawatnya di tanah air, bahkan dengan masyarakat Islam pada umumnya.

Padahal kalau kita mau berfikir jernih, konflik itu tak perlu terjadi. Mestinya kita menyadari bahwa ada perbedaan situasi belajar antara Timur dan Barat. Di lembaga-lembaga pendidikan Islam Barat, tradisi belajar dan kebebasan akademik diletakkan di atas landasan keterbukaan. Para mahasiswa mendapatkan kesempatan lebih bebas dan terbuka untuk mempelajari Islam.

Islam dikaji secara akademis dan ilmiah. Kendati profesor Barat yang mengajar Islam tidak banyak yang beragama Islam, bahkan ada yang ateis, tetap ada kewajiban didampingi pakar yang beragama Islam. Tak ada buku yang haram dibaca, tak ada pertanyaan yang tak boleh diajukan, semua data sejarah dihadirkan, semua aliran pemikiran ditelaah dan dikaji, dan mereka dibiarkan menafsirkan serta menyimpulkannya sendiri.

Sementara tradisi belajar Islam yang berkembang di Timur (termasuk di tanah air) justru sebaliknya. Situasi belajar itulah yang mempengaruhi gaya menyikapi perbedaan visi dan pemikiran tentang dinamika Islam.

Berdasarkan kenyataan itu, lantas ke mana kita harus memilih? Ke mana pun tentu tak soal benar. Baik belajar Islam di Barat atau di Timur tetap ada plus minusnya. Satu hal yang penting disadari ialah, bahwa segala latar belakang bahasa dan budaya akan mempengaruhi pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari, tidak terkecuali Islam. Karena itu banyak yang menyarankan, sebelum belajar Islam ke luar negeri, hendaknya kita benar-benar memahami Islam.

Jakarta, HU *Suara Karya*, Jumat 8 agustus 1997



## PENDIDIKAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



SEKURANG-kurangnya ada tiga kondisi objektif yang terjadi dalam masyarakat, baik akibat krisis ekonomi maupun akibat pendidikan nasional yang belum membumi.

*Pertama*, merosotnya pendapatan per kapita masyarakat dari US\$1.050 menjadi hanya US\$350. *Kedua*, meskipun dalam 10 tahun terakhir harga dasar gabah naik Rp 210 menjadi Rp 700, kenyataannya tidak merangsang produktivitas petani maupun peningkatan daya belinya. *Ketiga*, pengangguran terdidik yang tidak terserap dunia kerja dari tahun ke tahun terus meningkat tajam sehingga menjadi beban masyarakat.

Secara teoritis dan empiris, hasil riset di beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan yang diperoleh seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya. Kecuali itu, pendidikan yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan taraf hidup dan ekonominya.

Tentu saja melalui variabel antara, yakni mudahnya penyempitan pendidikan mendapat pekerjaan yang layak. Tapi mengapa fakta yang terjadi di Indonesia tidak demikian? Ketiga kondisi objektif di muka adalah beberapa buktinya. Hanya segmen tertentu saja di antara penyempitan pendidikan yang konsisten dengan simpulan-simpulan riset itu.

Padahal dalam 10 tahun terakhir, upaya meletakkan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan demikian intensif dilakukan. Barangkali apa yang dikatakan S Hamijoyo (1998), bahwa pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar di tingkat SD/SLTP hingga pendidikan tinggi di Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam filsafat pendidikan yang terus melayang di awang-awang dan kurang mendarat di bumi realitas, merupakan sebabnya.

## TERLALU BANYAK PAMRIH

Peter Drucker, pakar manajemen yang menulis *Post Capitalist Society* sangat yakin bahwa ekonomi masa depan adalah ekonomi pengetahuan. Maksudnya, semua aktivitas ekonomi merupakan aktivitas padat ilmu.

Dalam kaitan itu dengan sendirinya modal intelektual (*Intellectual capital*) menjadi taruhan sejauh mana sebuah bangsa dapat menjadi kompetitor yang andal di abad yang sarat kompetisi.

Jadi, yang menentukan kemajuan suatu bangsa di masa depan dengan sendirinya bukanlah kekayaan sumberdaya alam semata-mata, bukan pula kuantitas masyarakatnya. Melainkan setinggi apa kualitas bangsa itu dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam, termasuk daya kreasi dan kreativitasnya, inovasi dan tentu saja kemampuan analisis mereka agar mampu mewujudkan potensialitasnya.

Di luar penyelesaian krisis ekonomi yang sedang melanda dimana dunia pendidikan nyaris mengalami kebangkrutan (*collapse*) sebagai imbasnya, agaknya diperlukan refleksi untuk merenungi kembali perjalanan pendidikan nasional yang berlangsung selama ini. Terutama yang bersangkutan-paut dengan pendidikan massal untuk masyarakat, yakni pendidikan sekolah. Sebab pendidikan sekolah ditengarai mampu melakukan fungsi pemberdayaan mengingat potensi kolektivitasnya yang massal dan “murah.”

Langkah korektif - untuk tidak menyebut istilah lain, misalnya reformasi pendidikan - secara mendasar perlu dilakukan. Seperti diketahui, pendidikan sekolah telah terjebak dalam pola pengembangan kurikulum yang terlalu sentralistik dan generik karena terlalu banyak pamrih berbagai bidang keilmuan dan profesi harus dipenuhi.

Didukung proses belajar mengajar yang masih tradisional dan berbagai persoalan lain seperti kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik sehingga kurang berdedikasi, kurangnya jumlah dan mutu fasilitas belajar, maka klop sudah kegagalan pendidikan sekolah dalam memberdayakan masyarakat.

Terlalu banyak pamrih tidak hanya berkaitan dengan keilmuan dan profesi, lebih dari itu juga meliputi pamrih politik. Beban pendidikan sekolah yang juga mengemban fungsi politik tidak pernah usai mencapai sasaran integrasi nasional dan jati diri bangsa, lebih setengah abad sekalipun.

Padahal beban itulah - terwujud dalam padatnya kurikulum sentralistik - yang menyebabkan fungsi pemberdayaan menjadi tereduksi dan tidak dapat melakukan transformasi sosial sesuai dengan laju perkembangan dunia.

Celakanya, hal seperti ini sudah berlangsung sejak orang mengenyam pendidikan di tingkat SD. Akibat tuntutan beban yang begitu tinggi dan tidak

proporsional, kata Dirjen Dikdasmen Zainal Arifin Achmady, banyak anak SD mengalami stres (*Kompas*, 20/3/98). Untuk itu, barangkali sudah saatnya dipikirkan sungguh-sungguh bentuk pengembangan kurikulum pendidikan yang sederhana dan hanya mencakup konsep keilmuan semata.

Jika soal ini bisa diatasi, barangkali dunia pendidikan akan mampu menjalankan fungsi pemberdayaan untuk masyarakat, khususnya si miskin yang rata-rata hanya mampu berpendidikan SD. Dengan kurikulum sederhana dan beralokasi waktu pendek, alokasi lain bisa diisi dengan program yang lentur sifatnya dan berhubungan langsung dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan pemberantasan kemiskinan dengan mengaitkan situasi nyata komunitas peserta didik.

## MENGEFEKTIFKAN PLS

Di tengah gelombang krisis yang melanda hampir semua kalangan, di tengah situasi dimana pikiran-pikiran pembangunan mengalami hambatan struktural, agaknya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sekolah akan menghadapi kendala sangat berat.

Untuk itu diperlukan upaya lain agar penengam pendidikan, khususnya yang sudah dewasa dan harus berhadapan dengan kehidupan nyata dapat tetap *survive* sekalipun yang bersangkutan berpendidikan minimal SD.

Salah satu yang masih terbuka untuk dilakukan ialah mengefektifkan jalur pendidikan yang nyaris terlupakan, yakni pendidikan luar sekolah (PLS). Di luar kursus-kursus, PLS untuk orang dewasa belum mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan andragogi sebagai bagian dari metode pendidikan kurang dikuasai oleh mereka yang bertanggungjawab atas pemberdayaan masyarakat luas. Kecuali itu, pemerintah tidak menyediakan anggaran memadai di sektor tersebut.

Padahal sangat jelas, pendidikan minimal SD selama ini tidak (dan belum) melayani kebutuhan penengamnya akan isu-isu pemberdayaan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Para nelayan dan petani yang sudah berpendidikan minimal SD misalnya, ternyata tidak berbeda dengan nelayan dan petani yang tidak berpendidikan sama sekali. Baik dalam perilaku sosial, perilaku ekonomi, apalagi perilaku politik. Mereka sama-sama dalam kondisi tidak berdaya dan selalu menjadi korban dari ganasnya kompetisi kehidupan.

Banyak riset membuktikan, kemampuan bahasa, tulis dan baca yang mereka peroleh ketika berpendidikan SD menjadi tidak berguna karena daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Lingkungan mereka tidak menyediakan sarana baca, tulis dan aplikasi atas ilmu yang telah mereka dapat. Alhasil, tidak sedikit yang kemudian berkecenderungan mengalami buta aksara kembali.

Bukti lain, ketika krisis ekonomi betul-betul menghimpit, pembagian Sembako yang dari visi pemberdayaan tidak mendidik menjadi harapan banyak pihak, khususnya masyarakat miskin. Sementara lahan-lahan kosong yang subur terbengkalai dan hasil-hasil pertanian yang dapat “disulap” menjadi pengganti barang-barang komoditas pabrik dikonsumsi ala kadarnya.

Padahal diketahui, nenek moyang kita yang nyaris tak mengenyam pendidikan formal saja dapat bertahan dengan ekonomi subsisten. Mengapa sekarang tidak? Hal itu merupakan bukti tak terbantahkan bahwa dunia pendidikan, yang paling minimal sekalipun belum berfungsi optimal untuk pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini, tugas konstitusi yang dibebankan kepada penyelenggara negara untuk mengatasi kondisi stagnan pemberdayaan masyarakat tidak optimal dilaksanakan bahkan terkesan dianaktirikan. Organisasi non-pemerintah yang banyak menjamur dengan *fund* dari berbagai sumber terkesan hanya berkiprah di tingkat wacana. Bahkan mayoritas mereka berkiprah di sektor pemberdayaan politik melalui gerakan-gerakan prodemokrasi. Jarang yang menyentuh langsung pemberdayaan masyarakat miskin di sektor ekonomi. Padahal dari situlah sebenarnya titik berangkat jika seluruh topik pemberdayaan hendak dilakukan.

Mencermati kenyataan-kenyataan itu, kita tidak boleh berpangku tangan atau hanya merogoh kocek untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Memberikan kail jelas lebih bermakna daripada memberikan ikan. Mungkin biaya yang diperlukan cukup besar. Namun akan lebih besar ongkosnya jika akumulasi ketidakberdayaan itu meletup menjadi huru-hura sosial. Sebab ketika daya kreatif tidak memadai untuk mengantisipasi keinginan tetap hidup dan bertahan, yang muncul adalah gelombang irasionalitas.

Jika gelombang irasionalitas itu bertemu dengan berbagai tekanan, maka sangat mudah bagi orang dan sekelompok orang untuk melakukan tindakan asosial dan kriminal: mencuri, merampok, menodong, atau membakar dan memusnahkan milik orang lain hanya karena dirinya tidak memiliki.

Solo, HU *Solo Pos*, 2 Mei 1998



## PENDIDIKAN KEPOLISIAN



GAMBARAN visual sebuah film seperti NYPD (*New York Police Department*), LAPD (*Los Angeles Police Department*), film-film India dan film-film lain yang berkisah tentang kehidupan profesi polisi selalu menampilkan dua sisi. Sisi pertama adalah kisah sukses mereka sebagai salah satu pilar penegak hukum dan Kamtibmas di belahan manapun. Sisi ini sarat tampilan profesionalisme polisi yang cerdas, tegas, piawai dan kredibel, berwibawa dan canggih dalam mengatasi berbagai kasus kriminalitas dan segala macam problem sosial yang bersangkutan-paut dengan penegakan hukum.

Sisi lain menampilkan kinerja polisi yang amatiran, brengsek, korup (suka makan uang sogok), dan seringkali menjadi bagian dari kriminalitas itu sendiri. Kategori polisi yang demikian bukannya menegakkan hukum, namun sebaliknya, seringkali mempermainkan hukum untuk kepentingan pribadinya.

Citra yang dibangun film tentang polisi terkadang memang tak sejalan dengan fakta sebenarnya. Namun menyangkut gambaran dan citra polisi di Indonesia, hampir semua orang maklum. Puluhan kantor Polsek dan sejumlah kantor Polres yang remuk disasar amuk massa merupakan indikator bahwa citra polisi di negeri ini belum mengembirakan, apalagi membanggakan. Bahkan di televisi pernah ditayangkan bagaimana seorang polisi yang bertugas di kawasan Senen, Jakarta ditendang dan dipukuli massa tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti.

Kekeraasan massa terhadap polisi, langsung maupun tak langsung, agaknya merupakan tafsir sosial yang sah atas eksistensinya yang cenderung militeristik, keras, tidak mengayomi, tapi seringkali menakut-nakuti. Sindiran terhadap kinerja polisi tidak saja datang dari para seniman semacam Iwan Fals, opini publik pun menempatkan figur pemeco, “jika kehilangan kambing jangan lapor polisi, sebab kalau lapor polisi, nanti akan kehilangan sapi.” Wacana paling *gross* kinerja polisi demikian tercermin dalam kasus Jeffrey Winters.

Karena itu, ketika terbetik berita bahwa polisi secara resmi mulai dipisah dari ABRI sejak 1 April 1999 (*Bernas*, 3/4/99), tak lagi berada di bawah komando Pangab, melainkan berada di bawah naungan Presiden, tetap menarik perhatian.

Jika target waktu yang dijanjikan Menhankam/Pangab Wiranto tercapai kurang dari dua tahun dalam rangka memandirikan polisi, maka derajat kemenarikannya relevan dicermati. Sebab, satu hal penting dan mendasar, yakni perbedaan doktrin (*corporate culture*) antara polisi dan militer (tentara) akan menjadi jelas. Kepolisian bertugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, pemberantas kejahatan, dan penegak hukum Kamtibmas; sementara tentara dididik untuk mengantisipasi keadaan perang, membela negara.

## **KULTUR KEMILITER-MILITERAN**

Upaya mewujudkan sosok dan kinerja polisi yang dicintai dan disegani masyarakat jelas bukan pekerjaan gampang. Selain membutuhkan waktu lama, juga mempersyaratkan perubahan mendasar dan radikal, baik piranti keras maupun piranti lunak kepolisian. Trauma masa lalu di mana polisi berkultur kemiliter-militeran tidak begitu saja mudah dihapuskan hanya dengan penyederhanaan seragam (*uniform*) dan jenis atau jenjang kepangkatan.

Sekurang-kurangnya, hal itu disebabkan beberapa hal. *Pertama*, faktor sejarah dan kebijakan. Tak kurang dari 38 tahun, yakni sejak UU Pokok Kepolisian No 13/1961 berlaku, polisi berada di bawah bayang-bayang militer. Menurut UU tersebut, polisi adalah bagian dari tentara. Posisi demikian semakin kukuh sejak Soeharto dengan Orde Barunya mengeluarkan kebijakan integrasi Polri ke tubuh ABRI. Walhasil, Polri merupakan salah satu dari dua kepolisian yang menjadi bagian dari *army force* suatu negara selain Myanmar.

Kultur kemiliter-militeran terbentuk sebagai ekses kebijakan yang memaksakan disandingkannya dua doktrin berbeda.

*Kedua*, faktor kerancuan tugas dan kewenangan. Sebagai dampak nyata faktor pertama, terjadi *over-lapping* dalam hal tugas dan kewenangan antara militer dan polisi. Pada masa Orde Baru misalnya, tugas untuk menangkap orang tak hanya dimiliki polisi. Lembaga semacam Kopkamtib, Bakorstranas, bahkan Kopassus dapat menangkap dan menggebuksi seseorang senaknya tanpa perlu mengindahkan hukum.

Sebagai “saudara bungsu” militer, polisi seringkali harus mengalah dan seakan-akan wajib meminta bantuan militer dalam menangani berbagai kasus Kamtibmas. Pengamanan demonstrasi atau unjuk rasa adalah contoh konkret hal itu.

Status sebagai “saudara bungsu” militer pulalah yang menjadikan polisi merasa *inferior*, sehingga mandul dalam menangani berbagai tindak kriminal yang langsung maupun tak langsung diduga melibatkan oknum maupun institusi tentara. Tidak tuntasnya pengungkapan kasus pembunuhan Marsinah, wartawan *Bernas* Udin, Tjetje Tadjudin, penembakan mahasiswa Trisakti, tragedi Semanggi, dan masih banyak lagi adalah contoh betapa mandulnya kinerja polisi karena terkebiri.

*Ketiga*, faktor rekrutmen yang belum komprehensif. Buruknya kinerja kepolisian agaknya tak bisa dilepaskan begitu saja dari soal ini. Sudah menjadi rahasia umum jika rekrutman polisi, baik melalui Secaba, Catam, dan lain-lain sarat dengan praktik-praktik pungli atau KKN. Didukung rendahnya persyaratan pendidikan untuk menjadi polisi, maka kelemahan SDM kepolisian makin mengaktualisasi.

Dalam kaitan ini, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM (1999) mengungkapkan ada tiga titik lemah yang mempengaruhi profesionalisme polisi, yakni: (1) kelemahan kelengkapan dasar mulai dari jumlah personal, tingkat kesejahteraan, perlengkapan, serta dukungan dana; (2) kelemahan pengembangan SDM, mulai dari *raw input* hingga praktik suap; (3) kelemahan tata kerja organisasi mulai dari tingginya tingkat stres kerja hingga buruknya sistem penilaian kerja.

Apakah pelepasan Polri dari ABRI dengan sendirinya akan benar-benar menjadikan polisi mandiri dan profesional? Secara radikal mungkin tidak, namun secara *gradual*/bisa saja terjadi dengan syarat determinan penting segera dibenahi. Syarat lainnya bergantung pada perubahan di tubuh militer. Jika paradigma militer tidak berubah (misalnya enggan kembali ke barak atau tetap mempertahankan pendekatan kekuasaan) dan demokrasi tidak berjalan, maka kinerja polisi pun tidak akan berubah. Walaupun berubah, perubahan hanya akan menjangkau struktur, bukan kinerja dan perilaku.

## **PENDIDIKAN KEPOLISIAN**

Pemisahan polisi dari ABRI membawa konsekuensi logis perubahan di tubuh Polri, yakni struktural dan fungsional. Secara struktural- menurut mantan Kapolri Kunarto - bergantung pada *stressing* tugas polisi. Ada empat opsi; jika menekankan penegakan hukum, polisi mesti di bawah Departemen Kehakiman; jika memprioritaskan ketertiban umum polisi di bawah Depdagri; jika tekanan diletakkan pada keamanan seperti sekarang, maka polisi berada di bawah Dephankam. Namun apabila diinginkan tugas yang seimbang, polisi harus mandiri dan bertanggungjawab langsung pada eksekutif (Presiden atau Wapres) seperti berlaku pada 1946.

Selaras dengan tujuan perubahan struktural, sasaran perubahan fungsional adalah perubahan kinerja dan perilaku polisi. Menurut hemat penulis, perubahan fungsional hanya akan bisa terjadi apabila ada penguatan (*reinforcement*) dan pengayaan (*enrichment*) tugas pokok universal polisi yang relatif sama di dunia, yakni tugas investigasi kriminal (reserse), tugas penyidik, tugas lalu lintas, dan fungsi patroli yang menekankan pada bentuk layanan masyarakat (*public service*).

Berkaca dari kinerja dan perilaku polisi di negara-negara demokrasi yang santun, menegak-hormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi supremasi hukum; maka secara institusional, pendidikan kepolisian pun hendaknya segera direformasi. Sebab pendidikan kepolisian yang baik (*well educated*) itulah yang turut menentukan tercapai tidaknya perubahan fungsional polisi, selain pelatihan dan kesejahteraan yang memadai (*well trained* dan *well paid*).

Dua sasaran jangka panjang, yakni kuantitas dan kualitas penting diperhatikan bagi pendidikan kepolisian. Secara bersamaan, hal itu bisa dicapai melalui revitalisasi fungsi institusi pendidikan yang ada. Model-model rekrutmen melalui Secaba, Catam, dan lain-lain kecuali Akpol atau Akmil (kepolisian) sudah saatnya dihapuskan karena mempersyaratkan tingkat pendidikan yang tidak memadai sebagai seorang polisi.

Penting direalisasikan kerjasama antara Depdikbud dengan Polri untuk membuka fakultas kepolisian di sejumlah universitas atau istitusi besar seperti UI, UGM, ITB Undip dan Unair dengan konsentrasi studi yang berbeda. Sebagai langkah awal, Ubhara (Universitas Bhayangkara) milik Polri dapat dijadikan *pilot project*.

Guna mencapai sasaran kualitas, seiring dengan gerak cepat perubahan global, kurikulum inti pendidikan kepolisian sekurang-kurangnya mesti terdiri atas mata ajar (kuliah) tentang hukum (peradilan), HAM dan demokrasi; kriminologi (konvensional dan mutakhir); teknik informatika, investigasi dan komunikasi massa; serta kemampuan beladiri tanpa senjata. Sementara mata ajar kemiliteran dan penggunaan senjata hendaknya hanya menjadi ko-kurikuler. Dengan komposisi kurikulum seperti itu, sosok polisi yang dihormati dan disegani masyarakat akan mudah dihasilkan ketimbang dengan komposisi kurikulum yang saat ini berlaku.

Yogyakarta, HU Bernas, Senin, 19 April 1999

Bab  
4



**PRESTASI DENGAN  
SEBUTIR TELUR**





## HAK ASASI ANAK-ANAK

ANAK-ANAK dan masa kanak-kanak adalah satu periode dalam hidup manusia yang sangat fundamental. Pada periode itulah dasar-dasar kecerdasan, landasan kepribadian, bangunan moralitas dan etika, serta benih-benih integritas diletakkan. Pada masa itu pula dapat ditangkap derajat minat dan kebakatan yang berkontribusi nyata kehidupan dewasanya kelak. Berhasil tidaknya unsur-unsur tersebut melekat pada manusia dewasa dipengaruhi oleh lingkungannya.

Sehingga, kita mencermati tayangan *Anak Seribu Pulan* yang disiarkan empat stasiun televisi swasta setiap hari minggu (dalam rangka menyongsong Hari Anak Nasional, 23 Juli 1996) segera tertangkap pesan, agar perhatian dicurahkan sepenuhnya kepada anak-anak dan pada masa kanak-kanaknya.

Memang harus diakui, dengan ketajaman intelektual dan instuisi sinematografinya yang handal, Garin Nugroho benar-benar berhasil membuka mata setiap pemilik televisi (yang dengan sendirinya hidup lebih dari cukup), bahwa banyak masa kanak-kanak dan hak anak-anak marginal yang terampas oleh lingkungan. Tapi sayang, Garin gagal (atau belum?) mempresentasikan terampasnya masa kanak-kanak dan hak-hak anak-anak gedongan oleh lingkungannya.

Ada perbedaan mencolok di situ, yakni, jika dalam kelompok masyarakat marginal lingkungan yang merampas masa kanak-kanak dan hak anak-anak adalah kemelaratan dan ketidakberdayaan orangtuanya, maka dalam masyarakat gedongan, lingkungan yang merampas justru kemewahan dan ambisi serta pengharapan tinggi orangtuanya terhadap anak-anak.

## MASALAH GLOBAL

Pada prinsipnya, terampasnya hak asasi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka bukan hanya berwujud pemaksaan baca, tulis dan hitung semata-mata. Dalam banyak aspek anak-anak telah menjadi korban sistem dan ambisi orang dewasa, gejala sosial ekonomi akibat industrialisasi dan peperangan antar bangsa. Mobilitas orangtua yang tinggi di tengah kompetisi ekonomi yang sangat keras, ternyata sulit diintervensi agar hak anak-anak dalam masa kanak-kanaknya bisa terjamin.

Terampasnya hak asasi anak-anak dan masa kanak-kanak tidak hanya dialami anak-anak Indonesia yang baru menapak ke era industrialisasi. Melainkan telah menjadi masalah global yang cukup mencemaskan bagi masa depan mereka. Nyaris setiap hari media masa mengungkap realitas buruk anak-anak dan masa kanak-kanaknya di seluruh dunia. Jutaan anak-anak menderita karena kemiskinan dan krisis ekonomi yang menyebabkan kelaparan, tuna wisma, terserang epidemi penyakit, kehilangan kesempatan pendidikan sehingga buta huruf dan menderita fisik akibat kerusakan lingkungan.

Kematian anak-anak setiap hari karena kekurangan gizi dan penyakit, menjadi korban dikriminasi ras, pendudukan asing dan aneksasi, menjadi pengungsi yang terlantar, cacat, menjadi korban kekejaman, penculikan dan eksploitasi seolah-olah tidak menarik lagi karena sudah dianggap biasa. Ke mana dan kepada siapa anak-anak harus mengadu?

Sekalipun PBB pada tanggal 5 Desember 1989 melalui resolusi nomor 44/25 telah menetapkan suatu konvensi mengenai Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang intinya menjamin hak-hak asasi anak, fakta-fakta di muka masih tetap berlangsung. Padahal, dalam pembukaan (*preamble*) CRC dinyatakan adanya pengakuan bahwa anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis harus tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga dalam suasana bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Resolusi PBB dalam bentuk CRC tersebut juga menekankan bahwa anak dengan berbagai alasan kurang-matangan fisik dan mentalnya membutuhkan perhatian dan pembinaan khusus. Termasuk kebutuhan perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah kelahirannya di dunia. Dan tentu saja tanpa perlu mengabaikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural dari setiap bangsa sejauh menyangkut perlindungan serta keharmonisan tumbuh kembang anak.

Jika PBB mewajibkan setiap negara anggotanya untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil dalam usaha mengefektikan implementasi hak-hak anak setiap dua tahun, serta mengevaluasi pelaksanaan dan melaporkan berbagai kendala yang dihadapi setiap lima tahun, tentu tidak dimaksudkan

sebagai upaya memaksakan kehendak. Melainkan sebagai bentuk *warning* agar dalam pembangunan nasional suatu bangsa tidak mengabaikan hal-hal mendasar tersebut.

Apalagi UNDP, yakni Badan PBB untuk Program Pembangunan telah menegaskan bahwa pembangunan manusia yang berkesinambungan adalah pembangunan yang tidak semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga pembangunan yang pro kaum miskin, pro-lingkungan alam, pro-lapangan kerja, pro-demokrasi, pro-wanita, dan pro-anak.

Kini, masalahnya tidak terletak pada ada tidaknya regulasi-regulasi produk pembangunan nasional yang mempunyai komitmen tinggi terhadap perlindungan hak-hak asasi anak dan masa kanak-kanaknya. Lebih dari itu sejauh mana praktik nyata kehidupan benar-benar menjamin tumbuh kembang mereka sesuai kodrat. Hal ini jelas bukan persoalan mudah. Sebab untuk bisa bertindak seperti itu, diperlukan pemahaman komprehensif dan pendekatan integral terhadap permasalahan anak Indonesia dalam konteks pembangunan nasional.

## **KOREKSI MENYELURUH**

Menjamin hak asasi anak-anak dan masa kanak-kanak menjadi kewajiban setiap bangsa di dunia. Kelahiran CRC seharusnya menjadi momentum penyadaran agar anak-anak dan masa kanak-kanaknya tak teraniaya. Namun, karena tingkat kemajuan, kultur dan sub kultur, serta paradigma pembangunannya berbeda satu sama lain, terjadi disparitas dalam hal intensif tidaknya perlindungan tersebut.

Masa kanak-anak dan hak asasi anak-anak Indonesia misalnya, pada prinsipnya sudah terlindungi secara hukum. Buktinya, ketika dicanangkan *Dasawarsa Anak Indonesia 1986-1996*, diluncurkan *Paket Asta Citra Anak Indonesia* sebagai pedoman dan arah baku bagi pelaksanaan pembinaan tumbuh kembang anak Indonesia sesuai bahasa, cara dan adat istiadat serta kemampuan masing-masing. Terkait CRC, Menko Kesra pun telah pula mengesahkan keputusan tentang *Pola Umum Pembinaan Kesejahteraan Anak*. Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Konvensi Hak Anak di Indonesia*, merupakan regulasi lain yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap perlindungan hak asasi anak-anak dan masa kanak-kanak. Barangkali, cuma posisi buruh anak dan anak yang bekerja serta peradilan anak yang belum jelas juntrungannya.

Kendati begitu, fakta menunjukkan bahwa perlakuan sebagian besar masyarakat masih memberi peluang pada praktik-praktik eksploitasi dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi anak-anak. Barangkali inilah “buah” dari kebiasaan kita yang sering membangun, tapi sulit memelihara .Gampang

membikin peraturan, tapi seringkali inkonsisten. Mudah berjanji, tapi enggan menepati.

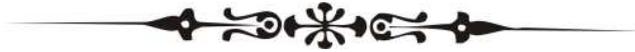
Bisa pula hal itu dikarenakan secara struktural masalah hak asasi anak dan masa kanak-kanak terkait proses besar pembangunan yang lebih mengarah kepada *developmentalisme* ketimbang *modernization*. Pembangunan terlalu menitikberatkan pada infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga perilaku sosial terabaikan, tidak transformatif dan mengakibatkan anak berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan.

Untuk bisa menjamin hak-hak anak dan masa kanak-kanak, diperlukan pendifusian yang intensif atas berbagai ketentuan yang berlaku. Lebih penting lagi, perlu ada koreksi menyeluruh atas pradigma pembangunan sosial yang diterapkan selama ini. Siapa nyana, hal-hal yang semula dianggap mapan dan sesuai karena terkesan sistemik, strategis dan transformatif, ternyata menambah ragam penderitaan sosial dan ekonomi sebagian besar orang dewasa yang pada gilirannya melahirkan keabsahan berbagai bentuk perampasan atas hak-hak anak dan masa kanak-kanak. Momentum Hari Anak Nasional merupakan saat yang tepat untuk melakukan introspeksi, sekaligus koreksi.

Jakarta, HU *Media Indonesia*, 23 JULI 1996



## PRESTASI DENGAN SEBUTIR TELUR?



TIDAK tanggung-tanggung, enam menteri Kabinet Pembangunan VI terlibat. Bukan soal korupsi, kolusi atau persekongkolan politik. Melainkan kerja bersama menggarap program yang pada tahun 50-an hingga awal tahun 70-an pernah populer, yakni program Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS).

Program beranggaran sekitar 67 milyar rupiah ini diberikan kepada masing-masing siswa sekolah dasar (SD) di desa-desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) mulai 14 Juli 1996. Kira-kira hari kedua tahun ajaran baru 1996-1997.

Program prestisius (ambisius?) ini diberikan kepada para siswa sebanyak tiga kali seminggu. Untuk wilayah Indonesia bagian barat disediakan anggaran Rp 250/siswa/hari, sementara untuk wilayah Indonesia bagian Timur dianggarkan Rp 350/anak/hari. Bilangan rupiah yang setara dengan sebutir telur asin atau setengah gelas susu.

Namanya saja makanan jajan tambahan, pastilah tidak dimaksudkan sebagai iming-iming agar para siswa SD rajin masuk sekolah. Melainkan sebagai pasokan tambahan gizi yang diharapkan mempunyai dampak fisiologis positif.

Mengapa baru sekarang hal itu terpikirkan? Di saat SD benar-benar keropos secara fisik maupun intelektual? Dan mengapa jumlahnya “cuma” secuil dibandingkan rencana pembiayaan menara Jakarta, jalan tol Semarang-Solo atau Yogya-Surabaya? Barangkali pertanyaan itu tergolong “nakal” karena bernada “sinisme” yang tidak semestinya dilontarkan.

Namun, mengingat SD merupakan basis pembangunan sumberdaya manusia yang sangat menentukan bagi jenjang pendidikan berikutnya; sementara diketahui 140 juta orang berpenghasilan Rp 2.692/hari dan 27 juta orang berpenghasilan hanya Rp 1.346/hari (Data BPS, 1993), maka pertanyaan bernada gugatan itu relevan diajukan.

## GIZI DAN PRESTASI

Nilai gizi yang dikonsumsi melalui makanan oleh seseorang tidak disangsikan berkaitan erat dengan kinerja fisiologis manusia. Terutama bagi anak sekolah yang sedang mengalami tumbuh kembang, hal itu diketahui betul.

Kendati tidak mesti berkaitan erat dengan prestasi seseorang, kenyataannya sejumlah produsen obat terang-terangan mengiklankan produknya sehubungan dengan keinginan untuk mencapai prestasi tinggi. Logikanya sederhana, anak yang kurang gizi seringkali sulit menangkap bahan ajar dan dengan sendirinya malas belajar.

Hasil survei Depdikbud (1994) terhadap 600 ribu siswa SD di 27 provinsi menunjukkan bahwa 14 persen dari mereka terganggu pertumbuhannya karena mengkonsumsi sebatas 70 persen dari energi (kalori) yang diperlukan dalam sehari. Akibatnya, 30-40 persen menderita kekurangan darah (anemia) dan dalam rentangan 50-80 persen menderita cacangan.

Dua hal itulah, yakni kekurangan gizi dan cacangan yang menjadi salah satu sebab tingginya angka putus sekolah di SD sebagai masalah besar yang dihadapi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kekurangan gizi dan cacangan mengganggu daya tahan belajar dan berimplikasi pada keengganannya bersekolah serta rendahnya prestasi mereka.

Sebenarnya soal rendahnya prestasi belajar secara nasional tidak hanya dialami siswa SD. Baik di tingkat SMP maupun SMA juga demikian. Dari data Balitbang Depdikbud sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini diketahui betapa rendah derajat pencapaian prestasi mereka ditilik dari rerata hasil Ebtanas dalam bentuk nilai Ebtanas murni (NEM).

**NEM Rata-rata Nasional Tahun Ajaran 1993/1994**

	PMP	B. Ind	Mat	IPA	Fisika	Kimia	Biologi	B. Inggris
<b>SD</b>	7,15	6,39	5,42	5,60	-	-	-	-
<b>SMP</b>	6,11	6,83	3,69	4,60	-	-	-	4,69
<b>SMA</b>	6,67	6,84	4,72	-	4,70	4,37	5,53	5,22

Padahal, penentuan NEM itu berdasarkan pendekatan norma (*norm reference test*), yakni derajat kemampuan seorang siswa dibandingkan berdasarkan kelompoknya. Bukan berdasarkan pendekatan patokan (*criterion reference test*) dimana kemampuan seseorang diukur berdasarkan persentase daya serapnya terhadap seluruh bahan ajar.

Niscayakah mengatrol prestasi hanya dengan sebutir telur? Tentu saja tidak, sebab PMT-AS pastilah tak berharap semuluk itu. Apalagi siapa pun

paham bahwa gizi bukanlah satu-satunya determinan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar seseorang. Anak yang berprestasi rendah tidaklah mutlak ditentukan oleh kerendahan gizi yang dikonsumsinya.

Banyak faktor bisa direntang. Tetapi tak bisa disangkal bahwa anak yang kekurangan gizi pastilah tidak mampu belajar optimal. Ketidakoptimalan belajar tentu saja akan mempengaruhi kadar hasil belajarnya.

Hasil riset Lynch (1994) menunjukkan kuatnya hubungan antara kekurangan gizi dengan pendidikan. Di lingkungan masyarakat yang kekurangan gizi secara endemik, anak-anak yang kekurangan energi protein yang gawat cenderung lambat masuk sekolah dan mudah putus sekolah.

Namun begitu, intervensi dari gizi harus dibarengi dengan pendekatan pendidikan. Lynch mengatakan, kelemahan karena energi protein dapat dimediasi melalui pendekatan pendidikan, sosial, dan fisiologis mengikuti rehabilitasi nutrisi.

Berdasarkan temuan itu barangkali, pemerintah berniat menambah kandungan gizi anak-anak SD sekitar 300 kalori dan 5 gram protein atau minimal menambah 15-20 persen gizi yang mesti dikonsumsi. Apakah anggaran per anak sebesar itu bisa mencukupi sementara harga-harga tidak terbelah daya lambungnya? Persoalannya bukan cukup atau tidak cukup. Sebab anak-anak SD di desa tertinggal, gizi sedikit lebih bermakna ketimbang tidak sama sekali.

Siapa tahu hal itu bisa berhasil meningkatkan kesehatan, kegairahan belajar, kehadiran siswa di sekolah, daya serap siswa, dan yang terpenting bisa memancing peran serta masyarakat mampu secara melembaga untuk memberikan sumbangsinya. Sebab di kalangan masyarakat mampu, makanan kecil yang tidak bergizi dengan harga lebih besar PMT-AS kenyataannya dikonsumsi secara besar-besaran.

Alangkah bahagianya anak-anak miskin itu kalau anak-anak mampu bisa mengurangi jajan *supermarket*-nya untuk ditambahkan ke PMT-AS sehingga jumlahnya memadai.

## **KAPAN UNTUK GURU?**

Pelarangan terhadap suplai konglomerat atas PMT-AS dengan makanan-makanan instant seperti susu kaleng, mie instant, dan sebagainya sangat positif. Sebab dengan demikian makanan bergizi yang hendak diberikan melalui PMT-AS bisa disuplai oleh daerah masing-masing.

Dengan demikian roda ekonomi dan perputaran uang di desa-desa IDT bisa hidup. Kecuali itu, jangan sampai terjadi monopoli oleh pengusaha tertentu yang jelas-jelas akan merugikan.

Kendala seperti tidak semua anak akan memakan makanan yang disediakan karena tidak terbiasa sekalipun makanan itu sangat baik gizinya juga perlu mendapat perhatian. Lebih penting lagi ialah diperlukan kejujuran pihak-pihak pelaksana seperti sekolah dan ibu-ibu PKK. Sebab hal itu menyangkut uang dan hak-hak si miskin. Kalau perlu dibuka pos pengaduan manakala ada sekolah yang dengan berbagai alasan tidak melaksanakan PMT-AS sementara dana yang tersedia sudah diambil.

Pertanyaan selanjutnya, kapan program sejenis diberikan kepada para guru SD? Pertanyaan ini tidak mengada-ada. Sebab guru SD diketahui paling lemah ekonominya dibanding guru di jenjang lainnya. Apalagi seorang guru SD diharuskan menguasai banyak bahan ajar karena sistem guru kelas mengharuskan demikian. Seringkali terjadi para guru SD itu tidak mampu lagi menganggarkan makanan bergizi di rumah karena daya belinya yang rendah. Padahal gizi yang baik bagi guru sangat “penting” untuk kegairahan mengajar.

Hasil survei IESCE (1995) – LSM yang bergerak di bidang studi-studi kependidikan dan pemberdayaan anak – di 31 SD di wilayah IDT yang tersebar di Jatim dan Jateng menunjukkan, selain kelas rendah I dan II, rata-rata 2-3 kelas dari 65 persen SD-SD tersebut memulai jam belajar pada pukul 08.00 pagi atau lebih dan mengakhirinya sebelum pukul 12.30 siang.

Ketidakmampuan SD-SD tersebut melaksanakan pembelajaran mulai pukul 07.30-13.30 sesuai jadwal belajar nasional sebagian besar dikarenakan faktor guru. Keadaan ekonomi memaksa para guru-guru itu “mencuri” waktu mengajar untuk melakukan aktivitas ekonomi selain mengajar.

Sejalan dengan pandangan Lynch, agaknya benar bahwa rehabilitasi nutrisi – apalagi “hanya” dengan sebutir telur – tidak serta-merta akan dapat mendongkrak prestasi belajar anak-anak tanpa disertai pendekatan lainnya. Sekalipun begitu, PMT-AS sudah cukup berbau pemerataan ekonomi nasional setelah pertumbuhan ekonomi tercapai.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 12 April 1996



## **INPRES PMT-AS BUTUH KREDIBILITAS PELAKSANA**



HOWARD E. Freeman jelas bukan orang pertama yang berhasil membuktikan korelasi positif antara nutrisi (makanan) dengan peningkatan kinerja kognitif anak-anak sekolah. Sebab sebelumnya, ahli-ahli gizi telah berkuat di laboratorium untuk membuktikan bahwa kesehatan dan kandungan gizi pada makanan berpengaruh pada kekuatan fisik dan psikis seseorang. Sekalipun demikian, kenyataannya hasil-hasil eksperimentasi Freeman (1977) dan kawan-kawan, pada anak-anak di perdesaan Guatemala sejak 1968 telah mengilhami banyak negara untuk melakukan hal yang sama, yakni rehabilitasi nutrisi melalui makanan tambahan.

Apalagi riset mutakhir sebagaimana dipublikasikan James Lynch (1994) dalam laporan Bank Dunia berjudul *Provision for Children with Special Educational Needs in the Asia Region* menunjukkan kuatnya hubungan antara kekurangan gizi dan pendidikan. Dalam lingkungan masyarakat kekurangan gizi secara endemik, anak-anak yang kekurangan energi protein gawat cenderung lambat masuk sekolah dan mudah putus sekolah.

Terkait dengan pendekatan baru dalam memahami anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dalam pendidikannya, diketahui dalam jumlah besar masih terdapat anak-anak yang telah berada di sekolah namun karena berbagai alasan tidak mencapai kemajuan sebagaimana layaknya. Kebanyakan mereka mudah putus sekolah atau tinggal kelas. Mereka adalah anak-anak miskin dengan kondisi fisik dan kesehatan yang kurang baik, sehingga semangat belajarnya rendah.

Itulah antara lain yang mendorong pemerintah melakukan program rehabilitasi nutrisi sejak 15 Juli 1996 dengan jalan memberikan makanan

tambahan untuk anak sekolah kepada masing-masing siswa sekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtida'iyah (MI) di desa-desa IDT di luar Jawa. Program itu merupakan langkah lanjutan IDT sebagai salah satu bentuk pemerataan ekonomi mengiringi pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Awalnya, program beranggaran sekitar Rp 70 miliar ini diperuntukkan 2,1 juta siswa yang tersebar di 16.800 SD/MI hingga tahun 2000, diharapkan program tersebut akan menjangkau keseluruhan siswa SD/MI yang mencapai 29,28 juta dengan perkiraan biaya mencapai Rp1 triliun. Program yang semula berada dalam Inpres kesehatan, menurut penjelasan Presiden Soeharto dalam Pidato Nota Keuangan di depan sidang DPR RI, 6 Januari 1996, akan menjadi Inpres baru dengan nama Inpres PMT-AS.

Banyak kalangan menilai, dilansirnya Inpres PMT-AS menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam mencurahkan perhatian pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sebab jika mencapai sasaran, PMT-AS bisa meningkatkan kondisi fisik siswa dan merangsang anak sekolah giat belajar. Kecuali itu, PMT-AS akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan karena bahan baku makanan diwajibkan berasal dari desa bersangkutan.

Persoalannya ialah, bagaimana meengurangi bias agar risiko yang sudah menggejala dialami Inpres-inpres lain yang dibiayai APBN tidak merembet ke Inpres PMT-AS? Sebab seperti diketahui, risiko paling besar yang terjadi dalam proyek Inpres adalah penyelewengan. Inpres untuk pembangunan gedung SD misalnya, terbukti banyak dimanipulasi. Sehingga bangunan SD tidak memenuhi standar. Membahayakan siswa karena banyak yang roboh sebelum batas waktu pakai sebagaimana mestinya.

Bukti lain adalah IDT. Tanpa mengecilkan keberhasilan progam ini, akronim IDT yang dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai salah satu wujud pemerataan ekonomi itu sering dipelesetkan meenjadi "Ini Duit Tiban." Sehingga tidak sedikit kepala desa sebagai penanggung jawab menggunakan dana IDT tidak sebagaimana mestinya.

Untuk meminimalkan risiko penyelewengan, Inpres PMT-AS membutuhkan kredibilitas pelaksananya. Kredibilitas itu antara lain berupa kejujuran, kesungguhan, ketekunan, dedikasi, dan pengabdian serta menjauhkan interes ekonomi yang tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Misalnya makanan tambahan harus benar-benar diproduksi penduduk desa bersangkutan. Tidak berasal dari pasokan pengusaha. Apalagi sampai memberi monopoli kepada pengusaha tertentu.

Namun perlu diingat, seringkali menyerahkan faktor kredibilitas kepada para pelaksana merupakan langkah spekulatif yang mengandung risiko tinggi.

Akan lebih baik jika ada tim pengawas independen yang memantau pelaksanaan Inpres PMT-AS. Pengawas independen itu tidak perlu dibentuk melalui rekrutmen baru. Cukup dengan memanfaatkan personalia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat, Ibu-ibu anggota PKK, dan wakil masyarakat.

Sanksi berat layak diberlakukan kepada mereka yang terbukti menyelewengkan duit tak seberapa itu. Kalau perlu dibuka pos pengaduan, manakala ada sekolah yang dengan berbagai alasan tidak melaksanakan Inpres PMT-AS sementara dana yang tersedia sudah diambil.

Inpres PMT-AS sebagai bentuk pemerataan ekonomi, di atas kertas sangat positif. Meski begitu, pelaksanaannya harus tetap dibarengi dengan pendekatan pendidikan. Tanpa pendekatan pendidikan yang konsisten, segala upaya untuk meeningkatkan SDM akan sia-sia. Sebab Inpres PMT-AS barulah sebatas pemberian makanan jajan tambahan. Sebagai pasokan tambahan gizi diharapkan mempunyai dampak fisiologis positif, bukan pemberian jaminan gizi sehat secara absolut (rutin).

Apalagi dengan dukungan dana yang “cuma” Rp 263 miliar tahun 1997-1998, barangkali secara teknis Inpres PMT-AS akan sama dengan tahun lalu. Makanan tambahan akan diberikan kepada siswa sebanyak tiga kali seminggu. Untuk kawasan Barat Indonesia ditetapkan Rp 250/ siswa, sementara untuk kawasan Timur Indonesia dianggarkan Rp 350/ anak/hari.

Jakarta, HU *Republika*, Jum'at, 24 Januari 1997



## **MENGEFEKTIFKAN GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK**



PADA tataran institusional, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, anak-anak secara sistematis telah terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap hari mereka diancam bahaya pembunuhan potensi kreatif akibat ambisi tak terkendali orang dewasa. Data-data konkret keadaan nasib anak-anak diberbagai negara yang sangat megenaskan itu dapat disimak jelas dalam buku *The State of the World's Children* (1996) terbitan Unicef (Dana Anak-anak PBB). Dalam salah satu bagian Unicef menulis bahwa mulai tahun 2000, agaknya anak-anak akan menjadi topik pembicaraan dan isu utama dalam agenda internasional tentang hak-hak asasi anak akan mengalahkan topik-topik lain seperti peperangan dan kemiskinan.

Oleh karena itu, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli 1998, berbagai pokok pikiran tentang upaya mengefektifkan gerakan nasional perlindungan anak, termasuk menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga perlindungan anak di tengah badai krisis ekonomi sangat relevan dikedepankan.

Perlindungan anak diperlukan karena fakta bahwa masalah pelanggaran hak-hak asasi anak telah menjadi kecenderungan global yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga terjadi di belahan lain. Anak-anak di negara-negara dunia telah menjadi korban sistem dan ambisi orang dewasa, tumbal gejolak sosial ekonomi akibat industrialisasi serta menderita akibat peperangan antarbangsa dan perang saudara.

## PRIORITAS PERHATIAN

Dari sederet pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak-anak, ada beberapa kasus besar yang saat ini perlu mendapatkan prioritas perhatian serius semua pihak. Kasus-kasus tersebut antara lain ialah pelecehan seksual dalam bentuk pelacuran anak-anak akibat krisis ekonomi; perdagangan anak-anak dengan kedok adopsi; ketiadaan akses berbagai hal sehingga mereka menjadi komunitas anak jalanan; serta terabaikannya hak-hak anak yang bekerja dan pekerja anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah terampasnya hak tumbuh kembang mereka secara alami sesuai kodrat dan kemampuannya.

Terkait kasus pertama dan kedua, peneliti PBB sekaligus pengacara asal Filipina, Ofelia Calcetas Santos pernah mengatakan bahwa jumlah anak-anak yang diperdagangkan ke dunia pelacuran dan untuk diadopsi mengalami kenaikan dramatis di seluruh dunia. Untuk wilayah Asia saja, terdapat sekitar 1 juta anak-anak pelacur dengan jumlah terbesar di India, Thailand, Taiwan dan Filipina. Bahkan di negeri makmur seperti Amerika Serikat, menurut Uncef diperkirakan 300.000 anak telah terjerumus ke dunia itu.

Menurut perkiraan Unicef, sekitar sejuta anak-anak mengalami eksploitasi seks secara global setiap tahun. Karenanya, sebagai pejabat pelapor khusus PBB mengenai masalah tersebut, ia meminta pemerintah di seluruh dunia agar meningkatkan usaha pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Dalam konteks di Indonesia, kasus penjualan De (14 tahun) sebesar Rp 2 juta oleh ibunya Ny Kar dengan alasan dililit utang melalui dua mucikari di Bandung tahun lalu dan yang juga terjadi di Solo tak lama berselang, ibarat gunung es yang hanya tampak puncaknya saja. Bagian terbesar yang tenggelam karena tak terungkap tentu jauh lebih besar. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum, pelanggaran tertinggi dan paling nyata terjadi adalah diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah akibat berbagai sebab. Termasuk di dalamnya makin maraknya penganiayaan anak.

Sementara kasus ketiga, yakni fenomena anak-anak jalanan yang nyaris tidak mendapat perlindungan negara, menjadi penghias tak sedap hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Komunitas anak-anak jalanan yang termarginalisasi kuantitasnya makin besar akibat krisis ekonomi yang tak kunjung teratasi. Bisa dibuktikan, di seluruh perempatan jalan dan tempat-tempat ramai lainnya di seluruh kota besar di Indonesia dipenuhi anak-anak jalanan yang mengadu nasib, menyambung hidup serta berjudi dengan peruntungan.

Pada sisi lain, anak-anak yang bekerja (*working children*) seringkali harus kehilangan kesempatan untuk merajut masa depannya melalui pendidikan yang memadai. Sedangkan pekerja anak-anak menjadi *bonded labour* (buruh anak yang

terpasung) karena hak-haknya sebagai pekerja terus menerus dikebiri. Menurut ILO (Organisasi Buruh Internasional, 1996), ada sekitar 100-200 juta orang. Dari jumlah itu, 7 persen berada di Amerika latin, 18 persen di Asia dan 25 persen di Afrika.

Di Indonesia, data BPS 1994 menunjukkan ada sekitar 1,9-2,5 juta anak yang secara ekonomi aktif, yakni yang mereka berusia 10-14 tahun. Sebagian besar, yakni lebih dari 70 persen ada di sektor pertanian. Namun, banyak kalangan menilai, data itu sebagai estimasi yang konservatif. Sebab data Depdikbud menunjukkan, ada sekitar 6,5 juta anak usia pendidikan dasar (7-10 tahun) tidak bersekolah atau putus sekolah. Sekali pun tidak diasumsikan seluruh anak-anak itu bekerja, tak terlalu sulit menyimpulkan bahwa masalah pekerja anak adalah soal serius yang perlu mendapat penanganan bersama secara terintegrasi.

Dalam hal tumbuh kembang, orang dewasa-melalui tangan panjang Taman Kanak-kanak dan Play Group, telah memaksa anak-anak untuk membaca, menulis bahkan berhitung di usia dini. Sementara layar gelas (televisi) telah pula merampas hak-hak bermain mereka dengan “memaksa” anak-anak menonton tayangan yang bukan porsinya. Dalam hal terakhir, YKAI (1996) menyebutkan, hanya 3,6 persen atau rata-rata 4,6 jam/minggu televisi menyajikan tayangan porsinya untuk anak-anak.

## **MENJAMIN KEBERPIHAKAN**

Pada tanggal 5 Desember 1989, melalui resolusi nomor 44/25, PBB telah menetapkan suatu konvensi Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child/ CRC*) yang pada intinya menjamin perlindungan bagi hak-hak asasi anak. Sekali pun banyak negara (termasuk Indonesia) telah meratifikasinya, komitmen perlindungan terhadap hak-hak asasi anak belumlah sesuai harapan. Padahal, sebagaimana dikatakan PBB dalam buku *ABC, Teaching of Human Rights*, hak-hak asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada manusia (termasuk anak) yang tanpa itu, ia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya seorang manusia.

Dalam UU No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Bab II Pasal 2 hingga Pasal 9, telah ditentukan Hak Anak. Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil dan optimal untuk kehidupan anak jika syarat-syarat seperti faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak; nilai budaya yang memberi kebebasan bagi tumbuh kembang anak; solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak, dapat terpenuhi.

Sejauh ini, Indonesia belum mempunyai program nasional yang konkret untuk melindungi hak-hak asasi anak. Kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi anak belum holistik dan belum sungguh-sungguh. Padahal setiap kebijakan, baik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial nasional, maupun dalam kerangka pembangunan pendidikan dan kebudayaan, haruslah menjamin keberpihakan kepada perlindungan hak-hak asasi anak secara total. Lembaga GNOTA yang diperuntukkan anak-anak yang terancam putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya; serta program “Rumah Singgah” yang dilaksanakan Depsos belum sepenuhnya efektif bagi upaya mengurangi anak-anak yang menderita.

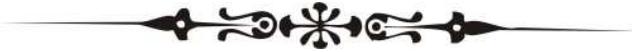
Dalam kaitan itu, diperlukan upaya serius untuk mengefektifkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak agar mampu memberi spirit positif agar setiap orang dewasa, institusi negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah serta sekolah berkomitmen tinggi terhadap masa depan anak-anak.

Solo, HU *Solopos*, 23 Juli 1998

# 5



## **OTONOMI SEJATI TUMBUH KEMBANG ANAK**



BELUM lama berselang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Wardiman Djojonegoro, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan elektronik mengingatkan kembali pentingnya menghargai hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya. Sebab selama ini banyak pelaku, baik di masyarakat secara umum maupun di lingkungan keluarga yang tidak sadar akan hak-hak anak.

“Kegusaran” Mendikbud itu sebenarnya bukan hal baru. Soalnya, ketika Fuad Hassan menjabat sebagai Mendikbud, hal yang sama juga pernah dilontarkan. Jika kemudian masalah itu dikedepankan lagi, tentu bukan tanpa argumentasi.

Dan agaknya bukan semata-mata kebetulan pula jika pada tanggal 2 September 1995 lalu diselenggarakan sarasehan sehari bertema tunggal “Refleksi 50 Tahun Kemerdekaan Anak Indonesia” oleh YLSSPM Cakra Indonesia di Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.

Sarasehan yang menampilkan pembicara utama Dr Mansour Fakih, YB Mangunwijaya dan Dr Muji Sutrisno SJ itu menggarisbawahi pentingnya perenungan lebih mendasar tentang fungsi dan peran pendidikan kritis, demokratis dan berprinsipkan keadilan, sesuai dengan hakikat tumbuh kembang anak dan lingkungan di mana mereka berada.

Mengingat hak-hak anak yang terampas dari hari ke hari makin memprihatinkan, maka makna penegasan Mendikbud dan tema inti sarasehan itu menjadi relevan diperbincangkan. Terutama jika dikaitkan kenyataan bahwa Undang-undang perlindungan anak, peradilan anak, dan Undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak belum ada di Indonesia.

## OTONOMI SEJATI

Kita yakin setiap orangtua pasti memahami bahwa keluarga merupakan institusi pertama penentu internalisasi nilai-nilai pada anak. Namun tidak dengan sendirinya setiap orangtua mampu mengindahkan bahwa dalam proses internalisasi itu anak harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek.

Kita yakin hampir setiap orangtua maklum bahwa moralitas dan jalinan simpatik antar interaksi dalam keluarga mam-pu menghadirkan rasa aman pada anak. Tapi belum tentu setiap orangtua acuh bahwa rasa aman itu mestilah dihadirkan dan dikembangkan dalam dimensi yang lebih longgar ke arah kebebasan dewasa secara layak dan lebih konkret.

Kita yakin setiap orangtua pasti mengerti bahwa model identifikasi positif keluarga sangat efektif guna membangkitkan motivasi internal dan mengangkat potensi kreatif anak-anak. Namun tidak otomatis setiap orangtua menghayati bahwa kebangkitan motivasi internal dan potensi kreatif itu patut diejawantahkan menuju terserapnya nilai-nilai rasionalitas yang seimbang dengan nilai-nilai religiositas.

Mencermati kenyataan-kenyataan itu, ada baiknya kita angkat kembali pandangan klasik tentang psikologi anak dan preseden-preseden pedagogis yang selayaknya diperhatikan.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Begitulah pemahaman para ahli psikologi yang sampai saat ini diyakini kebenarannya. Hal itu berarti, setiap orang dewasa tidak boleh memaksakan kehendak dan menjadikan anak sebagai medium programatik sebagaimana direncanakan oleh orang dewasa. Dalil ini kita tekankan karena secara pedagogis perlakuan terhadap anak-anak sudah ke luar jalur. Dalam arti mengabaikan tahapan-tahapan perkembangan anak.

Lembaga prasekolah (Taman Kanak-kanak), *play group*, dan lain-lain misalnya, tidak lagi menjadi medium sosialisasi dan wahana bermain yang nyaman. Didukung kecenderungan orangtua yang menaruh pengharapan tinggi kepada anak-anak, mengharuskan lembaga prasekolah menjadi ajang persiapan anak menjalani pendidikan dasar di tingkat SD.

Kondisi seperti itu bukan tanpa disadari. Namun karena kesadaran tersebut tidak disertai niat yang tulus untuk memperbaiki keadaan, maka praktik perampasan hak-hak anak untuk bermain selalu saja terjadi. Padahal lembaga pendidikan prasekolah seharusnya memberikan peluang bagi perkembangan kepribadian anak melalui proses bermain. Sebab bermain adalah sifat yang melekat pada kodrat anak dan merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati.

Memang harus diakui, harapan tertinggi pada tumbuh kembang anak adalah pencapaian sikap kreatif, kritis, adaptif, dan matang dalam segala hal. Na-mun hendaknya juga disadari bahwa penumbuhan dan pembinaan sikap-sikap tersebut hanya akan efektif jika mengacu pada sekurang-kurangnya dua matra, yakni matra kerja baik instru-mental maupun strategis dan matra komunikasi.

Kedua matra tersebut tentu saja berpijak pada landasan dasar psikologi anak. Misalnya saja pemahaman mengenai perkembangan anak yang oleh banyak pakar diyakini (juga dibuktikan melalui riset mendalam) tidak bersifat *instant*. Sekurang-kurangnya ada tiga prinsip yang layak diketahui, yakni, *pertama*, bahwa pada setiap anak berlaku tingkat perkembangan yang tidak sama. *Kedua*, bahwa setiap perkem-bangan selalu berjalan secara teratur. *Ketiga*, bahwa perkem-bangan anak akan berjalan tahapan demi tahapan (periksa Woolfolk & Nicolich, 1984).

Jika kita yakini itu, maka sebaik-baik orang dewasa (orangtua) adalah pendidik yang menghargai otonomi sejati anak untuk tumbuh kembang sesuai kodratnya. Anak-anak membutuhkan keleluasaan untuk mengaktualisasikan dirinya betapa pun bergantungnya mereka pada orang dewasa. Anak-anak adalah subjek yang tengah dalam proses tumbuh kembang menjadi manusia paripurna, yakni manusia dewasa.

Banyak kalangan yang peduli akan pentingnya otonomi sejati tumbuh kembang anak, mengajukan *warning* bahwa terampasnya otonomi mereka secara dini akan berakibat fatal bagi tahap akhir perkembangannya. Contoh konkret paling “sepele” adalah soal pemberian air susu Ibu (ASI).

Seringkali terjadi karena ba-nyak hal - misalnya saja atas nama (maaf) menjaga vitalitas payudara, ada tamu atau malu dilihat orang lain, (sekali lagi maaf) “direbut” sang Bapak, terkuras tenaganya karena harus mengerjakan banyak hal, dan sebagainya - “hubungan kasih sayang” antara Ibu dan anak melalui pemberian ASI terenggut paksa.

Padahal pemberian ASI mempunyai dampak psikologis (juga fisiologis) yang sangat penting bagi perkembangan anak. Kalau sejak dini anak sudah dibiasakan mendapati kekecewaan dan frustrasi kare-na sebab pokok kenikmatannya memperoleh ASI direnggut paksa, maka jangan salahkan kelak jika dewasa menjadi manusia yang suka memberontak, acuh tak acuh, kurang patuh, agresif, dan sebagainya.

## KELUARGA PILAR UTAMA

Di muka sudah disinggung soal dua matra penting bagi pembinaan dan penumbuhan kedewasaan anak agar kreatif, adaptif dan matang, yakni matra kerja dan matra komunikasi. Jika matra kerja lebih dititikberatkan pada kebergantungannya dengan status ekonomi, status pendidikan, dan dinamika aktivitas orangtua, maka matra komunikasi lebih mengacu pada proses dialektika yang terjadi dalam keluarga sebagai pilar utama.

Seperti diyakini banyak orang, keluarga merupakan “jendela” pertama bagi anak melihat ke luar, ke masyarakat luas. Dalam keluargalah pertama kali mereka berhubungan dengan kekuasaan, berkenalan dengan perbedaan peran (Ayah-Ibu-Adik-Kakak-Saudara-Paman-Bibi-Pembantu, dan sebagainya).

Dalam keluarga pula mereka belajar berorganisasi, bekerjasama, mengambil keputusan, mengatasi masalah-masalah, bersengketa dan berbeda pandangan, penyelesaian, rekonsiliasi, dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan tumbuh kembang anak menuju kedewasaan yang sempurna.

Dalam kaitan ini, kualitas kontak antaranggota keluarga menjadi indikator sejauh mana keluarga sebagai lembaga pendidikan berperan penting bagi terciptanya suasana keterbukaan yang menjamin kemerdekaan kreatif anggotanya. Keterbukaan diletakkan paling depan karena menjadi inti dialektika dan penentu keberhasilan matra komunikasi.

Pentingnya membangun iklim keterbukaan dalam keluarga sebagai sarana pendewasaan anak menjadikan fungsi keluarga sebagai pilar utama tak bisa tergantikan oleh institusi lain (Lein & O'Donnel, 1984). Institusi lain semisal sekolah dan kelompok-kelompok paguyuban di tengah masyarakat hanya bersifat komplementer. Maka, adalah kesalahan besar jika orangtua atas nama dinamika aktivitas menyerahkan tumbuh kembang anak kepada institusi lain.

Freud mengatakan, *“children is the father of the man.”* Itu tandanya isyarat bagi kepedulian untuk menata pribadi dewasa pada anak perlu dijamin keluarga. Dengan apa? Seperti dikatakan Mary Lee Grisanti, dkk (1990), dengan cinta, kepercayaan, dan dorongan. Berilah otonomi sejati pada anak sejak dini. Niscaya ia akan benar-benar menjadi “manusia.”

Yogyakarta, HU. *Bernas*, Senin, 18 September 1995



## TANTANGAN 'EDUCATION FOR ALL' DI INDONESIA



PRESIDEN SOEHARTO selaku kepala negara yang mendapat kesempatan pertama berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Copenhagen, Denmark, menegaskan pentingnya mewujudkan kesepakatan dan tekad guna melaksanakan *Education for All* (Pendidikan untuk Semua). Hal itu penting dilaksanakan sebagai prasyarat utama untuk meningkatkan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bagi semua orang dalam melalui pembangunan (*Media Indonesia*, 11/3/95).

Dalam pertemuan informal tingkat kepala negara/pemerintahan negara-negara E 9 (Indonesia, Bangladesh, Brazil, Cina, India, Mesir, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan), yakni sembilan negara yang ikut melahirkan deklarasi New Delhi di India pada 16 Desember 1993, Presiden juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga (*Kompas*, 11/3/95).

Dalam kaitan itu kita setuju penilaian Editorial *Media Indonesia*, bahwa apa yang dikemukakan Presiden Soeharto merupakan bukti besarnya tanggung jawab sebagai Ketua GNB dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan pendidikan rakyat.

Apalagi pemegang "Avicenna Award 1993" dari UNESCO ini juga bertanggung jawab atas posisi Indonesia yang dinilai "unggul" dengan mengantungi nilai "plus 23" bagi kinerja Indonesia di bidang pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam *The Progress of Nations* (Unicef, September 1993) yang memuat data kemajuau setiap negara dalam upaya mencapai kebutuhan dasar manusia menjelang tahun 2000.

Masalahnya, tantangan apa yang perlu mendapat prioritas penanganan agar pelaksanaan *Education for All* benar-benar berhasil?

## TANTANGAN BERAT

Tantangan berat pelaksanaan *Education for All* bagi negara-negara berkembang antara lain ialah besarnya jumlah penduduk. Diperkirakan mencapai 3,265 miliar pada tahun 2000. Satu hal yang tidak akan pernah terjadi pada negara-negara maju di Utara. Termasuk di dalamnya ia-lah makin meningkatnya jumlah utang negara-negara tersebut.

Sebab, seperti dikatakan Lourie & Reiff (1988) dalam *Toward International Strategy of Basic Education for All*, suramnya prospek pendidikan dasar di negara berkembang (termasuk Indonesia) tidak sepenuhnya akibat kegagalan pendidikan. Kondisi tersebut lebih merupakan akibat dari suatu kemiskinan yang meningkat karena berbagai sebab, antara lain me-ningkatnya utang negara-negara berkem-bang.

Sementara bagi Indonesia, tantangan berat yang dihadapi bagi pelaksanaan *Education for All* selain harus berhadapan dengan problem pendidikan persekolahan di jenjang pendidikan dasar, juga ber-hadapan dengan inefektivitas dan inefisiensi pendidikan orang dewasa (*adult education*).

Tantangan itu masih ditambah dengan satu atau kombinasi dari beberapa masalah. Antara lain terbatasnya sumber daya pendidikan (sumber dana dan SDM); tingkat pertumbuhan penduduk yang secara kultural tak mudah dikendalikan; tingginya populasi penduduk miskin; kecenderungan bencana alam nasional; indeks putus sekolah yang terus merangkak; kecenderungan menjadi buta aksara kembali, dan kurang tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Mencermati beberapa problem di muka, hal paling mendesak untuk segera diatasi sekurang-kurangnya ada tiga, yakni pro-blem putus sekolah; buta aksara kembali, dan keterbatasan sumberdaya pendidikan. Ketiga problem ini merupakan tantangan berat oleh karena keinginan kita memperluas pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Bagi kesembilan negara berkembang yang mengikuti KTT Pembangunan Sosial itu, putus sekolah (*dropouts*) merupakan masalah akut. Dari data Bank Dunia (*Education and Employment Division*, 1987) diketahui, sampai 1985 saja anak usia SD (6-12 tahun) yang putus sekolah sangat memprihatinkan. Dalam jutaan dan persentasenya dari jumlah anak usia SD di masing-masing negara adalah: India 22,5 (25 persen); Pakistan 11,0 (70 persen); Bangladesh 6,7 (45 persen); dan Nigeria 4,1 (26 persen).

Di Indonesia, putus sekolah tingkat SD selama periode 1987/1988-1990/1991 rata-rata berjumlah 1.096.945 anak tiap tahun (4, 12 persen). Sementara itu, DO tingkat SLTP pada periode yang sama rata-ratanya lebih rendah, yakni 439.250 orang anak atau 7,40 persen (Balitbang-Dikbud, *Rangkuman Statistik Persekolahan 1990/1991*, Jakarta, 1992).

Perhatian serius terhadap problem putus sekolah perlu dilakukan karena putus sekolah mengimbas pada masalah lain, yakni kecenderungan buta aksara kembali. Riset Aisemon (1988) di Afrika menunjukkan, pengalaman bersekolah dan mengikuti pendidikan masyarakat dalam hal membaca dan menulis tidak akan berkembang, bahkan cenderung menurun jika tidak ditunjang oleh tantangan, keadaan, dan pengalaman yang setara dalam kehidupan sehari-hari.

Tesis itu diperkuat simpulan riset Hartley & Swanson (1988) yang mengatakan, lamanya belajar (bersekolah) cenderung memperkaut retensi apa yang dipelajari. Hal ini berlaku pula bagi pendidikan orang dewasa. Mereka yang hanya belajar setahun cenderung menjadi buta aksara kembali.

Hal itu mudah dipahami bila kita memasuki kampung-kampung penduduk yang berprofesi homogen dan tradisional. Anak-anak nelayan yang putus kelas tiga SD misalnya, cenderung tak lagi dapat membaca dan menulis dengan baik manakala mereka harus berkulat sebagai nelayan mengikuti jejak orangtuanya. Berbeda dengan para penjual koran dan majalah di kota karena “terpaksa” membaca (walau sekelumit) barang dagangannya.

Demikian halnya orang dewasa yang mengikuti pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah (PLS) berupa Kejar Paket A. Didukung oleh subkultur “hangat-hangat tahi ayam” mereka belajar asal-asalan.

Mereka memang bisa berbahasa Indonesia, tapi tak dapat membaca dan menulis. Apalagi menguasai pengetahuan dasar yang mempersyaratkan pengetahuan membaca dan menulis.

## **EVALUASI NASIONAL**

Dalam *Unesco Office of Statistics* (Juli 1985) diketahui, persentase buta aksara beberapa negara berkembang peserta KTT Pembangunan Sosial pada tahun 1975 dan jumlahnya dalam jutaan orang adalah sebagai berikut; Bangladesh 66,9 persen dan 37; RRC 30,7 persen dan 229; Mesir 55,5 persen dan 16; India 56,5 persen dan 264; Nigeria 57,6 persen dan 27; Pakistan 70,4 persen dan 39. Itu berarti, dibanding dengan delapan negara berkembang lainnya, posisi Indonesia dalam hal jumlah buta aksara masih tergolong lebih baik. Pada tahun 1980, angka buta aksara di Indonesia masih 33,9 persen. Menurun pada 1990 menjadi 18,4 persen.

Namun, dalam hal sumberdaya pendidikan, kesembilan negara berkembang itu mempunyai problem sama, yakni terbatasnya dana dan SDM pendukungnya. Sehubungan dengan itu, peran negara-negara maju agar ikut berkontribusi sangat diperlukan. Misalnya melalui Kerjasama Tri-partit: Utara-Selatan-Selatan.

Dalam melaksanakan *Education for All*, persoalan mendasar yang dihadapi bukan kuantitas partisipasi pendidikan (sekolah dan luar sekolah) Lebih dari itu adalah kualitas dan efektivitas pembelajarannya.

Dengan kalimat lain, keberhasilan bu-kan ditandai oleh deretan angka-angka sebagaimana tertera dalam laporan berangkai program pendidikan. Melainkan sejauh mana program itu berjalan efektif dan jelas evaluasinya.

Itu berarti titik lemah yang agaknya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menciptakan suatu instrumen pengendali yang akurat dan handal. Dengan demikian kita memerlukan suatu evaluasi nasional (*national assessment*) yang menyeluruh. Sebab sejauh ini belum ada jaminan bahwa laporan program *Education for All* dari penilik pendidikan, pengawas dan super-visor dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari segi kualitasnya.

Evaluasi nasional, disamping berguna untuk perbaikan perencanaan pendidikan nasional, juga berfungsi sebagai acuan fungsionalisasi dan optimalisasi sumberdaya pendukung.

Selain itu, evaluasi nasional merupakan sarana reguler yang bisa mengamankan dana-dana pendidikan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Jakarta, HU *Media Indonesia*, Sabtu, 18 Maret 1995



## LULUSAN SLTP DAN PROSPEK WAJAR 12 TAHUN



PROVINSI DIY sejak dua tahun silam punya obsesi luar biasa, yakni merintis program kewajiban belajar (Wajar) 12 tahun atau Wajar Sekolah Menengah. Sekurang-kurangnya hal itu tercermin dari dua hal, yakni, *pertama*, angka partisipasi murni (APM) penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di DIY telah mencapai 95,95 persen. *Kedua*, perintisan Wajar 12 tahun telah diagendakan dalam Rakerda Kanwil Depdikbud DIY sejak 1997/1998 (*Bernas*, 19/2/1997).

Sekiranya krisis ekonomi tidak melanda Indonesia sejak Juli 1997, barangkali provinsi DIY akan menjadi *pilot project* atau laboratorium pendidikan untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun. Namun, ekses krisis ekonomi ternyata berdampak luas. Prospek program Wajar 12 tahun menja-di tidak menentu. Tantangan makin nyata setelah diketahui terjadi ledakan lulusan SLTP sebagai konsekuensi logis atas keberhasilan DIY menuntaskan program Wajar Dikdas 9 tahun.

Di Kabupaten Gunungkidul misalnya, sejak dibuka penerimaan siswa baru (PSB) pada 14 Juni 1999, sebanyak 2.818 kursi SMU/SMK Negeri dan 2.180 bangku SMU/SMK swasta di perebutkan. Kompetisi keras tak dapat dihindari karena daya tampung SMU/SMK di wilayah itu hanya 4.998 kursi, sementara lulusan SLTP jumlahnya men-capai 9.969 orang. Jika diasumsikan hanya 60 persen saja lulusan SLTP akan melanjutkan studi ke SMU/SMK, maka terdapat 983 orang lulusan SLTP yang tidak mendapatkan bangku sekolah. Mereka harus mencari sekolahan di luar Gunungkidul. Andaikata semua lulusan akan melanjutkan studi ke SMU/SMK, maka separuhnya, yakni 4.971 orang jelas tak mendapatkan sekolahan.

Sementara di Kabupaten Sleman, jumlah lulusan SLTP lebih besar lagi, yakni 14.409 orang. Tapi, karena daya tampung SMU/SMK Negeri dan swasta di Sleman mencapai 13.416 orang (terdiri atas 348 kelas), maka hanya 633 orang yang harus keluar Sleman untuk mendapatkan sekolah. Data-data yang tersedia di Kandepdikbud di tiga Kabupaten/Kodya lain di DIY menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni terjadi ledakan lulusan SLTP.

Persoalannya ialah, mau dikemanakan para lulusan SLTP yang tak tertampung itu? Kalaupun mereka dipersilakan hengkang ke luar DIY mencari sekolah, jangan-jangan di provinsi lain juga terjadi gejala yang sama?

### **WARGA NEGARA TAK SIAP**

Ledakan lulusan SLTP agaknya merupakan problem serius yang urgen dipecahkan Pemda DIY. Sementara membiarkan para lulusan SLTP tidak bersekolah, sama artinya dengan menelantarkan mereka. Sebab, diakui atau tidak, suka atau tak suka, para lulusan SLTP - ditilik dari umur kronologis maupun dari segi kemampuan dan keterampilan - bukanlah warga negara yang telah siap dilepas untuk mengarungi samudra kehidupan maha luas yang keras dan penuh kompetisi.

Kondisi seperti itu dapat terjadi karena SLTP yang dirancang untuk Wajar Dikdas 9 tahun berlaku bagi semua anak, baik mereka yang berkemampuan unggul, maupun anak biasa. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka peroleh selama ini barulah pada taraf dasar. Sementara dari segi keterampilan tidak memungkinkan mereka memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda dengan lulusan SLTP sebelum tahun 1979, di mana SLTP sangat bervariasi; di samping ada SLTP umum, yakni SMP, juga ada SLTP kejuruan seperti SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), ST (Sekolah Teknik), SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama), SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) dan lain-lain.

Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri P & K No. 008 f/U/1975 tertanggal 17 Januari 1975, sebanyak 1.166 SLTP, antara lain SMEP (383 sekolah), SKKP (196 sekolah), dan ST (587 sekolah) digabung oleh Proyek Pengintegrasian SLP Kejuruan dan Teknik ke dalam SMP yang disempurnakan. Argumentasi pengintegrasian itu antara lain *pertama*, adanya kenyataan bahwa banyak usia anak 15-16 tahun masih terlalu muda memasuki dunia kerja, kecuali pada daerah atau jenis pekerjaan tertentu. *Kedua*, laju pertumbuhan penduduk belum diikuti penyediaan daya tampung memadai dan merata, khususnya bagi lulusan SD.

*Ketiga*, dengan pemberlakuan Kurikulum 1975, tidak ada lagi perbedaan pokok antara SLTP-K dengan SMP karena terjadi integrasi pengetahuan keterampilan, sikap dan nilai dalam satu program. *Keempat*, keadaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana SLTP-K secara kuantitatif dan kualitatif tak dapat diandalkan guna menghasilkan lulusan siap pakai bagi lapangan kerja. Dengan biaya sebesar Rp 1.132.262.000,00 di mana kurs mata uang dolar AS ketika itu hanya ratusan rupiah, sebanyak 827 SLTP-K tuntas diintegrasikan menjadi SMP pada tahun 1978/1979. Sisanya, yakni 339 sekolah, hingga tahun ajaran 1992/1993 – menurut data Balitbang Dikbud 1992 – memang masih ada dan beroperasi, tersebar di berbagai daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir tak terdengar lagi kabarnya. Barangkali sudah mati ditelan zaman.

Mencermati fakta tersebut, sebenarnya mantan Mendikbud Wardiman pernah mengetengahkan gagasan untuk membuka kembali SLTP-K guna mengakomodasi lulusan SD yang tak cukup pintar untuk melanjutkan studi ke SLTP, atau untuk selanjutnya ke SMU/SMK. Namun, ide itu dibabat habis para praktisi dan pengamat pendidikan sehingga tidak jadi dilaksanakan. Dengan alasan konseptual dan legalitas, penulis dan Ki Supriyoko termasuk yang begitu gigih mengkritisnya.

Beberapa waktu lalu (*Kompas*, 27/4/1999), Romo J Drost kembali mengaktualisasi gagasan tersebut dengan asumsi dan alasan mirip. Andi Hakim Nasoetion termasuk salah seorang yang setuju dengan catatan hanya sebagai katup darurat bagi anak-anak yang ketika lulus SD usianya sudah di atas 12 tahun. Sementara Ki Supriyoko dan penulis tetap dengan pendapat semula. Bedanya, jika Ki Supriyoko mengusulkan agar para lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan studi ke SLTP diakomodasikan melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan basis argumentasi desentralisasi pendidikan; maka penulis mengusulkan agar program kurikulum pendidikan dasar (SD-SLTP) saja yang disusun ganda dalam satu sistem.

Maksudnya, untuk kelas-kelas rendah pendidikan dasar (kelas I-IV SD dan kelas I SLTP), program kurikulum yang dirancang untuk mereka memang sama, namun di kelas-kelas tinggi (sejak kelas V-VI SD; kelas II-III SLTP) sudah disediakan program kurikulum alternatif tapi tetap dalam satu lembaga pendidikan. Usulan yang sama juga berlaku untuk kelas rendah (kelas I) dan kelas tinggi (kelas II dan III) sekolah menengah sehingga tidak ada lagi dikhotomi SMU/SMK. Dari berbagai sudut, sistem sekolah terpadu seperti ini jauh lebih menguntungkan kendati memerlukan persiapan matang dan kerjasama intensif dengan LPTK dan dunia usaha.

Banyak keuntungan jangka panjang dapat diraih melalui sistem sekolah tunggal terpadu ketimbang harus menghidupkan kembali model-model

pemisahan sekolah-sekolah demi kepentingan jangka pendek (sesaat). Selain sosialisasi siswa, rasa kebersamaan, dan egalitarianisme bisa dipupuk; egoisme yang muncul akibat “penyakit” gengsi lulusan sedikit demi sedikit akan hilang karena mereka dibangun oleh *sense of belonging* institusi yang sama hingga sekolah me-nengah.

## **SOLUSI MULTILATERAL**

Dicermati dari sisi kepentingan *educated society*, ledakan lulusan SLTP secara nasional positif, sebab berarti sebagian besar masyarakat Indonesia berpendidikan minimal SLTP. Apalagi jika kemudian didukung prospek program Wajar 12 tahun dengan indikasi daya tampung sekolah menengah memadai dan “daya beli” rumah tangga terhadap pendidikan begitu optimal. Namun ditilik dari sisi kepentingan daerah otonom di mana kecenderungan pengelolaan pendidikan berbasis di kabupaten dan kota, maka ledakan lulusan SLTP akan merupakan beban tersendiri jika tidak diantisipasi secara serius.

Solusi unilateral di mana setiap Pemda dipaksa untuk menyediakan daya tampung pendidikan lanjutan yang seimbang dengan lulusan SLTP tak akan menyelesaikan masalah, bahkan cenderung melawan prinsip efisiensi karena fakta membuktikan tidak semua lulusan SLTP akan melanjutkan studi. Menurut hemat penulis, studi-studi kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan daerah dalam perencanaan sumberdaya manusia mutlak diperlukan. Dalam kaitan ini, lembaga nonstruktural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberi pertimbangan pendidikan dan kebudayaan kepada kepala daerah, mesti segera diwujudkan tanpa harus menunggu keputusan pusat.

Lewat pemberdayaan politik lokal di mana para kepala daerah pasca Pemilu 1999 akan datang dari berbagai komponen bangsa, maka sangat dimungkinkan adanya variasi kebijakan dan pro-program pendidikan yang relevan dengan masyarakatnya. Namun, solusi multilateral atas problem ledakan lulusan SLTP hanya akan dimungkinkan terwujud jika optimasi peran lembaga non-struktural terjamin dan kepala daerah adalah pemimpin yang demokratis. Sebab pada pemim-pin yang demokratislah melekat kehendak untuk meredam ambisi pribadi dan imajinasi tendensius yang seringkali tanpa kendali.

Yogyakarta, HU *Bernas*, Sabtu, 10 Juli 1999



## MENGUAK MISTERI PARA TEKYAN



DITEMUKANNYA mayat bocah tanpa kepala tak dikenal di Jakarta baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran banyak orangtua yang mempunyai anak sebaya itu. Tanpa harus mengabaikan kewaspadaan, sebenarnya para orangtua tak perlu merasa cemas. Sebab ditilik dari mayat tersebut, besar kemungkinan bahwa yang bersangkutan adalah seorang bocah di antara sekian ribu *tekyan* yang tersebar di berbagai kota. Jadi bukanlah bocah dalam “keluarga normal” yang kemudian diculik oleh psikopat penderita pedofilia.

Konon, kata *tekyan* itu berasal dari kata-kata *sitik ning lumayan* (sedikit tapi lumayan). Kata itu mulanya sangat populer di kalangan para pencopet kota Semarang. Entah bagaimana sejarahnya dan kapan dimulainya, *tekyan* lantas menjadi sebutan resmi bagi anak-anak jalanan. Bahkan, Heri Bongkok – *tekyan* “sukses” yang menuliskan pengalamannya dalam buku *Perjuangan dan Penindasan* (memperjuangkan perut sendiri, menindas teman sendiri) – ketika ditanya penulis soal itu pun tidak bisa menjawabnya.

Sebenarnya keberadaan para *tekyan* bukan tidak disadari oleh pemerintah dan masyarakat luas. Bagi masyarakat, mereka ini mudah dikenali bukan semata-mata kebiasaan buruk yang mereka tunjukkan seperti *mirit* (mengambil barang orang ketika orang lagi tidur), *meres* (minta dengan cara paksa), *ngebola* (mencopet, khusus untuk barang) atau *ngeges* (mengambil barang milik orang lain ketika lengah). Tetapi juga karena pekerjaan positif yang dilakukannya seperti menyemir dan *mulung* (mengambil barang, keliling daerah di tempat sampah), menjadi pengasong atau penjaja koran di tempat-tempat strategis, mengamen atau yang seringkali mengundang rasa perih nurani yang melihatnya manakala mereka berebut *hoyen* (sisa makanan).

Kehadiran para *tekyan*, khususnya di kota-kota besar dalam waktu-waktu terakhir menyentak banyak kalangan dan membetot perhatian khalayak.

Terutama setelah terungkap kasus pembunuhan sembilan orang di antara ribuan mereka – di Jakarta saja diperkirakan ada 10.000 orang, di Surabaya sekitar 8.000 orang, belum lagi di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Medan, Bandung, dan Semarang – oleh pengidap pedofilia yang untuk sementara dituduhkan kepada pelaku tunggal Robot Gedek.

## **SIAPAKAH MEREKA?**

Secara umum para *tekyan* adalah murni anak-anak jalanan tanpa tempat tinggal yang tetap. Tetapi sebagian yang lain merupakan anak-anak “rumahan” karena pada prinsipnya mereka masih memiliki orangtua dan tempat tinggal. Namun karena ketidakberdayaan orangtuanya mengikuti langgam kompetisi sosial dan ekonomi yang sangat ketat dan keras, serta ketidakmampuannya “menghindari” blunder pembangunan, menyebabkan mereka terpuruk ke pinggir. Menjadi masyarakat marginal yang terbentur kesulitan hidup amat serius.

Para *tekyan* adalah kelompok anak-anak jalanan yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi oleh orang dewasa, berbagai macam jenis kejahatan, kekerasan, selalu dikejar-kejar kaum homoseksual, pedofilia serta petugas keamanan dan ketertiban umum. Para *tekyan* “di dalam sistem” nyaris tidak memiliki akses ekonomi, edukasi, bahkan yudisial. Suatu akses prasyarat yang menjadi kebutuhan paling elementer dalam upaya menjaga eksistensinya sebagai manusia dan masyarakat normal.

Nasib para *tekyan* dalam prosesi kehidupan sosial dan ekonomi di negeri ini jelas tidak lebih baik ketimbang para wanita tuna susila (pekerja seks komersial) dan pekerja anak. Tidak seorang pakar pun berani melakukan prediksi kapan mereka bisa dientaskan dari komunitas kumuh dan penuh kegelapan. Bahkan pengampu kekuasaan sendiri agaknya mengalami kesulitan besar menguak misteri kehidupan mereka sekali pun secara konstitusional ‘keberadaannya’ jauh-jauh sudah ‘diramalkan’ bersamaan dengan berdirinya republik ini.

Secara geografis, ada dua kelompok *tekyan* yang selayaknya mendapat perhatian serius untuk ditangani karena pada hakikatnya mereka adalah anak-anak bangsa kita yang memiliki hak hidup dan kelak juga punya tugas bertanggungjawab atas kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika ada usulan agar di masa mendatang kelompok ini dimasukkan dalam GBHN sebagai bagian paradigma pembangunan yang mestinya diselesaikan (diprogramkan).

Kelompok pertama adalah *tekyan* yang bertebar di perdesaan-perdesaan kampung. Sementara kelompok lainnya adalah para *tekyan* yang berkelana di kampung-kampung kota dan metropolitan.

Dibanding kelompok yang pertama, kelompok kedua jauh lebih rumit karakteristiknya dan lebih kompleks problematikanya. Selain mereka telah bersentuhan dengan arus globalisasi dan eksplosif informasi, pola hidup konsumtif dan kekerasan menjadi bagian penting yang sulit dieliminasi. Kalau kelompok pertama terkenal dengan keluguanannya sehingga mudah diatur serta diarahkan untuk dientaskan, kelompok kedua justru sebaliknya. Prinsip hidup secara bebas sebagai simbol ekspaisme sekaligus protes atas keadaan yang tidak dikehendakinya, menjadi obsesi hampir setiap *tekyan* metropolitan.

Padahal kedua kelompok berasal dari sumber yang sama, yakni keluarga bermasalah atau *broken home*, baik karena perceraian (*divorce*) maupun disharmoni, tercerabut dari akar lingkungan keluarga karena tindak-tandak kekerasan (*violence in the family*) oleh pihak ayah atau ibu, yatim piatu dan merasa tertolak sanak famili serta handai-taulan, dan lain-lain sumber yang tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok itu. Salah satu hal yang bisa dipastikan ialah, bahwa sebagian besar (lebih dari 85 persen) para *tekyan* berasal dari keluarga miskin.

Keunikan *tekyan* metropolitan yang sudah terlenda unitas multipleks dan seringkali menarik berbagai organisasi non-pemerintah (Ornop) dan Depsos yang menangani mereka ialah jaringannya yang sangat luas. Munculnya istilah *adik-adikan* (anak buah), *anak-anakan*, dan nama-nama *geng* adalah bukti bahwa kelompok-kelompok *tekyan* yang terorganisasi secara spontan benar-benar mirip jaringan mafia yang tidak mudah diputus mata rantainya. Padahal memutus mata rantai merupakan langkah awal untuk menjamin efektivitas program.

## LANGKAH TERAPIUTIK

Ada yang mengusulkan, karena kemiskinan keluarga merupakan faktor utama munculnya para *tekyan*, maka secara makro, berjangka panjang, sistematis dan terprogram adalah melalui jalur pemecahan struktural. Sementara secara mikro program penanganan para *tekyan* ditekankan pada basis-basis keluarga, misalnya merekatkan kembali interrelasi yang sudah terkoyak-koyak.

Andaikata pandangan seperti itu diakomodasi dalam bentuk keputusan politik dan dilaksanakan secara serius, tentu sangat menguntungkan. Sebab langkah tersebut – sekali pun tidak tampak hasilnya secara cepat - merupakan langkah preventif untuk membendung laju kuantitas dan lahirnya *tekyan* baru.

Namun begitu, yang sekarang tampak di depan mata adalah belasan ribu *tekyan* yang memerlukan penanganan segera. Inaksesibilitas mereka terhadap pendidikan misalnya, menjadi batu sandungan (cacat) serius bagi upaya menyukseskan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar. Tak ada kemajuan sempurna bisa tercapai dengan meninggalkan mereka tetap berada di jalanan.

Salah satu masalah paling serius yang dihadapi bukanlah soal ada atau tiadanya program yang mesti dilakukan untuk mengentaskan mereka, melainkan bagaimana ketepatan metodenya. Kenyataannya tidak sedikit Ornop yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan para *tekyan* seperti ISJ, Yayasan Amalia, dan YKAI di Jakarta, YPLPS Humana dan Girli di Yogyakarta. Pada umumnya metode yang dipakai Ornop adalah metode pendampingan. Karena metode itulah yang dianggap paling efektif bagi tercapainya sasaran program. Kecuali itu, metode tersebut tidak merenggut para *tekyan* dari komunitasnya.

Namun, faktanya kuantitas *tekyan* tidak pernah surut. Berkurang di Yogyakarta, bertambah di Jakarta, surut di Semarang membengkak di Surabaya. Begitu seterusnya siklus itu terjadi. Demikian pula dengan metode panti sosial yang diterapkan oleh Depsos di berbagai kota, belum memberikan hasil memuaskan. Indikator keberhasilan secara fisik tentu saja makin surutnya jumlah *tekyan* karena telah hidup bermasyarakat dengan menekuni pekerjaan produktif, atau kembali kepada keluarga bagi mereka yang belum cukup umur.

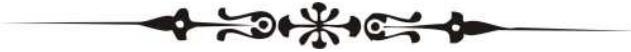
Sementara secara non-fisik adalah tertanamnya prinsip-prinsip hidup positif seperti hemat dan bersahaja, merasuknya nilai-nilai religius dan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Dengan indikator seperti itu, yang paling berhasil agaknya adalah metode panti asuhan yang dilaksanakan untuk menggarap para *tekyan* di perdesaan-perdesaan kampung.

Namun begitu, tidak lantas metode itu cocok bagi *tekyan* metropolitan. Oleh karenanya, agar program pengentasan mencapai sasarannya, tetap diperlukan sigi dan pemahaman komprehensif untuk memetakan profil mereka. Dari pemahaman komprehensif lintas bidang, baru bisa dikuak misteri yang selama ini menyelimuti mereka. Dengan terkuaknya misteri itu, terbentangleh jalan keluar yang bisa diterima semua pihak, fisibel, dan manajebel.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 20 Januari 1997



## MAKNA EDUKASIONAL IDUL FITRI



ORANG Madura menyebut Hari Raya Idul Fitri sebagai *telasan*. *Telas* itu sendiri dalam bahasa Jawa bermakna habis. Sehingga ada pemeo Madura yang mengatakan bahwa jika Hari Raya tiba, semuanya serba habis. Habis dalam makna fisik berarti selesainya kalkulasi harta benda dalam setahun. Untuk memperbaiki rumah agar asri dan sedap dipandang; membeli perabotan rumah tangga; mengganti pakaian dan asesori diri serba baru, dan tentu saja menyediakan serbaneka makanan kecil untuk para tamu jauh-dekat kelak ketika *silaturrahim*.

Makna fisik yang sama berlaku pula dalam sebagian besar masyarakat Jawa yang menyebut Hari Raya Idul Fitri sebagai *badha*, *borose bondho* (borosnya modal). Agaknya, dengan sebutan berbeda tetapi bermakna fisik yang sama juga berlaku untuk sebagian besar suku-suku bangsa yang beragama Islam di Indonesia. Ragam istilah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut “Lebaran.”

Lebaran dengan makna fisik yang beragam itulah satu-satunya hal yang membedakannya dengan Idul Fitri. Dalam lebaran nyaris tidak bisa dibedakan siapa-siapa yang serta merta merayakannya. Kenyataannya lebaran tidak melulu menjadi milik para Muslim. Kira-kira sama dengan ketika bangsa Indonesia merayakan kehadiran tahun baru. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, lebaran yang datang setiap tahun dan sudah berlangsung berabad-abad tidak identik dengan Idul Fitri.

Idul Fitri bagi umat Islam merupakan peristiwa simbolik dan ritual. Sementara lebaran menjadi peristiwa sosial dan budaya. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah, Idul Fitri merupakan kulminasi dari tahapan akhir puasa Ramadhan sebagai medium *ibtisab* (kalkulasi diri dan instropeksi) serta *melting pot* (kawah candradimuka) bagi perjalanan rohani setiap Muslim. Sebuah karakteristik yang tidak harus melekat erat pada lebaran.

Kira-kira apa yang menarik dari Idul Fitri yang jatuh setiap 1 Syawal? Ditilik dari dimensi religiositas barangkali Idul Fitri kali ini tidak banyak berbeda dengan beberapa tahun lalu dan mendatang, di mana Muslim Indonesia harus berhadapan dengan masa transisi menuju abad globalisasi informasi, Iptek, dan era keagairahan hidup keberagaman.

Namun, bagi makna edukasional, rasa-rasanya rada istimewa sekurang-kurangnya karena beberapa hal. *Pertama*, bahwa Idul Fitri kali ini berada dalam satu era di mana masyarakat digempur oleh isu-isu pemberdayaan rakyat, penegakan hak-hak asasi manusia, dinamika politik yang makin memanas menjelang Pemilu 1997, dan tema-tema perjuangan demokratisasi serta keterbukaan yang seharusnya menggiring ke arah perenungan kembali setiap Muslim terhadap dimensi kemanusiaannya.

*Kedua*, Idul Fitri kali ini berada dalam satu tahapan di mana negara berupaya mempertinggi derajat pendidikan masyarakat melalui peningkatan program kewajiban belajar dan berada dalam semangat menyelenggarakan pendidikan untuk semua (EFA). Ganjalan elementer program ini ialah, jutaan anak-anak kurang beruntung yang karena berbagai sebab - mayoritas karena kemiskinan - belum berkesempatan belajar. Sedangkan diketahui bahwa bagian terbesar dari anak-anak itu berasal dari keluarga Muslim. Karenanya, Idul Fitri sebagai *liberating process* yang sarat dimensi seharusnya bisa menjadi momentum nasional guna membebaskan mereka dari kemiskinan, baik kemiskinan material-finansial, maupun kemiskinan edukasional. Tentu saja dengan *imanan wahtisaban* sebagaimana telah menjadi *training method* selama kita menjalani puasa Ramadhan sebulan penuh.

*Terakhir*, karena Idul Fitri berada dalam era globalisasi informasi yang mengandaikan kualitas manusia berada dalam taraf kesejajaran, kita tidak saja diharapkan mempertinggi mutu kehidupan dan penghidupan muslim berstandar nasional, tapi lebih dari itu haruslah mencerminkan kualitas mondial (internasional). Idul Fitri dengan demikian merupakan momentum yang tepat guna mengembangkan wawasan keluar (*outward looking*) dengan cara tidak semata-mata mempertajam wawasan kemanusiaan berdasarkan *ukhawah Islamiyah*, tetapi sekaligus dengan mengembangkan *ukhawah insaniyah*.

Sampai hari ini, secara umum kita mengenal tiga institusi pendidikan yang dianggap primer, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses pendidikan yang berlangsung di ketiga institusi itu bertujuan membentuk satu profil, yaitu menghasilkan tampilan manusia Indonesia yang utuh dan menyeluruh; manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa; melekat pada dirinya kekuatan *Imtaq* (iman dan taqwa) dan sekaligus menguasai *Imtek* (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Setiap muslim tanpa kecuali harus berkeyakinan bahwa target pendidikan yang berbentuk keputusan politik seperti itu bukan hal baru yang istimewa. Islam telah mengajarkan bahwa puasa Ramadhan merupakan institusi pendidikan paling sempurna mengingat jaminan keluaran (*out-put*) yang diberikan oleh-Nya. Proses dan transaksi edukasional yang berlangsung secara nonformal tersebut telah dijamin akan menghasilkan manusia paripurna, yakni manusia yang *tattaqum*. Pakar dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, terpelihara dari bentuk-bentuk tindakan kejahatan, dan sebangsanya.

(QS: Al Baqarah:183).

Namun, sayang sekali belum banyak yang berhasil menyadari bahwa puasa Ramadhan merupakan medium edukatif yang sempurna. Steril dari unsur-unsur dan interes material, serta boleh dikata yang paling murah di dunia dibanding institusi pendidikan paling modern sekalipun. Sekiranya setiap muslim benar-benar melaksanakan *learning process* secara baik dan benar selama Ramadhan, dia tentu akan mampu menghayati betapa luas makna Idul Fitri sebagai puncak perjuangan spiritual sekaligus intelektual.

Jauh sebelum Aegidius Romanus di abad ke empat belas mengintroduksikan teori *tabula rasa*, di mana manusia dianggap lahir kosong, seperti meja yang belum ada tulisan apa pun, atau sebagai kertas putih yang bersih dari tulisan, Idul Fitri sudah menjadi teori klasik yang memandang manusia dengan praduga baik (*lebusnudhon, virtuous presumption*).

Idul Fitri yang secara harfiah bermakna kembali kepada kesucian merupakan hari kemenangan bagi muslim yang secara khushyuk menjalankan ibadah puasa. Idul Fitri menjadi semacam ijazah yang dapat dipakai untuk menapak ke arah peradaban yang jauh lebih baik, serta ke arah derajat keberagaman yang jauh lebih tinggi. Itu berarti Idul Fitri juga menjadi semacam terminal transit bagi seorang muslim guna melakukan *recycling* (daur ulang) dari derajat kekotoran ke derajat kesucian.

Dalam kalimat lain, Idul Fitri merupakan tiket (sertifikat) menuju *ahsanu taqim*, yakni manusia berderajat luhur atau sebaik-baik makhluk.

Dalam kenyataan sosial sehari-hari, refungsionalisasi dan revitalisasi makna Idul Fitri dan atau lebaran sebagai salah satu strategi penjernihan sosial jelas tidak perlu diragukan. Hal-hal seperti pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan swasta dan pegawai negeri tanpa kecuali (karena berlaku untuk muslim dan non-muslim), penyerahan zakat fitrah menjelang Idul Fitri, berbagi rezeki dengan para dhuafa sehabis shalat Ied, dan munculnya tradisi mudik (pulang kampung bagi masyarakat urban) adalah bukti-bukti empiris tentang itu.

Berbicara soal penjernihan sosial guna memperbaiki struktur sosial yang pincang di mana secara ekonomis terjadi ketimpangan luar biasa, sebenarnya ayat-ayat Alquran yang turun di Mekkah sudah berbicara banyak tentang hal itu. Islam sebagai agama dikenal akrab dengan keberadaan orang miskin, tetapi sesungguhnya ia antikemiskinan. Persahabatan Islam dengan kemiskinan bukan berarti mengekalkan kemiskinan, tapi sebaliknya, memerangi kemiskinan. Namun begitu, jumlah ayat yang banyak serta ajaran agama yang ada tidak akan berbunyi maknanya jika para pemeluk hanya menjadikannya sebagai wacana. Akan halnya dengan ajaran Islam, wajib bagi setiap muslim untuk dapat membaca fenomena dan struktur sosial di masyarakatnya.

Selain sebagai metode penjernihan sosial, pernahkah kita berpikir kritis untuk menjadikan Idul Fitri sebagai metode edukasional? Barangkali sudah, tetapi sebatas berpikir. Belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang periode lanjutan ketika seorang muslim masih diberi kesempatan merayakan Idul Fitri di waktu-waktu selanjutnya sampai ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.

Kritik ini kita lontarkan bukan untuk mengatakan bahwa Idul Fitri sudah dicemari penetrasi budaya lain di luar kultur Islami. Tanpa mengurangi makna agung Idul Fitri, kita seyogyanyalah mewaspadaai hal-hal menonjol yang dapat mengurangi bobot substansi agama. Misalnya saja kebiasaan saling mengirim parcel lebaran dengan nilai nominal berlebihan, berbelanja tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi, tradisi rekreasi dengan menghambur-hamburkan uang secara berlebihan, dan lain sebagainya.

Sebab, hal-hal seperti itu justru kontraedukatif. Padahal lebih dari ritual agama, Idul Fitri memiliki makna edukasional yang tinggi dan sarat nilai-nilai kebudayaan. Metode edukatif yang berkembang dan berlangsung pada hari itu ternyata melampaui batas-batas didaktis-metodis dan tak tersekat oleh dimensi waktu sebagaimana terjadi dalam pendidikan sekolah, sebab ia berlangsung dan kekal sepanjang masa. Inilah sebuah kelebihan yang terkadang lolos dari pantauan setiap orang.

Makna edukasional yang melekat pada hari raya Idul Fitri dan nyaris “punah” dari metode pendidikan pada umumnya antara lain memberi tempat pada proses imitatif melalui suri keteladanan. Sarat tata nilai sugesti dan saran guna memperbaiki kualitas diri. Mementingkan penekanan pada proses identifikasi dan idealifikasi positif. Menjadi mediator pengembangan komunikasi berbagai arah. Mencerminkan penegakan konsistensi peran, serta mengukuhkan visi reaktualisasi potensi kolegialitas antarmanusia.

Idul Fitri mendidik kita untuk berani menegakkan kejujuran dengan saling mengakui kesalahan dan lantas maaf-memaafkan. Melalui Idul Fitri kita dididik

untuk berani bertindak adil tanpa perlu membedakan asal-usul dan kepentingan. Dengan Idul Fitri kita dididik untuk menciptakan pemerataan lewat konsep zakat fitrah dan memberi perhatian pada kaum *dhuaifa*. Bahkan, tanpa perlu melebih-lebihkan, Idul Fitri juga berhasil mengukuhkan sikap kebersamaan, kegotong-royongan, dan persaudaraan.

Namun, apakah hal-hal seperti itu harus hanya berlangsung sesaat? Bagi muslim yang benar-benar beriman tentu saja tidak. Sebab Alquran sudah mengajarkan bahwa kawasan penyangga manusia untuk mencapai tujuan *absanu taqvim* adalah iman dan amal saleh (kemanusiaan). Itu berarti, bagi yang surplus secara ekonomi akan lebih indah jika Idul Fitri dijadikan momentum guna mengangkat derajat pendidikan sesamanya, yang saat ini menunggu uluran tangan agar dapat menikmati pendidikan. Program orang tua asuh untuk mengentaskan lebih dari 3,5 juta muslim yang tak berpendidikan atau tak mampu melanjutkan pendidikan sudah menunggu. Selamat Idul Fitri.

Jakarta, HU *Republika*, 22 Februari 1996



## LEMBAGA ADVOKASI PEKERJA ANAK



NASIB anakanak Indonesia — diakui atau tidak — belumlah sebaik nasib rekanrekan sebayanya di negeri lain. Terutama mereka yang hidup di negara di mana Undangundang perlindungan anak, peradilan anak dan Undangundang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak telah ada dan membumi, berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak kadokado yang hilang buat mereka. Kasih sayang yang tercerabut akibat keharusan bekerja membantu orangtua mencari nafkah. Terbunuhnya potensi kreatif berjutajuta anak akibat kekeliruan terapiutik pendidikan di sekolah. Belum terselenggaranya sistem peradilan yang cocok untuk anakanak, dan sebagainya.

Kado pertama yang hilang, yakni kasih sayang akibat keharusan membantu orangtua mencari nafkah kita angkat ke permukaan bukan tanpa sebab. Selain telah menjadi pemandangan umum dalam keseharian kehidupan di sekitar kita, juga karena sebagian besar merupakan praktik terselubung yang tidak menguntungkan bagi perkembangan generasi di kelak kemudian hari.

Nasib mereka ini, dilihat dari segi edukatif jelas tidak lebih baik ketimbang mereka yang berada di panti asuhan. Dari segi humanisme, mempekerjakan anak usia sekolah 1215 tahun dapat dipandang sebagai tindak reduksi intelektual, kurang manusiawi. Apalagi dilihat dari perspektif pendidikan secara makro, jelas sangat merugikan pembangunan nasional.

Meniadakan kesempatan untuk mengenyam pendidikan (*unequality of access*) — dengan “memaksa” bekerja — jelas bertentangan dengan jiwa *United Nation’s Declaration of the Rights to the Children*. Bertolak belakang dengan semangat konstitusi dan prinsip *Education for All*. Jika keadaan seperti itu terus berlanjut,

bukan tidak mungkin dapat mengganggu mulusnya gerakan nasional wajib belajar yang sudah dicanangkan.

Dapatkan para pengusaha yang mempekerjakan anak usia sekolah disalahkan? Masalahnya bukan soal salah atau benar. Soalnya, fenomena pekerja anak tidak semata-mata terkait keuntungan ekonomis yang diraih pengusaha. Melainkan karena fenomena itu telah menjadi bagian dari kompleksitas problem hidup yang makin kompetitif.

Juga karena masih berkembangnya subkultur keluarga yang memandang sebelah mata terhadap pentingnya pendidikan. Ini bisa terjadi karena kewajiban belajar di Indonesia tidak membawa konsekuensi hukum apa pun bagi orangtua yang lalai terhadap pendidikan anaknya.

Berbeda dengan di negara maju, orangtua di sini tidak akan pernah dibui (baca: diadili) kendati ia tidak menyekolahkan anaknya. Konsep kewajiban belajar di Indonesia berarti ketersediaan sarana (*Kompas*, 30/7/92).

Masalah pekerja anak di Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius. Sebab, kondisi kerja yang diberlakukan pada anakanak sama sekali tak memberi makna apapun dilihat dari segi ekonomis, psikologis, apalagi sosial edukatif. Bahkan seringkali justru menimbulkan penderitaan berkepanjangan yang bersifat traumatik.

Menurut beberapa laporan, pabrik yang mempekerjakan anak umumnya tidak menyediakan fasilitas kerja apapun. Baik makanan, minuman, obatobatan, apalagi keselamatan kerja. Biasanya pabrikpabrik itu sulit diidentifikasi karena lokasinya relatif terpencil dan tidak memasang papan nama.

Pekerja anak umumnya berstatus sebagai pekerja upahan di pabrik berskala menengah ke bawah ditinjau dari segi permodalan dan teknologi, serta bersifat padat karya. Antara lain, pabrik yang memproduksi makanan ringan dan minuman, bola lampu, obat pembasmi serangga, kosmetika, plastik, rokok, dan mebel.

Upah yang mereka terima berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per minggu, dan seringkali sudah termasuk upah lembur. Dasar perhitungan pengupahan juga tak jelas dan kerap berubahubah.

Terhadap kondisi seperti itu, pekerja anak umumnya diam. Selain tidak memiliki keberanian, mereka juga tak tahu harus mengadu kepada siapa. Pergaulan mereka dengan pekerja dewasa sering berada pada posisi sulit. Bahkan tak jarang mereka mengalami eksploitasi.

Secara edukatif, adanya pekerja anak merupakan potret buram dunia pendidikan. Bagi pengusaha, secara ekonomis memang menguntungkan. Sebab dengan pekerja anak, para pengusaha memperoleh tenaga kerja murah tanpa perlu merasa khawatir adanya unjuk rasa menuntut peningkatan upah.

Dr Suwarsih Madya (1993) menggambarkan betapa parahnya kondisi pendidikan pekerja anak. Mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomis tergolong miskin, dan secara sosial relatif terisolasi informasi. Tinggi rendahnya jumlah pekerja anak terkait pula dengan wawasan pendidikan orangtua.

Di wilayah Pantura (pantai Utara) Jawa misalnya, kebanyakan anakanak telah dituntut bekerja oleh orangtuanya. Umumnya mereka merasa puas dengan hasil yang didapatkan anakanaknya. Tanpa peduli bahwa secara esensial hal itu melanggar hak asasi, yakni meniadakan kesempatan untuk bermain dan berekreasi, kasih sayang, cinta, pengertian dan pendidikan. Kepuasan itu telah menyebabkan para orangtua menolak melepaskan anaknya bersekolah.

Sempitnya wawasan pendidikan tercermin dari sikap para orangtua yang mempertanyakan untuk apa bersekolah jika tanpa itu pun anakanaknya bisa memperoleh uang. Isolasi informasi tampaknya juga menyebabkan mereka (orangtua dan anakanaknya) kehilangan kesempatan yang pada prinsipnya dapat mereka raih.

Riset penulis di Jawa Timur pada tahun 1993 lalu menunjukkan, telah terjadi pergeseran wawasan pendidikan orangtua. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai konsep sosial, melainkan dipandang sebagai konsep ekonomi. Pergeseran wawasan ini mempunyai kontribusi positif terhadap kesediaan orangtua untuk menyekolahkan anakanaknya.

Sebenarnya, dengan gerakan nasional wajib belajar 9 tahun berarti telah melindungi anakanak dari keharusan bekerja di usia dini. Sebab dengan program itu tamatan pendidikan dasar telah mencapai usia 1516 tahun. Jika para lulusan tersebut mendapat program pelatihan selama setahun atau dua tahun, berarti usia mereka bertambah menjadi 1718 tahun.

Secara fisikpsikologis, usia itu telah memenuhi syarat minimal sebagai pekerja. Sekurangnya mereka telah matang kejiwaan, kepribadian, sosialisasi serta tanggung jawabnya. Tak terpaut jauh dengan lulusan SPG yang seusia itu sudah diberi tanggung jawab untuk “mendidik dan mengajar” anakanak SD.

Namun begitu, tidak serta merta anakanak yang sudah selesai menjalani program kewajiban belajar dapat dipekerjakan. Soalnya, belum tentu kurikulum pendidikan dasar relevan dan mendukung kebutuhan calon pekerja. Tapi, sekurangnya dengan kebijakan itu anakanak telah mendapat perlakuan lebih baik berupa pengakuan hak-haknya.

Pemulihan hak-hak anak untuk mengenyam pendidikan akan lebih optimal jika disertai upaya penyadaran bagi para orangtua. Maksudnya, perlu intensifikasi dalam menumbuhkan motivasi orangtua untuk menyekolahkan anak.

Satu kenyataan yang tak terbantah ialah, perlindungan terhadap pekerja anak belumlah nampak. Undang-undang No.1/1951 yang menetapkan batas usia 14 tahun ke bawah tak boleh bekerja belum sepenuhnya dipatuhi. Itu bisa

terjadi karena, kecuali perangkat pendukung berupa peraturan pemerintah tidak ada, pengusaha lebih cerdas dalam merekrut pekerja anak.

Misalnya, pengusaha mengabaikan syarat pendidikan. Pengusaha cuma membutuhkan kemauan bekerja dengan dilengkapi syarat administrasi berupa surat keterangan sudah berusia lebih dari 16 tahun. Padahal sudah menjadi rahasia umum jika surat keterangan semacam itu mudah diperoleh dari para ketua RT/RW dengan pengesahan lurah/kepala desa tempat mereka berasal. Hanya dengan imbalan tak lebih dari Rp 500 hingga Rp 1.000.

Praktik pemalsuan umur itu terus berlangsung selama para pengusaha membutuhkan pekerja anak. Dalam kaitan itu, aparat pengawas ketenagakerjaan dari Depnaker mengalami kesulitan menyidik. Soalnya, pekerja anak terdaftar sebagai pekerja dengan usia layak untuk bekerja. Lantas, langkah apa yang bisa dilakukan untuk meniadakan atau mengurangi praktikpraktik merugikan semacam itu?

Sekurangkurangnya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, mengatasi sumber utama yang menyebabkan anakanak harus bekerja, yakni memperbaiki status ekonomi keluarga. Dengan perbaikan status ekonomi keluarga berupa pengentasan mereka dari kemiskinan secara sungguhsungguh, lambat namun pasti praktik mempekerjakan anak usia sekolah akan berangsurangsur berkurang atau hilang.

*Kedua*, memperketat perizinan, pengawasan dan memperbaiki peraturan ketenagakerjaan yang lebih menaruh perhatian pada kepentingan anakanak. Intensitas supervisi terhadap badan usaha seyogyanya ditingkatkan. Kalau perlu diadakan penyidikan mendadak.

*Ketiga*, menggugah nurani pengusaha agar merasa berdosa jika mencari untung dengan mempekerjakan anak usia sekolah. Kita yakin usaha persuasif ini lebih menyentuh sikap manusiawi, karena berhubungan dengan rasa, bukan akal.

Pengusaha harus diyakinkan, bahwa merekrut orangtuanya untuk bekerja jauh lebih menguntungkan ketimbang merekrut anakanaknya yang masih berusia sekolah. Apalagi hal ini menyangkut sistem sosial, budaya dan penghargaan terhadap martabat dan kemerdekaan sebagai manusia.

*Terakhir*, perlunya segera dibentuk Lembaga Advokasi bagi pekerja anakanak. Dengan lembaga advokasi — di mana ahli berkumpul dan bertindak sebagai pembela — kepentingan anakanak akan lebih mendapat titik terang. Selain itu akan jelas kepada siapa mereka mengadu sekiranya mendapat perlakuan tidak manusiawi.

Jakarta, HU *Kompas*, Selasa, 11 Oktober 1994

Bab  
5



**PERSPEKTIF PENDIDIKAN  
DEMOKRASI**





## **PENDIDIKAN HAM DAN HAM DALAM PENDIDIKAN**



SELAIN kendali mutu (*quality control*), dewasa ini nyaris tidak ada kebijakan publik dalam kaitannya dengan kerjasama bilateral dan multilateral yang tidak menyertakan isu hak-hak asasi manusia (HAM). Dipelopori dominasi negara-negara maju di Utara, upaya mengintroduksi HAM menjadi gelombang mahadahsyat yang sangat dirasakan negara-negara berkembang dan terbelakang di Selatan. Indonesia adalah contoh konkret bagaimana isu tentang HAM menjadi faktor penghambat potensial bagi terciptanya kerjasama bilateral yang bebas prasangka.

Kasus pembubaran IGGI yang dipicu oleh tuntutan Belanda yang berlebihan atas pelaksanaan HAM di Indonesia; pembatalan pembelian pesawat tempur F-16 dari Amerika; serta pengunduran diri Indonesia dari program *E-IMET* (*Expanded International Military Education and Training*) sebagai kebijakan yang *preemptive* (mendahului), merupakan bukti bahwa isu HAM masih menjadi dilema yang sulit dijernihkan, baik melalui propaganda internasional, maupun melalui diplomasi antarnegara secara bilateral.

Seiring dengan makin mengkrystalnya keinginan ke arah demokratisasi dan kehidupan politik yang lebih terbuka, tuntutan terhadap optimalisasi pelaksanaan HAM di segala tingkatan masyarakat juga makin gencar. Itulah sebabnya ketika Komnas HAM terbentuk, banyak kalangan mengusulkan agar pendidikan HAM dimasukkan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan.

Intervensi pendidikan dimaksudkan untuk membangun pengertian tentang HAM secara dini di kalangan peserta didik dianggap sebagai langkah mendesak. Usulan tersebut dilandasi asumsi bahwa HAM bersifat universal. Namun sayang usulan itu tidak disertai pandangan kritis bahwa dalam banyak hal HAM justru bersifat kontekstual.

## KESULITAN EDUKATIF

Konsep HAM telah menempati ruang yang sangat luas dalam sejarah manusia. Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II hingga sekarang, hampir segenap bangsa di dunia mencoba merakit HAM dan menjadikannya perangkat yang agung guna menyusur perjalanan yang melelahkan di atas bumi. Secara historis, konsep HAM selalu mengalami evolusi operasional. Itulah sebabnya ada klaim bahwa konsep HAM mempunyai nuansa yang berbeda-beda, antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dari pergantian masa ke masa berikutnya.

Sebagai bangsa yang sangat lama hidup terjajah, mestinya kita lebih mengerti betapa nista jika HAM diinjak-injak. Ketika hak azasi kita untuk hidup merdeka dirampas oleh aneksasi asing dan kolonialisme, upaya membebaskan diri kita tebus dengan berbagai pengorbanan, baik harta bahkan nyawa. Namun pada saat yang berlainan, di mana hak azasi untuk hidup merdeka telah berhasil kita raih, pada saat yang sama terjadi upaya imitasi untuk merampas kemerdekaan tersebut dalam tataran tertentu.

Dalam hal terakhir, terlalu banyak contoh untuk disebutkan. Mulai dari soal terampasnya kemerdekaan untuk hidup dan mencari penghidupan, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpolitik, kemerdekaan beragama, hingga kemerdekaan untuk menjalani kehidupan akademik. Empirik membuktikan betapa merajalelanya pembunuhan disertai perampokan, bahkan sebelum manusia itu lahir (kasus aborsi dan *infanticide*). Betapa banyak pelarangan atas ekspresi, untuk seni yang bersifat menghibur sekali pun.

Pada sisi yang lain, bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai kampium demokrasi dan pejuang HAM yang mengatasmakan universalisme, kenyataannya tidaklah sekonsisten yang diharapkan. Karenanya, jika kita hendak mengintervensi pendidikan dengan HAM versi Barat, terjadi kesulitan edukatif guna membangun kepercayaan peserta didik. Sebab di era globalisasi informasi seperti sekarang, mereka sudah memahami bahwa Barat sendiri memiliki standar ganda dalam pelaksanaan HAM.

Bukti klasik sangat jelas, yakni bagaimana Barat membiarkan Israel menindas dengan brutal dan barbarian atas aspirasi sah rakyat Palestina. Dibiarkannya Bosnia porak poranda, invasi AS ke Panama, dan tak dipedulikannya kecamuk perang saudara di Timtim ketika ditinggal lari Portugal adalah contoh lain bagaimana pelaksanaan HAM yang mendua.

Hingga hari ini, Barat agaknya juga masih sangat bergairah untuk membagi-bagi dunia berdasarkan kepentingannya. HAM dan demokrasi hanya dipakai sebagai alat apabila dianggap menguntungkan, namun jika tidak, Barat akan mendukung *coup d'etat* pemerintahan yang sah, berupaya menciptakan kekacauan seperti yang terjadi atas Irak dan Aljazair.

Jika kita cermati secara serius praktik pelaksanaan HAM dan demokrasi Barat, terdapat beberapa catatan yang relevan dikemukakan. *Pertama*, standar HAM hanya merefleksikan kultur Barat, misalnya dimasukkan homoseksualitas sebagai bagian dari hak dasar manusia yang mesti dilindungi.

Padahal di kalangan bangsa-bangsa Timur, khususnya di negara-negara yang tidak memisahkan agama dan negara (termasuk Indonesia), homoseksualitas dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang oleh karena itu praktiknya tak disetujui norma sosial kemasyarakatan. Termasuk hak untuk mati (*euthanasia*) dan perbuatan aborsi.

*Kedua*, ada kecenderungan menjadikan politik dan sipil sebagai panglima. Hal tersebut berlawanan dengan hak-hak ekonomi dan sosial, seperti tidak dicantumkannya hak atas pangan, papan, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan kecuali dalam porsi yang amat sedikit. Dalam kaitan ini, negara-negara Barat tidak melihat konsumsi mereka yang berlebihan sementara pada saat yang sama jutaan rakyat bekas jajahan merengas maut karena kelaparan dan menderita hidupnya akibat kebodohan serta tak berpendidikan.

*Ketiga*, standar HAM lebih cenderung mengarah kepada kebebasan individu dan hak pribadi. Sementara hak kelompok, yakni hak sebagai bangsa untuk bebas dari tekanan misalnya, sama sekali diabaikan. Padahal pada sebagian besar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, hak kolektif untuk hidup bebas sebagai bangsa itulah tantangan terbesar yang dihadapinya.

*Keempat*, konsep HAM dan demokrasi Barat cenderung menghamba kepada universalisme dan menyederhanakan pluralitas serta kebhinekaan, baik dari segi sosial politik maupun dari segi kultural. Atas nama universalisme, Barat sama sekali mengabaikan jati diri bangsa-bangsa Timur.

Berdasar fakta-fakta tersebut, tanpa standarisasi dan konsistensi, sangat sulit berharap pendidikan HAM akan berhasil. Melalui kurikulum pendidikan sekali pun.

## **PRAKSIS PENDIDIKAN**

Di luar wacana kesulitan pendidikan HAM, terdapat fenomena lain dalam praksis pendidikan yang justru bertentangan dengan penegakan HAM. Terjadi kecenderungan di kalangan masyarakat dan praktisi pendidikan, mereka sebenarnya belum mengerti bahwa mereka mengerti tentang HAM. Sekadar contoh bisa disebut, hampir semua praktisi pendidikan dan sebagian besar orangtua mengerti jika masa kanak-kanak didominasi masa bermain. Segala bentuk penanaman nilai-nilai edukatif untuk mengembangkan kognitif dan kepribadian tidak akan pernah berhasil jika mengabaikan konsep itu.

Tetapi lihatlah di segala penjuru tanah air, hampir semua Taman Kanak-kanak (TK) telah merampas hak-hak bermain tersebut dan menggantinya dengan kewajiban bekerja dan berpikir. Kewajiban belajar membaca, menulis dan berhitung, bahkan bermain komputer yang dipaksakan oleh para orangtua melalui para guru TK merupakan bukti tak terbantahkan. Alih-alih menyongsong masa depan dan era globalisasi, anak-anak dipaksa untuk kehilangan masa kanak-kanaknya.

Di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, berjuta-juta potensi kreatif dan kecerdasan emosional peserta didik ditumpuli oleh dominasi peran guru dengan segala kekuasaannya. Bahkan dewasa ini, banyak kasus membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran serius atas HAM dengan penerapan hukuman fisik yang berlebihan terhadap peserta didik yang sangat merugikan.

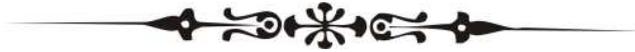
Barangkali, hanya di lingkungan pendidikan tinggillah pelanggaran HAM dalam pendidikan mendapatkan perlawanan berarti. Pemecatan mahasiswa oleh tangan besi rektor misalnya, masih dapat didudukkan secara proporsional melalui upaya hukum dan keadilan. Pemberangusan kebebasan akademik dalam berbagai bentuknya; intervensi pemerintah dan militer terhadap dunia kampus, dan sebagainya masih dapat diperjuangkan, sekali pun harus melalui demonstrasi.

Jadi cukup jelas bahwa pendidikan HAM dan pelaksanaan HAM dalam pendidikan ibarat dua sisi mata uang. Jika satu sisi wajah saja yang ditonjolkan dengan mengabaikan sisi wajah lainnya, cita-cita ke arah pelaksanaan HAM yang optimal akan sulit dapat tercapai. Sementara sisi mana yang hendak lebih dahulu diupayakan untuk diperbaiki, sangat bergantung kepada skala prioritas dan potensi.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, 10 Desember 1997



## PERPEKTIF PENDIDIKAN DEMOKRASI



SEJUMLAH kajian memperlihatkan bahwa demokrasi merupakan wacana paling mutakhir dari upaya pencarian manusia atas bentuk pemerintahan universal. Keterlibatan rakyat sejalan dengan semangat etimologis yang melekat padanya adalah keharusan absolut. Kenisbiannya hanya bisa ditoleransi oleh sistem, bukan oleh pemegang kekuasaan. Namun karena pelaksanaannya adalah manusia yang diketahui sarat berbagai keterbatasan dan kepentingan, maka sebenarnya demokrasi ibarat sepotong baju. Ada saat di mana baju itu pas dan nyaman dipakai, ada kalanya terasa longgar dan bukan tak mungkin sesekali begitu sempit sehingga tak memberi tempat bagi beberapa jengkal tubuh manusia.

Demokrasi sebagai sistem ideologi pun tak jauh dari perumpamaan tersebut. Tapi berbeda dengan baju yang kunci utamanya adalah ukuran, bahan, kepantasan dan mode; dalam demokrasi kunci utamanya adalah kesadaran dan keyakinan penganut yang kuat tentang kebenaran sistem demokrasi sebagai yang paling pas dan tepat bagi mereka dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan segala aspeknya.

Ketika sistem demokrasi yang diyakini mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat misalnya, maka proses demokrasi akan berjalan alami dan menemukan sendiri formatnya yang relevan sekalipun tidak benar-benar pas. Terbukti, dalam berbagai negara yang pemerintahannya begitu kuat menjalankan proses demokrasi, masih terdapat parlemen jalanan dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, aksi protes dan sebagainya sekalipun skalanya demikian kecil.

Persoalan mengemuka manakala sebuah bangsa baru belajar dan sedang dalam perjalanan melakukan pencarian atas esensi demokrasi yang oleh para pakar ilmu politik disebut masa-masa transisi menuju demokrasi. Transisi menuju

demokrasi di mana pun merupakan masa-masa kritis. Sebab, ketika tahap pertama ideologi demokrasi diterima suatu masyarakat, tidak secara otomatis mengkultur dan dipraktikkan secara sempurna. Dengan kalimat lain, ideologi demokrasi dalam sistem politik apa pun dan mana pun tetap memerlukan proses sosialisasi, pembudayaan dan pengamalan.

Karenanya, tak keliru jika ada pandangan, pelampiasan ketidakpuasan yang muncul pasca pemilihan presiden mengindikasikan bahwa pendidikan demokrasi belum merasuk jauh ke segenap elemen masyarakat. Proses kognitif, psikomotorik dan afektif atas esensi demokrasi baru ada pada anggota majelis, itu pun tidak semuanya.

Terbukti, masih ada yang menafikan langkah kompromi, negosiasi, *cow trading* (tidak termasuk *money politics*), *power sharing* atau apa pun namanya, padahal ia adalah bagian penting proses dan esensi demokrasi. Tak semuanya sadar bahwa perbedaan pendapat, kalah menang dalam pemungutan suara (*voting*), bahkan pembelotan (pembangkangan) organisasional atas nama argumentasi rasional adalah hal biasa dalam berdemokrasi.

Kesalahan, tentu saja tidak terletak pada rakyat yang telah melampiaskan ketidakpuasan politik (*political diskontents*) melalui berbagai bentuk perilaku yang sulit ditoleransi, sehingga jauh dari semangat demokrasi. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru merupakan penyumbang terbesar atas kegagalan pendidikan demokrasi. Padahal, sejak awal *founding fathers* negeri ini meletakkan dasar kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai pilar penyelenggaraan negara. Namun karena dalam perjalanannya dimanipulasi untuk dan atas nama kekuasaan, maka sepanjang usia negeri ini rakyat tak pernah merasakan kedaulatannya. Bila kemudian mereka berbondong-bondong “meminta” kembali kedaulatannya – meski secara formal telah menyerahkan kepada para anggota majelis – haruslah dipahami sebagai produk kesalahan sejarah.

## KOMUNIKASI POLITIK

Khas masa transisi, kata Alfian (1991), sebelum demokrasi betul-betul membudaya dan diamalkan suatu bangsa, biasanya akan mengalami berbagai macam kesulitan yang mengancam keberlangsungan eksistensinya. Ada masyarakat yang dapat mengatasi berbagai macam kesulitan, namun ada pula yang menemui kegagalan di tengah jalan, antara lain karena tidak mampu membendung arus anarkhisme yang dirangsang oleh sifat terbuka demokrasi sebagai ideologi.

Dalam kaitan itu, faktor komunikasi politik memainkan peran amat dominan guna memelihara sikap dan tingkah laku kehati-hatian masyarakat sehingga mereka tidak kembali jatuh ke pangkuan rezim otoritarianisme atau

totaliterisme, bahkan rezim militer sebagaimana terjadi di Myanmar dan baru-baru ini di Pakistan. Oleh karenanya kita berharap agar konsentrasi kelompok massa di Jakarta dan kota-kota lain yang hingga larut malam se usai pelantikan presiden baru melakukan vandalisme, perusakan dan bisa memancing kekerasan politik dan sosial lanjutan tidak terus dikondisikan.

Sebab bila itu terjadi, segenap warga bangsa akan kehilangan momentum untuk mengenyam demokrasi yang sesungguhnya. Apalagi diketahui, anggota MPR 1999 dan presiden terpilih *legitimate* adanya. Jika legitimasi itu digugat hanya lantaran kekecewaan yang sifatnya manusiawi, lantas kepada siapa lagi nasib republik ini dipertaruhkan?

Menyadari kenyataan adanya luapan kekecewaan dalam bentuk kemarahan sehingga sejumlah fasilitas publik dirusak bahkan sudah menjurus ke arah teror atas sejumlah anggota parlemen dan keluarganya; maka diperlukan terjalannya komunikasi politik yang sehat sehingga mampu menjembatani kesenjangan pemahaman atas demokrasi yang sedang mulai ditumbuhkembangkan. Para elit politik yang anggota dan simpatisannya kini melakukan “tantangan” duel terbuka, tidak hanya berkewajiban untuk membangun komunikasi politik yang brilian dan sehat; namun sekaligus bertanggung jawab atas retorika-retorika keras yang pernah dilontarkan.

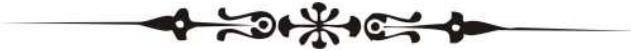
Banyak orang sepakat bahwa jauhnya harapan dengan kenyataan atas hasil rekrutmen politik selama SU-MPR berlangsung tetap menyulitkan bagi upaya-upaya meredam kekecewaan, kendati diketahui proses rekrutmen politik tersebut sudah sejalan dengan rel konstitusi. Namun apa boleh buat, pilihan atas demokrasi sudah dijatuhkan. Pantang bagi kita untuk surut ke belakang. Hal terpenting adalah, bagaimana memperkuat tritmen agar perspektif pendidikan demokrasi di masa mendatang mampu melahirkan proses politik yang sehat, etis dan menjunjung tinggi moralitas, aman serta damai.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 27 Oktober 1999

# 3



## KAMPANYE SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK



BANYAK sekali titik rawan yang harus diwaspadai menjelang pemilihan umum (Pemilu). Satu di antaranya adalah aktivitas kampanye sebagai ajang rivalitas antarpol. Sangat boleh jadi-mengingat singkatnya masa kampanye Pemilu, yakni 20 hari - sementara 48 partai politik merasa berhak mengambil bagian - kampanye akan menjadi arena *civil war* (perang saudara) jika tidak dimanajemani secara cerdas oleh masing-masing pimpinan parpol. Sebab, tak seorangpun dapat memastikan bahwa “tangan-tangan hitam” tak bertanggung jawab yang selama ini *mengobo-obok* harmoni tatanan masyarakat akan menjadi penonton yang baik. Bisa jadi justru sebaliknya, menjadi provokator.

Rivalitas antar parpol relevan dicermati karena terdapat fakta bahwa perseteruan antarpendukung Parpol tidak lagi semata-mata adu mulut, melainkan sudah mengarah pada bentrokan berdarah. Dengan berat hati kita katakan bahwa kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di beberapa desa (Cempaga, Sidetapa dan Banjar di Kabupaten Buleleng, Bali) antara pendukung Partai Golkar dan PDI Perjuangan dengan massa Partai Golkar juga berlangsung pada akhir pekan pertama Desember 1998. Belasan orang cedera, sejumlah kendaraan rusak berat dan pasar murah yang digelar Partai Golkar porak poranda. Sepekan kemudian aksi serupa juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Sementara pada saat yang hampir sama, di Yogyakarta juga terjadi bentrokan berdarah antara massa PDI Perjuangan dengan massa PPP yang berakhir dengan pembakaran kedua kantor DPC masing-masing.

Masih di Yogyakarta, beberapa waktu lalu sejumlah massa PAN dibacok sekelompok orang yang tak diketahui identitasnya di Bantul. Dan Minggu, 20 Maret 1999, pawai PPP dan PDI Perjuangan memakan seorang korban jiwa dibacok dan dikeroyok serta lebih dari 13 orang luka berat dan ringan (*Espos*, 21/3).

Sosialisasi UU Politik yang begitu singkat dan banyaknya Parpol yang ikut Pemilu tentu akan menyulitkan jadwal pelaksanaan kampanye. Kendati mungkin ada tekanan baru dalam kampanye mendatang seperti kampanye dialogis, atau mungkin larangan untuk melaksanakan kampanye lapangan dengan pengerahan massa, siapa yang bisa menjamin hal itu ditaat-azasi oleh pendukung Parpol?

Tradisi kampanye yang sudah berlangsung selama Orde Baru agaknya tak begitu saja gampang diubah. Kampanye dengan arak-arakan dan pengerahan massa niscaya masih akan dilaksanakan. Padahal, bentuk kampanye seperti itulah yang sangat potensial untuk membetot revalitas antarpengukung Parpol yang cenderung mengarah pada terciptanya benturan dan agresivitas massa. Kampanye seperti itu cenderung menjadi wahana pelampiasan emosi di tingkat *grassroots*. Bagaimana agar benturan antarmassa bisa dihindari?

## **PENDIDIKAN POLITIK**

Sudah menjadi kultur dunia politik, ketika kampanye datang, janji pun berbilang. Pada saat kampanye janji-janji selalu dilemparkan partai politik. Maksudnya, kampanye bukan semata-mata mengumpulkan massa, bukan pula sekadar pamer kekuatan (*show of force*). Lebih dari itu merupakan upaya meyakinkan massa agar memastikan diri memilih partai bersangkutan. Isu-isu seperti krisis ekonomi dan kesenjangan sosial, melambungnya harga-harga Sembako, ketidakpastian hukum (ketidakadilan), demokrasi yang tersendat, dominasi birokrasi dan militer dalam kehidupan sosial politik, pengadilan Soeharto, KKN, dan sebagainya, akan laris dijual dan dijanjikan untuk dibereskan. Tentu saja disertai embel-embel: jika massa memilih partai tersebut dalam Pemilu mendatang.

Oleh karena itu, sekiranya tak ada reformasi atas nuansa dan taktik kampanye, maka Pemilu mendatang akan tetap menjadi “pesta demokrasi” seperti di masa Orde Baru, bukan sebagai “sarana demokrasi” sebagaimana dikehendaki era reformasi. Dengan demikian, janji tetaplah janji, ditepati atau tidak adalah persoalan lain. Kenyataannya hampir semua pemilih tak perlu punya keberanian untuk menggugat juru kampanye di atas panggung dengan menagih janji. Mereka (para calon pemilih) lebih bergelora oleh pembagian uang dan kaus seragam, pekik dan *yel-yel* bersemangat, serta tontonan gratis para artis dangdut yang nampang di atas panggung, atau mengelu-elukan idola mereka dengan irasionalitas. Bahkan, ketika berada di TPS pun, janji-janji itu mungkin dilupakan. Keputusan untuk memilih sering kali dipengaruhi oleh faktor lain, yang bisa saja tak tampak dalam spanduk dan pidato para Jurkam.

Hal itu berarti, maraknya kampanye suatu partai bukanlah indikasi kemenangannya dalam Pemilu. Sehingga, ada yang mengatakan sepanjang-panjangnya arak-arakan kampanye, masih lebih panjang lantai rumah. Artinya, jumlah massa yang membeludak di jalanan, masih lebih sedikit ketimbang massa yang berada di rumah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, mestinya masing-masing Parpol menyadari betapa penting kejujuran untuk mengemukakan apa adanya, tidak perlu mengumbar janji muluk-muluk. Kejujuran juga yang dapat menghindarkan eksese negatif kampanye, menghindari kemungkinan benturan massa akibat saling ejek yang saling tuding.

Dalam kaitan itu, kampanye yang selama ini menjadi ajang hura-hura, hendaknya segera diubah sebagai wahana pendidikan politik bagi rakyat, khususnya para pemilih. Memang benar, tidak ada tafsir yang definitif atas pelaksanaan kampanye yang bermuatan pendidikan politik. Namun paling tidak, pemikiran harus difokuskan untuk menangkali kemungkinan Pemilu diselenggarakan dengan cara-cara yang lazim selama Orde Baru, yakni penuh kecurangan. Setiap partai politik diharapkan memanfaatkan sempitnya kesempatan kampanye lapangan untuk mendidik calon pemilih agar berani berbuat jujur dalam memilih, melakukan pengawasan intensif di daerah pemilihannya (tidak seperti selama ini yang langsung pulang ke rumah masing-masing sesudah memilih), dan membimbing cara-cara yang benar dalam memilih.

Kampanye bermuatan pendidikan politik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti radio dan TV dengan porsi jam tayang yang adil untuk melakukan debat publik, bukan pidato politik. Kelima stasiun TV swasta (TVRI sebagai TV publik mestinya netral, tidak boleh dimanfaatkan partai politik mana pun) diminta kerelaannya untuk menyediakan sedikitnya tiga hingga lima jam tayang dalam sehari untuk menampilkan perdebatan publik antarfungsiaris (tokoh) partai politik.

Di luar itu, penting diperhatikan ialah kemampuan manajerial fungsiaris partai untuk mengendalikan massa calon pemilih dan simpatisan partai. Sebab, calon pemilih Pemilu 1999 tak jauh berbeda dengan pemilih pada Pemilu 1997, ditambah munculnya “pemilih baru.” “Pemilih baru” itu adalah anak-anak muda yang sekali menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1997 dan kedua kali hendak menggunakan hak pilihnya.

Sekiranya stelsel pendaftaran pemilih yang dipakai Pemilu 1999 efektif, gabungan kelompok pemilih muda banyaknya mencapai 61 juta orang. Seiring dengan pertambahan usia anak-anak muda yang dua tahun belum bisa ikut Pemilu, maka dalam Pemilu 1999 ini tentu jumlah itu akan bertambah. Dengan demikian, jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 199 juta jiwa kali ini akan

didominasi pemilih muda. Dan jangan lupa, psikologi mengajarkan bahwa anak muda jauh lebih agresif ketimbang orang-orang tua. Agresivitas itulah yang relevan dicermati sebagai variabel potensial yang bisa menimbulkan kerusuhan massa antarpendingung Parpol.

## **ELIMINASI TITIK RAWAN**

Berdasarkan persepsi psikologis dan politik yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, pemerintahan Habibie adalah pemerintahan transisi yang tugas pokoknya adalah melaksanakan Pemilu dalam format reformasi yang bersih, demokratis, jujur dan adil. Dalam kajian ilmu politik, cukup banyak yang secara sistematis dan komparatif memfokuskan diri pada proses transisi menuju demokrasi. Satu diantaranya adalah kasus transisi yang terjadi di Eropa Selatan (Italia, Yunani, Portugal dan Turki) sebagaimana termuat dalam *Transitions from Authoritarian Rules: Southern Europe* (1992) yang dieditori O'Donnell, Schmitter dan Whitehead.

Kasus-kasus transisi memperlihatkan, kendati faktor-faktor internasional – langsung maupun tak langsung – mengkondisi dan mempengaruhi jalannya transisi, namun para partisan utama dan pengaruh-pengaruh dominan dalam setiap kasus tetap berasal dari dalam negeri. Kasus-kasus transisi juga memperlihatkan betapa penting lembaga-lembaga, prosedur-prosedur pengantara dan forum-forum yang membantu melegitimasi para penguasa diskursus politik dalam periode transisi.

Ada gambaran jelas betapa penting dan vital peran kepemimpinan serta pertimbangan politis, betapa penting dan vital peran individu-individu dalam proses historis yang kompleks. Namun, pada saat yang sama juga tampak bahwa ketepatan waktu, kerumitan dari proses interaktif yang dilaksanakan dalam periode tersebut menunjukkan berbagai cara bagaimana transisi menghasilkan kejut-an-kejutan, sejumlah ironi, bahkan paradoks.

Indonesia barangkali akan menjadi contoh terakhir betapa berat periode transisi dirasakan oleh semua kalangan. Gejala kerusuhan sosial dan kekerasan politik, bukan hanya mengejutkan namun sangat menakutkan. Oleh karena itu, jika pemilu 1999 dianggap sebagai *entry point to democracy*, maka sebagai komponen bangsa kita semua bertanggung jawab untuk mengamankan dan menyukseskannya. Terkait dengan peran individu-individu, kejut-an-kejutan dan sejumlah ironi, maka pengamanan dan penyuksesannya harus dimulai dari eliminasi titik-titik rawan sebelum dan sesudah Pemilu berlangsung.

Surakarta, HU *SOLOPOS*, Kamis, 8 April 1999



## BUKAN POLITISASI PENDIDIKAN



SEJAK awal Bung Harmoko memimpin Golkar, sudah ditebar bau kampanye. Kunjungannya ke ratusan kabupaten di seluruh Indonesia memang didefinisikan secara operasional sebagai temu kader. Tetapi substansi kegiatannya tidak berbeda dengan kampanye. Suatu aktivitas politik dengan maksud memasarkan program, memantapkan interes dan pilihan politik, bahkan menarik para calon pemilih baru.

Sesudah ketemu kader dirasa tuntas, dan saat-saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) makin dekat, kegiatan berlanjut di sekolah-sekolah. Para pelajar yang jumlahnya jutaan dan sangat potensial sebagai calon pemilih pemula mulai digarap. Di Batang, Jawa Tengah misalnya, ada kemah bakti yang diakhiri rekayasa pernyataan kebulatan tekad untuk mencoblos Golkar pada Pemilu mendatang disertai pemberian NPAG baru (*Adil*, 65:11, 18-24/12/96).

Beberapa waktu sebelumnya, dilakukan pembentukan Satgas Pelajar untuk Golkar di Wonogiri yang dilanjutkan dengan lomba mengerek bendera Golkar di Semarang (*Bernas*, 16/11/96 dan 24/12/96). Sementara di kota pelajar Yogyakarta, Depdikbud Kodya Yogya sempat menyerukan agar seluruh kepala SMP Negeri/Swasta mengerahkan pelajarannya mengikuti lomba lari masal yang digelar Golkar (*Bernas*, 24/12/96).

Kabar paling gres, di Irian Jaya para guru ditatar agar mampu berkampanye di hadapan para pelajarannya dan di Kaltim, DPD Golkar menggiring para dosen senior Unmul untuk jadi juru kampanye (*Forum Keadilan*, V: 21, 25/1/97 dan V:22, 10/1/97). Bahkan pelajar di Jakarta pun juga digarap serius sehingga mengundang protes keras Hadi Mulyo, anggota DPR dari FPP tak lama berselang.

Memang, sejauh ini baru pentolan PPP yang protes, baik lisan dan tertulis, maupun langsung dalam bentuk aksi nyata seperti “dekuningisasi” di Solo dan

Wonosobo. Sementara PDI, agaknya tak bergairah melakukan protes karena dipaksa “bertanding” di kandang sendiri.

Dan bisa dipastikan, langkah lain atas nama pemberian wawasan politik akan terus dilakukan oleh Golkar hingga detik-detik menjelang Pemilu beberapa bulan mendatang.

## **WAWASAN WIYATAMANDALA**

Banyak kalangan menyebut langkah yang dilakukan Golkar sebagai upaya mempolitisasi pelajar atau politisasi pendidikan. Tanpa perlu memilih salah satu istilah, dapatkah hal itu dibenarkan? Masalahnya bukan soal salah atau benar. Sebab sejauh ini sudah ada komitmen bahwa para pelajar dan mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan politik praktis. Kalaupun harus melakukan *politicking*, tidak boleh atas nama sekolah atau kampus.

Bagi para mahasiswa, Wawasan Almamater yang terpancang di depan setiap kampus rumusannya mengandung muatan jelas upaya pengharaman kegiatan politik praktis. Sehingga setiap mahasiswa melakukan aktivitas atau gerakan, selalu dikuntit dan diwaspadai. Begitu aktivitas ditengarai berbau politik, dengan serta merta birokrasi (bekerjasama sangat erat dengan pihak keamanan) sebisa-bisanya melakukan pelarangan. Upaya represif terus dilakukan atas berbagai aktivitas kemahasiswaan yang dianggap politis.

Kalau terhadap mahasiswa yang mestinya boleh berpolitik karena usia dan wawasannya dianggap cukup matang saja dilakukan pelarangan, kenapa terhadap para pelajar justru inkonsisten? Padahal bagi para pelajar, komitmen untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis itu sudah jelas tercermin dalam semangat Wawasan Wiyatamandala yang menegaskan bahwa sekolah adalah pusat pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian tidak etis jika para pelajar digiring untuk melakukan kegiatan politik praktis.

Karena itu, agaknya aneh jika Mendikbud Wardiman Djojonegoro justru menyatakan bahwa apa yang dilakukan Golkar bukan masalah, dengan alasan karena para pelajar itu juga para calon pemilih. Barangkali Wardiman benar. Sebab baik Wawasan Wiyatamandala maupun Wawasan Almamater lahir dalam kepemimpinan almarhum Nugroho Notosusanto yang dilanjutkan oleh kepemimpinan Fuad Hasan, tidak dalam kepemimpinannya sebagai Mendikbud. Jadi tak ada keharusan untuk tetap menegakkannya sekalipun aturan tersebut sudah disepakati bersama.

Berbeda dengan politisasi pelajar atau politisasi pendidikan, pendidikan politik jelas diperlukan. Sebagai pelestari sistem politik dan salah satu kontributor pembangunan politik, sekolah (termasuk universitas) sekurang-kurangnya



## “TRITUNA”, PENDIDIKAN DAN WAKIL RAKYAT



HARAPAN semua orang, manusia lahir dalam keadaan sempurna. Tapi jika Tuhan berkehendak lain, dalam kenyataannya kita dapati penyandang cacat. Bisa karena dibawa sejak lahir, dapat pula akibat kecelakaan. Konon, ketika dunia masih diskriminatif, para penyandang cacat seringkali mendapat perlakuan kurang pada tempatnya. Namun manakala dunia makin egaliter, tempat dan berbagai akses bagi para penyandang cacat menjadi terjamin.

Pendidikan misalnya, dari mula dirancang dan dikembangkan justru untuk manusia normal. Bahwa kemudian ada pendidikan khusus untuk para penyandang cacat, hal itu tidak lain karena pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia yang wajib dilindungi oleh siapapun. Manusia tanpa kecuali berhak memperoleh pendidikan secara layak.

Dari hak paling elementer tersebut, pengakuan akan hak-hak para penyandang cacat berkembang ke arah hak-hak manusia normal pada umumnya. Dengan kata lain, aksesibilitas mereka terhadap berbagai ragam kehidupan harus diakui dan diupayakan. Dalam rangka itulah baru-baru ini mulai digodok rancangan Undang-undang penyandang cacat (RUU Penca).

Salah satu hak penyandang cacat yang diakui adalah aksesibilitasnya terhadap dunia kerja. Menurut Pasal 19 RUU Penca misalnya, diatur, barang siapa tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mendapat pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh penyandang cacat tersebut sesuai dengan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya sebagaimana dimaksud Pasal 14, dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Tak ada makna lain dari “tiap-tiap” dalam kalimat itu selain semua orang Indonesia. Itu berarti, baik warga negara yang normal maupun mereka yang berkelainan, yakni mereka yang menyandang kecacatan baik dalam segi jasmaniah, keinderaan, rohani, intelektual, sosial dan emosi atau gabungan dari segi-segi kelainan itu berhak memperoleh pendidikan.

Agar tercapai perkembangan kapasitas yang maksimal serta wajar, maka bagi mereka yang menyandang kecacatan haruslah disediakan pendidikan khusus yang berbeda caranya dengan pendidikan yang diberikan kepada mereka yang normal, dalam lingkungan yang sedapat mungkin tak terbatas. Untuk itu, dunia pendidikan kita sepakat menyebutnya sebagai pendidikan luar biasa (PLB).

Sebagai suatu *nation-state*, secara nasional, secara solider, telah dilaksanakan pelayanan pendidikan luar biasa tersebut. Namun demikian, kalau pendidikan bagi anak-anak yang normal saja sudah menimbulkan berbagai masalah, apalagi pendidikan luar biasa ini. Secara teknis, ragam masalah itu menyangkut konsep, pola, metode, peralatan pendidikan, formasi, mutu tenaga kependidikan dan struktur organisatoris badan yang memikirkan dan melaksanakan PLB.

Apalagi diketahui ragam kecacatan itu cukup luas, mulai dari buta, kurang lihat, tuli, kurang dengar, cacat bicara, terbelakang mental, jenius, *cerebral palsy*, poliomeilitis, epilepsi, penyakit-penyakit kronis, autisme dan tunalaras (mengalami penyimpangan tingkah laku), dan lain-lain. Khusus untuk autistik, di Indonesia sekolahnya hanya ada di DIY dan baru saja diresmikan oleh GKR Hemas.

Di antara ragam kecacatan tersebut, barangkali baru mereka yang menyandang trituna, yakni tunanetra (buta), tunarungu (tuli) dan tunawicara (bisu) yang sudah mendapat perlakuan optimal. Tunanetra misalnya, melalui metode Braille mereka sudah banyak yang mampu meraih predikat master/magister bahkan doktor.

Sementara tunarungu dan tunawicara sudah begitu mudah berkomunikasi dengan manusia normal lain karena dibantu kamus bahasa isyarat yang sudah dapat diakses umum. Bahkan mereka pun dapat menikmati perkembangan nusantara dan dunia melalui berita-berita TVRI. Dengan kalimat lain, intervensi pendidikan terhadap para penyandang trituna sudah memadai dan mampu mengubah status penghidupan mereka sehingga sama dengan manusia normal paada umumnya.

Lantas apa hubungannya dengan wakil rakyat? Tentu saja tidak ada. Jangankan dicari dalam referensi ilmu politik, di berbagai literatur pendidikan manapun tidak mungkin ditemukan kolerasi antara ragam kecacatan, pendidikan dan wakil rakyat. Bahwa tulisan ini dirangkai sedemikian rupa, tidak lain ingin menunjukkan betapa di antara kita sudah banyak yang terjangkiti “penyakit

trituna” tersebut, lebih-lebih wakil rakyat, yakni para pengampu kekuasaan dan anggota dewan yang terhormat.

Jujur harus diakui, sedikit sekali para pengampu kekuasaan, mulai dari setingkat kepala desa (lurah) hingga menteri (presiden menjadi perkecualian karena orangnya hanya satu) yang tak “buta” atas kompleksitas problematika rakyatnya; tak “tuli” terhadap aspirasi masyarakatnya; dan tak “bisu” pada pengungkapan kebenaran atas nama keadilan dan penegakan hukum. Para anggota dewan yang terhormat pun (mulai dari DPRD-II, DPRD-I dan DPR pusat) yang mestinya menjadi representasi para pemilih, banyak yang menutup telinga, mata dan mulut terhadap berbagai kepentingan rakyat yang mestinya diperjuangkan sesuai kapasitasnya sebagai wakil rakyat.

Wacana mutakhir bisa disebut sebagai contoh, bagaimana mungkin seorang gubernur nekad membangun rumah dinas bernilai milyaran rupiah sementara banyak warganya didera kemiskinan, bahkan tak tentu tempat tinggalnya karena tergusur proyek besar yang mengatasnamakan pembangunan nasional? Bagaimana mungkin seorang pembina Korpri punya inisiatif membangun gedung pensiunan – juga bernilai milyaran rupiah – sementara diketahui mayoritas pegawai berpenghasilan kecil, banyak yang terjerat rentenir dan dilanda stress?

Juga sungguh tidak masuk akal, bagaimana mungkin seorang Megawati yang diketahui dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia didukung aspirasi rakyat banyak harus dikeluarkan dari sistem melalui konspirasi antarpengampu kekuasaan? Bagaimana bisa terjadi para anggota dewan yang terhormat menyetujui begitu mudah RUU Ketenaganukliran – dikatakan didukung mayoritas anggota dewan padahal dihadiri hanya oleh beberapa orang – sementara rakyat menolaknya di mana-mana? Mengapa mereka menjadi “tunarungu”, tidak mau mendengar apa yang disuarakan masyarakat luas?

Dan dalam waktu dekat, kita juga sedang menunggu nasib RUU Ketenagakerjaan yang diketahi belum sepenuhnya akomodatif terhadap kepentingan para pekerja nasional.

Mayoritas anggota dewan yang terhormat yang dipilih langsung oleh rakyat, mestinya tidak “tunanetra” terhadap persoalan yang dikeluhkan mereka yang diwakilinya. Tapi seringkali terjadi, ketika rakyat mengadukan nasibnya, mereka menghilang tak tentu rimbanya, atau tidak bersedia menemui dengan berbagai alasan. Alhasil, Komnas HAM yang mestinya tidak representatif untuk menampung keluhan mereka, kini menjadi satu-satunya tumpuan pengaduan.

Terhadap soal lain yang berskala nasional seperti kasus tambang emas Busang misalnya - dan kenyataan kemudian memang bermasalah - para anggota dewan yang terhormat itu justru “tunawicara.” Sehingga seorang Amien Rais

menjadi blunder yang harus menanggung risiko politik karena begitu garang menyuarakan hati nurani rakyat yang jelas-jelas sakit hati karena kekayaan kita dibagi-bagi menurut selera orang asing.

Tentu saja masih banyak contoh lain yang mengindikasikan bahwa para pengampu kekuasaan belum terbebas dari “penyakit trituna.” Hal paling *gres* adalah tetap digulirkannya kebijakan “kuningisasi” di berbagai daerah yang seolah-olah dikehendaki rakyat. Padahal kebijakan itu sendiri tidaklah akseptabel, bahkan cenderung menimbulkan desintegrasi sosial.

Cukup lama kita merenung, sungguh kasihan memikirkan nasib mereka. Sebab sejauh ini tidak ada terapi pendidikan khusus yang bisa menetralisasi kecacatan “trituna” yang melanda sebagian besar para wakil rakyat kita. Pendidikan luar biasa yang ada baru sebatas melayani mereka yang benar-benar tunanetra, tunarungu dan tunawicara (trituna sungguhan).

Untuk menyembuhkannya, barangkali benar kata para politikolog dan ilmuwan sosial yang yang paham betul soal politik, satu-satunya jalan untuk menyembuhkan wakil rakyat dari “penyakit trituna” itu hanyalah perubahan politik. Sementara perubahan politik itu sendiri baru bisa terjadi jika ada perubahan (pembaruan) atas lima paket Undang-undang tentang politik. Katanya.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 4 April 1997



## MUSYAWARAH (TANPA) MUFAKAT DI INTERNET



SIAPAKAH sebenarnya pejuang atau tokoh demokrat paling *ngetop* saat ini?ada yang berpendapat bahwa pejuang terpenting demokrasi di dalam maupun di luar Indonesia ternyata bukan LSM, lembaga internasional pemantau hak-hak asasi manusia, intelektual, anggota parlemen vokal, jurnalis, serikat buruh, ormas, OTB atau pun mahasiswa demonstran, melainkan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir, yakni Internet.

Bisa saja memang pandangan itu keliru. Sebab Internet sendiri sangat tergantung pada *man of behind the computer*. Namun ditilik dari derajat “ketokohnya” agaknya belum ada seorang pun yang bisa menandingi kedemokratan Internet. Internet kenyataannya mampu menampung, menyalurkan bahkan mungkin menjembatani ragam perbedaan visi dan kepentingan.

Tanpa kenal henti - karena tak terbatas dimensi waktu - Internet menyediakan kesempatan untuk bermusyawarah tanpa harus dan perlu mengambil kata mufakat. Berbanding terbalik dengan demokrasi yang kebanyakan berlangsung, dimana tak ada musyawarah pun seringkali harus diambil kata mufakat. Melalui pemungutan suara yang jujur atau lewat rekayasa yang cenderung curang.

Masalahnya, sejauh mana sebenarnya kredibilitas arus informasi yang berlalu lalang di Internet sehingga ia menjadi determinan penting dalam proses demokratisasi? Apakah Internet sebagai sosok layak dicurigai dan patut diwaspadai sehingga perlu dibalut instrumentasi hukum?

Pertanyaan-pertanyaan itu relevan ditengahkan karena baru-baru ini ada seorang dosen PTS di Yogyakarta ditangkap aparat keamanan gara-gara

meluncurkan sebuah pesan melalui *newsgroup* di Internet. Persoalan makin menarik bukan lantaran terjadi dalam situasi dimana kondisi politik sedang menghangat akibat kasus 27 Juli 1996, melainkan karena kebaruan kasus itu terkait teknologi informasi mutakhir yang sama sekali belum terjangkau oleh ketentuan hukum di Indonesia. Baik menyangkut tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.

## **KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Terkait konteks informasi aktual dan pembicaraan tentang masa depan Indonesia, Internet memang menyediakan banyak pilihan. Mulai dari ragam *homepage* yang tersedia, forum diskusi yang sangat ilmiah hingga yang paling *gombal* sekalipun. Sebut misalnya *mailing-list* media diskusi via surat elektronik (*electronic mail* atau *e-mail Indonesia-L* yang populer dengan sebutan 'Apakabar'), sangat diminati para *Netter's*, *Net Surfer's* atau *Internaut* (orang yang menggunakan jaringan global Internet).

Forum ini menjadi pilihan karena fakta, saluran informasi dan media-media konvensional lain seperti surat kabar, radio dan televisi terlalu banyak dikekang regulasi (bahkan penetrasi) sehingga tidak bisa menampung ragam aspirasi, seringkali tidak memuat segala macam berita dan informasi yang benar (faktual) karena pertimbangan politik, sosial, dan sebagainya.

Memang benar, karena prinsip utama berdirinya jaringan global Internet adalah kebebasan, kecepatan dan kemudahannya, bisa saja media itu disalahgunakan. Misalnya mengirim tulisan (informasi) yang bernada fitnah, bohong atau memutarbalikkan fakta. Apalagi seorang pengirim dimungkinkan untuk merahasiakan identitas aslinya, baik karena inisiatif sendiri maupun karena dijamin oleh moderator yang mengatur pendistribusian informasi itu.

Tapi perlu diingat bahwa pengguna Internet bukanlah tipe manusia kemarin sore yang serta merta menelan segala informasi dan berita bulat-bulat. Mereka kebanyakan kelas menengah yang berpendidikan. Setiap informasi atau berita dan tulisan selalu bisa disimpulkan sebagai gagasan berharga, cacat logika atau sekadar sampah. Sehingga tidak cukup alasan bagi siapapun untuk mencurigai apalagi mewaspadai Internet sebagai media agitasi dan propaganda.

Forum diskusi yang tersedia di Internet memberi manfaat besar bagi penumbuhkembangan kebebasan berpendapat. Siapapun bebas mengajukan visi, pandangan dan gagasan. Sementara siapa yang lain bebas pula menanggapi atau tidak menggubrisnya. Tak ada keharusan untuk meyakini kebenaran gagasan sekalipun didukung argumentasi-argumentasi akurat. Dengan kata lain, Internet mengembangkan seluas-luasnya musyawarah tanpa perlu mengambil mufakat. Hal ini berlaku juga untuk berita-berita dan informasi yang dirilis.

## DIATUR UNDANG-UNDANG?

Sampai saat ini tak banyak negara yang mengatur Internet dalam bentuk Undang-undang karena unsur kebaruan dan kemutakhirannya. Namun, Amerika Serikat sendiri sebagai negara paling liberal di dunia dan pengembang pertama jaringan global Internet sudah mulai merancanginya.

Beberapa instrumentasi hukum yang mengarah ke sana sudah mulai diluncurkan. Barangkali, selain karena tindak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi parallel dengan kemajuan teknologi manusia, ada segala sesuatu yang menyangkut hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa serta bernegara yang layak diatur.

Ambil contoh Connecticut di AS. Negara bagian itu telah meluncurkan Undang-undang yang menyatakan bahwa pelecehan seksual melalui Internet adalah tindakan kejahatan yang dapat diancam hukuman (Winarno, 1995). Termasuk pengesahan Undang-undang Reformasi Teknologi oleh Kongres AS pada 1 Februari 1996 yang, antara lain menyatakan bahwa siapa saja yang terbukti mengirim, menempatkan dan menyebarkan informasi tidak senonoh dalam jaringan Internet akan didenda 250.000 US dolar atau hukuman penjara maksimum dua tahun.

Dalam Konferensi Dunia Internet di Kualalumpur pada 7 Maret 1996 lalu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa kebijakan menyensor Internet bukanlah pembicaraan penting, sebab pengguna komputer sanggup melakukan swaregulasi. Menurut Anwar, sensor bukan solusi terbaik menanggapi arus informasi dan perdebatan yang dilemparkan ke jaringan komputer global. Bukan pula solusi menghadapi kekhawatiran yang ditimbulkan nilai-nilai interaktif melalui Internet.

Sikap itu berbeda dengan tetangga dekat Singapura. Pemerintah Singapura menurut rencana akan mengatur dan menyensor materi yang dilepaskan ke Internet. Kekhawatiran melanda para pengguna komputer di negara kota itu karena pemerintah berencana melarang diskusi politik dan agama melalui Internet. Pemerintah Singapura bahkan mengingatkan, semua informasi yang memasuki negara itu harus dibersihkan, dan penyedia layanan Internet harus menghapuskan kandungan informasi yang tidak diinginkan pemerintah.

Memang benar, instrumentasi hukum atau regulasi bisa disalahgunakan oleh penguasa menjadi alat sensor paling efektif seperti yang terjadi pada lembaga SIUPP dan RUU Penyiaran. Tapi perlu diingat, instrumentasi hukum tidaklah identik atau sama dengan sensor. Diperlukan tidaknya regulasi tentang Internet dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum, bukan untuk sensor. Sebab sensor dengan menutup mata jutaan informasi yang datang tidak hanya akan

mencelakakan, namun sekaligus bisa menjadi batu sandungan dan langkah mundur bagi upaya menghadapi kompetisi global guna menciptakan demokratisasi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemakmuran.

Peraturan atau perundang-undangan soal komputer dan perkembangan teknologi informasi itu mungkin diperlukan. Bukan untuk menutup, membatasi atau meniadakan ragam informasi di jalur yang oleh Wapres AS, Al Gore, disebut *superhighway*, melainkan diperlukan untuk mengatur kedudukan hukum para pengguna dan penyedia teknologi informasi itu agar jelas peran dan fungsinya. Bisa pula menjadi patokan semua pihak yang berkecimpung di bidang ini agar jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lebih penting lagi sebagai antisipasi atas tindakan-tindakan pelanggaran dan kejahatan yang bisa timbul karenanya.

Ketika harga teknologi komputer masih mahal, dan Internet baru diakses oleh sebagian kecil warga masyarakat, peraturan perundangan agaknya belum begitu mendesak karena kasus-kasus hubungan hukum sedikit kuantitasnya. Tetapi, manakala teknologi komputer diproduksi secara masal sehingga harganya terjangkau dan Internet diakses oleh masyarakat luas, hubungan hukum akan menjadi kompleks. Pada saat itulah peraturan perundangan menemukan relevansinya.

Namun begitu, sebagai negara hukum, semua kita pulangkan kepada para penegak, pakar, dan praktisi hukum. Sampai di mana apresiasi mereka terhadap kehadiran teknologi informasi paling mutakhir itu merupakan tantangan tersendiri yang diharapkan dapat memperkaya wacana hukum kita. Cuma satu hal yang layak mendapat perhatian ialah, masyarakat yang sudah lebih dari 50 tahun merdeka ini jangan terus-menerus dianggap awam dan bodoh.

Dalam situasi pergaulan global saat ini, kemampuan untuk melakukan *self censorship* telah tumbuh secara dinamis. Oleh karena itu, segala bentuk pendiktean oleh pemerintah, macam “penerangan” yang sering kali cacat logika, menjadi tidak relevan lagi.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 22 Agustus 1996



## EKSES DEGRADASI KEJUJURAN PEMIMPIN BANGSA



ANDAİKATA perlu disebut nama-nama pemikir politik dan sosial jempolan yang setiap bukunya laris bak kacang goreng di dunia, maka satu di antaranya adalah Francis Fukuyama. Pemikirannya dalam *The End of History and The Last Man* (1992) menjadi perdebatan para pakar di berbagai forum publik serta mengundang gelombang reaksi dan kritik di banyak negara. Ia juga menghasilkan *Trust: The Social Virtues & The Creation of Prosperity* (1995).

Kendati Fukuyama menyebut pencarian sistem pemerintahan sudah dituntaskan dengan keunggulan demokrasi dan ekonomi terbuka, namun ia melihat sejumlah sistem tumbuh lebih mekar dibanding lainnya. Dalam buku kedua yang tak kalah ambisiusnya, Fukuyama berusaha meyakinkan dunia bahwa *trust* atau kepercayaan dalam kehidupan ekonomi memiliki peran sentral. Dengan sampel AS, Jerman dan Jepang di satu sisi serta Cina, Perancis dan Italia di sisi lain, ia sampai pada tesis bahwa modal sosial sebuah negara dan tingkat kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya (demokratis atau otoriter) merupakan faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah negara dalam membangun kesejahteraan bangsanya.

Apa relevansi temuan Fukuyama mengenai kepercayaan sosial tersebut? Jawabannya adalah, di tengah zaman pertarungan untuk mencapai kejayaan ekonomi yang ada di depan kita sekarang, dimana perbedaan kultural akan menjadi penentu utama keberhasilan bangsa, modal sosial yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan akan menjadi sama pentingnya dengan modal fisik. Hanya masyarakat dengan kepercayaan sosial tinggilah yang akan mampu menciptakan organisasi bisnis skala besar yang fleksibel yang diperlukan untuk berhasil dalam kompetisi perekonomian global yang berkembang sekarang.

Tak bertanggung lagi berapa kerugian yang meski dibayar akibat ketidakpedulian pada soal penting kepercayaan ini sementara pada saat yang sama kita dihadapkan pada merosotnya moralitas dan degradasi kejujuran para pemimpin bangsa. Padahal diketahui hanya pemimpin yang jujur dan terpercayalah (*trust leader*) yang mampu mengontrol kepercayaan sosial warga bangsanya.

## **BELUM DEWASA**

Nyaris setiap hari, wacana publik sebagaimana direpresentasikan melalui pemberitaan pers nasional mengindikasikan betapa sulit menemukan pemimpin bangsa yang kredibel. Hiruk pikuk kasus duit ratusan miliar yang terkenal dengan skandal Bank Bali secara sistematis telah membuka mata publik betapa degradasi kejujuran para pemimpin bangsa sudah sampai pada tahapan paling kritis. Padahal, republik ini hanya dapat dibangun oleh para pemimpin yang kredibel, berdedikasi tinggi dan mengerti betul soal modal sosial dan nilai tambah.

Menurut sejumlah teori psikologi, kredibilitas berhubungan dengan persepsi. Sementara persepsi melekat pada pengalaman dan sekap terjang setiap individu dalam berbangsa dan bernegara di masa lampau. Dalam tataran kehidupan sosial politik, kredibilitas itu sendiri jelas tidak dapat dibangun melalui legitimasi semata-mata, namun juga harus didukung oleh integritas pemimpin dan didukung semua pihak guna membantu melalui dedikasi, keahlian dan kepakaran, kebersamaan serta - sekali lagi - kejujuran.

Dalam hal kejujuran, banyak orang menoleh pada wilayah psikologis manusia. Para teoretikus behaviorisme misalnya, menyatakan bahwa kejujuran dan kebajikan merupakan tingkah laku yang diperoleh berdasarkan prinsip belajar umum yang mereka senangi. Freudian (pengikut psikoanalisis Freud) berpendirian bahwa kebajikan dan kejujuran merupakan identifikasi superego dengan orangtua, dan oleh karenanya ia merupakan hasil keseimbangan yang tepat antara cinta dan otoritas dalam tata hubungan keluarga. Itulah sebabnya tidak sedikit kalangan yang berusaha menanamkan kejujuran dan kebajikan melalui intervensi pendidikan.

Namun, ketika para psikolog Amerika melakukan studi pertama tentang moralitas manusia (studi Harstone dan May pada 1928-1930), banyak kalangan tidak yakin bahwa kejujuran dan kebajikan dapat dibentuk melalui intervensi pendidikan. Banyak fakta membuktikan, tingkat pendidikan yang memadai misalnya, tidak serta merta menjadikan seseorang jujur dan bijak. Bahkan seringkali sebaliknya, pendidikan memadai dijadikan sebagai basis untuk melakukan ketidakjujuran, manipulasi, dan hal-hal tak terpuji lainnya yang merugikan masyarakat luas.

Studi Harstone dan May ini memusatkan perhatian pada suatu kelompok kebajikan moral seperti kejujuran, pelayanan, altruisme dan pengendalian diri. Hasilnya sungguh mengagetkan para pakar yang pada masa itu betul-betul intensif mengkaji soal moralitas manusia. Ternyata tak ada ciri-ciri watak disposisi psikologis atau hal-hal yang bersesuaian dengan kata-kata seperti kejujuran, pelayanan, altruisme dan pengendalian diri.

Sehubungan dengan kejujuran misalnya, mereka menemukan bahwa hampir setiap orang pada suatu waktu pernah menipu atau berbohong. Dan apabila orang pada situasi tertentu pernah menipu atau berbohong, hal itu tidak akan berarti ia akan atau tidak akan menipu atau berbohong pada situasi lainnya. Dengan kata lain, bukanlah ciri watak kejujuran yang membuat seorang manusia menipu atau berbohong pada situasi tertentu. Para peneliti awal ini menemukan bahwa orang yang menipu atau berbohong mengungkapkan sama banyak atau malah lebih banyak ketidaksetujuan moral terhadap penipuan atau kebohongan seperti mereka yang tidak berbohong dan tidak menipu. Apa relevansi pembahasan soal ini dikemukakan?

Jujur saja, dengan bahasan di atas sebenarnya hendak dikatakan bahwa kalau pun Baramuli, Rudy Ramli, Adnan Buyung Nasution, Subianto dan sederet pemimpin bangsa lainnya harus dan merasa perlu berbohong atau menipu publik dengan saling melempar tanggung jawab atas upaya *over-up* kasus Bank Bali; atau sekalipun Rudini, Bintang Pamungkas, Agus Miftah, dan sederet pemimpin partai politik perlu tidak jujur mengakui kekalahannya dalam pemilu 1999, bukan berarti watak psikologis mereka adalah penipu dan pembohong. Menurut hemat saya, hal itu lebih disebabkan karena para elit pemimpin tersebut belum sepenuhnya memahami aspirasi politik karena dibatasi oleh kepentingan politik individu atau kelompoknya.

Dan sekiranya dikaitkan dengan sejumlah tahapan moral sebagaimana dikemukakan Lawrence Kohlberg (1995), maka persis seperti dikatakan Rektor UII Asman Boedisantoso, sebagian besar elit politik di Indonesia ternyata belum dewasa. Karena itu tidaklah aneh jika kemudian konflik-konflik politik dan ekonomi sulit diselesaikan, yang pada gilirannya justru menimbulkan kebuntuan.

## **EKSES GANDA**

Teori orang besar (baca: kepemimpinan) sering kali menyebut-nyebut bahwa proses yang mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam upaya menuju ke arah pencapaian tujuan pada situasi tertentu hanya akan efektif jika ada kesamaan pandangan antara pemimpin potensial sebagai fungsi dari pengikut potensial. Hal ini berlaku tidak saja untuk pemimpin yang didaulat karena kedudukannya (*status leadership*), namun juga berlaku bagi kepemimpinan

yang muncul dalam suatu situasi tertentu (*emergent leadership*). Sehingga bisa dibedakan secara tegas antara pemimpin dengan pelawak.

Jika bantalan psikologis berupa kecerdasan emosional merupakan elemen penting yang selayaknya dipikirkan di masa-masa mendatang agar ada pada pengikut potensial, maka kejujuran adalah prasyarat mutlak yang diperlukan oleh para pemimpin potensial. Dengan kata lain, sekiranya kita hendak benar-benar keluar dari berbagai krisis yang sungguh-sungguh telah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sangat dibutuhkan kehadiran para pemimpin yang dapat dipercaya.

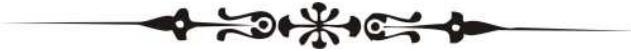
Pemimpin terpercaya inilah yang kelak diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial untuk bangkit kembali meraih kejayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kalau ada elit politik, hukum dan elit ekonomi yang dari hari ke hari selalu menjadi tertawaan banyak orang, lebih baik ia tak usah jadi pemimpin, melainkan jadi pelawak saja. Sebab pemimpin yang berperan ganda sebagai pelawak jauh lebih buruk ketimbang pelawak yang kemudian jadi pemimpin.

Sejumlah paparan di muka seharusnya membuka kesadaran siapapun bahwa degradasi (kemerosotan) kejujuran para pemimpin punya kontribusi besar atas munculnya berbagai multi ekses (ekses ganda). Ketidakjujuran, diakui atau tidak telah menimbulkan ekses ekonomik dan politik berupa ketidakpercayaan masyarakat. Sementara dari sisi pendidikan masyarakat, ekses edukatif yang ditimbulkannya sangatlah berat. Dibutuhkan waktu lebih dari satu generasi untuk menghapus tilas ketidakjujuran para pemimpin sehingga dihasilkan para pemimpin yang benar-benar jujur.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 16 September 1999



## ISU HAM DAN KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL



MENURUT Robertson (1992), globalisasi adalah proses peningkatan interdependensi masyarakat dunia menjadi *a single place*. Berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, proses tersebut, menurut Braudel (1990), sudah berlangsung lama, bahkan berabad-abad sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.

Hanya saja, terdapat perbedaan signifikan dalam hal kuantitas dan kualitas dari waktu ke waktu. Globalisasi yang berlangsung dewasa ini mempunyai akselerasi, kekuatan dan sekuen yang sangat luas.

Fenomena paling nyata dari globalisasi yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia adalah terintegrasikannya ekonomi pasar bebas antarbangsa. Baik di lingkungan negara-negara maju di Utara maupun negara-negara industri baru, berkembang dan terbelakang di Selatan serta gabungan di antara mereka.

Misalnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), NAFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Dari berbagai kajian dapat diketahui, banyak faktor yang menjadi motor penggerakannya, antara lain ekonomi kapitalis modern, dunia politik modern, kebudayaan, dan sistem komunikasi mutakhir yang bermakna.

Masalahnya, sudahkah globalisasi ekonomi menjamin kemakmuran dunia secara seimbang (*balance*), sehingga di masa mendatang beban ekonomi tidak hanya disangga oleh sebagian bangsa? Persoalan ini relevan dikemukakan mengingat akhir-akhir ini negara-negara maju di Utara yang sudah unggul di berbagai bidang cenderung memaksakan berbagai kehendak dengan menggunakan senjata baru, yakni masalah hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

## KETIMPANGAN EKONOMI

Dari Laporan Pembangunan Manusia (*HDR: Human Development Report*) 1996, dapat diketahui bahwa terjadi disparitas dan kesenjangan yang melebar seiring pertumbuhan ekonomi antarkawasan dan antarnegara. Laporan itu tidak saja mendefinisikan kemiskinan dalam bentuk indikator pendapatan yang rendah, melainkan juga merefleksikan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, kemerosotan dalam ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak manusia dan politik, serta tidak adanya kehormatan, kepercayaan dan harga diri.

Sementara itu HDR 1997 (diplublikasikan 12 Juni) melaporkan 1,3 miliar orang hidup di bawah garis kemiskinan karena berpendapatan kurang dari US\$1/hari. Berdasarkan besaran persentasenya, secara berturut-turut mereka berada di wilayah Asia Selatan dan Asia Timur, Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin dan Karibia, Asia Tenggara dan Pasifik, serta sebagian di negara-negara Arab.

Administrator UNDP (Program Pembangunan PBB), James Gustav Speth, mengakui bahwa selama 15 tahun terakhir, secara ekonomi dunia menjadi tidak seimbang. Baik antarnegara maupun antarmasyarakat di suatu negara. Ketimpangan ekonomi itulah yang menyebabkan 158 juta balita mengalami kekurangan gizi, 1,2 miliar orang tak punya akses terhadap air bersih, 507 juta orang sulit bertahan hidup sampai usia 40 tahun, dan 842 juta orang dewasa masih buta aksara.

Hal seperti itu tidak dialami negara-negara maju di Utara. Sebab, pada 1960-1989 negara terkaya yang berpenduduk 20 persen dari bumi mempunyai GNP global sebesar 70,2 persen menjadi 82,7 persen. Sementara negara-negara miskin dengan penduduk 80 persen dari seluruh penduduk dunia memiliki GNP global dari 2,3 persen menjadi 1,4 persen.

Pada 1960, negara-negara terkaya itu sudah menerima 30 kali lebih banyak ketimbang negara-negara miskin. Menjelang 1989 negara-negara terkaya tersebut menerima 60 kali lebih banyak. Menurut data *Finance & Development* (Maret 1997), negara-negara dengan pendapatan paling tinggi justru mengkonsumsi 57 persen energi dunia, 29 persen dikonsumsi oleh negara dengan pendapatan menengah, sedangkan negara-negara dengan pendapatan paling rendah hanya mengkonsumsi 15 persen.

Pada saat yang sama, Unicef melaporkan lebih dari 65.000 anak-anak di Dunia Ketiga meninggal akibat utang. Diperkirakan, lebih dari US\$123 miliar uang negara-negara berkembang dan terbelakang di Selatan tersedot ke negara-negara maju di Utara (Ishlah, 1997).

## SOLUSI

Mengatasi berbagai ketimpangan tersebut, HDR 1997 mengidentifikasi enam prioritas utama. Satu di antaranya merekomendasikan peningkatan manajemen globalisasi, termasuk kebijakan perdagangan yang lebih baik, peraturan yang lebih adil, dan persyaratan yang adil bagi negara-negara kurang berkembang untuk memasuki pasar dunia.

Jika globalisasi ekonomi tidak dikelola dengan baik, akibatnya negara-negara miskin semakin termarginalisasi. Sebab harga riil komoditas negara-negara itu pada 1990-an 45 persen di bawah level 1980-an, dan 10 persen di bawah level 1932 selama masa *great depression*. Padahal diketahui, negara-negara itu hidup dari komoditasnya.

Memang benar, salah satu ramalan penting dikemukakan dalam *Seminar Masa Depan Asia III* di Tokyo Mei 1997 bahwa tiga dari lima besar kekuatan ekonomi dunia di abad ke-21 akan berada di Asia Timur, yaitu Jepang, Cina dan Asean. Sementara dua kekuatan ekonomi lain masih berada di Utara, yakni Amerika dan Uni Eropa.

Namun, dapatkah ramalan itu terwujud - dimana Indonesia termasuk salah satu daripadanya - jika negara-negara maju di Utara tetap dengan arogansinya mencoba membagi-bagi dunia dan menguasainya dengan berbagai cara?

Kenyataan, Indonesia yang sudah mulai menapak menuju negara industri baru banyak mengalami kendala. Ekspor hasil hutan tersendat gara-gara *green politics* yang inkonsisten diberlakukan oleh negara maju di Utara. Ekspor tekstil Indonesia juga belum sesuai harapan karena pemberlakuan proteksi terselubung.

## TEKANAN BARAT

Dewasa ini, negara maju di Utara, atau sebut saja negara Barat, mempunyai senjata pamungkas baru untuk menghambat laju perkembangan pembangunan bangsa-bangsa di Selatan, termasuk Indonesia, bernama hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Lembaga Keuangan Dunia (Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia) menjadi wahana bagi Barat untuk memaksakan kehendaknya atas nama HAM dan demokrasi dalam hubungan internasional.

Belanda yang mula-mula mengkaitkan secara langsung bantuan (pinjaman) lewat IGGI dengan HAM dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah RI pun terpaksa melikuidasi (baca: membubarkan) IGGI dan membentuk organisasi baru CGI. Padahal dunia mengetahui Belanda adalah kolonialis yang lebih dari 350 tahun menginjak-injak HAM di wilayah Hindia Belanda, yakni hak untuk merdeka bagi bangsa Indonesia.

Negeri Paman Sam (AS) tak mau ketinggalan. Lahirnya sikap Deplu AS soal Pemilu 1997, disahkannya *Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Year 1998 and 1999, and European Security Act* yang diprakarsai Patrick Kennedy oleh *House of Representatives* (HoR), dan diajukan RUU Anti-Indonesia oleh Senator MarcPacheco dari negara bagian Massachussetts dan anggota HoR Antonio Cabral, membuktikan hal itu. Sehingga RI merasa perlu mengambil tindakan membatalkan pembelian pesawat tempur F-16 serta mengundurkan diri dari program *Expanded International Military Education and Training* (E-IMET) yang diprakarsai AS.

Jakarta, *HU Bisnis Indonesia*, 12 Juli 1997



## **REFORMASI: PERCEPATAN EVOLUSI DAN TOTAL**



SEJAK semula sebagian besar mahasiswa berkeinginan keras untuk berdialog langsung dengan Presiden. Upaya terakhir dilontarkan oleh Forum UMB, Jakarta, yang datang langsung ke Setneg (*Bernas*, 25/4/98). Terhadap permintaan itu, Presiden telah menyampaikan jawaban sebagaimana pernah dikemukakan oleh Menpora Agung Laksono yang pada intinya tidak keberatan, boleh-boleh saja asalkan melihat urgensinya. Namun untuk tahap pertama, kata Presiden, dialog mahasiswa itu bisa dilakukan dengan para menteri di bidangnya masing-masing (*Bernas*, 30/3/98).

Berdasarkan hal itu, maka dirancanglah dialog yang diprakarsai Keluarga Besar Laskar Arief Rachman Hakim antara mahasiswa dengan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 4 April 1998, namun gagal. Lebih tepatnya ditolak para mahasiswa. Dia-log selanjutnya benar-benar berlangsung pada tanggal 18 April 1998 antara petinggi ABRI dan belasan menteri dengan sejumlah mahasiswa, pemimpin Ormas, kaum intelektual dan sejumlah tokoh masyarakat di ruang Semeru, Gedung Pusat Niaga Lantai VI, arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kendati dinilai positif, dialog di antara mereka ternyata tidak menghasilkan solusi apa pun yang dapat disosialisasikan dan dinilai belum representatif. Selain karena perwakilan mahasiswa perguruan tinggi besar dan ternama seperti ITB, UI, UGM, dan IPB tidak diundang (dan kabarnya mereka tetap menolak dialog kecuali ada kejelasan format), dialog tersebut baru sebatas “peserta bertanya, pemerintah menjawab.”

Penolakan sebagian besar mahasiswa berdialog dengan para pembantu Pre-siden (menteri-menteri) dan tetap berkeinginan untuk berdialog langsung

dengan Presiden tentu saja bukan hal aneh. Ada beberapa kunci yang menjadi pertimbangan mereka. *Pertama*, karena kecil kemungkinan hasil dialog disampaikan secara jujur, penuh transparansi dan apa adanya mengingat kuatnya kultur *enub pakeub* dalam pola kekuasaan Jawa. Sangat dimungkinkan jika hasil dia-log dilaporkan sesuai kelaziman ABS (*AsalBapak Senang*). Apalagi diketahui, usia para menteri terpaut jauh dengan Presiden.

*Kedua*, agaknya mahasiswa tak dapat dikelabui lagi oleh fakta praktik politik yang menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif di tangan Presiden sangatlah kuat. Jauh lebih kuat sehingga cenderung menjadikan kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya hanya sebagai subordinat eksekutif. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR (legislatif), MA (yudikatif), hingga DPA dan BPK nyaris tak dapat berbuat banyak sesuai fungsi konstitusionalnya. Terutama ketika harus berhadapan dengan berbagai praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan oleh eksekutif.

*Ketiga*, dalam hal dialog dengan ABRI, para mahasiswa terkesan menyimpan “kecurigaan” akan terjadinya upaya “siapa hendak memanfaatkan siapa” Sebab sejarah tak dapat berdusta jika para mahasiswa pernah berkoalisi dengan — kalau tak boleh disebut dimanfaatkan — ABRI dalam krisis politik tahun 1966 yang berujung pada tumbangnyanya rezim Orde Lama. Namun kenyataan menunjukkan, dalam periode-periode selanjutnya mahasiswa merasa ditinggalkan, bahkan dibungkam aspirasi dan aktivitas politiknya. Baik secara halus melalui depolitisasi kampus, maupun secara vulgar melalui pagar betis, barikade, pentungan, bahkan peluru.

Sekalipun diketahui fungsi sosial politik ABRI sangatlah kuat dalam tiga dekade terakhir, kenyataannya kini sudah dianggap tidak mampu lagi berbuat apa-apa — selain hanya menjadi *yes man* atas nama stabilitas dan keamanan — dalam membendung arus besar kekuasaan yang gagal menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, dijalankan dengan baik, adil dan berwibawa (*clean, good, clear and guardian government*). Dipicu kristalisasi isu krisis ekonomi yang hingga 10 bulan terakhir tak dapat diatasi, mahasiswa tetap bulat menyatu dalam gerakan dan visi menyuarkan “Tri Tuntutan Rakyat”, yakni reformasi ekonomi, politik dan hukum.

*Terakhir*, tak dapat disangkal jika sasaran dialog justru adalah Presiden sendiri yang dianggap terlampau lama berkuasa, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol diri yang efektif atas berbagai praktik penyelenggaraan negara oleh para pembantu-pembantunya. Jika semula mahasiswa menganggap Presiden merupakan *part of the solution* (bagian dari pemecahan masalah), kini ada kesan mahasiswa menjadikan Presiden sebagai *part of the problem* (bagian dari masalah). Jadi benar apa yang dikatakan Hermawan Sulistyono

(peneliti LIPI) dalam wawancara dengan *The Jakarta Post*, tujuan utama reformasi yang dikehendaki adalah pergantian kepemimpinan nasional.

## MISI DAN SUBSTANSI

Andaikan, Presiden benar-benar bersedia berdialog dengan para mahasiswa, masih ada kendala di tingkat wacana representativitas mengingat tidak solidnya organisasi kemahasiswaan yang ada. Mahasiswa pasca NKK/BKK hingga hari ini masih merupakan komunitas yang cerai berai. Sekiranya kendala itu dapat diatasi, persoalannya tinggal menjawab misi dan substansi apa yang hendak disampaikan dalam forum dialog tersebut.

Dapat dipastikan, para mahasiswa akan mendapat kesulitan besar guna mengkristalisasikan gagasan dasar mengenai reformasi ekonomi, politik dan hukum sebagaimana disuarakan di berbagai kampus. Apalagi jika penunjukan mahasiswa yang dianggap representatif mewakili dialog kelak dapat diintervensi oleh tangan-tangan kekuasaan melalui berbagai bentuk rekayasa.

Namun demikian mahasiswa hendaknya tidak berkecil hati, sebab mereka tidaklah sendirian. Dukungan intelektual senior mulai dari guru besar hingga asisten ahli madya merupakan modal besar, dengan atau tanpa dukungan ABRI. Sekurang-kurangnya mahasiswa mesti mensosialisasikan landasan reformasi ekonomi, politik dan hukum dalam dialog tersebut sebagaimana sudah dirumuskan oleh para seniornya.

Substansi dialog dalam bentuk “cetak biru” (*blueprint*) rincian gagasan reformasi ekonomi itu antara lain meliputi penghapusan monopoli, penguatan ketahanan dan daya saing ekonomi nasional, kemandirian teknologi, disiplin anggaran, efektivitas fungsi pengawasan pemerintah, pelestarian sumber daya alam, desentralisasi ekonomi, pengamanan pangan dan kebutuhan dasar, serta yang paling mutlak adalah instrumentasi penangkal KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Substansi gagasan reformasi politik yang mesti dikedepankan mencakup isu-isu yang selama ini dianggap peka, yakni pembatasan masa jabatan presiden, redefinisi fungsi MPR dan DPR berikut deregulasi aturan permainannya, keseimbangan kekuasaan di antara lembaga tinggi negara, perubahan lima paket Undang-undang mengenai politik, dan tentu saja perbaikan sistem Pemilu. Jika memang dianggap perlu, gagasan referendum untuk menentukan status kepemimpinan nasional serta *reshuffle* atas Kabinet Pembangunan VII dimasukkan sebagai salah satu misi dan substansi dialog. Tentu saja semuanya itu ditempuh melalui cara-cara konstitusional, *elegant* dan anggun.

Dalam hal reformasi hukum, agaknya mahasiswa tak perlu bersusah payah menyusun substansinya. Sebab orang kampus semacam Muladi, barangkali masih layak diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang selama ini disuarakannya. Baik ketika ia masih tulen sebagai ilmuwan, maupun ketika yang bersangkutan aktif sebagai anggota Komnas HAM.

Jika ditilik kondisi objektif dewasa ini, agaknya Amien Rais benar bahwa waktu tidak lagi berpihak kepada kekuasaan. Intensitas gerakan para mahasiswa yang menemukan momentumnya secara pas hendaknya tidak dianggap sebagai angin lalu. Sebab tampaknya mahasiswa yang steril dari *vested interest* sudah mendapat ilham mendalam atas gerakan sejenis di manca negara seperti *Taliban* di Afghanistan dan *Hancongryon* di Korea Selatan yang demokratis.

## KAITAN YANG HILANG

Banyak kalangan bimbang, apakah dialog mahasiswa Presiden membuahkan hasil. Sebab pengalaman tiga kali dialog (awal Januari 1970, akhir Desember 1973 dan awal Januari 1974) tidak mem-buahkan hasil apa-apa. Apalagi diketahui, apa yang disuarakan mahasiswa dengan cara-caranya sendiri yang unik dan khas itu sudah diketahui oleh Presiden, ABRI dan pengampu kekuasaan lainnya.

Dalam posisi seperti itu, sejarah intelektual dunia membuktikan bahwa medan paling relevan yang layak ditempati mahasiswa adalah radikalisme dan revolusioner, karena mereka adalah kelompok progresif. Namun oleh karena negeri ini bukanlah negeri terbelakang (*under develop*), melainkan negeri yang diambang kebangkrutan (*high-risk-coun-try*), maka langkah-langkah radikal dan revolusioner hanya akan menambah hitungan korban yang sia-sia. Kecuali aksi dan gerakan mahasiswa mampu mene-mukan kembali dua *missing link* (kaitan yang hilang), yakni rakyat dan ABRI.

Dalam hal rakyat sebagai salah satu *link*, sebenarnya yang tinggal hanya soal kesamaan bahasa. Mahasiswa diharapkan bersabar menunggu. Namun dalam hal ABRI, sudah sangat jelas: ABRI menolak reformasi radikal dan revolusio-ner. ABRI cenderung memilih reformasi ke arah yang lebih baik, konstitusional, konseptual, gradual, tepat sasaran dan sesuai urgensi (*Bernas*, 13/3/98). Dan agaknya, mahasiswa sependapat soal empat hal, yakni ke arah yang lebih baik, konstitusional, konseptual dan tepat sa-saran. Namun tidak untuk dua hal lain, yakni “gradual” dan “sesuai urgensi”.

Mencermati perkembangan akhir-akhir ini, justru kedua hal itulah yang ditarik-ulur bak layang-layang. ABRI dengan F-ABRI-nya di DPR-MPR yang didukung kuat dua fraksi lain seperti FKP dan FUD dengan membongkar

pasal “gradual” dan “sesuai urgensi”. Barangkali karena sifat lawan kata-kata itu yang cenderung radikal dan revolusioner.

Kita sependapat jika langkah strategis yang ditempuh dalam hal reformasi ekonomi, politik dan hukum tidak bersifat radikal dan revolusioner, tapi juga tidak bagian demi bagian. Sudah saatnya pihak-pihak yang berkepentingan memikirkan perlunya reformasi dalam bentuk percepatan evolusi (akselerasi evolusi) yang berbeda dengan revolusi. Percepat-an evolusi yang meliputi segala aspek (total) memang mungkin saja akan memberangus banyak kepentingan kemapanan dalam *status quo*. Namun, jika sasaran akhir adalah keluar dari krisis, yakni kondisi pembangunan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan bebas dari gejolak, langkah itu perlu ditempuh.

Yogyakarta, HU *Bernas*, Rabu, 6 Mei 1998



## MELINDUNGI SIMBOL BUDAYA



KETIKA sedang *lesehan* bersama teman-teman pers yang menunggu selesainya rapat tertutup antara *Ngarsa Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan sejumlah rektor dan tokoh DIY di keraton (Jumat, 15/5/1998), datang dua kelompok anak muda. Dua orang kelompok pertama langsung pergi setelah meninggalkan pesan kekhawatiran bahwa massa rapat akbar yang digelar di depan Masjid Kauman berpotensi menimbulkan huru-hara (*riot*) tanpa kehadiran Sri Sultan. Sementara beberapa orang kelompok kedua yang dipimpin seorang aktivis UGM, selain menyampaikan hal sama, juga menghendaki kehadiran *Ngarsa Dalem* di Jalan Urip Sumoharjo (Jalan Solo) karena sudah ditunggu ribuan mahasiswa dan ribuan massa.

Kekhawatiran anak-anak muda itu tentu saja sangat beralasan mengingat beberapa hari sebelumnya terjadi *riot* massa yang sangat memprihatinkan di Medan, Jakarta, Solo, sebagian Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Apalagi diketahui, di antara beribu-ribu massa yang memadati jalan-jalan protokol dan pusat-pusat bisnis di Yogyakarta itu telah berbaur pula sejumlah orang yang *mengempit* kantung plastik, karung goni, dan ransel kosong yang sangat dimungkinkan dipakai untuk wadah barang-barang hasil jarahan jika benar-benar terjadi kerusuhan massal.

Beberapa oknum massa memang sempat merusak kantor *dealer* mobil Timor, melempari kaca Bank Tamara, sebuah pos polisi, toko tas Dallas dan toko fashion U2 di jalan Solo. Namun *alhamdulillah*, unjuk rasa dan konvoi yang melibatkan puluhan ribu massa dan mahasiswa itu berakhir damai tanpa kerusuhan dan penjarahan (selengkapnya baca *Kedaulatan Rakyat*, 16/5/1998). Hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran kharismatik Sri Sultan Hamengku Buwono X. Rakyat Yogyakarta sangat percaya bahwa Sultan yang hadir di tengah-tengah mereka mendukung sepenuhnya tuntutan reformasi di berbagai bidang.

## REFORMASI

Masyarakat kota budaya Yogyakarta berkewajiban mencermati dan mengarifi tulisan-tulisan bernada sama, yakni dukungan terhadap tuntutan reformasi (proreformasi) serta spanduk-spanduk besar bertuliskan ucapan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa Universitas Trisakti.

Tulisan-tulisan itu, selain mencerminkan psikologi ketakutan luar biasa yang dialami warga keturunan dan kekhawatiran mendalam akan meledaknya kerusuhan di kota ini, juga sekaligus mengindikasikan betapa serius problem etnisitas dan kegagalan integrasi bangsa, khususnya yang menyangkut integrasi dan hubungan antara etnis pribumi dengan warga keturunan.

Mencermati kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, penulis termasuk satu dari sedikit orang yang tidak percaya bahwa amuk itu mencerminkan sikap dendam anti warga keturunan akibat kejenuhan masyarakat terhadap keadaan sosial ekonomi yang terpendam. Sebab persoalan terpenting bukanlah pencarian apa etnis dan agama mereka dan bagaimana tipologi masyarakatnya. Memang mungkin saja sudah ada benih-benih perpecahan antargolongan, faktor kesenjangan ekonomi sosial (ketimpangan dalam hal pendapatan), atau sebetulnya upaya kolektif yang menyindir keras kemapanan. Tapi satu hal yang pasti ialah, kekerasan yang terjadi merupakan gado-gado ketidakberdayaan yang meledak.

Dengan kalimat lain, ada sekelompok masyarakat yang resah dan memerlukan penyaluran (pelampiasan) namun cenderung tidak menggunakan penalaran dan akal sehat, melainkan kebutaan emosional dengan memilih bertindak terlebih dahulu untuk kemudian menempatkan urusan kriminal belakangan. Bahwa kemudian sasaran empuk yang dilahap adalah warga keturunan, bukan berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pembauran atau integrasi di antara mereka. Melainkan selama ini kita sering bias dalam mencermati setiap persoalan masyarakat, kurang proporsional.

Andaikata boleh memilih, penulis cenderung meyakini bahwa letupan-letupan sosial yang terjadi di mana masyarakat cenderung melabrak indikator-indikator ekonomi warga keturunan seperti pasar, rumah toko, pusat-pusat perbelanjaan, plaza, rumah-rumah ibadah, merupakan refleksi dari ketidakpuasan politik (*political discontent*) terhadap para penguasa yang korup, aparat keamanan yang terlalu represif, dan para birokrat penyelenggara pemerintahan negara yang bermental buruk.

Ilustrasinya cukup sederhana, sejauh ini seluruh kebijakan ekonomi nasional diputuskan oleh sekelompok elite penguasa yang sulit dibendung kemauannya. Sedangkan kedudukan mereka secara politis diperoleh melalui proses-proses politik yang nyaris belum mengakomodasi kepentingan dan aspirasi publik.

Proses rekrutmen politik tersebut kelihatannya memang demokratis dan terbuka. Namun di balik itu ada tangan-tangan tersembunyi yang merekayasa, bahkan mengharuskan sekelompok masyarakat untuk berkorban nyawa sekiranya tidak sejalan dengan kemauan politik yang dikehendaki penguasa.

Jika kita meyakini teori perjuangan kelas dalam melihat komunitas sosial, sebenarnya warga keturunan pun memiliki struktur masyarakat yang sama dengan kaum pribumi. Mereka juga mengenal masyarakat marginal, yakni masyarakat kebanyakan yang dari hari ke hari terus bergulat melawan tekanan hidup dan kompetisi keras agar tetap *survive*. Di level kedua terdapat kelompok kelas menengah yang lebih mengandalkan profesionalisme, pendidikan, kemampuan *enterpreunership*, keterampilan berusaha dan etos kerja.

Sementara di tingkat elite, terdapat sekelompok warga keturunan yang nyaris tak tersentuh karena kepiawaiannya dalam menempatkan diri dan menjalin hubungan mesra (berkolusi) dengan penguasa. Kelompok elite inilah yang selama ini mendapatkan fasilitas politik dan ekonomi sehingga pola hidupnya sangat jauh berbeda dengan dua kelompok warga keturunan di bawahnya. Struktur dan lapisan warga keturunan seperti itu nyaris tersistematis keberadaannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kira-kira sama dengan struktur masyarakat pribumi, kelompok elite itulah sebenarnya sumber potensial ketidakpuasan masyarakat dalam berbagai bidang. Terkait kerusuhan di mana amuk massa menjadikan warga keturunan yang mayoritas berada di lapisan bawah dan menengah, karena segmen masyarakat itulah yang mudah dijangkau, bukan para elite yang nyaris tidak mereka ketahui keberadaannya.

Jika benar demikian, maka amuk massa pribumi kepada warga keturunan analog dengan ketidakpuasan mereka kepada elite pribumi yang berkuasa.

## **LINDUNGI WARGA KETURUNAN**

Ada hipotesis bahwa pertentangan dan wacana pri-nonpri sengaja dibiarkan berkembang guna mempertahankan *status quo* demi kemapanan. Sayang sekali tulisan singkat ini tidak memungkinkan penjelasan panjang lebar tentang hipotesis tersebut. Namun kasat mata dapat terlihat bahwa berbagai kebijakan kolonial peninggalan Belanda yang diperkirakan masih menguntungkan penguasa, cenderung dipertahankan. Termasuk kebijakan kolonial Belanda yang tidak menghendaki pembauran warga keturunan dengan pribumi, juga dipertahankan. Jika motivasi Belanda takut kehilangan pajak kepala dan agar agama Islam tidak dipeluk mayoritas warga keturunan, maka penguasa saat ini memiliki motivasi lain.

Pemberian fasilitas dan kemudahan ekonomi kepada elite warga keturunan dimaksudkan sebagai kamuflase untuk mengelabui masyarakat luas agar tak tercipta *image* (citra) bahwa hanya segelintir pribumilah yang paling kaya di negeri ini. Alhasil, jika terjadi sesuatu atas nama kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan sebagainya, ditumpahkan kepada warga keturunan.

Dalam situasi seperti itu, tentu saja banyak orang lebih percaya bahwa figur-figur elite warga keturunan seperti Liem Sioe Liong, Bob Hassan, Edy Tanzil, Prajogo Pangestu, Mochtar Riyadi, Eka Tjipta Wijaya, Kim Johannes dan lainnya, adalah orang-orang paling kaya di negeri ini. Nyaris tak ada upaya untuk mengkritisi bahwa mereka sebenarnya hanya kamuflase untuk menutupi para elite pribumi yang jauh lebih kaya akibat kekuasaan yang mereka miliki.

Futurolog terkemuka John Naisbitt (1994) dalam buku *Global Paradox* sudah mendapuk Indonesia sebagai salah satu negara yang punya potensi tribalisme dalam bentuk problem etnisitas. Kendati problem itu bukan monopoli Indonesia, kita sebagai bangsa yang bermartabat berkewajiban mengatasinya. Untuk itulah, kita harus menghentikan pengrusakan terhadap kehormatan dan harta warga keturunan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan integrasi bangsa.

## LINDUNGI SIMBOL BUDAYA

Hingga ke pelosok-pelosok desa, sudah tersiar kabar bahwa bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1998, kampus-kampus di seluruh Indonesia bersama-sama dengan rakyat menggelar aksi besar-besaran turun ke jalan menuntut dilaksanakannya reformasi total secepatnya. Di Yogyakarta aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di kampus UGM, dihadiri pula oleh *Ngarsa Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam situasi seluruh masyarakat turun ke jalan, sangat dimungkinkan adanya oknum atau kelompok yang berupaya menciptakan kerusuhan dan menggunting dalam lipatan gerakan reformasi damai yang disuarakan para mahasiswa.

Karena itu penting untuk diingatkan bahwa Yogyakarta dengan semangat kesederhanaan masyarakatnya menyimpan berbagai simbol budaya yang sangat kaya nilai-nilai. Penting dibangun keyakinan bahwa kecintaan kepada panutan, yakni *Ngarsa Dalem* sekaligus harus terwujud pada kecintaan pada potensi geografis dengan segala isinya. Upaya melindungi simbol-simbol budaya dan warga keturunan dari tangan-tangan tak bertanggungjawab akan optimal bisa dilakukan jika peran proaktif warga keturunan juga nyata.

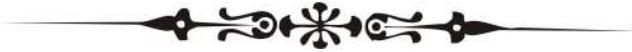
Warga keturunan di Yogyakarta tidak perlu memasang tulisan-tulisan yang bernada ketakutan di depan toko-tokonya, sementara mereka *ngumpet*

entah di mana. Justru yang diharapkan adalah mereka juga ikut serta secara fisik dan menampakkan diri, memberikan dukungan moral atau material mungkin hanya sekadar menyediakan minuman, serta berintegrasi mendukung aksi tuntutan reformasi. Dengan cara itu, mudah-mudahan warga Yogyakarta di bawah naungan Sri Sultan akan menjadi suri tauladan bagi masyarakat wilayah lain di Indonesia bagaimana menciptakan situasi aman, tenteram dan hidup secara damai sekalipun harus berbeda pendapat dalam hidup berbangsa.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, 20 Mei 1998



## PRASYARAT BIROKRASI BEBAS (BER-) POLITIK



BARANGKALI masih segar dalam ingatan tentang dua peristiwa amuk massa terkait posisi pegawai negeri sipil (PNS) di tengah berlangsungnya kampanye Pemilu 1997. Ketika itu, warga sebuah kompleks perumahan PNS di Pekalongan dilanda kengerian mencekam karena serombongan massa lewat persawahan menyerbu kompleks tersebut petang hari. Untunglah aparat keamanan yang mendapat bocoran penyerangan segera mengantisipasi keadaan sehingga peristiwa tersebut dapat dinetralisasikan.

Namun di lain tempat, yakni di Sampang, Madura, para guru PNS banyak yang mengungsi ke luar daerah atau pulang kampung ke Jawa Tengah dan DIY karena masyarakat setempat mengancam mereka dengan celurit dan membakar sebagian sekolah tempat mereka mengajar. Sampai-sampai, ulangan umum bersama (UUB) ditunda dan para siswa diliburkan.

Kedua peristiwa tersebut merefleksikan betapa kebencian masyarakat terhadap PNS menjelang Pemilu tiba sudah berurat berakar. Hal itu bisa terjadi karena selama lebih dari 30 tahun, PNS sebagai bagian dari birokrasi dianggap identik dengan Golkar, organisasi sosial politik yang tidak mau disebut partai namun berpraktik sebagai partai politik. Sehingga, sempat beredar seloroh, jika kelak terjadi perubahan konstelasi politik, akan diperlukan surat keterangan bebas anggota Golkar yang fungsinya kira-kira sama dengan surat keterangan bebas G30S/PKI.

Telah menjadi rahasia umum, kontribusi PNS yang di-*back up* ABRI menjadikan birokrasi sebagai mesin politik sangat ampuh bagi Golkar sehingga selama enam kali Pemilu Golkar selalu keluar sebagai pemenang, bahkan menjadikannya sebagai *single majority* yang menghalalkan segala cara.

Kini, angin reformasi mulai bertiup. Sekalipun baru sebatas janji politik, udara sejuk mulai dihirup PNS. Demikianlah kira-kira yang dapat ditangkap dari keterangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid yang mengatakan bahwa di masa mendatang, seiring dengan datangnya era reformasi, para PNS akan dibebaskan menggunakan hak pilih sesuai hati nuraninya masing-masing dalam Pemilu.

Jalur B (birokrasi) yang selama ini menguntungkan Golkar akan dipotong sejalan dengan dibentuknya undang-undang baru tentang partai politik.

## **HAK PILIH PNS**

Keterangan Mendagri Syarwan Hamid tersebut memang belum selengkap yang yang diharapkan, namun begitu seharusnya semangat demokrasi dikembangkan sehingga terbuka lebar dan tersedia ruang bagi publik untuk menentang pendapatnya.

Soal hak pilih PNS misalnya, sejauh ini sekurang-kurangnya ada dua pandangan yang berkembang. Masing-masing pandangan mempunyai dasar argumentasi yang sama-sama kuat dan tentu saja membawa konsekuensi logis yang berbeda-beda.

Pandangan pertama, sebagaimana dikatakan Syarwan Hamid, PNS dibebaskan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR dan DPRD) sesuai hati nuraninya. Hal ini dilandasi asumsi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Artinya, setiap PNS sebagai warga negara bebas memberikan dukungan suara kepada partai politik mana pun. Namun, jika ingin menjadi pengurus Parpol, diharuskan keluar dari PNS untuk menjaga kemungkinan penyelewengan jabatan birokrasi dan terkotak-kotaknya PNS seperti di masa Orde Lama.

Jika pandangan pertama ini dilaksanakan, terdapat beberapa prasyarat yang mesti dikondisikan. Selain kematangan dalam berdemokrasi sangat diperlukan, juga mesti ada perubahan dalam hal UU No 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kecuali itu, Pemilu harus diselenggarakan pada hari libur dan ada pelarangan bagi PNS untuk mengikuti atau menyelenggarakan kampanye Pemilu sehingga pilihannya tetap menjadi rahasia yang bersangkutan.

Sementara dalam hal status PNS-nya, sangatlah tidak adil jika yang bersangkutan harus keluar hanya gara-gara menjadi pengurus Parpol. Sebab sampai saat ini, PNS adalah sebuah profesi yang dari padanya seorang warga negara mendapatkan penghasilan untuk menghidupi ekonomi keluarganya, kecuali Parpol sudah menjadi sumber ekonomi.

Dalam hal Parpol masih sebatas sebagai wahana aktualisasi diri dalam berpolitik, jalan tengah dapat ditempuh. Misalnya, yang bersangkutan tetap tercatat sebagai PNS dengan hanya menerima gaji pokok minus tunjangan dan berbagai penghasilan lain namun dibebas-tugaskan; atau dibebas-tugaskan sementara tanpa menerima sepeser pun uang negara, namun tetap tercatat sebagai PNS. Jika sudah tak menjadi pengurus Parpol, ia dapat kembali bekerja sebagai PNS.

## **RENTAN PENYIMPANGAN**

Namun, menurut hemat kita, pandangan pertama ini sungguh tidak populer, sebab masih memberi peluang bagi Parpol untuk memanfaatkan birokrasi sebagai mesin politik. Terbukti, pada masa Orde Baru, monoloyalitas PNS kepada pemerintah yang sah sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) IV Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) telah diputarbalikkan menjadi keharusan untuk mengabdikan dan setia kepada Golkar selaku Orsospol yang memenangkan Pemilu. Bahkan, PNS yang menjadi anggota Parpol harus mendapatkan izin dari atasannya, bukan sekadar 'sepengetahuan atasan' sebagaimana tercantum dalam peraturan resminya.

Alhasil, mau tidak mau, suka atau tidak, setiap PNS mesti memilih Golkar karena jika tidak akibatnya bisa fatal. Selain karir kepegawaiannya dihambat dengan segala cara, hampir setiap atasan PNS berlomba-lomba memenangkan Golkar dengan harapan mendapatkan berbagai kemudahan.

Hal inilah yang kemudian melahirkan subkultur NK3, yakni nepotisme, korupsi, kolusi dan kancaisme. Bahkan tanpa rasa malu, jabatan sebagai PNS digunakan untuk secara sewenang-wenang melakukan diskriminasi layanan publik. Mulai dari pengurusan KTP dan berbagai surat keterangan, hingga ke soal pengurusan akta jual-beli tanah.

Akibat itu semua, pungutan liar tumbuh dengan subur. Bahkan guru-guru PNS di sekolah tidak segan-segan mewajibkan muridnya untuk mengacungkan dua jari ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini sudah sangat keterlaluan dan tidak boleh terjadi lagi di masa-masa mendatang.

Terlepas dari lubang besar monoloyalitas birokrasi yang tidak memiliki batas tegas, hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (Maret 1997) soal itu sudah merekomendasikan perlunya mengartikulasikan kepentingan politik aparat birokrasi yang menjamin hak politik dan dalam memilih Parpol yang ada untuk menjadi anggota bukan pengurus. Jadi, keputusan tergantung pada keputusan politik yang akan diambil pemerintah dan DPR.

## BIROKRASI BEBAS POLITIK

Saat ini aparat birokrasi terdiri atas 6 juta PNS. Kuantitas itu merupakan kekuatan yang dahsyat bagi partai politik mana pun yang akan ambil bagian untuk memenangkan Pemilu di masa mendatang. Jika pandangan pertama sebagaimana dikemukakan di muka diberlakukan, yakni aparat birokrasi bebas berpolitik – dengan Undang-undang khusus hak politik PNS sekali pun – maka bisa dipastikan akan terjadi tarik menarik yang luar biasa. Kondisi pengkotak-kotakan dalam tubuh PNS yang akan mempengaruhi kinerja profesionalnya jelas tidak diharapkan pihak mana pun, khususnya publik (masyarakat luas) yang harus dilayani.

Mencermati dan mengantisipasi hal itu, masih terbuka peluang untuk mempertimbangkan pandangan kedua, yakni birokrasi yang bebas politik. Kirakira sama dengan posisi ABRI dalam struktur politik kita.

Asumsinya, PNS adalah *public servant*. Abdi masyarakat yang melaksanakan tugas keseharian dan melayani siapa pun tanpa pandang bulu, *zonder* diskriminasi. Sama fungsinya dengan dokter atau tukang pos. Sehingga perlu dibedakan dengan jelas antara fungsi *state* (negara) dengan fungsi *government* (pemerintahan).

Birokrasi bebas politik bukan berarti hak-hak politik PNS diabaikan. Seperti halnya ABRI, PNS dimungkinkan menempatkan perwakilannya sebagai penyalur aspirasinya. Kalau personal ABRI yang kurang dari sejuta orang saja bisa mendapatkan kursi gratis 75 orang wakil, PNS yang 6 juta orang mestinya mendapatkan kursi lebih dari jumlah itu. Namun, gagasan seperti ini belum sesuai dengan semangat dan substansi reformasi.

Jika disetujui, maka jumlah wakil ABRI dan PNS harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan jumlah hak pilih warga negara non-ABRI dan non-PNS yang hendak diraih partai politik. Harus pula disesuaikan dengan jumlah anggota lembaga legislatif sesuai Undang-undang baru. Tapi yang paling baik, PNS maupun ABRI tak perlu menempatkan wakil di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Wakil itu cukup di MPR saja.

Andaikata birokrasi bebas berpolitik dengan format seperti itu bisa disetujui, pemberian tugas politik bagi PNS dan ABRI tidak menjadi masalah. Sebab tugas politik, baik langsung maupun tidak langsung guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu menjadi tanggung jawab semua warga negara.

Tugas politik hendaknya dibedakan dengan beban politik. Jika beban politik untuk memenangkan partai politik tidak ada, maka dengan sendirinya tugas politik mereka tidak berada dalam situasi dilematis. Hal ini, selain akan menguntungkan bagi pendidikan politik masyarakat, sekaligus menjadikan

mereka sangat objektif melaksanakan tugas. Tentu saja di bawah kendali lembaga Pemilu yang independen.

Bagi PNS sebagai aparat birokrasi, Sapta Prasetya Korpri merupakan krida yang relevan tetap dipegang teguh, termasuk konsep monoloyalitas kepada pemerintahan yang sah. Namun seperti diketahui, beban politik telah menyebabkan mereka “menghianati” krida itu.

Surakarta, HU *SOLOPOS*, 3 Juli 1998



## **MENYIKAPI DEKONSTRUKSI REPUBLIK**



TIDAK seperti setengah abad yang lampau, kata Anthony Giddens (1999), jika memang ada krisis demokrasi saat ini, bukanlah karena ancaman musuh, tetapi sebaliknya karena ia tidak memiliki musuh. Dengan berakhirnya era dwikutub, sebagian besar negara tidak memiliki musuh yang jelas. Negara yang menghadapi bahaya - bukan musuh - harus mencari sumber-sumber legitimasi yang berbeda dari sumber-sumber legitimasi masa lalu. Isunya bukan pada pemerintah yang lebih besar atau lebih kecil, lebih kuat atau lebih lemah, tetapi pengakuan pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara, harus diperbarui secara aktif.

Lebih jelasnya, negara demokrasi baru, selain harus merespon globalisasi secara struktural, juga harus memperluas ruang publik. Kecuali negara harus meningkatkan efisiensi administratifnya, negara harus pula memberi peluang pentingnya demokrasi yang lain dari sekadar proses pemungutan suara sebagaimana selama ini dikenal. Di samping negara harus memiliki pandangan kosmopolitan di mana pendemokrasian demokrasi tidak bisa hanya dilakukan secara lokal dan nasional, negara harus pula menggantungkan legitimasi pada kapasitas untuk mengelola risiko.

Indonesia Baru sebagaimana dicit-citakan sebagian besar komponen bangsa, sangat kasat indera sedang menghadapi risiko, baik risiko ekonomis maupun risiko yang dipicu oleh berbagai perkembangan. Risiko paling berat yang agaknya sedang mencari bentuk format solusinya ialah fenomena dekonstruksi republik. Gejala separatisme yang marak belakangan ini, disadari atau tidak, telah mengharuskan pemerintah menyibukkan diri untuk mengelolanya. Dalam kaitan tersebut, kita merasa lega karena sikap pemerintah

- sebagaimana diutarakan Gus Dur selaku Presiden dalam konsultasi pertama dengan pimpinan DPR, fraksi dan komisi – sangat jelas, yakni tidak mentoleransi upaya apapun untuk memerdekakan Aceh dari wilayah Republik Indonesia (*Suara Karya*, 9/12/99).

Kita lega, karena berbeda dengan kasus Timtim yang dimensi internasional dan eksternalnya begitu jelas, kasus Aceh tak lebih dari persoalan internal Indonesia sebagai bangsa. Hal itu berarti, penyikapan terhadap tuntutan rakyat Aceh merupakan barometer terhadap penyikapan atas tuntutan sejenis yang datang dari wilayah lain seperti Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya dan Sulawesi Selatan. Penyelesaian kasus Aceh dengan demikian merupakan rujukan pertama dan terakhir atas wacana yang berkembang saat ini, yakni: tetap bersikukuh mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pola pemerintahan yang cenderung sentralistik; melaksanakan otonomi luas atau khusus dalam kerangka NKRI; atau menerima federalisme dengan mengubah bentuk negara yang terdiri atas federasi berbagai negara bagian, baik sebagian atau pun seluruhnya.

## PROSES INDONESIANISASI

“Menjadi Indonesia” (proses Indonesianisasi) merupakan proses paling sulit yang pernah dihadapi oleh berbagai suku bangsa selama 75 tahun terakhir. Bahwa kemudian kita menyebut diri sebagai orang Indonesia, hal itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang manakala nenek moyang kita harus berhadapan dengan kaum penjajah dan penjajahan. Nasionalisme ke-Indonesiaan dengan demikian pada prinsipnya muncul sebagai respon atas *common enemy*, yakni kolonialisme. Persoalannya ialah, setelah kolonialisme berakhir, mengapa masih terjadi “gugatan” terhadap eksistensi Indonesia sepanjang sejarahnya?

Ketika Manifesto politik 1925 dicetuskan kaum muda di Belanda; manakala “Soempah Pemoeda” dideklarasikan golongan muda pada tahun 1928 sehingga diperoleh identitas Indonesia sebagai suatu *nation*; bahkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan ke seantero dunia dengan pilihan strategis membentuk NKRI, proses Indonesianisasi agaknya merupakan upaya final. Tapi ternyata tidak, sebab pilihan konsep geopolitik seperti itu belum sepenuhnya mengakomodasi visi masa depan konsep geostrategis dan pluralitas yang sudah menjadi takdir berbagai suku bangsa di nusantara.

Kemunculan pemberontakan PRRI, Permesta, DI/TII dan lain-lain di masa Orde Lama; serta OPM, GAM dan lain-lain di masa Orde Baru menunjukkan bahwa proses Indonesianisasi yang diupayakan melalui kebijakan-

kebijakan politik, diplomasi internal, bahkan lewat operasi militer belum membuahkan hasil optimal. Penyebabnya cukup jelas, yakni tidak diakomodasinya konsep-konsep geostrategis dan pluralitas bangsa. Pada masa-masa terakhir, ketidakadilan makin membumbui sehingga rasa ketidakpuasan yang semula terbungkus kesadaran kolektif bahwa pembangunan nasional memerlukan waktu dan tahapan, dari saat ke saat terus membesar mencari penyaluran yang relevan dan menemukan era reformasi sebagai momentumnya.

Kekeliruan masa lalu yang paling fatal – dan mau tidak mau, suka tidak suka harus diwarisi akibatnya oleh pemerintahan transisi – ialah, *pertama*, tidak memberi kesempatan sedikit pun pada dialog politik, sosial maupun kultural bagi pemeran utama konsep geostategis masing-masing wilayah dengan alasan di luar koridor negara kesatuan, kecuali lewat pola-pola repesif. *Kedua*, pembangunan karakter nasional (*national character building*) sebagai nasionalisme ke-Indonesiaan tidak berjalan sebagaimana mestinya melainkan dibelokkan melalui indoktrinasi dengan menempelkan stigma-stigma menakutkan bagi siapa pun yang berani membuka wacana tersebut yang dapat berujung pada penangkapan, pemenjaraan dengan atau tanpa pengadilan, penculikan dan penghilangan nyawa.

*Ketiga*, konsep kesatuan seringkali ditafsirkan sesuai kehendak penguasa sehingga memunculkan uniformitas yang begitu gencar menghancurkan tatanan plural dalam segala segmen kehidupan masyarakat yang pada prinsipnya adalah kekayaan bangsa. Sementara jargon persatuan dijadikan legitimasi atau pembenar bagi segala upaya pemberangusan praktik dan diskursus demokrasi yang berkembang dalam masyarakat. *Keempat*, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam atas nama pembangunan nasional ternyata tidak melalui proses yang benar dan tidak didistribusikan secara adil, melainkan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir elit politik dan ekonomi. Padahal sangat jelas bahwa konstitusi mencantumkan azas demokrasi ekonomi guna menggapai kesejahteraan seluruh rakyat.

## REVISI UNDANG-UNDANG

Pemerintah Gus Dur memiliki kewajiban moral untuk meletakkan fondasi bagi tercapainya demokrasi baru masyarakat madani; dasar-dasar penyelenggaraan negara yang jujur, transparan, bersih dan dijalankan secara baik serta bebas KKN. Namun, elemen-elemen mendasar tersebut tidak akan pernah dapat terwujud jika pemerintah masih harus disibukkan oleh berbagai macam tuntutan irasional berupa pelepasan diri dari republik yang cenderung ahistoris dan separatistis. Proses dekonstruksi republik adalah bahaya besar apabila tidak dikelola secara cerdas, piawai, arif dan jujur. Sebab, dekonstruksi republik

terjadi bukan dalam konteks hubungan antara embrio “Kerajaan Aceh Sumatera” dengan NKRI; bukan pula dalam relasi antara janin “Makassar Merdeka” dengan NKRI; atau kelahiran “Republik Kepulauan Riau”, “Papua Barat” dan “Negara Kalimantan Timur” dengan NKRI; melainkan - dengan meminjam sinyalemen Revisond Baswir (1999) - semata-mata karena ketidakharmonisan antara Jakarta dan Daerah.

Ketidakharmonisan yang cukup lama terjadi namun selalu ditutup-tutupi tersebut sebenarnya berpeluang untuk segera diatasi pemerintah Gus Dur, terutama dengan bekal UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UPKPD). Namun oleh karena kedua substansi UU tersebut belum mengakomodasi aspirasi daerah, melainkan hanya mencerminkan keengganan Jakarta untuk mendesentralisasikan pengelolaan keuangan negara kepada daerah, maka keberadaan UU tersebut nyaris tak berarti. Daerah sangat menyimak betapa berlakunya proses pembahasan draft kedua RUU yang muncul dalam beberapa versi oleh departemen berbeda, namun hasilnya masih sangat menguntungkan Jakarta.

UU No 22/1999 misalnya, begitu jelas memberikan otonomi luas kepada kabupaten dan kota, sementara untuk provinsi berlaku otonomi terbatas. Kecurigaan atas munculnya provinsialisme - padahal selama Orde Baru sangat dilembagakan misalnya melalui PON, lomba keteladanan, Sepak bola, dan sebagainya - menutup mata Jakarta sehingga berpura-pura tidak mengetahui adanya disparitas kemampuan dan jurang kesenjangan yang amat dalam antardaerah kabupaten atau kota. Sengaja, pemerintah Orde Reformasi Pembangunan Jakarta menciptakan “bom waktu” dengan pilihan-pilihan muskil bagi daerah dalam melaksanakan otonomi luas sehingga pada akhirnya akan menyerahkan kembali kepada Jakarta.

Kecuali itu, Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU tersebut sangat jelas menceminkan keengganan Jakarta untuk melepas urusan kepada daerah di luar politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dalam bentuk “kewenangan lain” yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi tinggi yang strategis.

Cara-cara mengelabui daerah menurut Baswir, tampak misalnya dari pengelolaan keuangan. Pergeseran struktur pengelolaan keuangan negara hanya terjadi pada persentase pembelanjaan oleh daerah dari 20,20 persen menjadi 35 persen. Sementara di sektor penerimaan, persentasenya tidak berubah, yakni sekitar lima persen penerimaan daerah dan 95 persen penerimaan pusat. Hal itu

berarti, dengan masih dikuasainya sumber-sumber penerimaan negara sebesar itu oleh Jakarta, peluang Jakarta untuk mengendalikan belanja daerah masih terbuka lebar. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan berat bagi daerah penyetor pajak besar seperti Jawa Timur yang menyetor sekitar Rp 60 trilyun, namun hanya mendapatkan kembalian sebesar kurang lebih Rp 4 trilyun.

Daerah sangat paham bahwa bagi hasil 80 persen hasil hutan, pertambangan umum, dan perikanan tidak langsung dapat dibelanjakan oleh daerah sesuai kebutuhan daerah, melainkan masuk dulu ke kantong Jakarta untuk kemudian diatur pembelanjanya untuk daerah. Demikian pula bagi hasil 15 persen dari minyak bumi setelah dikurangi pajak; 30 persen dari gas alam setelah dikurangi pajak; atau 25 persen penerimaan dalam negeri dalam bentuk alokasi umum, semuanya diatur Jakarta. Kalau pun dalam bentuk *block grant*, penggunaannya tetap dirinci Jakarta.

Jika dekonstruksi republik hendak diakhiri dengan menggunakan kedua UU tersebut, maka pemerintah Gus Dur harus bekerja keras untuk berani melakukan revisi atas kedua UU tersebut. Namun tantangannya pasti sangat besar. Selain akan datang dari militer, sebagian besar anggota DPR adalah orang Jakarta yang tidak mungkin rela kepentingannya terganggu. Maksudnya, jika otonomi luas diletakkan pada provinsi, sementara perimbangan keuangan Pusat dan Daerah betul-betul terjadi, maka ekonomi Jakarta akan mengalami *decline*. Dan itu berarti hilangnya berbagai peluang keuntungan mereka sebagai pejabat.

Jakarta, HU *Suara Karya*, 20 Desember 1999



## MUATAN KRITIK HAM DAN ELEMEN PROKEKUASAAN



EVALUASI mutakhir pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tak jauh dari gambaran Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral. Menurut Amaral - sebagaimana dikemukakan ketika memperingati 50 tahun *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), 10 Desember 1998 - sampai sekarang ini Indonesia belum bisa keluar dari kelompok 10 besar negara-negara pelanggar HAM tertinggi di dunia. Bahkan kecenderungan pelanggaran semakin meningkat dengan adanya penculikan dan penembakan yang mengancam masyarakat sipil.

Seperti diketahui, sejak sebelum Pemilu 1997 hingga menjelang SU-MPR Maret 1998, kasus pelanggaran HAM marak di mana-mana. Intensitasnya makin meningkat setelah gerakan reformasi bergulir kencang sejak Mei 1998 yang ditandai *lengser-nya* Presiden Soeharto. Ini semua tecermin dalam bentuk terjadinya kekerasan politik (*political violence*) maupun dalam bentuk kerusuhan sosial (*social riots*).

Kapan HAM bisa ditegakkan secara konsisten, sekali pun MPR-RI sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tertinggi telah menghasilkan ketetapan tentang HAM (Tap MPR No XVII/MPR/1998) melalui Sidang Istimewa yang berlangsung 10-13 November 1998, tak seorang pakar pun lugas dan berani memprediksikannya.

Oleh karena itu, Presiden BJ Habibie yang secara psikologis-politis pemerintahannya dianggap oleh masyarakat sebagai pemerintahan masa transisi, mempunyai tugas sangat berat. Selain mesti meletakkan landasan bagi sosialisasi Piagam HAM yang tertunda selama 32 tahun, yakni sejak MPRS tahun 1966 membentuk *Panitia Ad Hoc* untuk merencanakan Piagam HAM dan baru

terlaksana sekarang, juga meletakkan elemen fundamental bagi pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh setiap warga negara maupun oleh seluruh jajaran penyelenggara ne-gara. Baik melalui pergaulan berbangsa dan bernegara, maupun melalui pergaulan antarbangsa di dunia. Sebab dewasa ini nyaris tak ada kebijakan publik dalam kaitannya dengan kerjasama bilateral dan multilateral yang tidak menyertakan isu HAM.

Dipelopori dominasi negara-negara maju di Utara, upaya mengintroduksikan HAM menjadi gelombang mahadahsyat yang sangat dirasakan negara-negara berkembang dan terbelakang di Selatan. Indonesia adalah contoh konkret bagaimana isu tentang HAM menjadi faktor penghambat potensial bagi terciptanya kerjasama bilateral yang bebas prasangka.

Kasus pembubaran IGGI yang dipicu oleh tuntutan Belanda atas pelaksanaan HAM di Indonesia yang berlebihan; pembatalan pembelian pesawat tempur F-16 dari Amerika; serta pengunduran diri Indonesia dari program *Expanded International Military Education and Training* (E-IMET) sebagai kebijakan yang mendahului; dan terakhir pembatalan latihan bersama antara Kopassus dengan militer Australia menjadi bukti bahwa isu HAM merupakan dilema yang sulit dijernihkan, baik melalui propaganda internasional maupun melalui diplomasi antarnegara secara bilateral.

*Euphoria* reformasi, mengkristalnya spirit demokrasi, kuatnya tuntutan penyelenggaraan *clean and good governance* yang bebas KKN, derasnya desakan terciptanya supremasi hukum, dan dahsyatnya keinginan menikmati kehidupan politik yang lebih terbuka, semuanya menjadikan tuntutan terhadap optimalisasi pelaksanaan HAM di segala tingkat kehidupan masyarakat makin gencar. Hanya beberapa hari setelah Tap MPR tentang HAM disepakati, beberapa kalangan mengusulkan agar reformasi pendidikan memasukkan konsep-konsep HAM sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan.

Intervensi pendidikan agaknya dimaksudkan untuk membangun pengertian tentang HAM secara dini di kalangan peserta didik dianggap sebagai langkah mendesak. Usulan tersebut dilandasi asumsi bahwa HAM bersifat universal. Namun sayang, usulan itu belum disertai pandangan kritis bahwa dalam banyak hal HAM justru bersi-fat kontekstual.

Berbagai kalangan berpandangan bahwa kelahiran Tap MPR tentang HAM hasil SI-MPR merupakan babak baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Karenanya ia diharapkan berfungsi sebagai perangkat pendidikan sekaligus acuan bagi penyelenggara negara untuk menghormati HAM dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, kendati sangat jelas terlihat bahwa perumusan Tap tersebut masih didominasi elemen-elemen *status quo* dan prokekuasaan yang ambivalen.

Ambivalensi bisa dideteksi dari munculnya “pasal pengunci” yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membatasi aktualisasi HAM. Pasal 34 ketetapan ini menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rincian pembatasan itu makin je-las sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 yang menyatakan, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Sebenarnya, dengan atau tanpa pembatasan sekalipun, kalau memang tak terjadi kooptasi elemen pro-kekuasaan atas implementasi HAM, penegak-hormatan HAM akan terjaga. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masya-rakat, sosiografis, dan prinsip universalitasnya. Hal itu berarti, mulai saat ini pemerintahan transisi mesti sudah mengkondisikan prasyarat kehidupan yang kental dengan penegakan HAM. Tak boleh lagi ada sementara warga negara yang dicekam rasa takut sehingga tak dapat hidup nyaman di negeri ini. Tak boleh lagi ada kekhawatiran munculnya tindak kekerasan, dan sebagainya. Mudah-mudahan.

Jakarta, HU *Republika*, Rabu 30 Desember 1998

Bab  
6



**TEKNOLOGI DAN  
PORNOGRAFI**





## TELEVISI DAN PENDIDIKAN KITA



HARI Televisi Indonesia yang diperingati tanggal 24 Agustus setiap tahun seringkali membetot perhatian banyak khalayak. Perhatian tidak semata-mata tertuju ke layar gelas dimana ketiga stasiun televisi, yakni televisi negeri (TVRI), dan stasiun TV swasta saling berebut perhatian menampilkan kesemarakan acara karena bersamaan dengan itu mereka merayakan ulang tahun masing-masing. Tetapi juga karena inilah momentum yang tepat untuk merenungi perjalanan dan keberadaan televisi di tengah-tengah masyarakat.

Kontribusi apa yang disumbangkan oleh kehadiran televisi dalam meningkatkan apresiasi positif masyarakat, lebih khusus lagi untuk kepentingan pendidikan? Pernyataan ini absah diajukan mengingat televisi memiliki derajat ketersediaan dan aksesibilitas tinggi yang diakrabi oleh masyarakat luas. Apalagi diketahui terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang diberikan televisi kepada masyarakat. Beberapa suara protes yang akhir-akhir ini dialamatkan kepada pengelola televisi dan imbauan banyak kalangan untuk membentuk masyarakat pemirsa televisi merupakan bukti empiris adanya kesenjangan itu.

Dalam situasi pergaulan global saat ini, adalah benar bahwa tak ada kemajuan berarti bisa dicapai tanpa kehadiran televisi. Jangkauan siaran yang luas karena dibantu teknologi global seperti satelit, memungkinkan televisi hadir dari pintu ke pintu, di pelosok sekalipun. Sejauh ini, terdapat dua pandangan mengenai dampak merebaknya siaran televisi (TV) terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan. Pandangan *pertama* cenderung gusar terhadap dampak negatif siaran TV, terutama yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, kejahatan dan pola hidup konsumtif. Pandangan ini menggarisbawahi agar setiap orangtua melakukan pendampingan terhadap anak-anak dalam menonton TV.

Pandangan *kedua* lebih optimis. Siaran TV tidaklah absolut secara langsung mempengaruhi pola hidup seseorang. Pandangan ini menyarankan agar setiap pemirsa dewasa mengambil langkah guna meminimalisasi dampak siaran TV terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Menilik kedua pandangan itu, seyogyanya penggembira televisi menyikapinya secara positif. Perlu dibangun kesepakatan bahwa orangtua di rumah merupakan kunci bagi upaya preventif guna melindungi anak-anak dari dampak negatif siaran TV. Sebab era globalisasi informasi tidak akan mampu membendung siaran televisi. Di tempat yang terisolasi sekalipun.

Kendati belum jelas diketengahkan segmen keluarga mana sebenarnya yang rentan terhadap ragam dampak tersebut, tentu kita berpandangan bahwa membebani tugas secara sepenuhnya kepada orangtua terasa kurang adil. Sebab yang paling bertanggung jawab atas hal itu seharusnya pihak pengelola stasiun TV sebagai perencana program siaran.

## UPAYA MENGKRITISI

Di seluruh pelosok negeri dan beberapa kota besar, masyarakat telah dapat menikmati enam stasiun televisi nasional. Sementara mereka yang memiliki antena parabola juga dapat menangkap siaran televisi manca negara kapan saja dikehendaki. Kehadiran sejumlah televisi itu mengindikasikan bahwa kebijakan langit terbuka (*open sky policy*) yang diterapkan pemerintah sangat memungkinkan setiap rumah tangga bertelevisi menangkap siaran TV dari penjuru mana pun. Bahkan beberapa kalangan meramal, sampai akhir abad ini keluarga bertelevisi di Indonesia akan diluberi sedikitnya 20 jenis tayangan dari studio televisi yang berbeda-beda, dengan atau tanpa antena parabola.

Belum selesai wacana soal televisi, sudah muncul media baru Internet yang juga mirip televisi. Karena itu, sebenarnya sudah kadaluwarsa memperdebatkan plus minus pengaruh siaran televisi bagi keluarga, khusus untuk pendidikan anak-anak. Namun demikian tidak ada salahnya kita berupaya mengkritisnya. Terutama bagaimana agar kehadiran televisi justru bisa dioptimalkan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Tentu saja bukan pendidikan khusus, melainkan pendidikan dengan segala aspeknya. Apalagi kehadiran televisi di rumah, diakui atau tidak, selalu menghadirkan pergulatan sengit antara pihak orangtua selaku penanggung jawab pendidikan anak dengan anak-anak selaku penggembira siaran TV. Dalam hubungan itu, tentu saja pihak studio televisi tidak akan pernah mau tahu dan ambil pusing soal itu.

Bukti tentang ini cukup jelas. Misalnya, lolosnya sejumlah adegan berbau pornografi lewat beberapa tayangan serial yang sempat membuat geger

masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk dominasi film-film keras yang ditayangkan saat *time prime* (Pk. 19.30-21.30), saat anak-anak mestinya terkondisi untuk belajar.

Jika hal itu kemudian dikaitkan dengan program-program siaran unggulan masing-masing stasiun televisi, kecenderungan untuk lebih menekankan aspek *entertainment* sangat menonjol. Aspek edukasional agaknya cenderung dihindari mengingat daya jualnya yang sangat rendah bagi pemasang iklan. Padahal, pakar di bidang televisi dan film justru melontarkan pikiran kritis di seputar pengaruh negatif kehadiran televisi bagi anak-anak usia sekolah. Ahli pendidikan anak dari Universitas Deakin, Australia, Rhonda M. Bunbury (1992) misalnya mengatakan bahwa riset di beberapa negara menunjukkan adanya perubahan pola hidup anak dalam memanfaatkan waktu senggangnya.

Mereka yang tadinya memanfaatkan waktu luang untuk bermain, berolah raga, mendengarkan radio, dan membaca buku, kini menggantinya dengan kegiatan menonton TV. Padahal, banyak studi menunjukkan, makin banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton TV, makin rendah tingkat kemampuan bacanya. Kasuo Takahashi (1992), seorang sineas film anak-anak dari Jepang menggambarkan situasi anak-anak Jepang dewasa ini. Katanya, akibat dari media audio-visual itu anak-anak di negerinya cenderung tumbuh dengan sifat keras, kehilangan emosi dan minat baca.

Memang benar, pengaruh positif tersebut umumnya berlaku bagi masyarakat lapisan bawah. Riset pakar komunikasi Inggris, Bradley Greenberg (1970), misalnya, menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari lapisan bawah di Inggris lebih banyak memanfaatkan waktunya di depan TV daripada anak-anak dari kalangan lebih tinggi. Hal ini berlaku juga di Amerika Serikat. Persoalannya, bagaimana melindungi masyarakat bagian bawah, yakni masyarakat penggembira televisi yang tidak begitu kritis terhadap ragam siaran yang di tayangkan.

Sekiranya banyak orangtua, pendidik, psikolog, dan praktisi pendidikan anak mengeluh karena beragamnya siaran TV yang mengasyikkan ditonton menyebabkan anak-anak lupa belajar, bisa saja hal itu diragukan. Sebab dengan atau tanpa siaran TV pun, anak-anak bisa saja hanya bermain dan tidak pernah belajar. Amat tergantung pada kemauan anak dan strategi orangtua dalam mengawasinya. Orangtua mana bisa bertindak ketat sedemikian rupa sementara ia sendiri menyukainya?

## PERLINDUNGAN KONSUMEN

Siapa pun yakin, tidak semua orangtua memahami proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang membutuhkan bimbingan. Bahwa anak-anak sangat sensitif untuk melakukan imitasi (peniruan) seringkali juga dilupakan. Fenomena film anak-anak yang cenderung antisosial seperti 'Ksatria Baja Hitam', 'Power Rangers', 'X-Men', 'Winspector', dan lain-lain adalah contoh yang pas bagi proses imitasi itu. Sedikit anak-anak kita yang tidak melakukan peniruan terhadap pola tingkah tokoh film itu.

Barangkali benar seandainya pun kita – orangtua dan anak-anak – menonton tayangan sadisme, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan, tidak mungkin lantas begitu saja melakukan praktik sadisme, merampok, memperkosa dan membunuh. Namun, secara psikologis pasti ada pengaruhnya. Minimal kita merasa miris, ketakutan jika dirampok atau disadisi, apalagi diperkosa dan dibunuh dengan cara sebagaimana ditayangkan TV. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, seringkali terjadi modus operandi sebagaimana dipertontonkan TV mengilhami tindak kejahatan dan ditiru oleh mereka yang berwatak jahat. Merebaknya fenomena kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita agaknya juga tidak terlepas dari kontribusi televisi sebagai media siaran.

Mencermati hal itu, para pakar komunikasi (termasuk para pejabat) sering menyarankan agar orangtua mematikan saja TV-nya jika tayangannya dirasa tidak layak ditonton anak-anak. Kalau dipikir-pikir, saran itu memang tidak cacat logika. Tapi cara itu bukan langkah solusif yang tepat, sebab apa mungkin orangtua memamatkannya sementara mereka sendiri menyukainya?

Kita sadar, hampir setiap keluarga bertelevisi berkepentingan terhadap ragam tayangan TV. Tanpa perlu meyakini seratus persen perlunya mengantisipasi dampaknya, agaknya perlindungan terhadap konsumen televisi sudah saatnya diintroduksikan. Sekalipun tidak dalam bentuk Undang-undang mengenai siaran TV, sekurang-kurangnya ada keputusan di tingkat Menteri yang bisa melindungi konsumen televisi.

Jakarta, *HU Media Indonesia*, 22 Agustus 1996



## TEKNOLOGI DAN PORNOGRAFI



ANTARA teknolog dan ilmuwan mempunyai target kerja yang berbeda, sekali pun berangkat dari landasan kerja yang sama. Teknolog pada umumnya selalu mencari yang terbaik, sementara ilmuwan rata-rata selalu mencari yang paling benar. Seorang teknolog yang mempunyai kredibilitas sebagai ilmuwan, secara profesional tidak akan pernah mencampuradukkan yang benar dan yang salah, dan juga tidak akan pernah menyembunyikan hal yang benar.

Ketika para teknolog yang dipimpin Dr Ian Wilmut menemukan teknik pengklonan domba tidak dari embrio, melainkan hanya dari sel *ambing epitel* yang ada pada domba dewasa misalnya, hasil teknologi itu dapat digolongkan sebagai teknologi pengklonan yang paling baik sampai saat ini. Namun karena Ian Wilmut dan kawan-kawannya adalah ilmuwan profesional, maka bersama PPL Therapeutics - perusahaan pemegang paten teknik pengklonan yang mensponsorinya - sepakat melarang pengklonan manusia karena dianggap tidak benar sekalipun kemungkinan itu terbuka luas.

Banyak sekali teknologi terbaik telah dihasilkan oleh para teknolog. Satu di antaranya ialah teknologi komunikasi. Dulu, ketika teknologi komunikasi masih sangat sederhana, jarak 50 km sudah merupakan kendala besar. Sekarang, dengan ditemukannya telepon, faksimili, sistem digital, televisi dan komputer, tak ada sejengkal jarak pun yang tak terjangkau di bumi ini.

Tetapi seringkali teknologi itu tidak diterapkan secara benar. Sebut misalnya televisi. Tidak jarang media komunikasi itu dipakai sebagai alat propaganda, mengibuli rakyat dengan informasi-informasi bohong hasil rekayasa, menyebarkan sadisme dan kekerasan, dan yang paling akhir menjadi keprihatinan banyak kalangan adalah dijadikannya teknologi komunikasi sebagai penyebar pornografi.

## BERJALAN SEIRING

Pornografi yang paling dekat dengan dimensi seksualitas manusia selalu menjadi perbincangan menarik. Sebab, seperti dikatakan Freud, ia menjadi inti aktivitas manusia. Di mana pun manusia berada dan ke mana pun manusia pergi, di situ pula ada kepedulian tentang seksualitas. Apalagi ketika AIDS menghantui seluruh bumi, tak ada satu spasi pun terlewat membicarakan seksualitas.

Ketika masyarakat masih primitif, kuno dan tidak semobil seperti sekarang, soal seksualitas lazim digunjing secara bisik-bisik. Seksualitas berjalan secara alamiah. Kendati mereka berpakaian ala kadarnya, tidak sedikitpun mereka terbius seksualitas karena mobilitasnya rendah. Kontrol pikiran mereka lebih terarah untuk berburu dan berladang, mencari makan guna menjamin *survival*.

Tapi manakala manusia mengenal teknologi cetak, perbincangan soal seksualitas tampil dalam hasil cetakan. Media cetak pun lantas berbondong-bondong untuk mengeksploitasinya karena di dalamnya terdapat “harta karun”, yakni inspirasi yang mendatangkan keuntungan ekonomi tanpa mengenal habis. Eksploitor seks juga mendapat limpahan rezeki dengan pemanfaatan telepon, film, video, televisi dan terakhir Internet. Dengan demikian, agaknya benar bahwa masalah seksualitas dan pornografi berjalan seiring dengan tingkat kemajuan teknologi manusia.

Dalam perkembangan terakhir, yakni penggunaan Internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi komunikasi, ada hal yang membuat kita sangat prihatin, yakni penyalahgunaannya untuk kepentingan penyebaran pornografi. Jika pada permulaan Internet dikenal dan digunakan secara luas di Indonesia, para pengakses hanya dapat menikmati pornografi yang menampilkan wanita-wanita asing.

Dalam beberapa waktu terakhir, wanita-wanita Indonesia sudah berani tampil, mejeng, *go international* dengan berbagai pose menantang di halaman-halaman internet. Hanya dengan mendaftar dan menyebar beberapa dollar (semula gratisan) kita bisa membuka situs (*homepage*) halaman web *Indoxxx* atau *Indonona* yang seram dan *Gadis Indonesia* yang elegan (dengan alasan etis, alamat ketiganya tidak penulis sertakan).

Diawali ucapan welcome, *Indoxxx* misalnya, menampilkan grafitinya berdampingan dengan foto gadis setengah telanjang yang sedang berbaring atau tiduran di atas kalimat “khusus untuk 21 tahun ke atas.” Selanjutnya, pengguna Internet tinggal mengklik kurang lebih 23 gambar wanita Indonesia. Tiga di antaranya adalah selebritis terkenal di dunia perfilman.

Berbeda dengan *Indoxxx* yang tidak kita ketahui siapa yang meluncurkannya di Internet, *Indonona* justru sangat jelas. Adalah Olivia Suharto, gadis Indonesia yang bermukim di Amerika, mengaku merilis situs itu. Bahkan dengan gaya seronok, ia ikut tampil tanpa selembaar benang pun dalam salah satu halaman situs panas yang diluncurkannya.

Selain dirinya sendiri, lebih 100 nona Indonesia tampil dengan gaya telanjangnya masing-masing. Pada setiap gambar yang muncul; selalu ada informasi siapa dan apa gerakan identitasnya. Jelas ini bukan pekerjaan iseng, sebab *Indonona* mendapat koleksi foto tersebut dari kiriman para pelanggannya di Indonesia. Dan seluruh foto-foto itu - jika kita menghendaki - tinggal di transfer file (di-*download*) melalui FTP ke *hardisk* dan bisa dibuka kapan saja.

Liku-liku tubuh dan kemolekan nona-nona Indonesia juga bisa diketahui via situs Gadis Indonesia yang gambarnya jauh lebih berkelas karena tampil dalam resolusi tinggi. Foto-foto yang terpampang pun jauh lebih aristik karena dijepret tidak serampangan. Misalnya, ada gadis Jawa lengkap dengan sanggul yang masih bertengger di kepala dan duduk di kursi tua jaman kolonial. Tapi begitu gambar menjadi lengkap, sulit melukiskannya, kecuali dengan satu kata: pelecehan seksual.

Begitu “maju” kah nona-nona Indonesia itu sehingga budaya Timur tak lagi lekat padanya lantas rela kemolekan tubuhnya dipampang gratis ke seluruh penjuru dunia? Atau inikah indikasi dari “keberhasilan” mereka memperjuangkan emansipasi dan tuntutan kesamaan hak atas nama modernitas itu? Tak terbayangkan, ideologi macam apa yang mereka anut sehingga memberi inspirasi keberanian luar biasa menantang arus besar ketinggalan etika dan falsafah bangsa. Edan.

## **INSTRUMENTASI HUKUM**

Melihat fenomena seperti itu, apakah perlu internet dibatasi instrumentasi hukum? Bisa perlu bisa pula tidak, sama dengan teknologi komunikasi lainnya, tergantung dari sisi mana kepentingan hendak didulukan. Sebab menyangkut pornografi dalam kaitan teknologi, khususnya internet, *self-censorship* seringkali lebih ampuh.

Kecuali itu, para pengguna Internet sudah banyak yang mampu melakukan gerakan anti mesum dengan menghancurkan situs-situs itu setelah lebih dulu melacak keberadaanya.

Memang, sampai saat ini belum ada negara yang mengatur Internet dalam bentuk Undang-undang karena unsur kebaruan dan kemutakhirannya. Namun begitu, Amerika Serikat sebagai negara paling liberal di dunia sudah mulai

merancangnya. Bahkan beberapa instrumentasi hukum yang mengarah ke sana sudah mulai di luncurkan. Mengapa? Selain karena pergunjungan dan tindak kejahatan yang terjadi paralel dengan kemajuan teknologi manusia, ada segala sesuatu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungan hukum yang layak diatur.

Dimulai dari negara bagian Connecticut di AS, dilansirlah Undang-undang yang menyatakan pelecehan seksual melalui Internet adalah tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman (Winarno, 1995). Hal itu berlanjut dengan disahkannya Undang-undang Reformasi Teknologi oleh Konggres AS pada 1 Februari 1996 yang antara lain menyatakan bahwa siapa saja yang mengirim, menempatkan dan menyebarluaskan informasi yang tidak senonoh dalam jaringan Internet (*World Wide Web, Newsgroup*) akan didenda 250.000 dollar AS dan hukuman penjara maksimum dua tahun (*Info Komputer*, Maret 1996).

Bahkan pertengahan Februari 1996 dilansirlah keputusan bahwa segala karya cipta legal yang sudah dipublikasikan, jika masuk di Internet dinyatakan illegal. Keputusan itu sempat mengundang protes kalangan *Net Surfers* dan penyedia jasa koneksi Internet komersial (*provider*) sehingga selama delapan jam “menghitamkan” (kondisi *blank*) jalur Internet.

Terlepas dari soal pro-kontra perlu tidaknya Internet disertai instrumentasi hukum, agaknya para penegak, ahli dan praktisi hukum di Indonesia sudah selayaknya mengikuti perkembangan teknologi informasi itu untuk selanjutnya mengantisipasi kehadiran Undang-undang. Kehadiran Undang-undang teknologi informasi sebagai instrumentasi hukum tentunya akan menjadi patokan semua pihak yang berkecimpung di bidang ini. Sehingga semua tahu dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Tentu saja, instrumentasi hukum diperlukan bukan untuk menutup, membatasi atau meniadakan ragam informasi di jalur yang oleh Wapres AS, Al Gore disebut *super highway*, melainkan diperlukan untuk mengatur kedudukan hukum para pengguna dan penyedia teknologi informasi itu agar jelas peran dan fungsinya, khususnya di Indonesia. Selain tentu saja untuk mengantisipasi tindak-tanduk kejahatan yang bisa saja akan timbul karenanya.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 19 Maret 1997



## **TV, DISIPLIN NASIONAL DAN PRODUKTIVITAS**



DISIPLIN merupakan suatu latihan batin dan watak dengan maksud agar segala perbuatan senantiasa taat pada tata tertib. Disiplin adalah wujud proses perilaku yang menomorsatukan ketepatan. Baik dari segi sistematika pikiran, waktu, maupun kinerja. Tujuan akhir dari semua itu tidak lain agar tercapai optimalisasi produktivitas seseorang. Dengan demikian, gerakan disiplin nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden bertujuan akhir meningkatkan produktivitas bangsa.

Wacana tentang disiplin selama ini memang menimbulkan banyak diskusi. Dari waktu ke waktu tiada habis-habisnya orang mempertahankan sejumlah variabel yang mempengaruhinya. Riset-riset pun dilakukan untuk mencari “kata sepakat” variabel mana yang bisa berkontribusi positif terhadap terciptanya disiplin seseorang sehingga bisa diintroduksi untuk mendongkraknya.

Wacana itu makin bertambah setelah kita masukkan kehadiran media audio visual semacam televisi yang merasuk dari rumah ke rumah sepanjang waktu. Momentum kehadiran televisi itu tentu saja sudah diulas panjang lebar oleh para pakar ilmu komunikasi. Namun satu hal yang belum terjawab ialah, apa hubungan antara televisi dengan disiplin nasional dan produktivitas bangsa? Sebuah pertanyaan menarik karena terkait erat dengan persiapan dan kesiapan bangsa untuk menghadapi kompetisi global dalam percaturan mondial di abad mendatang.

Sekalipun harus berhadapan dengan ragam variabel yang terkait dengan siaran-siaran mana, serta budaya masyarakat pemirsa televisi yang mana, agaknya perlu ada pengkajian dampak penyiaran televisi dan materi siarannya terhadap produktivitas masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar ada kesatuan persepsi sehubungan dengan upaya memperbaiki dan mengembangkan kebijakan

pengelolaan materi siaran media elektronik. Sebab, kehadiran televisi sepanjang waktu di era globalisasi informasi tidak mungkin bisa dibendung.

Dalam hal budaya masyarakat, *warning* Alwi Dahlan (1994) sepatutnya diantisipasi. Ia mengatakan, ada satu lompatan budaya yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya dampak negatif siaran televisi bagi pemirsanya, yakni, kita melompat dari budaya cerita ke budaya televisi tanpa melalui budaya baca. Diloncatinya budaya baca itu, tentu saja akan membuat masyarakat tidak kritis.

Akibat lain, kita melompati suatu tahapan yang memungkinkan pemirsa dapat membandingkan, menyaring, memilih, dan memilah siaran mana yang seharusnya kita tonton, dan siaran mana yang mustinya ditinggalkan. Bagi masyarakat yang *well informed*, “kekuasaan” televisi yang mengatur hampir setiap hidup keseharian amat terasa.

Tetapi tidak demikian bagi kalangan sebaliknya. Rutinitas siaran televisi, yang mengharuskan jadwal makan mundur, jam ke kantor bergeser, atau mengharuskan seseorang bangun pukul 02.00 dinihari gara-gara “dipaksa” menonton siaran TV justru dianggap sebagai hiburan.

Ketika televisi menyiarkan langsung Piala Dunia Sepakbola misalnya, pola-pola kerja dalam konteks sosial psikologis dengan serta merta berubah. Baik pada keluarga yang memiliki televisi, maupun yang tidak namun berhobi menonton sepakbola atau penggila bola. Demikian pula untuk siaran-siaran menarik lainnya yang memang sengaja dirancang untuk menyedot penonton.

## **SUBKULTUR ANTISERIUS**

Eksplorisasi informasi dan “revolusi” dibidang telekomunikasi menyebabkan keluarga pemilik televisi tak dapat menolak kehadiran teknologi *direct broadcasting satellite* itu. Siaran televisi – dengan atau tanpa sensor – merasuk dari rumah ke rumah. Ragam pilihan *channel* yang hadir sepanjang waktu nyaris tidak memberi kesempatan pada pemirsa untuk mengembangkan subkultur serius, membaca misalnya.

Kenyataannya, kebanyakan masyarakat negara berkembang (termasuk masyarakat Indonesia) menerima “keharusan” menonton siaran televisi tanpa *reserve*. Benda *miracle* itu dianggap berkah kemajuan luar biasa. Kecuali dianggap menampilkan citra modern, juga dipandang sebagai sarana yang dapat memecahkan ragam persoalan hidup, termasuk pendidikan.

Celakanya, yang tergabung dalam barisan penonton setia televisi adalah anak-anak sekolah yang, dengan sendirinya belum mampu melakukan seleksi. Memang, hidup seorang anak harus dilalui penuh kegembiraan. Tapi tidak berarti harus terus menerus berada di depan televisi.

Mereka juga memerlukan proses lain seperti bermain atau sosialisasi dengan teman-teman sebaya, membaca, melatih keterampilan motorik agar terlatih jasmaniahnya. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan manakala menonton televisi. Sebab, dengan menonton televisi mereka menghadapi komunikasi searah, yang dalam jangka panjang pasti memberi efek kurang menguntungkan pada diri dan perkembangan anak.

Siaran televisi – diakui atau tidak – telah dengan sengaja mentransformasi subkultur antiserius yang makin tampak dari ragam siarannya. Dan dalam jangka panjang pastilah dapat mereduksi subkultur serius yang seharusnya menjadi perhatian utama sumberdaya manusia kita. Itu pula yang disinyalir banyak pakar dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat.

Proses transformasi subkultur antiserius itu tercermin dari misalnya, - untuk menyebutnya beberapa - telenovela dan opera-opera sabun semacam *Maria Mercedes*, *Setulus Hati*, *Kristal*, *Kassandra*, dan sebagainya. Atau komedi-komedi situasi yang tidak berbobot yang dikemas oleh rumah produksi lokal. Atau beberapa tayangan Kuis yang bisa membuat kita makin “bodoh”, bermimpi jadi milyarder dan berjudi dengan nasib.

## SIKAP KRITIS

Siapapun mengakui, siaran televisi selalu mempunyai dua sisi. Ada manfaatnya, juga ada negatifnya. Bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan SDM yang produktif tentu saja kita patut mengantisipasi semua kemungkinan yang timbul. Yakni, mengambil manfaat sebesar-besarnya dari luberan siaran televisi.

Untuk kepentingan pendidikan anak misalnya, bisa dilakukan melalui *educational program* dengan memanfaatkan keberadaan televisi. Sekadar contoh, di Norwegia, menurut Dr Ada Haug (1992), ada satu program bertitel *Good Book*. Acara ini jelas tidak sama dengan *Sesame Street* sebagaimana disiarkan di SCTV dalam bahasa Indonesia setiap hari. Melalui acara tersebut anak-anak dirangsang mau membaca. Mereka diajak ke perpustakaan untuk memilih buku yang baik. Kemudian pengasuh acara membacakan cerita buku itu dengan menarik. Dengan demikian anak-anak masih memiliki kebebasan untuk berimajinasi membentuk tokoh-tokoh dalam cerita menurut daya khayalnya. Dengan berimajinasi, kreativitas dapat berkembang.

Kesempatan mengembangkan kreativitas tidak akan diperoleh jika siaran televisi – terutama yang berwarna – menayangkan informasi atau cerita dengan bantuan gambar bergerak yang sangat menarik. Sebab, pemirsa tak perlu bersusah payah mengembangkan imajinasi guna menghidupkan cerita. Imajinasi yang

tidak berkembang dengan sendirinya akan mengurangi daya kreativitas. Satu aspek psikologis yang amat erat kaitannya dengan etos kerja dan produktivitas.

Bisakah *educational program* bertema serius menangkal transformasi fenomena antiserius yang terlanjur merasuk dalam jiwa masyarakat pemirsa? Masalahnya bukan bisa atau tidak. Melainkan bagaimana agar masyarakat bisa mengkritisi program dan ragam tayangan secara lebih rasional. Tanpa sikap kritis, kita berpotensi menjadi masyarakat konsumtif yang selalu bergantung. Lawan dari masyarakat produktif.

Soal produktivitas yang akhir–akhir ini mencuat kembali ke permukaan harus menjadi perhatian kita. Sebab, sudah ditengarai banyak kalangan bahwa produktivitas masyarakat kita amat rendah. Sekitar 50 juta dari 75 juta tenaga kerja di Indonesia tidak produktif. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Menurut Prof Dr Mathias Aroef (1994) produktivitas manusia Indonesia memang sangat rendah. Selain itu, tenaga kerja kita dibayar dengan upah yang mahal dibanding tenaga kerja bangsa lain. Kita menerima upah seperlima dari upah tenaga kerja asing, namun produktivitasnya hanya sepersepuluh dari tenaga kerja asing.

Lantas, apa ada hubungan produktivitas tersebut dengan siaran televisi? Tentu saja ada, banyaknya jam tayang yang menarik bukan saja menghibur, tapi sekaligus mengurangi vitalitas kerja. Ketidakproduktivan tersebut bisa dipastikan karena kurang serius dalam bekerja. Bisa saja kekurangseriusan itu akibat “berhasilnya” transformasi subkultur antiserius yang “dikembangkan” televisi.

Sekarang tinggal etos masyarakat pemirsa, mau serius atau antiserius semuanya berpulang pada kesungguhan masyarakat untuk bisa sejajar dalam hal kemampuan dengan bangsa lain atau tetap berjalan di tempat dengan menjadi masyarakat konsumen yang “baik.” Namun begitu yang terpenting adalah bagaimana menentukan parameter untuk mengukur produktivitas sejelas–jelasnya. Termasuk menentukan apakah siaran televisi atautkah semata–mata materi tayangannya yang mempengaruhi produktivitasnya.

Yogyakarta, HU *YOGYA POST*, 4 Oktober 1995



## TAYANGAN TV DAN KEKHUSYUKAN IBADAH PUASA



JOSEPH E LeDoux adalah bagian dari kelompok ilmuwan saraf yang mau memanfaatkan metode dan teknologi inovatif yang dapat memberi tingkat ketepatan yang belum pernah dicapai untuk memetakan otak yang sedang bekerja. Dan dengan demikian mampu mengungkapkan misteri-misteri pikiran yang tidak mampu ditembus oleh generasi-generasi ilmuwan sebelumnya. Temuan yang paling mutakhir dari perkembangan teori pemayaran otak ialah terdeteksinya otak emosional yang berdampingan dengan otak rasional pada otak manusia sebagaimana dikenal selama ini.

Ahli saraf di *Center for Neural Science, New York University* itulah orang pertama yang menemukannya. Dalam *Emotional Memory and the Brain* (1994), LeDoux merinci bukti-bukti bahwa segala apa yang diindera oleh manusia akan memicu suatu respon psikologis dalam bentuk reaksi-reaksi sensoris. Kedua jenis reaksi itu bisa sama dan kompromistis, kadang bertentangan, bahkan seringkali sulit disadari. Bahwa keduanya berjalan harmonis, tidak lain karena otak manusia merupakan kumpulan jutaan, bahkan mungkin miliaran sirkuit yang saling berhubungan satu sama lain.

Ketika kita menahan nafsu makan sekalipun sangat lapar dan dahaga karena berpuasa misalnya, segala indera yang ada sangat sensitif. Begitu melihat bagaimana orang memperagakan nikmatnya makanan dan minuman, sinyal visual yang ditangkap mata akan dikirim dari retina ke talamus yang bertugas menerjemahkan sinyal itu ke dalam bahasa otak. Respon psikologis yang terjadi antara lain berusaha menjawab pertanyaan apa yang dimakan, apa yang diminum.

Dalam tempo sekejap setelah terjawab, sebagian pesan dikirim ke korteks visual yang menganalisis dan menentukan makna dan respon yang cocok. Otak

rasional mungkin mengatakan, ‘pasti makanan itu nikmat, tentu minuman itu segar, barangkali obat itu manjur’, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu reaksi fisiologis pun seringkali muncul secara refleks tanpa bisa ditahan. Misalnya menelan air liur karena tergiur, atau reaksi fisiologis lain seperti perut berbunyi-bunyi (keroncongan).

Tapi perlu diingat, sebagian kecil sinyal asli langsung menuju amigdala (pusat otak emosional) dari talamus dengan transmisi yang lebih cepat, sehingga memungkinkan adanya respon yang lebih pula berupa emosi. Kata hati atau perasaan – bahasa lain dari otak emosional – mungkin mengatakan (maaf); ‘kurang ajar, sialan, puasa-puasa kok disodori makanan.’

## TAYANGAN SIANG

Sedikit ilustrasi di muka setidak-tidaknya telah menggambarkan betapa erat hubungan antara apa yang diindera oleh setiap muslim dengan kadar kekhisyukannya dalam menjalankan ibadah puasa. Sebab makna ibadah puasa tidak hanya sekadar menahan lapar, dan dahaga saja. Lebih dari itu merupakan ujian bagi setiap muslim untuk dapat menahan segala jenis nafsu yang disebabkan terjadinya kontak inderawi. Itu berarti dengan puasa, mata diharapkan hanya melihat hal-hal yang baik-baik saja, sementara telinga diharapkan cuma mendengar segala sesuatu yang mengarah kepada kebajikan. Demikian halnya dengan indera-indera lainnya agar manusia tidak menjadi budak nafsu.

Dalam bahasa Daniel Goleman (1996), orang yang menjadi budak nafsu disebut sebagai orang yang buta emosional (*emotional illiteracy*). Secara psikologis orang demikian mempunyai cacat emosional yang serius, salah satu ciri yang mengindikasikan rendahnya kecerdasan emosional yang bersangkutan. Terkait kontak inderawi tersebut, apa hubungannya dengan tayangan televisi (TV)? Agar diperoleh jawaban seobjektif mungkin, diperlukan rincian lebih jelas tentang tayangan apa yang dimaksud.

Di mata muslim khususnya, selama bulan puasa tayangan TV malam hari kurang mendapat perhatian. Sebab pada umumnya mereka lebih terkonsentrasi dalam menjalankan sholat tarawih dan tadarus. Selebihnya digunakan untuk istirahat agar waktu makan sahur tidak terlambat.

Berbeda dengan tayangan TV malam hari, tayangan siang seringkali susah dilewatkan. Setelah capek bekerja, kebanyakan muslim sudah tidur karena lemah secara fisiologis. Untuk membunuh waktu, daya goda layar gelas tentu lebih kuat ketimbang aktivitas lain. Padahal diketahui, tayangan TV siang hari beraneka ragam.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga kelompok tayangan. *Pertama*, tayangan reguler dalam bentuk informasi dan hiburan seperti sinetron, telenovela atau film yang terkadang tak layak dinikmati orang yang sedang berpuasa. *Kedua*, tayangan bernuansa Ramadhan, baik dalam bentuk diskusi, interaksi langsung (tanya jawab), dakwah oleh dai-dai terkemuka, informasi-informasi ke-Islaman hingga irama-irama musik bernafaskan religiositas. Terakhir adalah tayangan iklan yang bertebar di jeda setiap acara, baik iklan-iklan produk industri, pelayanan, hingga iklan rokok, makanan, dan minuman.

Di antara ketiga jenis tayangan siang tersebut, yang perlu diwaspadai tentu saja sebagian besar jenis yang pertama dan ketiga. Karena kedua jenis tayangan itu seringkali tidak cocok diindera oleh orang yang sedang berpuasa. Lebih banyak *mudharat*-nya ketimbang keuntungannya. Sebab tayangan-tayangan seperti itu akan mengurangi kadar kekhusyukan ibadah puasa. Sekadar contoh bisa disebut, mata sulit terjaga puasanya melihat tayangan film India yang banyak mempertontonkan aurat wanita yang mestinya ditutup rapat-rapat, atau dari adegan-adegan tidak senonoh. Contoh lain, telinga akan berat menjaga dari upaya tidak mendengar gunjingan-gunjingan dalam telenovela, *Infotainment* dan sebagainya.

Padahal seperti diuraikan di awal tulisan ini, segala apa yang terindera oleh manusia akan menimbulkan dua reaksi penting, yakni fisiologis dan emosional yang, bagi setiap muslim seyogianya dihindari jauh-jauh agar kekhusyukan ibadah puasa benar-benar intens dan tak terganggu.

Apalagi diketahui, kewajiban berpuasa tidak hanya berlaku bagi unsur-unsur lahiriah yang bersifat inderawi. Lebih dari itu menyangkut pula hal-hal yang dulu dianggap metafisika seperti hati nurani (otak emosional) dan akal pikiran (otak rasional). Orang yang sedang berpuasa harus jernih hatinya dan steril dari berbagai prasangka, dengki, dan keinginan-keinginan buruk lainnya. Sementara otak rasionalnya tidak boleh terlalu *ngeres*, berpikiran yang tidak-tidak tentang sesuatu hal yang negatif.

## SOAL IKLAN

Di luar tayangan-tayangan positif pada siang hari yang dikemas dalam bentuk Ramadhan, umat Islam benar-benar mendapati tantangan yang relevan dalam menjalankan ibadah puasa. Kadar kekhusyukan ibadah puasa diuji secara transparan. Betapa tidak, di tengah kekuatan iman menahan segala hawa nafsu seperti lapar dan haus, televisi dengan tenangnya menayangkan iklan-iklan aksi yang mendemonstrasikan betapa nikmat makan dan minum sesuatu yang diiklankan.

Menurut data SRI (1996), iklan-iklan seperti makanan, minuman, rokok dan, obat-obatan mencapai 40 persen. Padahal diketahui jenis-jenis iklan itulah yang langsung mempunyai daya goda paling tinggi terhadap kemungkinan berkurangnya kadar kekhusyukan ibadah puasa.

Sejauh ini banyak kalangan meminta agar di masa-masa mendatang pihak pengelola televisi mengurangi jenis iklan makanan, minuman, rokok, dan obat-obatan di siang hari. Namun agaknya sulit bagi pengelola TV untuk memenuhi permintaan tersebut mengingat hajat besar mereka terhadap belanja iklan sangat tinggi. Apalagi diketahui, pendapatan utama TV justru berasal dari belanja iklan.

Selama periode Januari-Juli 1996 saja – dalam miliar rupiah – stasiun TV masing-masing mendapat belanja iklan bruto senilai: RCTI (422,621), SCTV (220,384), TPI (189,186), Indosiar (165,749) dan AN-teve (155,606). Padahal sepanjang tahun tersebut belanja iklan di televisi diperkirakan mencapai Rp 4,480 triliun.

Sehari-hari dalam bulan puasa, umat Islam melewati sepuluh hari pertama puasa yang penuh rahmat, sepuluh hari kedua yang penuh ampunan, dan melaksanakan sepuluh hari terakhir yang dijanjikan sebagai hari-hari pembebasan dari api neraka.

Bagi umat Islam, agar kadar kekhusyukan ibadah puasa tidak terganggu dan derajat keimanan serta taqwa sebagai sasaran akhir ibadah puasa dapat tercapai, agaknya tak ada pilihan lain selain selektif bila menonton TV di siang hari. Atau mencari aktivitas lain untuk membunuh waktu. Barangkali dengan belajar mengaji bersama istri dan anak-anak, atau membaca buku-buku yang bersifat memperdalam ajaran agama, akan lebih baik.

Jakarta, *HU Media Indonesia*, 31 Januari 1997



## **KERTAS, NASIB PERS DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN**



ALVIN Toffler (1981) pernah meramalkan bahwa bisnis pers akan menjadi industri cerobong paling akhir dalam abad ini. Dengan nada sinis dia mengatakan, bisnis pers sudah loyo, kuno dan ditakdirkan bakal mati.

Toffler jelas tidak sendirian. Banyak tokoh lain berpandangan sama bahwa bisnis pers akan menghadapi pembantaian media baru sebagai hasil reformasi teknologi komunikasi. Mulai dari satelit, faksimili, televisi kabel, komputer, hingga koran digi-tal.

Tanda-tanda kemerosotan itu sebenarnya sudah dirasakan sejak tujuh tahun silam. Koran-koran di Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang misalnya, telah menderita banyak kerugian karena kemerosotan terburuk selama 50 tahun terakhir. Pendapatan iklan turun drastis, sirkulasi anjlok, bahkan terjadi rasionalisasi wartawan dan peniadaan beberapa jabatan serta pengurangan sejumlah pengeluaran.

Berbeda dengan Toffler, Roger Fidler (1996) berpendapat lain. Menurut dia, kelahiran media elektronik tidak serta merta menjadi tanda kematian pers, khususnya media cetak. Dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai basis baru selain kertas dan tinta, pers dapat tetap bertahan dan unggul. Oleh karena itu kehadiran teknologi dig-ital yang berkembang saat ini dan mendatang bukan untuk menggantikan koran, melainkan sebagai format digital dari koran atau *digital print media*.

Barangkali Fidler benar, setidaknya-tidaknya jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Di Indone-sia, kematian pers tidak disebabkan oleh persaingan di antara sesama kompetitor maupun dengan kompetitor baru seperti media elektronik; melain-kan seringkali oleh sistem manajerial yang tidak mampu

mengembangkan diri sehingga ditinggalkan pembacanya atau terkena pencabutan SIUPP.

Kini — jika tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian — ada faktor baru yang menyebabkan kematian pers, yaitu melambungnya harga kertas jauh di atas harga normal.

### **NASIB PERS KECIL**

Seperti diketahui, harga kertas koran sebagai bahan baku utama penerbitan pers mengalami lonjakan luar biasa. PT Aspek Paper yang memegang pangsa pasar lebih dari 62 persen alias memonopoli, menaikkan harga kertas secara sepihak berdasarkan perhitungan nilai tukar dolar Amerika seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah.

Data berbagai sumber menyebutkan, jika pada awal tahun 1997 harga kertas koran adalah Rp 1.254 per kilogram, maka sepanjang tahun 1998 mengalami kenaikan sebanyak tiga kali. Pertama pada bulan Juli sebesar Rp 1.440 per kilogram, kedua bulan Agustus sebesar Rp 1.724 per kilogram dan pada bulan November mencapai Rp 3.545 per kilo-gram.

Akibat kenaikan harga kertas tersebut, banyak penerbitan pers berskala sedang dan kecil yang umumnya terbit di daerah mengalami kerugian besar. Sebuah koran yang terbit di Yogyakarta misalnya, pada bulan Oktober dan November saja sudah mengalami kerugian tak kurang dari Rp 200 juta. Sementara sebuah koran yang terbit di Surabaya harus mensubsidi sekitar Rp 1,2 miliar karena harga langganan masih tetap. Bahkan beberapa koran besar yang terbit di Jakarta sudah mengurangi jumlah halaman dari 24 halaman menjadi 20 halaman saja.

Kecuali kertas koran, kertas jenis lain seperti HVS pun turut melonjak menjadi lebih 160 persen. Beberapa pengusaha percetakan yang sempat ditemui penulis di Yogyakarta dan Solo mengatakan, selama tiga bulan terakhir, banyak order terpaksa dibatalkan sekali pun untuk itu mereka harus menerima caci maki dan sumpah serapah karena terlanjur menyanggupi pesanan.

Sebagian di antara mereka berhenti berproduksi. Sebab, untuk pesanan di bawah harga Rp 1 juta saja, mereka harus menanggung kerugian lebih dari Rp 200 ribu. Dengan modal dan keuntungan yang sangat kecil, sangat tidak mungkin mereka harus menanggung kerugian besar.

Kendati Menpen R Hartono sudah berjanji akan membantu mengatasinya, namun kenyataannya perundingan yang berlangsung antara SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) selaku konsumen dan APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) selaku produsen, berlangsung alot.

Agaknya, pihak produsen hanya melihat sisi bisnis semata tanpa mempedulikan kepentingan bangsa yang lebih luas. Padahal seperti diketahui, pers dewasa ini memiliki fungsi sangat strategis dibanding di masa lalu.

Jika pada masa lalu pers hanya berfungsi sebatas olah berita, dewasa ini sudah sangat kompleks. Salah satu di antaranya adalah sebagai media edukatif dan referensi. Jika dibandingkan media lain seperti televisi, harga informasi yang ditawarkan pers jauh lebih murah.

Pers memang tidak sama dengan sekolah sebagai wahana pencerdasan kehidupan bangsa. Namun begitu, fungsi edukatif yang diemban dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah kalah dengan sekolah, bahkan dalam beberapa sisi dapat dikatakan lebih unggul. Jika lembaga pendidikan seperti sekolah hanya menyediakan informasi tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbatas, maka pers justru menjangkau lebih dari itu, yakni melansir perkembangan pengetahuan dan teknologi sekaligus informasi penerapannya di berbagai bidang.

Oleh karena itu, jika sebuah penerbitan harus mati karena tidak mampu lagi memproduksi mengingat harga kertas sebagai bahan baku utama tak terjangkau, kerugian edukatif yang ditanggung masyarakat luas sangatlah tak terhingga. Dalam skala yang lebih makro, tak ada jaminan bahwa kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, bahkan politik akan mengalami keseimbangan dan dinamis tanpa pers mengingat laju globalisasi informasi demikian intensif.

Alhasil, kecil kemungkinan sebuah bangsa dapat hidup kompetitif dengan bangsa lain tanpa ditopang ketersediaan informasi di mana pers ikut menyumbang besar memasoknya. Amerika saja, yang sudah sangat maju teknologi komunikasi elektroniknya, masih mempertahankan pers (media cetak) sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsanya yang *well informed*.

## MASA DEPAN PENDIDIKAN

Reigeluth dan Grafinkle (1994) boleh-boleh saja mengangankan kinerja pendidikan - dalam arti luas - yang mengedepankan penggunaan instrumen berteknologi tinggi sebagai alat sesuai ciri abad informasi (*information age*). Namun, *books as tools* (buku sebagai alat) yang menjadi karakteristik paling menonjol dalam *industrial age* agaknya akan tetap kukuh. Sebab daya simpan buku terhadap ragam informasi lebih tahan lama dibanding teknologi semacam disket, hardisk, CD-ROM, microfilm, dan sebagainya.

Maka, beruntunglah sebuah bangsa yang dalam perjalanan sejarahnya memperkokoh diri lewat buku. Berlomba-lomba menerbitkan buku sebanyak dan semutu mungkin sepanjang tahun. Sebut saja Amerika Serikat, negeri itu

setiap tahun menerbitkan tak kurang dari 100.000 judul buku. Sama dengan Jepang dan Korea Selatan yang menerbitkan masing-masing sekitar 44.000 dan 43.000 judul buku saban tahunnya. Agaknya mereka sangat sadar bahwa buku merupakan kunci segala kemajuan dan kecerdasan bangsa.

Hal itu berarti, masa depan pendidikan sebenarnya juga sangat bergantung kepada buku. Namun di negeri ini, dari kurang lebih 260 penerbit anggota Ikapi, selama sepuluh tahun terakhir baru mampu menerbitkan sebanyak 24.259 judul buku. Artinya setahun rata-rata diterbitkan kurang dari 2.500 judul. Jika kambing hitam selama ini diarahkan kepada soal bisnis dan politis seperti maraknya pembajakan dan regulasi (balutan instrumentasi hukum) yang sangat ketat; atau ditujukan ke hambatan lain seperti rendahnya minat baca akibat lompatan budaya dari lisan dengar ke visual (budaya lihat) tanpa melalui budaya baca; maka di hari-hari ini dan mendatang jumlah “musuh” buku akan bertambah, yaitu produsen kertas yang mematok harga sangat mahal.

Dengan harga kertas yang semakin mahal, otomatis harga buku pun akan menjadi mahal. Di tengah krisis ekonomi yang demikian berat, daya beli masyarakat sudah berkurang. Akibatnya, jangankan membeli buku, mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah sangat sulit. Karena produksi tak terbeli, akibatnya mudah ditebak, akan banyak pula penerbit buku, khususnya yang berskala sedang dan kecil mengalami kebangkrutan, gulung tikar. Lagi-lagi masa depan pendidikan nasional akan dikorbankan.

Menimbang hal-hal tersebut, produsen kertas hendaknya lebih arif memahami kondisi sulit yang dialami bangsa secara menyeluruh. Atau barangkali sudah saatnya pemerintah menghapus monopoli produsen kertas agar pasar berjalan lebih *fair*. Jika dalam jangka pendek pemerintah tidak mampu mensubsidi harga kertas mengingat fungsinya sebagai bahan baku yang sangat strategis bagi kepentingan bangsa dan negara, masih dimungkinkan pemerintah menggunakan *power* sebagaimana seringkali diberlakukan untuk menekan masyarakat sipil selama ini. Sasaran kali ini tentu saja adalah produsen kertas. Coba sajalah.

Surakarta, HU *SOLOPOS*, Jumat., 2 Januari 1998



## ANAK-ANAK, TELEVISI DAN INTERNET



DUNIA main anak-anak dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami revolusi besar. Setelah mereka kehilangan akses memanfaatkan tanah lapang untuk bermain bola, layang-layang, *engklek*, *gobak sodor*, *jentikan*, kasti, dan lain-lain aneka permainan tradisional yang membutuhkan tanah lapang — karena tergusur untuk pemukiman yang makin padat — segera alat-alat permainan elektronik seperti video game, game watch, tetris, dan sebagainya menggantikannya.

Selain dunia wisata anak-anak, sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir anak-anak juga dibuai, dibikin sanggup dan terpukau selama berjam-jam berada di depan media elektronik televisi. Sementara hampir dua tahun belakangan, hadir pula Internet yang mampu menggoda anak-anak untuk bermain, bercanda, surat-suratan, nonton film, dan sederet keasyikan lain yang menakjubkan di seluruh belahan bumi.

Kita angkat televisi dan in-ternet ke permukaan mengingat dua medium komunikasi inilah yang hingga kini paling diakrabi masyarakat karena faktor *avai-lability* dan aksesibilitasnya yang tinggi. Kecuali itu, kehadiran televisi dan internet ternyata membawa efek, dampak, dan paradigma yang berbeda satu sama lain. Kalangan pesimis berpandangan, rasanya tidak mungkin lagi menyelamatkan anak-anak golongan bawah dari imbas teknoglobal yang makin dahsyat.

Ilustrasinya sederhana. Tele-visi, dengan semangat *entertainment*-nya yang tinggi telah mampu merampas sebagian besar waktu anak-anak dari kalangan bawah hingga menengah ke atas. Sementara Inter-net merupakan alternatif menarik yang hanya bisa dinikmati anak-anak kalangan menengah ke atas. Sebab yang terakhir ini mempersyaratkan dua media lain, yakni komputer dan pesawat telepon.

Manakah yang paling berbahaya bagi anak-anak, televisi atau Internet? Ini pertanyaan absah yang seringkali muncul manakala ada masalah soal kesenjangan antara apa yang diharapkan dari kedua media itu dengan apa yang bisa diperoleh oleh pengaksesnya.

## OTORITER VS DEMOKRATIS

Jelas terlalu naif apabila seseorang dengan serta merta berusaha membandingkan dua hal yang tidak komparabel karena berangkat dari representasi yang berbeda. Namun, dengan asumsi bahwa baik televisi maupun Internet sama-sama berbasis teknologi digital serta sama-sama berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi, maka tidak ada salahnya kita berupaya menjawab pertanyaan penting di muka.

Berangkat dari opini masyarakat yang berkembang dewasa ini, berdasar pengalaman pribadi dalam mengakses kedua media, dan menilik kepentingan masyarakat luas khususnya anak-anak, dicoba pemetaan profil kedua media sebagaimana disajikan dalam tabel terlampir. Tanpa mengurangi sifat hipotetisnya, tidak ada keharusan bagi siapa pun untuk meyakini kebenarannya. Namun begitu, sekurang-kurangnya para orangtua memiliki sedikit wawasan guna mengkritisi keberadaan kedua media dalam konteks pendidikan anak-anak. Tentu, daftar pemetaan profil tersebut bisa diperpanjang dengan visi yang berbeda-beda.

**Tabel Perbandingan Karakteristik Televisi dan Internet**

Kisi-kisi	Televisi	Internet
1. Pengelolaan	Terpusat	Menyebar
2. Materi informasi	Terbatas	Tak terbatas
3. Sifat informasi	Cenderung menghibur	Kompleks
4. Ikatan pemirsa	Keharusan (memaksa)	Tergantung kebutuhan
5. Intervensi tayangan	Tidak dapat	Dapat dilakukan
6. Fungsi pengakses	Pasif	Aktif
7. Interaksi pemirsa	Pasif, sedikit aktif	Aktif
8. Orientasi bisnis	Tinggi	Rendah
9. Biaya operasi dst.	Rendah	Tinggi

Sekalipun televisi dan Inter-net mempunyai fungsi yang sama, yakni sebagai media informasi, ternyata dari sembilan kisi itu sudah memiliki karakteristik yang berbeda. Televi-si cenderung bersifat otoriter, sementara Internet cenderung lebih demokratis. Sekadar contoh, tak banyak pilihan bagi para orangtua manakala televisi menghadirkan tayangan-tayangan berbau

pornografi serta kekerasan yang bisa merugikan perkembangan kepribadian anak-anak. Mungkin mematakannya atau memindah ke saluran lain.

Sementara di Internet orang-tua bisa memblokir *homepage* yang menyediakan tayangan-tayangan atau situs-situs sejenis. Untuk itu banyak cara. Satu di antaranya dengan perangkat lunak. Pada bulan Maret lalu misalnya, CompuServe, *provider* terkemuka di Amerika telah menghadirkan paket *Wow!* yang sangat *family friendly* karena pelanggan dapat memblokir informasi dan tayangan berbau porno dan sejenisnya sehingga anak-anak tidak dapat mengakses data itu.

Hal itu bisa dilakukan karena menu *Wow!* memungkinkan para pengguna memecah *ac-count* dengan login dan *pas-sword* sendiri. Anak-anak diberi *account* sendiri, namun diblokir, sehingga mereka tidak dapat mengakses gambar-gambar dan video porno, bahkan berbelanja via Internet sekalipun. Satu hal yang tidak dimungkinkan oleh para orangtua di televisi karena kekuasaan yang luas berada pada pihak pengelola televisi. Ditayangkan tidaknya suatu siaran atau informasi sangat bergantung kepada mereka.

Pengelola televisi cenderung bersikap apa yang mereka sajikan adalah yang terbaik (*percei-ved interest*), padahal secara aktual pemirsanya belum tentu sependapat bahkan mungkin menolaknya (*actual interest*). Itulah sebab akhir-akhir ini banyak masyarakat yang risau karena kekuasaan itu seringkali dipergunakan secara sewenang-wenang oleh pengelola televisi demi keuntungan bisnis semata. Ajakan serius untuk membentuk “masyarakat pemirsa televisi” merupakan wujud ketidak-berdayaan masyarakat dalam posisi tawar-menawar dengan pengelola televisi.

Namun begitu, mengingat aspirasi pemirsa baik secara individu maupun kolektif tidak bersifat monolitik, bahkan persepsi mereka pun terhadap suatu tayangan cenderung sangat beragam, maka tidak mungkin mendikte televisi. Apalagi diketahui, tak ada kemajuan yang sangat berarti bisa diperoleh tanpa kehadiran televisi. Sehingga, sebenarnya sudah kedaluwarsa memperdebatkan plus minus pengaruh siaran televisi bagi keluarga, khususnya untuk kepentingan pendidikan anak-anak.

Namun demikian tidak ada salahnya kita mengritisinya demi kepentingan pendidikan itu sendiri. Terutama bagaimana agar kehadiran televisi justru bisa dioptimalkan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Tentu saja bukan pendidik-an khusus, melainkan pendidik-an dengan segala aspeknya. Termasuk di dalamnya bagaimana melindungi masyarakat lapisan bawah, yakni masyarakat penggembira televisi yang tidak begitu kritis terhadap ragam siaran yang ditayangkannya. Sebab seperti diketahui, pengaruh negatif tersebut umumnya berlaku bagi masyarakat lapisan bawah. Riset pakar komunikasi Inggris, Bradley

Greenberg (1970), misalnya, menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari lapisan bawah di Inggris lebih banyak memanfaatkan waktunya di depan TV daripada anak-anak dari kalangan lebih tinggi. Hal ini berlaku juga di Amerika Serikat.

## PENTINGNYA PENDAMPINGAN

Dari segi ragam tayangan yang disajikan, televisi terkesan demokratis. Ada upaya mengakomodasi pemirsa yang aspirasinya tidak monolitik. Tapi kesan otoriter lebih menonjol manakala keresahan-keresahan masyarakat pemirsa ternyata tidak ditanggapi secara serius. Ketua Dewan Kesenian Jakarta Dr Salim Said, dalam suatu semi-nar di Jakarta mengatakan, tayangan program-program televisi cenderung merusak selera masyarakat. Karena itu perlu dipikirkan adanya satu stasiun televisi khusus yang dapat mendidik apresiasi masyarakat yang lebih bagus.

Dalam kaitan dengan sajian untuk anak-anak lain lagi. Hasil riset YKAI dan Litbang Deppen pada tahun 1993 menunjukkan bahwa mayoritas (52 persen) film-film yang disajikan televisi untuk anak-anak memperagakan adegan-adegan anti sosial. Hanya 48 persen yang prososial. Saluran RCTI terbukti paling banyak menampilkan adegan-adegan antisosial tersebut (54,96 persen).

Penetrasi televisi, terutama (hanya) dari sisi negatif memang seringkali mengkhawatirkan banyak kalangan. Apalagi menurut Djoko Lelono (1996) anak-anak usia 5-9 tahun yang menonton televisi pada saat *prime time* mencapai 51 persen. Sementara yang menonton pagi hari tujuh persen, siang hari 21 persen, *early fringe* 32 persen, *late fringe* empat persen dan di akhir pekan 17 persen. Tanpa perlu menyebutkan satu per satu bukti-bukti, diketahui pada saat *prime time* tayangan televisi cenderung cocok untuk orang dewasa.

Berbeda dengan televisi, Internet menyediakan banyak pilihan yang sangat sesuai untuk pendidikan anak-anak dan keluarga. Sebut misalnya *homepage* (situs) Kidscom yang dikhususkan anak-anak usia 4-15 tahun (<http://www.kidscom.com>). Dipandu tokoh kartun Tobie Wan Kenobi, anak-anak diajak bermain di tempat-tempat bermain, mencoba grafiti, atau bercanda dengan teman-teman di seluruh dunia.

Ada lagi *homepage Berit's Best Sites for Children* yang memberi informasi mengenai sekolah-sekolah yang ada di Internet; alamat-alamat *homepage* keluarga dan anak-anak; informasi iklan, kapal dan kehidupan di laut; tentang katak dan kodok; game dan mainan anak-anak secara *online*; informasi mengenai lingkungan, sumber energi dan alam; serta informasi tentang sejarah suatu bangsa,

mulai dari bangsa Viking sampai koleksi kesenian dunia yang berasal dari Asia dan Mesir (tengok [http://www.cohran.com/theosite/ksites\\_part 2.html](http://www.cohran.com/theosite/ksites_part 2.html)).

Tentu saja masih banyak lagi alamat-alamat di Internet yang bisa dibuka sesuai karakteristik umur anak-anak seperti *The Kids on the Web*; *Steve and Ruth Bennet' Family Surfboard*, dan sebagainya. Namun begitu, bukan berarti Internet tidak disertai sisi negatif. Interaksi dengan mesin komputer yang monoton tentu punya kontribusi kurang baik dalam perkembangan psikososial seseorang. Jika untuk televisi seperti dikatakan Milton Chen (1996) diperlukan pendampingan untuk mengoptimalkan peran edukasional televisi, di Internet pun pendampingan oleh orangtua tetap diperlukan kendati kadarnya rendah.

Yogyakarta, HU *Bernas*, Jumat, 13 September 1996



## KECENDERUNGAN SEKSUAL KAUM MUDA DAN NILAI-NILAI KELUARGA



PERILAKU seksual anak-anak belakangan ini disinyalir nyaris mengalami perkembangan tak terkendali. Bahkan bagaimana cara melampiaskan sudah banyak yang mengetahui, dengan bersepeda bersama beberapa temannya, mereka melampiaskan hasrat seksualitas mereka di tempat pelacuran kumuh. Dan tanpa rasa khawatir, mereka lakukan dorongan biologis itu tanpa mengindahkan penyakit kelamin. Sungguh mengerikan!

Begitulah paragraf pengantar yang ditulis mengawali laporan Zubaidah Moestajab M, tentang *Pelampiasan Seks Anak-anak* di sebuah daerah kumuh di Surabaya sebagaimana dipublikasikan Majalah *Liberty* edisi No. 1777, Juli 1992.

Pembaca boleh percaya boleh tidak, di Banjarmasin, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya, seperti diberitakan sebuah koran Surabaya, sedikitnya ada 299 orang remaja usia sekolah mengidap penyakit kelamin. Dari jumlah itu, 76 persen di antaranya berusia 16 tahun ke bawah. Mereka yang terkena GO (*gonorhea*) 132 orang dan siphilis 72 orang, selebihnya penyakit kelamin lainnya.

Hal yang sama juga dialami kaum muda di berbagai kota, hanya tidak diungkapkan secara transparan. Di Malang misalnya, ada anak ingusan yang kerjanya mencuri sepeda sekadar untuk bisa menyalurkan hobi berkencan dengan WTS.

Tanpa mengesampingkan penghargaan yang tinggi kepada kaum muda kita yang berprestasi dan memiliki aktivitas positif, cacat sosial itu jelas meresahkan. Merupakan tamparan yang menyakitkan bagi para orangtua dan pendidik yang memandang arti penting posisi kaum muda bagi kelangsungan hidup berbangsa

dan bernegara yang berbudaya. Sudah demikian parahkah demoralisasi itu melanda kaum muda? Mengapa dan bagaimana menyiasati fenomena seperti itu?

## EFEK GLOBALISASI

Globalisasi teknologi dan informasi ternyata tidak seratus persen membawa berkah. Kekurangpahaman dalam menempatkannya secara baik dan benar justru mengundang marabahaya, azab dan bisa jadi kesengsaraan. Generasi muda di sebagian Kalimantan dan Batam misalnya, sudah bisa menangkap “*dial-aporn*”, jaringan televisi tengah malam yang hanya pantas ditonton oleh orang dewasa. Apalagi dengan sistem antena parabola, rasanya sulit berkata ‘tidak’ terhadap masuknya siaran-siaran pornografi yang dipancarkan oleh stasiun televisi mancanegara.

Di sejumlah kota besar, bahkan sudah merambah ke kampung-kampung, kaset-kaset video porno dan kekerasan secara rutin ditawarkan dari pintu ke pintu. Kendati secara yudisial itu ilegal, *toh* hukum positif tak sepenuhnya ampuh untuk menangkalnya. Film-film kekerasan dan berita-berita pers tentang kejahatan perkosaan secara kronologis diulas tuntas dan lugas, persis seperti ensiklopedia. Gedung-gedung bioskop sendiri, tak cukup punya nyali – apalagi konsekuen – melarang penonton di bawah usia 17 tahun jika film yang bersangkutan memang mempersyaratkannya. Bahkan, TVRI yang *notabene* adalah TV pemerintah, juga mulai *latah* memutar film-film dewasa pada tayangan *prime time*. Lantas, mau dibawa ke mana sebenarnya generasi ini?

Seperti diberitakan berbagai harian, di depan peserta Konvensi Partai Demokrat pada pertengahan Juli 1992, Bill Clinton, kandidat presiden AS tersebut berpidato dengan tema pokok *Put the People First*. Porsi terbesar pidato Clinton, dan juga Gore sebagai calon wapres tertuju pada masalah nilai-nilai keluarga (*family value*).

Siapakah yang bisa memastikan apa motivasinya sehingga mereka penuh perhatian kepada nilai-nilai keluarga? Apakah sekadar ingin menepis tuduhan kubu Partai Republik yang sudah memojokkannya dengan membangun citra seakan-akan Demokrat telah kehilangan nilai-nilai keluarga, karena memberikan dukungan kepada para ibu yang tak bersuami (*single mother*) dan aksi *pro choice* (dalam perkembangan selanjutnya dianggap *pro-aborsi*)? Ataukah semua itu hanya retorika gaya Amerika agar mereka bisa mulus “nongkrong” di Gedung Putih? Ataukah mereka ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah dua di antara beberapa gelintir orang Amerika yang “baru” menyadari pentingnya nilai-nilai keluarga?

Kita memang tidak berkepentingan dan tak pula membutuhkan jawabannya. Namun, berita itu cukup menarik perhatian manakala dihubungkan dengan keadaan di Amerika yang 20 persen generasi mudanya telah terbiasa melakukan hubungan seks di luar nikah pada umur 14 tahun, sekitar 30 persen pada umur 17 tahun, dan lebih dari 70 persen pada umur 19 tahun. Sampai dengan bulan Maret 1987 saja, pasangan di luar nikah (*kumpul kebo*) di negara “polisi dunia” itu telah mencapai 2.334.000 pasangan, meningkat 130.000 pasangan dari tahun sebelumnya.

Demikian halnya dengan angka-angka perceraian (*divorce*) dan aborsi. Bahkan mereka sudah mulai membangun suatu komunitas baru bernama “*The Postmarital Society*.” Akibatnya, persentase *single parent children* (anak dengan satu orangtua) dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Keadaan yang sama, seperti dilaporkan Majalah *The Plain Truth* edisi April 1989 dengan sampul depan yang mencolok dalam tanda seru besar berjudul *Sex: The Big Risk!* (Seks: Risiko Tinggi!), juga terjadi di negara lain. Di Italia misalnya, hasil riset menunjukkan, 70 persen generasi mudanya sudah melakukan hubungan seks pada umur 15 tahun, lebih dari tiga persen di antaranya pada umur 17 tahun.

Di bekas Uni Soviet, 87 persen kaum pria dan 60 persen wanitanya telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Di negeri beruang itu, 75 persen dari kaum wanita tersebut menikah dengan pasangan seks pertamanya, dan pada laki-laki hanya 28 persen.

Degradasi nilai-nilai, demoralisasi dan dehumanisasi di era globalisasi informasi ini nampaknya memang sulit dibendung. Ketika moralitas menjadi salah satu fragmen budaya manusia yang beradab, antimoral menjadi segmen lain yang berusaha menembusnya dengan beragam cara. Dan nun di bumi belahan Utara, tepatnya di negara-negara Barat, lambat namun pasti, perilaku-perilaku yang kita anggap menyimpang itu telah memperoleh legitimasi (pengabsahan). Bahkan disadari atau tidak, fenomena tersebut juga sudah merembet ke Bumi Pertiwi.

Efek globalisasi informasi? Nampaknya begitu. Dewan Riset Nasional AS sendiri, dalam *The Risking the Future* mengakui bahwa program-program televisi dan periklanan pada umumnya begitu gamblang mengekspose bagaimana menjadi seksi, teknik-teknik dan diskusi kenikmatan seksual. Sedikit sekali yang membicarakan soal bagaimana pertanggungjawabannya.

## REAKTUALISASI NILAI

Hal yang ingin dikemukakan di sini ialah makna penegasan sejumlah pakar tentang peranan strategis pendidikan untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Terminologi kemajuan dan pembangunan bangsa seyogyanya dimaknai sebagai upaya sadar yang dilakukan untuk peningkatan peradaban, sekaligus menggapai obsesi tentang manusia yang berbudaya.

Isi pendidikan, dalam hal ini pendidikan nilai, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah dan di masyarakat, termasuk peran sentral orangtua dan media informasi sudah saatnya melakukan introspeksi. Adakah yang salah dalam pelaksanaannya? Ataukah karena perhatian dan kontrol kita kepada konsumsi informasi kaum muda amat terbatas?

Barangkali ada yang berkilah bahwa pendidikan nilai sudah demikian sarat dalam muatan kurikulum pendidikan sekolah. Memang benar, namun kenyataan membuktikan bahwa hal itu hanya menjangkau aspek kognitif peserta didik, belum sampai kepada ranah afektifnya.

Dalam keluarga sendiri, mobilitas orangtua sudah *over* dinamis, sehingga kontak dengan anak-anak, kebiasaan mendongeng tentang suriketauladanan, bahkan mengajari kebiasaan yang baik di rumah, sudah menjadi barang yang mahal. Alhasil, kebutuhan akan penanaman nilai-nilai moral, akhlak dan budi pekerti sebagai bagian dari pelestarian sistem nilai budaya harus dilacak oleh mereka sendiri. Di sini, kaum muda yang keliru melangkah bisa tersesat.

Siapa yang harus disalahkan? Kiranya tak perlu mencari kambing hitam. Sebab, kehidupan berjalan terus tanpa henti. Demikian halnya dengan tatanan sosio-budaya, selalu berubah. Kemana perubahan itu terjadi, negatif atau positif, kita sendiri yang mewarnainya.

Barangkali, dekadensi moral, pelacuran atau prostitusi, kekerasan dan kejahatan, sekali pun pahit harus hadir di muka bumi ini, agar agama dan nilai-nilai keluarga semakin eksis dan sangat penting diperhatikan oleh manusia. Ya, jawaban kita adalah reaktualisasi ajaran agama dan nilai-nilai keluarga. Soal agama dan ketaqwaan kepada Tuhan merupakan tanggung jawab khusus masing-masing pemeluknya. Sedangkan nilai-nilai keluarga Indonesia, sangatlah universal, tanggung jawab kita semua. Marilah, informasi yang menyesatkan kaum muda kita rekayasa dan kita arahkan menjadi informasi yang meluruskan. Di sini efektivitas kontak dengan anak-anak menjadi taruhannya.

Jakarta, HU *Suara Karya*, Sabtu, 10 Oktober 1992.



## LANGKANYA PENDIDIKAN KREATIF



TERLEPAS dari berbagai kekurangan dan kelemahan karena memang ‘tiada gading yang tak retak’, Pemilu 7 Juni 1999 dinilai berbagai kalangan relatif jurdil, luber dan demokratis. Di wilayah yang tergolong aman, dua fenomena menarik mengemuka, yakni, *pertama*, kuatnya partisipasi politik yang diindikatori antrean panjang di mayoritas TPS. Gejala ini di luar dugaan, sebab selain wacana situasi politik menjelang Pe-milu masih diwarnai ketidakpastian dan prakiraan munculnya huru-hara, juga karena stelsel daftar yang diberlakukan calon pemilih belum sepenuhnya efektif.

*Kedua*, fenomena psikopolitik yang berkembang di tingkat konstituen. Nuansa kegembiraan dan euphoria seolah-olah inilah pertama kali mereka mengikuti Pemilu sangatlah nyata dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya. Agaknya, kehendak untuk menyelenggarakan Pemilu jurdil, demokratis dan bernuansa reformasi bukanlah isapan jempol belaka.

Jika dicermati serius, barangkali cukup banyak korelat penentu ledakan partisipasi dan psikopolitik yang terjadi. Bisa karena kinerja para pemimpin partai dan elite politik, kendati variabel ini diragukan mengingat ada kecenderungan justru keduanya yang mengembangkan wacana politik menakutkan. Bisa pula karena kesadaran berdemokrasi sudah mulai tumbuh secara positif. Atau, dapat pula karena tuntutan perubahan menuju Indonesia Baru yang demikian kuat.

Namun di luar ragam korelat tersebut, faktor penentu paling dominan bagi kuatnya partisipasi dan psikopolitik yang kemudian menghasilkan Pemilu sejuk, damai, dan tanpa kekerasan agaknya adalah nilai tinggi kreativitas. Kreativitas manakah yang memiliki kontribusi nyata atas terselenggaranya Pemilu damai di mayoritas wilayah?

## FENOMENA IKLAN PEMILU

Kontribusi terbesar berasal dari penyebarluasan kreativitas yang dikemas bingkai *entertainment*. Ini tecermin dari sajian iklan partai dan iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik sehingga membuat calon pe-milih menepis berbagai keraguan Pemilu berjalan penuh kekerasan. Bahkan impuls ketakutan yang semula menggumpal akibat prolog kerusuhan sosial dan kekerasan politik jauh sebelum Pemilu, menjadi cair seketika. Berganti keriang menyongsong datangnya detik-detik menentukan yang dianggap sebagai awal perjalanan bangsa menuju penyelesaian berbagai krisis.

Kefasihan kalangan muda, anak-anak bahkan ibu-ibu rumah tangga menirukan gaya Gus Dur dan Matori mengiklankan partainya dengan langgam *pelesetan* se-hingga berbunyi, *maju tak gentar, membela yang benar bersama... Pil KB!* Atau menirukan potongan iklan la-yanan masyarakat dari Kelompok Kerja Visi Anak Bang-sa dengan mengatakan, *makanya, pilih partai yang ba-nyak duitnya!* Demikian pula *pelesetan* iklan partai seperti *Golkar Bau*, partai penipu, bersatu untuk maju; PKP, partai yang begitu akrab dalam keseharian menjelang Pemilu. Termasuk kalimat *inga... inga... badaftar rame-rame* yang dilafalkan Frida Pitoy dengan kerlingan mata menjadi sangat populer. Sementara, kemunculan figur-figur *entertainer* seperti Mandra, Bendot, Basuki, Timbul, Nunung dan lain-lain menambah pencitraan bahwa Pe-milu, selain penting juga tidaklah menakutkan sebagaimana digambarkan kebanyakan analis.

Kreativitas ditempatkan sebagai korelat karena psikologi mengajarkan jiwa manusia dapat mengalami kondisi lelah (*fatigue*). Dalam rentang waktu menjelang Pemilu — ketika Pemilu diragukan pelaksanaannya — para calon pemilih didera luberan informasi yang luar biasa gencar. Informasi politik yang simpang siur, wacana politik lokal yang karut-marut, perang pernyataan antar elite, dan belum menentunya situasi ekonomi negara berdampak buruk pada sosiopsikologis masyarakat.

Namun, kehadiran kreativitas yang menyelusup melalui layar gelas (televisi) serta kartun-kartun segar dengan dialog menggelitik yang ditampilkan media cetak ternyata mampu mengurangi tingkat stres masyarakat sehingga tak sampai depresi, agresif dan apolitis. Faktanya, tampilan kreatif dalam kampanye pun mengundang kerumunan orang untuk menonton dan menikmati kegembiraan. Terajutnya satu kreativitas dengan kreativitas lain terbukti juga mengurangi ekses negatif kampanye pengerahan massa dengan indikasi 'sedikit' korban dan kerusakan dibanding kampanye Pemilu 1997. Padahal, kampanye Pemilu 1999 diikuti 48 parpol atau 16 kali lipatnya.

## PENDIDIKAN KREATIF

Jika ekspresi kreativitas dapat menembus tembok tebal kesumpekan sosial politik, maka pasca Pemilu 1999 — termasuk saat-saat menegangkan menjelang SU MPR — sebenarnya dapat ditarik pelajaran darinya. Ekspresi kreativitas sangat mungkin mampu mendobrak kegalauan ekonomi, bahkan ragam karut-marut lingkungan dan sosial budaya suatu masyarakat. Bila selama ini berkembang anggapan perkembangan peradaban Eropa dan Amerika jauh lebih cepat dibanding perkembangan peradaban Asia minus Jepang, Korea, Singapura dan Hongkong. Maka hal itu disebabkan potensi kreatif orang-orang Asia masih terkungkung kultur konformitas sosial dan harmoni.

Kultur konformitas dan harmoni yang menjadi ciri khas budaya Timur ini tak hadir dengan sendirinya, melainkan karena diperkuat sistem pendidikan yang belum demokratis. Sebab hanya dalam sistem pendidikan yang demokratislah konformitas dan harmoni dapat dikritisi. Dalam sistem pendidikan itu pula pendidikan kreatif dan kreativitas dapat berkembang sempurna. Jika kemudian masih muncul sejumlah kreativitas yang bisa berlaku sebagai korelat bagi anasir sistem sosial, hal itu pastilah diciptakan segelintir kalangan terdidik yang memang memiliki ruang gerak untuk itu.

Mahalnya “harga” kreativitas karena kelemahan pendidikan kreatif dan terkait sistem pendidikan yang belum demokratis sangat merugikan berbagai segi kehidupan bangsa. Orang-orang kreatif seperti Garin yang berada di balik 12 iklan layanan masyarakat soal Pemilu dan beberapa nama di balik iklan-iklan menarik lain, jumlahnya tak banyak. Padahal, setiap segmen kehidupan, baik sosial, ekonomi, kebudayaan, iptek, politik bahkan kehidupan keluarga pun sangat membutuhkan orang-orang kreatif.

Nilai tinggi kreativitas dan pendidikan kreatif sebenarnya tak sulit dimassalkan. Hal ini tergantung pada kemauan banyak pihak. Satu di antaranya ialah mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Reformasi pendidikan yang didengung-dengungkan sejumlah kalangan haruslah ditangkap serius para praktisi pendidikan. Dunia pendidikan mesti menyediakan ruang gerak bagi tumbuh kembang kreativitas dengan memperlonggar bentuk-bentuk kungkungan tak penting yang selama ini membelenggunya. Sekadar contoh mikro, tidak boleh lagi seorang guru hanya berdiri di depan kelas mengajarkan apa kata buku dan melakukan kinerja pendidikan seperti tertera dalam kurikulum baku.

Perlu dikembangkan suasana demokratis yang memungkinkan peserta didik bertanya sebaik dan secerdas mungkin, berkreasi, menemukan apa yang menjadi kegalauan ilmiahnya, bahkan memenuhi kebutuhannya sendiri akan

ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan dan penghidupannya. Tugas guru mesti diarahkan seoptimal mungkin sebagai fasilitator, bukan penentu masa depan peserta didik sebagaimana berlangsung selama ini. Dalam suasana ajar belajar demokratis, pendidikan kreatif dan kreasi kreativitas dapat muncul, berkembang dan tumbuh sempurna.

Jakarta, HU *Republika*, Jumat 16 Juli 1999



Bab  
7



**OTAK DAN WATAK  
TERDIDIK IBU MANUSIA**





## **OTAK DAN WATAK TERDIDIK IBU MANUSIA**



ANTARA otak dan watak, kendati mempunyai kemiripan metatesis, ternyata tidak berbasis pada konsep dan perilaku yang sama. Menurut Sprey, Hubel dan Weisel – pemenang Nobel Kedokteran 1981 – konstruksi jaringan otak hanya akan hidup bila diprogram melalui berbagai rangsangan.

Tanpa dirangsang oleh terapi pendidikan dan latihan misalnya, otak manusia akan bodoh. Sebab, didalam otak manusia, terdapat pusat-pusat jaringan potensial yang hanya akan berfungsi jika mendapatkan rangsangan. Pusat-pusat jaringan tersebut mencakup beragam kemampuan mulai dari potensi mengikuti aturan, analisis, matematika, bahasa, dan sebagainya hingga perasan dan imajinasi. Itulah sebabnya manusia yang memiliki otak terdidik disebut pintar, pandai, berkemampuan, cerdas, bahkan mungkin jenius.

Berbeda dengan otak yang cara kerjanya bersifat “teknik”, tidak demikian halnya dengan watak. Kendati pusat jaringan watak juga berada di dalam otak, ia tidak dengan sendirinya dapat berfungsi rasional. Sebab seringkali watak dikaitkan dengan peran penting hati manusia yang dalam istilah psikologi disebut sebagai otak emosional (lihat Le Doux, 1996; juga Goleman, 1995). Untuk dapat disebut manusia yang manusiawi, berkepribadian integral, beradab, memiliki kesadaran diri dan kendali dorongan hati, memiliki empati dan kecakapan sosial, manusia tidak sepenuhnya dapat mengandalkan otak terdidik. Lebih penting dari itu adalah dimilikinya watak terdidik.

Agaknya, elemen fundamental itulah yang dilupakan banyak orang ketika harus berhadapan dengan kasus banyaknya kaum wanita yang menolak untuk menjadi ibu manusia. Kendati bukan perilaku baru, kabar menghebohkan dari Jakarta soal keberanian sejumlah wanita yang menolak menjadi ibu manusia

melalui cara-cara yang menyinggung perasaan sosial, menjadikan kita perlu melakukan refleksi guna menjawab pertanyaan mendasar: apakah sebutan ‘ibu’ tidak lagi sesakral dan seterhormat yang kita ketahui sehingga mesti ditolak?

## INTERVENSI PENDIDIKAN

Ketika dunia dilanda eksplosif penduduk yang berakibat pada makin minimnya distribusi kemakmuran dan indikator-indikator lain kesejahteraan manusia, banyak negara menaruh komitmen tinggi untuk “mengendalikan” kaum wanita selaku pemegang hak reproduksi melalui intervensi pendidikan dan kebijakan publik. Hal itu dilakukan mengingat perhatian terhadap wanita inheren dengan kepentingan negara. Negara melihat peran ideologis wanita yang sangat penting.

Di bidang peningkatan partisipasi pendidikan misalnya, perhatian pemerintah begitu serius dan membuahkan hasil memadai. Data Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) tahun 1994 menunjukkan, tingkat partisipasi pendidikan wanita pada jenjang SD (48,37 persen); SLTP (45,76 persen); SLTA (45,06 persen) dan PT (36,32 persen). Tentu saja, selama beberapa tahun belakangan, partisipasi itu makin meningkat. Untuk apa sebenarnya kaum wanita diharapkan berpendidikan setinggi-tingginya? Sebagai wujud atas persamaan hak pendidikan, sebagai pintu terbukanya lapangan kerja, sebagai penguatan *bargaining power*, atau sekadar mewujudkan demokratisasi pendidikan?

Apa pun jawabannya, satu hal yang pasti ialah, intervensi pendidikan terhadap kaum wanita telah membawa dampak serius karena tidak diimbangi dengan antisipasi yang dini atas perubahan sosial yang bakal terjadi. Penyusunan kebijakan publik hanya terpana oleh kenyataan bahwa peningkatan pendidikan wanita memiliki kontribusi yang positif terhadap penurunan angka kelahiran, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusun kebijakan publik tidak kekurangan alasan untuk mendukung pendidikan bagi wanita karena mereka diasumsikan memiliki peluang untuk menopang kehidupan yang sehat dan bahagia dalam keluarga. Sebab pendidikan bagi wanita membawa manfaat penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang berpendidikan kelak memiliki keterampilan, informasi, dan kepercayaan diri yang dibutuhkannya untuk menjadi orangtua, pekerja, dan anggota masyarakat.

Wanita yang berpendidikan juga cenderung lebih produktif di tempat kerja, mendapatkan upah (penghasilan) lebih baik dan lebih selektif dalam membelanjakan uang. *Rate of return* (nilai kembalian) atas investasi untuk

pendidikan wanita lebih tinggi dibanding investasi untuk pendidikan laki-laki. Riset di berbagai negara menunjukkan, satu tahun tambahan untuk pendidikan wanita, menambah masukan dimasa depan 15 persen, sementara pada pria hanya 11 persen.

Sebagai kunci pemegang reproduksi, seorang wanita yang berpendidikan cenderung menikah pada usia yang lebih lanjut dan memiliki anak lebih sedikit. Hasil-hasil riset yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan, bahwa bersekolah satu atau lebih lama bagi anak wanita mengurangi tingkat kesuburan 5 sampai 10 persen. Demikian anak-anak dari ibu yang berpendidikan, cenderung lebih mampu bertahan hidup.

Sayang sekali dampak-dampak positif tersebut sering digunakan *kebablasan*. Kontrol sosial masyarakat makin merenggang karena pola hidup yang cenderung impersonal. Ditopang merebaknya seks bebas dan terbukanya peluang-peluang kontraseptif. Menjadikan lembaga perkawinan yang memberikan keabsahan moral dan agama untuk melakukan hubungan seks yang sehat dianggap sebagai “hanya persoalan selembaar kertas.” Penolakan menjadi ibu lantas tak terbendung, baik yang dilakukan secara “ilegal” melalui penundaan perkawinan namun hidup bersama layaknya suami isteri, maupun yang ilegal dengan cara menolak melahirkan jabang bayi, calon manusia.

Hal lain yang nyaris tak diantisipasi ialah konsekuensi logis dari intervensi pendidikan atas wanita, yakni keterbukaannya untuk secara sadar mengakui bahwa dirinya sudah memiliki otak terdidik. Perilaku otak terdidik yang berbasis rasionalitas dan akal sehat melahirkan argumentasi lain berupa anggapan dasar bahwa menjadi ibu manusia yang didahului oleh perkawinan sah dan kehamilan dianggap sebagai pengganggu potensial kiprah wanita terdidik. Sebab pencapaian pendidikan pada dasarnya merupakan pintu pertama bagi terbukanya peluang kerja dan karier optimal.

## **KERUGIAN EDUKATIF**

Banyak sekali sebutan ‘ibu’ yang tidak memiliki relevansi apapun kecuali kepopulerannya. Ada ibu pertiwi, ibu negara, ibu kota, ibu jari, dan sebagainya. Namun jika pada suatu hari disebut-sebut soal Hari Ibu, tentulah yang dimaksudkan adalah peringatan tentang peran penting ibu manusia. Itulah sebabnya segala aktivitas seremonial diarahkan untuk menggali, mereaktualisasi dan merekognisi tali temali berkaitan dengan fungsi strategis seorang ibu, baik didalam maupun di luar rumah.

Sebagai bangsa Timur, tak ada kesulitan berarti guna mencandra fungsi dan peran strategis yang melekat pada figur seorang ibu. Tanpa perlu merincinya

satu per satu, wacana yang sarat kekayaan kultural hampir disadari dan dimengerti setiap orang. Namun seringkali proses akulturasi, kontak sosial-edukatif dan informasi liar yang merembes tak terbendung dalam pergaulan global menghasilkan konsep dan pemahaman yang lain. Penolakan menjadi ibu yang dianggap menjadi kompleks adalah bukti daripadanya.

Jika kita cermati serius kehidupan wanita dan kalangan selebritis Barat, terdapat indikasi kuat untuk mengatakan bahwa menjadi seorang ibu manusia merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Sekalipun untuk itu mereka seringkali menjadi *single parent* yang harus berjuang keras sendirian guna meletakkan fundasi bagi kehidupan masa depan manusia yang dilahirkannya. Oleh karenanya – dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tak terungkap (*hidden factors*) – agak mengherankan jika di kalangan kita bangsa Timur justru beramai-ramai menolak menjadi ibu.

Mendapati kenyataan itu, sudah saatnya dibangun kesadaran kolektif bahwa penolakan menjadi ibu menimbulkan kerugian edukatif sangat besar. Selain lunturnya peran strategis karena ‘ibu’ mengalami degradasi makna; juga betapa sia-sia investasi yang telah ditanamkan untuk pendidikan calon ibu. Masalahnya, dengan cara apa kesadaran kolektif itu bisa dibangun kembali dalam situasi dunia yang makin egaliter dan penuh tantangan kultural ini?

Jawabannya tentu bukan persoalan mudah. Namun dengan keyakinan bahwa otak terdidik dan watak terdidik perlu diseimbangkan agar integral dengan pribadi manusia yang berperadaban, maka sudah saatnya intervensi pendidikan diarahkan untuk tidak melulu mengasah otak, namun juga mengasah watak. Dengan demikian, usulan banyak kalangan agar pendidikan watak mendapat porsi lagi dalam sistem pendidikan nasional, relevan dipertimbangkan. Tentu saja tidak hanya penting bagi calon ibu, tapi juga calon bapak.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 22 Desember 1997)



## **PENDIDIKAN BAGI ANAK WANITA: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN**



KOMITMEN pemerintah terhadap peran wanita sebenarnya sudah baik. Satu di antaranya tercermin dalam besaran anggaran (*gender budgetting*) yang diperuntukkan pembinaan mereka. Jika pada 1996-1997 pemerintah menyediakan plafon anggaran sebesar Rp 1.364.940 juta, maka pada tahun 1997-1998 meningkat menjadi Rp 2.097.216 juta. Walaupun demikian, upaya pemerintah itu masih kurang dapat memposisikan kaum wanita secara layak dan proporsional. Belum tersimpul upaya serius pemberdayaan mereka mengingat perhatian terhadap wanita inheren dengan kepentingan negara. Negara memang melihat peran ideologis wanita yang sangat penting. Namun begitu, sejauh ada kesempatan, negara kenyataannya masih memerlukan lembaga kontrol yang sangat ketat atas segala kiprah mereka.

### **NILAI KEMBALIAN**

Komunike bersama KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark, Maret 1995 antara lain merekomendasikan pentingnya upaya peningkatan pendidikan wanita. Pendidikan wanita juga menjadi perhatian serius dan tekanan khusus dalam Konferensi Perempuan di Kairo dan Beijing, dalam KTT Pendidikan untuk Semua (EFA) di Jomtien dan New Delhi, serta dalam pertemuan antarmenteri pendidikan sembilan negara berpenduduk besar di Bali pada 1995.

Tentu saja perhatian itu berpengharapan adanya *rate of return* (nilai kembalian) sekiranya pendidikan wanita bisa dioptimalkan. Sebut misalnya adanya temuan bahwa peningkatan pendidikan wanita berkolerasi positif dengan penurunan angka kelahiran, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat. Di sisi lain, data publikasi UNESCO (*Education for All: Status and Trends*, 1993) menunjukkan, ada korelasi antara tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) pendidikan dengan angka bebas buta aksara pria dan wanita.

Di negara-negara yang APM-nya rendah, perbandingan (rasio) kemelekhurufan pria dan wanita sangat kontras. Misalnya, Pakistan yang APM-nya cuma 29 persen, rasio itu 0,45. Artinya, hanya ada 45 wanita yang melek huruf di antara 100 pria yang melek huruf. Dibanding negara-negara lain seperti Mesir, Bangladesh, India, Nigeria dan Cina, perhatian terhadap pendidikan wanita di Indonesia tergolong lebih intens. Terbukti, rasio kemelekhurufan antara pria dan wanita adalah 0,81. Lebih tinggi dari negara-negara itu yang masing-masing 0,54; 0,47; 0,55; 0,63; dan 0,73.

Namun begitu, pendidikan wanita di Indonesia bukan berarti tidak bermasalah. Selain karena masih terjadi diskriminasi, pendidikan wanita banyak diwarnai nilai-nilai budaya dan bagaimana kaum wanita diperlakukan oleh masyarakat. Sebab seperti diketahui, APM Indonesia tinggi, yakni 96,7 persen. Secara ideal rasio tersebut mestinya seimbang. Tapi kenyataannya tidak. Padahal, Meksiko yang APM-nya 98 persen, rasio kemelekhurufan tersebut 0,95.

Persoalannya, dengan strategi apa optimalisasi pendidikan wanita bisa dicapai? Tidak banyak referensi untuk itu. Namun dari publikasi UNICEF (*The State of the World's Children*, 1996) dapat ditarik kesimpulan bahwa pengabaian pendidikan wanita merupakan mata rantai yang tidak bisa dilepaskan dari terbaikannya pendidikan anak-anak wanita sebelumnya. Menurut UNICEF, di antara anak-anak yang tidak bersekolah, jumlah anak wanita dua kali lebih banyak dari daripada anak-anak pria.

Memberikan perhatian dan aksesibilitas dengan menawarkan pendidikan setinggi mungkin pada anak wanita merupakan salah satu cara pasti untuk memberikan kekuatan lebih besar yang, pada gilirannya akan memperdayakan (*empowering*) mereka untuk memilih jenis kehidupan yang ingin dijalani.

Kesempatan seperti itu tentu saja bukan hal istimewa. Sebab Konvensi Hak-hak Anak dan Konvensi Pembatasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita menetapkan pendidikan sebagai hak-hak asasi manusia yang mendasar. Karena itu tepat kiranya jika pendidikan sekolah dan pesantren yang semula hanya menerima siswa (santri) pria membuka kesempatan lebih luas untuk mereka.

Kiranya cukup alasan untuk mendukung pendidikan bagi anak wanita karena mereka diasumsikan memiliki peluang untuk menopang kehidupan yang sehat dan bahagia dalam keluarga. Pendidikan bagi anak wanita membawa manfaat penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak wanita yang berpendidikan kelak memiliki keterampilan, informasi, dan kepercayaan diri

yang dibutuhkannya untuk menjadi orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat yang lebih baik. *Rate of return* (nilai kembalian) atas investasi untuk pendidikan wanita lebih tinggi dibanding investasi pendidikan untuk laki-laki.

## **BEBERAPA REKOMENDASI**

UNICEF yang mengidentifikasi pengalaman di berbagai negara dengan tingkat pendidikan wanita yang lebih baik, memberikan catatan dalam bentuk rekomendasi untuk optimalisasi pendidikan anak wanita melalui sejumlah jalan. *Pertama*, intensifikasi keterlibatan orangtua dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat hendaknya bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum dan perencanaan pendidikan anak. Jadi, kurikulum dan perencanaan pendidikan yang sifatnya terpusat pada negara sedikit memberikan kontribusi berarti.

*Kedua*, menarik biaya rendah dan menekankan fleksibilitas penjadwalan. Pendidikan dasar (di Indonesia hingga tingkat SLTP) harus benar-benar bebas biaya. Jika memungkinkan, baiknya ada beasiswa atau tunjangan keluarga untuk menggantikan tenaga anak wanita yang sering dianggap sebagai tenaga kerja rumah. Kecuali itu, jadwal sekolah sebaiknya luwes sehingga memungkinkan anak masih bisa membantu di rumah selain bersekolah.

*Ketiga*, sekolah sebaiknya dirancang dekat dengan rumah dan lebih memberi peluang kepada guru-guru wanita. Asumsinya, banyak orangtua enggan melepaskan anak-anak wanitanya pergi jauh untuk bersekolah dan banyak orangtua lebih suka jika anak-anak wanitanya dididik guru-guru wanita.

*Keempat*, mempersiapkan secara dini untuk bersekolah. Anak wanita akan mencapai prestasi terbaik jika mereka mendapat perhatian yang layak semasa balita. Kondisi tersebut akan meningkatkan harga diri dan mempersiapkan mereka lebih baik untuk bersekolah.

*Kelima*, menyediakan kurikulum yang sesuai. Bahan yang dipelajari di sekolah sebaiknya sesuai dan cocok dengan latarbelakang anak wanita. Materi sebaiknya disampaikan dalam bahasa setempat dan perlu dihindari terjadinya *stereotipe gender*.

Beberapa rekomendasi tersebut memang sulit terlaksana di Indonesia mengingat politik pendidikan yang sentrifugal dan kemampuan ekonomi negara yang terbatas. Namun mengingat fungsi sentral yang diperankan anak-anak wanita sebagai calon ibu dan tiang negara, maka diperlukan kemauan politik, kesamaan persepsi, arahan yang jelas serta aksi yang nyata. Sebab ada tesis, pendidikan mempunyai pengaruh yang luas terhadap perubahan di semua sektor pembangunan. Hal itu juga berarti, jangan sampai terjadi slogan emansipasi wanita, momentum Hari Kartini, Hari Ibu, dan lain-lain gerakan nasional yang

bersifat memberdayakan wanita hanya menjadi retorika belaka. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih mendasar untuk mencapai peradaban yang lebih baik dan kemajuan sosial daripada pengembangan manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Jakarta, *HU Media Indonesia*, 22 April 1997



## ABORSI & DILEMA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



SEKSUALITAS merupakan konsep yang mencakup kapasitas fisik seseorang terhadap rangsangan dan kenikmatan seksual maupun nilai-nilai pribadi atau sosial yang dikaitkan baik pada perilaku seksual pembentukan identitas seksual maupun *gender* (Rurh Dixon-Muller, 1993). Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa terdapat kaitan erat antara gender dan seksualitas.

Dalam pola hubungan seksual antara wanita dan laki-laki, terdapat indikasi kuat dominasi laki-laki akibat rendahnya status dan peran wanita yang tampak dan lemahnya *bargaining position* dalam proses pengambilan keputusan serta diabaikannya hak-hak reproduksi.

Seperti diketahui, secara biologis wanita dan laki-laki adalah makhluk berbeda. Perbedaan itu mendapatkan artikulasi kultural yang menghasilkan anggapan bahwa wanita merupakan makhluk lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) wanita secara jelas dimanfaatkan laki-laki dalam praktik seksual yang tidak sehat. Ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi lelaki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.

Mempertegas hal tersebut, Elizabeth Eviota (1992) sebagaimana diungkapkan dalam *The Political Economy of Gender, Women and the Sexual Division of Labour in the Philippines* menyindir keras bahwa relasi seksual adalah relasi sosial dan merupakan relasi kekuasaan tempat laki-laki mengontrol seksualitas perempuan.

Agaknya, itulah yang terjadi dalam kasus aborsi atau lebih tepatnya *infanticide* puluhan calon bayi yang tak berdosa sebagaimana ditemukan di Jakarta beberapa waktu berselang. Sebenarnya, keterlibatan sejumlah dokter, badan dan pasien dalam kasus *abortus provocatus criminalist* tidak hanya terjadi di perkotaan.

Di perdesaan pun para dukun bayi dan bidan desa serta masyarakat luas telah sejak lama mempraktikkannya.

Mencuatnya kasus tersebut sehingga menyinggung perasaan sosial masyarakat luas mengharuskan kita perlu meninjau ulang program kependudukan sebagaimana berlangsung selama ini. Sebab penanganan oleh polisi atas apa yang sudah terjadi tidak akan dapat menyentuh masalah sebenarnya, kira-kira sama dengan soal perjudian dan prostitusi.

## DILEMA MORALITAS

Masri Singarimbun pernah menyatakan bahwa kesadaran baru terhadap urgensi adakalanya merubah moralitas. Dalam pembangunan kependudukan, khususnya program keluarga berencana (KB/*family planning*), hal tersebut sudah dialami sejak lama. Meyakinkan kalangan agamawan (kendati kemudian berhasil) dan “mengalahkan” tradisi bukanlah upaya mudah yang bisa ditempuh dalam sekejap. Demikian halnya dengan kampanye hubungan seks yang sehat melalui penggunaan kondom karena AIDS telah merajalela.

Keberhasilan KB dan gencarnya ide tentang perspektif pemakaian kontrasepsi dalam perencanaan provisi kontraseptis menjadikan wanita dan laki-laki dari berbagai kelompok yang berbeda-beda kebutuhan telah memiliki pengetahuan tentang pilihan reproduksi yang mensyaratkan serangkaian metode.

Aborsi yang aman dengan demikian lantas juga dianggap sebagai salah satu alternatif pilihan metode kontrasepsi. Celakanya, banyak pihak telah menyalahgunakan pengertian tersebut, sehingga menganggap legal semua jenis aborsi.

Padahal, seperti dijelaskan Marge Berer (1993) dalam *Making Abortion Safe and Legal: The Ethics and Dynamic of Change*, aborsi bukan merupakan metode perencanaan kelahiran, sekalipun dari sudut pandang wanita mungkin saja aborsi adalah suatu perencanaan kelahiran. Itulah sebabnya sejak sebelum diselenggarakannya *International Conference on Population and Development* (IPCD) 1994 di Kairo hingga hari ini, aborsi tetap menjadi perdebatan marak.

Penolakan keras Paus Johannes Paulus II dari Vatikan dan negara-negara Timur Tengah terhadap dimasukkannya agenda aborsi dalam segala konsep dan program aksi IPCD, tidak menjadikan sejumlah negara Barat surut untuk mengakui aborsi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) bersamaan hak untuk mati (*euthanasia*).

Hak itulah antara lain yang menjadikan pembangunan kependudukan di Indonesia kini berada dalam dilema moral. Pada satu sisi dituntut untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan menekan angka kelahiran seminimal

mungkin dimana aborsi punya andil mensukseskannya, pada sisi lain aborsi belum sesuai dengan kaidah moral, sosial, bahkan hukum di Indonesia.

Sementara di kalangan aktivis organisasi nonpemerintah (Ornop) yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita, vonis tentang aborsi sudah dilihat dari dua sudut kepentingan: kepentingan si janin ataukah kepentingan wanita. Ada fenomena anggapan yang berkembang, jika kelahiran si janin dianggap akan menyengsarakan wanita karena harus menanggung aib dan beban pembiayaan kelangsungan hidupnya (dalam kasus hubungan seks bebas di luar nikah), maka aborsi dianggap sebagai pilihan tak terelakkan.

Kini, masalahnya terletak pada program aksi apa dan bagaimana agar aborsi tidak dilakukan sembarangan. Sebab, aborsi selain dilarang oleh KUHP juga dilarang UU Kesehatan No. 23/1992 karena bertentangan dengan agama dan moral.

## **PROGRAM AKSI**

Jika ditilik dari kondisi kekinian, praktik aborsi tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dan berbagai pergeseran yang telah terjadi dalam masyarakat. Ketika masyarakat masih bersifat agraris, kaum wanita seringkali komit terhadap fungsinya sebagai pemegang hak reproduksi. Artinya, kultur bahwa wanita memiliki tugas menghasilkan keturunan (melahirkan anak-anak) untuk regenerasi sekaligus menjamin ketersediaan tenaga kerja dalam rumah tangga masih menjadi keyakinan yang positif.

Namun, proses dialektika modernisasi dan gegap gempitanya industrialisasi menyebabkan komitmen tersebut mulai bergeser. Hal itu dimungkinkan karena wanita sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari proses tersebut. Pilihan karier dan pekerjaan, lamban namun pasti telah menjadikan wanita lebih mengandalkan akal sehat (*common sense*) ketimbang harus berkutat dengan kaidah kultural, paradigma moral dan sosial, bahkan dogmatisme agama.

Tidak sedikit wanita dewasa ini yang menganggap bahwa proses kehamilan dan kelahiran merupakan penghambat potensial bagi optimalisasi pekerjaan dan karier. Dalam situasi dimana kontrol sosial sangat mengendur, dalam zaman dimana seks bebas di luar nikah dianggap biasa, mendatangi klinik yang menawarkan jasa aborsi menjadi pilihan tak terelakkan.

Pembangunan kependudukan yang dilaksanakan pemerintah dalam banyak indikator dapat disebut sangat berhasil. Itulah sebabnya mengapa PBB seringkali memberikan penghargaan kepada Kepala Negara atas segala sukses tersebut. Satu di antara kekeliruan yang belum dibenahi dalam hubungan dengan merajalelanya praktik aborsi ialah tidak diantisipasi perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap sistem nilai.

Pemerintah belum tanggap atas perubahan sosial yang antara lain menyeret pola-pola hubungan sosial yang personal ke arah impersonal. Mestinya pemerintah menyusun agenda aksi yang memungkinkan masyarakat mengerti bahwa tindakan aborsi bukanlah tindakan legal, bahkan merugikan dan membahayakan jiwa.

Sosialisasi atas UU Kesehatan, khususnya pasal 15 dan 80, serta pasal-pasal KUHP yang bersangkutan-paut soal aborsi (Pasal 346 dan 349) perlu dilakukan optimal dan terintegrasi dengan program kependudukan lain. Peningkatan tentang bahaya, kerugian edukatif dan ekonomik yang ditimbulkannya harus terus-menerus dilakukan dengan memanfaatkan segala sarana komunikasi massa. Hal ini penting agar kita tetap menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya.

Sementara dalam tingkatan dini, sudah saatnya kita lebih terbuka terhadap perlunya pendidikan seks. Sebab, jika kita masih menganggap tabu pendidikan seks bagi anak-anak (remaja), sementara diketahui globalisasi informasi sudah demikian intensif, maka yang menjadi korban adalah generasi muda yang keliru dalam menjalani proses adopsi inovasi.

Sudah menjadi rahasia umum banyak remaja mengalami buta pendidikan seks, sehingga cenderung membabi-butakan dalam melakukan hubungan seksual. Pengetahuan dan pendidikan tentang seks yang sehat dan sesuai dengan tuntutan kaidah moral sudah saatnya diberikan secara terbuka. Tentu saja tidak harus melalui kurikulum tersendiri, sehingga memerlukan perangkat lunak dan keras yang mahal, melainkan dapat diintegrasikan dalam mata ajar lain seperti Biologi, PPKN, IPS, dan tentu saja mata ajar Pendidikan Agama. Mudah-mudahan kita belum terlambat.

Jakarta, HE *Bisnis Indonesia*, 13 Desember 1997



## PENGLONAN MANUSIA



REAKSI keras terhadap kemungkinan pengklonan manusia sebenarnya sudah lama terjadi, akan dan perlu terus-menerus dilakukan. Terutama sejak Dr Jerry Hall dan rekan-rekannya dari *George Washington University* menyatakan keberhasilannya mengklon embrio manusia pada tahun 1993 sehingga menjadi laporan utama majalah *Newsweek* dan menghebohkan seluruh dunia. Sebab, didukung kemajuan teknologi reproduksi yang sudah berhasil menyimpan (membekukan) sperma dan embrio sesuai waktu yang dikehendaki, sangat dimungkinkan rekayasa genetika menghasilkan kembaran hasil pengklonan dilahirkan dalam waktu belasan hingga puluhan tahun kemudian.

Bahwa reaksi sangat keras muncul kembali, tidak lain karena temuan kontroversial di bidang pengklonan yang dilakukan Dr Ian Wilmut dan timnya di Inggris sudah sampai pada batas mutakhir.

Sebagai bagian dari teknologi *in vitro fertilization* (era bayi tabung), ada perbedaan mendasar dari kedua temuan itu. Pada kasus Jerry Hall yang bermain-main dengan pengklonan embrio manusia di mana sejumlah sel telur diambil dan dibuahi dalam cawan petri di laboratorium, daya tahan embrio hanya enam hari lantas mati. Sementara dalam kasus Ian Wilmut, pengklonan yang diujicobakan pada binatang (domba) dilakukan tanpa pembuahan, melainkan hanya dari sel epitel kambing domba lain yang digabung dengan sel telur yang sudah diambil inti selnya melalui kekuatan listrik.

Jika para teknolog itu sudah berhasil mengembangkan sel dewasa domba menjadi domba dewasa lainnya, maka besar kemungkinan teknik yang sama bisa diterapkan pada manusia. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana nasib peradaban manusia andaikata *The Boys From Brazil* – sebuah cerita fiksi ilmiah karya Ira Levin yang mengisahkan dikopinya sel-sel Hitler dengan menggunakan teknik pengklonan menjadi Hitler-Hitler muda itu – benar-benar jadi kenyataan.

## LAYAK DITOLAK

Sejauh ini, penolakan terhadap kemungkinan riset pengklonan manusia sudah dilakukan banyak kalangan, antara lain pemerintah Perancis, Jerman, Ilmuwan Jepang dan Ilmuwan Amerika Serikat. Direktur *National Institute of Health*, AS, Harold Varmus misalnya, mengatakan bahwa pengklonan manusia jelas merupakan ide gila yang secara epistemologis tidak perlu. Bagaimanapun, katanya, kita sudah memiliki kembar identik, kita memiliki binatang dan kultur sel untuk diteliti. Mengklon manusia sungguh menjijikkan.

Dari Vatikan diketahui, Paus Yohanes Paulus II bereaksi keras dengan mengecam para teknolog yang menginjak-injak martabat manusia demi kekuasaan dan uang dengan mengkhianati segala hal. Ia menyerukan agar semua negara menyusun Undang-undang guna melarang pengklonan manusia. Sementara presiden Bill Clinton, memberi waktu selama tiga bulan kepada sebuah komite untuk meneliti dan melaporkan aspek hukum dan etika tentang itu.

Pengklonan manusia memang selayaknya ditolak. Dan penolakan itu tentu saja bukanlah sikap apriori yang tidak dilandasi apa pun. Banyak pembenaran yang sangat relevan diajukan sebagai dasar penolakan. Prof Dr Andi Hakim Nasution bahkan mengingatkan, kita jangan bermain-main dengan manusia. Sebab banyak hal elementer yang menyangkut misteri tentang manusia belum bisa dijawab. Sekalipun kemudian bisa dijawab, bukan berarti lantas pengklonan manusia menjadi layak dilakukan. Sebut misalnya soal hubungan antara manusia hasil klon itu dengan kembarannya, dengan manusia lain, dan sebagainya.

Penolakan juga bisa didasarkan atas prinsip etika riset. Seperti diketahui, objektivitas sebuah riset adalah kewajiban yang dibutuhkan bagi riset yang dapat diterima semua pihak. Namun banyak kesulitan yang dapat dihadapi untuk mencapainya. Tidak saja ada sejumlah masalah dalam pengendalian penyimpangan-penyimpangan (bias) pribadi perisetnya namun juga menyangkut beberapa masalah berkaitan dengan tata nilai yang timbul di lingkungan tempat riset dilakukan. Sejauh menyangkut riset tentang manusia, memang sulit menentukan garis tegas antara objektivitas dan etika. Tapi objektivitas haruslah menyadarkan kita akan nilai-nilai yang dianut oleh konsensus para periset dalam hubungan dengan pokok persoalan yang dirisetnya.

Oleh karena itu, konsensus para teknolog dan ilmuwan yang tergabung dalam berbagai lembaga ilmu pengetahuan di seluruh dunia sangat dibutuhkan. Jika perlu lembaga arbitrase seperti Unesco (Badan yang mengurus kerjasama pendidikan dan ilmu pengetahuan PBB) benar-benar difungsionalisasikan untuk melakukan pengawasan ketat dengan meminta agenda riset lembaga-lembaga riset yang dicurigai melakukan riset pengklonan manusia.

Jangan sampai terlambat seperti kasus riset-riset senjata nuklir. Sehingga untuk mencapai traktat pembatasan pun dilakukan bertahun-tahun dan nyaris setelah korban manusia banyak yang jatuh karenanya. Akibatnya, setiap kali sebuah negara dicurigai mengembangkan senjata nuklir, ada kendala besar yang dialami PBB untuk memantaunya. Hal itu bisa terjadi karena alih teknologi untuk teknik nuklir bukan lagi hal yang istimewa. Terutama bagi negara-negara yang diduga kaya uranium, bahan dasar nuklir yang dijadikan senjata sangat menakutkan seluruh penduduk bumi.

Kecuali itu, jika riset pengklonan manusia tidak dilarang, dikhawatirkan akan muncul hegemonik baru dalam tata pergaulan dunia. Obsesi narsistik yang sangat bernaflu menguasai dunia dalam segala bentuk itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab seperti diketahui mereka menyandarkan riset ilmiah pada ideologi-ideologi modern yang telah menjanjikan kemajuan menggiurkan di bidang Iptek untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju mampu menjadikannya sebagai komoditas yang menguntungkan ekonomi mereka.

Namun di balik itu, ada realitas kehidupan yang mengancam martabat kemanusiaan dan kelangsungan hidup manusia sebagai sebuah buah daripadanya. Sehingga lahirlah apa yang disebut manusia modern nestapa yang hidup serba dilematis, hipokrit, dan materialistik. Kemajuan yang menjanjikan kemandirian dan perbaikan taraf hidup itu justru merenggutnya. Banyak negara bangsa menjadi marginal karenanya.

## **DIMENSI AXIOLOGIS**

Jika riset tentang pengklonan manusia tidak dilarang, dan keberhasilannya dianggap sebagai keniscayaan, maka banyak dimensi axiologis yang ditabrak. Padahal dimensi axiologis merupakan tata nilai yang menjadikan martabat manusia mempunyai kedudukan dengan muatan logika dan ontologika yang jauh lebih tinggi dari sekadar proses dialektika untuk menjawab pertanyaan ilmiah.

Dimensi axiologis pertama yang ditabrak tentu saja adalah axiologis dogmatis, yakni sistem religi. Banyak pendapat yang berkembang bahwa Iptek dewasa ini telah mereduksi keimanan dan kebenaran sistem religi (baca: agama). Pengklonan manusia misalnya, akan bertabrakan dengan kaidah-kaidah yang diyakini Islam dalam hal penciptaan umat manusia oleh Allah SWT.

Sebab sejauh ini, teori penciptaan manusia belum bergeser dari keyakinan sebagaimana ditulis Al Ghazali dalam *Al-Madnun al Saghir* dalam *Al-Insan al-kamil* yang mencoba memberi tafsir berdasarkan ayat suci yang berbunyi “Dan

ketika Aku sempurnakan kejadiannya (manusia), aku meniupkan roh-ku ke dalam dirinya” (QS, 15; 29; 28; 72).

Al-Ghazali menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam ayat diatas. Pembentukan (*taswiyah*) merupakan proses yang timbul dalam materi yang membuatnya cocok untuk menerima roh. Materi itu merupakan saripati tanah liat Nabi Adam yang merupakan cikal bakal bagi keturunannya. Cikal bakal atau sel benih (*nutfah*) ini, yang semula adalah tanah liat berubah menjadi makanan (melalui tanaman dan hewan). Makanan menjadi darah, darah menjadi sperma jantan dan indung telur betina di dalam suatu wadah (QS, 23; 14).

Bahwa kemudian kelak teknolog dan ilmuwan berhasil mengganti peranan sperma jantan dengan materi lain seperti sel rambut, sel kulit, sel darah atau sel tubuh lainnya, jelas hal itu bertentangan dengan axiologi dogmatis yang menjelaskan teori kejadian manusia. Itulah sebabnya guru besar ahli teologi Islam dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Abdelmuti Bayyumi, secara tegas mengomentari pengklonan manusia dengan meminta agar riset itu dihentikan karena akan mengarah pada hal yang dilarang hukum Islam, secara ideologis dan etis, dan menyebutkan keburukan yang ditimbulkan dari rekayasa genetika dan pengklonan sejauh ini lebih besar dibanding manfaatnya.

Jakarta, *HU Media Indonesia*, 29 Maret 1997



## PENGLONAN DAN PERADABAN MANUSIA



SASTRAPRATEDJA (1985) ketika mengutip *de waelbens* mengatakan, dalam sejarahnya manusia menderita tiga jenis luka narsistik, yakni: *pertama*, ketika Copernicus merenggut keluhuran manusia sebagai pusat dunia; *kedua*, ketika Darwin menempatkan manusia dalam kesinambungan sebagai keturunan binatang; dan *ketiga*, manakala Freud mementahkan kesadaran akaliah dengan postulat ketaksadarannya. Dan agaknya luka narsistik itu bakal bertambah lagi, yakni manakala ilmuwan Inggris Ian Wilmut - jika ia *ngotot* mau melakukannya - berhasil mengklon manusia dari sel, bukan dari embrio.

Seperti diketahui, keberhasilan tim yang dipimpin Dr Ian Wilmut dari Institute Roslin di Eidenburg, Inggris mengklon domba yang kemudian diberi nama Dolly hanya dari sel epitel ambing seekor domba lainnya, telah menggemparkan dunia, mendapat reaksi luar biasa dan menjadi perdebatan luas berbagai kalangan. Padahal rekayasa genetika dengan menggunakan teknik pengklonan (*clonning*) bukan sesuatu yang baru di bidang pertanian dan primata. Hal itu dikarenakan, jika ilmuwan sudah berhasil mengembangkan sel dewasa seekor domba menjadi domba dewasa tanpa melalui pembuahan, berarti teknik yang sama bisa juga diterapkan pada manusia.

Temuan itu, tentu saja bagaikan petir di siang bolong. Menebarkan rasa takut ke segala penjuru dunia karena dianggap akan memberangus eksistensi peradaban manusia. Sama menakutkannya dengan teknologi nuklir yang disalahgunakan. Bayangkan, jika pengklonan manusia diizinkan, akan bisa diciptakan belasan bahkan puluhan Edy Tanzil (sang pembobol Bapindo Rp 1,4 trilyun itu) yang bisa saja sifatnya sama jahat, bahkan mungkin lebih licik dari dia. Betapa repot dan sibuknya polisi dan pemerintah Indonesia dibuatnya.

## DAMPAK POLEKSOS

Pada prinsipnya, pengklonan yang diterapkan di bidang pertanian dan binatang masih memberikan rasa puas serta harapan besar kebanyakan ilmuwan di mana pun, termasuk masyarakat luas. Sebab riset tentang itu akan memberikan pendekatan yang luas dan nyata untuk menjaga keseimbangan bahkan meningkatkan ketersediaan sumberdaya alam dan pangan. Kecuali itu, keberhasilannya akan menjadikan aset publik yang mulai punah bisa diciptakan kembali. Bahkan, ketika tim dari pusat primata yang dipimpin Susan Smith di Oregon, AS melaporkan keberhasilan mengklon monyet dari embrio, terkesan revolusi kemungkinan baru riset manipulasi genetika untuk meneliti pengobatan penyakit manusia.

Namun secara politik, ekonomi dan sosial (Poleksos) dampaknya sangat terasa bagi negara-negara berkembang yang saat ini sedang berkuat untuk menata kehidupan kenegaraan, tata perekonomian dan kehidupan sosialnya. Dominasi negara-negara maju diperkirakan akan makin terasa seiring dengan makin kencangnya isu pasar bebas dan globalisasi dunia. Dari segi ekonomi misalnya, bibit-bibit unggul yang sudah teruji akan membanjiri pasar negara-negara berkembang.

Sehingga, rakyat Indonesia misalnya, yang belum cukup lama menikmati hasil inseminasi (perkawinan buatan atau suntik) untuk ternak-ternaknya, akan tersaingi secara tidak adil. Sebab ilmuwan Indonesia belum tentu siap mengambillalih teknologi pengklonan tersebut.

Dan bayang-bayang banjir bibit unggul itu sudah tampak di depan mata akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang agaknya belum ditekuni ilmuwan Indonesia karena mereka sibuk membikin pesawat terbang. Sekadar contoh bisa disebut, para peneliti swasta dari Monsanto mengklaim telah berhasil memasukkan gen asing tahan herbisida yang mereka produksi pada tanaman kedelai. Sehingga tanaman kedelai hasil rekayasa itu tahan terhadap herbisida tersebut. Dan tanaman itu sudah dapat dibeli.

Melalui teknik rekayasa genetika pula, para ilmuwan juga telah berhasil menciptakan babi transgenik yang bisa memproduksi hormon pertumbuhan manusia. Tentu bisa dipastikan, dalam jangka relatif akan semakin banyak binatang transgenik yang akan lahir di muka bumi ini. Karena itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi ilmuwan di Indonesia untuk tidak terlalu jauh ketinggalan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara maju. Sebab jika itu terjadi, harga sosial yang harus dibayar sangatlah mahal. Kita akan tetap menjadi objek politik dan ekonomi mereka.

Secara sosial, ketimpangan kemajuan Iptek itu juga tidak menguntungkan. Rasa harga diri sebagai bangsa menjadi terusik karenanya. Memang bisa saja

rasa harga diri itu ditopang oleh kemajuan lain seperti kemampuan ilmuwan Indonesia di bidang teknologi kedirgantaraan dan barangkali juga kelautan. Tetapi, bukankah kehidupan nyata yang paling dekat dengan kemampuan sebagian besar bangsa Indonesia adalah pertanian dan peternakan? Ini jelas tantangan.

## **EKSISTENSI PERADABAN**

Sila pertama yang menjadi sendi dasar kehidupan bernegara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti ada pengakuan yang melembaga bahwa di luar kekuatan dan kekuasaan manusia, kita yakini ada kekuatan dan kekuasaan maha besar, yakni Tuhan. Pola hubungan manusia dan Tuhan yang kita yakini meniscayai suatu sikap untuk tidak melawan kodrat-Nya. Penciptaan manusia kita yakini sepenuhnya merupakan kekuasaan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Dan hal itu sudah ditunjukkan dengan terciptanya milyaran manusia di mana satu dengan lainnya saling berbeda. Tidak ada satu pun manusia yang sama dengan lainnya, kembar sekali pun.

Bahwa kemudian manusia bisa menciptakan manusia yang sama dari segi fisik dengan manusia lainnya, jelas menunjukkan betapa manusia TIDAK MAHA KUASA. Dengan demikian, temuan pengklonan harus dipandang justru sebagai bukti ketidakmampuan manusia untuk menyaingi Tuhan. Barangkali pandangan ini terlalu berlebihan karena bisa dianggap tidak kontekstual. Namun, dengan mencermati posisi antara ilmuwan dan teknolog yang bisa saling berlawanan, ilmuwan dan teknolog Indonesia harus mengambil sikap.

Sebab seperti diketahui, para teknolog pada umumnya mendasarkan pekerjaannya pada upaya mencari yang paling baik. Sementara ilmuwan cenderung mencari yang paling benar. Padahal segala sesuatu yang sangat baik belum tentu benar. Namun jika kedua-duanya disatukan, yakni yang paling baik dan benar digunakan untuk semata-mata kemaslahatan umat manusia, maka sudah tentu akan diterima semua pihak.

Untuk dapat menyatukan itu, satu-satunya jalan ialah tetap berpegang teguh kepada etika, moralitas (norma-norma), dan religi sebagai indikator eksistensi peradaban manusia. Dengan peradaban, gerak teknologi akan sejalan dengan langkah ilmuwan. Dalam kaitan dengan kemungkinan pengklonan manusia, masih ada sisi gelap yang harus menjadi pemikiran panjang. Misalnya soal keyakinan kita akan ruh yang ditiupkan Tuhan, sifat-sifat pribadi dan wilayah-wilayah *the dark side* yang tidak mungkin dijelajahi manusia karena keterbatasannya.

Sehingga penolakan banyak pihak terhadap pengklonan manusia, antara lain oleh Paus Yohanes Paulus II (Vatikan), Bill Clinton (AS), Abdelmuti Bayyoumi (Cairo) dan Ian Wilmut sendiri haruslah kita dukung sepenuhnya

dengan cara apapun. Sebab seperti dikatakan Harold Varmus, mengklon manusia sangat menjijikkan (*repugnant to*). Kita setuju pandangan bahwa pengklonan manusia sama artinya dengan menginjak-injak martabat dan eksistensi peradaban demi kekuasaan dan uang dengan mengkhianati segala hal. Padahal kita diberikan akalnya agar dapat berpikir.

Jakarta, HU *Suara Karya*, 18 Maret 1997



## **REPLIKA MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



REPLIKA (pengklonan) manusia, jika intensif diteliti agaknya tak lama lagi bakal menjadi kenyataan. Itulah suatu masa dalam peradaban manusia, dimana wanita tidak lagi memerlukan laki-laki dalam proses reproduksi (baca: melanggengkan keturunan). Kelak, sekali lagi jika intensif diteliti, lahir kembar dua, tiga, empat dan seterusnya cukup hanya membutuhkan sel telur yang inti selnya telah diambil dan digabung (seolah-olah dibuahi) oleh sel lain yang ada pada tubuh manusia. Bisa sel rambut, sel kulit, sel darah dan sel-sel lainnya.

Praktik menjijikkan itu (meminjam istilah Harold Vermus), bukan hal mustahil setelah tim periset yang dipimpin Dr Ian Wilmut dari Roslin Institut berhasil membuat replika domba melalui teknik klon, pengembangbiakan makhluk baru tanpa pembuahan dengan memakai sel dewasa.

### **PERSPEKTIF ISLAM**

Arnold Toynbee pernah mengatakan bahwa ideologi-ideologi modern telah melahirkan peradaban yang lebih banyak menghancurkan daripada membangun. Dan dalam setengah abad saja telah menimbulkan dua kali perang dunia. Barangkali Toynbee benar, sebab di luar perang besar tersebut, masih ada perang lain yang jumlahnya mencapai belasan, bahkan puluhan sehingga banyak negara-bangsa menjadi hancur lebur karenanya.

Jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan atas ideologi-ideologi modern, bukan didasarkan pada axiologi dogmatis seperti agama-agama, maka akibatnya akan sama saja. Iptek akan mereduksi keimanan dan kebenaran agama. Dalam perspektif Islam, replika manusia sebagai bagian

dari kemajuan iptek di bidang *in vitro fertilization* (teknik bayi tabung), akan mengarah kepada hal-hal yang dilarang hukum Islam.

Soal reproduksi manusia, sejauh ini pemahaman Islam tidak pernah menyimpang dari apa yang dikemukakan oleh Al Ghazali dalam sebuah esai singkat berjudul *al-Madnun al-Shanghir* (lihat *Al-Insan al-Kamil* dari *al-Jilani*, halaman 89-98), di mana ia berusaha menjelaskan ayat suci yang berbunyi: “Dan ketika Aku sempurnakan kejadiannya (manusia), Aku meniupkan roh-Ku ke dalam dirinya” (QS.15:29:38:72).

Di dalam esai tersebut, Ghazali menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam ayat itu. Pembentukan (*taswiyah*) merupakan suatu proses yang timbul di dalam materi yang membuatnya cocok untuk menerima roh. Materi itu merupakan saripati tanah liat Nabi Adam yang merupakan cikal bakal bagi keturunannya. Cikal bakal atau sel benih (*nutfah*) ini, yang semula adalah tanah liat, setelah melewati berbagai proses, akhirnya menjadi manusia.

Tanah liat berubah menjadi makanan (melalui tanaman dan hewan). Makanan menjadi darah, dan darah menjadi sperma jantan dan indung telur betina (Ghazali membedakan antara sperma dan indung telur dengan menggunakan kata-kata “jantan” dan “betina” sebelum kata *nutfah* (periksa Al Issa Othman, 1981, 115). Sperma jantan kemudian bersatu dengan indung telur betina di dalam suatu wadah (QS,23:14).

Hasil dari persatuan yang terjadi (istilah medisnya adalah pembuahan) di dalam rahim itu, setelah melalui proses transformasi panjang sehingga mencapai resam tubuh yang harmonis (*jabillah*) dan menjadi cocok untuk menerima roh. Sampai disini proses murni bersifat “materi.” Hanya itulah yang diwarisi manusia dari leluhurnya. Setiap manusia menerima roh langsung dari Allah. Roh tersebut ada di saat embrio sudah siap dan cocok untuk menerimanya. Ketika terjadi pertemuan antara roh dengan badan, terbentuklah makhluk baru, yakni manusia.

Teori semacam itulah yang lantas memudahkan penerimaan keluarga berencana oleh setiap muslim, di mana pengaturan kelahiran dilakukan sebelum jabang bayi tercipta. Bahwa kemudian para teknolog dan ilmuwan kelak berhasil “menciptakan” replika manusia tanpa melalui teori sebagaimana difirmankan Allah tersebut, maka jelas hal itu merupakan *keblingeran* yang paling dasyat.

Jika hal itu (riset tentang replika manusia) diteruskan, maka akan timbul masalah baru yang jauh lebih rumit. Tidak akan jelas lagi makna hubungan ayah-ibu. Tak jelas lagi siapa kakak, siapa adik, siapa paman, siapa keponakan, siapa bibi, siapa sepupu, dan seterusnya. Peradaban manusia yang sudah porak poranda ini akan makin rusak karenanya.

## RESPONSI MORAL

Sejauh ini, alasan dikembangkannya iptek yang bersandar pada ideologi modern adalah karena sistem religi, yakni agama dianggap tidak mampu menjawab permasalahan dunia modern, akibat konflik internal (sektarianisme yang eksklusif) dan eksternal (inkonsistensi antar pemeluk agama). Tetapi, sebagaimana dikatakan Daniel Bell, jika agama dituntut memberikan jawaban secara matematis dan praktis jelas tidak bisa. Namun demikian, agama mempunyai kemampuan responsi secara moral terhadap persoalan manusia modern.

Responsi moral itulah yang selayaknya menjadi landasan elementer dikembangkannya iptek di belahan dunia mana pun, agar manusia tidak terjerumus untuk mengingkari kemahakuasaan dan kemahakuatan Tuhan. Sebab banyak hal yang sampai hari ini belum mampu dijelaskan oleh akal manusia modern.

Dalam hal kemungkinan replika manusia itu misalnya, apakah manusia bisa menciptakan roh yang diyakini ditiupkan (*nafkeli*) hanya atas kemurahan hati Allah dalam melimpahi (*tafidhu*) sehingga segala sesuatu menjadi ada? Bukankah pada setiap tahap penciptaan manusia selalu ada peran aktif dari rahmat Allah dan sejarah penciptaan pada saat tersebut? Apakah manusia lantas dapat menciptakan kepribadian sebagaimana diciptakan Allah atas manusia ciptaannya?

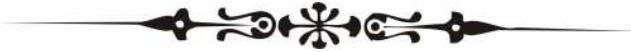
Di luar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *the dark side* di mana hanya Allah yang Maha mengetahui dapat menjelaskan, masih ada pertanyaan ilmiah yang belum tentu para teknolog dan ilmuwan bisa menjawab. Misalnya, diketahui pada mamalia, *Deoxiribo Nucleid Acid* (DNA, asam-asam yang menyusun protein pembentuk kode genetik) mitokondria sel ibu selalu sama dengan janinnya. Apakah ada pengaruhnya jika mitokondria tidak sama? Bagaimana daya tahannya bila keseimbangan DNA mitokondria mengalami pergeseran karena diketahui tidak semua mitokondria membawa gen-gen yang sama?

Untuk menghindari murka Allah, barangkali harus ada upaya untuk mencegah, menghindari bahkan memprotes dan melarang segala upaya menciptakan replika manusia. Masih sangat banyak riset lain perlu dilakukan demi kemaslahatan dan peningkatan taraf hidup manusia.

Surabaya, HU *SURYA*, 29 MARET 1997



## KUALITAS TENAGA KERJA DAN ELITE WANITA INDONESIA



DEKADE 90-an boleh disebut tahun-tahun “kemenangan” bagi kaum wanita. Ketika Presiden Soeharto mengumumkan kenaikan tunjangan isteri PNS dari 5 persen menjadi 10 persen, sementara orang tak hanya mengatakan sebagai “hiburan” bagi PNS. Setidak-tidaknya sebagian wanita memandangnya sebagai *reward* dan upaya meningkatkan prestise kaum ibu. Kita memang tak tahu apakah maknanya persis seperti itu. Satu hal uang pasti, dalam pidato presiden ketika melaporkan nota keuangan dan RAPBN 1992/1993, 6 Januari 1992 tersurat upaya memperhatikan dan meningkatkan pembinaan ka-um wanita.

Jika Anda membolak-balik lembaran sejarah, Anda tentu akan ingat ketika seorang ibu muda, dr R Abdulkadir, yang ikut Kongres Perempuan Indonesia di Dalem Josodipuran, Yogyakarta, enam puluh sembilan tahun silam mengatakan, “*biarkanlah para ibu di tanah Jawa membantu suaminya dengan bekerja yang giat, menurut ala kadarnya. Biarakan mereka menyumbangkan darma baktinya, buah pikirannya, dan kekuatan batin yang bersarang di hati.*”

Pernyataan yang jelas diwarnai oleh jargon kebebasan, persamaan hak, dan kewajiban alias emansipasi dengan kaum pria tersebut kemudian membawa implikasi pada gejala perubahan status wanita Indonesia dewasa ini. Kewajiban ekonomi dan sosial keluarga tak lagi melulu menjadi tanggung jawab pria. Wanita di dalam dan di luar rumah, sama-sama berkiperah dengan pria membangun konstruksi rumah tangga yang kokoh dan saling menegak-hormati serta berupaya melengkapi satu dengan yang lain.

Kalau dicermati, perkembangan perjuangan kaum wanita, baik di Barat maupun di Timur telah cukup membuahkan hasil. Perspektif dan spektrumnya demikian luas. Mulai dari kesejajaran ketenagakerjaan sampai ke tingkat elite

kaumnya. Kaum wanita telah mampu menembus tirani dominasi kaum pria. Suatu rintangan kultural, dan mungkin gaib, yang selama ini menghambat kaum ‘lemah’ itu untuk mencapai posisi strategis di segala bidang.

Tatanan sosial kaum wanita, tampaknya memang mulai bergeser, dari sekadar objek menjadi lebih dari subjek. Kasus revolusi ka-um wanita di Jepang misalnya, bukan tidak mungkin akan memberi corak pada masyarakatnya sepuluh tahun mendatang. Tak sedikit kaum wanita yang menjadi tokoh internasional yang elitisitasnya layak disejajarkan dengan pemimpin dunia pria lainnya. Misalnya di Inggris, Pakistan, Myanmar, Filipina, dan lain-lain.

## **KUALITAS TENAGA KERJA WANITA**

Di sektor ekonomi, khususnya partisipasi kerja, dapat dilihat dalam *Megatrends 2000* buah karya Naisbitt dan Aburdene (1990). Dalam buku tersebut diungkap fakta bahwa di Amerika 67 persen para isteri dan 79 persen wanita lajang juga bekerja. Bahkan, kuantitas wanita yang membuka usaha sendiri dua kali lebih banyak daripada pria.

Di Kanada sepertiga usaha wiraswasta dimiliki oleh kaum wan-ita. Di Perancis seperlimanya, di In-ggris justru wanita yang berwiraswasta tiga kali lebih banyak dari-pada pria. Gambaran kuantitas tersebut jelas berbicara soal kisah sukses perjuangan kaum wanita.

Di Indonesia partisipasi kerja wanita semakin bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, Indone-sia mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi untuk wanita kerja, bukan saja yang masih lajang tetapi juga yang telah bersuami dan berkeluarga. Mereka meninggalkan rumah dan keluarga dalam waktu-waktu tertentu. Menjadi pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, maupun buruh di berbagai badan usaha. Secara kuantitas, hitungannya memang seimbang dengan kaum pria. Namun, secara kualitas tenaga kerja wani-ta masih harus mengalami perjuangan panjang.

Abad mendatang adalah abad teknologi, Indonesia sedang berjuang menuju bangsa yang maju teknologi dan industrinya. Partisipasi kaum wanita dalam proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat teknologi sangat diharapkan. Sayangnya, sampai saat ini pendidikan dan pelatihan bagi kaum wanita masih dalam kategori kelas menengah ke bawah.

Di tingkat pendidikan dasar memang menjangkau angka 93,90 persen dari keseluruhan wanita. Namun, di tingkat pendidikan tinggi baru mencapai 32,60 persen. Bahkan yang paling memprihatinkan, jumlah wanita yang lulus dari pendidikan teknologi baru 10 persen seluruh lulusan. Ini jelas memerlukan perhatian yang serius.

Seandainya pemerintah dalam hal ini urusan peranan wanita mampu menerbitkan semacam buklet seperti yang dilakukan oleh Direktorat Wanita di Kanada misalnya, yang secara rinci memberikan jenis-jenis pekerjaan Iptek yang dapat ditekuni kaum wanita, mulai dari suasana kerja, pribadi yang cocok, tempat pelatihan, gaji secara umum, prospek sampai alamat di mana keterangan tentangnya dapat diperoleh, maka setidaknya-tidaknya lulusan wanita SMTA dapat memetakan kariernya sejak dini sehingga kesenjangan kualitas tenaga kerja wanita dapat teratasi.

### **MINIMNYA ELIT WANITA**

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah minimnya elite wanita Indonesia. Dalam logika Vilfredo Pareto berlaku tesis, manusia dalam kodratnya sebenarnya bukan hanya berbeda secara fisik, melainkan secara intelektual. Akibatnya, selalu muncul sejumlah orang yang mempunyai kepandaian dan kemampuan istimewa dibanding yang lain. Elite wanita lahir dari proses alami. Terpilih dan dikaruniai kemampuan lebih tinggi dalam mengatasi persoalan hidup, melekat karakteristik individual tertentu yang spesifik, lahir bukan karena menempati posisi strategis dalam hidup bermasyarakat, melainkan karena mempunyai kapasitas kemampuan yang lebih.

Namun demikian, dalam pandangan Mosca, keberadaan kelompok elite ini hanya dapat terjamin jika kelompok minoritas di atasnya (*the ruling class*) relatif terorganisasi dalam linieritas kemitraan.

Kelompok elite wanita di Indonesia masih relatif sedikit, tidak menonjol, dan umumnya berada setingkat di bawah *the ruling class*, kurang mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Marilah kita lihat buktinya. Kalau kita ikuti pembagian elite ini berdasarkan pilihan Pareto, akan ditemui dua kelompok. Kelompok pertama adalah *the governing elite*, yakni mereka yang secara langsung maupun tidak menjadi bagian dan memiliki peranan penting dalam birokrasi pemerintahan. Elite wanita Indonesia yang masuk kategori ini sangat sedikit. Sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan pria. Dalam jajaran kabinet kita sekarang baru seorang, itu pun kurang strategis. Bahkan kalau mau jujur, belum ada figur pemimpin nasional yang datang dari kaum wanita.

Padahal, beberapa abad silam sejarah nusantara mencatat bagaimana putri-putri bangsawan dianggap sederajat kepemimpinannya dengan kaum pria. Misalnya di masa kejayaan Airlangga, Putri Sanggalangit (Dyah Sanggramawijaya Dharmaprasadhotunggadewi Jayawisnuwardhani) diangkat menjadi putri mahkota kerajaan, walaupun kemudian menolak memerintah. Di Kadiri,

permaisuri Maharaja Kameswara yaitu Sri Kinaratu berpangkat senapati atau perwira utama. Di masa Majapahit, tampil Rani Tribuanatunggadewi sebagai penguasa tunggal, yang setengah abad ke-mudian disuksesikan ke Dyah Suhita. Kita tentu masih kagum akan “kegagahan” istri bupati Su-rabaya di zaman Sultan Agung Mataram, yakni Ratu Wandansari yang menjebol benteng kokoh Bukit Giri. Di zaman Belanda muncul tokoh-tokoh sekaliber Tjoet Nya’ Din, Tjoet Mutiah, dan lain-lain.

Sekarang, setelah 47 tahun merdeka kita baru memiliki satu elite wanita dan seorang jenderal wani-ta. Padahal, di negara-negara lain golongan kaum wanita sudah tam-pil memimpin negara.

Kelompok elite kedua adalah *the non governing elite*, yaitu mereka yang aktivitasnya berada di luar urusan pemerintahan. Bisa disebut dalam kategori ini adalah ka-um wanita cendekiawan, manajer profesional dan ilmuwan. Di perguruan tinggi misalnya, kaum wa-nita yang menyandang gelar doktor dan profesor, termasuk mereka yang memimpin institusi jumlah maupun persentasenya jauh dari seimbang jika dibandingkan den-gan pria. Kita semua berharap, di masa-masa mendatang kaum wanita mampu mengatasi hal ini. Paling tidak, secara berangsur-angsur hendaknya diupayakan mengikis budaya patriarkhi, suatu sistem yang menomorsatukan promosi kaum pria pada posisi dominan.

Surabaya, HU *Java Pos*, Rabu, 25 Maret 1992



Bab  
8



**KOMITMEN KERAKYATAN  
SEKOLAH NEGERI**





## KOMITMEN KERAKYATAN SEKOLAH NEGERI



PARA *founding fathers* negeri ini pasti punya argumentasi kuat untuk mencantumkan Pasal 31 (2) pada UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.” Kekayaan alam raya, keragaman hayati yang melimpah tentu menjadi satu dari sekian banyak alasan. Barangkali dalam benak mereka terbayangkan bahwa suatu ketika Indonesia akan menjadi *welfare state* yang bisa menggratifikasi pendidikan rakyatnya.

Bayangkan, lima puluh tahun silam ketika republik ini didirikan sampai saat ini masih menjadi misteri. Setidak-tidaknya jika dikaitkan dengan obsesi ‘pendidikan gratis’ yang didambakan oleh seluruh rakyat. Kendati dokumen-dokumen politik sudah mengarah kesana, tapi “kemandulannya” masih terasa hingga kini.

Mengkaji kembali sistem pengajaran nasional sebagaimana diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sesuai pasal konstitusi tersebut merupakan hal menarik. Apalagi jika dikaitkan dengan usia sistem pengajaran nasional (sebagai lawan sistem pengajaran kolonial) yang sudah mencapai setengah abad. Dengan kata lain, kita berupaya mempertanyakan kembali komitmen kerakyatan sekolah negeri sebagaimana tersirat dalam pasal 31 (2) UUD 1945.

### KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Sebulan menjelang peringatan setengah abad kemerdekaan RI dan bertepatan dengan awal penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah negeri diguncang tindakan protes para orangtua karena menarik sumbangan pendidikan yang besarnya ratusan ribu rupiah. Khusus di DKI Jakarta, sampai-sampai

Gubernur Surjadi Soedirdja mengancam, sekolah-sekolah negeri yang melakukan pungutan akan ditindak tegas (*Media Indonesia*, 11/7/95).

Seide dengan Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Dikdasmen Depdikbud Zainal Arifin Achmady tak kalah garang. Ia menegaskan, apabila memang ditemukan orangtua mengadu anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri hanya karena tidak membayar sumbangan awal, hari itu juga guru atau kepala sekolah yang bersangkutan akan diminta berhenti (*Kompas*, 12/7).

Pernyataan kedua pejabat itu sudah cukup menjadi alasan bahwa secara politis pemerintah keberatan jika sekolah-sekolah negeri menarik biaya pendidikan dari masyarakat. Sebab kata 'mengusahakan dan menyelenggarakan' sebagaimana termuat dalam kontitusi mengandung konsekuensi logis kewajiban negara (pemerintah) untuk menggratiskan sekolah-sekolah negeri.

Aksi politik untuk itu sebenarnya sudah dilakukan sejak 1984 dengan menghapuskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SD ketika pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun. Dan sejak tahun ajaran 1994-1995 pemerintah membebaskan siswa SLTP Negeri dari kewajiban membayar SPP disertai janji SLTP swasta akan memperoleh subsidi dari anggaran rutin dan pembangunan. Konsekuensinya, pemerintah mengalokasikan Rp 52,5 miliar dari anggaran rutin untuk SLTP Negeri, dan Rp 16 miliar untuk SLTP swasta. Pembebasan SPP ditempuh, selain untuk mendukung pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, juga bertujuan membangun momentum agar dapat mempertinggi semangat belajar dan motivasi bersekolah.

Anehnya, kebijakan tersebut nyaris tak membuat rakyat bergembira dan lega. Sekolah gratis tetap menjadi angan-angan. Soalnya, sekalipun SPP dihapuskan, tidak berarti mereka bebas biaya. Baju pengganti SPP sudah disiapkan, sudah menunggu, yakni pungutan iuran BP3 dan lain-lain yang jumlahnya lebih besar ketimbang SPP.

Pertanyaannya, dapatkah lembaga pendidikan (dasar dan menengah) - sebagai institusi sosial nonprofit - dibenarkan melakukan pungutan uang sekolah secara sepihak? Persoalannya bukan soal dapat atau tidak dapat. Lebih dari itu bagaimana proses pemungutan itu berjalan dengan lebih menghargai keberdayaan masyarakat yang amat beragam. Dengan kata lain, sangat penting memomorsatukan komitmen kerakyatan sekolah negeri.

Sebab menurut PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, Bab XI tentang Pembiayaan, khususnya Pasal 26 (1) ditandakan, pemerintah atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar harus membiayai penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara untuk pendidikan menengah, hal yang sama tercantum dalam PP No 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, Bab XI tentang Pembiayaan, khususnya pasal 28 (1) yang berbunyi, penyelenggara sekolah menengah harus membiayai sekolah menengah yang diselenggarakannya. Kedua klausul itu bersumber dari UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VIII (Sumber Daya Pendidikan), khususnya Pasal 36 (1) yang berbunyi, biaya penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggungjawab Pemerintah.

Kata ‘harus’, baik dikutipan pertama maupun kedua yang digunakan dalam redaksi pasal itu tentu saja bermakna sebagai kewajiban, bersifat imperatif dan memaksa. Tak ada satu kamus pun yang memberi padanan kata ‘harus’ dengan makna lain seperti *sukarela*, atau *semampu-mampunya*. Bagi pendidikan dasar, pembiayaan pendidikan menurut pasal 28 ayat (2) meliputi: (1) gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, serta tenaga administrasi; (2) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana; (3) penyelenggaraan pendidikan. Hal yang sama untuk pendidikan menengah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 PP No 29/1990.

“Kemandulan” Pasal-pasal itu sangat terasa setelah kita buka pasal-pasal lain yang mereduksi keharusan pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Menurut Pasal 27 PP No 28/1990 dan Pasal 29 (1) PP No 29/1990 dengan bunyi yang berbeda tapi sama maknanya dinyatakan, pengelola satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber dana (daya).

Di sinilah masalahnya, kata-kata dapat bekerjasama telah diputar balikkan maknanya menjadi legitimasi untuk melakukan pungutan. Faktanya, bukan usaha mencari dermawan dan mengetuk hati dunia usaha. Bukan pula tawar menawar dengan orangtua siswa. Melainkan mematok suatu keharusan membayar sebesar sekian ratus ribu rupiah, atau memberi pilihan pada masyarakat untuk tidak bersekolah sama sekali. Padahal, berbeda dengan di perkotaan, untuk bisa menggiring mereka ke sekolah di daerah tetap menjadi misteri yang tidak mungkin terpecahkan dalam satu dua Pelita. Sangat berbeda jika misalnya, sekolah benar-benar digratiskan tanpa adanya macam-macam pungutan.

## **PUNGUTAN PROGRESIF**

Salah satu tujuan negara ini dibentuk adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pada prinsipnya pendidikan merupakan kepentingan publik yang harus dijamin negara. Sebab tanpa kepentingan publik itu terpenuhi, negara akan merugi. Bisa dibayangkan, bagaimana nasib negara ini jika tidak seorang pun mau atau kebanyakan orang tidak mau bersekolah karena alasan besarnya biaya pendidikan.

Di Indonesia kita dihadapkan fakta, dengan dalih peningkatan mutu pendidikan, sekolah-sekolah negeri tetap melakukan pungutan untuk bermacam-macam kegiatan. Jangankan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, di sekolah dasar dan prasekolah saja sudah bermacam-macam jenis pungutan itu. Misalnya, ragam pungutan yang dikenakan pada siswa kelas VI SD sekurang-kurangnya ada 10 jenis, yakni pungutan untuk: Ebta/Ebtanas, pra-Ebta, piagam-piagam, pembangunan, pres dan copy ijazah, pelepasan/wisuda, kenang-kenangan, peningkatan prestasi, karyawisata dan BP3.

Sebenarnya, pembebasan SPP bagi pendidikan dasar dimaksudkan oleh pemerintah agar bisa secara positif membantu meringankan beban masyarakat. Bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah, pembebasan SPP jelas meringankan. Sayangnya, keluarga miskin tak cukup mampu mengalokasikan besarnya SPP yang dibebaskan itu untuk kepentingan peningkatan prestasi di luar sekolah. Melainkan justru untuk menambal kebutuhan hidup sehari-harinya.

Sementara bagi keluarga berstatus ekonomi tinggi, pembebasan SPP makin memberikan pilihan untuk peningkatan prestasi. Uang SPP bisa dialihkan untuk membiayai kursus bidang studi, bimbingan tes, atau les privat yang menjadikan prestasi anak makin meningkat.

Ini jelas tidak adil. Oleh karenanya, sekiranya pungutan uang sekolah dalam bentuk non-SPP sudah tidak dapat dihindari, maka pemungutannya haruslah sesuai asas pemerataan dan keadilan. Hal itu hanya bisa dicapai jika sekolah melaksanakan pungutan progresif. Artinya, siswa yang berasal dari keluarga mampu dipungut lebih besar dibanding siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Bagi keluarga miskin, seharusnya dibebaskan sama sekali dari segala macam pungutan. Ukuran kemampuan bisa didasari tingkat penghasilan, status pekerjaan orang tua, sumber penghasilan (Ayah saja, atau Ibu saja) dan kepemilikan barang sekunder di rumah.

Jakarta, *HU Media Indonesia*, 25 September 1995



## **KRISIS EKONOMI, PERUBAHAN KURIKULUM DAN PROSES PEMISKINAN**



TANPA memerlukan penjelasan *njlimet*, siapapun akan mudah mengerti jika krisis ekonomi yang terus memburuk berdampak serius pada kemiskinan. Korelasi variabel pertama terhadap variabel kedua positif signifikan. Maksudnya, semakin lama dan berkepanjangan krisis ekonomi terjadi, kuantitas penduduk miskin akan semakin besar. Lantas, apa hubungannya antara kurikulum dan kemiskinan? Pakar mana yang berani berteori bahwa kurikulum pendidikan berkorelasi dengan kemiskinan? Pada saat roda pertumbuhan ekonomi stabil, tentu saja hal itu dianggap sebagai kelakar yang tak lucu kerana jelas tidak memenuhi standar persyaratan hipotesis. Namun, jika tiba-tiba merebak tuntutan perubahan kurikulum pendidikan di tengah badai krisis karena terkait dengan proses pemiskinan peserta didik, hal ini sangat menarik dicermati dan relevan diperbincangkan.

Euforia reformasi telah menggiring keinginan publik untuk membongkar banyak hal. Dalam bidang pendidikan, salah satu tuntutan yang mengemuka ialah agar pemerintah meninjau ulang Kurikulum 1994 yang sudah berjalan selama empat tahun. Tegasnya, seperti disuarakan Kepala Pusat Kurikulum Balitbang Depdikbud, Djamil Ibrahim tak lama berselang, Kurikulum 1994 perlu dibedah total alias direformasi. Reformasi tidak hanya menyangkut susunan atau sistematikanya, lebih dari itu juga mencakup jumlah mata ajar dan substansi materi atau bahan ajar. Rasionalkah tuntutan itu di tengah upaya negara-bangsa menyelamatkan diri dari kehancuran akibat didera krisis berbagai bidang kehidupan?

Ditilik dari kepentingan jangka panjang, euforia seperti itu sangat bisa dimengerti mengingat Kurikulum 1994 dinilai berbagai kalangan (pakar, guru, peserta didik dan orangtuanya) amat banyak memuat mata ajar dan terlalu luas cakupan topiknya. Akibatnya, selain rentan terhadap krisis karena inefisien (memerlukan biaya tinggi), kurikulum itu telah menjadikan sebagian besar peserta didik tak memiliki *deeper insight* pada tiap mata ajar. Bahkan beberapa laporan menunjukkan, kurikulum tersebut menyebabkan sebagian besar anak mengalami stres berat. Tapi jika dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek, diperlukan ekstra kehati-hatian karena bersangkut-paut dengan keterlibatan banyak orang. Apalagi sudah lazim terjadi, perubahan kurikulum dilakukan manakala usianya telah mencapai 10 tahun.

### **BEBERAPA TITIK LEMAH**

Suatu kurikulum dikatakan berubah apabila terdapat perbedaan mendasar antara satu atau lebih komponen antara kurikulum periode tertentu dengan periode lainnya. Di luar perbedaan mendasar tersebut, yang terjadi adalah pengembangan. Baik perubahan atau pengembangan biasanya didorong oleh determinan tertentu. Saylor dan Alexander (1986) misalnya, menyebut determinan itu antara lain pengaruh historis, kekinian, ekspresi nilai-nilai dan kondisi siswa sebagai peserta didik. Sementara secara sosiologis, determinan itu mencakup analisis masyarakat, analisis kebudayaan dan konsepsi kekinian tentang fungsi-fungsi persekolahan (baca: Hilda Taba, 1986).

Bagi kurikulum yang didesain secara nasional maupun lokal, faktor masyarakat (konsumen pendidikan dan pengguna lulusan) sangatlah penting. Artinya, jika ada tuntutan perubahan maupun pengembangan, berarti ada sesuatu yang dirasa belum pas dan memerlukan perhatian serius agar dibenahi. Dalam hal Kurikulum 1994 terdapat beberapa titik lemah yang secara psikologis, sosiologis, apalagi ekonomis yang tak dapat dipertanggungjawabkan; baik kurikulum yang berlaku di lingkungan pendidikan dasar (jenjang SD dan SLTP) maupun yang berlaku di lingkungan pendidikan menengah, khususnya SMU.

Kita ambil contoh Kurikulum SD 1994, terdapat beberapa titik lemah. *Pertama*, muatannya sarat beban. Sembilan mata ajar (PPKN, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta sejumlah mata ajar muatan lokal) bagi anak usia 7-12 tahun jelas terlalu banyak. Anak-anak dipaksa melahap semua tanpa ada satu pun mata ajar yang berkesan. Jangankan peserta didik, gurunya pun kelabakan menghadapinya. Program PGSD di LPTK sama sekali tidak menyiapkan seorang calon guru SD menguasai total kesembilan mata ajar itu sejak Kelas I hingga Kelas VI. Karena itu tidak mengherankan jika guru dan

murid sama-sama menderita stres. Orangtua di rumah seringkali ketiban sial karena guru mengambil kiat menutupi kelemahannya dengan memberikan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Celakanya, PR itu bukan buatan guru, melainkan diambil dari sejumlah buku ajar yang cakupannya sangata luas. Kalau bagi orangtua yang berpendidikan sarjana saja sudah kesulitan membimbing anak-anaknya mengerjakan PR, lantas bagaimana dengan anak-anak yang orangtuanya berpendidikan kurang dari itu? Di seluruh pelosok tanah air, jumlah mereka lebih banyak. Akibatnya, dengan kurikulum seperti itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak yang tidak bersekolah dengan anak yang bersekolah.

Mestinya, ibarat makanan, kurikulum itu harus berporsi wajar, bermenu sehat dan bergizi. Ibarat perempuan, ia mestilah cantik, ramping, lincah dan menyenangkan. Dengan kalimat lain, bagi guru dan murid, kurikulum harus dapat menumbuhkan *enjoy of discovering* dan *enjoy of scientific invention* (menumbuhkan rasa nyaman, keasyikan dan refleksi untuk pemahaman ilmu pengetahuan). Bukan sebaliknya, bagi guru ibarat rodi atau romusha, sementara bagi murid dan orangtua penuh beban.

*Kedua*, cakupan topik terlalu luas yang mengakibatkan bias pelaksanaannya di lapangan. Titik lemah kedua ini tak terpisahkan dengan ketersediaan buku-buku ajar (pokok dan penunjang) yang tidak memenuhi persyaratan didaktis dan metodis. Kompetisi tak sehat dalam bisnis perbukuan, kolusi pengadaan buku, dan bermainnya raja-raja kecil di departemen menjadikan penerbit asal menunjuk penulis buku yang tidak memenuhi kualifikasi akademis. Walaupun memenuhi kualifikasi, sebagian besar penulisnya tidak menguasai psikologi perkembangan anak. Sebut misalnya buku pokok Matematika SD kelas IV, latihan-latihan yang tersedia tidak berbeda dengan tingkat kesulitan soal-soal UMPTN. Sedangkan Buku Pedoman Guru hanya memuat jawabannya. Asal muasal jawaban tersebut diserahkan kepada murid sebagai PR.

Jika diteliti secara komprehensif, hampir seluruh buku ajar SD melanggar prinsip *learning by playing* yang menjadi kunci keberhasilan pembelajaran di jenjang pendidikan dasar khususnya tingkat SD. Padahal, Kurikulum 1994 hanya memuat rambu-rambu yang sepenuhnya bergantung pada kreativitas, inovasi dan kondisi lingkungan guru. Namun karena para guru tidak disiapkan untuk itu, hampir sepenuhnya mereka apa kata buku. Jawaban murid yang benar sekalipun, jika tidak sesuai buku pastilah disalahkan. Guru sama sekali tidak mempertimbangkan dampak psikologis yang mendalam pada anak akibat perlakuannya.

*Ketiga*, terlalu kompleks. Muatan mata ajar kurikulum mestinya sederhana dengan prinsip yang diberikan saat tertentu menjadi dasar untuk muatan yang lebih lanjut. Dalam kaitan kelemahan ini ada usulan agar yang diberikan di SD cukup tiga mata ajar esensial yakni aritmetika, bahasa dan budi pekerti. Walaupun

tetap dipertahankan, mestinya dibatasi pada muatan yang mempunyai derajat keterpakaian tinggi. Di luar ketiga titik lemah tersebut, tentu masih banyak titik lemah lainnya yang menyebabkan agar kurikulum diubah semakin santer.

## PROSES PEMISKINAN

Berkaitan dengan krisis ekonomi yang terjadi saat ini, sulit dipungkiri adanya kesan bahwa Kurikulum 1994 mempercepat proses pemiskinan. Kurikulum 1994 yang berbiaya mahal turut menyumbang angka putus sekolah (*drop-out*) di seluruh tanah air. Di Kabupaten Sleman saja, angka DO mencapai sedikitnya 494 siswa, terdiri atas 289 siswa SLTP, 90 siswa SMU dan 115 siswa SMK (*Kedaulatan Rakyat*, 11/9/98).

Kurikulum yang menyebabkan percepatan pemiskinan itu dapat diilustrasikan berikut. Untuk satu mata ajar di kelas tinggi SD, umumnya guru mewajibkan murid memiliki satu buku pokok, buku penunjang, dan buku latihan kerja. Ketiga jenis buku itu berasal dari penerbit yang ditentukan dengan harga bervariasi. Paling sedikit, orangtua harus merogoh *kecek* Rp 15.000 untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kecuali itu, biasanya guru juga mewajibkan murid mempunyai empat buku tulis: dua untuk catatan, satu untuk PR buku pokok dan satu untuk PR buku penunjang. Jika satu buku setebal 50 halaman berharga Rp 1.250, maka empat buku harganya Rp 5.000. Dengan demikian, untuk satu mata ajar orangtua harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000. Jika total, untuk sembilan hingga sepuluh mata ajar, paling sedikit orangtua harus mengeluarkan biaya tak kurang dari RP 175 ribu. Belum lagi untuk membayar berbagai jenis biaya yang sekalipun sudah dilarang menteri bahkan presiden, kenyataannya masih dilaksanakan oleh sekolah dengan berbagai alasan.

Jika di perkotaan banyak orangtua tidak bisa bertahan, bagaimana dengan mereka yang di perdesaan? Berapa pun biaya yang harus dikeluarkan orangtua, krisis ekonomi telah mengharuskan mereka menentukan satu pilihan, yakni menarik anak-anaknya dari sekolah. Bagi yang masih bertahan, bisa dipastikan kualitas hidupnya akan menurun dan pemiskinan tak dapat dihindari. Andaikata kurikulum bisa disederhanakan, barangkali beban biaya yang harus dikeluarkan orangtua bisa ditekan. Dengan sendirinya, laju proses pemiskinan pun dapat dihambat.

Rasional penyederhanaan kurikulum dengan demikian relevan dipertimbangkan mengingat sekolah bukanlah satu-satunya institusi ilmu pengetahuan. Tidak semua perkembangan Iptek harus disosialisasikan melalui sekolah. Institusi lain seperti media massa cetak dan elektronik, keluarga, pesantren dan lain-lain bisa berfungsi sebagai substitusi sekolah.

Yogyakarta, HU *Kedaulatan Rakyat*, 28 September 1998



## **KOMPENSASI KOMERSIALISASI PENDIDIKAN**



KOMERSIALISASI pendidikan dalam beberapa tahun sempat dikhawatirkan oleh banyak kalangan. Terutama sejak menjamurnya PTS yang hanya memajang papan nama dan kecenderungan perubahan fungsi kursus atau lembaga pendidikan kejuruan (LPK) yang berramai-ramai menawarkan program pascasarjana magister (S-2) dalam bentuk program MM dan MBA berbiaya jutaan rupiah. Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat hajat hidup orang banyak terhadap pendidikan sekolah sangat besar.

Setelah pemerintah melakukan penertiban dalam bentuk akreditasi ketat terhadap PTS dan menetapkan larangan bagi LPK yang bukan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik setara sarjana atau lebih tinggi, maka komersialisasi pendidikan mulai mereda. Tetapi tidak hilang sama sekali. Sebab sesudah itu muncul fenomena sekolah elit barbiaya tinggi dan pemaksaan argumentasi bahwa pendidikan bermutu membutuhkan biaya besar.

Kini, kekhawatiran sudah berubah menjadi keluhan dan protes karena komersialisasi pendidikan bukan hanya melanda perguruan tinggi. Demam komersialisasi sudah melanda seluruh jenis dan jenjang pendidikan sekolah mulai dari TK hingga SLTA. Bahkan di pendidikan luar serkolah (PLS), baik dalam bentuk kursus, bimbingan belajar dan bimbingan tes biayanya melebihi pendidikan sekolah.

Harga pendidikan tidak lagi setara dengan kebutuhan primer, melainkan melebihi kebutuhan sekunder. Di TK dengan kategori “biasa saja”, biaya masuk sudah sama dengan harga televisi berwarna 14 inci. Sementara biaya masuk SMU sudah setara dengan harga televisi berwarna ukuran yang lebih besar lagi.

Celakanya, pendidikan berbiaya tinggi tidak melulu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta yang jelas-jelas membiayai sendiri operasionalisasi pendidikannya. Institusi pendidikan negeri (milik pemerintah) pun sudah ketularan wabah itu. Kompensasi apa saja yang diberikan kepada masyarakat konsumen pendidikan atas terjadinya komersialisasi pendidikan tersebut?

## **MENYIMPANG**

Memang benar, menilai kualitas pendidikan bukan persoalan mudah. Tak ada indikator pasti yang bisa dijadikan ukuran. Kalaupun yang dijadikan acuan adalah keluaran dalam bentuk produktivitas lulusan dan standar evaluasi seperti tingginya nilai ebtanas murni atau diterimanya mereka pada tingkat pendidikan lebih tinggi di sekolah (perguruan tinggi) berkualifikasi baik, maka sebenarnya hal itu hanya merupakan gejala alamiah belaka.

Tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan ragam ukuran-ukuran itu dalam bentuk baik semua. Mereka yang tergolong baik hanya berada pada 1,5 simpangan baku rerata; sementara modus tertinggi berada pada posisi rerata atau cukup; dan sisanya berada dalam golongan kurang. Dengan demikian, argumentasi bahwa mutu pendidikan hanya bisa dicapai dengan biaya tinggi patut diragukan. Apalagi faktor penentu keberhasilan adalah standar mutu masukan dan para guru selaku fasilitator.

Jika komersialisasi dikompensasikan terhadap penghasilan guru yang lebih baik, barangkali akan ada kontribusi nyata terhadap mutu keluaran pendidikan. Sebab dengan demikian para guru akan memiliki tanggung jawab besar guna mengoptimalkan kinerjanya agar potensi subjek didik meningkat. Tapi jika komersialisasi hanya digunakan untuk makin mempermewah sarana prasarana, sementara SDM pelakunya terabaikan, jangan harap biaya tinggi itu akan bermanfaat.

Terlepas dari soal perbantahan disisi itu, kita dihadapkan fakta bahwa komersialisasi pendidikan sudah menyimpang dari esensi dan substansi ekonomi pendidikan. Bahkan bisa dikatakan menyimpang dari teori-teori pendidikan. Kita sebut misalnya bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas III SMP. Biaya bimbingan belajar untuk mereka di LPK selama setahun rata-rata dikutip Rp 640 ribu untuk enam bidang studi. Biaya itu jauh lebih tinggi ketimbang biaya belajar di SMP regular yang lebih dari enam bidang.

Di LPK yang menyebut program-programnya setara diploma, biaya belajar yang dikutip rata-rata Rp 1,75 juta per tahun. Itu belum termasuk biaya sumbangan pendidikan tiap bulannya berkisar antara Rp 15 ribu - Rp 50 ribu.

Jika dihitung, biaya itu sudah melebihi biaya kuliah selama setahun di PTN. Kalau dipikir-pikir hal seperti itu tidak berbeda dengan ibarat orang membeli baju di Singapura atau di Amerika dengan harga sangat mahal, tapi sebenarnya baju itu baju impor buatan Solo, Indonesia.

Penyimpangan makin nyata kalau kita cermati klaim keberhasilan para penyelenggara bimbingan tes untuk siswa kelas III sekolah menengah yang diterima di PTN melalui iklan di koran-koran. Klaim keberhasilan itu sungguh sangat menyakitkan karena menihilkan peran guru selama bertahun-tahun membina kemampuan subjek didik.

Demikian pula diadakannya tes-tes multi gelombang yang dilakukan oleh PTN dan PTS, merupakan bentuk lain dari upaya mengeruk dana masyarakat atas nama pendidikan (komersialisasi). Seleksi untuk program-program Diploma-3 dan ekstensi di PTN serta masuk PTS, diselenggarakan sesudah pelaksanaan UMPTN (gelombang I dan II sebelum pengumuman UMPTN, sementara gelombang III sesudah pengumuman UMPTN). Rata-rata mereka membuka seleksi tiga gelombang dengan biaya tes berkisar antara Rp 35 ribu – Rp 50 ribu.

Cara-cara seperti itu agaknya tidak didasari oleh asumsi dasar tes atau sistem seleksi, yakni menyaring calon mahasiswa yang diperkirakan akan berhasil jika diberi kesempatan untuk studi di perguruan tinggi. Dalam situasi ekonomi serba sulit saat ini, cara-cara seperti itu jelas tidak pada tempatnya dilakukan. Apalagi di PTS, seringkali keikutsertaan dalam tes multi gelombang dijadikan dasar guna menentukan besar sumbangan gedung dan pendidikan yang harus dibayar. Mereka yang diterima dan masuk pada gelombang paling awal memperoleh banyak keringanan, demikian pula sebaliknya.

## **DIBAKUKAN?**

Barangkali kurang masuk akal jika pemerintah turun tangan dan mengintervensi komersialisasi pendidikan dalam bentuk pembakuan biaya belajar. Sebab pendidikan sendiri sudah mengikuti selera pasar. Buktinya, biaya belajar di PTS yang program studinya berstatus “terdaftar” tapi diselenggarakan oleh konglomerat, sangat diminati sekalipun biayanya jauh lebih tinggi ketimbang program studi yang sama di PTS lain berstatus “disamakan.”

Ditilik dari cara hidup berbangsa dengan masalah besar soal melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi, tentu saja praktik-praktik semacam itu sama sekali tidak mendidik. Tak ada kontribusi sosial yang nyata memberikan dukungan bagi terciptanya rasa persaudaraan.

Jika pendidikan dianggap sebagai kepentingan publik atau barang publik (*public goods*) yang layak dilindungi, maka cukup alasan bagi pemerintah untuk membakukan biaya belajar. Sebagai kepentingan publik, pendidikan bisa saja diperlakukan sama dengan bahan pokok yang tidak harus mengikuti selera pasar. Harganya bisa dikendalikan agar tidak timbul gejolak. Bisa dibayangkan, bagaimana jika banyak warga negara tidak mau berpendidikan sekolah karena dianggap sangat komersial.

Sebut saja misalnya pembakuan itu dalam bentuk pengkategorian I, II, dan III. Ukuran kategori tentu saja berdasarkan sistem akreditasi, sebab sekolah, perguruan tinggi, dan LPK baik negeri maupun swasta dikenai akreditasi. Biaya pendidikan untuk lembaga pendidikan kategori I (karena layak menduduki kategori I) bisa lebih tinggi dari pada kategori selanjutnya. Dengan cara itu barangkali komersialisasi pendidikan bisa ditekan. Dan masyarakat menjadi lega karena secara objektif bisa menentukan pendidikan anak-anak sesuai dengan ekonominya.

Jakarta, HU *Suara Karya*, 26 Juli 1996



## **PENARIKAN IURAN SUKARELA NON-SPP**



DALAM *Global Paradox* (1994), John Naisbitt memaparkan, “Orang Asia sedang belajar bagaimana menjadi kaya.” Orang kaya Asia yang global dilukiskannya seperti ini: mengenakan kemeja dan dasi rancangan Ferragamo, memakai jam tangan Rolex atau Cartier, membawa tas ala Louis Vuitton, dan membuat tanda tangan dengan pena Mountblanc.

Menurut Naisbitt, orang kaya Asia pergi kerja dengan BMW-nya yang berkilau, terus menerus bicara lewat telepon seluler Motorola, memasukkan semua tagihannya pada kartu American Express, mengadakan perjalanan dengan Singapore Airlines, tinggal di apartemen di kota. Menggunakan *aftershave* Giorgio Armani dan membeli Poison untuk wanita kekasihnya.

Bagi masyarakat kosmopolitan, yakni sebagian kecil orang Indonesia yang hidup di kota metropolitan semacam Jakarta, Surabaya, atau Medan, paparan Naisbitt ada benarnya. Kalangan ini bisa berbangga karena bisa dapat makan pagi di Jakarta, diteruskan makan siang di Hongkong dan berkesempatan makan malam di Los Angeles.

Tapi tidak demikian bagi sebagian besar orang Indonesia yang justru saat ini sedang belajar menjadi “kaya” dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal)-nya. Bagi sebagian besar masyarakat kita berlaku kenyataan lain. Walaupun sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi diajari untuk percaya bahwa negeri ini kaya raya, kenyataannya kita tidak cukup mampu menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Untuk jenjang pendidikan dasar sekalipun.

## HAMBATAN

Sehingga, ketika pemerintah mengumumkan pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SLTP negeri dan hendak memberi subsidi SPP SLTP swasta, tak banyak orangtua siswa merasa gembira atau lega. Soalnya, pungutan non SPP sudah menunggu. “Baju” pengganti SPP bisa jauh lebih tinggi ketimbang SPP.

Masalah penarikan iuran non-SPP itulah yang saat ini menjadi persoalan. Sebab, dikhawatirkan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Wajar 9 tahun sebagaimana dicanangkan pemerintah pada 2 Mei lalu. Bukankah hambatan terbesar banyaknya lulusan SD yang tidak melanjutkan studi ke SLTP dikarenakan alasan biaya? Hasil Susenas BPS 1989 menunjukkan, alasan itu mencapai jumlah 69,19 persen.

Menurut laporan sejumlah media, banyak orangtua siswa di Jakarta mengeluh karena penarikan iuran non-SPP lebih besar daripada SPP. Jika orangtua siswa di Jakarta yang relatif mampu saja sudah mengeluh, bagaimana orangtua siswa di daerah atau pelosok? Lantas, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan masyarakat agar penarikan iuran non-SPP bisa menjamin asas pemerataan dan keadilan?

Pada prinsipnya, penarikan iuran non-SPP untuk SD dan SLTP masih bisa diperdebatkan keabsahannya. Sebab ada kewajiban yang bersifat imperatif dan memaksa agar penyelenggara sekolah membiayai pendidikan sepenuhnya. Dalam PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar (Bab XI soal Pembiayaan, Pasal 26 ayat 1) dinyatakan, pemerintah atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar harus membiayai penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pembiayaan yang dimaksud sudah mencakup banyak hal. Menurut pasal 26 ayat (2) meliputi : (1) gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, serta tenaga administrasi; (2) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana; (3) penyelenggaraan pendidikan. Hal yang sama untuk pendidikan menengah diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 PP No 29/1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memang harus diakui, pasal itu tidak berdiri sendiri. Ada pasal lain yang perlu dipertimbangkan. Yakni, pasal 27 yang menyatakan, pengelola satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

Inilah permasalahannya. Kata-kata “dapat bekerjasama” yang digunakan dalam redaksi pasal 27 ternyata mereduksi makna “harus” sebagaimana dipakai dalam pasal 26. Dalam kenyataannya, “dapat bekerjasama” telah diputarbalikkan menjadi pembenar guna melakukan penarikan iuran.

Sekolah lebih suka memaksakan kehendak ketimbang berusaha mencari dermawan dan mengetuk hati dunia usaha. Ketika sekolah mengundang BP3 untuk bermusyawarah, bukan tawar-menawar dengan orangtua siswa yang terjadi. Melainkan proses menggolkan keharusan membayar sebesar sekian ribu rupiah sesuai dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Atau memberi pilihan pada masyarakat untuk tidak bersekolah sama sekali.

## **TAK BERDAYA**

Ketidakterdayaan masyarakat untuk menolak penarikan iuran non-SPP makin terasa dengan hadirnya PP No 39/1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. Menurut Bab III Pasal 4 butir 5 dikatakan, peranserta masyarakat dapat berbentuk pengadaan dana dan pemberian bantuan yang berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.

Sebenarnya, sifat peranserta menurut Pasal 5 (1) ada dua, yakni dapat bersifat wajib atau sukarela. Dalam kenyataannya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela tidak berbeda. Sukarela bisa menjadi wajib. Karena itu, berapa pun besarnya dirasa memberatkan. Bagaimana mungkin orangtua siswa yang “tidak rela” ditarik bisa bebas dari kewajiban membayar iuran non-SPP? Mau tidak mau, suka atau tak suka, rela maupun tak rela, mereka terpaksa merogoh kantung untuk memenuhi “kesukarelaan” itu.

Dalam kaitan penarikan iuran non-SPP, kita pun menyadari betapa terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Namun begitu, sekolah hendaknya mempertimbangkan kemampuan orangtua siswa dalam menentukan seberapa besar iuran sukarela non-SPP harus ditarik. Tentu saja dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.

Dalam takaran ruang, makna keadilan bisa berwujud proporsionalitas. Dalam kehidupan ekonomi yang nyata-nyata terjadi, proporsional berarti yang besar mendapat besar, yang kecil mendapat kecil. Sekiranya kita sepakat dengan makna itu, tentu saja sekolah akan mudah mengambil keputusan untuk tidak menyamaratakan besarnya penarikan.

Hal itu berarti, siswa yang berasal dari kalangan ekonomi mampu bisa ditarik iuran yang lebih besar dibanding siswa yang berasal dari kalangan ekonomi tak mampu. Parameter kemampuan keluarga dapat diukur dari tingkat penghasilan, status pekerjaan orangtua, sumber penghasilan (ayah saja, atau ibu saja), properti dan kepemilikan barang sekunder di rumah. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menyebar kuesioner atau melalui kunjungan rumah.

Dengan sistem penarikan progresif seperti itu, asas pemerataan dan keadilan lebih bisa dijamin. Dan dengan sendirinya harkat masyarakat lebih diakui keberadaannya.

Jakarta, HU *Suara Karya*, 12 September 1994



## **SWASTA WAJIB IKUT MEMBIYAI PENDIDIKAN**



NYARIS setiap hari, wacana pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi kompetisi pasar global, didengungkan. Tetapi, upaya peningkatan mutu SDM, melalui sektor pendidikan sebagai ujung tombak menghadapi hal itu, belum optimal. Pemerintah masih menomorsatukan infrastruktur ekonomi dan pembangunan fisik. Infrastruktur sosial, khususnya sektor pendidikan sebagai fundasi pembangunan SDM, terlihat masih jauh dari kebutuhan riil bangsa ini. Hali itu tercermin dari masih rendahnya anggaran sektor pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Anggaran sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1996-1997, yang disampaikan oleh Presiden Soeharto di depan sidang DPR RI, 4 Januari 1996, besarnya Rp 3.970,7 miliar. Jika dibanding anggaran yang tersedia dalam APBN 1995-1996 sebesar 3.359,2 miliar, memang terlihat kenaikan sebesar 18,2 persen. Tapi kenaikan itu tidak mengindikasikan sebagai skala prioritas. Sebab, nominal anggaran itu masih tetap tak beranjak dari angka 4,3 persen dari total pengeluaran pemerintah.

Hal itu bisa ditafsirkan, semangat GBHN 1993 yang menggariskan pembangunan SDM bersamaan pembangunan ekonomi, belum ditindaklanjuti secara nyata.

### **DUA ISU POKOK**

Riset penulis (1994) di Jawa Timur menunjukkan terjadinya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap dunia pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai konsep sosial humanisme dan kebudayaan, melainkan

sudah dipandang sebagai konsep ekonomi. Yakni, sebagai sebagai suatu kegiatan investasi sumberdaya manusia, dengan titik berat harapan pada perolehan pekerjaan yang layak.

Masyarakat konsumen pendidikan, tidak semata-mata memandang pendidikan sebagai penawaran. Lebih dari itu, pendidikan dipandang sebagai gejala permintaan, yang persoalan pokoknya adalah untuk apa para lulusan lembaga pendidikan didayagunakan. Hal itulah, antara lain yang menyebabkan sebagian masyarakat ragu menyekolahkan anak, atau hanya memilih lembaga pendidikan profesi sebagai pilihan pendidikan anak-anaknya.

Kondisi cara pandang masyarakat seperti itu, menyebabkan dua isu pokok, yaitu, relevansi pendidikan dan pembiayaan pendidikan menjadi penting diperhatikan. Isu pokok pertama, sudah sejak 1993 menjadi fokus perhatian Depdikbud, dengan menempatkannya sebagai salah satu dari empat programnya. Kebijakan *link and match*, yang juga populer dengan sebutan pendidikan sistem ganda (PSG), dicoba untuk mencapai tujuan itu. Sementara, pembiayaan pendidikan tetap menjadi misteri tak terpecahkan hingga kini, karena berbagai sebab. Kita katakan misteri, karena kenyataannya dalam berbagai kesempatan, Presiden Soeharto menegaskan tantangan pendidikan di Indonesia masih banyak dan tidak mudah. Sekalipun GBHN menyatakan pembangunan dititikberatkan pada pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia, sementara tidak serta merta pemerintah mampu menyediakan anggaran pendidikan sedemikian. Apalagi, pembangunan sumberdaya manusia tidak bisa dilihat semata-mata dari anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Untuk menaikkan anggaran pendidikan dari 3,8 persen menjadi 6 persen GDP (*Gross Domestic Product*) seperti telah dilakukan India, agaknya masih panjang dan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang.

Padahal, agar pendidikan nasional *well planned*, perlu keberanian untuk melakukan langkah terobosan, dengan mempertimbangkan perubahan komposisi alokasi anggaran negara. Sebab, jika diperhatikan, beberapa negara yang menomorsatukan anggaran pendidikan, aspek kesejahteraan dan kualitas pendidikannya sangat mengagumkan (lihat tabel). Malaysia, Filipina dan Thailand menempatkan anggaran pendidikan jauh lebih tinggi dibanding anggaran untuk hankam, kesehatan dan sosial. Jika Korea menganggarkan hankam lebih tinggi daripada anggaran pendidikan bisa dimengerti, *tob* anggaran pendidikannya jauh lebih tinggi dibanding tiga bidang pembangunan lainnya.

Apakah struktur dan komposisi anggaran seperti itu yang menjadi biang dari kurang bermutunya pendidikan di Indonesia, sebagaimana dilontarkan banyak pihak? Tentu, tidaklah sesederhana itu jawabannya. Namun kita belum

pernah bereksperimen tentang upaya menomorsatukan pembangunan SDM yang tercermin dalam besaran anggaran pendidikan.

## **KONTRIBUSI SWASTA**

Kini banyak pihak berharap bagaimana dengan anggaran pendidikan yang tersedia bisa menghasilkan SDM yang bermutu serta kemajuan pendidikan yang berarti. RAPBN 1996–1997 meniscayai peran sektor swasta yang jauh lebih besar dalam perekonomian nasional. Tidak terkecuali di bidang pendidikan, hal yang sama juga sangat diharapkan.

Dunia usaha swasta, wajib ikut membiayai pendidikan. Sebab, secara finansial mereka banyak menikmati hasil pembangunan dan lebih dari berkecukupan. Kecuali itu, hanya 4,5 juta tenaga kerja lulusan lembaga pendidikan yang dimanfaatkan pemerintah. Lebih dari 10 juta orang, justru dimanfaatkan oleh kalangan swasta. Jadi, merekalah yang terbanyak menyerap SDM hasil pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

Tanpa mengesampingkan kontribusi pembiayaan pendidikan oleh sektor swasta dan kalangan dunia usaha melalui PSG, yang mungkin lebih dari 10 persen, peranan pembiayaan pendidikan oleh sektor swasta, sangatlah kecil. Gambaran kontribusi biaya pendidikan di tingkat SD dapat diketahui dari riset Ditjen PUOD, yakni dari orangtua sebesar 6,98 persen, dan pemerintah daerah sebesar 1,07 persen. Sementara sektor swasta dan dunia usaha, praktis tidak menyumbang sedikit pun. Ini sangat memprihatinkan. Padahal, tenaga kerja lulusan SLTA ke atas, yang berkualitas lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan dunia usaha atau swasta. Sementara untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas di tingkat itu, landasan pendidikan dasarnya haruslah kuat.

Pada sisi lain, asal biaya pendidikan untuk SLTP dan SLTA Negeri dapat diketahui dari riset Ditjen Dikdasmen. Dari orangtua untuk SLTP sebesar 7,05 persen, untuk SMU sebesar 9,65 persen, dan untuk SMK sebesar 8,52 persen. Sedangkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh kalangan dunia usaha atau swasta di SLTP cuma 0,39 persen, di SMU sebesar 0,15 persen.

**Tabel**  
**Pesentase Alokasi Anggaran Beberapa Negara**

Tabel: Pesentase Alokasi Anggaran Beberapa Negara						
Negara	Alokasi Bidang					
	Hankam	Pend	Keseht	Sos	Eknm	lainnya
Indonesia	8,3	10,0	1,8	1,7	19,3	78,2
Malaysia	18,5	23,4	6,8	4,4	14,2	32,7
Filipina	11,6	15,7	4,6	2,2	31,9	34,1
Korea	27,1	19,0	2,2	8,5	17,1	26,0
Singapura	14,6	14,4	3,6	11,0	15,6	40,8
Thailand	18,7	19,3	6,2	5,4	19,5	30,9

*Diolah dari World Development Report 1990, World Bank dan World Development Report 1988, Bank Dunia.*

Surabaya, HU *Surya*, 11 Januari 1996



## MUTU PENDIDIKAN DAN INDEKS DAYA SAING



TERPILIHNYA duet KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 1999-2004 memberikan harapan baru optimalisasi upaya pemulihan berbagai krisis yang melanda negeri ini selama lebih dari dua tahun. Di bidang politik misalnya, jelas telah ada kepastian menuju Indonesia Baru yang lebih stabil, aman, demokratis, menghargai HAM, berkepastian hukum, dan kerkeadilan.

Jaminan kepastian politik dari Bapak dan Ibu Bangsa tersebut diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap kemungkinan pemerintahan yang dijalankan secara baik, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Stabilitas politik dan pemulihan kepercayaan inilah yang kelak menjadi modal dasar bagi lempangnya jalan menuju *economic recovery*, meskipun untuk itu masih menunggu langkah strategis yang ditempuh sebuah kabinet solid profesional.

Pemulihan kondisi ekonomi dan tantangan berat lainnya di masa depan — sebagaimana dipidatokan Gus Dur saat memulai jabatannya sebagai presiden — menjadi titik sentral perhatian di tengah kompetisi ketat pergaulan global. Apalagi diketahui, menjelang *East Asia Economic Summit* di Singapura, 18-20 Oktober 1999, *World Economic Forum* (WEF) baru saja menerbitkan laporan bertajuk *The 1999 Global Competitiveness Report*.

Dalam laporan tersebut, untuk kesekian kali sejak 1996, rapor daya saing (*competitiveness*) Indonesia terpuruk, menempati urutan ke-37 dari 59 negara yang dilaporkan, dengan skor Indeks Daya Saing (IDS) hanya 0,39 poin. Merosot enam tingkat dibandingkan tahun 1998 dan 22 tingkat dibandingkan 1997. Ragam krisis, agaknya telah menyumbang besar atas keterpurukan Indonesia

dalam berbagai indikator, ekonomi domestik, internasionalisasi, pemerintahan, keuangan, infrastruktur, manajemen, sains dan teknologi, serta tenaga kerja sebagaimana termuat dalam *The World Competitive-ness Year Book 1999*.

## PINTU GERBANG

Jika ditelusur lebih komprehensif, rendahnya evaluasi terhadap delapan indikator daya saing di muka, memang tak semata-mata akibat multikrisis. Lebih dari itu, karena secara elementer, strategi pembangunan sumberdaya ekonomi pendidikan sangatlah rapuh. Paradigma kualitas pendidikan tidak sekadar berkorelasi, melainkan memiliki interkoneksi yang tinggi dengan delapan indikator tersebut.

Simbiosis mutualisme keduanya dipotong oleh percepatan kemajuan dan situasi sosial politik. Sangat jelas, sejak paruh 1996, menjelang Pemilu 1997 hingga berakhirnya SU-MPR yang baru lalu, instabilitas politik telah menjauhkan dunia pendidikan dari iklim kondusif sehingga tak memungkinkannya menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Guna mengangkat pamor daya saing ekonomi ke depan menuju perdagangan bebas dunia — sebagaimana terungkap pula saat Gus Dur berkunjung ke kediaman mantan Presiden RI Habibie, sesaat setelah dilantik menjadi RI-1 — sentuhan (*hands-on*) tajam atas kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan haruslah menempati eksemplar pertama setelah stabilitas politik dapat diciptakan.

Pendidikan sebagai pintu gerbang ke arah penyelesaian multikrisis dalam jangka panjang juga sempat ditekankan oleh Mbak Mega dalam pidato pelantikannya sebagai RI-2 di depan mimbar majelis yang terhormat.

Hal itu berarti, dengan meminjam istilah John Kenneth Galbraith (1967) dan Alvin Tofler (1995), agaknya diperlukan transformasi radikal dalam bentuk teknostruktur melalui perkawinan karakter dan sikap kewirausahawanan dengan kemajuan Iptek; serta revolusi pendidikan dalam bentuk *super industrial education*. Tiga komponen pokok, yakni *economic enterprise*, estat pendidikan, dan estat ilmiah haruslah dibangun inheren dalam upaya memajukan kualitas sumberdaya manusia ekonomi pendidikan.

Koneksitas mutu pendidikan dan peranannya bagi kemajuan suatu negara dalam mengembangkan kegiatan ekonomi global jelas tak relevan lagi diperdebatkan. Terpenting adalah bagaimana fokus strategis transformasi radikal dan revolusi pendidikan diarahkan dan dikondisikan menuju perubahan paradigma sebagai dasar perumusan pendidikan konvensional agar menghasilkan keahlian, keterampilan, dan keteladanan yang kompatibel dengan kebutuhan bangsa.

Beberapa perubahan paradigma dimaksud barangkali bisa disebut, misalnya, jika semula kita lebih mengutamakan posisi dan status sebagai sumber kewenangan; untuk selanjutnya kewenangan mestinya bersumber dari keahlian dan hubungan baik. Jika efisiensi semula dicapai melalui repetisi, selanjutnya efisiensi dicapai melalui inovasi. Kalau semula mengutamakan legalitas, prosedur, dan birokrasi, maka selanjutnya perlu mengutamakan kinerja dan kerja tim. Apabila sebelumnya imbalan didasarkan atas status, selanjutnya imbalan haruslah berdasar kontribusi dan prestasi.

Tentu saja masih segudang perubahan paradigma mesti diwujudkan dan diterjemahkan melalui praktik pendidikan. Sebut misalnya, jika sistem manajemen sebelumnya bersifat formal dan tertutup, di masa mendatang haruslah terbuka dan nonformal. Bila di masa lalu lingkup kerja terbatas pada mandat dan wilayah, selanjutnya haruslah melampaui lingkup, mandat, dan wilayah. Jika semula mengutamakan kepemilikan, di masa depan haruslah mengutamakan pemanfaatan.

Agar kualitas pendidikan dapat tercapai dalam waktu relatif pendek, maka prinsip *minimize obligations and maximize options* serta *directed auto-nomy* dalam pelaksanaan pendidikan di era reformasi haruslah direalisasikan. Tak perlu lagi penyelenggara pendidikan harus terus-menerus berkuat soal kurikulum yang luas atau sempit; bukan zamannya lagi sistem dan strategi pendidikan diseragamkan; dan agaknya sudah kedaluwarsa jika yurisdiksi pelaksanaan pendidikan bersifat sentralistik.

## **REFORMASI MENTALITAS**

Kita garisbawahi pidato Mbak Mega bahwa kebijakan yang mendesak adalah menyuguhkan dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Karena itu, kata beliau, dengan kesadaran baru, harus dibangun sikap mental baru menuju era pemberdayaan rakyat, bukan era penuh dengan perilaku memperdaya rakyat.

Terkait soal daya saing, hal itu relevan, sebab cukup bukti menunjukkan banyak negara yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk terus tumbuh sebagaimana tercermin dari cukup baiknya daya saing ekonomi di masa lalu seperti Korsel, Malaysia, Thailand, dan Indone-sia, justru terperosok ke dalam krisis. Namun, sebaliknya, banyak negara yang peringkat daya saingnya sebenarnya rendah, tapi bisa selamat dan lolos dari lubang jarum krisis. Artinya, meskipun daya saing dalam jangka panjang berperan penting, perekonomian suatu negara tetap bisa terpuruk jika praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela.

Pemerintah yang bersih dan dijalankan secara baik dan bertanggungjawab mengandaikan suatu pemerintahan yang bebas KKN. Untuk itu, dibutuhkan reformasi atas mentalitas aparatur pemerintah secara menyeluruh. Hanya perilaku dan mentalitas bersihlah penopang utama perekonomian kompetitif. Dalam jangka panjang, dari manakah hal itu dimulai? Tak lain dan tak bukan, justru dari bangku pendidikan.

Sebab, salah satu parameter penting perekonomian kompetitif, kata Sachs dan Warner (1999), adalah tingkat pendidikan yang berkualitas tinggi, di samping parameter lain seperti pasar modal yang fleksibel, tingkat tabungan nasional yang tinggi, tingkat pajak marginal yang rendah, tingkat perdagangan terbuka yang tinggi, dan sebagainya.

Reformasi mentalitas yang dimulai dari dunia pendidikan jelas masih konseptual. Diperlukan penerjemah secara teknis agar praktisi pendidikan yang ditopang birokrasi bisa mengaplikasikannya di lapangan. Sebut misalnya, soal pentingnya kebebasan pedagogis para guru. Ke depan, tak relevan lagi mereka disibukkan dan dibebani tugas-tugas administrasi yang tak terkait langsung dengan proses pembelajaran sebagai inti aktivitas menuju pendidikan berkualitas.

Meski demikian, kebebasan pedagogis dimaksud haruslah disertai perubahan mentalitas dari fungsi guru secara kultural ke arah fungsi guru yang profesional.

Contoh konkret hal itu mudah diterapkan, misalnya, jika di masa lalu para guru terpaksa dan berpijak kuat pada rangkaian kata-kata atas pemahaman peserta didik dalam menyerap Iptek; untuk selanjutnya haruslah diarahkan menuju dasar pijak substansi. Hingga hari ini praktik enggan memberi skor 10 pada seorang siswa yang tingkat pemahaman substansi atas Ipteknya optimal, masih terjadi.

Praktik-praktik koruptif seperti itulah sebenarnya yang kelak menyumbang perilaku korupsi manusia yang pernah mengenyam pendidikan.

Yogyakarta, HU *Bernas*, Rabu, 27 Oktober 1999



## DENGAN PENDIDIKAN KITA SELAMATKAN INDONESIA



SEKURANG-KURANGNYA, kemajuan dunia dewasa ini bergantung pada tiga macam revolusi. Demikian perkiraan sebuah lembaga pemikiran asal Amerika Serikat, *Institute for National Strategic Studies* (INSS) dalam laporan berjudul “*Strategic Assesment*” (1997). *Pertama*, revolusi geostrategis, yakni kemenangan gagasan demokrasi dan ekonomi pasar. *Kedua*, revolusi teknologi informasi, yakni kemajuan komunikasi global sebagai pintu gerbang bagi lalulintas kepentingan, kultur, dan nilai-nilai. *Ketiga*, revolusi dalam pemerintahan, yakni penyusutan wilayah kontrol negara yang beralih ke pemerintahan regional atau lokal.

Ketiga macam revolusi itu merupakan unsur-unsur kapitalisme yang dipelopori AS dan negara-negara Eropa Barat dengan sasaran pokok mengendalikan negara-negara periferal yang baru berkenalan dengan sistem tersebut. Jika semula “angin sorga” kapitalisme telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka sejak pertengahan 1997 konsekuensi kapitalisme itu te-lah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kendali pada akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut. Tidak terkecuali Indonesia. Padahal, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark, sebelumnya telah mengingatkan bahwa “sesungguhnya tidak ada yang lebih mendasar dilakukan untuk mencapai kemajuan sosial daripada pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan dan latihan.” Rekomendasi tersebut mestinya disadari betul oleh negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju. Maksudnya, sebuah adopsi inovasi suatu sistem tidak begitu saja gampang diterapkan tanpa persiapan sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam manajemen sistem tersebut.

Kini, krisis di berbagai bidang telah memberi pelajaran banyak pada kita bahwa tidak semua kemajuan yang dicapai memberikan maslahat bagi kemanusiaan. Terbukti, bangsa yang dulu dikenal sangat santun dan beradab, tiba-tiba begitu beringas dan saling bunuh. Persatuan dan kesatuan yang semula diagungkan, digelontor gelombang separatisme. Fenomena disintegrasi sedang berada di ambang pintu. Dengan kata lain, Indonesia — sebagai sebuah entitas —terancam eksistensinya. Dengan cara apa kita menyelamatkannya?

## UPAYA PEMBUDAYAAN

Judul gagasan ini merupakan refleksi paradigma yang dibangun KTT Pembangunan Sosial sebagaimana dikutip di muka, yakni pelaksanaan pendidikan yang baik dengan tekanan khusus pada keunggulan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pada akhirnya akan dapat meningkatkan kemajuan sosial. Aksentuasi pada SDM sebagai sentra keunggulan mengingatkan kembali betapa penting upaya pemanusiaan manusia agar kembali kepada identitas atau jati diri. Sebab hanya manusialah yang bisa dididik, lain makhluk tidak.

Binatang misalnya, hanya bisa di-*dresseur* atau di-*drill*, tak dapat dididik. Karena pendidikan menyangkut upaya meningkatkan peradaban, maka segala pendewaan atas pentingnya men-*dresseur* dan men-*drill* manusia bisa diartikan sama dengan memperlakukan manusia sebagai bukan manusia. Jika diteruskan, maka hasilnya seperti kita lihat sekarang ini: alumni pendidikan menjadi setengah robot, setengah manusia. Diajak mengamuk, siap mengamuk, diajak merusak bersedia merusak. Bagaimana mungkin manusia — yang katanya beragama dan terdidik — begitu sadis memotong leher saudara sebangsanya dan menenteng kepala untuk dipertontonkan di depan umum dengan mimik gembira?

Sekiranya kemajuan sosial disepakati sebagai unsur simbolik atau indikator peradaban, maka timbul pertanyaan menarik, pendidikan bagaimanakah yang bisa mewujudkan paradigma itu? Tidak gampang menjawabnya. Sekalipun pemikiran pendidikan yang berkembang mampu menjawab, bisa dipastikan jawaban itu belum memuaskan. Kecuali ada kata sepakat dalam diskursus nasional bahwa pendidikan tidaklah sama dengan persekolahan. Bukankah yang terjadi sebaliknya?

Empirik, pendidikan sudah telanjur diidentikkan persekolahan. Sehingga orang yang mengenyam persekolahanlah yang seringkali dilabeli sebagai orang-orang terdidik. Munculnya *practicality thinking*, misalnya dengan perlu diadakan pendidikan ini atau pendidikan itu, lantas diusahakan pelaksanaannya adalah bentuk pemikiran berorientasi dengan persekolahan. Padahal, selama kita berpikir

seperti itu, selama itu pula kita terjebak dalam orientasi kepraktisan — suatu landasan berpikir yang dapat mereduksi keluasan dan kedalaman makna pendidikan.

Mentautkan dimensi peradaban dalam praksis pendidikan bukan berarti merekomendasikannya dalam kurikulum pendidikan. Melainkan bagaimana proses pendidikan, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar sekolah tidak semata-mata menekankan proses instruksional. Lebih dari itu hendaknya memberi arti penting pada pro-ses dialektika dengan titik berat pada pembentukan afeksi kemanusiaan. Dalam istilah lain kita sebut sebagai upaya pembudayaan.

Supaya pendidikan bisa begitu, agaknya terlalu merugi jika kita melupakan gagasan mendasar almarhum Soedjatmoko — cendekiawan tulen yang tidak “dibangun” persekolahan, melainkan oleh pendidikan — yang menaruh kepedulian besar terhadap integritas pendidikan. Soedjatmoko (dalam Kathleen Newland dan Kemala Candrakirana Soedjatmoko, 1994) antara lain menganggap bahwa bidang-bidang akademik mudah tergelincir ke dalam kekakuan dan pengkotak-kotakan realitas. Itulah sebabnya para ilmuwan seringkali gagal memahami dinamika dan jatidiri manusia.

Proses mempelajari (mestinya juga membelajari) manusia, kata Soedjatmoko, harus mengandung unsur-unsur yang lebih dari sekadar penerapan metode-metode analitik dan eksperimental yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam maupun ilmu-ilmu sosial. Berbagai kebutuhan, ambisi, rasa frustrasi manusia, dan sebagainya, tidak dapat diamati secara empiris; tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka persamaan. Semua itu hanya dapat dipahami melalui suatu upaya untuk melakukan proyeksi imajinatif. Proyeksi mana merupakan kemampuan yang dibina oleh kajian humaniora.

Oleh karena kajian humaniora mengembangkan proyeksi imajinatif melalui pengembangan empati dan toleransi, maka sebenarnya humaniora merupakan jendela menuju kedalaman hati manusia. Itulah yang, menurut hemat penulis, sebagai inti dimensi peradaban. Tema klasik yang agaknya sudah mulai dilupakan banyak orang.

Upaya pembudayaan dalam isi dan proses pendidikan mendapat tekanan khusus karena dimensi itulah akar pembentuk manusia berbudaya. Manusia yang tidak cepat meradang hanya oleh persoalan kecil; tidak mudah beringas hanya karena kesumpekan pikiran; tidak gampang korup hanya karena tergiur ekonomi; tidak mudah berkhianat manakala dipercaya; dan tidak semaunya sendiri “memangsa” sesama hanya karena kepentingan dan interes tertentu. Dengan kata lain, melalui pendidikan yang benar kita selamatkan Indonesia.

## PERUBAHAN MASYARAKAT

Kadangkala orang keliru memahami bahwa kemajuan sosial identik dengan kemajuan eko-nomi. Sebab indikator paling nyata yang nampak ke permukaan adalah indikator-indikator ekonomi. Contoh konkret hal ini ialah semakin mudah seseorang mengumpulkan harta benda, semakin hemat dan bersahaja menggunakannya. Jika yang terjadi sebaliknya, maka bukan kemajuan sosial yang diperolehnya, melainkan ketertinggalan. Pendidikan, dalam hal ini mempunyai kontribusi langsung terhadap terciptanya kemajuan dan ketertinggalan itu. Sebab unsur pembentuk sistemik kemajuan sosial adalah matra akal pikiran, mata hati, dan sikap mental. Sementara perilaku yang mengindikasikan kemajuan sosial itu barangkali hanyalah fungsi dari ketiganya.

Mengenai kemajuan sosial, sudah umum disepakati bahwa sasaran terpenting yang diharapkan adalah perubahan masyarakat. Perubahan yang oleh kebanyakan ahli ilmu sosial disebut modernisasi. Jika pendidikan hendak diarahkan menuju ke sana, hendaknya seluruh unsur yang terlibat dalam praksis pendidikan perlu lebih tekun memahaminya. Secara ilmiah mungkin sudah, tapi secara praktikal barangkali belum. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan dianggap gagal, sekalipun pengajarannya berhasil.

Terlepas dari berbagai kritik atas pendekatan yang dipakai dalam memvalidasi instrumen modernitas, baik individu maupun kelompok, sejumlah ahli masih meyakini adanya kaitan erat antara pendidikan dengan sikap modern sebagai salah satu unsur kemajuan sosial. Ballantine (1983) misalnya, memandang pendidikan tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemerataan kesempatan, melainkan juga mendorong warga masyarakat meresapi nilai-nilai yang diejawantahkan ke dalam sikap dan perilakunya. Artinya, semakin banyak dan semakin bagus pendidikan dialami oleh seseorang, semakin kuat orang tersebut memiliki nilai-nilai modernitas — yang salah satu cirinya berorientasi ke masa depan dan beradab. Suatu tanda bahwa ia sudah mendapati kemajuan sosial.

Jakarta, HU *Republika*, Sabtu, 1 Mei 1999



## KEBANGKITAN BANGSA



KEMUNCULAN badai tropis merupakan sesuatu yang wajar terjadi di Nusantara. Ia seringkali menjadi pertanda pergantian musim. Tapi, badai kekejaman massa berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan fanatisme pendukung partai politik menyengat yang melanda di tengah pergantian era pemerintahan Republik ini — tak pelak lagi — terasa sangat mencemaskan dan menakutkan. Hampir setiap saat, serangkaian kerusuhan yang terjadi telah mengakibatkan paras Ibu Pertiwi pucat pasi dan kusut masai.

Pada saat yang hampir bersamaan, ramai-ramai sejumlah provinsi menuntut merdeka dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Mulai dari Timtim, Irian Jaya, Daerah Istimewa Aceh, hingga Riau. “Referendum” lantas menjadi kata paling populer mendampingi istilah “reformasi” yang sudah mengalami inflasi. Inilah agaknya tanda-tanda nyata bahwa disintegrasi nasional sedang mengintip di balik pintu. Siap menggelontor persatuan dan kesatuan bangsa, mulai merasuk dan mencoba meracuni sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Perusakan dan pertikaian massal terjadi di mana-mana. Kini, setelah segala potensi yang kita miliki ludes dihantam krisis, barulah disadari betapa mahal harga sebuah kejayaan. Karenanya, momentum Hari Kebangkitan Nasional yang selalu diperingati setiap 20 Mei memunculkan pertanyaan relevan. Dapatkah kita sebagai bangsa akan bangkit kembali dari keterpurukan? Sekiranya kita malu jadi pecundang di tengah kejayaan bangsa-bangsa lain di dunia, maka seyogyanya kita merenungi kembali betapa penting daya rekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini diabaikan hanya demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

## KEBANGGAAN BERNEGARA

Salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan mendasar bagi kebangkitan bangsa adalah kadar kebanggaannya dalam berbangsa dan bernegara. Makin tinggi kebanggaan ber-bangsa dan bernegara, peluang untuk bangkit kembali semakin besar. Namun, kebanggaan berbangsa dan bernegara tentu tidak terbangun dengan sendirinya, melainkan bergantung pada baik buruknya apresiasi masyarakat terhadap berbagai masalah yang ada di sekitarnya.

Sejak Republik ini mengalami krisis, kebanggaan berbangsa dan bernegara juga dilanda krisis. Sekurangnya hal itu tercermin dari data jajak pendapat yang pernah dilakukan *Kompas* edisi 16 Agustus 1998. Sebut, misalnya, soal kebanggaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan tingkat pendidikan (rendah, menengah dan tinggi), secara berturut-turut 39,4 persen, 34 persen dan 46 persen menyatakan tidak bangga. Rasa tidak bangga juga ditujukan untuk kondisi dan situasi negara saat ini seperti keadaan alam (25,3 persen), situasi ekonomi (86,5 persen), situasi sosial (60 persen), dan pemerintahan sekarang (39,7 persen).

Sementara tingkat apresiasi masyarakat yang menyatakan buruk, tercermin dalam hal-hal seperti kondisi fasilitas umum (47,8 persen), kesempatan kerja (87,8 persen), pemenuhan kebutuhan pokok (81,1 persen), pemerataan kesejahteraan (79,2 persen), perlindungan HAM (57,6 persen), kepastian dan perlindungan hukum (52,5 persen), pengusutan kerusuhan dan penjarahan (48,6 persen), dan pengusutan perkosaan massal (53,8 persen).

Harus diakui, validitas jajak pendapat sebagaimana dikutip di muka masih dapat diperbantahkan. Tapi pesan substansial yang terkandung di dalamnya - mau tidak mau, suka atau tidak suka - seyogyanya menjadi *warning* bahwa *sense of belonging* sebagai bangsa sedang mengalami kelunturan. Kelunturan mana dapat menjadi sumber malapetaka yang potensial jika tidak sesegera mungkin diatasi.

Kendati mungkin kurang analog, contoh-contoh kecil di sekitar menunjukkan betapa lemah kebanggaan berbangsa dan bernegara yang kita miliki. Lihat saja, banyak orang lebih bangga makan di KFC, CFC, bahkan menenteng *pizza* dan kue donat buatan McDonald ketimbang harus menyantap nasi pecel, soto, kue klepon, gethuk lindri dan sejenisnya. Banyak orang merasa perlu harus berbelanja pakaian di manca negara atau yang berlabel asing dengan harga mahal (kendati terkadang buatan dalam negeri yang sudah direimpor) ketimbang yang tersedia di pasar atau buatan sendiri. Sekeping gengsi, agaknya jauh lebih membanggakan ketimbang rasa persaudaraan dan rasa kebangsaan.

## MEMBANGUN KEMBALI

Kasat indera dapat dirasakan bahwa lawan terberat yang sedang dihadapi saat ini adalah disintegrasi bangsa. Menurut laporan utama majalah *Forum* (17 Agustus 1998), benih-benih perpecahan dimaksud sangat beragam. Mulai dari soal kegagalan politik pembauran pri dan nonpri; politik SARA; ketimpangan pembangunan ekonomi di berbagai daerah; Jawanisasi kultur politik Indonesia; kuatnya Dwifungsi ABRI; sakralisasi UUD 1945 dan Pancasila; hingga intervensi IMF, Bank Dunia, dan PBB dalam kebijakan dalam negeri.

Menurut hemat penulis, di luar konteks reformasi, satu-satunya kekuatan yang paling ampuh guna menangkal segala potensi penghambat kebangkitan bangsa adalah mem-bangun kembali nasionalisme, sebab musuh utama nasionalisme tidak lain adalah upaya memecah belah bangsa dan separatisme.

Nasionalisme dimaknai sebagai *an aware-ness of membership in a nation, together with a desire to achieve, maintain, and perpetuate the identity, integrity, prosperity, and power of that nation* (suatu kesadaran sebagai bangsa yang disertai oleh hasrat untuk memelihara, melestarikan, dan memajukan identitas, integritas, serta ketangguhan bangsa tersebut) (Mostafa Reja'i, et.al. 1975). Sehingga sangat jelas bahwa nasionalisme bukanlah sekadar rasa cinta kepada tanah air. Lebih dari itu adalah upaya pengaktualisasian dalam bentuk tindakan-tindakan.

Teori politik mengajarkan, agar nasio-nalisme berkembang subur dalam masyarakat, maka dibutuhkan upaya-upaya yang kompatibel dengan keberadaan masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat yang otoriter misalnya, pengeksploitasian nasionalisme sebagai ideologi yang dibumbui berbagai macam tindak kekerasan dan represifitas para pemimpinnya akan melahirkan bangsa berdimensi ganda. Selain mengakibatkan na-sionalisme sempit bahkan cenderung *chauvinis* sehingga seringkali melahirkan pemeco *right or wrong is my country*, juga sebaliknya akan melahirkan masyarakat anasionalis.

Berdasar pengalaman nyata sejumlah negara di dunia, nasionalisme yang lugas dan proporsional hanya bisa berkembang efektif pada masyarakat demokratis. Pada masyarakat demokratis dan sudah dilandasi supremasi hukum, sekalipun gejala separatisme, disintegrasi, dan potensi konflik dalam berbangsa dan bernegara masih terjadi; namun skalanya demikian kecil sehingga mengatasinya pun bukanlah persoalan sulit. Sebab praktik-praktik kehidupan berjalan sesuai prosedur akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan). Kecuali itu, sudah ada keterlibatan sisi-sisi rasional sebuah ideologi sekaligus jaminan persuasif para pemimpinnya. Itulah sebab dalam masyarakat tersebut, harga satu nyawa warga bangsa akan sangat berarti bahkan bisa menjadi sentimen nasionalismenya.

Apakah Indonesia selama ini otoriter? Kendati tidak sepenuhnya benar, ciri khas rezim Orde Baru cenderung otoriter. Faktanya, tidak seorang pakar asing pun pernah menyebut Indonesia di bawah Orde Baru sebagai negara demokratis, melainkan sebagai rezim otoritarian dan militeristik. Gerakan perlawanan di dalam negeri dalam bentuk tuntutan reformasi adalah bukti nyata betapa kita merindukan munculnya tatanan Indonesia baru yang demokratis.

Dalam masyarakat yang demokratis — sebagaimana disebutkan Keith Graham (1986) — nasionalisme dikembangkan atas dasar kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Namun, langkah seperti itu tidak bisa diterapkan begitu saja pada masyarakat transisi di Indonesia dewasa ini, sebab ia tidak identik dengan masyarakat demokratis. Sekadar contoh, ketika kebebasan (pers misalnya) benar-benar dibuka lebar, yang terjadi bukanlah harmoni, melainkan benturan dan tabrakan berbagai kepentingan.

Menurut hemat penulis, yang dapat diterapkan pemerintahan saat ini dan mendatang adalah berusaha meminimalisasi rasa takut sebagai-mana disarankan Lucian W Pye (1990); rasa takut ini bisa diterapkan terhadap negara maupun masyarakat. Terhadap negara dikemb-angkan watak yang tabah dalam memerintah. Dengan ketabahan tersebut, mereka tidak akan selalu dilanda rasa takut bahwa kekuasaannya akan runtuh. Sebab jika ketakutan itu senantiasa hadir, negara akan cenderung represif. Seperti kata Montesquieu, penguasa yang selalu takut kehilangan kekuasaan, akan menjadi tiran.

Sementara pada masyarakat, penting diciptakan iklim politik yang menjadikan mereka tidak takut bersikap dan bertindak sesuai aturan konstitusi dan hukum. Tentu saja keamanan mereka yang menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai konstitusi dan hukum harus dijamin negara. Misalnya, jika masyarakat mencium adanya indikasi pejabat negara melakukan KKN dan kemudian melaporkannya, laporan itu harus ditindak-lanjuti untuk diusut transparansi kebenarannya. Bukan sebaliknya, si pelapor ditakut-takuti untuk dihukum atau dituduh mencemarkan nama baik. Ini merupakan gejala berbangsa dan bernegara yang tidak sehat. Padahal, hanya bangsa sehatlah yang mampu bangkit meraih cita-cita dan kejayaannya.

Yogyakarta, HU *Bernas* Senin, 17 MEI 1999

Bab  
9



**KRIMINALITAS PELAJAR  
DAN PENDIDIKAN**





## KETIDAKSEIMBANGAN PENDIDIKAN



KEKERASAN kolektif yang merebak di negeri ini, baik berwujud perkelahian bersenjata, pengusiran etnis, pembunuhan massal, perusakan fasilitas umum, perampasan hak milik orang lain dan tindak kriminal lain sebagai paradoks perilaku bangsa telah menjadi *genuine problem* yang menuntut perhatian semua pihak. Jika dianggap sebagai eksese atau gejala biasa yang mengiringi proses transisi menuju masyarakat demokratis, berarti kita membiarkan racun jahat yang lambat namun pasti akan menggerogoti kepribadian, nasionalisme dan adat ketimuran yang menyejarah khas dimiliki berbagai suku bangsa di wilayah nusantara.

Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan perilaku brutal orang-orang yang sejak dulu kala dikenal sebagai bangsa santun, ramah dan berbudaya tersebut? Tidak banyak yang bisa dipakai penjelas. Sebab, informasi yang tersedia baru sebatas menyangkut hipotesis teoritis dalam hal rendahnya standar akademis, keterlibatan provokator, kerapuhan daya tahan masyarakat, fanatisme dukungan atas partai politik dan pertikaian antarelit di tingkat penguasa.

Kalaupun tersedia informasi yang dapat dipakai oleh ilmuwan sosial untuk mencandra kecemasan terhadap perilaku buta emosi (*emotion illiteracy*) masyarakat, baru sebatas profil pelaku dan pemicunya. Informasi lain seperti kemungkinan adanya kesulitan serius yang sedang mereka hadapi, belum banyak terungkap karena berada dalam wilayah *the dark side* yang tak mudah dipahami. Kebanyakan ahli ilmu sosial agaknya belum tertarik menjelajahi “wilayah asing” itu, yakni kondisi psikologis masyarakat sehingga mempunyai nyali untuk bertindak kriminal. Sama dengan ketika kurikulum baku pendidikan belum tertarik untuk mempertimbangkan upaya memberantas buta emosi secara dini.

Padahal, kasat mata para vandalis yang anarkhis itu sedang menghadapi kesulitan se-rius berupa ketidakmampuan menyelesaikan pertenggaran secara

damai dan kesulitan bergaul biasa secara manusiawi. Barangkali juga mengalami kesulitan lain akibat memiliki suasana hati berubah-ubah (labil) dan menanggung beban tuntutan perhatian tinggi.

## **PENDIDIKAN MASA LALU**

Di negeri seberang, Andriane Raines (1994) pernah berhasil membuktikan bahwa jalur prototipe menuju kekerasan dan tindak kejahatan justru dimulai pada anak-anak yang agresif dan sulit ditangani sejak kelas satu dan kelas dua (kelas-kelas rendah pendidikan dasar). Sama dengan temuan Dan Offod, dkk (1992) yang membuktikan bahwa anak kelas satu yang suka mengganggu, tidak mampu bergaul dengan anak lain, tidak patuh kepada orangtua mereka dan sering membandel terhadap guru, hingga separonya akan menjadi penjahat remaja pada masa pubertas mereka dan berpeluang cenderung akrab dengan kekerasan dan kejahatan ketika dewasa.

Tentu saja tidak cuma ada satu jalan menuju tindak kekerasan dan kejahatan. Banyak faktor lain yang bisa membuat seseorang menghadapi risiko itu. Sebut misalnya karena ia lahir dan hidup dalam pemukiman yang tinggi tingkat kriminalitasnya sehingga lebih gampang tergoda berbuat keras, jahat dan kejam. Dan yang sering diomongkan para pakar ialah karena berasal dari keluarga yang dihadap tekanan berat atau hidup dalam kemiskinan.

Tapi, menurut Daniel Goleman (1995), tidak satu pun di antara faktor-faktor itu yang menjadikan kekerasan dan kejahatan tak bisa dielakkan dalam hidup seseorang. Jika segala sesuatunya sama, kekuatan psikologis yang ada pada manusia agresif memperbesar kemungkinan tersebut. Hal itu berarti, masa dini seseorang adalah masa kritis yang layak mendapat perhatian serius. Barangkali karena argumentasi itu pula sebagian kalangan menyebut, pendidikan nasional di masa lalu turut bertanggung jawab atas terbentuknya karakter kekerasan yang kini teraktualisasikan di berbagai wilayah dan dalam beragam komunitas.

Masalah psikologis dalam bentuk kekerasan kolektif telah menimbulkan rasa takut dan keprihatinan mendalam. Kurangnya perhatian kita terhadap pendidikan dini mereka, khususnya yang menyangkut keterampilan dan kecakapan sosial di masa lampau, siapa nyana telah membuahkan manusia yang buta emosi, cenderung keras, brutal, beringas, dan yang layak diwaspadai: jahat.

Pendidikan, dalam artian umum, yakni yang berlangsung dalam masyarakat di bawah bimbingan para pemimpin formal dan in-formal serta yang berlangsung di sekolah di bawah bimbingan para praktisi pendidikan, kini telah menjadi sang terdakwa.

Tuduhan atas kegagalan pendidikan makin mengkrystal setelah akal sehat tak mampu menjangkau: bagaimana mungkin seseorang yang mengaku beragama dan terpelajar begitu sadis memotong leher saudara sebangsanya sendiri dan menenteng kepalanya untuk dipertontonkan di depan khalayak? Bagaimana bisa terjadi rumah-rumah hunian milik tetangganya yang selama ini hidup rukun dan damai dibakar ramai-ramai dan harta bendanya dijarah dengan mimik gembira?

Jika benar pendidikan masa lalu turut bertanggungjawab atas merebaknya penyakit kekerasan, vandalisme, anarkhisme dan kejahatan, di mana sebenarnya letak kesalahan dan kekeliruannya? Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, agaknya merupakan saat yang tepat untuk merenungkan kembali, merefleksi dan melakukan koreksi atas berbagai kekeliruan terapi pendidikan yang bertahun-tahun dianggap berlangsung wajar tanpa perbaikan berarti.

## **REFORMASI PENDIDIKAN**

Jika jujur harus diakui, pendidikan selama ini memang penuh dengan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut tidak saja dimulai dari diskriminasi sistem dan perlakuannya, namun lebih dari itu juga diskriminasi atas muatannya. Sebut misalnya pendidikan sekolah, sejak dari Taman Kanak-kanak, cikal bakal manusia Indonesia sudah harus berhadapan dengan kesenjangan dan diskriminasi. Sistem dan politik pendidikan telah direkayasa untuk menghadap-hadapkan anak-anak balita pada posisi yang berlawanan-lawanan.

Terdapat komunitas anak-anak yang bisa menikmati fasilitas bermain berlebihan, de-ngan seragam dan sepatu indah di satu sisi; sementara di sisi lain terdapat anak-anak yang harus bermain dengan fasilitas seadanya, tanpa seragam indah bahkan sebagian besar harus *cekeran* (bertelanjang kaki).

Pada tataran pendidikan menengah, calon manusia dewasa itu juga terpilah-pilah. Antara mereka yang direkayasa untuk unggul dan sampai ke jenjang tertinggi pendidikan, hingga mereka yang harus puas memasuki dunia tukang. Jika rekayasa itu didasari minat, bakat dan kemampuan, barangkali tidak ada masalah. Namun oleh karena pemilahan itu didasarkan seleksi alam kemampuan ekonomi, maka persoalannya menjadi lain. Secara sadar mereka telah berkenalan dengan bentuk diskriminasi ekonomi. Dengan kata lain, mereka sadar bahwa negara telah “menakdirkan” kelas-kelas masyarakat. Satu kelompok masyarakat kaya-raya, dan satu kelompok masyarakat lagi tergolong miskin, bahkan sangat miskin.

Ketidakseimbangan pendidikan juga terjadi pada muatannya. Politik pendidikan diarahkan semata-mata untuk meraih keunggulan global dengan tekanan penguasaan teknologi tinggi. Sains diposisikan berhadapan-hadapan antara eksakta, *engineering* dan ilmu-ilmu alam di satu sisi dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada sisi lain. Terjadi *brain washing* massal ketika ilmu-ilmu eksakta, *engineering* dan ilmu-ilmu alam mendapat prioritas pendanaan dan luberan fasilitas, sementara ilmu-ilmu sosial dan humaniora direkayasa untuk kepentingan kekuasaan. Akibat selanjutnya adalah, merebaknya penyakit gengsi di mana ilmu yang satu dianggap unggul, sementara ilmu lainnya dianggap pecundang.

Tapi sayang, komitmen pelaksanaannya setengah-setengah sehingga hasilnya pun tak memadai. Lulusan pendidikan sekolah menjadi setengah robot, setengah manusia. Otak dan individualitasnya tak terasah sempurna, nurani dan humanismenya pun tak terbimbing paripurna. Realitas edukatif seperti itu mengakibatkan lulusan pendidikan terpolarisasi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama *over confidence* dan cenderung pongah dan merasa lebih berharga karena aksesibilitasnya tinggi, sementara kelompok lain memendam kekecewaan mendalam (dan mungkin dendam) karena dipaksa menerima kodrat sistematis yang sebenarnya tidak mereka kehendaki.

Tentu masih segudang contoh adanya ketidakseimbangan pendidikan yang bertahun-tahun dianggap wajar. Termasuk manipulasi pendidikan oleh penguasa di mana yang benar dianggap salah dan yang salah bisa dibenarkan. Dan pola-pola kekerasan yang terjadi belakangan ini, agaknya tidak menyimpang jauh dari ketidakseimbangan tersebut. Tentu saja dalam perspektifnya yang luas di berbagai segi kehidupan.

Guna menjembatani dan menghindari permusuhan abadi eksekutif bias ketidakseimbangan pendidikan, agar tidak turun temurun, barangkali hanya satu jawabannya, yakni reformasi pendidikan. Pendidikan nasional dalam berbagai dimensi sudah saatnya direformasi. Pemerintah tidak bisa menutup mata atas berbagai usulan reformasi para pakar dan praktisi pendidikan baik secara individu maupun secara melembaga dengan alasan bahwa pendidikan yang berlangsung selama ini ternyata lebih menguntungkan penguasa ketimbang kesejahteraan dan kedamaian umat manusia.

Yogyakarta, HU *Bernas*, Sabtu, 1 Mei 1999



## **KRIMINALITAS PELAJAR DAN PENDIDIKAN**



DALAM beberapa tahun terakhir waktu dihabiskan untuk mendebat labelisasi apa yang tepat bagi tindak kekerasan, sadisme, perilaku melampaui batas, perkelahian massal yang cenderung brutal dan lain-lain fenomena patologi sosial dengan pelaku para pelajar. Ketika itu ada yang bertahan dengan istilah kenakalan remaja atau kenakalan taruna (*juvenile delinquency*). Tak sedikit pula yang terang-terangan menyebut sebagai kriminalitas pelajar.

Jejak perdebatan itu masih tersisa sampai kini. Misalnya akhir-akhir ini memasyarakat sebutan “pelajar bermasalah” dengan terapi khusus di lingkungan ABRI.

Barangkali benar, sebutan merupakan konsep *trivial*. Tapi, begitu dihadapkan pada alternatif terapiutik dan kewenangan institusi guna menanganinya, sebutan lantas menjadi problem krusial. Pertimbangan dominan dalam kaitan penyebutan itu sudah tentu umur kronologis pelaku kriminal yang masih muda, masih mungkin dibina dan merupakan calon generasi penerus bangsa.

### **KRIMINALITAS PELAJAR**

Dalam kaitan itu, kita dihadapkan pada pilihan untuk menyebut salah satunya. Jika dalam tulisan ini dipilih istilah kriminalitas pelajar, bukan berarti para pelajar yang umumnya masih remaja itu identik dengan miniatur orang dewasa. Lebih karena melihat betapa “tindakan melampaui batas” itu sudah sangat keterlaluan. Melampaui limit indikator kenakalan pelajar, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Di berbagai kota, keberingasan para pelajar sudah menjadi momok paling menakutkan. Di Jakarta dan sekitarnya saja, sejak 1989–1992 terjadi 700 tawuran. Setiap tahun rata-rata terjadi 175 perkelahian. Untuk kategori tindak kriminalitas, setidak-tidaknya sampai September 1995 telah digaruk 1.223 pelajar. Sejak 1992–Juni 1995 telah terjadi 166 kasus perkelahian, 101 pengeroyokan, 31 penganiayaan, 38 pengrusakan, dan 38 pemerasan dengan pemberatan.

Dari sejumlah kasus perkelahian, keberingasan, dan kriminalitas pelajar diketahui, muara peristiwa terkadang sangat sepele: bisa soal kesalahpahaman, ketersinggungan gengsi, cemburu buta atau permintaan sekeping rupiah yang tidak dipenuhi.

Penyebab lebih kompleks, akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan tindak kriminal bisa ditunjuk kasus berdarah di Cilacap beberapa tahun silam. Keterlibatan beberapa orang pelajar dalam perampokan disertai pembubuhan sekeluarga. Termasuk dalam kategori ini, pemerkosaan (dan juga *esek-esek* secara sukarela) yang terus meningkat oleh kalangan pelajar, baik sendiri-sendiri atau berkelompok.

Memang, persoalannya bukanlah beberapa persentase kriminalitas pelajar dari *total crime* yang tercatat di kepolisian. Tapi, kecenderungannya itulah yang harus diwaspadai. Dari masalah kecil dan amat sederhana, justru berakibat fatal dan mengerikan. Jika kita rentang, daftar “dosa pelajar” untuk beragam kriminal sepanjang 1990-an sampai diturunkannya artikel ini amatlah panjang.

Tanpa perlu mengetengahkan data konkret yang sudah diketahui umum dalam lima tahun terakhir, agaknya kita perlu meyakini bahwa kriminalitas pelajar dan atau kriminalitas remaja benar-benar telah ada. Tidak perlu lagi ada efemisme bahasa dengan menyebutnya sebagai kenakalan.

Jika kita sepakat berpandangan seperti itu, barangkali kehadiran *Students Court* di tengah–tengah sistem peradilan kita menjadi penting dipikirkan dan dipersiapkan. Lembaga advokasi anak dan remaja yang sudah lebih dulu berdiri merupakan wacana, betapa urgen antisipasi kehadiran peradilan pelajar, kini dan mendatang. Hal itu tidak saja melindungi kepentingan umum dengan sistem berbeda, tapi sekaligus menyelamatkan para pelajar kita dari kehancuran total kehidupannya.

Mengingat kriminalitas pelajar masih merupakan sebuah misteri, tak mungkin kita terus-menerus berkutat dengan riset tentangnya. Diperlukan tindakan nyata yang langsung menyentuh persoalan itu. Sebab, kriminalitas pelajar tampaknya akan selalu hadir. Dan kehadirannya mustahil kita hindari. Bukankah telah ribuan riset dan jutaan manuskrip telah disusun di seluruh dunia guna menjawab misteri ini? Bukankah tiada satu pun usaha manusia itu mampu menjawab persoalan kriminal secara tuntas dan merumuskannya dalam bentuk solusi yang unilateral?

## IDEALISME PENDIDIKAN

Keterlibatan pelajar dalam bentuk tindak kriminal jelas merupakan tamparan menyakitkan bagi orangtua dan para pendidik pada umumnya. Orangtua dan pendidik mana yang bercita-cita agar anak-anaknya kelak menjadi kriminal? Dalam kaitan ini, terasa ada perasaan gagal dalam memberi isi dan makna pendidikan, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun dalam pergaulan bermasyarakat.

Terasa ada mata rantai yang hilang dalam rangkaian idealisme pendidikan. Meminjam istilah Menhankam Edi Sudradjat, fungsi pendidikan semakin mencair, tergeser oleh fungsi pengajaran dengan tekanan penuluran ilmu pengetahuan semata. Jadi, seperti dikatakan Brigjen Sutiyoso, *student brawls* memang tidaklah berdiri sendiri sebagai fenomena milik para pelajar, melainkan terkait dengan faktor-faktor sosial lainnya. Termasuk masalah-masalah keluarga dan sekolah (*The Jakarta Post*, 27/ 9/95).

Atau kalau mau berhibur diri, kriminalitas pelajar pada dasarnya merupakan cerminan masyarakat sosial yang sedang dilanda sakit. Lebih tinggi lagi, ada yang menganggap merupakan kompensasi dan katarsis sosial sebagai reaksi atas tekanan-tekanan kekuasaan yang otoritarian, sehingga mengakibatkan pelajar tidak mampu beradaptasi dengan standar-standar yang diterapkan pengampu kekuasaan.

Kita sudah sepakat, pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Fungsi yang diemban adalah peningkatan mutu kehidupan dan martabat kemanusiaan. Sasaran yang dituju adalah kecerdasan, kemanusiaan yang utuh, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan, budi pekerti luhur, pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sekiranya kita percaya bahwa kriminalitas dan pendidikan itu merupakan dua kredo yang berlawanan dan saling bertentangan, maka diperlukan kehati-hatian guna menyikapinya. Sampai tahap ini pastilah kita berpikir, betapa idealisme misi pendidikan itu akan sia-sia belaka bila hanya menekankan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan keterampilan; sementara aspek afektif, kebudayaan dan humaniora dinomor-duakan.

Terkait dengan masalah kriminalitas pelajar, haruskah kita terpaksa menerima pandangan Tannenbaum yang menyarankan agar kriminalitas dianggap tak dapat dihapuskan sama sekali kecuali dalam pikiran kaum upotis? Dengan kalimat lain, kriminalitas itu kita anggap seperti hidup dan kehidupan, sakit dan penyakit serta kematian yang selalu hadir di setiap zaman?

Jika kita masih waspada, tentu saja jawabannya pasti tidak. Dalam kaitan ini, ada baiknya kita peduli peringatan sejumlah pakar bahwa intensitas pendidikan agama dalam keluarga semakin penting untuk diperhatikan.

Atau seperti disarankan para kriminolog, ahli hukum dan psikolog bahwa kriminalitas, tawuran, perusakan sarana-sarana publik dengan pelaku para pelajar, diselesaikan secara hukum tanpa perlu menimbang-nimbang bahwa pelakunya adalah para remaja berstatus pelajar. Bagi mereka yang terbukti bersalah harus dihukum setimpal perbuatannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Yogyakarta, HU *YOGYA POST*, 3 November 1995



## **KEBERINGASAN PELAJAR DAN INTENSITAS PEMBUDAYAAN**



PELAJAR atau pembunuh? Sebuah pertanyaan berbau gugatan. Inilah kasus utama kedua yang diangkat “Berita Kriminalitas dan Hukum Delik” *HU Media Indonesia* edisi Rabu, 17/4/1996, sesudah enam bulan yang lalu juga mengangkat kasus yang sama (*Media Indonesia*, 27/9/1995).

Kedua laporan itu menggarisbawahi kebingasan para pelajar yang makin memprihatinkan disertai kecenderungan menelan korban jiwa. Dalam sepekan ini saja, sekurang-kurangnya tiga pelajar tewas dan seorang menderita koma akibat tusukan badik. Kini, kebingasan pelajar agaknya menjadi momok paling menakutkan di Ibukota dan kota-kota besar lain di Indonesia.

### **INTENSITAS PEMBUDAYAAN**

Ketika seseorang bertindak jahat, ia akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Sehingga tidak mengherankan jika kasus-kasus kejahatan pelajar pun dihadapkan pada ketentuan hukum seperti itu. Mengingat pelakunya adalah para pelajar, seringkali hukuman yang diberikan adalah hukuman disiplin. Sebut saja misalnya skorsing, sekolah khusus bergaya militer, dikembalikan kepada orang tuanya dan lain-lain langkah terapiutik yang tergolong masih enak.

Namun ketika bermacam-macam hukuman itu, tidak meredakan kasus kejahatan yang ditimbulkan oleh kalangan pelajar, bahkan justru semakin beringas, banyak kriminolog dan psikolog menyarankan agar hukuman dipertegas, dengan hukuman fisik, misalnya. Sementara di lain pihak, banyak pakar hukum pidana yang tidak sependapat karena bagaimana pun juga para pelajar adalah aset bangsa yang masih bisa dibina dan diperbaiki. Itulah sebabnya antara lain

KUHP yang baru konon mengintroduksi hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang belum pernah diberlakukan di Indonesia.

Dalam praksis pendidikan sendiri, sebenarnya teori-teori hukuman sebagai bagian dari ilmu mendidik sudah cukup kompleks. Persoalannya, seberapa kuat teori-teori itu dikuasai dan diterapkan para pendidik, merupakan problem tersendiri. Dan kelihatannya mulai tidak dipedulikan, kalau tak boleh disebut ditinggalkan. Sehingga derajat kompleksitas teori-teori itu berikut contoh-contoh penerapannya tidak serta merta bisa mendisiplinkan objek didik untuk tidak melakukan pelanggaran, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan bermasyarakat.

Kita yakin bahwa pada prinsipnya hukuman bukannya tidak berhasil mendisiplinkan para pelajar. Para pelaku yang sudah pernah terjaring dan dikenai hukuman ada yang sudah kembali menjadi pelajar yang baik. Kasus-kasus perkelahian, sadisme, dan kekerasan yang timbul kemudian, barangkali dilakukan oleh pelajar lain yang belum pernah menjalani hukuman disiplin. Jika benar dugaan ini, berarti penyakit sebenarnya berada di hulu komunitas tempat para pelajar melakukan kontak sosial.

Sekurang-kurangnya ada empat komunitas yang bisa ditelusuri ketidakberesannya, yakni kondisi pergaulan dalam keluarga, proses pendidikan di sekolah, pergaulan teman sebaya di masyarakat dan konsumsi informasi. Keempat komunitas inilah yang membentuk standar kognisi dan intelektual, moralitas, watak, kepribadian dan disiplin, serta kualitas perilaku sosialnya. Jika keempat komunitas itu berjalan seiring dalam rel yang baik, niscaya seorang anak akan bisa menjadi 'manusia'. Demikian pula sebaliknya.

Salah satu yang kini tampaknya tinggal kenangan dan cenderung ditinggalkan oleh keempat komunitas itu ialah dimensi intensitas kebudayaan. Keluarga, misalnya kini tidak lagi menjadi tempat pendidikan yang utama. Dinamika keluarga lebih banyak diarahkan kepada aktivitas-aktivitas ekonomi. Padahal, selain sebagai wahana edukasi, keluarga seharusnya juga menjadi tempat rekreasi, uji coba kontak sosial sekaligus medium bermain peran yang paling efektif bagi penghuninya.

Intensitas kebudayaan di sekolah juga demikian. Sekolah sebagai wakil keluarga cenderung hanya dipandang sebagai tempat untuk belajar membaca, menulis, berhitung, dan menguasai Iptek. Kebudayaan berbagai sikap, nilai-nilai, dan kemampuan-kemampuan yang dituntut dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tersisihkan. Sekolah tidak membuat para pelajar *kerasan* (betah). Corat-coret di baju dan kebut-kebutan ketika lulus sekolah menjadi indikasi betapa merdekanya mereka lepas dari sekolah.

Akan halnya pergaulan masyarakat, semua orang sudah maklum. Bangsa yang dulu dikenal ramah-tamah dan bersahaja, nyaris mulai ditinggalkan. Modernisasi dalam berbagai bidang dipandang keliru sehingga mengubah tatanan sosial dan menimbulkan perubahan sosial yang amat dahsyat. Dan itu terjadi di segenap lapisan. Mulai dari lingkungan marginal, sampai ke tingkat elit. Sehingga banyak kalangan mensinyalir bahwa masyarakat kita saat ini lagi sakit.

Apakah konsumsi informasi para pelajar bisa diandalkan dan terjamin positif? Kira-kira sama saja. Di media elektronik misalnya, tayangan-tayangan antisosial mendominasi sebagian besar acara (menurut riset YKAI dan Litbang Deppen, 1993, sebanyak 52 persen). Padahal jenis-jenis tayangan seperti itu mempunyai kontribusi yang tidak kecil terhadap pembentukan sikap sosial para pelajar. Kalaupun media cetak memberi informasi positif, hal itu belum terjangkau, karena kita telah melompat dari budaya membaca ke budaya menonton.

Barangkali benar bahwa media massa yang lugas merinci praktik-praktik berupa rekonstruksi tindak kriminal, film-film baku hantam, baku tembak di layar bioskop atau pun di layar kaca (televisi), tidak dapat disalahkan. Sebab di balik tontonan yang mengasyikkan itu terselip pesan pendidikan. Kebaikan akan selalu unggul melawan kejahatan. Pesan itu sampai atau tidak, dicerna atau tidak oleh para pelajar amat bergantung pada tingkat pemahaman dan kedalaman penghayatan masing-masing individu.

Sayang sekali, diferensi tingkat pemahaman dan kedalaman penghayatan itu kurang disadari oleh para orang dewasa. Padahal, sebagai penangkal kekeliruan menangkap isi pesan, bisa saja di awal tayangan atau akhir tayangan diselipkan pesan-pesan pendidikan dalam bahasa yang mampu menjembatani diferensi itu agar para penonton pelajar tidak meniru model-model kriminal.

## **KEMBALI KE HAKIKAT**

Dari sejumlah kasus sadisme pelajar, perkelahian, keberingasan dan kriminalitas diketahui, muara peristiwa itu seringkali sangat sepele. Misalnya soal kesalahpahaman, ketersinggungan, gengsi, cemburu buta, atau permintaan sekeping rupiah yang tidak terpenuhi. Ada juga pemicu lebih kompleks seperti akibat kontak langsung maupun tak langsung dengan tindak kriminal.

Sejauh ini beberapa pihak menganggap sadisme pelajar masih dalam batas yang wajar. Sebab selain kasuistis, sadisme itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelajar di perkotaan.

Sebenarnya persoalannya bukanlah berapa persentase sadisme pelajar dari *total crime* yang tercatat, diketahui, dan dilaporkan. Namun kecenderungannya

itulah yang mesti diwaspadai. Dari masalah kecil dan amat sederhana, mengapa berakibat fatal dan mengerikan?

Jika diketahui hakikat manusia itu, tidak terkecuali para pelajar, ekstremnya berjati diri sebagai *animal educandum*, *animal educable* sekaligus *animal rationale*, sementara jelas bahwa hukum disiplin belum sepenuhnya mampu mengerem laju realitas kejahatan, kebingasan, dan sadisme pelajar, maka langkah terbaik barangkali mengembalikan berbagai macam fungsi sosial kepada hakikatnya masing-masing.

Kembalikanlah hakikat keluarga, hakikat sekolah, hakikat masyarakat, dan hakikat media massa sesuai kondisi kekinian para pelajar. Perkuat intensitas pembudayaan di keempat segmen tersebut agar menjadi cermin bagaimana sebaiknya menjadi beradab.

Jakarta, HU *Media Indonesia*, 19 April 1996



## **KEKERASAN DAN VAKSINASI PSIKOLOGIS**



TIDAK terlalu berlebihan jika ada yang mengibaratkan bahwa emosi masyarakat kita dewasa ini bagaikan rumput kering. Jangankan disulut api, kena sundut puntung rokok yang masih menyala saja sudah terbakar. Kalau ladang rumput yang terbakar, barangkali cuma api yang membara. Namun jika emosi masyarakat yang terbakar, wujudnya tidak nyala api. Tapi sekaligus tindak kekerasan yang berujung pada musnahnya harta benda, bahkan nyawa.

Sifat untuk bertindak keras yang pada gilirannya cenderung agresif, merusak atau destruktif – kata Sigmund Freud – memang ada pada diri setiap manusia. Dengan demikian muatan psikologis berupa kekerasan bukan menjadi hal merisaukan. Sebab pada sisi lain, secara psikologis setiap manusia juga dimuati altruisme dan belas kasih, kesadaran diri dan kendali dorongan hati, sekaligus empati yang berfungsi sebagai filter dan pengerem.

Jika kemudian kekerasan muncul dalam bentuk perilaku kebrutalan kolektif sehingga menimbulkan huru-hara dan kerusuhan massal, tentu mengundang keprihatinan mendalam. Keprihatinan dimaksud jelas sangat beralasan. Sebab seperti diketahui, bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang sangat ramah tamah, menjunjung toleransi, religius, dan populer kegotongroyongannya. Bagaimana mungkin kekerasan massal bisa terjadi dalam masyarakat seperti itu?

## RAGAM JAWABAN

Ber macam-macam tindak kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah nusantara mulai dari Medan, Sumatera Utara hingga Dili, Timor Timur memang dipicu banyak hal. Mulai dari soal sangat sederhana hingga yang kompleks. Bahkan sementara ini diketahui, kekerasan itu dirajut ragam masalah. Oleh karenanya beragam jawaban dilontarkan para pakar di bidangnya masing-masing.

Pemerhati sosial dan ekonomi mengatakan bahwa kekerasan kolektif itu muncul akibat makin melebarnya kesenjangan ekonomi dan sosial. Kekerasan dengan demikian dipandang sebagai subkultur tandingan (*counter subculture*) bagi mereka yang merasa tersisih dan tidak memiliki aksesibilitas ekonomi dan sosial.

Mengapa kesenjangan dituding sebagai biang, padahal di negara-negara maju kesenjangan ekonomi dan sosial justru jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Kenyataannya tidak menimbulkan gejolak luar biasa. Barangkali karena di negara-negara maju itu masih ada jaminan sosial bagi masyarakat marginal. Sementara golongan miskin sadar betul bahwa kelompok kaya memperoleh harta benda dengan memeras otak dan keringat. Sementara di sini justru sebaliknya, akses ekonomi dan status sosial diperoleh melalui cara-cara curang, nepotis, manipulasi, korupsi, dan kolusi.

Jawaban lain diperoleh dari kalangan ahli hukum. Mereka melihat, kekerasan massal terjadi akibat wajah hukum yang coreng-moreng. Kalangan praktisi dan penegak hukum kenyataannya belum mampu membangun kepastian hukum. Bahkan ketidakadilan dengan mengalahkan si lemah dan memenangkan si kuat cenderung terjadi secara transparan. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan menimbulkan kekecewaan mendalam. Kekecewaan yang mengakumulasi itu akhirnya menjadi “bom waktu” yang kapan dan dimana saja siap meledak dengan picu apa pun.

Sementara para pengamat politik menjawab, kekerasan massal yang terjadi sepanjang tahun 1996, bahkan terjadi di awal tahun 1997 dan mungkin lusa atau sesudah lusa lebih dikarenakan hilangnya etika dan moralitas politik, kesewenang-wenangan pengampu kekuasaan, bahkan akibat kekerasan struktural. Para pemimpin publik masih banyak yang belum mampu menjadi suri tauladan dan idola.

Begitu transparan masyarakat merasakan betapa sering mereka dibodoh-bodohi. Komunikasi politik diarahkan untuk menjamin kepentingan tanpa peduli suara hati masyarakat. Sementara pada sisi lain secara demonstratif oknum-oknum aparat keamanan “mengajari” masyarakat untuk bertindak keras. Tidak persuasif.

Mencermati jawaban beragam itu, agaknya memang tidak ada solusi unilateral guna meredam kekerasan massal yang mungkin terjadi. Namun sekurang-kurangnya jawaban-jawaban tersebut bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki keadaan setahap demi setahap. Sebab tanpa adanya rasa tenteram sangat sulit untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang sudah puluhan tahun kita upayakan.

## **VAKSINASI**

Dalam kajian psikososial, masyarakat yang cenderung agresif dan bertindak keras seringkali disebut buta emosi (*emotion illiteracy*). Buta emosi secara terpisah bukanlah masalah yang membuat dahi berkenyit, tetapi jika dilihat sebagai kelompok, buta emosi merupakan barometer suatu perubahan besar. Dalam istilah Goleman (1996) ia merupakan racun jenis baru yang merasuki pengalaman dan menandai adanya cacat berat dalam keterampilan emosional.

Kemerosotan emosional tersebut di kebanyakan negara berkembang merupakan “harga” universal kehidupan modern yang harus dibayar siapa pun. Kemerosotan emosional itulah yang mengakibatkan kecenderungan berbuat keras dan agresif pada seseorang. Dalam tampilan yang lain, kemerosotan emosional terwujud melalui tanda-tanda seperti suka berbohong dan menipu, bertindak kasar terhadap orang lain, menuntut perhatian, merusak milik orang lain, terlalu banyak bicara, sering mengolok-olok dan bertemperamen panas.

Dalam jangka panjang, ketiadaan kecakapan emosional sangat membahayakan kaum muda. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka menyaksikan bagaimana kaum dewasa mendemonstrasikan ketidakmatangan emosional itu melalui tindak kekerasan. Sementara diketahui, kecenderungan menyeluruh kaum muda adalah intensitasnya terhadap proses imitasi atau peniruan. Padahal tindak kekerasan adalah bentuk perilaku yang paling mudah untuk ditiru.

Mengingat banyak riset membuktikan bahwa jalur prototipe menuju tindak kekerasan sebenarnya dimulai pada anak-anak yang agresif dan sulit ditangani sejak di kelas-kelas rendah, maka solusi edukatif paling baik bagi terbentuknya masyarakat yang rukun, damai dan bersatu adalah dengan vaksinasi psikologis, yakni membantu meningkatkan kecerdasan emosional melalui pendidikan.

Selain standar akademis, di sekolah-sekolah publik dan konvensional, pendidikan emosi memang belum dipertimbangkan dalam kurikulum baku. Tapi sekolah-sekolah unggul di tingkat rendah sudah mulai mempertimbangkannya. Misalnya, bagaimana mengenal amarah, rasa takut, sedih, gembira, berani, dan

sebagainya yang dalam sekolah-sekolah modern dibakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan: membangkitkan kesadaran diri emosional, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati: membaca emosi, dan membaca hubungan. Pembakuan itu dilandasi fakta empiris bahwa kecerdasan emosional sangat penting bagi kehidupan seseorang. Jauh lebih penting dibanding kecerdasan otak.

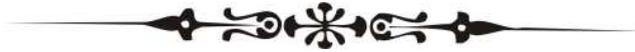
Bagi manusia dewasa, vaksinasi psikologis berupa pendidikan emosi untuk meredam kekerasan sebenarnya belum terlambat dilakukan. Sebab analog dengan upaya mengintervensi wilayah perasaan dan emosi itu., sekolah-sekolah kepribadian yang tumbuh di berbagai kota mendapat respon dan hasil positif. Cuma kesulitannya, bagaimana mungkin mengintroduksikan hal itu secara massal sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa.

Barangkali, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah melalui suatu gerakan moral lewat pemimpin-pemimpin informal. Sementara pada tataran yang sama, ketimpangan-ketimpangan nyata yang membuat kehidupan menjadi sumpek dan sesak nafas harus serius dan sesegera mungkin diperbaiki.

Jakarta, HU *Suara Karya*, 15 Januari 1997



## MENGUSUT TUNTAS PEMALSU NEM



MULANYA kita mengira bahwa isu adanya manipulasi dan pemalsuan Nilai Ebtanas Murni (NEM) oleh sejumlah oknum praktisi pendidikan di Kodya Bandung, Jawa Barat dan DKI Jaya adalah yang pertama kali terjadi. Ternyata secara “diam-diam” hal itu sudah berlangsung sekurang-kurangnya dua tahun silam.

Bukti tentang itu ialah diberhentikan dengan tidak hormat 11 Taruna Akmil (Akademi Militer) Magelang, karena diketahui menggunakan daftar NEM palsu saat mendaftarkan diri. Sembilan di antaranya taruna tingkat II berpangkat Sertar dan dua lainnya Taruna tingkat I berpangkat Koptar (*Bernas*, 30/7/95).

Bahwa kesebelas taruna yang terbukti memalsukan NEM itu “hanya” dikembalikan kepada orangtuanya, merupakan hal menarik yang layak diperbincangkan. Mengapa Akmil tidak mengajukan mereka ke pengadilan? Apakah dalam hal ini Akmil yang sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk pendidikan mereka tidak merasa dirugikan? Bagaimana manipulasi itu bisa terjadi, apa akibatnya, dan dengan tuduhan apa para pemalsu itu bisa dijaring?

Sejauh ini segala bentuk pidana pendidikan, selain penggunaan gelar dan sebutan profesional memang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tidak mengakomodasinya sebagai bagian dari yurisdiksi sebuah undang-undang.

Padahal tindak pidana pendidikan dengan modus-modus operandinya makin memprihatinkan. Misalnya saja perjokian. Pembocoran soal-soal Ebtanas, penipuan oleh lembaga pendidikan kejuruan dengan cara mengiming-imingi lapangan kerja bagi calon warga belajar dan memanipulasi atau pemalsuan NEM yang sedang kita bicarakan.

Soal manipulasi NEM ini seharusnya tidak dianggap enteng. Sebab Mendikbud Wardiman Djojonegoro sudah berjanji kepada masyarakat akan

mengusutnya secara tuntas. Tapi, agaknya kasus ini memiliki bobot politis cukup tinggi sehingga sampai sekarang tak ada kabar beritanya.

## **KEJENUHAN SISTEM**

Nilai Ebtanas Murni sebagai sebuah sistem dirancang untuk banyak kepentingan. Terutama yang menyangkut standar mutu pendidikan. Dengan NEM diharapkan diketahui keragaman kualitas pendidikan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sebab, sekali pun redaksi item tes yang menghasilkan NEM tidak sama persis atau kembar, bobot soal sudah teruji keandalannya. Mulai dari tingkat kesulitan, daya beda, kesahihan maupun reabilitasnya. Apalagi muatan soal berasal dari sumber rumusan kurikulum yang sama.

Kecuali NEM biayanya relatif murah dibandingkan jika masing-masing sekolah menyelenggarakan tes sendiri-sendiri, NEM dirasa paling relevan untuk penempatan seseorang di jenjang pendidikan berikutnya. NEM SD misalnya dapat digunakan untuk menentukan penempatan tamatan SD di SLTP. Sementara NEM SLTP dapat digunakan untuk menentukan penempatan tamatan SLTP di SLTA. NEM juga dipakai oleh sejumlah perusahaan untuk menentukan penerimaan karyawan.

Masalah kemudian terjadi ketika ledakan tamatan SD tidak seluruhnya tertampung di SLTP, dan ledakan tamatan SLTP tidak sepenuhnya terserap di SLTA. Skor NEM tidak lagi murni sebagai ukuran standar mutu dan daya serap siswa, melainkan lebih condong dianggap kartu menentukan.

Masyarakat, menurut Suyanto PhD (1995) sudah terlanjur mendewakan NEM, sehingga terjadi kecenderungan untuk memanipulasinya. Padahal kalau mau jujur menggunakan NEM sebagai standar kelulusan, paling banter hanya lima persen siswa yang lulus. Hal ini tentu saja akan menimbulkan huru-hara sosial yang akibatnya bisa lebih besar.

Agaknya, NEM sudah mencapai tingkat kejenuhan sistem sehingga cenderung dimanipulasi. Variabel lain yang turut memacu manipulasi NEM ialah persepsi masyarakat yang sudah termakan mitos tentang sekolah favorit, unggul, dan sebagainya tanpa standar acuan yang jelas. Sehingga ketika digoda oleh standar tinggi jenjang pendidikan di atasnya, didukung kondisi sosial ekonomi para praktisi pendidikan yang cenderung kurang memadai, dan didorong oleh ambisi para orangtua yang berkemampuan cukup, maka mereka-reka nilai siswa tidak lagi menjadi persoalan rumit.

Mencermati hal itu, apakah lantas NEM sebagai sistem perlu diganti atau dihapuskan? Untul tingkat SLTA barangkali sudah saatnya ditinjau kembali. Sebab NEM SLTA nyaris hanya berfungsi sebagai pelengkap STTB. Ujian

masuk perguruan tinggi (UMPT) tidak mempersyaratkan skor NEM, melainkan melulu mengadakan hasil tes. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kesamaan skor di ambang batas daya tampung. Penerimaan tanpa tes pun (PMDK, PBUD, PSB, dan sebagainya) juga begitu, didasarkan pada nilai rapor setiap Cawu (catur wulan).

Akan halnya NEM untuk SD masih terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menghendaki agar NEM SD dihapuskan dengan alasan selain pemborosan biaya, sudah tidak sesuai semangat gerakan wajib belajar sembilan tahun dimana setiap warga negara berhak dan wajib bersekolah hingga SLTP dan sederajat. Sementara pendapat kedua masih menghendaki karena belum ada sistem seleksi yang “sejujur” NEM dalam penempatan mereka di SLTP yang dirasa masih terbatas.

Bagi SLTP memang agak sulit mengganti sistem NEM mengingat keseimbangan jumlah SLTP dan SLTA sangat timpang. Akan ada persoalan siapa yang berhak menentukan siapa masuk ke SLTA mana. Kalaupun harus diadakan tes sendiri-sendiri karena NEM termanipulasi, harus ada jaminan bahwa hal itu dilakukan oleh lembaga independen yang objektif.

Sayangnya, lembaga independen yang objektif itu sendiri (seperti lembaga-l lembaga psikologi) tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap evaluasi belajar di sekolah. Selain birokrasinya rumit, duitnya pun nyaris tidak ada.

## **TINDAKAN HUKUM**

Reaksi terhadap isu adanya manipulasi NEM di Bandung menjelang dan sesudah penerimaan murid baru ditandai oleh pengaduan para orangtua murid yang dirugikan kepada LBH dan DPR-RI.

Andaikata cukup bukti, sebenarnya “kasus Bandung” bisa dibawa ke pengadilan. Sebab setiap tindakan pemalsuan atau pemberian keterangan palsu yang tidak benar terhadap dokumen, surat, akta, atau kertas berharga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Demikian pula “kasus Akmil” yang jelas-jelas mempunyai bukti kuat.

Memang UUSPN tidak mengatur tindakan hukum apa yang dapat dikenakan kepada para pemalsu dan manipulator NEM. Tapi, bukankah perangkat hukum kita seperti KUHP sudah mengaturnya? Tindakan pemalsuan dan manipulasi NEM (Danem) dapat dikategorikan sebagai tindak pemalsuan, atau memasukkan keterangan palsu dalam surat atau akta yang dapat dijerat oleh pasal-pasal pemalsuan surat yang ancaman hukuman maksimalnya 6 hingga 8 tahun penjara (Pasal 263-266 KUHP).

Ketika kasus Bandung merebak ke permukaan, Dirjen Dikdasmen menyatakan bahwa NEM yang diduga hasil kolusi adalah NEM yang sah dan untuk sementara dapat digunakan untuk seleksi masuk SLTP/SLTA. Itu berarti masih ada peluang bagi polisi untuk menentukan tindakan selanjutnya. Misalnya melakukan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan penyidikan.

Dengan demikian, sekiranya kasus itu terusut tuntas dan bisa diajukan ke pengadilan dimana para pelakunya terbukti adanya manipulasi, maka para siswa yang terbukti memiliki NEM hasil kolusi harus rela mengulang kembali di jenjang di bawahnya sebagai konsekuensi tindakan hukum. Seperti halnya 11 taruna Akmil.

Agaknya, untuk dapat menjaring para pemalsu NEM akan menghadapi banyak kesulitan. Selain delik aduan dimana pihak-pihak tertentu yang dirugikan harus melapor kepada para penyidik, yakni polisi, juga tidak mudah membuktikannya. Bagi kasus Akmil, sejauh Akmil tidak mengajukan tuntutan, polisi tentu saja mengalami kesulitan. Namun karena kasusnya sudah dipublikasikan luas, seharusnya polisi mengusut tuntas pemalsu NEM tersebut.

Jika tidak, peristiwa ini akan menjadi preseden buruk bagi sistem evaluasi pendidikan di masa mendatang. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk makin meningkatkan standar dan mutu pendidikan, disiplin nasional serta memupuk nilai-nilai kejujuran bangsa.

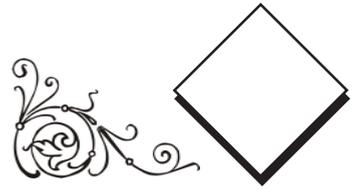
Akan halnya kasus Bandung, pemeriksaan harus diarahkan pada lembar jawaban Ebtanas para siswa yang dicurigai dan korektornya. Jika cukup bukti kemungkinan adanya manipulasi, baru dilakukan penyidikan yang diarahkan ke pihak-pihak yang dicurigai, terutama panitia skoring Ebtanas dan sekolah bersangkutan.

Yogyakarta, HU *Bernas*, 5 Agustus 1995



## EPILOG





## EPILOG

SEBUAH kesaksian selalu terikat oleh waktu. Demikian pula otokritik pendidikan yang penulis narasikan dalam buku ini. Sangat jelas bahwa periode panjang kesaksian penulis, baik sebagai pelaku langsung praktik pendidikan maupun sebagai pengamat dan komunikator masalah-masalah pendidikan, tidak memiliki awal dan akhir yang demikian jelas. Narasi-narasi itu adalah *never ending process* yang terus menerus bergulir, menggelinding, dan mendapat pembaruan sesuai pokok soal yang dibicarakan.

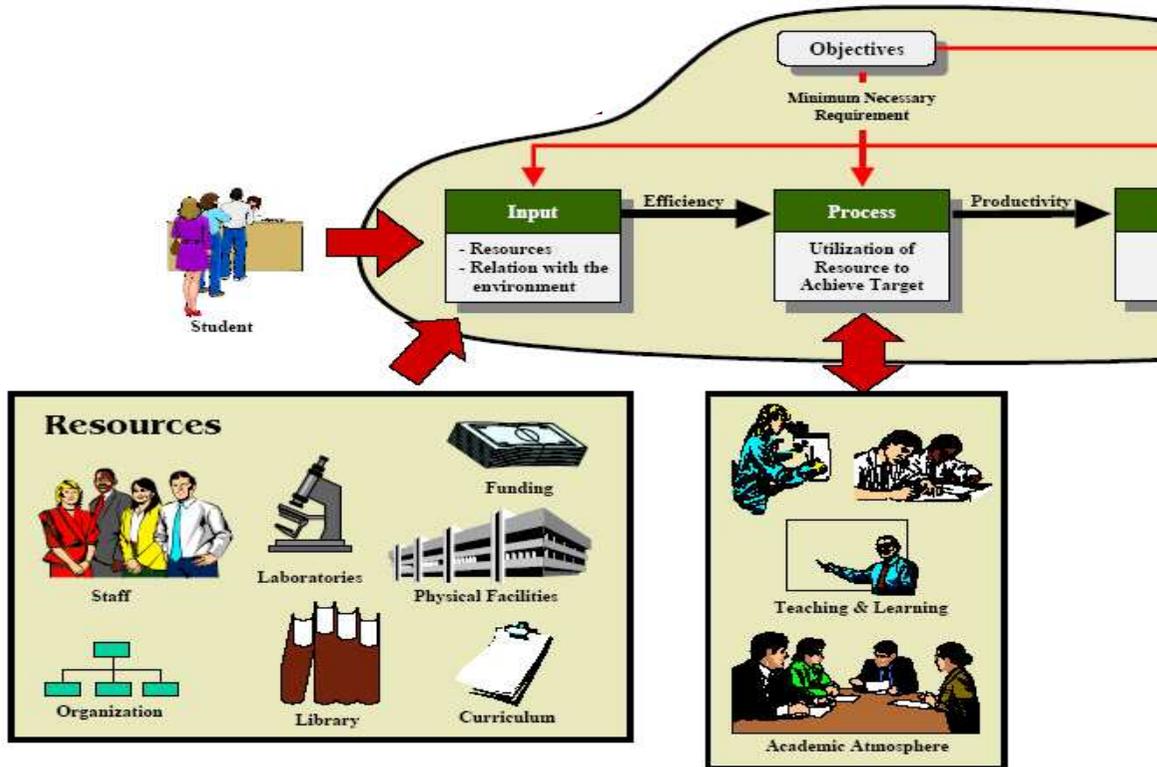
Teknologi *copy paste* atau *cut and glue* yang sejak tahun 1990-an difasilitasi oleh piranti lunak pengolah kata di komputer agaknya akan menjadi sang terdakwa manakala narasi-narasi otokritik pendidikan ditelusuri. Jujur harus diakui, dengan fokus persoalan pendidikan yang terus berulang nyaris sepanjang periode panjang tanpa penyelesaian yang jelas - kecuali sejak tahun 2000-an sebagai buah reformasi - maka akan senantiasa sulit untuk menghindari tidak berulangnya penyampaian gagasan-gagasan atau pokok-pokok pikiran dalam narasi yang sama. Tak ada pretensi penulis untuk mengulang-ulang penyampaian ide. Jika hal itu terjadi, seyogyanya dipandang sebagai wujud konsistensi gagasan atau keinginan keras untuk tetap berpegang teguh pada prinsip dan pendirian.

Ambil contoh gagasan-gagasan tentang pembaruan pendidikan guru, tentang kualitas guru, pendidikan anak dan kehadiran teknologi komunikasi yang nyaris tanpa batas dan pengaruhnya terhadap pendidikan keluarga. Penulis tetap pada keyakinan yang sama sejauh menyangkut isi narasi otokritik pendidikan ini. Khusus mengenai pendidikan tinggi memang sengaja tidak banyak disinggung dalam otokritik ini karena disampaikan dalam buku lain yang dikemas penulis dalam judul “Tradisi Intelektual dan Wibawa Universitas” yang segera akan sampai ke tangan pembaca.

Tahun-tahun sebelum reformasi 1998 merupakan tahun-tahun sulit bagi siapa saja yang berniat mengungkapkan segala hal secara lebih terbuka, apalagi menyangkut profesi dan dunianya sendiri melalui media publik. Kekuatan daya kungkung birokrasi dan kekuasaan amat ketat. Apalagi bagi para pegawai negeri, sungguh tidaklah mudah menempatkan diri dalam konteks mengkritisi apa yang ada di lingkungan kerjanya, secara jujur dan apa adanya. Penulis termasuk salah satu dari sedikit yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan evaluatif dan otokritik dalam dunia pendidikan, meskipun untuk itu selalu ada risiko yang harus ditanggung. Bagi golongan intelektual, tidak ada kegembiraan paling mendalam pada masa-masa itu selain tersampainya gagasan-gagasan atau ide-ide kepada publik, lebih-lebih apabila gagasan-gagasan atau ide-ide itu sama sekali bertentangan atau tidak sejalan dengan keinginan dan kemauan pemerintah sebagaimana tercermin dari kebijakan-kebijakannya.

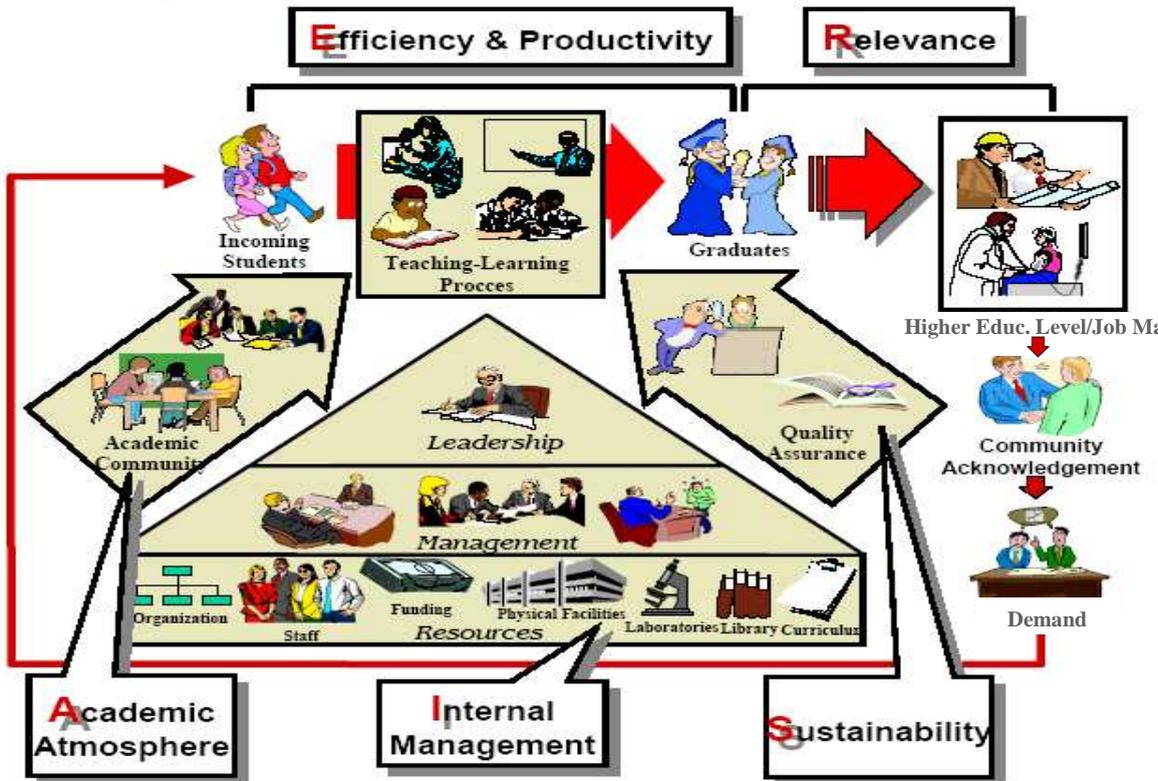
Apa yang termuat dalam buku ini, terutama kritik-kritik dan solusi-solusi konstruktik yang ditawarkan memang sebagian besar sudah terakomodasi dan menjadi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Tapi sebagian besar yang lain masih belum. Oleh karena itu, tanpa bermaksud untuk menggurui pembaca, sejatinya dunia pendidikan sekolah atau pendidikan yang melembaga, dapat dikritisi dari berbagai sudut pandang yang berporos pada dua entitas paling krusial, yakni proses pendidikan dan pola manajemen pendidikan.

GAMBAR 1  
PROSES PENDIDIKAN



Dalam proses pendidikan, sedikitnya ada lima komponen utama yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi mereka yang menghajatkannya agar lebih berkualitas, yakni komponen-komponen tujuan, masukan, proses, produk dan komponen sumberdaya. Namun penting ditegaskan bahwa, sebaik dan sebagus apa pun kelima komponen tersebut tersedia, tanpa ditunjang oleh pola manajemen yang memadai, baik secara fundamental dalam bentuk atmosfer akademik, manajemen internal dan sustainabilitas (keberlanjutan)-nya, maka efisiensi dan produktivitas, bahkan relevansi pendidikan sebagaimana diharapkan tidak akan pernah dapat tercapai (lihat Gambar 2).

BAR 2  
EN PENDIDIKAN

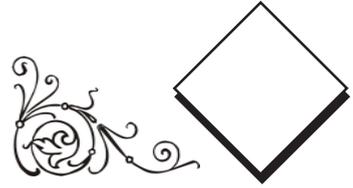


Alhasil, pendidikan hanya akan menjadi pelengkap komoditas yang dari hari ke hari terus bertambah panjang deretannya seiring dengan kreativitas para produsen untuk menciptakan “kebutuhan” baru bagi konsumennya, apabila tidak terus menerus dikritisi dan diacuhi. Teori dan praksis pendidikan sebenarnya bukanlah dunia maya yang identitasnya demikian verbal. Melainkan dunia nyata yang dapat dikenali melalui berbagai alat inderawi tanpa perlu bantuan alat khusus semacam mikroskop, apalagi teleskop. Dunia pendidikan ada dalam diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat di sekeliling kita dan berlangsung sepanjang hayat hidup manusia.

Tapi apakah dunia pendidikan itu menyumbang signifikan bagi pembentukan anak manusia menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bermartabat, dan lebih mempunyai peluang untuk mendukung peradabannya atautkah tidak – SEKALI LAGI – amat bergantung kepada kepedulian kita terhadap dunia pendidikan itu sendiri.

Lereng Merapi, Jogjakarta, 17 Agustus 2002

Penulis,  
Mutrofin



## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, N. A.  
2002. Race, Poverty, and the Student Curriculum: Implications for Standards Policy. *American Educational Research Journal*. 32 (3). 675-693.
- Alfian.  
1991. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Angwin, Jennifer, *et.al.*  
1997. *The First International Handdbook of Action Research for Indonesian Educators*. Jakarta: The Indonesian Primary School Development Project.
- Bain, R. & Mirel, J.  
1982. Re-Enacting The Past: Using Colling Wood at The Secondary Level. *The History Teacher*.
- Ballantine, J.H.  
1983. *The Sociology of Education: A Systematic Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
- Banks, J.  
1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Needham Heights, MA.
- Berer, M.  
1993. Making Abortion Safe and Legal: The Ethics and Dynamic of Change. *Reproductive Health Matters*. (2). 5-10.
- Bok, D.  
1982. *Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Borg, W.R. dan Gall, M.D.  
1983. *Educational Research: An Introduction*. 4<sup>th</sup> Edition. New York & London: Longman.

- Brandt, R.  
1993. What Do You Mean “Profesaional?” *Educational Leadership*. 6 (50), March.
- Brym, R.  
1980. *Intellectuals and Politics*. London: George Allen & Unwin.
- Buchori, M.  
1993. *Ilmu Pendidikan & Praktik Pendidikan dalam Renungan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan IKIP Muhammadiyah Jakarta.
- Cummings, W.K.  
1981. Notes on Higher Education and Indonesian Society. *Prisma*. 21. 16-39
- Eviota, E.  
1992. *The Political Economy of Gender, Women and the Sexual Division of Labour in the Philippines*. London: Zed Books.
- Fraser, Barry J. et al.  
1987. Syntheses of Educational Productivity Research. *International Journal of Educational Research*, 2 (11). 145-252. Oxford: Pergamon Press.
- Freeman, H.E.  
1977. Nutrition and Cognitive Development among Rural Guatemalan Children. Dalam Freeman, H.E & Solomon, M.A. (eds.). *Evaluation Studies: Review Annual Volume 6*. Beverley Hills: Sage Publications.
- Fukuyama, F.  
1992. *The End of History and The Last Man*. London: Hamish Hamilton
- Gerstner Jr., L.V.; Roger D. Emerald; Dennis Philips Doyle & William B. Johnson.  
1995. *Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Shools*. New York: Pinguin Books USA, Inc.
- Giddens, A.  
1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Malden USA: Blackwell Publisher Ltd.
- Goleman, D.  
1996. *Emotional Intelligence*. New York: Bantams Books.
- Gordon, T.  
1997. *Teacher Effectiveness Training*. New York: David MacKay Company, Inc.
- Gramsci, A.  
1981. *Selections from the Prison Notebook*. Q. Hoare & G. Smith (ed.). London: Lawrence & Wishart.

- Grisanti, M.L., Smith, D.G., & Flatter, C.  
1990. *Seni Mendisiplinkan Anak: Petunjuk bagi Orangtua*. Alihbahasa Anton Adiwiyoto. Jakarta: Penerbit Mitra Utama.
- Igarashi, K.  
1988. Recent Trends in Educational Reform in Japan. Dalam Amagi, I. (Guest Editor). *Educational Reform in International Perspective. International Journal of Educational Research*. 12 (2). 109-114. Oxford: Pergamon Press.
- Institute for National Strategic Studies (INSS).  
1997. *Strategic Assesment*. New York: INSS
- Kartodirdjo, S.  
1996. *Makna Manifesto Politik 1925 dan Sumpah Pemuda 1928 dalam Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta.
- Kompas.  
2000. "Yang Diperlukan Bukan Falsafah Pendidikan, Tetapi Implementasinya." Jakarta: *Kompas*, 12 Februari.
- Kompas.  
2000. "Menkeu AS: Lima faktor Penyebab Kegagalan Negara Berkembang." Jakarta: *Kompas*, 7 Juli.
- LeDoux, J.E.  
1994. *Emotional Memory and the Brain*. New York: Center for Neutral Science-Scientific American, Inc.
- Lourie & Reiff  
1988. *Toward International Strategy of Basic Education for All*.
- Lynch, J.  
1994. *Provision for Children with Special Educational Needs in the Asia Region*. Washington, DC.: the World Bank.
- Madya, S.  
1993. Anak Bekerja: Potret Muram Dunia Pendidikan. *HU Jawa Pos*, edisi 27 Juli.
- Mahasin, A.  
1986. Radang-radang Perubahan. *Prisma*. 8. Agustus.
- Martisasi, F.  
1998. Singapura dan Modal Intelektual: Modal Otak, Bukan Otot. *Harian Umum Kompas*, 13 Desember.
- Mulder, N.  
2000. *Indonesian Images: The Culture of the Public World*. Yogyakarta: Kanisius Publishing House.

---

1997. *Individual, Society and History According to Indonesian School Texts*. Amsterdam: The Pepin Press.

Mutrofin.

2000. Revisi Undang-Undang Sisdiknas. Yogyakarta: HU *Bernas*, 16 Februari.

---

1999. Menyoal Transparansi Indeks Mutu Sekolah. Solo: HU *Solopos*, 12 Juni.

---

2002. *Mengapa Mereka Tak Bersekolah? Evaluasi Program Kewajiban Belajar*. Jakarta: PT. Media Edukasi Utama.

Nagai, M.

1993. *Higher Education in Japan: Its Take-off and Crash*. Tokyo: University of Tokyo Press.

Naisbitt, J.

1994. *Global Paradox*. Colorado: William Morrow and Company, Inc. Alih Bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.

Naisbitt, J.

1990. *Megatrends 2000*. Colorado: William Morrow and Company, Inc. Alih Bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.

Nasikun, J.

2002. "Imperatif Pendidikan Multikultural bagi Masyarakat Majemuk." *Makalah*. Diskusi Terbatas tentang RUU-Sisdiknas dalam Perspektif Multikulturalisme. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (Inpedham).

Newland, K. & Kemala, C.S.

1994. *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nieto, S.

1992. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York.

O'Donnel, G., Schmitter, P.C., & Whitehead, L. (eds.).

1992. *Transitions from Authoritarian Rules: Southern Europe (Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan)*. Jakarta: LP3ES.

Osborne, D & Gaebler, T.

1992. *Reinventing Government*. Readings, USA: Addison-Wessley Longman, Inc.

- Osborne, D. & Plastrik, P.  
1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Massachusetts, Menlo Park: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Othman, A.I.  
1981. *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Bandung: PUSTAKA, Perpustakaan Salman, ITB.
- Pennell, A. & Alexander, D.  
1998. *The Management of Change in the Primary School*. London: The Falmer Press.
- Plank, D.N. & Boyd, W.L.  
1994. Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight from Democracy. *American Educational Research Journal*. 31 (2). 263-281.
- Reich, R.  
2002. *Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Reyes, P.  
1990. *Teachers and Their Workplace: Commitment, Performance, and Productivity*. Woodbury Park, CA.: Sage.
- Rowan, B.  
1994. Comparing Teachers' Work With Work in Other Occupations: Notes on the Profesional Status of Teaching. *Educational Researcher*. 23 (6). 4-17.
- Snyder, J.  
2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Stewart, T. A.  
1998. *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. Manhattan: Dobleday.
- Supratiknya, A.  
2000. "Telaah Kritis tentang Sistem Pendidikan Indonesia Saat ini dalam Perspektif Psikologis." *Seminar Pendidikan Indonesia Menghadapi Abad 21*. Semarang: Badan Eksekutif Mahasiswa Unika Soegijapranata.
- Supratiknya, A, Faturochman dan Sentot Haryanto.  
2000. *Tantangan Psikologi Menghadapi Milenium Baru: Refleksi atas Peran dan Pendidikan Psikologi di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Psikologi-UGM.
- Suyanto.  
1995. *Efektivitas dan Kualitas Sekolah*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP-Yogyakarta.

- Taba, H.  
1986. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt Brace & World. Inc.
- Thurow, L.D.  
1996. *The Future of Capitalism*. London: Nicholas Brealey.
- Toffler, A.  
1974. *Future Shock*. New York: Bantam Books.
- Toffler, A.  
1989. *The Third Wave*. New York: Bantam Books.
- UNDP.  
1996. *Human Development Report 1996*. New York: Oxford University Press.
- UNDP.  
1997. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press.
- UNESCO.  
1995. Kumpulan Makalah *The NORRAG Panel on Globalization and New Knowledge*. Geneva: Unesco, 4 Oktober 1994.
- UNESCO.  
1985. *Unesco Office of Statistics*. Paris: Unesco, July.
- UNESCO.  
1993. *Education for All: Status and Trends*. Paris: Unesco.
- UNICEF.  
1996. *The State of the World's Children*. New York: Unicef
- UNICEF.  
1993. *The Progress of Nations*. New York: Unicef
- Widja, I.G.  
1996. *Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengembangan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Wignjosuebrotto, S.  
2002. Dilema Nasionalisme Pada Peralihan Ke Abad XXI: Masalah Etnisitas dan Etno-Nasionalisme dalam Kehidupan Berbangsa. *Makalah*. Seminar Nasional “Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural”, 6 Mei. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (Inpedham).
- Woolfolk, A. E. & Nicolich, L. M.  
1984. *Educational Psychology for Teachers*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- World Bank.  
1998. *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. Washington, DC.: The World Bank.

World Bank.

1988. *World Development Report 1988*. Washington, DC.: the World Bank.

World Bank.

1990. *World Development Report 1990*. Washington, DC.: the World Bank.

World Bank.

1994. *Development Practice, Higher Education: The Lessons of Experience*. Washington D.C.: A World Bank Publication.

Zamroni.

1997. "Reformasi Pendidikan Menuju Keutuhan Intelektual, Sosial dan Emosional." Jakarta: *Kompas*, 21 Oktober.